PROSPEKTUS

JADWAL

Tanggal Efektif	:	18 Juni 2025	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	24 Juni 2025
Masa Penawaran Umum	:	19 Juni 2025	Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah Secara Elektronik	:	24 Juni 2025
Tanggal Penjatahan	:	20 Juni 2025	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	25 Juni 2025

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT GLOBAL MEDIACOM TBK (PERSEROAN) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

globalmediacom

PT GLOBAL MEDIACOM Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Perdagangan, Jasa, dan Investasi
Kantor Pusat
MNC Tower Lantai 27
Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat 10340
Telepon: (021) 390-9211, 390-0310, Faksimili: (021) 392-7859, 390-9207
Email: investor.relations@mncgroup.com
Website: mediacom.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V GLOBAL MEDIACOM
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.750.000.000.000,- (SATU TRILIUN TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN V")
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN V TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN V GLOBAL MEDIACOM TAHAP I TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp850.000.000.000,- (DELAPAN RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")
DAN
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN V GLOBAL MEDIACOM
DENGAN TARGET SISA IMBALAN IJARAH YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.250.000.000.000,- (SATU TRILIUN DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
("SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN V")
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN V GLOBAL MEDIACOM TAHAP I TAHUN 2025
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp550.000.000.000,- (LIMA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("SUKUK IJARAH")
OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI DITANGGUNG SELURUHNYA, TANPA SYARAT DAN TIDAK DAPAT DIBATALKAN OLEH

CGIF Credit Guarantee & Investment Facility
An Asian Bond Markets Initiative

SEBAGAI PENANGGUNG
CREDIT GUARANTEE AND INVESTMENT FACILITY
LEMBAGA DANA PERWALIAN (*TRUST FUND*) DARI ASIAN DEVELOPMENT BANK

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) Seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C. Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp850.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh miliar Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*), yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp279.350.000.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,60% (tujuh koma enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp480.600.000.000,- (empat ratus delapan puluh miliar enam ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,85% (tujuh koma delapan lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp90.050.000.000,- (sembilan puluh miliar lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 24 September 2025 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 24 Juni 2028 untuk Obligasi Seri A, 24 Juni 2030 untuk Obligasi Seri B dan 24 Juni 2032 untuk Obligasi Seri C. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Sukuk Ijarah ini terdiri dari 3 (tiga) Seri, yaitu Sukuk Ijarah Seri A, Seri B, dan Seri C. Sukuk Ijarah yang ditawarkan sebesar Rp550.000.000.000,- (lima ratus lima puluh miliar Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*), yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A yang ditawarkan sebesar Rp434.990.000.000,- (empat ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp33.059.240.000,- (tiga puluh tiga miliar lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B yang ditawarkan sebesar Rp89.010.000.000,- (delapan puluh sembilan miliar sepuluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp6.987.285.000,- (enam miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C yang ditawarkan sebesar Rp26.000.000.000,- (dua puluh enam miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp2.054.000.000,- (dua miliar lima puluh empat juta Rupiah) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah ini dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 24 September 2025, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 24 Juni 2028 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 24 Juni 2030 untuk Sukuk Ijarah Seri B, dan 24 Juni 2032 untuk Sukuk Ijarah Seri C. Pembayaran Sukuk Ijarah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo. Perseroan tidak akan melakukan pemotongan zakat atas Cicilan Imbalan Ijarah.

Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

BAHWA UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI, ATAS PERMOHONAN PERSEROAN, *CREDIT GUARANTEE AND INVESTMENT FACILITY*, LEMBAGA DANA PERWALIAN (*TRUST FUND*) DARI ASIAN DEVELOPMENT BANK, ("CGIF") TELAH MENYETUJUI UNTUK BERTINDAK SEBAGAI PENANGGUNG (*GUARANTOR*) OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ATAS SELURUH JUMLAH OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN DAN BERSAMA-SAMA TELAH MENANDATANGANI PERJANJIAN PENANGGUNGAN DAN AKAD KAFALAH DENGAN WALI AMANAT BERDASARKAN SYARAT-SYARAT OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DENGAN MEMPERHATIKAN SYARAT-SYARAT DALAM PERJANJIAN PENANGGUNGAN DAN AKAD KAFALAH.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN/ATAU SISA IMBALAN IJARAH. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK HUTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):
idAAA(cg) (*Triple A, Corporate Guarantee*) idAAA(sy)(cg) (*Triple A Syariah, Corporate Guarantee*)
PADA TANGGAL 26 MARET 2025 TELAH DITANDATANGANI AKAD KAFALAH DAN PADA TANGGAL 29 APRIL 2025 TELAH DITANDATANGANI PERJANJIAN PENANGGUNGAN

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK, DIMANA PERSEROAN MEMILIKI KETERGANTUNGAN TERHADAP KEGIATAN DAN PENDAPATAN USAHA DARI ENTITAS ANAK, TERUTAMA DARI LINI USAHA PENYIARAN DAN TELEVISI BERLANGGANAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

Pencatatan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

MNC sekuritas	BAHANA Sekuritas A member of IFG	mandiri sekuritas	CIMB NIAGA SEKURITAS	true Friend Korea Investment & Sekuritas Indonesia	KB Valbury Sekuritas
PT MNC Sekuritas (Terafiliasi)	**PT Bahana Sekuritas**	**PT Mandiri Sekuritas**	**PT CIMB Niaga Sekuritas**	**PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia**	**PT KB Valbury Sekuritas**

PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH

MNC sekuritas	BAHANA Sekuritas A member of IFG	mandiri sekuritas	true Friend Korea Investment & Sekuritas Indonesia	KB Valbury Sekuritas
PT MNC Sekuritas (Terafiliasi)	**PT Bahana Sekuritas**	**PT Mandiri Sekuritas**	**PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia**	**PT KB Valbury Sekuritas**

PENJAMIN EMISI SUKUK IJARAH

Maybank Sekuritas Indonesia
PT Maybank Sekuritas Indonesia

WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2025

PT Global Mediacom Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 ("**Obligasi**") dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 ("**Sukuk Ijarah**") kepada OJK dengan No. 006-OJK/MCOM-CL/II/2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Surat Pengantar Untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 (selanjutnya disebut "UUPM atau "Undang-Undang Pasar Modal") sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845 (selanjutnya disebut "**UUP2SK**").

Perseroan akan mencatatkan Obligasi dengan jumlah Pokok sebesar Rp850.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh miliar Rupiah) yang merupakan sebagian nilai emisi dari keseluruhan target Pokok Obligasi yang akan dihimpun melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Global Mediacom dan Sukuk Ijarah dengan jumlah Sisa Imbalan ijarah sebesar Rp550.000.000.000,- (lima ratus lima puluh miliar Rupiah) yang merupakan sebagian nilai emisi dari keseluruhan target Sisa Imbalan Ijarah yang akan dihimpun melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom pada PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"), dimana Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dan Sukuk dari BEI sesuai dengan surat No. S-04662/BEI.PP2/05-2025 tanggal 16 Mei 2025. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah akan dibatalkan dan uang pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data, kejujuran pendapat, keterangan dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kode etik dan standar profesi masing-masing.

PT Bahana Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT KB Valbury Sekuritas, PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan PT MNC Sekuritas menyatakan bahwa telah memerbikan persetujuan tertulis mengenai pencantuman nama dalam Prospektus ini sebagai pihak yang membantu Perseroan dalam penyusunan Prospektus ini dan tidak akan mencabut persetujuan tersebut. Tidak terdapat pihak selain Penjamin Emisi dan Profesi/Lembaga Penunjang yang terlibat dalam penyusunan Prospektus.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap Pihak Terafiliasi tidak diperkenankan memberi penjelasan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, kecuali PT MNC Sekuritas, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUP2SK. Penjelasan mengenai Afiliasi untuk Penjamin Emisi dapat dilihat pada Bab X tentang Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, dan penjelasan mengenai Afiliasi untuk Lembaga dan Profesi Penunjang dapat dilihat pada Bab XI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG SERTA PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT ATAU YURIDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020 TANGGAL 3 DESEMBER 2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK IJARAH TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SERTA MENJAMIN BAHWA SELAMA PERIODE SUKUK IJARAH KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK IJARAH TIDAK AKAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 PERATURAN OJK NO.15/POJK.04/2015.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DEFINISI DAN SINGKATAN ii
DAFTAR SINGKATAN xvi
RINGKASAN xvii
I. PENAWARAN UMUM 1
A. PERSYARATAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN 3
B. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI 3
C. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI SUKUK IJARAH 23
D. KETERANGAN MENGENAI EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK YANG BELUM DILUNASI 48
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM 50
III. PERNYATAAN UTANG 59
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 83
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 88
A. UMUM 88
B. ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN LABA RUGI 88
C. RASIO KEUANGAN 90
D. LAPORAN ARUS KAS 93
E. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL 94
F. OPERASIONAL PER SEGMEN OPERASI 95
G. BELANJA MODAL 96
H. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING 96
I. MANAJEMEN RISIKO 97
J. IKHTISAR PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN 100
K. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA 100
L. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI 101
M. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG 101
VI. FAKTOR RISIKO 102
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK 105
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 106
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN 106
B. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM 131
C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN 132
D. TATA KELOLA PERUSAHAAN 138
E. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) 152
F. SUMBER DAYA MANUSIA 153
G. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK YANG MEMILIKI KONTRIBUSI 10% (SEPULUH PERSEN) ATAU LEBIH DARI TOTAL ASET, TOTAL LIABILITAS, ATAU LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK DARI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 159
H. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 166
I. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 167
IX. PERPAJAKAN 205
X. PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH 207
XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 209
XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT 212
XIII. KETERANGAN MENGENAI PENANGGUNG 218
XIV. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH 228
XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH 233
XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 235
XVIII. LAPORAN KEUANGAN 236

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi : Berarti Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UUPM sebagaimana diubah dengan UU No. 4/2023, berarti:

a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
   1. suami atau istri;
   2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
   3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
   4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang
   5. bersangkutan; atau
   6. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
   1. orang tua dan anak;
   2. kakek dan nenek serta cucu; atau
   3. saudara dari orang yang bersangkutan.
c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

Agen Pembayaran : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah ditunjuk Perseroan dengan perjanjian tertulis yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, serta denda (jika ada) dan Cicilan Imbalan Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah, serta Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan, dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran.

Akad Ijarah	:	Berarti Akad Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 26 Maret 2025 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Wali Amanat selaku wakil Pemegang Sukuk Ijarah, dimana Perseroan setelah menguasai objek ijarah dan mengalihkan hak manfaat kepada Pemegang Sukuk yang diwakili Wali Amanat sehingga hak manfaat dimiliki pemegang sukuk (sebagaimana Akad Ijarah antara Perseroan dengan MNCN sebagai pemilik obyek ijarah), selanjutnya Wali Amanat sebagai wakil Pemegang Sukuk bertindak sebagai *mu'jir* (pemberi sewa) menyewakan Obyek Ijarah tersebut kepada Perseroan sebagai *musta'jir* (penyewa). Atas Obyek Ijarah yang disewa tersebut Perseroan memberikan pembayaran sewa kepada Pemegang Sukuk berupa Cicilan Imbalan Ijarah secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta Sisa Imbalan Ijarah pada saat jatuh tempo sukuk.
Akad Kafalah	:	Berarti Akad Kafalah tanggal 26 Maret 2025 yang ditandatangani oleh CGIF dan Wali Amanat, di mana CGIF akan bertindak sebagai Penanggung (Kafil Sukuk Ijarah).
Akad Wakalah	:	Berarti Akad Wakalah sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 26 Maret 2025 antara pemegang sukuk/investor yang diwakili kepentingannya oleh Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, dalam hal ini berkedudukan sebagai *muwakkil,* dengan Perseroan, dimana muwakkil dengan ini memberikan kuasa khusus kepada Perseroan sebagai W*akil* untuk melakukan sewa menyewa (ijarah) sebagian gedung Tower 2, MNC Studios milik MNCN (sebagai anak perusahaan dari Perseroan) di Jl. Raya Perjuangan No.1, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, 11530 ("Obyek Ijarah") yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Wali Amanat selaku wakil Pemegang Sukuk Ijarah.
Akuntan Publik	:	Berarti Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono (KPS) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak dalam rangka Penawaran Umum ini.
Bank Kustodian	:	Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Bapepam dan/atau Bapepam dan LK (sekarang telah menjadi OJK)	:	Berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan ("DJLK"), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember dua ribu lima) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober dua ribu sepuluh) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK dan sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari BI ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Biaya Pihak Yang Dijamin	:	Berarti (a) seluruh pengeluaran, biaya, dan pengeluaran yang wajar serta terdokumentasi yang dikeluarkan secara sah oleh Pihak Yang Dijamin dalam membuat suatu Klaim pada CGIF sehubungan dengan Obligasi sesuai dengan Perjanjian Penanggungan dan (b) remunerasi yang telah jatuh tempo dan terutang (tetapi belum dibayar) kepada Pihak Yang Dijamin berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan sehubungan dengan Obligasi sampai waktu tersebut di mana penunjukan Wali Amanat diakhiri.
BNRI	:	Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
Bunga Akrual Tambahan	:	Berarti jumlah bunga sehubungan dengan Obligasi untuk Periode Akrual Tambahan (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Penanggungan) pada Bunga Obligasi.
Bunga Obligasi	:	Berarti bunga Obligasi per tahun dari masing-masing seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
Bunga Terjadwal	:	berarti bunga yang dibayarkan atas Obligasi yang harus dibayar pada setiap Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi (untuk menghindari keragu-raguan, tidak termasuk bunga cidera janji (apabila ada)).
Bursa Efek	:	Berarti PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
CGIF	:	Berarti Credit Guarantee and Investment Facility, lembaga dana perwalian (*trust fund*) dari Asian Development Bank, dengan kantor pusat di Manila, Filipina.
Cicilan Imbalan Ijarah	:	Berarti bagian dari Imbalan Sukuk Ijarah yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sebagai imbalan atas manfaat yang diterima oleh Perseroan dari pihak ketiga, yang pembayarannya akan dilakukan pada setiap Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
Daftar Pemegang Rekening	:	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah oleh Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Denda	:	Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar oleh Perseroan akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Dokumen Emisi	:	Berarti Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Pengakuan Utang, Pengakuan Kewajiban, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI, Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek, Prospektus, Prospektus Ringkas dan Pernyataan Pendaftaran serta dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.
DPS	:	Berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan.
Efek	:	Berarti berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensial dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) UUPM sebagaimana diubah dengan UU No. 4/2023.
Efek Syariah	:	Berarti Efek sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara pengelolaan kegiatan usaha; (ii) aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan kegiatan usaha dan/atau aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya; (iii) memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
Emisi	:	Berarti Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah oleh Perseroan untuk ditawarkan atau dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Entitas Anak	:	Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
Entitas Asosiasi	:	Berarti perseroan terbatas yang berbentuk badan hukum Indonesia dimana Perseroan mempunyai penyertaan saham kurang dari 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan terbatas tersebut.
Force Majeure	:	Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang, atau huru hara di Indonesia, menyebarnya wabah penyakit yang mematikan secara nasional, atau ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bencana nasional yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
Gagal Bayar	:	Berarti kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor, sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014.
Hari Bursa	:	Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	:	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan *Gregorius Calendar* tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Hari Kerja	:	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Manila, dan New York sebagai bukan Hari Kerja biasa.
IAPI	:	Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
Jumlah Terutang	:	Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terhutang dari waktu ke waktu.
Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*)	:	Berarti bagian penjaminan dari Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini yang didasarkan pada komitmen Penjamin Emisi Efek untuk berjanji dan mengikatkan diri akan menawarkan dan menjual Obligasi Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 kepada Masyarakat pada pasar perdana sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Efek pada tanggal penutupan masa Penawaran Umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan	:	Berarti sejumlah dana yang harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Fatwa Nomor: 43/DSN/MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) dan Fatwa DSN MUI Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi (*At-Takalif Al Fi'liyyah An-Nasyi'ah An-Nukul*), sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan Perseroan memenuhi kewajiban pembayaran atau terlambat membayar Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Sisa Imbalan Ijarah, dimana dalam hal ini tidak ada unsur kesalahan dari Pemegang Sukuk Ijarah serta Pemegang Sukuk Ijarah dirugikan sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan tersebut. Dana yang harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sebesar biaya/kerugian riil. Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan sampai dengan pembayaran jumlah yang wajib dibayar Perseroan dilaksanakan dengan ketentuan bahwa Pemegang Sukuk Ijarah membatasi untuk mengenakan biaya/kerugian riil sebesar-besarnya sebagai berikut:
		– Atas kelalaian membayar jumlah Cicilan Imbalan Ijarah dengan ketentuan sebagai berikut:
		  – Sukuk Ijarah Seri A : sebesar Rp7.897.490,- (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh Rupiah) per hari.
		  – Sukuk Ijarah Seri B : sebesar Rp1.717.710,- (satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sepuluh Rupiah) per hari.
		  – Sukuk Ijarah Seri C : sebesar Rp507.800,- (lima ratus tujuh ribu delapan ratus Rupiah) per hari.
		
		– Atas kelalaian membayar Sisa Imbalan Ijarah dengan ketentuan sebagai berikut:
		  – Sukuk Ijarah Seri A : sebesar Rp103.914.280,- (seratus tiga juta sembilan ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh Rupiah) per hari.
		  – Sukuk Ijarah Seri B : sebesar Rp21.881.630,- (dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh Rupiah) per hari.
		  – Sukuk Ijarah Seri C : sebesar Rp6.427.780,- (enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh Rupiah) per hari.

Konfirmasi Tertulis	:	Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi dan Sukuk Ijarah.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO/RUPSI (KTUR)	:	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi/ Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi/ Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO/ RUPSI atau meminta diselenggarakan RUPO/ RUPSI, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
KSEI	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI.
Kustodian	:	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dan harta lain yang berkaitan dengan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah serta jasa lainnya termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang telah mendapat Persetujuan OJK.
Manajer Penjatahan	:	Berarti PT Bahana Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
Masyarakat	:	Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing, baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia.
Menkumham	:	Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
MNC Grup	:	Berarti Perseroan beserta afiliasinya.
Nilai Pengalihan	:	Berarti nilai pengalihan Obyek Ijarah dengan jumlah sebesar Rp550.000.000.000,- (lima ratus lima puluh miliar Rupiah) atau sejumlah Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah dengan tata cara sesuai yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
Obligasi	:	Berarti Obligasi Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025.
Obligasi Berkelanjutan V	:	Berarti Obligasi Berkelanjutan V Global Mediacom, yang akan ditawarkan oleh Penjamin Emisi Efek kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp1.750.000.000.000,- (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah).
Obyek Ijarah	:	Berarti hak manfaat atas 4 lantai Gedung Tower 2, MNC Studios milik RCTI dengan perincian dan spesifikasi yang terdapat pada Lampiran Akad Ijarah.
Obyek Ijarah Tambahan	:	Berati obyek ijarah tambahan karena adanya penurunan nilai dari Obyek Ijarah.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	Berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UU No. 4/2023.
Pemegang Obligasi	:	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: a. Rekening Efek pada KSEI; atau b. Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Pemegang Sukuk Ijarah	:	Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Sukuk Ijarah dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan dan diadministrasikan dalam (a) Rekening Efek pada KSEI; atau (b) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemeringkat Efek	:	Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Pemerintah	:	Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penanggung	:	berarti CGIF sebagai Penanggung Obligasi Perseroan.
Penawaran Awal (*Bookbuilding*)	:	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang akan ditawarkan dan perkiraan tingkat Bunga Obligasi serta Sukuk Ijarah yang ditawarkan dan perkiraan Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah sesuai Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No.IX.A.2.
Penawaran Umum	:	Berarti kegiatan penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah oleh Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penawaran Umum Berkelanjutan	:	Berarti kegiatan penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek untuk menjual Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Masyarakat berdasarkan tatacara yang diatur dalam UUPM, Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah.
Pengakuan Utang	:	Berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam akta Pengakuan Utang No. 47 tanggal 13 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.
Pengakuan Kewajiban	:	Berarti pengakuan kewajiban Perseroan sehubungan dengan Sukuk Ijarah, sebagaimana tercantum dalam akta Pengakuan Kewajiban No. 50 tanggal 13 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.
Penitipan Kolektif	:	Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Penjamin Emisi Obligasi	:	Berarti Penjamin Emisi Obligasi dan pihak-pihak lain (apabila ada) yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini PT MNC Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia, dan PT KB Valbury Sekuritas.
Penjamin Emisi Sukuk Ijarah	:	Berarti Penjamin Emisi Sukuk Ijarah dan pihak-pihak lain (apabila ada) yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, yang dalam hal ini PT MNC Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia, dan PT KB Valbury Sekuritas.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	:	Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum Obligasi, yang dalam hal ini PT MNC Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia, dan PT KB Valbury Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah	:	Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum Sukuk Ijarah, yang dalam hal ini PT MNC Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia, dan PT KB Valbury Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.
Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014	**:**	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014	**:**	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014	**:**	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014	**:**	Berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2015	**:**	Berarti Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015	**:**	Berarti Peraturan OJK Nomor 18/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015	**:**	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015	**:**	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2018	:	Berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk
Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020		Berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
Peraturan No.VIII.G.12	:	Berarti Peraturan No.VIII.G.12, tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.
Peraturan No.IX.A.2	:	Berarti Peraturan No.IX.A.2, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.A.7	:	Berarti Peraturan No.IX.A.7, tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Perjanjian Agen Pembayaran	:	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan Pokok Obligasi No. 60 tanggal 26 Maret 2025 dan pelaksanaan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah serta pelunasan Sisa Imbalan Ijarah No. 61 tanggal 26 Maret 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Penanggungan	:	Berarti Perjanjian Penanggungan Obligasi dan Perjanjian Penanggungan Sukuk tanggal 29 April 2025 yang ditandatangani oleh CGIF dan Wali Amanat, dimana CGIF akan bertindak sebagai Penanggung Obligasi dan Sukuk Ijarah.
Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI	:	Berarti Perjanjian Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 di KSEI No. SP-027/OBL/KSEI/0225 tanggal 26 Maret 2025 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.

Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI	:	Berarti Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 di KSEI No. SP-014/SKK/KSEI/0225 tanggal 26 Maret 2025 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Penggantian Biaya dan Ganti Rugi antara Perseroan dengan CGIF ("RIA")	:	Berarti Perjanjian yang mengatur persyaratan pendahuluan sehubungan dengan penerbitan Jaminan Obligasi dan Jaminan Sukuk oleh CGIF, termasuk kewajiban Perseroan untuk membayar biaya penjaminan serta mengganti secara tanggung renteng seluruh jumlah yang dibayarkan oleh CGIF kepada Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah akibat kegagalan pembayaran oleh Perseroan, berdasarkan Perjanjian Penanggungan dan/atau Akad Kafalah.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi	:	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 No. 65 tanggal 26 Maret 2025, Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 No. 74 tanggal 29 April 2025, Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 No. 75 tanggal 20 Mei 2025, Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 No. 46 tanggal 13 Juni 2025, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah	:	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 No. 66 tanggal 26 Maret 2025, Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 No. 76 tanggal 29 April 2025, Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 No. 77 tanggal 20 Mei 2025, Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 No. 49 tanggal 13 Juni 2025, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	:	Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan/atau Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.
Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek	:	Berarti Surat persetujuan prinsip yang telah diterbitkan oleh PT Bursa Efek Indonesia sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, sehubungan dengan permohonan pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah Perseroan pada PT Bursa Efek Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat No. S-04662/BEI.PP2/05-2025 tanggal 16 Mei 2025 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dan Sukuk.
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi	:	Berarti perjanjian perwaliamanatan yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Wali Amanat dengan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 No. 63 tanggal 26 Maret 2025, Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 No. 73 tanggal 29 April 2025, Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 No. 74 tanggal 20 Mei 2025, Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 No. 45 tanggal 13 Juni 2025, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.

Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah	:	Berarti perjanjian perwaliamanatan yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Wali Amanat dengan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 No. 64 tanggal 26 Maret 2025, Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 No. 75 tanggal 29 April 2025, Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 No. 76 tanggal 20 Mei 2025, Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 No. 48 tanggal 13 Juni 2025, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Perwaliamanatan	:	Berarti Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan	:	Berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 sebagaimana termaktub dalam akta No. 62 tanggal 26 Maret 2025, Addendum I Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 sebagaimana termaktub dalam akta No. 73 tanggal 20 Mei 2025, Addendum II Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 sebagaimana termaktub dalam akta No. 44 tanggal 13 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.
Pernyataan Pendaftaran	:	Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (18) UUPM sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4/2023, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, yang terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya, termasuk semua perubahan, tambahan, serta pembetulannya.
Perseroan	:	Berarti PT Global Mediacom Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat.
Pihak yang Dijamin	:	Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penanggungan yang dalam hal ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta.
Pokok Obligasi	:	Berarti seluruh jumlah pokok Obligasi yang akan dikeluarkan sebesar Rp850.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri Obligasi, dimana jumlah pokok tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi sesuai dengan Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.
PP No. 5/2021	:	Berarti Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Prospektus	:	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (26) UUPM, Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 dan Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015, dengan memperhatikan Peraturan Nomor IX.A.2 dan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014.

Prospektus Awal	:	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran kecuali informasi mengenai penjaminan Emisi Efek, tingkat suku bunga Obligasi, Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum yang belum dapat ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf a Peraturan No.IX.A.8.
Prospektus Ringkas	:	Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017.
Rekening Efek	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/ atau catatan posisi Sukuk Ijarah dan/atau dana milik Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan Kontrak Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah.
RUPS	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPO	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
RUPSI	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
RUPSLB	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Satuan Pemindahbukuan	:	Berarti satuan jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya yaitu senilai Rp 1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan Obligasi dan Sukuk Ijarah mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
Satuan Perdagangan	:	Berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Sertifikat Jumbo Obligasi	:	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan di KSEI dan diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah	:	Berarti bukti penerbitan Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI dan diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening.
Sisa Imbalan Ijarah	:	Jumlah keseluruhan dana yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, yang belum dibayar kembali pada suatu waktu tertentu, dengan jumlah sebesar Rp550.000.000.000,- (lima ratus lima puluh miliar Rupiah), yang terdiri dari 3 (tiga) seri, dimana nilai Sisa Imbalan Ijarah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah sesuai dengan Seri Sukuk Ijarah dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Sukuk Ijarah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah.
Suara	:	Berarti hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi atau Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPO atau RUPSI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Sukuk	:	Berarti Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*), atas aset yang mendasarinya.
Sukuk Ijarah	:	Berarti Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025.
Tanggal Emisi	:	Berarti Tanggal Pembayaran hasil Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dari Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Perseroan yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi, yaitu pada tanggal distribusi Efek secara elektronik.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	:	Berarti tanggal dimana seluruh jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran.
Tanggal Pembayaran	:	Berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Perseroan yang telah disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, yang juga merupakan Tanggal Emisi.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	:	Berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran.
Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah	:	Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak, yang ditentukan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
Tanggal Pencatatan	:	Berarti tanggal Obligasi dan Sukuk Ijarah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, yaitu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah.
Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah	:	Berarti tanggal jatuh tempo dan dapat ditagihnya seluruh Sisa Imbalan Ijarah, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
Tanggal Penjatahan	:	Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yaitu tanggal 20 Juni 2025.
Tim Ahli Syariah	:	Berarti tim yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal yang diterbitkan atau dikeluarkan perusahaan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 5 /POJK.04/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal.
Utang	:	Berarti utang-utang Perseroan yang menimbulkan kewajiban pembayaran bunga atau kewajiban tetap lainnya.
UUP2SK	:	berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845.
UUPM	:	Berarti Undang-undang No. 8 tahun 1995, tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, yang diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.

UUPT	:	Berarti Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
UUWDP	:	Berarti Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tanggal 1 Februari 1982 tentang Wajb Daftar Perusahaan yang diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3214 tahun 1982, Tambahan No. 3214.
Wali Amanat	:	Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK yang pada saat ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta.

DAFTAR SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

BMTR	:	Berarti Perseroan atau PT Global Mediacom Tbk
BDL	:	Berarti BMTR Digital Limited
BML	:	Berarti BMTR Media Limited
DVN	:	Berarti PT Digital Vision Nusantara
GIB	:	Berarti PT Global Informasi Bermutu (Global TV)
GMI	:	Berarti Global Mediacom International Ltd
Infokom	:	Berarti PT Infokom Elektrindo
IPTV	:	Berarti PT MNC Vision Networks Tbk
MIMEL	:	Berarti MNC International Middle East Limited
MKM	:	Berarti MNC Kabel Mediakom
MMN	:	Berarti PT MNC Multimedia Networks
MMI	:	Berarti PT MNC Media Investasi
MNC Shop	:	Berarti PT MNC GS Homeshopping
MMU	:	Berarti PT MNC Media Utama
MNCN	:	Berarti PT Media Nusantara Citra Tbk
MSIN	:	Berarti PT MNC Digital Entertainment Tbk
MNC TV	:	Berarti PT MNC Televisi Indonesia
MOL	:	Berarti PT Mitra Operator Lokal
MSKY	:	Berarti PT MNC Sky Vision Tbk
MTN	:	Berarti PT MNC Televisi Network (iNews TV)
NV	:	Berarti PT Nusantara Vision
RCTI	:	Berarti PT Rajawali Citra Televisi Indonesia
Universal	:	Berarti Universal Media Holding Corp

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

A. RIWAYAT SINGKAT

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan dengan nama PT Bimantara Citra dan berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta No. 60 tanggal 30 Juni 1981 sebagaimana diubah dengan Akta No. 81 tanggal 29 Januari 1982, keduanya dibuat di hadapan Lukman Kirana, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/84/22 tanggal 22 Mei 1982, telah didaftarkan di dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta, masing-masing di bawah No. 1883 dan 1884, keduanya tertanggal 28 Mei 1982, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 54 tanggal 5 Juli 1985, Tambahan No. 912.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian, sesuai dengan Akta No.60 tanggal 30 Juni 1981, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.1.000.000,- per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	**100**	**100.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- Tuan Bambang Trihatmojo	10	10.000.000	50,00
- Tuan Mohamad Tachril Sapi'ie	5	5.000.000	25,00
- Tuan Rosano Barack	5	5.000.000	25,00
Jumlah modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**20**	**20.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**80**	**80.000.000**	

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, dan seluruh anggaran dasar ditegaskan kembali untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Terbuka sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 51 tanggal 20 Mei 2015 ("**Akta No. 51 Tanggal 20 Mei 2015**"), dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H. M.Kn., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0943978 tanggal 19 Juni 2015, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3522272.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 19 Juni 2015.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir telah mengalami perubahan untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 120 tanggal 28 Juli 2022 ("Akta No. 120 Tanggal 28 Juli 2022"), dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan No. AHU-0054141.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 2 Agustus 2022; didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0149266.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 2 Agustus 2022; diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0273800 tanggal 2 Agustus 2022; didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0149293.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 2 Agustus 2022, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 032529.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 Akta No. 120 Tanggal 28 Juli 2022, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha di bidang industri pengolahan; pertambangan dan penggalian;

informasi dan komunikasi; real estat; konstruksi; perdagangan besar dan eceran; dan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis. Kegiatan usaha yang saat ini secara aktif dilakukan oleh Perseroan adalah perdagangan, jasa, dan investasi.

Keterangan lebih lengkap mengenai riwayat singkat Perseroan dapat dilihat pada Prospektus Bab VIII.

B. KEGIATAN USAHA

Mayoritas pendapatan Perseroan dikontribusikan oleh dua lini bisnis utama, yaitu bisnis media berbasis iklan dan konten, yang dikelolah oleh MNCN selaku Entitas Anak Perseroan, yang saat ini menghasilkan pendapatan bagi Perseroan sebesar 79,07% dan bisnis media berbasis pelanggan, yang dikelola oleh IPTV selaku Entitas Anak Perseroan yang saat ini berhasil menghasilkan pendapatan sebesar16,68% bagi Perseroan. Selain itu Perseroan juga memperoleh pendapatan dari bisnis pendukung lainnya.

B.1. Bisnis Media Berbasis Iklan dan Konten melalui MNCN

MNCN adalah grup perusahaan media terintegrasi di Asia Tenggara dengan operasional mencakup 4 (empat) saluran televisi *Free-To-Air* (FTA) nasional, produksi dan distribusi konten termasuk rumah produksi, manajemen artis, dan manajemen media sosial termasuk *multi-channel networks,* serta layanan digital *entertainment* melalui 2 (dua) platform *Superapp,* 4 portal *online*, dan operasi pemberitaan terbesar yang berfokus pada konten pemberitaan dan informasi melalui platform portal online, saluran FTA & berbayar, radio, dan media sosial.

1. Penyiaran Televisi FTA

MNCN memiliki dan mengoperasikan 4 FTA nasional di Indonesia, yaitu RCTI, MNCTV, GTV dan iNews. Peringkat stasiun televisi MNCN masih kuat dan stabil dengan pangsa pemirsa *prime time* rata-rata per tahun 2024 adalah 35,9% pada slot *prime time* dan 36,7% pada slot *all time* (Sumber: Nielsen).

2. **Bisnis Konten dan Media Sosial**

Bisnis konten merupakan salah satu bisnis inti MNCN. Sampai akhir Desember 2024, MNCN memiliki pustaka konten terbesar di Indonesia dengan lebih dari 300.000 jam dan terus bertumbuh lebih dari 20.000 jam setiap tahunnya. Pustaka konten ini sangat berpotensi menjadi sumber pendapatan bagi MNCN. Konten dan *Intellectual Property* (IP) di dalamnya dapat dimonetisasi lebih lanjut dengan berbagai cara untuk *platform* distribusi lain baik di Indonesia maupun luar negeri.

MNCN juga mendapatkan penghasilan dari penayangan konten-konten hasil produksinya yang diunggah secara *online* ke dalam *platform* media sosial. Per bulan Desember 2024, akun media sosial (Youtube, Facebook, dan TikTok) yang dimiliki oleh MNC memiliki total sekitar 600 juta *subscribers*/*followers* dengan 124,7 miliar *views*.

3. Digital *Entertainment*

Bisnis digital *entertainment* terdiri dari beberapa jenis layanan yaitu layanan *superapp Over The Top* ("**OTT"**) melalui RCTI+ (AVOD) & Vision+ (SVOD) dan Portal *Online* melalui okezone.com, sindonews.com, iNews.id, dan idxchannel.com.

B.2. Bisnis Media Berbasis Pelanggan melalui IPTV

IPTV merupakan bagian dari bisnis media MNC Grup. IPTV merupakan perusahaan publik sejak Juli 2019 dengan kode saham IPTV. Bisnis utama IPTV terdiri dari TV Berlangganan DTH pascabayar ("**MNC Vision**") & DTH prabayar ("**K-Vision**"), layanan TV Berlangganan berbasis *Fiber Optic* ("**MNC Play**"), dan layanan bisnis ICT ("**Infokom**").

Adapun lini usaha Entitas Anak IPTV adalah sebagai berikut:

a. Jasa penyedia layanan *postpaid* televisi berbayar melalui PT MNC Sky Vision Tbk ("MNC Vision")

MNC Vision merupakan penyedia layanan TV berlangganan pasca bayar di Indonesia dengan lebih dari 1,2 juta pelanggan. Prestasi ini menunjukkan pencapaian yang luar biasa mengingat ekonomi Indonesia yang berfluktuasi,

peningkatan pembajakan video, dan persaingan sengit di antara operator TV berbayar lokal (sumber: data internal Perseroan).

b. Jasa penyedia layanan prabayar televisi berbayar melalui PT Digital Vision Nusantara ("K-Vision")

K-Vision merupakan TV berlangganan di Indonesia, yang melayani segmen pasar menengah ke bawah yang membutuhkan kualitas lebih baik pada pilihan saluran FTA yang beragam (FTA Indonesia lokal dan FTA internasional) dan saluran eksklusif berlangganan milik Perseroan. Sampai dengan Desember 2024, K-Vision memiliki lebih dari 12,5 juta pelanggan.

c. Jasa penyedia layanan internet *broadband* dan televisi berbayar berbasis Fiber Optik melalui PT MNC Kabel Mediakom ("MNC Play")

MNC Play fokus pada layanan video dengan menggunakan jaringan FTTH. MNC Play menyediakan layanan IPTV dengan pilihan program channel berbayar terbesar dilengkapi dengan fitur-fitur interaktif, seperti TVOD dan saluran siaran ulang (*catch up* TV).

d. Jasa layanan ICT melalui Infokom

Infokom telah berkembang menjadi penyedia layanan terkelola dan penyedia solusi Teknologi Informasi & Komunikasi di Indonesia. Dengan cakupan area jaringan yang luas, Infokom terus berkomitmen untuk menyediakan solusi ICT untuk sektor publik dan swasta.

Keterangan lebih lengkap mengenai kegiatan usaha Perseroan dapat dilihat pada Prospektus Bab VIII.

C. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut ini adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan saat Prospektus diterbitkan.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada tahun 2023 sehingga merujuk pada Akta No. 51 Tanggal 20 Mei 2015 *Junctis* Akta No. 21 Tanggal 9 Oktober 2020 dan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Perseroan per 31 Mei 2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan saat Prospektus diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	**55.750.000.000**	**5.575.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT MNC Asia HoldingTbk	7.520.655.000	752.065.500.000	45,99
- Drs. Lo Kheng Hong	1.067.633.500	106.763.350.000	6,53
- Masyarakat*	7.764.203.586	776.420.358.600	47,48
Saham Treasury	**231.485.500**	**23.148.550.000**	**-**
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**16.583.997.586**	**1.658.399.758.600**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**39.166.002.414**	**3.916.600.241.400**	

**) kepemilikan saham di bawah 5%*

D. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK

Berikut ini adalah Penyertaan Perseroan pada Entitas Anak berdasarkan DPS masing-masing Entitas Anak tertanggal Prospektus ini diterbitkan:

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Domisili	Presentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Tahun Pendirian	Status Operasional	Penyertaan Melalui
1.	MNCN	Media berbasis iklan dan konten	Jakarta	52,67%	2002	1997	Beroperasi	Langsung
2.	IPTV	Aktivitas Konsultasi Manajemen	Jakarta	63,24%	2006	2006	Beroperasi	Langsung
3.	Infokom	Infrastruktur telekomunikasi dan teknologi	Bekasi	99,99%	1997	1997	Beroperasi	Langsung
4.	MNC Shop	TV *homeshopping*	Jakarta	60,00%	2012	2012	Tidak Beroperasi	Langsung
5.	GMI	Investasi	Dubai	100,00%	2007	2007	Beroperasi	Langsung
6.	Universal	Investasi	Cayman Island	100,00%	2007	2007	Beroperasi	Langsung
7.	BML	Investasi	Hong Kong	81,06%	2020	2020	Beroperasi	Langsung
8.	BDL	Investasi	Hong Kong	81,06%	2022	2002	Beroperasi	Langsung
9.	RCTI	Penyiaran televisi	Jakarta	99,99%	2004	1987	Beroperasi	Tidak langsung (melalui MNCN dan Infokom)
10.	GIB	Penyiaran televisi	Jakarta	99,99%	2005	1999	Beroperasi	Tidak langsung (melalui MNCN dan Infokom)
11.	MNCTV	Penyiaran televisi	Jakarta	87,07%	2006	1990	Beroperasi	Tidak langsung (melalui MNCN)
12.	MTN	Penyiaran televisi	Jakarta	99,99%	2008	2006	Beroperasi	Tidak langsung (melalui MNCN dan Infokom)
13.	MMN	Stasiun radio	Jakarta	99,43%	2005	2005	Beroperasi	Tidak langsung (Melalui MNCN)
14.	MSIN	Konten	Jakarta	72,81%	2007	2000	Beroperasi	Tidak langsung (melalui MNCN)
15.	MMI	Periklanan dan Konten	Jakarta	99,99%	2016	2016	Tidak Beroperasi	Tidak langsung (melalui MNCN)
16.	MMU	Advertising	Jakarta	99,99%	2014	2014	Tidak Beroperasi	Tidak langsung (melalui MNCN)
17.	MIMEL	Investasi	Dubai	100,00%	2007	2007	Beroperasi	Tidak langsung melalui MNCN)
18.	MSKY	Media berbasis pelanggan	Jakarta	91,90%	2007	1988	Beroperasi	Tidak Langsung (melalui IPTV)
19.	NV	Media berbasis pelanggan	Jakarta	99,99%	2019	2006	Beroperasi	Tidak langsung (melalui IPTV)
20.	DVN	Media berbasis pelanggan	Jakarta	99,99%	2019	2010	Beroperasi	Tidak langsung (melalui IPTV dan Infokom)
21.	MKM	Jasa Televisi Protokol Internet	Jakarta	99,99%	2015	2013	Beroperasi	Tidak langsung (melalui IPTV dan Infokom)
22.	MOL	Aktivitas Konsultasi Manajemen	Jakarta	99,99%	2023	2012	Beroperasi	Tidak langsung (melalui IPTV dan MKM)

Mayoritas pendapatan Perseroan dikontribusikan oleh 2 Entitas Anak yaitu MNCN (79,07%) dan IPTV (16,68%).

Alasan Entitas Anak tidak beroperasi karena *business plan* setiap Entitas Anak yang tidak beroperasi tersebut tidak lagi sesuai, dikarenakan faktor-faktor eksternal diluar kendali setiap Entitas Anak.

E. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Selain itu, Efek yang diterbitkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini juga memiliki risiko investasi bagi investor. Beberapa potensi risiko di bawah ini dapat mempengaruhi usaha serta laba yang dihasilkan Perseroan, yang diurutkan berdasarkan bobot dari yang tertinggi hingga bobot yang terendah sebagai berikut:

1. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Sebagai Perusahaan Induk

2. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

a. Risiko Investasi
b. Risiko Operasional
c. Risiko Persaingan Usaha
d. Risiko Perubahan Teknologi
e. Risiko Penurunan Belanja Iklan
f. Risiko Persaingan Program
g. Risiko Kegagalan atau Kerusakan pada Fasilitas-Fasilitas Penting

3. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Perekonomian secara Makro
2. Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing
3. Risiko Kebijakan Pemerintah
4. Risiko Kepatuhan
5. Risiko Tuntutan Hukum

4. RISIKO BAGI INVESTOR

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi dan Sukuk Ijarah adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko tertundanya pembayaran disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah serta Pokok Obligasi dan/atau Sisa Imbalan Ijarah pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi dan Sukuk Ijarah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan dan Entitas Anak.
3. Risiko turun/berkurangnya nilai manfaat atas Objek Ijarah yang disebabkan karena perubahan lingkungan bisnis, perubahan regulasi, dan/atau faktor lainnya.
4. Risiko aksi korporasi dalam hal penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah bagi Perseroan meliputi terutama risiko kredit (kemampuan Perseroan untuk melunasi bunga dan pokok obligasi dan Sukuk Ijarah tepat waktu) dan risiko gagal bayar. Selain itu, Perseroan juga dapat menghadapi risiko terkait pemeringkatan efek bersifat utang yang dapat memengaruhi harga obligasi, Sukuk Ijarah dan biaya pembiayaan kedepannya.

F. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi Obligasi, akan digunakan untuk:

1. Sebesar Rp300.235.000.000,- (tiga ratus miliar dua ratus tiga puluh lima juta Rupiah) akan digunakan seluruhnya untuk pelunasan Obligasi Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap II Tahun 2024 Seri A. Sumber dana untuk membayar bunga obligasi adalah kas dari aktivitas usaha Perseroan.

2. Sebesar Rp217.825.000.000,- (dua ratus tujuh belas miliar delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah) akan digunakan seluruhnya untuk pelunasan Obligasi Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022 Seri B. Sumber dana untuk membayar bunga obligasi adalah kas dari aktivitas usaha Perseroan.
3. Sebesar Rp1.075.000.000 ,- (satu miliar tujuh puluh lima juta Rupiah) akan digunakan seluruhnya untuk pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 Seri C. Sumber dana untuk membayar bunga obligasi adalah kas dari aktivitas usaha Perseroan.
4. Sebesar Rp139.160.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan miliar seratus enam puluh juta Rupiah) akan digunakan seluruhnya untuk pelunasan Obligasi Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap II Tahun 2022 Seri B. Sumber dana untuk membayar bunga obligasi adalah kas dari aktivitas usaha Perseroan.
5. Sebesar Rp430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta Rupiah) akan digunakan seluruhnya untuk pelunasan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 Seri C. Sumber dana untuk membayar cicilan imbalan ijarah adalah kas dari aktivitas usaha Perseroan.
6. Sebesar Rp96.600.000.000,- (sembilan puluh enam miliar enam ratus juta Rupiah) akan digunakan seluruhnya untuk pelunasan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap II Tahun 2022 Seri B. Sumber dana untuk membayar cicilan imbalan ijarah adalah kas dari aktivitas usaha Perseroan.
7. Sisanya setelah dikurangi dengan biaya emisi Obligasi akan digunakan seluruhnya untuk pelunasan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022 Seri B. Sumber dana untuk membayar cicilan imbalan ijarah adalah kas dari aktivitas usaha Perseroan.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi Sukuk Ijarah, akan digunakan untuk:

1. Sebesar Rp381.705.000.000 ,- (tiga ratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus lima juta Rupiah) akan digunakan seluruhnya untuk pelunasan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap II Tahun 2024 Seri A. Sumber dana untuk membayar cicilan imbalan ijarah adalah kas dari aktivitas usaha Perseroan.

2. Sisanya setelah dikurangi dengan biaya emisi Sukuk Ijarah akan digunakan seluruhnya untuk pelunasan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022 Seri B. Sumber dana untuk membayar cicilan imbalan ijarah adalah kas dari aktivitas usaha Perseroan

Dalam hal dana hasil penawaran umum Obligasi dan Sukuk Ijarah tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan dan/atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Keterangan lebih lengkap mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum dapat dilihat pada Prospektus Bab II.

G. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Saat ini pasar iklan media di Indonesia merupakan pasar yang terbesar di Asia Tenggara dengan belanja iklan bersih diperkirakan sekitar 3,436 miliar dolar AS pada tahun 2025 berdasarkan Media Partners Asia. Kondisi tersebut ditopang oleh perkiraan pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 5,1% pada tahun 2025. Dengan PDB yang diproyeksikan tumbuh di level yang sangat baik, Indonesia mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil demi mempertahankan peningkatan untuk seluruh industri periklanan di Indonesia kedepannya. Sebagai tambahan, terdapat korelasi yang positif antara pertumbuhan PDB dengan konsumsi domestik yang pada akhirnya akan mengakibatkan naiknya anggaran pemasaran bagi perusahaan consumer goods demi menggambil bagian dalam peningkatan kebutuhan konsumen.

Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, industri periklanan di masa mendatang diprediksi akan semakin membaik. Beberapa indikator berikut mendukung perkiraan prospek tersebut, yakni:

- Pasar domestik yang besar, dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta, tumbuh sekitar 3-4 juta orang setiap tahun selama 15 tahun ke depan. Selain itu komposisi penduduk pada usia yang produktif akan menjadi target pasar potensial bagi produk konsumsi seperti produk makanan dan minuman serta produk rumah tangga.

- Potensi kenaikan signifikan untuk pertumbuhan belanja iklan karena rasio belanjaiklan terhadap PDB adalah dibawah 0,2%, salah satu yang terendah di Asia.
- Belanja iklan di FTA Nasional dan Digital akan tumbuh menjadi 94% dari belanja iklan nasional dalam 2 tahun ke depan.
- Indonesia sebagai negara kepulauan menjadikan FTA sebagai media iklan termurah per individu bagi pengiklan dibandingkan dengan media iklan lainnya, karena jangkauan FTA yang terluas dari media iklan lainnya sedangkan penetrasi internet masih terbatas pada kota-kota besar.

Industri media berlangganan juga memiliki prospek yang baik, yakni:
- TV berlangganan berbasis satelit mempunyai peranan penting di Indonesia, terutama karena karakteristik geografisnya sebagai negara kepulauan.
- Ekspansi *bundle services* seperti fiber dan IPTV merupakan salah satu pendorong utama peningkatan pelanggan TV berlangganan, dengan kontribusi TV berlangganan berbasis fiber dari seluruh segmen TV berlangganan mencapai 68% pada tahun 2027.
- MPA memproyeksikan pada tahun 2027, pelanggan *fixed broadband* akan meningkat menjadi 16,6 juta pelanggan yang mewakili pertumbuhan CAGR 2022-2027 sebesar 8,2%, dengan segmen fiber masih mendominasi pasar dengan pangsa lebih dari 92%.

Keterangan lebih lengkap mengenai prospek usaha Perseroan dapat dilihat pada Prospektus Bab VIII.

H. STRATEGI USAHA PERSEROAN

Strategi umum Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Menjaga posisi sebagai pemimpin dalam industri media.
2. Mempertahankan pertumbuhan jangka panjang melalui kombinasi dari pertumbuhan organik dan akusisi dari kegiatan usaha baru khususnya pada bidang digital yang saat ini memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat pesat.
3. Mengoptimalkan pendapatan dan mengatur pengeluaran biaya demi meraih laba yang memadai dengan terus menciptakan sinergi antar unit bisnis.
4. Konsolidasi semua aset digital media dan entertainment yang memiliki pertumbuhan jauh lebih tinggi.

Keterangan lebih lengkap mengenai strategi usaha Perseroan dapat dilihat pada Prospektus Bab VIII.

I. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN

Ringkasan mengenai Obligasi sebagai berikut:

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025
Target Dana Obligasi Berkelanjutan V Global Mediacom	:	Sebesar Rp1.750.000.000.000,- (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah)
Jumlah Pokok Obligasi	:	Seluruh jumlah Pokok Obligasi yang akan ditawarkan sebesar Rp850.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh miliar Rupiah). Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri Obligasi yang dijamin dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*): Seri A : Rp279.350.000.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) Seri B : Rp480.600.000.000,- (empat ratus delapan puluh miliar enam ratus juta Rupiah) Seri C : Rp90.050.000.000,- (sembilan puluh miliar lima puluh juta Rupiah)
Harga Penawaran	:	100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi
Jangka Waktu	:	Seri A : 3 (tiga) tahun Seri B : 5 (lima) tahun Seri C : 7 (tujuh) tahun

Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya
Satuan Perdagangan	:	Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah)
Tingkat Bunga	:	Seri A : 7,60% (tujuh koma enam nol persen) per tahun Seri B : 7,85% (tujuh koma delapan lima persen) per tahun Seri C : 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun
Periode Pembayaran Bunga	:	Bunga Obligasi akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan
Tanggal Pembayaran Bunga Pertama	:	24 September 2025
Peringkat Efek	:	$_{id}AAA_{(cg)}$ *(Triple A; Corporate Guarantee)* dari Pefindo
Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi (*Sinking Fund)*	:	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi.
Pembelian Kembali (*Buy Back*)	:	1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (*buy back*) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Wali Amanat	:	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Agen Pembayaran	:	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan kebendaan khusus, namun dijamin dengan penanggungan oleh Credit Guarantee and Investment Facility, lembaga dana perwalian (*trust fund*) dari Asian Development Bank ("CGIF").

Ringkasan mengenai Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

Nama Sukuk Ijarah	:	Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025
Target Dana Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom	:	Sebesar Rp1.250.000.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah)
Jumlah Sisa Imbalan Ijarah	:	Seluruh jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang akan ditawarkan sebesar Rp550.000.000.000,- (lima ratus lima puluh miliar Rupiah), yang terbagi dalam 3 (tiga) seri yang akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*): Seri A : Rp434.990.000.000,- (empat ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh juta Rupiah) Seri B : Rp89.010.000.000,- (delapan puluh sembilan miliar sepuluh juta Rupiah) Seri C : Rp26.000.000.000,- (dua puluh enam miliar Rupiah)
Harga Penawaran	:	100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah
Jangka Waktu	:	Seri A : 3 (tiga) tahun Seri B : 5 (lima) tahun Seri C : 7 (tujuh) tahun

Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya
Satuan Perdagangan	:	Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah)
Cicilan Imbalan Ijarah	:	Seri A : Rp33.059.240.000,- (tiga puluh tiga miliar lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah) per tahun Seri B : Rp6.987.285.000,- (enam miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) per tahun Seri C : Rp2.054.000.000,- (dua miliar lima puluh empat juta Rupiah) per tahun
Periode Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah	:	Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan
Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah Pertama	:	24 September 2025
Peringkat Efek	:	$_{id}AAA_{(cg)\,(sy)}$ (*Triple A syariah; Corporate Guarantee*) dari Pefindo
Penyisihan Dana Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah (*Sinking Fund*)	:	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai rencana penggunaan dana penerbitan Sukuk Ijarah.
Pembelian Kembali (*Buy Back*)	:	1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Sukuk Ijarah sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Sukuk Ijarah. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (*buy back*) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Sukuk Ijarah atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Wali Amanat	:	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Agen Pembayaran	:	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan suatu jaminan kebendaan khusus, namun dijamin dengan penanggungan oleh Credit Guarantee and Investment Facility, lembaga dana perwalian (*trust fund*) dari Asian Development Bank ("CGIF").

J. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini serta dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia dan Peraturan nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (KPS) member of "Nexia International" network dengan Opini Tanpa Modifikasian dalam laporan yang diterbitkan kembali tanggal 15 Mei 2025. Audit dilaksanakan sesuai dengan Standard Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Florus Daeli, SE., Ak., M.M., CPA., ASEAN CPA., CA., CRA., CLI (Rekan pada KAP KPS dengan Ijin AP No. 0126).

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Jumlah Aset	36.243.772	35.268.302
Jumlah Liabilitas	7.164.262	7.618.296
Jumlah Ekuitas	29.079.510	27.650.006
Jumlah Liabilitas Dan Ekuitas	36.243.772	35.268.302

Ikhtisar Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Pendapatan	10.059.317	10.163.157
Beban Pokok Pendapatan	6.019.583	6.175.305
Laba Kotor	4.039.734	3.987.852
Laba Sebelum Pajak	1.040.602	1.086.680
Beban Pajak Penghasilan	(123.382)	(18.938)
Laba Bersih Tahun Berjalan	917.220	1.067.742
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	918.482	1.055.116
Laba Per Saham Dasar		
(dalam Rupiah penuh)	32,9	41,4

Rasio-Rasio Keuangan Konsolidasian Penting

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Rasio Usaha		
Laba Sebelum Pajak/Pendapatan	10,34%	10,69%
Laba Bersih Tahun Berjalan/ Pendapatan	9,12%	10,51%
Laba Bersih Tahun Berjalan/Jumlah Ekuitas	3,15%	3,86%
Laba Bersih Tahun Berjalan/Jumlah Aset	2,53%	3,03%
Pendapatan/Jumlah Aset	27,75%	28,82%
Rasio Keuangan		
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	3,21x	2,69x
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	0,25x	0,28x
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	0,20x	0,22x
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)[(1)]	0,69x	0,70x
Net Debt to Equity Ratio	0,16x	0,17x
Interest Service Coverage Ratio (ISCR)[(2)]	4,07x	4,72x
Rasio Pertumbuhan		
Pendapatan	-1,02%	-16,92%
Laba Bersih Tahun Berjalan	-14,10%	-48,19%
Jumlah Aset	2,77%	-1,79%

Jumlah Liabilitas	-5,96%	-17,76%
Jumlah Ekuitas	5,17%	3,76%

Catatan:
(1) DSCR = EBITDA terhadap bunga pinjaman dan pokok pinjaman yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun = Laba sebelum bunga dan pajak / Bunga + Pokok pinjaman
(2) ISCR = EBITDA terhadap beban bunga = Laba sebelum bunga dan pajak / Beban bunga

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit Atau Liabilitas Lainnya dan Pemenuhannya

Keterangan	Persyaratan Keuangan	31 Desember	
		2024	2023
Net Debt to Equity Ratio	Maksimal 4x	0,16x	0,17x
Interest Service Coverage Ratio (ISCR)	Minimal 2x	4,07x	4,72x
Debt to EBITDA	Maksimal 3x	2,06x	2,15x

Penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah oleh Perseroan tidak akan menyebabkan terlanggarnya ketentuan dalam perjanjian kredit yang ada, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai rasio keuangan, serta tidak mengakibatkan pelanggaran terhadap financial covenants yang berlaku dalam perjanjian-perjanjian tersebut.

K. EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK YANG BELUM DILUNASI

No	Nama	Rating	Nominal (Rp juta)	Jangka Waktu	Tingkat Bunga/Cicilan Imbalan (per tahun)	Jatuh Tempo	Total Nilai Efek yang Terutang (Rp juta)
1	Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2020 Seri C	idA	1.075	5 tahun	12%	11 September 2025	1.075
2	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2020 Seri C	idA(sy)	430	5 tahun	Rp51.600.000	11 September 2025	430
3	Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 Seri C	idA	10.555	5 tahun	11,0%	14 September 2026	10.555
4	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 Seri C	idA(sy)	50	5 tahun	Rp5.500.000	14 September 2026	50
5	Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 Seri B	idA+	217.825	3 tahun	10,00%	5 Juli 2025	217.825
6	Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 Seri C	idA+	169.505	5 tahun	11,00%	5 Juli 2027	169.505
7	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 Seri B	idA+(sy)	269.630	3 tahun	Rp26.963.000.000	5 Juli 2025	269.630
8	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 Seri C	idA+(sy)	10.210	5 tahun	Rp1.123.100.000	5 Juli 2027	10.210
9	Obligasi Berkelanjutan III	idA+	139.160	3 tahun	10,00%	16 September 2025	139.160

No	Nama	Rating	Nominal (Rp juta)	Jangka Waktu	Tingkat Bunga/Cicilan Imbalan (per tahun)	Jatuh Tempo	Total Nilai Efek yang Terutang (Rp juta)
	Tahap II Tahun 2022 Seri B						
10	Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022 Seri C	idA+	36.695	5 tahun	11,00%	16 September 2027	36.695
11	Sukuk Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022 Seri B	idA+(sy)	96.600	3 tahun	Rp9.660.000.000	16 September 2025	96.600
12	Sukuk Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022 Seri C	idA+(sy)	2.250	5 tahun	Rp247.500.000	16 September 2027	2.250
13	Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2023 Seri B	idA+	230.260	3 tahun	10,25%	6 Juli 2026	230.260
14	Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2023 Seri C	idA+	22.330	5 tahun	11,25%	6 Juli 2028	22.330
15	Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2023 Seri B	idA+(sy)	442.360	3 tahun	Rp45.341.900.000	6 Juli 2026	442.360
16	Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2023 Seri C	idA+(sy)	15.350	5 tahun	Rp1.726.875.000	6 Juli 2028	15.350
17	Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2024 Seri A	idA+	300.235	370 Hari Kalender	8,75%	1 Juli 2025	300.235
18	Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2024 Seri B	idA+	217.510	3 tahun	10,25%	21 Juni 2027	217.510
19	Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2024 Seri C	idA+	132.255	5 tahun	11,00%	21 Juni 2029	132.255
20	Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2024 Seri A	idA+(sy)	381.705	370 Hari Kalender	Rp33.399.187.500	1 Juli 2025	381.705
21	Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2024 Seri B	idA+(sy)	267.130	3 tahun	Rp27.380.825.000	21 Juni 2027	267.130
22	Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2024 Seri C	idA+(sy)	1.165	5 tahun	Rp128.150.000	21 Juni 2029	1.165
	Jumlah		**2.964.285**				**2.964.285**

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih memiliki utang obligasi dan sukuk ijarah dalam mata uang rupiah sebesar Rp2.964.285 juta.

I. PENAWARAN UMUM

PT GLOBAL MEDIACOM Tbk

Bidang Usaha:
Perdagangan, Jasa dan Investasi

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat
MNC Tower Lantai 27
Jl. Kebon Sirih No.17-19, Jakarta Pusat 10340
Telepon: (021) 390-9211, 390-0310, Faksimili: (021) 392-7859, 390-9207
Email : investor.relations@mncgroup.com
Website : mediacom.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V GLOBAL MEDIACOM DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.750.000.000.000,- (SATU TRILIUN TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN V")
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN V TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN V GLOBAL MEDIACOM TAHAP I TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp850.000.000.000,- (DELAPAN RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")
DAN
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN V GLOBAL MEDIACOM DENGAN TARGET SISA IMBALAN IJARAH YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.250.000.000.000,- (SATU TRILIUN DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
("SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN V")
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN V GLOBAL MEDIACOM TAHAP I TAHUN 2025
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp550.000.000.000,- (LIMA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("SUKUK IJARAH")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) Seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C. Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp850.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh miliar Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*), yaitu sebagai berikut:

Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp279.350.000.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,60% (tujuh koma enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri B: Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp480.600.000.000,- (empat ratus delapan puluh miliar enam ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,85% (tujuh koma delapan lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp90.050.000.000,- (sembilan puluh miliar lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 24 September 2025 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 24 Juni 2028 untuk Obligasi Seri A, 24 Juni 2030 untuk Obligasi Seri B dan 24 Juni 2032 untuk Obligasi Seri C. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Sukuk Ijarah ini terdiri dari 3 (tiga) Seri, yaitu Sukuk Ijarah Seri A, Seri B, dan Seri C. Sukuk Ijarah yang ditawarkan sebesar Rp550.000.000.000,- (lima ratus lima puluh miliar Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*), yaitu sebagai berikut:

Seri A: Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A yang ditawarkan sebesar Rp434.990.000.000,- (empat ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp33.059.240.000,- (tiga puluh tiga miliar lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri B: Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B yang ditawarkan sebesar Rp89.010.000.000,- (delapan puluh sembilan miliar sepuluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp6.987.285.000,- (enam miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C yang ditawarkan sebesar Rp26.000.000.000,- (dua puluh enam miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp2.054.000.000,- (dua miliar lima puluh empat juta Rupiah) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah ini dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 24 September 2025, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 24 Juni 2028 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 24 Juni 2030 untuk Sukuk Ijarah Seri B, dan 24 Juni 2032 untuk Sukuk Ijarah Seri C. Pembayaran Sukuk Ijarah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo. Perseroan tidak akan melakukan pemotongan zakat atas Cicilan Imbalan Ijarah.

Dalam rangka penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") dengan peringkat:

idAAA(cg) (*Triple* A; *Corporate Guarantee*) **idAAA(sy)(cg) (*Triple* A Syariah; *Corporate Guarantee*)**

PENCATATAN ATAS OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
PENAWARAN ATAS OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH *(FULL COMMITMENT).*

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH PADA UMUMNYA ADALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

A. PERSYARATAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014:

1. Telah menjadi Perseroan atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir sebelum Penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Global Mediacom dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom;
2. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dimana pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun ke-2 (kedua) sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
3. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum Penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Perseroan pada tanggal 26 Maret 2025 dan surat tanggal 26 Maret 2025 yang dibuat oleh akuntan atas surat pernyataan Perseroan tersebut;
4. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

B. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI

NAMA OBLIGASI

Obligasi yang diterbitkan ini diberi nama "Obligasi Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025".

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan Perseroan dan didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui pemegang rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

HARGA PENAWARAN

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JANGKA WAKTU OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp850.000.00.000,- (delapan ratus lima puluh miliar Rupiah). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) Seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*), yaitu sebagai berikut:

Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp279.350.000.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,60% (tujuh koma enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri B: Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp480.600.000.000,- (empat ratus delapan puluh miliar enam ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,85% (tujuh koma delapan lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp90.050.000.000,- (sembilan puluh miliar lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 24 September 2025 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 24 Juni 2028 untuk Obligasi Seri A, 24 Juni 2030 untuk Obligasi Seri B dan 24 Juni 2032 untuk Obligasi Seri C.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

TATA CARA PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI

Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Pembayaran Pokok Obligasi yang terhutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.

Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

Pembayaran Bunga Obligasi yang terhutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

JADWAL PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Jadwal pembayaran bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga ke-	Seri A	Seri B	Seri C
1	24 September 2025	24 September 2025	24 September 2025
2	24 Desember 2025	24 Desember 2025	24 Desember 2025
3	24 Maret 2026	24 Maret 2026	24 Maret 2026
4	24 Juni 2026	24 Juni 2026	24 Juni 2026
5	24 September 2026	24 September 2026	24 September 2026
6	24 Desember 2026	24 Desember 2026	24 Desember 2026
7	24 Maret 2027	24 Maret 2027	24 Maret 2027
8	24 Juni 2027	24 Juni 2027	24 Juni 2027

Bunga ke-	Seri A	Seri B	Seri C
9	24 September 2027	24 September 2027	24 September 2027
10	24 Desember 2027	24 Desember 2027	24 Desember 2027
11	24 Maret 2028	24 Maret 2028	24 Maret 2028
12	24 Juni 2028	24 Juni 2028	24 Juni 2028
13		24 September 2028	24 September 2028
14		24 Desember 2028	24 Desember 2028
15		24 Maret 2029	24 Maret 2029
16		24 Juni 2029	24 Juni 2029
17		24 September 2029	24 September 2029
18		24 Desember 2029	24 Desember 2029
19		24 Maret 2030	24 Maret 2030
20		24 Juni 2030	24 Juni 2030
21			24 September 2030
22			24 Desember 2030
23			24 Maret 2031
24			24 Juni 2031
25			24 September 2031
26			24 Desember 2031
27			24 Maret 2032
28			24 Juni 2032

OBLIGASI MERUPAKAN BUKTI UTANG

Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, semua Obligasi merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berhutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.

Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

PENDAFTARAN OBLIGASI DI KSEI

Obligasi didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku. Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

PENARIKAN OBLIGASI

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.

PENGALIHAN OBLIGASI

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI

Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Satu satuan pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain) yaitu Rp 1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus namun dijamin dengan penanggungan dari *Credit Guarantee And Investment Facility*, Lembaga Dana Perwalian (*Trust Fund*) dari Asian Development Bank ("**CGIF**") dengan jumlah penanggungan sebesar Jumlah Yang Dijamin (sebagaimana dijelaskan di bawah ini) sehubungan dengan Obligasi berdasarkan dan tunduk pada Perjanjian Penanggungan yang telah ditandatangani antara CGIF dan Wali Amanat.

PENANGGUNGAN

Bahwa untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi ini, atas permohonan Perseroan, CGIF telah menyetujui untuk bertindak sebagai penanggung *(guarantor)* Obligasi, dan bersama-sama telah menandatangani Perjanjian Penanggungan pada tanggal 29 April 2025 dengan Wali Amanat berdasarkan Syarat dan Ketentuan Obligasi dengan memperhatikan syarat-syarat dalam Perjanjian Penanggungan yaitu sebesar Jumlah Yang Dijamin.

Perseroan, MNCN, dan IPTV pada tanggal 16 Juni 2025 telah menandatangani Perjanjian Penggantian Biaya dan Ganti Rugi dengan CGIF ("**RIA**"), yang mengatur, antara lain, kewajiban Perseroan, MNCN dan IPTV masing-masing sebagai Obligor untuk mengganti nilai yang ditanggung CGIF dalam hal terjadi kegagalan pembayaran oleh Perseroan dan CGIF telah melakukan pembayaran kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Penanggungan. Berdasarkan RIA, Perseroan akan memberikan jaminan kepada CGIF berupa hak tanggungan atas tanah dan bangunan berupa gedung iNews Tower , suatu bangunan perkantoran yang berlokasi di Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 36-38, RT. 15, RW. 7, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340, yang dimiliki oleh MNCN dan berdiri diatas tanah yang disewa oleh MNCN dari PT GLD Property, serta fidusia atas mesin dan peralatan yang dimiliki oleh MNCN. Pemberian jaminan oleh Perseroan berdasarkan RIA tersebut bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.17/2020, dikarenakan nilai transaksi penanggungan tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan 31 Desember 2024 dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.42/2020, mengingat CGIF bukan merupakan pihak terafiliasi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.42/2020.

Penanggung dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUP2SK.

Kecuali didefinisikan secara lain, istilah-istilah dengan huruf kapital yang digunakan pada bagian ini mengacu kepada istilah-istilah yang telah didefinisikan dalam Perjanjian Penanggungan.

Berikut ini adalah rangkuman ketentuan dari Perjanjian Perwaliamanatan:

1. Untuk menjamin kewajiban pembayaran dari Pokok Obligasi dan Bunga Terjadwal, Bunga Akrual Tambahan dan Biaya Pihak Yang Dijamin (termasuk pengeluaran apapun yang dikeluarkan oleh Agen Pemegang Obligasi) yang terutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, CGIF akan memberikan Penanggungan untuk kepentingan Pemegang Obligasi yang diwakili oleh Wali Amanat, dengan ketentuan:
    a. Penanggungan adalah jaminan pembayaran atas kewajiban pembayaran atas Jumlah Yang Dijamin untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, sebagaimana dibuktikan dengan, dan tercantum dalam, Perjanjian Penanggungan.
    b. Nilai Penanggungan adalah sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Jumlah Yang Dijamin.
    c. Wali Amanat wajib menyampaikan Klaim atas suatu Peristiwa Gagal Bayar dalam periode permintaan sebagai berikut: (i) untuk Bunga Terjadwal (termasuk Bunga Terjadwal yang jatuh

tempo pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi terakhir) atau Biaya Pihak Yang Dijamin sehubungan dengan suatu Peristiwa Gagal Bayar, maka Klaim tersebut harus dilakukan dalam waktu sepuluh (10) Hari Kerja terhitung sejak tanggal terjadinya Peristiwa Gagal Bayar tersebut; dan (ii) untuk Jumlah Pokok Obligasi yang jatuh tempo pada Tanggal Jatuh Tempo Obligasi sehubungan dengan suatu Peristiwa Gagal Bayar, maka Klaim tersebut harus diajukan dalam waktu dua puluh (20) Hari Kerja terhitung sejak tanggal Kejadian Gagal Bayar tersebut (Periode Klaim).

d. CGIF akan, dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penanggungan, membayar kepada Wali Amanat Jumlah Yang Dijamin yang menjadi pokok dari Klaim, atau bagiannya yang masih belum dibayar, dalam waktu lima belas (15) Hari Kerja setelah diterimanya Klaim tersebut oleh CGIF, yang mana Kewajiban CGIF untuk melakukan pembayaran berdasarkan Perjanjian Penanggungan hanya muncul apabila Klaim dibuat kepada CGIF sesuai dengan ketentuan Perjanjian Penanggungan.
e. Untuk menghindari keraguan, pada saat pembayaran CGIF, CGIF tidak menjadi pemegang Obligasi yang baru atau menggantikan posisi Pemegang Obligasi secara harfiah. Selain itu, pembayaran CGIF tidak akan mempengaruhi status Obligasi.
f. Dalam hal terjadi peristiwa gagal bayar Bunga Obligasi dan setelah dilakukannya pembayaran CGIF, maka CGIF tidak menjadi Pemegang Obligasi baru, dan hak tagihnya hanya terbatas pada jumlah Bunga Obligasi yang akan diselesaikan dengan Emiten secara terpisah dan bilateral tanpa melibatkan Wali Amanat sebagai Pihak Yang Dijamin.
g. Dalam hal terjadi gagal bayar Pokok Obligasi dan setelah dilakukannya pembayaran CGIF, maka Obligasi untuk seri yang bersangkutan akan berakhir dan hak tagih CGIF akan diselesaikan dengan Emiten secara terpisah dan bilateral tanpa melibatkan Pihak Yang Dijamin. CGIF tidak akan menjadi pemegang obligasi baru untuk seri-seri Obligasi yang tersisa.

2. Sehubungan dengan Penanggungan yang diberikan oleh CGIF, maka Wali Amanat berhak dan diberi kuasa (yang kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali dengan cara apapun) untuk:
    a. menandatangani Perjanjian Penanggungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas atas nama Pemegang Obligasi dan atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan Perjanjian Penanggungan; dan
    b. melaksanakan seluruh hak Pemegang Obligasi atas Penanggungan berdasarkan Perjanjian Penanggungan tersebut dan melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Penanggungan.

3. Kuasa-kuasa yang tersebut sub-bab Penanggungan ini merupakan bagian penting dan merupakan syarat mutlak yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, yang tanpa kuasa-kuasa tersebut Perjanjian Perwaliamanatan tidak akan dibuat dan karenanya kuasa-kuasa tersebut tidak dapat berakhir karena sebab apapun termasuk karena sebab-sebab yang diatur dalam Pasal 1813, 1814, 1815 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

4. Dalam hal terjadi pelunasan atas seluruh jumlah Pokok Obligasi baik terjadi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi maupun terjadi pelunasan lebih awal, Wali Amanat berkewajiban untuk menerbitkan surat pelepasan jaminan dan seluruh perjanjian penjaminan (jika ada) wajib dilepaskan oleh Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari kerja setelah terjadinya pelunasan Pokok Obligasi tersebut, pada tanggal pelepasan tersebut seluruh jaminan yang diberikan menjadi bebas dari segala bentuk pembebanan, dengan ketentuan, untuk menghindari keraguan, tidak ada dalam ketentuan ini yang akan memengaruhi berakhirnya Penanggungan sesuai dengan Perjanjian Penanggungan.

5. Kewajiban CGIF untuk melakukan pembayaran Klaim berdasarkan Perjanjian Penanggungan hanya muncul setelah Klaim dibuat kepada CGIF sesuai dengan Perjanjian Penanggungan, Klaim wajib berisi dasar atas pengajuan Klaim, termasuk seluruh bukti, informasi, dan dokumen yang mendukung Klaim yang relevan sebagaimana disyaratkan secara wajar yang membuktikan secara rinci terjadinya Peristiwa Gagal Bayar (sebagaimana didefinisikan pada Perjanjian Penanggungan), jumlah yang belum dibayar, dan pembayaran jumlah yang wajib dibayar dari CGIF sehubungan dengan Jumlah Yang Dijamin. Untuk menghindari keraguan, dokumen pendukung sehubungan dengan Klaim termasuk:
    (a) surat pemberitahuan dari KSEI kepada Pemegang Obligasi yang ditembuskan ke Wali Amanat perihal keterlambatan penyetoran dana yang telah jatuh tempo dan terutang pada tanggal surat pemberitahuan tersebut oleh Perseroan ke rekening yang ditunjuk oleh Agen Pembayaran.

(b) Surat Pemberitahuan dari Wali Amanat Kepada Perseroan yang berisikan pemberitahuan keterlambatan pembayaran beserta jumlah yang belum dibayar dan denda (apabila ada); dan
(c) bukti, informasi, dan dokumentasi relevan lainnya yang mendukung Klaim sebagaimana diperlukan yang secara umum dapat diterima dalam praktik pasar di Indonesia untuk membuktikan secara rinci dengan wajar terjadinya Gagal Bayar, jumlah yang belum dibayar dan pembayaran yang jatuh tempo dari CGIF sehubungan dengan Jumlah Yang Dijamin.

6. Setelah Klaim dikirim ke CGIF sesuai dengan persyaratan Perjanjian Penanggungan, semua jumlah yang diterima Wali Amanat dari CGIF berdasarkan Penanggungan akan diterapkan dalam urutan prioritas berikut:
   a. pertama, Biaya Wali Amanat;
   b. kedua, bunga Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi masih harus dibayar dan belum dibayar sampai dengan tanggal pembayaran;
   c. ketiga, jumlah pokok Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi; dan
   d. sisanya, saldo (jika ada) harus dibayarkan ke CGIF tanpa penundaan yang tidak wajar.

7. Semua biaya dan ongkos-ongkos yang timbul sehubungan dengan Penanggungan sebagaimana dimaksud dalam sub-bab Penanggungan ini termasuk tapi tidak terbatas biaya notaris, serta biaya-biaya yang diperlukan oleh Wali Amanat dalam rangka pengikatan jaminan dalam batas jumlah yang wajar dan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Perseroan dengan disertai bukti-bukti pembayaran asli yang cukup atau keterangan tertulis tentang pengeluaran tersebut, menjadi beban dan tanggung jawab Perseroan.

PENANGGUNGAN DARI CGIF

Berikut merupakan gambaran umum skema Penanggungan Obligasi dari CGIF:



1. CGIF menyetujui permohonan Perseroan dan bertindak sebagai Penanggung setelah melakukan uji tuntas yang memuaskan dan penyelesaian semua persyaratan;
2. CGIF memberikan Penanggungan kepada Para Pemegang Obligasi yang diwakili oleh Wali Amanat sebagai Pihak Yang Dijamin atas Jumlah Yang Dijamin sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penanggungan (*Guarantee Agreement*) sampai Obligasi jatuh tempo;
3. Dengan Penanggungan CGIF, Perseroan menerbitkan Obligasi dan menerima dana emisi dari Para Pemegang Obligasi;
4. Perseroan membayar imbal jasa Penanggungan kepada CGIF sehubungan dengan penanggungan yang diberikan oleh CGIF.

Kecuali didefinisikan secara lain, istilah-istilah dengan huruf kapital yang digunakan pada bagian ini mengacu kepada istilah-istilah yang telah didefinisikan dalam Perjanjian Penanggungan.

Penanggungan

Wali Amanat dan CGIF telah menandatangani Perjanjian Penanggungan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Penanggungan
   (a) Tunduk pada ketentuan Perjanjian Penanggungan, CGIF secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat menanggung untuk kepentingan Pemegang Obligasi Yang Dijamin sebagaimana diwakilkan oleh Pihak Yang Dijamin atas pembayaran penuh dan tepat waktu dari setiap Jumlah Yang Dijamin.
   (b) Dalam Perjanjian Penanggungan, Jumlah Yang Dijamin berarti:
      (i) setiap Jumlah Pokok dan Bunga Terjadwal yang jatuh tempo dan belum dibayar (baik seluruhnya atau sebagian) (setelah berakhirnya masa tenggang yang berlaku) oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;
      (ii) setiap Bunga Akrual Tambahan; dan
      (iii) setiap Biaya Pihak Yang Dijamin.

      Untuk menghindari keraguan, suatu Jumlah Yang Dijamin tidak termasuk:
      (i) setiap peningkatan biaya ganti rugi terkait pajak (termasuk jumlah tambahan yang wajib dibayarkan kepada Para Pemegang Obligasi akibat dari pemotongan pajak dan pelaksanaan Pasal 5.13 huruf d Perjanjian Perwaliamanatan dengan ketentuan bahwa Jumlah Yang Dijamin tidak akan melebihi jumlah semula yang akan telah jatuh tempo dari Emiten jika seandainya tidak ada pemotongan pajak), bunga gagal bayar, biaya, atau jumlah lain selain dari Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Terjadwal, Bunga Akrual Tambahan dan Pihak Yang Dijamin yang harus dibayarkan oleh Emiten kepada Wali Amanat atau Pihak Yang Dijamin; atau
      (ii) setiap Pokok Obligasi atau setiap Bunga Terjadwal yang harus dibayar atau dapat dibayarkan berdasarkan atau sehubungan dengan setiap Obligasi yang dibeli, dibeli kembali atau dengan cara lain dimiliki, baik secara sah atau secara manfaat, oleh setiap Entitas Terkait Emiten atau Emiten.
   (c) Terlepas dari ketentuan lain dalam Perjanjian Penanggungan atau Dokumen Obligasi apa pun lainnya, CGIF tidak akan memiliki kewajiban untuk membayar jumlah apa pun sesuai dengan Perjanjian Penanggungan di mana jumlah pokok yang relevan atau bunga yang timbul tetapi belum dibayar menjadi harus dibayarkan secara penuh berdasarkan Syarat dan Ketentuan Obligasi secara dipercepat atas dorongan Emiten, termasuk, tanpa batasan, sebagai akibat dari pelunasan sukarela Emiten atas Obligasi-Obligasi dari suatu Tahap Yang Ditanggung yang relevan (baik secara penuh atau sebagian) sebelum Tanggal Jatuh Tempo Obligasi yang berlaku.
   (d) Untuk menghindari keraguan, setiap Penanggungan diberikan sehubungan dengan setiap Tahap Yang Ditanggung berdasarkan Program Obligasi secara terpisah dan independen.
2. Jangka Waktu Setiap Penanggungan
   (a) Penanggungan sehubungan dengan suatu Tahap Yang Ditanggung akan efektif sejak tanggal pertama di mana kedua:
      (i) Tanggal Emisi Obligasi sehubungan dengan Tahap Yang Ditanggung tersebut telah terjadi; dan
      (ii) CGIF telah menerbitkan sertifikat CGIF sehubungan dengan Tahap Yang Ditanggung tersebut.

   (b) Tunduk pada Perjanjian Penanggungan sehubungan dengan suatu Tahap Yang Ditanggung akan berakhir pada yang lebih awal dari:
      (i) tanggal di mana Jumlah Yang Dijamin sehubungan dengan Tahap Yang Ditanggung tersebut telah dibayar, dilunasi, atau dibayar lebih awal secara penuh, atau kewajiban pembayaran dari Perseroan sehubungan dengan Jumlah Yang Dijamin tersebut telah sebaliknya diberhentikan atau dilepaskan sesuai dengan Dokumen Obligasi atau pengaturan lainnya antara Emiten dan Pihak Yang Dijamin;
      (ii) tanggal pelunasan penuh, *prescription* atau pembatalan Obligasi-Obligasi berdasarkan Tahap Yang Ditanggung tersebut;
      (iii) dalam hal terjadinya Peristiwa Gagal Bayar sehubungan dengan Tahap Yang Ditanggung tersebut, dan tidak ada Klaim yang dibuat dalam Periode Klaim sesuai dengan Perjanjian ini, hari terakhir dari Periode Klaim;
      (iv) tanggal di mana Pihak Yang Dijamin mengambil Percepatan Pelunasan sehubungan dengan Tahap Yang Ditanggung tersebut selain dari sehubungan dengan Peristiwa Gagal Bayar CGIF sehubungan dengan Tahap Yang Ditanggung tersebut;
      (v) tanggal di mana Obligasi-Obligasi berdasarkan Tahap Yang Ditanggung tersebut menjadi harus dibayar berdasarkan Syarat dan Ketentuan Obligasi atas dasar percepatan dengan dorongan dari Emiten sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Obligasi; dan
      (vi) tanggal efektif dari pengakhiran Penanggungan sehubungan dengan suatu Tahap Yang Ditanggung sesuai dengan Klausul 12 (Pengakhiran) pada Perjanjian Penanggungan.

(periode efektif tersebut dari Penanggungan sehubungan dengan suatu Tahap Yang Ditanggung merupakan **Jangka Waktu Penanggungan**).

(c) Penanggungan sehubungan dengan suatu Tahap Yang Ditanggung akan tetap efektif di mana Klaim telah dibuat sehubungan dengan Tahap Yang Ditanggung tersebut sesuai dengan Perjanjian ini dan pembayaran oleh CGIF belum dibuat kepada Pihak Yang Dijamin.

Pembayaran Berdasarkan Penanggungan

1. Umum
   (a) CGIF hanya bertanggung jawab untuk membayar suatu Jumlah Yang Dijamin berdasarkan Penanggungan (dan hanya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penanggungan) jika dan sejauh Pihak Yang Dijamin memberikan kepada CGIF suatu Klaim sehubungan dengan Jumlah Yang Dijamin tersebut di dalam Periode Klaim (jika ada) dan Klaim tersebut memenuhi persyaratan yang dinyatakan dalam Klausul 3 (Pembayaran Berdasarkan Penanggungan) Perjanjian Penanggungan.
   (b) Pihak Yang Dijamin dapat mengajukan Klaim setelah terjadinya Peristiwa Gagal Bayar yang berlanjut, dengan ketentuan bahwa, untuk menghindari keraguan, tidak akan ada Periode Klaim dalam hal Klaim berdasarkan Klausul 5.3 Perjanjian Penanggungan (Klaim atas Percepatan Pihak Yang Dijamin) sehubungan dengan Peristiwa Gagal Bayar CGIF. Klaim dapat dicabut dengan pemberitahuan tertulis oleh Pihak Yang Dijamin kepada CGIF kapan saja sebelum tanggal di mana Jumlah Yang Dijamin jatuh tempo untuk pembayaran sejauh uang benar-benar diterima sehubungan dengan Jumlah Yang Dijamin sebelum tanggal tersebut dari sumber selain CGIF.
   (c) Terlepas dari ketentuan lain dari Perjanjian Penanggungan, Klaim hanya dapat disampaikan untuk pembayaran Jumlah Yang Dijamin atau Jumlah Bunga Wanprestasi Penanggung. Selanjutnya, jika Peristiwa Gagal Bayar terjadi sebagai akibat dari Obligasi-Obligasi yang menjadi terutang atas dasar percepatan pelunasan:
      (i) Klaimhanya dapat dilakukan sehubungan dengan Peristiwa Non-Pembayaran sesuai dengan Klausul 5 Perjanjian Penanggungan (Percepatan Pelunasan Obligasi); dan
      (ii) tidak ada Klaim yang dapat dilakukan sehubungan dengan Peristiwa Gagal Bayar di mana jumlah pokok atau bunga yang masih harus dibayar yang relevan menjadi terutang berdasarkan Syarat dan Ketentuan Obligasi atas dasar percepatan pelunasan atas dorongan Perseroan sesuai dengan Ketentuan Obligasi, termasuk, namun tidak terbatas pada, sebagai akibat dari pelunasan sukarela Perseroanatas Obligasi-Obligasi (baik secara penuh atau sebagian) sebelum Tanggal Jatuh Tempo Obligasi yang relevan.
   (d) CGIF setuju bahwa Pihak Yang Dijamin tidak diharuskan untuk melanjutkan menentang, menegakkan hak-hak atau Jaminan lainnya (jika ada), atau mengklaim pembayaran dari siapa pun sebelum mengklaim dari CGIF berdasarkan Perjanjian ini, terlepas dari hukum atau ketentuan apa pun dari Dokumen Obligasi apa pun yang bertentangan, dengan ketentuan bahwa CGIF hanya akan diminta untuk melakukan pembayaran kepada Pihak Yang Dijamin sesuai dengan ketentuan Perjanjian Penanggungan dan Syarat dan Ketentuan Obligasi.

2. Formulir Klaim
   (a) Masing-masing Klaim harus dalam bentuk yang dinyatakan dalam Lampiran 2 (Formulir Klaim) Perjanjian Penanggungan dan harus secara jelas menyatakan:
      (i) Tahap Yang Ditanggung sehubungan dengan Klaim dan dilakukan hanya terhadap satu Tahap Yang Ditanggung saja;
      (ii) dasar Klaim termasuk rincian perhitungan Jumlah Yang Dijamin;
      (iii) Jumlah Bunga Wanprestasi Penanggung (jika ada), dan
      (iv) semua bukti, informasi dan dokumentasi yang relevan untuk mendukung Klaim sebagaimana diperlukan untuk membuktikan secara rinci terjadinya Peristiwa Gagal Bayar, jumlah yang belum dibayar dan pembayaran yang jatuh tempo dari CGIF sehubungan dengan Jumlah Yang Dijamin dan Jumlah Bunga Wanprestasi Penanggung (jika ada) yang relevan.
   (b) Tidak ada Klaim (selain Klaim berdasarkan Klausul 5.3(a) Perjanjian Penanggungan (Klaim atas Percepatan Pihak) dapat mencakup porsi Jumlah Yang Dijamin atau Jumlah Bunga Wanprestasi Penanggung yang sedang atau pernah diajukan dalam Klaim sebelumnya.
   (c) Jika Klaim tidak:
      (i) dalam bentuk yang sesuai (sebagaimana yang dinyatakan dalam Lampiran 2 (Formulir Klaim) dari Perjanjian Penanggungan);
      (ii) telah diselesaikan, ditandatangani atau disampaikan dengan benar; atau
      (iii) didukung oleh bukti yang diperlukan atau informasi atau dokumentasi lain yang dimaksud dalam ayat (a) di atas,

Klaim tersebut akan dianggap belum diterima oleh CGIF. CGIF harus, sesegera mungkin, memberitahu Pihak Yang Dijamin jika CGIF menganggap hal ini terjadi, dan memberi tahu Pihak Yang Dijamin tentang persyaratannya, sehingga Pihak Yang Dijamin dapat mempersiapkan dan mengajukan Klaim yang direvisi kepada CGIF dalam Periode Klaim.

3. Pembayaran Jumlah Yang Dijamin
   (a) Tunduk pada Klausul 2.1 (Penanggungan), 5.2 (Percepatan Pihak Yang Dijamin) dan 5.4 (Percepatan CGIF), CGIF akan, sesuai dengan Klausul 8 (Pembayaran), dalam waktu lima belas (15) Hari Kerja setelah diterimanya Klaim oleh CGIF (Hari Kerja kelima belas setelah diterimanya Klaim oleh CGIF, Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Penanggung), membayar kepada Pihak Yang Dijamin Jumlah Yang Dijamin yang merupakan subjek dari Klaim tersebut atau bagiannya yang masih belum dibayar, dengan ketentuan jika, sesuai dengan Klausul 5.4 (Percepatan CGIF), Percepatan CGIF telah terjadi sebelum Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Penanggung, semua Jumlah Yang Dijamin, yang merupakan subjek pemberitahuan terkait yang disampaikan oleh CGIF berdasarkan Klausul 5.4 (Percepatan CGIF), akan dibayarkan oleh CGIF kepada Pihak Yang Dijamin dalam Tanggal Jatuh Tempo Percepatan.
   (b) Setelah diterimanya Jumlah Yang Dijamin yang dibayarkan oleh CGIF sesuai dengan Klaim, Pihak Yang Dijamin harus segera memberi tahu Emiten dan CGIF bahwa pembayaran tersebut telah diterima.

Percepatan Pelunasan Obligasi

1. Langkah Percepatan Pelunasan
   Pihak Yang Dijamin setuju dengan, dan berjanji untuk kepentingan CGIF, bahwa Pihak Yang Dijamin tidak boleh:
   (a) mengambil langkah apa pun untuk menyatakan Obligasi akan atau menjadi segera jatuh tempo dan harus dibayar, atau dibayarkan secara dipercepat berdasarkan Dokumen Obligasi; atau
   (b) mengambil tindakan eksekusi atau tindakan serupa dengan Jaminan (jika ada) sehubungan dengan Obligasi-Obligasi,

   (masing-masing disebut **Percepatan Pelunasan**), selain yang sesuai dengan Klausul 5.2 Perjanjian Penanggungan (Percepatan Pihak Yang Dijamin).
2. Percepatan Pihak Yang Dijamin
   Pihak Yang Dijamin dapat, atas nama Pemegang Obligasi dan tunduk pada ketentuan dari Dokumen Obligasi, mengambil suatu Percepatan Pelunasan jika:
   (a) suatu Peristiwa Gagal Bayar sehubungan dengan Obligasi telah terjadi dan berlanjut dan Klaim telah dikirimkan dengan benar ke CGIF (dalam Periode Klaim) sesuai dengan Perjanjian Penanggungan sehubungan dengan Jumlah Yang Dijamin yang relevan dan tidak dibayar oleh CGIF sesuai dengan ketentuan Perjanjian Penanggungan (Peristiwa Gagal Bayar CGIF); atau
   (b) suatu Wanprestasi Obligasi (selain berdasarkan suatu Peristiwa Gagal Bayar) dan persyaratan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan untuk pelaksanaan Percepatan Pelunasan tersebut telah dipenuhi,

   dalam setiap kasus, disebut **Percepatan Pihak Yang Dijamin**.

SANKSI

Apabila Perseroan tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Perwaliamanatan khususnya Pasal 7.3 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi berupa Denda sesuai Perjanjian Perwaliamanatan. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

Apabila Perseroan dinyatakan lalai berdasarkan Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan dengan mana seluruh kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi menjadi jatuh tempo, maka Wali Amanat wajib untuk segera menyampaikan Klaim kepada CGIF dalam Periode Klaim sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penanggungan.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Kewajiban pembayaran oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi menurut Perjanjian Perwaliamanatan pada setiap waktu mempunyai kedudukan yang sama dengan kewajiban pada seluruh kreditur lainnya.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran

Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.

b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

c. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian pembayaran pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi sebesar 1% (satu persen) diatas tingkat Bunga Obligasi yang bersangkutan dari jumlah dana yang terlambat dibayar atas Jumlah Terhutang. Jumlah denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

e. Hak Suara Pemegang Obligasi diatur bahwa setiap Pokok Obligasi senilai Rp 1,00 (satu Rupiah) memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

1) Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan ongkos-ongkos lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut:
   a. melakukan dan/atau mengizinkan Entitas Anak (jika ada) melakukan penjualan, pengalihan atau dengan cara apapun melepaskan dalam satu atau beberapa transaksi yang berhubungan, seluruh atau sebagian Aset, kecuali :
      i. dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada);
      ii. penjualan, pengalihan atau pelepasan atas Aset yang sudah tua atau tidak produktif baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan satu atau lebih penjualan, pengalihan atau pelepasan; dan
      iii. dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban yang tertuang dalam suatu perjanjian dan/atau perikatan yang telah ada atau dibuat sebelum tanggal Perjanjian Perwaliamanatan.

   Adapun yang dimaksud dengan sebagian besar Aset adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total Aset per laporan keuangan terkonsolidasi Perseroan yang terakhir;
   "Aset" berarti seluruh Aset konsolidasi Perseroan berdasarkan harga perolehan Aset sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan.
   b. mengadakan segala bentuk merger atau akuisisi atau peleburan (atau mengizinkan Entitas Anak (jika ada) untuk mengadakan segala bentuk merger atau akuisisi atau peleburan), kecuali:
      (i) merger dan/atau akuisisi yang dilakukan dalam kaitannya dengan dan/atau untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan atau Entitas Anak, atau
      (ii) merger dan/atau akuisisi tersebut didanai oleh tambahan setoran modal yang dilakukan oleh pemegang saham Perseroan, dan tidak menimbulkan akibat negatif terhadap kemampuan Perseroan dalam membayar semua kewajibannya kepada Pemegang Obligasi, atau
      (iii) merger merger dan/atau akuisisi antara Perseroan dan Entitas Anak (jika ada), termasuk diantaranya rencana merger atau akuisisi antara Perseroan dengan Anak Perusahaan yaitu MNCN, di mana MNCN akan menjadi perusahaan hasil merger (surviving company) dan pengendali atas Anak Perusahaan lainnya;
   c. mengubah kegiatan usaha utama Perseroan, kecuali dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   d. mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan;
   e. memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak ketiga selain Entitas Anak (jika ada) di luar kegiatan usaha Perseroan tersebut, dimana jumlah pinjaman tersebut melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan

berdasarkan laporan keuangan konsolidasi posisi triwulan terkini, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7.3 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali pinjaman kepada karyawan Perseroan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan, dan/atau Afiliasi/ Entitas Anak (jika ada) serta PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. menjaminkan dan/atau menggadaikan baik sebagian besar maupun seluruh aktiva dan/atau pendapatan Perseroan, dan mengijinkan atau memberikan persetujuan kepada Entitas Anak untuk menjaminkan dan/atau menggadaikan baik sebagian besar maupun seluruh aktiva dan/atau pendapatan Entitas Anak yang bersangkutan, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali agunan atau jaminan yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali:
   (i) agunan atau jaminan yang telah ada sebelum tanggal Perjanjian Perwaliamanatan;
   (ii) agunan atau jaminan yang timbul sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada);
   (iii) agunan atau jaminan yang timbul sehubungan dengan penjaminan atas fasilitas pinjaman baru dalam rangka menunjang kegiatan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada);
   (iv) agunan atau jaminan yang timbul sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan posisi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (refinancing) yang dijamin dengan aktiva yang sama.

g. memberikan jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*) kepada pihak lain, kecuali (i) kepada Entitas Anak, (ii) dalam rangka yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau penunjang kegiatan usaha Perseroan atau Entitas Anak, atau (iii) kepada perusahaan Afiliasi Perseroan.

h. mengeluarkan surat utang baru atau instrumen utang lain yang sejenis dan/atau utang bank yang mempunyai tingkatan (*ranking*) lebih tinggi dari Obligasi dan pembayarannya didahulukan, dengan tetap memperhatikan ketentuan huruf f tersebut di atas.

2) Sebagaimana dimaksud dalam poin 1, persetujuan tertulis dari Wali Amanat diberikan dengan ketentuan :
   a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
   b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/ dokumen pendukung lainnya dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima oleh Wali Amanat, dan jika persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung tersebut tidak diberikan oleh Wali Amanat selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja terhitung sejak permohonan persetujuan diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, maka dengan lewatnya waktu permohonan tersebut dianggap telah disetujui oleh Wali Amanat; dan
   c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika persetujuan atau penolakan tersebut tidak diberikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja terhitung sejak seluruh dokumen diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, maka dengan lewatnya waktu permohonan tersebut dianggap telah disetujui oleh Wali Amanat.

3) Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan ongkos-ongkos lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau melakukan hal-hal sebagai berikut
   a. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian terkait lainnya sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan dimana Perseroan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut;
   b. menjaga rasio keuangan dan memelihara keadaan keuangan Perseroan berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK dan diserahkan Wali Amanat, dengan ketentuan kondisi keuangan sebagai berikut:
      i. *Net Debt to Equity Ratio*, yaitu perbandingan total Utang Bersih dengan total Modal tidak lebih dari: 4 : 1 (empat) berbanding (satu).
      ii. *Interest Service Coverage Ratio*, yaitu perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga tidak kurang dari 2 : 1 (dua) berbanding (satu).

      "Utang Bersih" adalah total pinjaman berbunga dikurangi dengan kas dan setara kas per laporan keuangan konsolidasi;

      "EBITDA" adalah laba sebelum beban pajak konsolidasi ditambah biaya bunga ditambah depresiasi dan amortisasi;

      "Modal" adalah total ekuitas per laporan keuangan konsolidasi yang berakhir;
   c. menjaga saham Perseroan dikendalikan atau Perseroan dimiliki baik secara langsung-maupun secara tidak langsung lebih dari 40% (empat puluh persen) mengacu pada laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, oleh PT MNC Asia Holding Tbk selama jangka waktu Obligasi;

d. menyetorkan jumlah uang untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang akan jatuh tempo yang harus sudah tersedia/efektif (*in good funds*) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi di rekening KSEI yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Sehubungan dengan pembayaran dana tersebut diatas, Perseroan wajib untuk menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti pengiriman uang tersebut pada hari yang sama melalui faksimili;

e. bila Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut pada waktu sebagaimana diatur dalam huruf c diatas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan dikenakan Denda.
Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proposional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran;

f. memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan;

g. menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien serta sesuai dengan praktek keuangan dan perdagangan sebagai-mana mestinya dan peraturan yang berlaku;

h. memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

i. segera memberikan kepada Wali Amanat keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain;

j. segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja sejak terjadinya hal-hal sebagai berikut:
   (i) membuat pinjaman baru (dengan bunga) baik yang dilakukan oleh Perseroan maupun Entitas Anak (jika ada) kecuali untuk kegiatan operasional perusahaan dengan memperhatikan ketentuan mengenai rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b di atas;
   (ii) setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting dan/atau buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Entitas Anak (jika ada) serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
   (iii) setiap perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan perubahan pemegang saham utama Perseroan, diikuti dengan penyerahan akta-akta/dokumen-dokumen keputusan rapat umum pemegang saham Perseroan atas perubahan tersebut, setelah akta-akta/dokumen-dokumen tersebut diterima oleh Perseroan; dan
   (iv) Perkara pidana, perdata, administrasi dan perburuhan yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

k. membayar kewajiban pajak Perseroan atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;

l. menyerahkan kepada Wali Amanat:
   (i) laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Perseroan yang terdaftar di OJK dalam waktu yang bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan tahunan Perseroan kepada OJK dan/atau Bursa Efek, dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang berlaku;
   (ii) laporan rasio keuangan Perseroan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7.3 huruf (b) beserta uraian penjelasannya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kelander sejak diterbitkanya Laporan Keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit;
   (iii) laporan-laporan keuangan internal triwulanan (unaudited) Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah periode laporan keuangan tersebut berakhir;
   (iv) laporan-laporan lain yang harus disampaikan kepada OJK dan/atau Bursa Efek dalam waktu yang bersamaan dengan disampaikannya laporan-laporan tersebut oleh Perseroan kepada OJK dan/atau Bursa Efek;
   (v) salinan resmi akta Perjanjian Perwaliamanatan dan akta-akta lainnya yang dibuat sehubungan dengan Emisi Obligasi ini;
   (vi) data-data dan keterangan-keterangan lain yang sewaktu-waktu diminta secara tertulis oleh Wali Amanat mengenai jalannya usaha, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan data-data lain sepanjang hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas Wali Amanat yang telah ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku; dan

(vii) setiap pelanggaran terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini, selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah diketahuinya pelanggaran tersebut;

(viii) Bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tahunan, surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan tentang kejadian kejadian pada masalah dan/atau keterangan yang dapat mempengaruhi kepentingan Pemegang Obligasi termasuk akan tetapi tidak terbatas pada:

1. Pernyataan mengenai tidak adanya pelanggaran terhadap pembatasan pembatasan dan kewajibankewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, atau jika ada pelanggaran, uraian mengenai bentuk pelanggaran tersebut;
2. Pernyataan bahwa Perseroan telah mentaati dan melaksanakan seluruh pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam persyaratan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan atau sesuai dengan persyaratan Obligasi.
3. Pernyataan mengenai tidak adanya kejadian yang telah dan/atau akan menyebabkan Obligasi menjadi cidera janji sehingga sanksi-sanksi berdasarkan Perjanjian Perwalianatan dan/atau perjanjian yang berhubungan dengan penerbitan menjadi berlaku dan harus dilaksanakan;
4. Pernyataan mengenai tidak adanya kejadian yang secara materiil mempengaruhi Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, atau jika ada, uraian mengenai kejadian-kejadian tersebut;
5. Pernyataan mengenai tidak adanya perubahan yang berarti dalam bidang usaha Perseroan yang tidak dilaporkan sejak penerbitan Obligasi yang pertama kali, atau jika ada, uraian mengenai kejadian-kejadian tersebut.

m. memelihara harta kekayaannya agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mngenai harta milik dan usaha yang serupa;

n. memelihara asuransi-asuransi atas harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik terhadap segala resiko yang secara material lazim dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sejenis dengan Perseroan dengan ketentuan asuransi- asuransi tersebut tersedia dengan syarat-syarat komersial yang wajar bagi Perseroan;

o. Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat mengenai perkara pidana, perdata, tata usaha negara, dan hubungan industrial yang dihadapi oleh Perseroan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap serta dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas kegiatan usaha Perseroan, termasuk dalam hal terjadinya penyitaan oleh pengadilanatau instansi yang berwenang terhadap semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

p. segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat setelah menyadari terjadinya keadaan atau kejadian sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan yang dapat menimbulkan kelalaian atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan;

q. memberi ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat dengan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya selama jam kerja Perseroan, untuk memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan pada saat jam kerja Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan dengan memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;

r. memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan dari pemerintah serta perijinan-perijinan penting dengan pihak lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dari waktu ke waktu disyaratkan oleh hukum yang berlaku;

s. menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI, untuk kepentingan Pemegang Obligasi sebagai bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Rekening dan menyampaikan fotokopi Sertifikat Jumbo Obligasi dengan tanda terima dari KSEI tersebut kepada Wali Amanat;

t. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2020, yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan, yaitu antara lain:

(i). Pemeringkatan Tahunan

i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi kepada OJK dan Wali Amanat paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

ii. Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia

yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
a. peringkat tahunan yang diperoleh; dan
b. penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.

(ii). Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
a. peringkat baru; dan
b. penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.

ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.

(iii). Pemeringkatan Obligasi Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan.
i. Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
a. periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
b. Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014.

(iv). Pemeringkatan Ulang
i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf x angka 1) butir i dan angka 2) butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK dan Wali Amanat paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.

(v). Pengumuman sebagaimana dimaksud huruf x angka 1), angka 2), dan angka 3) di atas, wajib dilakukan paling sedikit:
i. Situs Web Emiten;
ii. Situs Web Bursa Efek.

u. tetap mematuhi segala kewajiban yang disyaratkan oleh CGIF sebagai Penanggung Obligasi berdasarkan perjanjian-perjanjian yang relevan.
v. membayar secara tepat waktu biaya Penanggungan yang wajib dibayar kepada CGIF.

KELALAIAN PERSEROAN

a. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
1) Perseroan tidak membayar Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
2) Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
3) Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan (jika ada) dinyatakan lalai dan telah melewati jangka waktu perbaikan (apabila ada) sehubungan dengan suatu perjanjian utang atau kredit oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah utang melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian triwulan terakhir, yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;
4) Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium); atau

5) Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Dokumen Emisi lainnya yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Dokumen Emisi (selain Pasal 10.1 angka 1 Perjanjian Perwaliamanatan).

b. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam:
   1) Huruf a angka 1 Wali Amanat wajib untuk segera menyampaikan Klaim kepada CGIF dalam Periode Klaim sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penanggungan;
   a. Huruf a angka 5 dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
   b. Huruf a angka 2 sampai dengan huruf a angka 4 dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak surat teguran dari Wali Amanat mengenai kelalaian tersebut, tanpa adanya upaya perbaikan yang mulai dilakukan oleh Perseroan atau tanpa dihilangkannya keadaan tersebut;

   maka Wali Amanat wajib memberitahukan keadaan atau kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atas biaya Perseroan. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

   Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaian tersebut.

   Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan serta RUPO memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo sehingga dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

c. Apabila Perseroan:
   1) dibubarkan karena sebab apapun atau Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) yang diajukan oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) yang dijamin langsung oleh Perseroan yang telah memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga yang berwenang;
   2) Menyatakan secara tertulis ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (*standstill*).

   maka dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya dan Wali Amanat bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi berhak mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dengan mengajukan tagihan sebesar Jumlah Terutang kepada Perseroan. Untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakandan tuntutan oleh Pemegang Obligasi.
d. Perseroan berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Wali Amanat dan/atau membebaskan Wali Amanat dari setiap dan semua gugatan, kerugian, biaya, tanggungan dan ongkos lain apapun yang diderita oleh Wali Amanat termasuk biaya Konsultan Hukum yang disetujui oleh Perseroan sehubungan dengan kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Dokumen Emisi dan yang telah ditentukan berdasarkan suatu keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali yang diakibatkan oleh kelalaian Wali Amanat.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (*BUY BACK*)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
2. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek.
3. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
4. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
5. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO.

6. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi.
7. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar.
8. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.
9. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 8, paling sedikit memuat informasi tentang:
   a. periode penawaran pembelian kembali;
   b. jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
   c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
   d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
   e. tata cara penyelesaian transaksi;
   f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
   g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
   h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
   i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukancpenjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasian atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 9, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masingmasing jenis Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
   b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
   c. Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali.

   dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.
13. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
   a. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
   b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
   c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
   d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
14. Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;
15. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut;
16. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
   a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
   b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
   a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran

Bunga Obligasi, jaminan atau penyisihan dana pelunasan (*sinking fund*) dan dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2020.

b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibatakibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2020;
e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
   a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
   b. Perseroan;
   c. Wali Amanat; atau
   d. OJK.

3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, huruf b dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.

4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengantembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaran RUPO:
   a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
   b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalendersebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
   c. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
   d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
      - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
      - agenda RUPO;
      - pihak yang mengajukan usulan RUPO;
      - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
      - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
   e. RUPO kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.

6. Tata cara RUPO :
   a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.

b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
e. Setiap Obligasi sebesar Rp.1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
h. Pemegang Obligasi dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPO namun abstain dianggap tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
i. Sebelum pelaksanaan RUPO:
   - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
   - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
   - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
j. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
k. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
l. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
m. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakan RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 6 huruf g Perjanjian Perwaliamantan, kuorum dan pengambilan keputusan:

   a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sebagai berikut:

      1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
         (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
         (ii) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
         (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusanyang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat)bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
         (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

(v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit ⅔ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
   (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
   (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit ⅔ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
   (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
   (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit ⅔ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
   (ii) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
   (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
   (iv) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
   (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
2) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
4) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
6) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang keempat.

7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat.
8) Pengumuman, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas.

8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya pemasangan iklan untuk pengumuman dan pemanggilan-pemanggilan RUPO, biaya Notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.

9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notarial oleh Notaris.

10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusankeputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjianperjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjianperjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.

11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.

12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambatlambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.

13. Peraturanperaturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

14. Apabila ketentuanketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundangundangan di Pasar Modal tersebut yang berlaku.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi.

PERPAJAKAN

Diuraikan dalam Bab IX mengenai Perpajakan dalam Prospektus ini.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan surat Pefindo No.RC-399/PEF-DIR/III/2025 tanggal 24 Maret 2025, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:

$_{id}$AAA$_{(cg)}$
(*Triple A; Corporate Guarantee*)

Hasil Pemeringkatan ini berlaku untuk periode 21 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pefindo, baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUPM sebagaimana diubah dalam UUP2SK. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Alamat Wali Amanat
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Divisi Investment Services
Gedung BRI II Lt.6
Jl. Jend Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
Tel. (021) 575 8143
Faks. (021) 575 2360

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII dalam Prospektus ini mengenai Keterangan Mengenai Wali Amanat.

PERWALIAMANATAN

Penerbitan Obligasi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang bertindak selaku Wali Amanat.

PROSEDUR PEMESANAN

Prosedur Pemesanan Pembelian Obligasi dapat dilihat pada Bab XIII mengenai Tata Cara Pemesanan dan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam Prospektus ini.

C. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI SUKUK IJARAH

NAMA SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah yang diterbitkan ini diberi nama “Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025”.

JENIS SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan Perseroan dan didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening. Sukuk Ijarah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah.

JUMLAH SISA IMBALAN IJARAH, CICILAN IMBALAN IJARAH DAN JATUH TEMPO SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah ini diterbitkan dengan Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp550.000.000.000,- (lima ratus lima puluh miliar Rupiah). Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Sukuk Ijarah ini terdiri dari 3 (tiga) Seri, yaitu Sukuk Ijarah Seri A, Seri B, dan Seri C yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*), yaitu sebagai berikut:

Seri A:	Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A yang ditawarkan sebesar Rp434.990.000.000,- (empat ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp33.059.240.000,- (tiga puluh tiga miliar lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri B:	Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B yang ditawarkan sebesar Rp89.010.000.000,- (delapan puluh sembilan miliar sepuluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp6.987.285.000,- (enam miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C :	Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C yang ditawarkan sebesar Rp26.000.000.000,- (dua puluh enam miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp2.054.000.000,- (dua miliar lima puluh empat juta Rupiah) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 24 September 2025, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 24 Juni 2028 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 24 Juni 2030 untuk Sukuk Ijarah Seri B, dan 24 Juni 2032 untuk Sukuk Ijarah Seri C.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah pada Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah.

TATA CARA PEMBAYARAN SISA IMBALAN IJARAH DAN CICILAN IMBALAN IJARAH

Sukuk Ijarah harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah. Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah yang terhutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Sisa Imbalan Ijarah yang bersangkutan.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Cicilan Imbalan Ijarah. Dalam hal Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Cicilan Imbalan Ijarah dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan. Jumlah Cicilan Imbalan Ijarah tersebut merupakan persentase per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Cicilan Imbalan Ijarah tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Ijarah setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak Tanggal Emisi, melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah.

PEMBAYARAN CICILAN IMBALAN IJARAH

Jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah masing-masing Sukuk Ijarah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Cicilan imbalan ke-	Seri A	Seri B	Seri C
1	24 September 2025	24 September 2025	24 September 2025
2	24 Desember 2025	24 Desember 2025	24 Desember 2025
3	24 Maret 2026	24 Maret 2026	24 Maret 2026
4	24 Juni 2026	24 Juni 2026	24 Juni 2026
5	24 September 2026	24 September 2026	24 September 2026
6	24 Desember 2026	24 Desember 2026	24 Desember 2026
7	24 Maret 2027	24 Maret 2027	24 Maret 2027
8	24 Juni 2027	24 Juni 2027	24 Juni 2027
9	24 September 2027	24 September 2027	24 September 2027
10	24 Desember 2027	24 Desember 2027	24 Desember 2027
11	24 Maret 2028	24 Maret 2028	24 Maret 2028
12	24 Juni 2028	24 Juni 2028	24 Juni 2028
13		24 September 2028	24 September 2028
14		24 Desember 2028	24 Desember 2028
15		24 Maret 2029	24 Maret 2029
16		24 Juni 2029	24 Juni 2029
17		24 September 2029	24 September 2029
18		24 Desember 2029	24 Desember 2029
19		24 Maret 2030	24 Maret 2030
20		24 Juni 2030	24 Juni 2030
21			24 September 2030
22			24 Desember 2030
23			24 Maret 2031
24			24 Juni 2031
25			24 September 2031
26			24 Desember 2031
27			24 Maret 2032
28			24 Juni 2032

SUKUK IJARAH MERUPAKAN BUKTI KEWAJIBAN

Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, semua Sukuk Ijarah merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berhutang kepada Pemegang Sukuk Ijarah sejumlah Sisa Imbalan Ijarah yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah ditambah dengan Cicilan Imbalan Ijarah dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Sukuk Ijarah tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.

Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Sukuk Ijarah dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

PENDAFTARAN SUKUK IJARAH DI KSEI

Sukuk Ijarah akan diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI sebagai bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat mempunyai kewajiban pembayaran kepada pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal, dan akan ditawarkan pada nilai nominal Sukuk Ijarah 100% (seratus persen).

PENARIKAN SUKUK IJARAH

Penarikan Sukuk Ijarah dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Sukuk Ijarah ke luar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Sukuk Ijarah dalam Penitipan Kolektif KSEI atas permintaan

Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan keputusan RUPSI.

PENGALIHAN SUKUK IJARAH

Hak kepemilikan Sukuk Ijarah beralih dengan pemindahbukuan Sukuk Ijarah dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Sukuk Ijarah yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Sukuk Ijarah.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN SUKUK IJARAH

Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya. Satu satuan pemindahbukuan Sukuk Ijarah mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain) yaitu Rp 1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN SUKUK IJARAH

Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

JAMINAN

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus namun dijamin dengan penanggungan dari CGIF dengan jumlah penanggungan sebesar seluruh kewajiban pembayaran imbalan Sukuk Ijarah dan Pokok Sukuk Ijarah (tidak termasuk denda) serta pengeluaran Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Penanggungan/Akad Kafalah yang telah ditandatangani antara CGIF dan Wali Amanat.

PENANGGUNGAN

Bahwa untuk melakukan Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, atas permohonan Perseroan, CGIF telah menyetujui untuk bertindak sebagai penanggung *(guarantor)* Sukuk Ijarah, dan bersama-sama telah menandatangani Perjanjian Penanggungan pada tanggal 29 April 2025 dengan Wali Amanat berdasarkan Syarat dan Ketentuan Sukuk Ijarah dengan memperhatikan syarat-syarat dalam Perjanjian Penanggungan yaitu sebesar Jumlah Yang Dijamin.

Perseroan, MNCN, dan IPTV pada tanggal 16 Juni 2025 telah menandatangani Perjanjian Penggantian Biaya dan Ganti Rugi dengan CGIF (”**RIA**”), yang mengatur, antara lain, kewajiban Perseroan, MNCN dan IPTV masing-masing sebagai Obligor untuk mengganti nilai yang ditanggung CGIF dalam hal terjadi kegagalan pembayaran oleh Perseroan dan CGIF telah melakukan pembayaran kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Penanggungan. Berdasarkan RIA, Perseroan akan memberikan jaminan kepada CGIF berupa hak tanggungan atas tanah dan bangunan berupa gedung iNews Tower , suatu bangunan perkantoran yang berlokasi di Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 36-38, RT. 15, RW. 7, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340, yang dimiliki oleh MNCN dan berdiri diatas tanah yang disewa oleh MNCN dari PT GLD Property, serta fidusia atas mesin dan peralatan yang dimiliki oleh MNCN. Pemberian jaminan oleh Perseroan berdasarkan RIA tersebut bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.17/2020, dikarenakan nilai transaksi penanggungan tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan 31 Desember 2024 dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.42/2020, mengingat CGIF bukan merupakan pihak terafiliasi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.42/2020.

Penanggung dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUP2SK.

Kecuali didefinisikan secara lain, istilah-istilah dengan huruf kapital yang digunakan pada bagian ini mengacu kepada istilah-istilah yang telah didefinisikan dalam Perjanjian Penanggungan/Akad Kafalah Sukuk Ijarah.

Berikut ini adalah rangkuman ketentuan dari Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah:

1. Untuk menjamin kewajiban pembayaran dari Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Imbalan Ijarah, Imbalan Akrual Tambahan dan Biaya Pihak Yang Dijamin yang terutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, CGIF akan memberikan Penanggungan untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat, dengan ketentuan:
    a. Penanggungan adalah jaminan pembayaran atas kewajiban pembayaran atas Jumlah Yang Dijamin untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Wali Amanat, sebagaimana dibuktikan dengan, dan tercantum dalam Perjanjian Penanggungan.
    b. Nilai Penanggungan adalah sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Jumlah Yang Dijamin.
    c. Wali Amanat wajib menyampaikan Klaim atas suatu Peristiwa Gagal Bayar dalam periode klaim sebagai berikut: (i) untuk Imbalan Ijarah (termasuk Imbalan Ijarah yang jatuh tempo pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Sukuk Ijarah terakhir) atau Biaya Pihak Yang Dijamin, maka Klaim tersebut harus dilakukan dalam waktu sepuluh (10) Hari Kerja terhitung sejak tanggal terjadinya Peristiwa Gagal Bayar tersebut; dan (ii) untuk Jumlah Pokok Sukuk Ijarah yang jatuh tempo pada Tanggal Jatuh Tempo Sukuk Ijarah sehubungan dengan suatu Peristiwa Gagal Bayar, maka Klaim tersebut harus diajukan dalam waktu dua puluh (20) Hari Kerja terhitung sejak tanggal Peristiwa Gagal Bayar tersebut (Periode Klaim).
    d. CGIF akan, dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penanggungan, membayar kepada Wali Amanat Jumlah Yang Dijamin yang menjadi pokok dari Klaim, atau bagiannya yang masih belum dibayar, dalam waktu lima belas (15) Hari Kerja setelah diterimanya Klaim tersebut oleh CGIF.
    e. Untuk menghindari keraguan, pada saat pembayaran oleh CGIF, CGIF tidak menjadi pemegang Sukuk Ijarah yang baru atau menggantikan posisi Pemegang Sukuk Ijarah secara harfiah. Pemegang Sukuk Ijarah akan tetap terdaftar sebagai Pemegang Sukuk Ijarah dan pembayaran CGIF tidak akan mempengaruhi status Sukuk Ijarah.
    f. Dalam hal terjadi peristiwa gagal bayar Imbalan Sukuk Ijarah dan setelah dilakukannya pembayaran oleh CGIF, maka CGIF tidak menjadi Pemegang Sukuk Ijarah baru, dan hak tagihnya terbatas pada jumlah Imbalan Sukuk Ijarah yang akan diselesaikan dengan Perseroan secara terpisah dan bilateral tanpa melibatkan Wali Amanat sebagai Pihak Yang Dijamin.
    g. Dalam hal terjadi gagal bayar Sisa Imbalan Sukuk Ijarah dan setelah dilakukannya pembayaran oleh CGIF, maka Sukuk Ijarah untuk seri yang bersangkutan akan berakhir dan hak tagih CGIF akan diselesaikan dengan Perseroan secara terpisah dan bilateral tanpa melibatkan Pemegang Sukuk Ijarah. CGIF tidak akan menjadi pemegang Sukuk Ijarah baru untuk seri-seri Sukuk Ijarah yang tersisa.

2. Sehubungan dengan Penanggungan yang diberikan oleh CGIF, maka Wali Amanat Sukuk Ijarah berhak dan diberi kuasa (yang kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali dengan cara apapun) untuk:
    a. menandatangani Perjanjian Penanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.1 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atas nama Pemegang Sukuk Ijarah dan atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan Perjanjian Penanggungan; dan
    b. melaksanakan seluruh hak Pemegang Sukuk Ijarah atas Penanggungan berdasarkan Perjanjian Penanggungan tersebut dan melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan hak-hak Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Penanggungan.

3. Kuasa-kuasa yang tersebut dalam Pasal 13 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah merupakan bagian penting dan merupakan syarat mutlak yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, yang tanpa kuasa-kuasa tersebut Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah tidak akan dibuat dan karenanya kuasa-kuasa tersebut tidak dapat berakhir karena sebab apapun termasuk karena sebab-sebab yang diatur dalam Pasal 1813, 1814, 1815 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

4. Dalam hal terjadi pelunasan atas seluruh jumlah Sisa Imbalan Ijarah baik terjadi pada Tanggal Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah baik terjadi pada Tanggal Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah maupun terjadi pelunasan lebih awal, Wali Amanat untuk kepentingan CGIF berkewajiban untuk menerbitkan surat pelepasan jaminan dan seluruh perjanjian penjaminan (jika ada) wajib dilepaskan oleh Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari kerja setelah terjadinya pelunasan Cicilan Imbalan Ijarah tersebut, pada tanggal pelepasan tersebut seluruh jaminan yang diberikan menjadi bebas dari segala bentuk pembebanan, dengan ketentuan, untuk menghindari keraguan, tidak ada dalam ketentuan ini yang akan memengaruhi berakhirnya Penanggungan sesuai dengan Perjanjian Penanggungan.

5. Kewajiban CGIF untuk melakukan pembayaran Klaim berdasarkan Perjanjian Penanggungan hanya muncul setelah Klaim dibuat kepada CGIF sesuai dengan Perjanjian Penanggungan. Setiap Klaim wajib dibuat sesuai format yang ditetapkan dalam Perjanjian Penanggungan yang memuat secara jelas dasar atas pengajuan Klaim, termasuk seluruh bukti, informasi, dan dokumen yang mendukung Klaim yang relevan sebagaimana disyaratkan secara wajar yang membuktikan secara rinci terjadinya Peristiwa Gagal Bayar, rincian perhitungan jumlah yang belum dibayar dan rincian perhitungan jumlah yang wajib dibayar dari CGIF sehubungan dengan Jumlah Yang Dijamin. Untuk menghindari keragu-raguan, dokumen pendukung sehubungan dengan Klaim termasuk:
   (a) surat pemberitahuan dari KSEI kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang ditembuskan ke Wali Amanat perihal keterlambatan penyetoran dana yang telah jatuh tempo dan terutang pada tanggal surat pemberitahuan tersebut oleh Perseroan ke rekening yang ditunjuk oleh Agen Pembayaran.
   (b) Surat Pemberitahuan dari Wali Amanat Kepada Perseroan yang berisikan pemberitahuan keterlambatan pembayaran beserta jumlah yang belum dibayar dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (apabila ada); dan
   (c) bukti, informasi, dan dokumentasi relevan lainnya yang mendukung Klaim sebagaimana diperlukan sehubungan dengan Jumlah Yang Dijamin.

6. Setelah Klaim dikirim ke CGIF sesuai dengan persyaratan Perjanjian Penanggungan, semua jumlah yang diterima Wali Amanat dari CGIF berdasarkan Penanggungan akan diterapkan dalam urutan prioritas berikut:
   a. pertama, Biaya Wali Amanat;
   b. kedua, Cicilan Imbalan Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah masih harus dibayar dan belum dibayar sampai dengan Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah;
   c. ketiga, jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah; dan
   d. sisanya, saldo (jika ada) harus dibayarkan ke CGIF tanpa penundaan yang tidak wajar.

7. Semua biaya dan ongkos-ongkos yang timbul sehubungan dengan Penanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian Perwalmanatan Sukuk Ijarah termasuk tapi tidak terbatas biaya notaris, serta biaya-biaya yang diperlukan oleh Wali Amanat dalam rangka pengikatan jaminan dalam batas jumlah yang wajar dan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Perseroan dengan disertai bukti-bukti pembayaran asli yang cukup atau keterangan tertulis tentang pengeluaran tersebut, menjadi beban dan tanggung jawab Perseroan.

PENANGGUNGAN DARI CGIF

Berikut merupakan gambaran umum skema Penanggungan Sukuk Ijarah dari CGIF:



1. CGIF menyetujui permohonan Perseroan dan bertindak sebagai Penanggung setelah melakukan uji tuntas yang memuaskan dan penyelesaian semua persyaratan;

2. CGIF memberikan Penanggungan kepada Para Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat sebagai Pihak Yang Dijamin atas Jumlah Yang Dijamin sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penanggungan (*Guarantee Agreement*) sampai Sukuk Ijarah jatuh tempo;
3. Dengan Penanggungan/Kafalah CGIF, Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah dan menerima dana emisi dari Para Pemegang Sukuk Ijarah;
4. Perseroan membayar imbal jasa Kafalah (Penanggungan) kepada CGIF sehubungan dengan penanggungan/ Kafalah yang diberikan oleh CGIF.

Kecuali didefinisikan secara lain, istilah-istilah dengan huruf kapital yang digunakan pada bagian ini mengacu kepada istilah-istilah yang telah didefinisikan dalam Perjanjian Penanggungan Sukuk Ijarah.

Penanggungan

Wali Amanat dan CGIF telah menandatangani Perjanjian Penanggungan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penanggungan
   (a) Tunduk pada ketentuan Perjanjian Penanggungan, pada dan sejak Tanggal Efektif sehubungan dengan Tahap Yang Ditanggung, CGIF secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat menanggung untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah Yang Dijamin sehubungan dengan Tahap Yang Ditanggung tersebut sebagaimana diwakilkan oleh Pihak Yang Dijamin atas pembayaran penuh dan tepat waktu dari setiap Jumlah Yang Dijamin sehubungan dengan Tahap Yang Ditanggung tersebut.
   (b) Dalam Perjanjian Penanggungan, Jumlah Yang Dijamin berarti sehubungan dengan suatu Tahap Yang Ditanggung:
      (i) setiap Imbalan Ijarah Pokok dan Cicilan Terjadwal yang jatuh tempo dan belum dibayar (baik seluruhnya atau sebagian) (setelah berakhirnya masa tenggang yang berlaku) oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;
      (ii) setiap Imbalan Akrual Tambahan; dan
      (iii) setiap Biaya Pihak Yang Dijamin.

      Untuk menghindari keraguan, Jumlah Yang Dijamin tidak termasuk:
      (iv) peningkatan biaya, ganti rugi terkait pajak (tetapi mencakup jumlah tambahan yang harus dibayarkan kepada Para Pemegang Sukuk Ijarah karena pengurangan pajak dan pengoperasian Pasal 5.14 (d) dari Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dengan ketentuan bahwa Jumlah Yang Dijamin tidak akan melebihi jumlah awal yang akan telah jatuh tempo dari Perseroan apabila tidak ada pengurangan pajak yang diperlukan), Imbalan gagal bayar, kompensisai atas kerugian yang harus dibayarkan oleh Perseroan sehubungan dengan keterlambatan pembayaran Imbalan Ijarah Pokok atau Cicilan Terjadwal apa pun, biaya atau jumlah lain selain dari Imbalan Ijarah Pokok, Cicilan Terjadwal, Imbalan Akrual Tambahan dan Biaya Pihak Yang Dijamin yang harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Phak Yang Dijamin atau Pemegang Sukuk Ijarah Yang Dijamin; atau
      (v) setiap Imbalan Ijarah Pokok atau Cicilan Terjadwal yang harus dibayarkan atau dapat menjadi harus dibayarkan berdasarkan atau sehubungan dengan Sukuk Ijarah yang dibeli, dibeli kembali atau sebaliknyya dipegang, baik secara sah atau bermanfaat, oleh Afiliasi mana pun dari Perseroan atau Perseroan.
   (c) Terlepas dari ketentuan lain dalam Perjanjian Penanggungan atau Dokumen Sukuk Ijarah apa pun lainnya, CGIF tidak akan memiliki kewajiban untuk membayar jumlah apa pun sesuai dengan Perjanjian Penanggungan di mana jumlah pokok yang relevan atau imbalan yang masih harus dibayar tetapi belum dibayar menjadi harus dibayarkan secara penuh berdasarkan Syarat dan Ketentuan Sukuk Ijarah secara dipercepat atas dorongan Emiten, termasuk, tanpa batasan, sebagai akibat dari pelunasan sukarela Emiten atas Sukuk dari Suatu Tahap Yang Ditanggung yang relevan (baik secara penuh atau sebagaian) sebelum Tanggal Jatuh Tempo Sukuk yang Berlaku.
   (d) Untuk menghindari keraguan, setiap Penanggungan diberikan sehubungan dengan setiap Tahap Yang Ditanggung berdasarkan Program Sukuk secara terpisah dan independen.
2. Jangka Waktu Setiap Penanggungan
   (a) Penanggungan sehubungan dengan suatu Tahap Yang Ditanggung akan efektif sejak tanggal pertama di mana keduanya:
      (i) Tanggal Emisi sehubungan dengan Tahap Yang Ditanggung tersebut telah terjadi; dan
      (ii) CGIF telah menerbitkan sertifikat CGIF sehubungan dengan Tahap Yang Ditanggung tersebut.
   (b) Tunduk pada Perjanjian Penanggungan sehubungan dengan suatu Tahap Yang Ditanggung akan berakhir pada yang lebih awal dari:

(i) tanggal di mana Jumlah Yang Dijamin sehubungan dengan Tahap Yang Ditanggung tersebut telah dibayar, dilunasi, atau dibayar lebih awal secara penuh, atau kewajiban pembayaran dari Perseroan sehubungan dengan Jumlah Yang Dijamin tersebut telah sebaliknya diberhentikan atau dilepaskan sesuai dengan Dokumen Obligasi atau pengaturan lainnya antara Emiten dan Pihak Yang Dijamin;

(ii) tanggal pelunasan penuh, *prescription* atau pembatalan Obligasi-Obligasi berdasarkan Tahap Yang Ditanggung tersebut;

(iii) dalam hal terjadinya Peristiwa Gagal Bayar sehubungan dengan Tahap Yang Ditanggung tersebut, dan tidak ada Klaim yang dibuat dalam Periode Klaim sesuai dengan Perjanjian ini, hari terakhir dari Periode Klaim;

(iv) tanggal di mana Pihak Yang Dijamin mengambil Percepatan Pelunasan sehubungan dengan Tahap Yang Ditanggung tersebut selain dari sehubungan dengan Peristiwa Gagal Bayar CGIF sehubungan dengan Tahap Yang Ditanggung tersebut;

(v) tanggal di mana Obligasi-Obligasi berdasarkan Tahap Yang Ditanggung tersebut menjadi harus dibayar berdasarkan Syarat dan Ketentuan Obligasi atas dasar percepatan dengan dorongan dari Emiten sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Obligasi; dan

(vi) tanggal efektif dari pengakhiran Penanggungan sehubungan dengan suatu Tahap Yang Ditanggung sesuai dengan Klausul 12 (Pengakhiran) pada Perjanjian Penanggungan.

(periode efektif tersebut dari Penanggungan sehubungan dengan suatu Tahap Yang Ditanggung merupakan **Jangka Waktu Penanggungan**).

(c) Penanggungan sehubungan dengan suatu Tahap Yang Ditanggung akan tetap efektif di mana Klaim telah dibuat sehubungan dengan Tahap Yang Ditanggung tersebut sesuai dengan Perjanjian ini dan pembayaran oleh CGIF belum dibuat kepada Pihak Yang Dijamin.

Pembayaran Berdasarkan Setiap Penanggungan

1. Umum

(a) CGIF hanya bertanggung jawab untuk membayar Jumlah Yang Dijamin berdasarkan Penanggungan sehubungan dengan suatu Tahap Yang Ditanggung (dan hanya sesuai dengan ketentuan dan tunduk pada persyaratan Perjanjian Penanggungan) jika dan sejauh Pihak Yang Dijamin memberikan kepada CGIF suatu Klaim sehubungan dengan Jumlah Yang Dijamin tersebut dalam Periode Klaim (jika ada) dan Klaim tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Klausul 3 Perjanjian Penanggungan.

(b) Pihak Yang Dijamin dapat mengajukan Klaim untuk pembayaran suatu Jumlah Yang Dijamin sehubungan dengan suatu Tahap Yang Ditanggung dalam Periode Klaim setelah terjadinya Peristiwa Gagal Bayar sehubungan dengan Tahap Yang Ditanggung tersebut yang berlanjut, dengan ketentuan bahwa, untuk menghindari keraguan, tidak akan ada Periode Klaim dalam hal Klaim berdasarkan Klausul 5.3 Perjanjian Penanggungan (Klaim atas Percepatan Pihak) sehubungan dengan Peristiwa Gagal Bayar CGIF. Klaim dapat dicabut dengan pemberitahuan tertulis oleh Pihak Yang Dijamin kepada CGIF kapan saja sebelum tanggal di mana Jumlah Yang Dijamin jatuh tempo untuk pembayaran sejauh uang benar-benar diterima sehubungan dengan Jumlah Yang Dijamin sebelum tanggal tersebut dari sumber selain CGIF.

(c) Tanpa mengesampingkan ketentuan lain dari Perjanjian Penanggungan, Klaim hanya dapat disampaikan untuk pembayaran Jumlah Yang Dijamin atau Jumlah Kompensasi Kerugian Penanggung. Selanjutnya, jika Peristiwa Gagal Bayar terjadi sebagai akibat dari Sukuk berdasarkan suatu Tahap Yang Ditanggung menjadi terutang atas dasar percepatan pelunasan:

(i) Klaim hanya dapat dilakukan sehubungan dengan Peristiwa Gagal Bayar sesuai dengan Klausul 5 Perjanjian Penanggungan (Percepatan Pelunasan Sukuk Ijarah); dan

(ii) tidak ada Klaim yang dapat dilakukan sehubungan dengan Peristiwa Gagal Bayar di mana jumlah pokok atau Imbalan yang masih harus dibayar yang relevan menjadi terutang berdasarkan Syarat dan Ketentuan Sukuk Ijarah atas dasar percepatan pelunasan atas dorongan Perseroan sesuai dengan Ketentuan Sukuk Ijarah, termasuk, namun tidak terbatas pada, sebagai akibat dari pelunasan sukarela Perseroan atas Sukuk Ijarah - Sukuk Ijarah (baik secara penuh atau sebagian) sebelum Tanggal Jatuh Tempo Sukuk Ijarah yang relevan.

(d) CGIF setuju bahwa Pihak Yang Dijamin tidak diharuskan untuk melanjutkan menentang, menegakkan hak-hak atau Jaminan lainnya (jika ada), atau mengklaim pembayaran dari siapa pun sebelum mengklaim dari CGIF berdasarkan Perjanjian Penanggungan, terlepas dari hukum atau ketentuan apa pun dari Dokumen Sukuk apa pun yang bertentangan, dengan ketentuan bahwa CGIF hanya akan diminta untuk melakukan pembayaran kepada Pihak Yang Dijamin sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini dan Syarat dan Ketentuan Sukuk Ijarah.

2. Formulir Klaim

(a) Setiap Klaim harus dalam bentuk yang dinyatakan dalam Lampiran 2 (Formulir Klaim) Perjanjian Penanggungan dan harus secara jelas menyatakan:
   (i) Tahap Yang Ditanggung sehubungan dengan Klaim dan dilakukan hanya terhadap satu Tahap Yang Ditanggung saja
   (ii) dasar Klaim termasuk rincian perhitungan Jumlah Yang Dijamin;
   (iii) Jumlah Kompensasi Kerugian Penanggung (jika ada), dan
   (iv) semua bukti, informasi dan dokumentasi yang relevan untuk mendukung Klaim sebagaimana diperlukan secara wajar untuk membuktikan secara rinci terjadinya Peristiwa Gagal Bayar, jumlah yang belum dibayar dan pembayaran yang jatuh tempo dari CGIF sehubungan dengan Jumlah Yang Dijamin dan Jumlah Kompensisai Kerugian Penanggung (jika ada) yang relevan.

(b) Tidak ada Klaim (selain Klaim berdasarkan Klausul 5.3(a) (Klaim atas Percepatan Pihak) Perjanjian Penanggungan yang dapat mencakup porsi Jumlah Yang Dijamin atau Jumlah Kompensasi Kerugian Penanggung yang sedang atau pernah diajukan dalam Klaim sebelumnya.

(c) Jika Klaim tidak:
   (i) dalam bentuk yang sesuai (sebagaimana yang dinyatakan dalam Lampiran 2 (Formulir Klaim) Perjanjian Penanggungan;
   (ii) terlihat diselesaikan, ditandatangani atau disampaikan dengan benar; atau
   (iii) didukung oleh bukti yang diperlukan atau informasi atau dokumentasi lain yang dimaksud dalam paragraf (a) di atas,

   Klaim tersebut akan dianggap tidak diterima oleh CGIF. CGIF harus, sesegera mungkin, memberitahu Pihak Yang Dijamin jika CGIF menganggap hal ini terjadi, dan memberi tahu Pihak Yang Dijamin tentang persyaratannya, sehingga Pihak Yang Dijamin dapat mempersiapkan dan mengajukan Klaim yang direvisi kepada CGIF dalam Periode Klaim.

3. Pembayaran Jumlah Yang Dijamin
   (a) Tunduk pada Klausul 2.1 (Penanggungan), 5.2 (Percepatan Pihak Yang Dijamin) dan 5.4 (Percepatan CGIF), CGIF akan, sesuai dengan Klausul 8 (Pembayaran), dalam waktu lima belas (15) Hari Kerja setelah diterimanya Klaim oleh CGIF (Hari Kerja kelima belas setelah diterimanya Klaim oleh CGIF, Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Penanggung), membayar kepada Pihak Yang Dijamin Jumlah Yang Dijamin yang merupakan subjek dari Klaim tersebut atau bagiannya yang masih belum dibayar, dengan ketentuan jika, sesuai dengan Klausul 5.4 (Percepatan CGIF), Percepatan CGIF telah terjadi sebelum Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Penanggung, semua Jumlah Yang Dijamin, yang merupakan subjek pemberitahuan terkait yang disampaikan oleh CGIF berdasarkan Klausul 5.4 (Percepatan CGIF), akan dibayarkan oleh CGIF kepada Pihak Yang Dijamin dalam Tanggal Jatuh Tempo Percepatan.
   (b) Setelah menerima Jumlah Yang Dijamin yang dibayarkan oleh CGIF sesuai dengan Klaim, Pihak Yang Dijamin harus segera memberi tahu Perseroan dan CGIF bahwa pembayaran tersebut telah diterima.

Percepatan Pelunasan Sukuk Ijarah

1. Percepatan Pelunasan

   Pihak Yang Dijamin setuju dengan, dan berjanji untuk kepentingan CGIF, bahwa Pihak Yang Dijamin tidak akan:
   (a) mengambil langkah apa pun untuk menyatakan Sukuk Ijarah dari Tahap(-Tahap) Yang Ditanggung akan atau menjadi segera jatuh tempo dan harus dibayar, atau dibayarkan secara dipercepat berdasarkan Dokumen Sukuk Ijarah; atau
   (b) mengambil tindakan eksekusi atau tindakan serupa sehubungan dengan Jaminan (jika ada) sehubungan dengan Sukuk Ijarah,

   (masing-masing disebut **Percepatan Pelunasan**), selain yang sesuai dengan Klausul 5.2 Perjanjian Penanggungan (Percepatan Pihak Yang Dijamin).
2. Percepatan Pihak Yang Dijamin

   Pihak Yang Dijamin dapat, atas nama Pemegang Sukuk Ijarah dan tunduk pada ketentuan dari Dokumen Sukuk Ijarah, mengambil Percepatan Pelunasan sehubungan dengan Tahap Yang Ditanggung jika:
   (a) suatu Peristiwa Gagal Bayar sehubungan dengan Tahap Yang Ditanggung telah terjadi dan berlanjut dan Klaim telah dikirimkan dengan benar ke CGIF (dalam Periode Klaim) sesuai dengan Perjanjian Penanggungan sehubungan dengan Jumlah Yang Dijamin yang relevan dan tidak dibayar oleh CGIF sesuai dengan ketentuan Perjanjian Penanggungan (Peristiwa Gagal Bayar CGIF); atau
   (b) suatu Wanprestasi Sukuk Ijarah terjadi berdasarkan Tahap(-Tahap) Yang Ditanggung tersebut (selain berdasrkan Peristiwa Gagal Bayar) dan persyaratan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan untuk Tahap Yang Ditanggung tersebut untuk pelaksanaan Percepatan Pelunasan oleh Pihak Yang Dijamin telah dipenuhi,

   dalam setiap kasus, disebut **Percepatan Pihak Yang Dijamin**.

OBJEK IJARAH

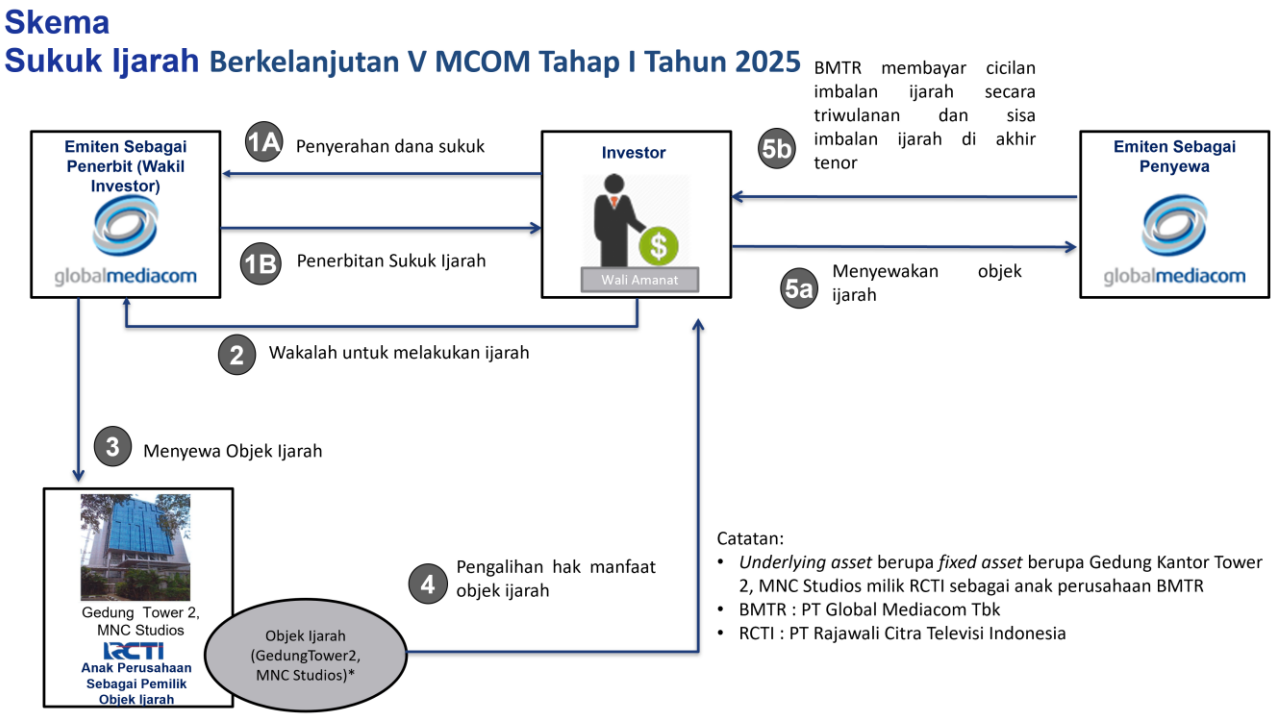
Dalam Penawaran Umum Sukuk Ijarah, yang menjadi Objek Ijarah adalah berupa hak manfaat atas 4 lantai Gedung Tower 2, MNC Studios dengan rincian sebagai berikut:

Nama Objek Ijarah	:	Lantai B2, 2, 3, dan 4 Gedung Tower 2, MNC Studios
Pemilik Objek Ijarah	:	PT Rajawali Citra Televisi Indonesia
Alamat Objek Ijarah	:	Gedung Tower 2, MNC Studios, Jalan Raya Perjuangan No. 1, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta 11530
Luas Tanah	:	95,672 m2 (SHGB No. 2393, 3058, 3060, 3061, 3062, 3067, 3068, 3069. 3070 dan SHGB NIB No. 14340, 14350, 14360)
Luas Bangungan	:	4 (empat) lantai (Lantai B2, 2, 3 dan 4)

Perseroan menyatakan bahwa aset yang menjadi dasar sukuk ijarah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal serta menjamin bahwa selama periode sukuk ijarah aset yang mendasari penerbitan sukuk ijarah tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 dan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2015.

SKEMA SUKUK IJARAH

Berikut diagram skema atas Sukuk Ijarah:



Penjelasan Skema:

1. A. Investor selaku Pemegang Sukuk Ijarah menyerahkan dana Sukuk Ijarah sebesar Rp550.000.000.000,- (lima ratus lima puluh miliar Rupiah) kepada Perseroan atas Sukuk Ijarah yang ditawarkan Perseroan dan;
   B. Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah sejumlah nilai tersebut yang didasarkan pada Obyek Ijarah (yang tertuang dalam Perjanjian Perwaliamanatan).

2. Sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah yang dilangsungkan antara Perseroan dan Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dibuat Akad Wakalah, yaitu akad antara Investor atau Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat, selaku Muwakkil (pemberi kuasa) dan Perseroan selaku Wakil, dimana Muwakkil memberikan kuasa khusus tanpa syarat yang tidak dapat ditarik kembali kepada Perseroan sebagai Wakil untuk melakukan sewa menyewa (ijarah) atas objek berupa sebagian gedung Tower 2, MNC

Studios, yang terletak di Jl. Raya Perjuangan No.1, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, 11530, SHGB No. 2393, 3058, 3060, 3061, 3062, 3067, 3068, 3069, 3070, dan SHGB NIB no. 14340, 14350, 14360 (Objek Ijarah).

3. Berdasarkan akad wakalah di atas, Perseroan selaku penerima kuasa dari Wali Amanat melakukan Akad Ijarah dengan PT Rajawali Citra Televisi Indonesia ("RCTI") untuk menyewa Objek Ijarah dari RCTI (sebagai anak perusahaan selaku pemilik Objek Ijarah berupa gedung perkantoran) dengan nilai sewa Objek Ijarah sebesar Rp550.000.000.000,- (lima ratus lima puluh miliar Rupiah). Dalam hal ini Perseroan sebagai Penyewa (lessee/musta'jir), dan RCTI sebagai pemberi sewa (lessor/mu'jir)*;*

4. Atas penyewaan Objek Ijarah tersebut, Perseroan mengalihkan hak manfaat Objek Ijarah kepada Wali Amanat, dan Wali Amanat menerima hak manfaat Objek Ijarah dari RCTI, sehingga hak manfaat Objek Ijarah dimiliki Investor.

5. Selanjutnya, 5A. disepakati pembuatan Akad Ijarah antara Wali Amanat dan Perseroan, dan ditandatangani tanggal 26 Maret 2025, dimana Wali Amanat setuju untuk menyewakan atau mengalihkan hak manfaat serta memberikan hak untuk menggunakan Objek Ijarah tersebut kepada Perseroan. Investor yang diwakili Wali Amanat bertindak sebagai mu'jir (pemberi sewa) menyewakan Objek Ijarah tersebut kepada Perseroan sebagai musta'jir (penyewa). 5B. Atas Objek Ijarah yang disewa tersebut Perseroan memberikan pembayaran sewa kepada investor berupa Cicilan Imbalan Ijarah secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta Sisa Imbalan Ijarah pada saat jatuh tempo sukuk.

   Setelah jatuh tempo dan setelah pelunasan sisa *fee* ijarah, maka investor yang diwakili oleh wali amanat mengalihkan kembali hak manfaat beserta objek ijarah (*mahall al-manfaah)* kepada Perseroan.

Dalam hal terjadi peristiwa di luar kekuasaan manusia (*force majeure*) termasuk kejadian, baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya, seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, huru hara, angin topan, benturan dengan benda angkasa lain, badai matahari, kerusakan mekanik, dan elektronik pada Obyek Ijarah dan lain-lain yang mengakibatkan kerusakan atau tidak dapat digunakannya Obyek Ijarah, hal mana dapat mengakibatkan kerugian bagi Pemegang Sukuk atas turunnya nilai Obyek Ijarah menjadi kurang dari nilai pengalihan Obyek Ijarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.1 dari Akad Ijarah selama jangka waktu Sukuk Ijarah, maka Para Pihak sepakat untuk melakukan dan melaksanakan penggantian Obyek Ijarah sesuai dengan prinsip syariah dan tata caranya sebagaimana diatur dalam Akad Ijarah antara RCTI dan Perseroan (manfaat pengganti atas hak manfaat atas Obyek Ijarah tersebut selanjutnya disebut "Obyek Ijarah Pengganti").

Pemberitahuan atas peristiwa *force majeure* wajib dilakukan secara tertulis oleh Perseroan yang mengalaminya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *force majeure* disertai dengan bukti-bukti yang sah. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka Wali Amanat akan menganggap hal tersebut tidak pernah terjadi.

Penyediaan dan pemberian Obyek Ijarah Pengganti memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah ("RUPSI") dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Akad Ijarah.

Nilai Obyek Ijarah Pengganti dan/atau Nilai Obyek Ijarah Perubahan dan/atau Nilai Obyek Ijarah Tambahan yang ditetapkan harus sama dengan jumlah nilai Obyek Ijarah yang telah diserahkan sebelumnya atau untuk nilai Obyek Ijarah Tambahan yang ditetapkan harus sama dengan nilai penurunan Obyek Ijarah. Obyek Ijarah Pengganti dan/atau Obyek Ijarah Perubahan dan/atau Obyek Ijarah Tambahan harus sesuai dengan prinsip syariah, sehingga nilai Obyek Ijarah akan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.1 Akad Ijarah.

Berdasarkan Pernyataan Kesesuaian Syariah yang dikeluarkan tanggal 25 Maret 2025 oleh Tim Ahli Syariah Penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025, menyatakan bahwa Tim Ahli Syariah telah menetapkan bahwa perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan prinsip syariah sesuai fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

PROSEDUR PENGGANTIAN ATAU PENAMBAHAN OBJEK IJARAH

Dalam hal terdapat rencana Penggantian Obyek Ijarah karena alasan apapun, maka Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum mengajukan Obyek Ijarah pengganti dan meminta Wali Amanat untuk menyelenggarakan RUPSI sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Dalam hal terdapat rencana penambahan Objek Ijarah karena adanya penurunan nilai dari Objek Ijarah (selanjutnya disebut sebagai "Objek Ijarah Tambahan"), maka Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum mengajukan Obyek Ijarah Tambahan.

Nilai Objek Ijarah Pengganti dan/atau Nilai Objek Ijarah Perubahan dan/atau Nilai Objek Ijarah Tambahan yang ditetapkan harus sama dengan jumlah nilai Objek Ijarah yang telah diserahkan sebelumnya atau untuk nilai Objek Ijarah Tambahan yang ditetapkan harus sama dengan nilai penurunan Objek Ijarah dan harus sesuai dengan prinsip syariah, sehingga nilai Objek Ijarah akan kembali sebagaimana dimaksud di atas.

Setelah RUPSI menyetujui penetapan Objek Ijarah Pengganti dan/atau Nilai Objek Ijarah Perubahan dan/atau Objek Ijarah Tambahan, dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja, Para Pihak wajib menandatangani revisi Lampiran I Akad Ijarah yang menjelaskan tentang spesifikasi Objek Ijarah Pengganti.

Paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah diperolehnya persetujuan dari Wali Amanat, Para Pihak wajib menandatangani perubahan Akad Ijarah.

Obyek Ijarah Pengganti dan/atau Nilai Objek Ijarah Perubahan dan/atau Nilai Objek Ijarah Tambahan akan berlaku efektif setelah ditandatanganinya penetapan Objek Ijarah Pengganti atau Objek Ijarah Tambahan atau Objek Ijarah perubahan sebagaimana dimaksud di atas.

PERUBAHAN STATUS DAN SYARAT KETENTUAN DALAM HAL PERSEROAN AKAN MENGUBAH JENIS AKAD SYARIAH SUKUK IJARAH

Perubahan Status Sukuk Ijarah:

1. Sukuk Ijarah tidak lagi menjadi Efek Syariah jika terjadi kondisi sebagai berikut:
   a) tidak lagi memiliki aset yang menjadi dasar Sukuk; dan/atau-
   b) terjadi perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk, yang menyebabkan --- bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
2. Pihak yang menentukan/menilai bahwa Sukuk Ijarah tidak lagi menjadi Efek Syariah adalah Tim Ahli Syariah, dengan demikian pada tanggal dibuatnya pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang menyatakan bahwa terjadi Perubahan Status Sukuk Ijarah tidak lagi menjadi Efek Syariah maka pada tanggal pernyataan tersebut dikeluarkan terjadilah perubahan status Sukuk Ijarah (selanjutnya disebut Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah). Dalam hal terjadi kejadian demikian, maka Tim Ahli Syariah berkewajiban menyampaikan Surat Pernyataan Kesesuaian Syariah atas perubahan status tersebut kepada Wali Amanat selambat lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah.
3. Dalam hal terjadi kondisi perubahan status tersebut di atas, pada Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah, maka Sukuk Ijarah berubah menjadi utang piutang. Dalam hal terjadi perubahan kondisi ini maka Perseroan seketika pada tanggal tersebut wajib untuk menyelesaikan dan membayar seluruh Jumlah Kewajiban atas Sukuk Ijarah senilai Pendapatan Bagi Hasil yang telah jelas perhitungannya menjadi hak Pemegang Sukuk dan Dana Sukuk Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah tanpa melalui RUPSU, dan pada setiap hari keterlambatan pembayaran, Perseroan berkewajiban membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan sampai dengan dipenuhinya kewajiban tersebut. Dalam kondisi tersebut, Pemegang Sukuk Ijarah tidak berhak lagi untuk mengajukan Klaim kepada CGIF dan CGIF tidak lagi memiliki kewajian pembayaran berdasarkan Perjanjian Penanggungan/Akad Kafalah
4. Kewajiban Wali Amanat tetap mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sampai dengan seluruh haknya Pemegang Sukuk Ijarah dipenuhi Perseroan, termasuk jika Sukuk Ijarah berubah menjadi utang piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.

Syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Ijarah adalah:

1. Perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSI;

2. Mekanisme pemenuhan hak Pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud adalah pelunasan Sukuk Ijarah;
3. Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah sebelum dilaksanakannya RUPSI.

SUMBER DANA

Sumber Dana pembayaran dan/atau pelunasan Imbalan Ijarah berasal dari dana yang diperoleh dari kegiatan usaha Perseroan dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.

SANKSI

Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pelunasan Sisa Imbalan Ijarah setelah lewat Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal pelunasan Sisa Imbalan Ijarah, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah atas Imbalan Ijarah. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.

Apabila Perseroan dinyatakan lalai berdasarkan Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan dengan mana seluruh kewajiban Perseroan berdasarkan Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo, maka Wali Amanat Sukuk wajib menyampaikan Klaim atas suatu Peristiwa Gagal Bayar (sebagaimana didefinisikan pada Perjanjian Penanggungan), dalam periode permintaan sebagai berikut:

(i) Untuk Imbalan Ijarah (termasuk Imbalan Ijarah yang jatuh tempo pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir) atau Biaya Pihak Yang Dijamin, maka Klaim tersebut harus dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal terjadinya Peristiwa Gagal Bayar tersebut; dan

(ii) Untuk Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang jatuh tempo pada tanggal jatuh tempo Sukuk Ijarah, maka Klaim tersebut wajib diajukan dalam waktu 20 (dua puluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal Peristiwa Gagal Bayar tersebut ("**Periode Klaim**").

HAK SENIORITAS ATAS KEWAJIBAN

Kewajiban pembayaran oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah menurut Perjanjian Perwaliamanatan pada setiap waktu mempunyai kedudukan yang sama dengan kewajiban pada seluruh kreditur lainnya.

HAK-HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH

a. Menerima pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan. Sisa Imbalan Ijarah harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah.
b. Yang berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanyá tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pembeli Sukuk Ijarah yang menerima pengalihan Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
c. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah berhak untuk menerima pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas setiap kelalaian pembayaran pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang besarnya sesuai dengan biaya kerugian riil yang batasan maksimalnya akan ditentukan kemudian dalam Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
d. Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Sukuk Ijarah yang belum dilunasi tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSI dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah

yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

e. Hak Suara Pemegang Sukuk Ijarah diatur bahwa setiap Sisa Imbalan Ijarah senilai Rp1,00 (satu Rupiah) memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

1) Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Ijarah dan sebelum dilunasinya semua Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah dan ongkos-ongkos lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Sukuk Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut:
   a. melakukan dan/atau mengizinkan Entitas Anak (jika ada) melakukan penjualan, pengalihan atau dengan cara apapun melepaskan dalam satu atau beberapa transaksi yang berhubungan, seluruh atau sebagian Aset, kecuali :
      i. dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada);
      ii. penjualan, pengalihan atau pelepasan atas Aset yang sudah tua atau tidak produktif baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan satu atau lebih penjualan, pengalihan atau pelepasan; dan
      iii. dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban yang tertuang dalam suatu perjanjian dan/atau perikatan yang telah ada atau dibuat sebelum tanggal Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah ini.

      Adapun yang dimaksud dengan sebagian besar Aset adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total Aset per laporan keuangan terkonsolidasi Perseroan yang terakhir;
      "Aset" berarti seluruh Aset konsolidasi Perseroan berdasarkan harga perolehan Aset sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan.
   b. mengadakan segala bentuk merger atau akuisisi atau peleburan (atau mengizinkan Entitas Anak (jika ada) untuk mengadakan segala bentuk merger atau akuisisi atau peleburan), kecuali:
      i. merger dan/atau akuisisi yang dilakukan dalam kaitannya dengan dan/atau untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan atau Entitas Anak, atau
      ii. merger dan/atau akuisisi tersebut didanai oleh tambahan setoran modal yang dilakukan oleh pemegang saham Perseroan, dan tidak menimbulkan akibat negatif terhadap kemampuan Perseroan dalam membayar semua kewajibannya kepada Pemegang Sukuk Ijarah, atau
      iii. merger atau akuisisi antara Perseroan dan Entitas Anak (jika ada, termasuk diantaranya rencana merger atau akuisisi antara Perseroa dengan Entitas Anak yaitu MNCN, di mana MNCN akan menjadi perusahaan hasil merger (surviving company) dan pengendali atas Entitas Anak lainnya;
   c. mengubah kegiatan usaha utama Perseroan, kecuali dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   d. mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan;
   e. memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak ketiga selain Entitas Anak (jika ada) di luar kegiatan usaha Perseroan tersebut melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi posisi triwulan terkini, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7.3 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali pinjaman kepada karyawan Perseroan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan, dan/atau Afiliasi/Entitas Anak (jika ada) serta PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   f. menjaminkan dan/atau menggadaikan baik sebagian besar maupun seluruh aktiva dan/atau pendapatan Perseroan, dan mengijinkan atau memberikan persetujuan kepada entitas anak untuk menjaminkan dan/atau menggadaikan baik sebagian besar maupun seluruh aktiva dan/atau pendapatan entitas anak yang bersangkutan, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali:
      i. agunan atau jaminan yang telah ada sebelum tanggal Perjanjian Perwaliamanatan;
      ii. agunan atau jaminan yang timbul sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada);
      iii. agunan atau jaminan yang timbul sehubungan dengan penjaminan atas fasilitas pinjaman baru dalam rangka menunjang kegiatan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada);
      iv. agunan atau jaminan yang timbul sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan posisi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) yang dijamin dengan aktiva yang sama.
   g. memberikan jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*) kepada pihak lain, kecuali kepada:
      i. Entitas Anak
      ii. dalam rangka kegiatan usaha atau penunjang kegiatan usaha Perseroan atau Entitas Anak, atau
      iii. kepada perusahaan Afiliasi Perseroan.

h. mengeluarkan surat utang baru atau instrumen utang lain yang sejenis dan/atau utang bank yang mempunyai tingkatan (*ranking*) lebih tinggi dari Sukuk Ijarah dan pembayarannya didahulukan, dengan tetap memperhatikan ketentuan huruf f tersebut diatas.

2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud diatas dari Wali Amanat diberikan dengan ketentuan:

a. permohonan persetujuan tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;

b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung tersebut tidak diberikan oleh Wali Amanat Sukuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja terhitung sejak permohonan persetujuan diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, maka dengan lewatnya waktu permohonan tersebut dianggap telah disetujui oleh Wali Amanat; dan

c. jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika persetujuan atau penolakan tersebut tidak diberikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja terhitung sejak seluruh dokumen diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, maka dengan lewatnya waktu permohonan tersebut dianggap telah disetujui oleh Wali Amanat.

3) Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Ijarah dan sebelum dilunasinya semua Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah dan ongkos-ongkos lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Sukuk Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan perjanjian terkait lainnya sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dimana Perseroan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut;

b. menjaga rasio keuangan dan memelihara keadaan keuangan Perseroan berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK dan diserahkan kepada Wali Amanat, dengan ketentuan kondisi keuangan sebagai berikut:
   - *Net Debt to Equity Ratio*, yaitu perbandingan total Kewajiban Keuangan Bersih dengan total Modal tidak lebih dari 4 : 1 (empat) berbanding (satu).
   - *Coverage Ratio*, yaitu perbandingan antara EBITDA dengan beban Cicilan Imbalan Ijarah tidak kurang dari 2 : 1 (dua) berbanding (satu).

   "Kewajiban Keuangan Bersih" adalah total pinjaman berbunga dikurangi kas dan setara kas per laporan keuangan konsolidasi;

   "EBITDA" adalah laba sebelum beban pajak konsolidasi ditambah biaya bunga ditambah depresiasi dan amortisasi;

   "Modal" adalah total ekuitas per laporan keuangan konsolidasi yang berakhir;

c. menjaga saham Perseroan dikendalikan atau Perseroan dimiliki baik secara langsung-maupun secara tidak langsung lebih dari 40% (empat puluh persen) mengacu pada laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, oleh PT MNC Asia Holding Tbk selama jangka waktu Sukuk Ijarah;

d. memastikan bahwa Perseroan tetap mematuhi segala kewajiban yang disyaratkan oleh CGIF sebagai Penanggung Sukuk Ijarah berdasarkan perjanjian-perjanjian yang relevan;

e. (i) selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif, Perseroan wajib membuka Rekeing Penampungan;

   (ii) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Emisi, Perseroan wajib menyetorkan sejumlah uang ke dalam Rekening Penampungan yang jumlahnya setara dengan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) yang haru dibayar apabila Perseroan terlambat melakukan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Sisa Imbalan Ijarah selama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender;

   (iii) Dalam hal dana yang tertampung dalam Rekening Penampungan tidak mencukupi pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang harus dibayar Perseroan, Perseroan wajib segera menyetorkan kekurangan dana tersebut ke dalam Rekening Penampungan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak Perseroan menerima permintaan penyetoran dana tambahan dari Wali Amanat.

f. memastikan bahwa Perseroan tetap mematuhi segala kewajiban yang disyaratkan oleh CGIF sebagai Penanggung Sukuk Ijarah berdasarkan perjanjian-perjanjian yang relevan.

g. menyetorkan jumlah uang untuk pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dana/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang akan jatuh tempo yang harus sudah tersedia/efektif (*in good funds*) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah di rekening yang ditunjuk oleh KSEI yang khusus dibuka untuk keperluan tersebut berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Sehubungan dengan pembayaran dana tersebut diatas, Perseroan wajib untuk menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti pengiriman uang tersebut pada hari yang sama melalui faksimile;

h. bila Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut pada waktu sebagaimana diatur dalam huruf f diatas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan dikenakan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proposional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran;
i. menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien serta sesuai dengan praktek keuangan dan perdagangan sebagai-mana mestinya dan peraturan yang berlaku;
j. memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
k. segera memberikan kepada Wali Amanat keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain;
l. segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja sejak terjadinya hal-hal sebagai berikut:
    (i) membuat pinjaman baru (dengan bunga) baik yang dilakukan oleh Perseroan maupun Entitas Anak (jika ada) kecuali untuk kegiatan operasional perusahaan dengan memperhatikan ketentuan mengenai rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.3 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
    (ii) setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting dan/atau buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Entitas Anak (jika ada) serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
    (iii) setiap perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan perubahan pemegang saham utama Perseroan, diikuti dengan penyerahan akta-akta/dokumen-dokumen keputusan rapat umum pemegang saham Perseroan atas perubahan tersebut, setelah akta-akta/dokumen-dokumen tersebut diterima oleh Perseroan; dan
    (iv) Perkara pidana, perdata, administrasi dan perburuhan yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.
m. Dalam hal terdapat rencana penggantian, perubahan dan/atau penambahan Obyek Ijarah karena alasan apapun, Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat Sukuk paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah mendapatkan permohonan pengajuan Obyek Ijarah Pengganti dan meminta Wali Amanat Sukuk untuk menyelenggarakan dan meminta persetujuan RUPSI.
n. membayar kewajiban pajak Perseroan atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
o. menyerahkan kepada Wali Amanat:
    (i) laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Perseroan yang terdaftar di OJK dalam waktu yang bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan tahunan Perseroan kepada OJK dan/atau Bursa Efek, dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang berlaku;
    (ii) laporan rasio keuangan Perseroan sebagaimana Pasal 7.3 huruf (b) Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah beserta uraian penjelasannya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kelander sejak diterbitkanya Laporan Keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit;
    (iii) laporan-laporan keuangan internal triwulanan (*unaudited*) Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah periode laporan keuangan tersebut berakhir;
    (iv) laporan-laporan lain yang harus disampaikan kepada OJK dan/atau Bursa Efek dalam waktu yang bersamaan dengan disampaikannya laporan-laporan tersebut oleh Perseroan kepada OJK dan/atau Bursa Efek;
    (v) salinan resmi akta Perjanjian Perwaliamanatan dan akta-akta lainnya yang dibuat sehubungan dengan Emisi Sukuk Ijarah ini;
    (vi) data-data dan keterangan-keterangan lain yang sewaktu-waktu diminta secara tertulis oleh Wali Amanat mengenai jalannya usaha, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan data-data lain sepanjang hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas Wali Amanat yang telah ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku; dan
    (vii) penjelasan dan/atau perbaikan atas setiap pelanggaran terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah diketahuinya pelanggaran tersebut;
    (viii) Bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tahunan, surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan tentang kejadian kejadian pada masalah dan/atau keterangan yang dapat mempengaruhi kepentingan Pemegang Obligasi termasuk akan tetapi tidak terbatas pada:

1. Pernyataan mengenai tidak adanya pelanggaran terhadap pembatasan pembatasan dan kewajibankewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, atau jika ada pelanggaran, uraian mengenai bentuk pelanggaran tersebut;
2. Pernyataan bahwa Perseroan telah mentaati dan melaksanakan seluruh pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau sesuai dengan Persyratan Sukuk Ijarah.
3. Pernyataan mengenai tidak adanya kejadian yang telah dan/atau akan menyebabkan Sukuk Ijarah menjadi cidera janji sehingga sanksi-sanksi berdasarkan Perjanjian Perwalianatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian yang berhubungan dengan penerbitan menjadi berlaku dan harus dilaksanakan;
4. Pernyataan mengenai tidak adanya kejadian yang secara materiil mempengaruhi Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah, atau jika ada, uraian mengenai kejadian-kejadian tersebut;
5. Pernyataan mengenaitidak adanya perubahan yang berarti dalam bidang usaha Perseroan yang tidak dilaporkan sejak penerbitan Sukuk yang pertama kali, atau jika ada, uraian mengenai kejadian-kejadian tersebut.

p. memelihara harta kekayaannya agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa;
q. memelihara asuransi-asuransi atas harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik terhadap segala resiko yang secara material lazim dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sejenis dengan Perseroan dengan ketentuan asuransi-asuransi tersebut tersedia dengan syarat-syarat komersial yang wajar bagi Perseroan;
r. segera memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Wali Amanat setelah menyadari terjadinya keadaan atau kejadian sebagaiaman tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwalimanatan Sukuk Ijarah yang dapat menimbulkan kelalaian atau adanya pemberitahuan mengenai kelaalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan;
s. memberi ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat dengan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya selama jam kerja Perseroan, untuk memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan pada saat jam kerja Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan dengan memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
t. memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan dari pemerintah serta perijinan-perijinan penting dengan pihak lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dari waktu ke waktu disyaratkan oleh hukum yang berlaku;
u. menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah kepada KSEI, untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sebagai bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Rekening dan menyampaikan fotokopi Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah dengan tanda terima dari KSEI tersebut kepada Wali Amanat;
v. Melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2020, yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan, yaitu antara lain :
    1) Pemeringkatan Tahunan
        i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Sukuk Ijarah kepada OJK dan Wali Amanat paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk Ijarah yang diterbitkan.
        ii. Dalam hal peringkat Sukuk Ijarah yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
            a) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
            b) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
    2) Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
        i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat yang berbeda dengan yang sebelumnya, maka Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya peringkat yang berbeda dengan sebelumnya, yang paling sedikit memuat:
            a) peringkat yang berbeda dengan sebelumnya; dan
            b) penjelasan singkat mengenai faktor penyebab terbitnya peringkat yang berbeda dengan sebelumnya.

        ii. Masa berlaku peringkat yang berbeda dengan sebelumnya adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.

3) Pemeringkatan Sukuk Ijarah Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan.
   i. Perseroan yang menerbitkan Sukuk Ijarah melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan;
   ii. Peringkat tahunan dan peringkat yang dikeluarkan oleh Pemeringkatt karena adanya fakta material, kejadian penting, atau faktor lainnya yang berbeda dengan peringkat sebelumnya wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
      a) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
      b) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Sukuk Ijarah tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014.
4) Pemeringkatan Ulang
   i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Sukuk Ijarah selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf y angka 1) butir i dan angka 2) butir i Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK dan Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya peringkat dimaksud.
   ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (situs web) Bursa Efek paling lama lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya peringkat dimaksud.
5) Pengumuman sebagaimana dimaksud huruf y angka 1), angka 2), dan angka 3) di atas, wajib dilakukan paling sedikit:
   ii. Situs Web Emiten;
   iii. Situs Web Bursa Efek.

v. tetap mematuhi segala kewajiban yang disyaratkan oleh CGIF sebagai Penanggung Obligasi berdasarkan perjanjian-perjanjian yang relevan.

w. membayar secara tepat waktu biaya penanggungan yang wajib dibayar kepada CGIF.

KELALAIAN PERSEROAN

a. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :
   1) Perseroan tidak membayar Sisa Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; atau
   2) Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
   3) Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada) dinyatakan lalai dan telah melewati jangka waktu perbaikan (apabila ada) sehubungan dengan suatu perjanjian utang atau kredit oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah utang melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian triwulan terakhir, yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
   4) Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium); atau
   5) Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan Dokumen Emisi lainnya yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan Dokumen Emisi (selain Pasal 11.1 angka 1 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah).

b. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam:
   1. Pasal 11.1 angka 1 Perjanjian Perwaliamantan Sukuk Ijarah, Wali Amanat akan segera menyampaikan Klaim kepada CGIF dalam Periode Klaim sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penanggungan;
   2. Pasal 11.1 angka 5 Perjanjian Perwaliamantan Sukuk Ijarah keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat Sukuk,

tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

3. Pasal 11.1 angka 2 dan/atau angka 3 dan/atau angka 4 Perjanjian Perwaliamantan Sukuk Ijarah dan keadaan atau kerjadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat Sukuk yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak surat teguran dari Wali Amanat mengenai kelalaian tersebut, tanpa adanya upaya perbaikan yang mulai dilakukan oleh Perseroan atau tanpa dihilangkannya keadaan tersebut;

maka Wali Amanat wajib memberitahukan keadaan atau kejadian tersebut kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atas biaya Perseroan. Wali Amanat akan memanggil RUPSI menurut ketentuan dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Dalam RUPSI tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaian tersebut.

Apabila RUPSI tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan serta RUPSI memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Sukuk Ijarah sesuai dengan keputusan RUPSI menjadi jatuh tempo sehingga dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSI itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

c. Apabila Perseroan:
   1) dibubarkan karena sebab apapun atau Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) yang diajukan oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) yang dijamin langsung oleh Perseroan yang telah memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga yang berwenang;
   2) Menyatakan secara tertulis ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (*standstill*).

   maka dalam hal ini Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya dan Wali Amanat bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah berhak mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Ijarah dengan mengajukan tagihan sebesar Jumlah Kewajiban kepada Perseroan dan/atau Penanggung. Untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Ijarah.
d. Perseroan berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Wali Amanat Sukuk dan/atau membebaskan Wali Amanat Sukuk dari setiap dan semua gugatan, kerugian, biaya, tanggungan dan ongkos lain apapun yang diderita oleh Wali Amanat Sukuk termasuk biaya Konsultan Hukum yang disetujui oleh Perseroan sehubungan dengan kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Dokumen Emisi dan telah ditentukan berdasarkan suatu keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali yang diakibatkan oleh kelalaian Wali Amanat Sukuk.

PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH (*BUY BACK*)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. pembelian kembali Sukuk Ijarah ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
b. pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek.
c. pembelian kembali Sukuk Ijarah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
d. pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
e. pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSI.
f. pembelian kembali Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi, kecuali Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah.
g. rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut.
h. pembelian kembali Sukuk Ijarah, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah.
i. rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.7 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan pengumumna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.8 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, paling sedikit memuat informasi tentang:
   1) periode penawaran pembelian kembali;
   2) jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
   3) kisaran jumlah Sukuk Ijarah yang akan dibeli kembali;

4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah;
5) tata cara penyelesaian transaksi;
6) persyaratan bagi Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan penawaran jual;
7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Ijarah;
8) tata cara pembelian kembali Sukuk Ijarah; dan
9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah;

j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Ijarah yang melakukan penjualan Sukuk Ijarah apabila jumlah Sukuk Ijarah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Ijarah, melebihi jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dibeli kembali;

k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Ijarah;

l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Ijarah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf i, dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) jumlah pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Ijarah untuk masing-masing jenis Sukuk Ijarah yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
   2) Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
   3) Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali.
   dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Ijarah.

m. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Ijarah, informasi yang meliputi anatara lain:
   1) jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli;
   2) rincian jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
   3) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
   4) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah.

n. Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Sukuk Ijarah;

o. Dalam hal terdapat lebih dari satu sukuk ijarah yang diterbitkan oleh Persreoan, maka pembelian kembali Sukuk Ijarah dilakukan dengan mendahulukan sukuk ijarah yang tidak dijamin;

p. Dalam hal terdapat lebih dari satu sukuk ijarah yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut;

q. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh sukuk ijarah, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut;

r. Pembelian kembali Sukuk Ijarah oleh Perseroan mengakibatkan:
   1) hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
   2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

s. Pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud pada ayat 6.7 dan ayat 6.8 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelulm tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. Situs web Perserian dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
   2. Situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional

RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK IJARAH (RUPSI)

Untuk penyelenggaraan RUPSI, kuorum yang diisyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan dibawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1) RUPSI diadakan dengan tujuan antara lain:
   a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah mengenai perubahan jangka waktu, Sisa Imbalan Ijarah, suku Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, jaminan atau penyisihan dana pelunasan (*sinking fund*) dan dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2020;

b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamatan Sukuk Ijarah serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamatan Sukuk Ijarah;
d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Ijarah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan dalam Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2020;
e. mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat bermaksuda mengambil tingakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamatan Sukuk Ijarah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

2) RUPSI dapat diselenggarakan atas permintaan:
   a. Pemegang Sukuk Iajrah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Ijarah yang belum dilunasi tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
   b. Perseroan;
   c. Wali Amanat; atau
   d. OJK.

3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 12. 2 huruf a, huruf b, dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSI.

4) Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk Ijarah atau Perseroan untuk mengadakan RUPSI, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

5) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelengaraan RUPSI :
   1. Pengumuman RUPSI wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
   2. Pemanggilan RUPSI dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSI, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
   3. Pemanggilan RUPSI kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPSI kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSI sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
   4. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSI dan mengungkapkan informasi antara lain:
      (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSI ;
      (2) agenda RUPSI;
      (3) pihak yang mengajukan usulan RUPSI;
      (4) Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSI ; dan
      (5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSI.

   5. RUPSI kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSI sebelumnya.

6) Tata cara RUPSI
   a. Pemegang Sukuk Ijarah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSI dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.

b. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dalam RUPSI adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI yang diterbitkan oleh KSEI.
c. Pemegang Sukuk Ijarah yang menghadiri RUPSI wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
d. Seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSI.
e. Setiap Sukuk Ijarah sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
g. Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
h. Pemegang Sukuk Ijarah dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPSI namun memberikan suara abstain dianggap tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
i. Sebelum pelaksanaan RUPSI:
   - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk Ijarah dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
   - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
   - Pemegang Sukuk Ijarah atau kuasa Pemegang Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk Ijarah memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
j. RUPSI dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
k. RUPSI dipimpin oleh Wali Amanat.
l. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPSI termasuk materi RUPSI dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSI.
m. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah, maka RUPSI dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakannya RUPSI tersebut. Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakannya RUPSI tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSI dan materi RUPSI serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSI.

7) Dengan memperhatikan ketentuan butir 6 huruf g di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
   a. Dalam hal RUPSI bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam butir 1) diatur sebagai berikut:
      1. Apabila RUPSI dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
         (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah Pemegang Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
         (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI kedua.
         (iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
         (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI ketiga.
         (v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
      2. Apabila RUPSI dimintakan oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

(i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit ⅔ (dua per tiga) dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
(ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI kedua.
(iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit ⅔ (dua per tiga) dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
(iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI ketiga.
(v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit ⅔ (dua per tiga) dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.

3. Apabila RUPSI dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
(i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
(ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI kedua.
(iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
(iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI ketiga.
(v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.

b. RUPSI yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dapat diselenggarakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
2. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI kedua.
3. RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
4. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI ketiga.
5. RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
6. dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang keempat.
7. RUPSI keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat.
8. Pengumuman, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPSI keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas.

8) Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSI termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya pemasangan iklan untuk pengumuman dan pemanggilan RUPSI, biaya Notaris, dan sewa ruangan dibebankan dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.

9) Penyelenggaraan RUPSI wajib dibuatkan berita acara secara notarial oleh Notaris.

10) Keputusan RUPSI mengikat bagi semua Pemegang Sukuk Ijarah, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Sukuk Ijarah wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSI. Keputusan RUPSI mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk Ijarah, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Sukuk Ijarah.

11) Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSI dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSI tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.

12) Apabila RUPSI yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Sisa Imbalan Ijarah, perubahan Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, dan perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSI atau tanggal lain yang diputuskan RUPSI (jika RUPSI memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Imbalan Ijarah kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSI.

13) Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSI dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

14) Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSI ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku

PENYISIHAN DANA PELUNASAN SISA IMBALAN IJARAH

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai rencana penggunaan dana penerbitan Sukuk Ijarah.

TIM AHLI SYARIAH

Berdasarkan surat Dewan Syariah Nasional MUI Nomor U-0111/DSN-MUI/II/2025tanggal 18 Februari 2025, Tim Ahli Syariah yang bertugas memberikan pendampingan dalam penerbitan Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Izin
1.	Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc, MA	Ketua	Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-03/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal Kepada Mohammad Bagus Teguh Perwira *jo*. Nomor KEP-02/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Mohammad Bagus Teguh Perwira.

No	Nama	Jabatan	Izin
2.	Dr. H. Asep Supyadillah, M.Ag	Anggota	Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-04/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 15 April 2016 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal Kepada Asep Supyadillah *jo*. Nomor KEP-06/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 5 April 2021 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Asep Supadillah.

Tim Ahli Syariah berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

PERPAJAKAN

Diuraikan dalam Bab IX mengenai Perpajakan dalam Prospektus ini.

HASIL PEMERINGKATAN SUKUK IJARAH

Dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan surat Pefindo No.RC-400/PEF-DIR/III/2025 tanggal 24 Maret 2025, hasil pemeringkatan atas instrumen pendanaan syariah (Sukuk Ijarah) Perseroan adalah:

$_{id}$AAA$_{(sy)(cg)}$
(*Triple A Syariah; Corporate Guarantee*)

Hasil Pemeringkatan ini berlaku untuk periode 21 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pefindo, baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUPM sebagaimana diubah dalam UUP2SK. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Sukuk Ijarah kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk Ijarah yang diterbitkan.

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Alamat Wali Amanat
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Divisi Investment Services
Gedung BRI II Lt.6
Jl. Jend Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
Tel. (021) 575 8143
Faks. (021) 575 2360

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII dalam Prospektus ini mengenai Keterangan Mengenai Wali Amanat.

PERWALIAMANATAN

Penerbitan Sukuk Ijarah ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang bertindak selaku Wali Amanat.

PROSEDUR PEMESANAN

Prosedur Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah dapat dilihat pada Bab XIII mengenai Tata Cara Pemesanan dan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam Prospektus ini.

D. KETERANGAN MENGENAI EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK YANG BELUM DILUNASI

No	Nama	Rating	Nominal (Rp juta)	Jangka Waktu	Tingkat Bunga/Cicilan Imbalan (per tahun)	Jatuh Tempo	Total Nilai Efek yang Terutang (Rp juta)
1	Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2020 Seri C	idA	1.075	5 tahun	12%	11 September 2025	1.075
2	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2020 Seri C	idA(sy)	430	5 tahun	Rp51.600.000	11 September 2025	430
3	Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 Seri C	idA	10.555	5 tahun	11,0%	14 September 2026	10.555
4	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 Seri C	idA(sy)	50	5 tahun	Rp5.500.000	14 September 2026	50
5	Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 Seri B	idA+	217.825	3 tahun	10,00%	5 Juli 2025	217.825
6	Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 Seri C	idA+	169.505	5 tahun	11,00%	5 Juli 2027	169.505
7	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 Seri B	idA+(sy)	269.630	3 tahun	Rp26.963.000.000	5 Juli 2025	269.630
8	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 Seri C	idA+(sy)	10.210	5 tahun	Rp1.123.100.000	5 Juli 2027	10.210
9	Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022 Seri B	idA+	139.160	3 tahun	10,00%	16 September 2025	139.160
10	Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022 Seri C	idA+	36.695	5 tahun	11,00%	16 September 2027	36.695
11	Sukuk Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022 Seri B	idA+(sy)	96.600	3 tahun	Rp9.660.000.000	16 September 2025	96.600

No	Nama	Rating	Nominal (Rp juta)	Jangka Waktu	Tingkat Bunga/Cicilan Imbalan (per tahun)	Jatuh Tempo	Total Nilai Efek yang Terutang (Rp juta)
12	Sukuk Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022 Seri C	idA+(sy)	2.250	5 tahun	Rp247.500.000	16 September 2027	2.250
13	Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2023 Seri B	idA+	230.260	3 tahun	10,25%	6 Juli 2026	230.260
14	Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2023 Seri C	idA+	22.330	5 tahun	11,25%	6 Juli 2028	22.330
15	Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2023 Seri B	idA+(sy)	442.360	3 tahun	Rp45.341.900.000	6 Juli 2026	442.360
16	Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2023 Seri C	idA+(sy)	15.350	5 tahun	Rp1.726.875.000	6 Juli 2028	15.350
17	Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2024 Seri A	idA+	300.235	370 Hari Kalender	8,75%	1 Juli 2025	300.235
18	Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2024 Seri B	idA+	217.510	3 tahun	10,25%	21 Juni 2027	217.510
19	Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2024 Seri C	idA+	132.255	5 tahun	11,00%	21 Juni 2029	132.255
20	Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2024 Seri A	idA+(sy)	381.705	370 Hari Kalender	Rp33.399.187.500	1 Juli 2025	381.705
21	Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2024 Seri B	idA+(sy)	267.130	3 tahun	Rp27.380.825.000	21 Juni 2027	267.130
22	Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2024 Seri C	idA+(sy)	1.165	5 tahun	Rp128.150.000	21 Juni 2029	1.165
	Jumlah		**2.964.285**				**2.964.285**

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih memiliki utang obligasi dan sukuk ijarah dalam mata uang rupiah sebesar Rp2.964.285 juta.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi Obligasi, akan digunakan seluruhnya untuk:

1. Sebesar Rp300.235.000.000,- (tiga ratus miliar dua ratus tiga puluh lima juta Rupiah) akan digunakan seluruhnya untuk pelunasan Obligasi Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap II Tahun 2024 Seri A dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan		Penjelasan
Nama surat utang	:	Obligasi Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap II Tahun 2024 Seri A
Jumlah utang saat ini	:	Rp300.235.000.000,- (tiga ratus miliar dua ratus tiga puluh lima juta Rupiah)
Tingkat bunga	:	8,75% (delapan koma tujuh puluh lima persen)
Jangka waktu (tenor)	:	370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender
Jatuh tempo	:	1 Juli 2025
Penggunaan dana	:	Setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya digunakan untuk pelunasan sebagian (*refinancing*) pinjaman rupiah yang dimiliki oleh Perseroan
Jumlah utang yang akan dibayarkan	:	Rp300.235.000.000,- (tiga ratus miliar dua ratus tiga puluh lima juta Rupiah)
Sisa saldo utang setelah pembayaran sebagian	:	Rp0
Sifat hubungan afiliasi dengan kreditur	:	Tidak ada
Riwayat utang	:	Pada tanggal 24 Juni 2024, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap II Tahun 2024 Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp300.235.000.000,- (tiga ratus miliar dua ratus tiga puluh lima juta Rupiah) berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak tanggal emisi.
Prosedur dan persyaratan pembayaran utang	:	1. Obligasi dilunasi pada tanggal pelunasan pokok obligasi. 2. Pembayaran pokok obligasi kepada pemegang obligasi melalui pemegang rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. 3. Perseroan akan menyetorkan dana (*in good fund*) yang diperlukan untuk pelunasan pokok obligasi tersebut yang jatuh tempo kepada agen pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal pelunasan pokok obligasi tersebut dan menyerahkan kepada wali amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada tanggal pelunasan pokok obligasi tersebut.

Sumber dana untuk membayar bunga obligasi adalah kas dari aktivitas usaha Perseroan.

2. Sebesar Rp217.825.000.000,- (dua ratus tujuh belas miliar delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah) akan digunakan seluruhnya untuk pelunasan Obligasi Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022 Seri B dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan		Penjelasan
Nama surat utang	:	Obligasi Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022 Seri B
Jumlah utang saat ini	:	Rp217.825.000.000,- (dua ratus tujuh belas miliar delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah)
Tingkat bunga	:	10,00% (sepuluh persen)
Jangka waktu (tenor)	:	3 (tiga) tahun
Jatuh tempo	:	5 Juli 2025
Penggunaan dana	:	Setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya digunakan untuk pelunasan sebagian (*refinancing*) pinjaman rupiah yang dimiliki oleh Perseroan
Jumlah utang yang akan dibayarkan	:	Rp217.825.000.000,- (dua ratus tujuh belas miliar delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah)
Sisa saldo utang setelah pembayaran sebagian	:	Rp0
Sifat hubungan afiliasi dengan kreditur	:	Tidak ada
Riwayat utang	:	Pada tanggal 5 Juli 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022 Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp217.825.000.000,- (dua ratus tujuh belas miliar delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah) berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi.
Prosedur dan persyaratan pembayaran utang	:	1. Obligasi dilunasi pada tanggal pelunasan pokok obligasi. 2. Pembayaran pokok obligasi kepada pemegang obligasi melalui pemegang rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. 3. Perseroan akan menyetorkan dana (*in good fund*) yang diperlukan untuk pelunasan pokok obligasi tersebut yang jatuh tempo kepada agen pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal pelunasan pokok obligasi tersebut dan menyerahkan kepada wali amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada tanggal pelunasan pokok obligasi tersebut.

Sumber dana untuk membayar bunga obligasi adalah kas dari aktivitas usaha Perseroan.

3. Sebesar Rp1.075.000.000 ,- (satu miliar tujuh puluh lima juta Rupiah) akan digunakan seluruhnya untuk pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 Seri C dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan		Penjelasan
Nama surat utang	:	Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 Seri C
Jumlah utang saat ini	:	Rp1.075.000.000 ,- (satu miliar tujuh puluh lima juta Rupiah)
Tingkat bunga	:	12,00% (dua belas persen)
Jangka waktu (tenor)	:	5 (lima) tahun
Jatuh tempo	:	11 September 2025
Penggunaan dana	:	Setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya digunakan untuk pelunasan sebagian (*refinancing*) pinjaman rupiah yang dimiliki oleh Perseroan
Jumlah utang yang akan dibayarkan	:	Rp1.075.000.000 ,- (satu miliar tujuh puluh lima juta Rupiah)

Sisa saldo utang setelah pembayaran sebagian	:	Rp0
Sifat hubungan afiliasi dengan kreditur	:	Tidak ada
Riwayat utang	:	Pada tanggal 11 September 2020, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp1.075.000.000 ,- (satu miliar tujuh puluh lima juta Rupiah)berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi.
Prosedur dan persyaratan pembayaran utang	:	1. Obligasi dilunasi pada tanggal pelunasan pokok obligasi. 2. Pembayaran pokok obligasi kepada pemegang obligasi melalui pemegang rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. 3. Perseroan akan menyetorkan dana (*in good fund*) yang diperlukan untuk pelunasan pokok obligasi tersebut yang jatuh tempo kepada agen pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal pelunasan pokok obligasi tersebut dan menyerahkan kepada wali amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada tanggal pelunasan pokok obligasi tersebut.

Sumber dana untuk membayar bunga obligasi adalah kas dari aktivitas usaha Perseroan.

4. Sebesar Rp139.160.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan miliar seratus enam puluh juta Rupiah) akan digunakan seluruhnya untuk pelunasan Obligasi Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap II Tahun 2022 Seri B dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan		Penjelasan
Nama surat utang	:	Obligasi Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap II Tahun 2022 Seri B
Jumlah utang saat ini	:	Rp139.160.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan miliar seratus enam puluh juta Rupiah)
Tingkat bunga	:	10,00% (sepuluh persen)
Jangka waktu (tenor)	:	3 (tiga) tahun
Jatuh tempo	:	16 September 2025
Penggunaan dana	:	Setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya digunakan untuk pelunasan sebagian (*refinancing*) pinjaman rupiah yang dimiliki oleh Perseroan
Jumlah utang yang akan dibayarkan	:	Rp139.160.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan miliar seratus enam puluh juta Rupiah)
Sisa saldo utang setelah pembayaran sebagian	:	Rp0
Sifat hubungan afiliasi dengan kreditur	:	Tidak ada
Riwayat utang	:	Pada tanggal 16 September 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap II Tahun 2022 Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp139.160.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan miliar seratus enam puluh juta Rupiah) berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi.
Prosedur dan persyaratan pembayaran utang	:	2. Obligasi dilunasi pada tanggal pelunasan pokok obligasi. 3. Pembayaran pokok obligasi kepada pemegang obligasi melalui pemegang rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

		4. Perseroan akan menyetorkan dana (*in good fund*) yang diperlukan untuk pelunasan pokok obligasi tersebut yang jatuh tempo kepada agen pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal pelunasan pokok obligasi tersebut dan menyerahkan kepada wali amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada tanggal pelunasan pokok obligasi tersebut.

Sumber dana untuk membayar bunga obligasi adalah kas dari aktivitas usaha Perseroan.

5. Sebesar Rp430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta Rupiah) akan digunakan seluruhnya untuk pelunasan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 Seri C dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan		Penjelasan
Nama sukuk	:	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 Seri C
Jumlah sisa imbalan ijarah saat ini	:	Rp430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta Rupiah)
Cicilan imbalan ijarah	:	Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta Rupiah) per tahun
Jangka waktu (tenor)	:	5 (lima) tahun
Jatuh tempo	:	11 September 2025
Penggunaan dana	:	Setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya digunakan untuk pelunasan sebagian (*refinancing*) pinjaman rupiah yang dimiliki oleh Perseroan dan modal kerja.
Jumlah sisa imbalan ijarah yang akan dibayarkan	:	Rp430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta Rupiah)
Sisa saldo sisa imbalan ijarah setelah pelunasan	:	Rp0
Sifat hubungan afiliasi dengan kreditur	:	Tidak ada
Riwayat kewajiban	:	Pada tanggal 11 September 2020, Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 Seri C dengan jumlah sisa imbalan ijarah sebesar Rp430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta Rupiah) berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi.
Prosedur dan persyaratan pembayaran sisa imbalan ijarah	:	1. Sukuk ijarah dilunasi pada tanggal pelunasan sisa imbalan ijarah sukuk ijarah. 2. Pembayaran sisa imbalan ijarah sukuk ijarah kepada pemegang sukuk ijarah melalui pemegang rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. 3. Perseroan akan menyetorkan dana (*in good fund*) yang diperlukan untuk pelunasan sisa imbalan ijarah sukuk ijarah tersebut yang jatuh tempo kepada agen pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal pelunasan sisa imbalan ijarah tersebut dan menyerahkan kepada wali amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada tanggal pelunasan sisa imbalan ijarah sukuk ijarah tersebut.

Sumber dana untuk membayar cicilan imbalan ijarah adalah kas dari aktivitas usaha Perseroan.

6.Sebesar Rp96.600.000.000,- (sembilan puluh enam miliar enam ratus juta Rupiah) akan digunakan seluruhnya untuk pelunasan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap II Tahun 2022 Seri B dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan		Penjelasan
Nama sukuk	:	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap II Tahun 2022 B
Jumlah sisa imbalan ijarah saat ini	:	Rp96.600.000.000,- (sembilan puluh enam miliar enam ratus juta Rupiah)
Cicilan imbalan ijarah	:	Rp9.660.000.000,- (sembilan miliar enam ratus enam puluh juta Rupiah) per tahun
Jangka waktu (tenor)	:	3 (tiga) tahun
Jatuh tempo	:	16 September 2025
Penggunaan dana	:	Setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya digunakan untuk pelunasan sebagian (*refinancing*) pinjaman rupiah yang dimiliki oleh Perseroan dan modal kerja.
Jumlah sisa imbalan ijarah yang akan dibayarkan	:	Rp96.600.000.000,- (sembilan puluh enam miliar enam ratus juta Rupiah)
Sisa saldo sisa imbalan ijarah setelah pelunasan	:	Rp0
Sifat hubungan afiliasi dengan kreditur	:	Tidak ada
Riwayat kewajiban	:	Pada tanggal 16 September 2022, Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap II Tahun 2022 B dengan jumlah pokok sebesar Rp96.600.000.000,- (sembilan puluh enam miliar enam ratus juta Rupiah) berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi.
Prosedur dan persyaratan pembayaran sisa imbalan ijarah	:	1. Sukuk ijarah dilunasi pada tanggal pelunasan sisa imbalan ijarah sukuk ijarah. 2. Pembayaran sisa imbalan ijarah sukuk ijarah kepada pemegang sukuk ijarah melalui pemegang rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. 3. Perseroan akan menyetorkan dana (*in good fund*) yang diperlukan untuk pelunasan sisa imbalan ijarah sukuk ijarah tersebut yang jatuh tempo kepada agen pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal pelunasan sisa imbalan ijarah tersebut dan menyerahkan kepada wali amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada tanggal pelunasan sisa imbalan ijarah sukuk ijarah tersebut.

Sumber dana untuk membayar cicilan imbalan ijarah adalah kas dari aktivitas usaha Perseroan.

7. Sisanya setelah dikurangi dengan biaya emisi Obligasi akan digunakan seluruhnya untuk pelunasan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022 Seri B dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan		Penjelasan
Nama sukuk	:	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022 Seri B
Jumlah sisa imbalan ijarah saat ini	:	Rp269.630.000.000,- (dua ratus enam puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh juta Rupiah)
Cicilan imbalan ijarah	:	Rp26.963.000.000,- (dua puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta Rupiah) per tahun
Jangka waktu (tenor)	:	3 (tiga) tahun
Jatuh tempo	:	5 Juli 2025

Penggunaan dana	:	Setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya digunakan untuk pelunasan sebagian (*refinancing*) pinjaman rupiah yang dimiliki oleh Perseroan dan modal kerja.
Jumlah sisa imbalan ijarah yang akan dibayarkan dari hasil Penawaran Umum Obligasi	:	Sekitar Rp86.502.754.314,- (delapan puluh enam miliar lima ratus dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat belas Rupiah)
Jumlah sisa imbalan ijarah yang akan dibayarkan dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah		Sekitar Rp163.209.841.026,- (seratus enam puluh tiga miliar dua ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua puluh enam Rupiah)
Jumlah sisa imbalan ijarah yang akan dibayarkan dari kas internal Perseroan		Seluruh kekurangan dana setelah dikurangi dengan seluruh sisa dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah diatas setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah adalah sekitar sebesar Rp19.917.404.660,- (sembilan belas miliar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus empat ribu enam ratus enam puluh Rupiah)
Sisa saldo sisa imbalan ijarah setelah pelunasan	:	Rp 0
Sifat hubungan afiliasi dengan kreditur	:	Tidak ada
Riwayat kewajiban	:	Pada tanggal 5 Juli 2022, Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022 Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp269.630.000.000,- (dua ratus enam puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh juta Rupiah) berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi.
Prosedur dan persyaratan pembayaran sisa imbalan ijarah	:	1. Sukuk ijarah dilunasi pada tanggal pelunasan sisa imbalan ijarah sukuk ijarah. 2. Pembayaran sisa imbalan ijarah sukuk ijarah kepada pemegang sukuk ijarah melalui pemegang rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. 3. Perseroan akan menyetorkan dana (*in good fund*) yang diperlukan untuk pelunasan sisa imbalan ijarah sukuk ijarah tersebut yang jatuh tempo kepada agen pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal pelunasan sisa imbalan ijarah tersebut dan menyerahkan kepada wali amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada tanggal pelunasan sisa imbalan ijarah sukuk ijarah tersebut.

Sumber dana untuk membayar cicilan imbalan ijarah adalah kas dari aktivitas usaha Perseroan.

Dalam hal dana hasil penawaran umum Obligasi tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan dan/atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi Sukuk Ijarah, akan digunakan untuk:

1. Sebesar Rp381.705.000.000 ,- (tiga ratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus lima juta Rupiah) akan digunakan seluruhnya untuk pelunasan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap II Tahun 2024 Seri A dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan		Penjelasan
Nama sukuk	:	Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap II Tahun 2024 Seri A
Jumlah sisa imbalan ijarah saat ini	:	Rp381.705.000.000 ,- (tiga ratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus lima juta Rupiah)
Cicilan imbalan ijarah	:	Rp33.399.187.500,- (tiga puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) per tahun
Jangka waktu (tenor)	:	370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender
Jatuh tempo	:	1 Juli 2025
Penggunaan dana	:	Setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya digunakan untuk pelunasan sebagian (*refinancing*) pinjaman rupiah yang dimiliki oleh Perseroan dan modal kerja.
Jumlah sisa imbalan ijarah yang akan dibayarkan	:	Rp381.705.000.000 ,- (tiga ratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus lima juta Rupiah)
Sisa saldo sisa imbalan ijarah setelah pelunasan	:	Rp 0
Sifat hubungan afiliasi dengan kreditur	:	Tidak ada
Riwayat kewajiban	:	Pada tanggal 24 Juni 2024, Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap II Tahun 2024 Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp381.705.000.000 ,- (tiga ratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus lima juta Rupiah) berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak tanggal emisi.
Prosedur dan persyaratan pembayaran sisa imbalan ijarah	:	1. Sukuk ijarah dilunasi pada tanggal pelunasan sisa imbalan ijarah sukuk ijarah. 2. Pembayaran sisa imbalan ijarah sukuk ijarah kepada pemegang sukuk ijarah melalui pemegang rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. 3. Perseroan akan menyetorkan dana (*in good fund*) yang diperlukan untuk pelunasan sisa imbalan ijarah sukuk ijarah tersebut yang jatuh tempo kepada agen pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal pelunasan sisa imbalan ijarah tersebut dan menyerahkan kepada wali amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada tanggal pelunasan sisa imbalan ijarah sukuk ijarah tersebut.

Sumber dana untuk membayar cicilan imbalan ijarah adalah kas dari aktivitas usaha Perseroan.

2. Sisanya setelah dikurangi dengan biaya emisi Sukuk Ijarah akan digunakan seluruhnya untuk pelunasan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022 Seri B dengan rincian ada pada poin no 7 diatas

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 18/POJK.04/2015.

Dalam hal dana hasil penawaran umum Obligasi dan Sukuk Ijarah tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan dan/atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya. Berdasarkan dana yang dari hasil penawaran umum Obligasi dan Sukuk Ijarah yang telah diterima oleh Perseroan sebesar Rp1.400.000.000.000,- (satu triliun empat ratus miliar Rupiah), maka Perseroan akan menggunakan kas internal dan/atau menggunakan pendanaan

eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya senilai sekitar Rp19.917.404.660,- (sembilan belas miliar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus empat ribu enam ratus enam puluh Rupiah) untuk melunasi Obligasi dan Sukuk yang akan jatuh tempo tersebut.

Rencana penggunaan dana hasil PUB V Tahap I yang akan digunakan untuk pelunasan Obligasi atau Sukuk tidak terkualifikasi sebagai Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 17/POJK.04/2020 dan POJK No. 42/POJK.04/2020.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum akan mengikuti peraturan yang berlaku di pasar modal. Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala kepada OJK dan para pemegang Obligasi melalui Wali Amanat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan Otoritas Jasa Keuangan serta dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan secara berkala setiap tahun sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/2015. Serta khusus untuk dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah harus ditempatkan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Apabila penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah ini akan diubah, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO dan RUPSI dengan mengemukakan rencana dan alasan beserta pertimbangan dan perubahan penggunaan dana tersebut. Perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari RUPO dan RUPSI sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015. Selanjutnya Perseroan melaporkan hasil RUPO dan RUPSI kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPO dan RUPSI.

Sesuai Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2017, total biaya (belum termasuk perpajakan yang berlaku) yang dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan emisi Penawaran Umum Obligasi ini kurang lebih setara dengan 0,96% (nol koma sembilan enam persen) dari nilai emisi yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk penjamin emisi efek sekitar 0,50% (nol koma lima nol persen) yang terdiri dari:
   Biaya jasa penjamin pelaksana emisi (*management fee*) sekitar 0,10% (nol koma satu nol persen), penjaminan emisi (*underwriting fee*) sekitar 0,20% (nol koma dua nol persen), dan penjualan (*selling fee*) sekitar 0,20% (nol koma dua nol persen).
2. Biaya jasa untuk profesi penunjang pasar modal sekitar 0,05% (nol koma nol lima persen), yang terdiri dari:
   A. Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,03% (nol koma nol tiga persen);
   B. Biaya jasa Notaris sekitar 0,01% (nol koma nol satu persen);
   C. Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,01% (nol koma nol satu persen);
3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,05% (nol koma nol lima persen), yang terdiri dari:
   A. Biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,01% (nol koma nol satu persen);
   B. Biaya jasa Pemeringkat Efek sekitar 0,04% (nol koma nol empat persen).
4. Biaya proses penanggungan sekitar 0,25% (nol koma dua lima persen).
5. Biaya lain-Lain (Pernyataan Pendaftaran di OJK, Pendaftaran Efek di KSEI dan Pencatatan Efek di BEI, percetakan, iklan, *public expose* dan audit penjatahan, dan lain-lain) sekitar 0,11% (nol koma satu satu persen).

Sesuai Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan emisi Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini kurang lebih setara dengan 0,92% (nol koma sembilan dua persen) dari nilai emisi yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk penjamin emisi efek sekitar 0,50% (nol koma lima nol persen) yang terdiri dari:
   Biaya jasa penjamin pelaksana emisi (*management fee*) sekitar 0,10% (nol koma satu nol persen), penjaminan emisi (*underwriting fee*) sekitar 0,20% (nol koma dua nol persen), dan penjualan (*selling fee*) sekitar 0,20% (nol koma dua nol persen).
2. Biaya jasa untuk profesi penunjang pasar modal sekitar 0,05% (nol koma nol lima persen), yang terdiri dari:
   A. Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,03% (nol koma nol tiga persen);
   B. Biaya jasa Notaris sekitar 0,01% (nol koma nol satu persen);
   C. Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,01% (nol koma nol satu persen);
3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,05% (nol koma nol lima persen) , yang terdiri dari:
   A. Biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,01% (nol koma nol satu persen) ;
   B. Biaya jasa Pemeringkat Efek sekitar 0,04% (nol koma nol empat persen) .
4. Biaya proses penanggungan sekitar 0,25% (nol koma dua lima persen).
5. Biaya lain-Lain (Pernyataan Pendaftaran di OJK, Pendaftaran Efek di KSEI dan Pencatatan Efek di BEI, biaya jasa Tim Ahli Syariah, percetakan, iklan, *public expose* dan audit penjatahan, dan lain-lain) sekitar 0,07% (nol koma nol tujuh persen).

Sebagai informasi tambahan, Perseroan membayar biaya penanggungan (guarantee fee) berkisar antara 1,25%-1,35% per tahun dari nilai emisi yang dijaminkan kepada Penanggung yakni CGIF tergantung pada tenor Obligasi dan Sukuk Ijarah. Biaya tersebut dibayarkan secara langsung oleh Perseroan tanpa menggunakan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah.

Penggunaan dana hasil emisi Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2024, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, telah digunakan seluruhnya sebagaimana telah disampaikan dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam surat Perseroan No. 003/CFO-MCOM/I/2025 tanggal 10 Januari 2025

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 yang diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 yang dicantumkan pada bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia dan Peraturan nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik dan telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, auditor independen, sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporan yang diterbitkan kembali tanggal 15 Mei 2025 dan ditandatangani oleh Florus Daeli, SE., Ak., M.M., CPA., ASEAN CPA., CA., CRA., CLI.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan mempunyai jumlah liablitas sebesar Rp7.164.262 juta. Rincian dari liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	**31 Desember 2024**
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang bank	1.311.959
Utang usaha	
Pihak berelasi	7.271
Pihak ketiga	415.988
Utang lain-lain	
Pihak berelasi	15.264
Pihak ketiga	111.735
Pendapatan diterima dimuka	11.225
Utang pajak	71.095
Biaya masih harus dibayar	82.625
Uang muka pelanggan	6.331
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun	
Pinjaman bank dan lembaga keuangan - jangka panjang	808.495
Liabilitas sewa pembiayaan	27.717
Utang obligasi	656.819
Utang Sukuk Ijarah	746.633
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	4.273.157
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas pajak tangguhan – bersih	108.961
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Pinjaman bank dan lembaga keuangan - jangka panjang	967.382
Liabilitas sewa pembiayaan	49.359
Utang obligasi	813.539
Utang Sukuk Ijarah	733.583
Liabilitas imbalan kerja	218.281
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.891.105
JUMLAH LIABILITAS	**7.164.262**

1. Utang Bank

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember
	2024
Bank Mayapada	475.000
Deutsche Bank AG	379.807
Bank DBS Indonesia	200.000
Pinjaman Sindikasi	135.000
Bank Nationalnobu	50.000
Bank MNC International	15.400
Bank BJB	13.000
Bank Ganesha	12.500
Bank Jtrust Indonesia	12.043
Bank Central Asia	9.826
Bank Oke Indonesia	9.383
Bank Sinarmas	-
Jumlah	**1.311.959**

Bank Mayapada

GTV

Pada tanggal 23 November 2018 dan 26 November 2018, GTV memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank Mayapada dengan maksimum pinjaman Rp250.000 juta. Selama tahun 2020, fasilitas pinjaman tersebut dikenakan tingkat bunga 13% per tahun dan jatuh tempo dalam 7 bulan. Pinjaman ini telah di perpanjang pada tanggal 23 Oktober 2024 dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 Oktober 2025, dan tidak terdapat batasan-batasan keuangan tertentu. Pinjaman tersebut dijamin dengan aset anak perusahaan dan penjaminan perusahaan.

MTN

Pada tanggal 15 April 2019, MTN memperoleh fasilitas pinjaman dari Bank Mayapada dengan maksimum pinjaman sebesar Rp100.000 juta dengan bunga 14% per tahun, dan tidak terdapat batasan-batasan keuangan tertentu. Pinjaman ini dijamin dengan hak guna bangunan dan penjaminan perusahaan dari PT MNC Land Tbk.

Selanjutnya, berdasarkan adendum perjanjian tanggal 13 Februari 2023, pinjaman tersebut diperpanjang dengan tambahan fasilitas Rp25.000 juta, berlaku selama 12 (duabelas) bulan sejak tanggal 22 April 2023 atau fasilitas kredit dinyatakan lunas oleh Bank. Pinjaman ini telah diperpanjang pada tanggal 22 April 2024 dengan tingkat bunga 12% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 April 2025.

Infokom

Pada tanggal 15 Februari 2022, Infokom telah memperoleh fasilitas Pinjaman Tetap *On-Demand* (PTX OD) dari Bank Mayapada sebesar Rp150.000 juta, jangka waktu 12 bulan, dengan tingkat bunga 10% per tahun, dan tidak terdapat batasan-batasan keuangan tertentu. Perjanjian tersebut dijamin dengan aset tetap berupa mesin-mesin. Fasilitas pinjaman ini telah diperpanjang pada tanggal 15 Februari 2025 dan akan jatuh tempo tanggal 15 Februari 2026.

Deutsche Bank AG

Pada tanggal 26 Agustus 2024, MNC memperoleh fasilitas kredit dari Deutsche Bank AG, Singapore Branch sebesar US$ 26 juta dengan tingkat bunga SOFR 3 bulan + marjin 5,85% per tahun, dimana marjin tersebut meningkat 0,5% setiap 3 bulan sejak tangal utilisasi. Pinjaman ini memiliki jangka waktu selama 12 bulan. Saldo pinjaman atas fasilitas pinjaman Deutsche Bank adalah US$ 23,5 juta (setara dengan Rp379.807 juta) pada 31 Desember 2024.

Bank DBS Indonesia (DBS)

Pada tanggal 25 September 2023, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas perbankan dalam bentuk Commited Revolving Credit Facility ("Fasilitas RCF") sebesar Rp200.000 juta dengan DBS. Bunga yang dikenakan adalah sebesar JIBOR + 4% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 (dua belas) bulan sejak ditandatanganinya Fasilitas RCF. Fasilitas ini telah diperpanjang pada tanggal 25 September 2024 dan akan jatuh tempo tanggal 25 September 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah mematuhi rasio keuangan dan batasan-batasan sebagaimana tercantum dalam Fasilitas RCF, yaitu *debt-to-ebitda ratio (DER)* kurang dari tiga kali dan *interest service coverage ratio (ISCR)* lebih besar dari 1,25 kali dimana DER Perseroan sebesar 0,16x dan ISCR sebesar 4,07x.

Pinjaman Sindikasi

Pada tanggal 13 September 2024, RCTI, entitas anak, menandatangani perjanjian pinjaman sindikasi dengan (i) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebagai mandated lead arrangers; (ii) PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Kalteng, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT Bank MNC Internasional Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sebagai para kreditur sebesar Rp 135.000 juta. Jangka waktu fasilitas pinjaman adalah 12 bulan. Suku bunga pinjaman per tahun adalah 10,5%. Pinjaman ini dijamin dengan tanah beserta bangunan gedung, tagihan dan persediaan, serta jaminan MNC.

Bank Nationalnobu

Pada tanggal 25 Agustus 2023, MNC memperoleh fasilitas pinjaman tetap dari Bank Nationalnobu sebesar Rp50.000 juta. Jangka waktu perjanjian kredit ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal dimulai perjanjian dengan tingkat bunga 9,75% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 25 Agustus 2024. Pinjaman ini dijamin dengan aset MNC. Pinjaman ini telah di perpanjang pada tanggal 23 Agustus 2024 dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Agustus 2025.

Bank MNC Internasional

<u>MPI</u>

Pada tanggal 10 Mei 2021, MPI memperoleh fasilitas pinjaman dari Bank MNC Internasional dengan pinjaman sebesar Rp26.000 juta. Jangka waktu perjanjian kredit ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal di mulai perjanjian, dengan tingkat bunga >10% per tahun, dan tidak terdapat batasan-batasan keuangan tertentu. Perjanjian ini telah diperpanjang pada tanggal 10 Mei 2024 dan akan jatuh tempo tanggal 10 Mei 2025.

Pada tanggal 30 Desember 2024, MPI telah membayar luans fasilitas kredit tersebut sebesar Rp26.000 juta.

<u>MNI</u>

Pada tanggal 3 September 2021, MNI memperoleh fasilitas pinjaman dari Bank MNC Internasional dengan pinjaman sebesar Rp4.750 juta dan pada tanggal 10 Desember 2021, MNI memperoleh tambahan fasilitas pinjaman dari Bank MNC Internasional dengan pinjaman sebesar Rp18.750 juta. Jangka waktu perjanjian kredit ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal di mulai perjanjian dengan tingkat bunga deposito ditambah marjin tertentu dan jatuh tempo pada tanggal 3 September 2023, serta tidak terdapat batasan-batasan keuangan tertentu. Para pihak telah menyetujui untuk memperpanjang jatuh tempo menjadi 3 September 2024.

Pada tanggal 9 Juli 2024, MNI telah membayar lunas fasilitas kredit tersebut sebesar Rp23.500 juta.

<u>MTN</u>

Pada tanggal 10 Mei 2022, MTN memperoleh fasilitas pinjaman dari Bank MNC Internasional dengan pinjaman sebesar Rp58.500 juta. Jangka waktu perjanjian kredit ini berlaku selama 12 (duabelas) bulan sejak tanggal di mulai

perjanjian, dengan tingkat bunga >10% per tahun dan jatuh tempo pada 10 Mei 2023, dan tidak terdapat batasan-batasan keuangan tertentu. Perjanjian ini telah diperpanjang pada tanggal 6 Mei 2024 dan akan jatuh tempo tanggal 17 Mei 2025.

Pada tanggal 17 Mei 2022, MTN memperoleh fasilitas pinjaman dari Bank MNC Internasional dengan pinjaman sebesar Rp3.300 juta. Jangka waktu perjanjian kredit ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal di mulai perjanjian, dengan tingkat bunga >10% per tahun dan jatuh tempo pada 17 Mei 2023, dan tidak terdapat batasan-batasan keuangan tertentu. Perjanjian ini telah diperpanjang pada tanggal 6 Mei 2024 dan akan jatuh tempo tanggal 17 Mei 2025.

MNC

Pada tanggal 15 Juni 2023, MNC memperoleh fasilitas pinjaman dari Bank MNC Internasional dengan pinjaman sebesar Rp12.100 juta. Jangka waktu perjanjian kredit ini berlaku selama 12 (duabelas) bulan sejak tanggal di mulai perjanjian, dengan tingkat bunga 10,5% per tahun dan jatuh tempo pada 15 Juni 2024. Pinjaman ini telah di perpanjang pada tanggal 22 Mei 2024 dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Juni 2025.

Bank JTrust Indonesia

Pada tanggal 29 Maret 2022, Infokom menandatangani perjanjan fasilitas pinjaman kredit rekening koran sebesar Rp10.000 juta dengan PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Bunga yang dikenakan sebesar 10,50% per tahun dan jangka waktu pinjaman 12 (dua belas) bulan dari tanggal ditandatangani fasilitas kredit, dan tidak terdapat batasan-batasan keuangan tertentu. Fasilitas pinjaman dijamin dengan surat jaminan fidusia dengan obyek jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan. Fasilitas pinjaman ini telah diperpanjang pada tanggal 30 Maret 2025 dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2026.

Pada tanggal 29 September 2022, Infokom menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman kredit rekening koran sebesar Rp10.000 juta dengan PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Bunga yang dikenakan sebesar 10,50% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 1 tahun dari tanggal ditandatangani fasilitas kredit, dan tidak terdapat batasan-batasan keuangan tertentu. Fasilitas Pinjaman diatas dijamin dengan surat jaminan fidusia dengan obyek jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan.

Pada tanggal 4 Agustus 2023, Infokom menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman kredit atas permintaan sebesar Rp20.000 juta dengan PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Bunga yang dikenakan sebesar 11% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 1 tahun dari tanggal ditandatangani fasilitas kredit, dan tidak terdapat batasan-batasan keuangan tertentu. Fasilitas Pinjaman diatas dijamin dengan surat jaminan fidusia dengan obyek jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan. Fasilitas pinjaman ini telah diperpanjang pada tanggal 30 Maret 2025 dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2026.

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB)

RCTI

Pada tanggal 11 Oktober 2019, RCTI memperoleh fasilitas kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (BJB). Fasilitas pinjaman ini memiliki batas maksimum sebesar Rp100.000 juta dengan tingkat bunga 11% per tahun. Jangka waktu perjanjian kredit ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal di mulai perjanjian. Pinjaman ini dijamin dengan aset MNC dan penjaminan MNC. Selanjutnya, berdasarkan adendum perjanjian tanggal 15 Oktober 2021, pinjaman tersebut diperpanjang dengan tambahan fasilitas Rp50.000 juta, berlaku selama 12 (dua belas) bulan sampai 16 Oktober 2022 atau fasilitas kredit dinyatakan lunas oleh Bank. Pinjaman ini telah di perpanjang pada tanggal 15 Oktober 2022 dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 Oktober 2023.

Pada tanggal 7 September 2023, RCTI menandatangani adendum perjanjian kredit senilai Rp150.000 juta yang mengubah jangka waktu kredit menjadi 48 (empat puluh delapan) bulan sehingga RCTI mengklasifikasikan pada pinjaman bank dan lembaga keuangan - jangka panjang.

DVN

Pada bulan Juni 2022, DVN menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (BJB) sebesar Rp13.000 juta. Jangka waktu perjanjian kredit ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal dimulai perjanjian.

Perjanjian atas pinjaman ini diperpanjang dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan sampai dengan Juni 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup telah mematuhi rasio keuangan dan batasan-batasan sebagaimana tercantum dalam perjanjian pinjaman yaitu rasio lancar lebih besar dari satu kali dan rasio utang terhadap modal tidak lebih dari satu kali.

Bank Ganesha

Pada tanggal 2 Juni 2021, Infokom menandatangani perjanjian fasilitas Short Term Loan (STL) sebesar Rp13.500 juta dengan PT Bank Ganesha Tbk. Bunga yang dikenakan sebesar 10,50% p.a dengan jangka waktu pinjaman 1 tahun dari tanggal ditandatangani fasilitas kredit, dan tidak terdapat batasan-batasan keuangan tertentu. Fasilitas pinjaman diatas dijamin dengan surat jaminan fidusia dengan objek jaminan berupa Hak Guna Bangunan. Perjanjian ini telah diperpanjang dan akan jatuh tempo pada tanggal 2 Juni 2025.

Bank Central Asia (BCA)

Pada tanggal 24 Juni 2022, RCTI memperoleh fasilitas pinjaman dari BCA maksimal sebesar Rp10.000 juta, jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal dimulai perjanjian. Perjanjian kredit ini telah di perpanjang pada tanggal 26 Juli 2024 dan berlaku selama 12 (duabelas) bulan dengan tingkat bunga 10% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2025 atau fasilitas kredit dinyatakan lunas oleh Bank. Pinjaman ini dijamin dengan tanah seluas 915 m^2 berlokasi di Kebon Jeruk, Jakarta Barat milik entitas anak.

Bank Oke Indonesia

Pada tanggal 31 Januari 2023, Infokom menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman kredit rekening koran sebesar Rp10.000 juta dengan PT Bank Oke Indonesia Tbk. Bunga yang dikenakan sebesar 11% per tahun dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditandatanganinya fasilitas kredit, dan tidak terdapat batasan-batasan keuangan tertentu. Perjanjian ini telah diperpanjang dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2026.

Bank Sinarmas

Pada tanggal 19 Maret 2019, RCTI memperoleh fasilitas kredit dari Bank Sinarmas sebesar Rp400.000 juta dengan tingkat bunga 12% per tahun, dan tidak terdapat batasan-batasan keuangan tertentu.

Jangka waktu perjanjian kredit ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal di mulai perjanjian. Perjanjian kredit ini telah di perpanjang pada tanggal 16 Maret 2024 dan berlaku selama 12 (dua belas) bulan atau fasilitas kredit dinyatakan lunas oleh Bank. Pinjaman tersebut dijamin dengan aset, dan penjaminan MNC.

Pada tanggal 19 September 2024, RCTI telah melunasi fasilitas kredit ini.

2. Utang Usaha

Saldo utang usaha pada tanggal 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Berdasarkan Pemasok	31 Desember 2024
Pihak berelasi	7.271
Pihak ketiga	

TV berbayar dan *broadband*	355.012
Iklan dan konten	40.299
Lainnya	20.677
Subjumlah	415.988
Jumlah	**423.259**

(dalam jutaan Rupiah)

Berdasarkan Mata Uang	**31 Desember 2024**
Rupiah	384.565
Dolar Amerika Serikat	37.521
Lainnya	1.173
Jumlah	**423.259**

Jangka waktu kredit yang timbul dari pembelian program, baik dari pemasok dalam maupun luar negeri, berkisar antara 30 sampai dengan 60 hari.

Tidak ada bunga yang dibebankan pada utang usaha kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan karena pembayaran masih dilakukan dalam periode kredit normal.

3. Utang Pajak

Saldo utang pajak pada tanggal 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2024
Pajak pengasilan	60.269
Pajak pertambahan nilai – bersih	10.826
Jumlah	**71.095**

4. Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan - Jangka Panjang

Rincian saldo liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2024
Bank Mayapada	343.321
Pinjaman Sindikasi	334.583
Bank BJB	255.995
China Development Bank	225.925
Investment Opportunities V Pte. Limited	160.812
Deutsche Bank	155.559
Bank Jtrust Indonesia	147.506
Marymount Road Limited	113.134
Bank Victoria	24.858
Bank Central Asia	14.184
Shinhan Investment Corp.	-
Bank Rakyat Indonesia	-
Jumlah	**1.775.877**
Bagian Jangka Pendek	(808.495)
Bagian Jangka Panjang	**967.382**

Pinjaman bank dan lembaga keuangan - jangka panjang akan dilunasi sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2024
Jatuh tempo dalam setahun	808.495
Pada tahun kedua	530.170
Lebih dari tiga tahun	440.475
Subjumlah	1.779.140
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(3.263)
Jumlah	**1.775.877**

Biaya perolehan diamortisasi atas pinjaman yang diperoleh adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2024
Pinjaman bank dan lembaga keuangan - jangka panjang	1.775.877
Biaya bunga masih harus dibayar	1.606
Jumlah	**1.777.483**

Bank Mayapada

Infokom

Pada tanggal 21 Februari 2022, Infokom telah memperoleh fasilitas Pinjaman Tetap Angsuran (PTA LINE) dari Bank Mayapada sebesar Rp50.000 juta, jangka waktu 60 bulan, dengan tingkat bunga 10% per tahun, dan tidak terdapat batasan-batasan keuangan tertentu. Perjanjian tersebut dijamin dengan aset tetap berupa mesin-mesin.

IPTV

Pada bulan November 2021, IPTV menandatangani fasilitas pinjaman kredit sebesar Rp200.000 juta dengan PT Bank Mayapada Internasional Tbk (Bank Mayapada). Atas fasilitas ini dikenakan bunga 12% per tahun. Pinjaman ini mempunyai jangka waktu 5 tahun dari awal penarikan fasilitas/pinjaman pertama kali, dan tidak terdapat batasan-batasan keuangan tertentu.

MSIN

Pada tanggal 8 April 2021, MSIN, melalui entitas anak telah memperoleh fasilitas Pinjaman Tetap Angsuran (PTA LINE) dari Bank Mayapada sebesar Rp200.000 juta, jangka waktu 120 bulan, dengan tingkat bunga 12% per tahun serta grace period selama 30 bulan ("Perjanjian"), dan tidak terdapat batasan-batasan keuangan tertentu. Perjanjian tersebut dijamin dengan tanah berupa Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh entitas anak.

Pinjaman Sindikasi

Pada tanggal 13 September 2024, RCTI, entitas anak menandatangani perjanjian pinjaman sindikasi dengan (i) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebagai mandated lead arrangers; (ii) PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Kalteng, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT Bank MNC Internasional Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebagai para kreditur sebesar Rp 365.000 juta. Jangka waktu fasilitas pinjaman adalah 36 bulan. Suku bunga pinjaman per tahun adalah 10%. Pinjaman ini dijamin dengan tanah beserta bangunan gedung, tagihan dan persediaan, serta jaminan MNC.

Pemberi Pinjaman	*(dalam jutaan Rupiah)* 31 Desember 2024
PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	68.474
PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara	68.474
PT Bank Kalteng	65.050
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	51.355
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	32.083
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	30.813
PT Bank MNC Internasional Tbk	18.334
Jumlah	**334.583**

Sehubungan dengan pinjaman tersebut, RCTI diwajibkan mempertahankan rasio keuangan dan memenuhi batasan-batasan tertentu sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian Pinjaman. Pada tanggal 31 Desember 2024, RCTI telah memenuhi rasio keuangan dan batasan-batasan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Induk berikut perubahannya.

Bank BJB

IPTV

Pada Desember 2020, IPTV menandatangani fasilitas pinjaman kredit sebesar Rp250.000 juta dengan Bank BJB (BJB). Atas fasilitas ini dikenakan bunga 11% p.a. Pinjaman ini mempunyai jangka waktu 5 tahun dari awal penarikan fasilitas/pinjaman pertama kali.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, saldo rekening yang dibatasi penggunaannya adalah sebesar Rp14.750 juta yang tercatat di dalam akun "bank yang dibatasi penggunaannya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada tahun 2024, IPTV membayar pinjaman kredit investasi sebesar Rp50.000 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, IPTV telah mematuhi rasio keuangan dan batasan-batasan sebagaimana tercantum dalam perjanjian pinjaman, yaitu rasio lancar lebih besar dari satu kali dan *debt service coverage ratio* tidak kurang dari satu kali.

RCTI

Pada tanggal 7 September 2023, RCTI menandatangani adendum perjanjian kredit senilai Rp150,000 juta yang mengubah jangka waktu kredit menjadi 48 (empat puluh delapan) bulan dan tambahan fasilitas kredit sebesar Rp150.000 juta, dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal penandatanganan adendum perjanjian kredit atau fasilitas kredit dinyatakan lunas oleh Bank . Atas fasilitas ini dikenakan bunga 11% p.a.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, RCTI telah mematuhi rasio keuangan dan batasan-batasan sebagaimana tercantum dalam perjanjian pinjaman, yaitu rasio lancar lebih besar dari 1,5 kali debt-to-equity ratio kurang dari 1 kali dan debt service coverage ratio tidak kurang dari 1 kali.

China Development Bank

Pada tanggal 10 Juli 2014, MKM telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dalam kaitannya dengan proyek jaringan serat optic ZTE dan Huawei Tech Investment di Indonesia, dengan China Development Bank (sebagai Pemberi Pinjaman) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (sebagai Security Agent) serta Perusahaan (sebagai Penjamin) dan akan jatuh tempo pada bulan Oktober 2027.

Pada tanggal 17 November 2017, MKM telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman, dalam kaitannya dengan proyek jaringan serat optik ZTE dan Huawei Tech Investment di Indonesia, dengan China Development Bank (sebagai Pemberi Pinjaman, Arranger, Facility Agent) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (sebagai Security Agent). Dalam hal ini, Perusahaan bertindak sebagai penjamin.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, MKM telah mematuhi rasio keuangan dan batasan-batasan sebagaimana tercantum dalam perjanjian pinjaman, yaitu rasio lancar lebih besar dari satu kali, *debt-to-equity ratio* kurang dari tiga kali dan *debt service coverage ratio* lebih besar dari 1,25 kali.

Investment Opportunities V Pte. Limited

Pada tahun 2019, MNCSV menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dengan Investment Opportunities V Pte. Limited dimana MNCSV memperoleh fasilitas pinjaman sebesar US$ 55 juta. Tingkat suku bunga untuk pinjaman ini adalah 8% per tahun yang dibayarkan setiap bulan.

Sampai pada bulan Desember 2024, MNCSV telah melunasi sebagian pinjaman sebesar US$ 45,05 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, saldo rekening yang dibatasi penggunaannya adalah masing-masing sebesar Rp27.784 juta dan Rp29.676 juta yang tercatat di dalam akun "bank yang dibatasi penggunaannya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, MNCSV telah mematuhi rasio keuangan dan batasan-batasan sebagaimana tercantum dalam perjanjian pinjaman, yaitu rasio *leverage* kurang dari 3,5 kali. Dan pinjaman ini bersifat *roll-over* dapat diperpanjang.

Deutsche Bank

BMTR Media Limited (BML)

Pada tanggal 4 Juni 2021, BML, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit dari Deutshe Bank AG, Singapore Branch sebesar US$ 35 juta dengan tingkat bunga Libor 3 bulan + 4,5% per annum dan jatuh tempo pada tanggal 24 Agustus 2022. BML telah melunasi pinjaman ini.

Pada tanggal 22 Agustus 2022, BML, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit dari Deutshe Bank AG, Singapore Branch sebesar US$ 50 juta dengan tingkat bunga SOFR 3 bulan + 5,35% per annum dengan jangka waktu 24 bulan, dan tidak terdapat batasan-batasan keuangan tertentu. Biaya perolehan belum diamortisasi termasuk dalam nilai tercatat pinjaman serta diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 26 Agustus 2024, BML telah melunasi fasilitas kredit dari Deutshe Bank AG, Singapore Branch sebesar US$ 27,5 juta atau setara dengan Rp424.325 juta.

BMTR Digital Limited (BDL)

Pada tanggal 27 Desember 2022, BDL, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit dari Deutshe Bank AG, Singapore Branch sebesar US$ 40 juta dengan tingkat bunga SOFR 3 bulan + 5,35% per annum dengan jangka waktu 24 bulan dan telah diperpanjang hingga 30 Juni 2025, dan tidak terdapat batasan-batasan keuangan tertentu. Biaya perolehan belum diamortisasi termasuk dalam nilai tercatat pinjaman serta diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Saldo pinjaman atas fasilitas pinjaman Deutsche Bank adalah US$ 9.625.000 (setara dengan Rp142.157 juta) pada 31 Desember 2024.

Bank JTrust Indonesia

Pada tanggal 29 Maret 2022, Infokom menandatangani perjanjan fasilitas pinjaman kredit investasi sebesar Rp90.000 juta dengan PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Bunga yang dikenakan sebesar 10,50% p.a. dan jangka waktu pinjaman 8 tahun dari tanggal ditandatangani fasilitas kredit, dan tidak terdapat batasan-batasan keuangan tertentu. Fasilitas pinjaman dijamin dengan surat jaminan fidusia dengan obyek jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan.

Pada tanggal 29 September 2022, Infokom menandatangani perjanjan fasilitas pinjaman kredit investasi sebesar Rp90.000 juta dan fasilitas pinjaman kredit rekening koran sebesar Rp10.000 juta dengan PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Bunga yang dikenakan sebesar 10,50% p.a. dan jangka waktu pinjaman 8 tahun dari tanggal ditandatangani

fasilitas kredit, dan tidak terdapat batasan-batasan keuangan tertentu. Fasilitas pinjaman dijamin dengan surat jaminan fidusia dengan obyek jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan.

Marymount Road Limited

Pada tanggal 4 November 2016, GMI menandatangani perjanjan fasilitas pinjaman sebesar US$ 30 juta dengan Marymount Road Limited (MRL) dengan bunga 1,5% per 90 hari. Pada tanggal 16 Januari 2020, perjanjian fasilitas pinjaman telah di amandemen dan telah diperpanjang. Fasilitas pinjaman di atas dijamin saham entitas anak.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, GMI telah mematuhi rasio keuangan dan batasan-batasan sebagaimana tercantum dalam perjanjian pinjaman, yaitu rasio utang terhadap modal kurang dari dua kali dan rasio EBITDA terhadap beban bunga lebih besar dari empat kali.

Bank Victoria

Pada tanggal 8 Desember 2021, MSIN, memperoleh tambahan fasilitas kredit modal kerja dari Bank Victoria sebesar Rp50.000 juta, jangka waktu 60 bulan, dengan tingkat bunga 10% per tahun ("Perjanjian"), dan tidak terdapat batasan-batasan keuangan tertentu. Perjanjian tersebut dijamin dengan fidusia tagihan dan persediaan yang dimiliki oleh entitas anak.

Bank Central Asia

MKM

Pada tanggal 21 Desember 2018, MKM menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman kredit investasi sebesar Rp50.000 juta.

Pada tahun 2024, MKM membayar pinjaman kredit investasi sebesar Rp392 juta.

DVN

Pada tanggal 14 Juli 2022, DVN memperoleh fasilitas pinjaman dari BCA sebesar Rp17.000 juta, jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal dimulai perjanjian, dengan tingkat bunga 9,25% per tahun.

Pada tanggal 15 Agustus 2023, DVN memperoleh tambahan fasilitas pinjaman sebesar Rp6.000 juta dari BCA. Jangka waktu perjanjian kredit ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal dimulai perjanjian dengan tingkat bunga 8,25% untuk 2 tahun dan pengenaan bunga mengambang pada tahun berikutnya.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup telah mematuhi rasio keuangan dan batasan-batasan sebagaimana tercantum dalam perjanjian pinjaman, yaitu rasio *debt to equity* lebih besar dari empat kali dan *EBITDA to interest* lebih besar dari satu kali.

Shinhan Investment Corp.

Pada tanggal 24 Oktober 2020, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar US$ 20 juta dari Shinhan Investment Corp. (SHIC), dengan tingkat bunga sebesar LIBOR 3 bulan + 2,1% p.a yang akan jatuh tempo dalam 2 tahun dari tanggal utilisasi. Pada tanggal 26 Oktober 2022, Perusahaan melunasi pinjaman dari SIHC sebesar US$ 14.340.774 atau setara dengan Rp223.573 juta.

Pada tanggal 24 Oktober 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar US$ 10 juta dari Shinhan Investment Corp. (SHIC), dengan tingkat bunga sebesar SOFR 3 bulan + 2,85% p.a yang akan jatuh tempo dalam 2 tahun dari tanggal utilisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah mematuhi rasio keuangan dan batasan-batasan sebagaimana tercantum dalam perjanjian pinjaman, yaitu *debt-to-EBITDA ratio* tidak lebih dari tiga kali.

Pada tanggal 24 Oktober 2024, Perusahaan telah melunasi fasilitas pinjaman sebesar US$ 10 juta dari Shinhan Investment Corp. (SHIC).

Bank Rakyat Indonesia

Pada tanggal 20 Desember 2013, MNC memperoleh fasilitas Kredit Investasi (KI) dari Bank Rakyat Indonesia dengan jumlah maksimum sebesar Rp337.000 juta yang terdiri dari Kredit Investasi Pokok sebesar Rp315.000 juta dan Kredit Investasi IDC sebesar Rp22.000 juta dengan tingkat bunga tahun 2017 sebesar 11,5% per tahun dan jangka waktu utang sampai dengan bulan Desember 2024, dan tidak terdapat batasan-batasan keuangan tertentu. Pembayaran pokok pinjaman setiap 3 bulan dan telah diubah dimulai pada bulan Maret 2016 dengan jumlah angsuran tertentu. Pada tanggal 5 November 2020, Perusahaan melakukan kesepakatan restrukturisasi kredit yaitu penundaan pembayaran pokok periode September 2020 sampai dengan Juni 2021 dan memperpanjang waktu kredit selama satu tahun untuk fasilitas KI dan KI IDC.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan hak guna bangunan No. 601 dan No. 867 seluas 5.837 m^2 berlokasi di Kelurahan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Pada tahun 2024, MNC membayar pinjaman kredit investasi sebesar Rp29.530 juta.

5. Utang Obligasi

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2024
Obligasi Berkelanjutan I	
Nilai nominal – Tahap 1	
Seri C	-
Obligasi Berkelanjutan II	
Nilai nominal – Tahap 1	
Seri C	1.075
Nilai nominal – Tahap 2	
Seri B	-
Seri C	10.555
Obligasi Berkelanjutan III	
Nilai nominal – Tahap 1	
Seri B	217.825
Seri C	169.505
Nilai nominal – Tahap 2	
Seri B	139.160
Seri C	36.695
Obligasi Berkelanjutan IV	
Nilai nominal – Tahap 1	
Seri A	-
Seri B	230.260
Seri C	22.330
Nilai nominal – Tahap 2	
Seri A	300.235
Seri B	217.510
Seri C	132.255
Biaya transaksi belum diamortisasi	(7.047)
Subjumlah	1.470.358
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(656.819)
Jumlah bagian jangka panjang	**813.539**

Obligasi dengan Tingkat Bunga Tetap

Obligasi Berkelanjutan I

Perusahaan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom I Tahap 1 Tahun 2017 sebesar Rp850.000 juta dengan tingkat bunga tetap yang terdiri dari 3 seri, yaitu Seri A yang jatuh

tempo pada 7 Juli 2022 (5 tahun) dengan tingkat bunga 11,5% dan Seri B yang jatuh tempo pada 7 Juli 2023 (6 tahun) dengan tingkat bunga 11,75% dan Seri C yang jatuh tempo pada 7 Juli 2024 (7 tahun) dengan tingkat bunga 12%, serta Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom I Tahap 2 sebesar Rp250.000 juta dengan tingkat bunga tetap 11,0% yang jatuh tempo pada 19 September 2020 (3 tahun).

Obligasi ditawarkan 100% dari nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Obligasi dijamin dengan saham entitas anak yang dimiliki Perusahaan dengan nilai 125% dari jumlah yang terutang atas jumlah pokok Obligasi.

Sehubungan dengan penerbitan obligasi, Perusahaan harus memenuhi rasio keuangan dan persyaratan tertentu yang tercantum dalam propektus. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, Perusahaan telah mematuhi persyaratan-persyaratan tersebut.

Biaya perolehan belum diamortisasi termasuk dalam nilai tercatat obligasi serta diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 6 Juli 2022, Perusahaan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom I Tahap 1 Tahun 2017 Seri A sebesar Rp804.800 juta.

Pada tanggal 24 Maret 2023, hasil pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak ketiga, Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom I Tahap 1 Tahun 2017 mempunyai rating $_{id}$A+ (*Single A Plus*) dan telah diperpanjang pada tanggal 15 Maret 2024.

Pada tanggal 7 Juli 2023, Perusahaan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom I Tahap 1 Tahun 2017 Seri B sebesar Rp6.300 juta.

Pada tanggal 7 Juli 2024, Perusahaan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom I Tahap 1 Tahun 2017 Seri C sebesar Rp38.900 juta.

Obligasi Berkelanjutan II

a. Tahap 1

Perusahaan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom II Tahap 1 Tahun 2020 sebesar Rp700.000 juta dengan tingkat bunga tetap yang terdiri dari 3 seri, yaitu Seri A yang jatuh tempo pada 21 September 2021 (370 hari) dengan tingkat bunga 10,75%, Seri B yang jatuh tempo pada 11 September 2023 (3 tahun) dengan tingkat bunga 11,25% dan Seri C yang jatuh tempo pada 11 September 2025 (5 tahun) dengan tingkat bunga 12%. Jumlah biaya transaksi Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom II Tahap 1 Tahun 2020 sebesar Rp5.197 juta diamortisasi setiap bulan sampai dengan jatuh tempo.

Obligasi ditawarkan 100% dari nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Obligasi dijamin dengan saham entitas anak yang dimiliki Perusahaan dengan nilai 125% dari jumlah yang terutang atas jumlah pokok Obligasi.

Sehubungan dengan penerbitan obligasi, Perusahaan harus memenuhi rasio keuangan dan persyaratan tertentu yang tercantum dalam propektus. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah mematuhi persyaratan-persyaratan tersebut.

Biaya perolehan belum diamortisasi termasuk dalam nilai tercatat obligasi serta diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 24 Maret 2023, hasil pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak ketiga, Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom II Tahap 1 Tahun 2020 mempunyai rating $_{id}$A+ (*Single A Plus*) dan telah diperpanjang pada tanggal 4 Maret 2025.

Pada tanggal 11 September 2023, Perusahaan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom II Tahap 1 Tahun 2020 Seri B sebesar Rp367.500 juta.

b. Tahap 2

Perusahaan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom II Tahap 2 Tahun 2021 sebesar Rp700.000 juta dengan tingkat bunga tetap yang terdiri dari 3 seri, yaitu Seri A yang jatuh tempo pada 24 September 2022 (370 hari) dengan tingkat bunga 9,40%, Seri B yang jatuh tempo pada 14 September 2024 (3 tahun) dengan tingkat bunga 10,30% dan Seri C yang jatuh tempo pada 14 September 2026 (5 tahun) dengan tingkat bunga 11%. Jumlah biaya transaksi Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom II Tahap 2 Tahun 2021 sebesar Rp3.780 juta diamortisasi setiap bulan sampai dengan jatuh tempo.

Obligasi ditawarkan 100% dari nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Obligasi dijamin dengan saham entitas anak yang dimiliki Perusahaan dengan nilai 125% dari jumlah yang terutang atas jumlah pokok Obligasi.

Sehubungan dengan penerbitan obligasi, Perusahaan harus memenuhi rasio keuangan dan persyaratan tertentu yang tercantum dalam propektus. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah mematuhi persyaratan-persyaratan tersebut.

Biaya perolehan belum diamortisasi termasuk dalam nilai tercatat obligasi serta diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 23 September 2022, Perusahaan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom II Tahap 2 Tahun 2021 Seri A sebesar Rp669.040 juta.

Pada tanggal 24 Maret 2023, hasil pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak ketiga, Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom II Tahap 2 Tahun 2021 mempunyai rating $_{id}$A+ (*Single A Plus*) dan telah diperpanjang pada tanggal 4 Maret 2025.

Pada tanggal 14 September 2024, Perusahaan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom II Tahap 2 Tahun 2021 Seri B sebesar Rp20.405 juta.

Obligasi Berkelanjutan III

a. Tahap 1

Perusahaan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom III Tahap 1 Tahun 2022 sebesar Rp700.000 juta dengan tingkat bunga tetap yang terdiri dari 3 seri, yaitu Seri A yang jatuh tempo pada 10 Juli 2023 (370 hari) dengan tingkat bunga 8,5%, Seri B yang jatuh tempo pada 5 Juli 2025 (3 tahun) dengan tingkat bunga 10% dan Seri C yang jatuh tempo pada 5 Juli 2027 (5 tahun) dengan tingkat bunga 11%. Jumlah biaya transaksi Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom III Tahap 1 Tahun 2022 sebesar Rp5.413 juta diamortisasi setiap bulan sampai dengan jatuh tempo.

Obligasi ditawarkan 100% dari nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Obligasi dijamin dengan saham entitas anak yang dimiliki Perusahaan dengan nilai 125% dari jumlah yang terutang atas jumlah pokok Obligasi.

Sehubungan dengan penerbitan obligasi, Perusahaan harus memenuhi rasio keuangan dan persyaratan tertentu yang tercantum dalam propektus. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah mematuhi persyaratan-persyaratan tersebut.

Biaya perolehan belum diamortisasi termasuk dalam nilai tercatat obligasi serta diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 24 Maret 2023, hasil pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak ketiga, Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom III Tahap 1 Tahun 2022 mempunyai rating $_{id}$A+ (*Single A Plus*) dan telah diperpanjang pada tanggal 4 Maret 2025.

Pada tanggal 10 Juli 2023, Perusahaan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom III Tahap 1 Tahun 2022 Seri A sebesar Rp312.670 juta.

b. Tahap 2

Perusahaan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom III Tahap 2 Tahun 2022 sebesar Rp600.000 juta dengan tingkat bunga tetap terdiri dari 3 seri, yaitu Seri A yang jatuh tempo pada 21 September 2023 (370 hari) dengan tingkat bunga 8,25%, Seri B yang jatuh tempo pada 16 September 2025 (3 tahun) dengan tingkat bunga 10% dan Seri C yang jatuh tempo pada 16 September 2027 (5 tahun) dengan tingkat bunga 11%. Jumlah biaya transaksi Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom III Tahap 2 Tahun 2022 sebesar Rp4.020 juta diamortisasi setiap bulan sampai dengan jatuh tempo.

Obligasi ditawarkan 100% dari nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Obligasi dijamin dengan saham entitas anak yang dimiliki Perusahaan dengan nilai 125% dari jumlah yang terutang atas jumlah pokok Obligasi.

Sehubungan dengan penerbitan obligasi, Perusahaan harus memenuhi rasio keuangan dan persyaratan tertentu yang tercantum dalam propektus. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telahmematuhi persyaratan-persyaratan tersebut.

Biaya perolehan belum diamortisasi termasuk dalam nilai tercatat obligasi serta diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 24 Maret 2023, hasil pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak ketiga, Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom III Tahap 2 Tahun 2022 mempunyai rating $_{id}$A+ (*Single A Plus*) dan telah diperpanjang pada tanggal 4 Maret 2025.

Pada tanggal 21 September 2023, Perusahaan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom III Tahap 2 Tahun 2022 Seri A sebesar Rp424.145 juta.

Obligasi Berkelanjutan IV

a. Tahap 1

Perusahaan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom IV Tahap 1 Tahun 2023 sebesar Rp850.000 juta dengan tingkat bunga tetap terdiri dari 3 seri, yaitu Seri A yang jatuh tempo pada 16 Juli 2024 (370 hari) dengan tingkat bunga 9,25%, Seri B yang jatuh tempo pada 6 Juli 2026 (3 tahun) dengan tingkat bunga 10,25% dan Seri C sebesar yang jatuh tempo pada 6 Juli 2028 (5 tahun) dengan tingkat bunga 11,25%. Jumlah biaya transaksi Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom IV Tahap 1 Tahun 2023 sebesar Rp6.578 juta diamortisasi setiap bulan sampai dengan jatuh tempo.

Obligasi ditawarkan 100% dari nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Obligasi dijamin dengan saham entitas anak yang dimiliki Perusahaan dengan nilai 125% dari jumlah yang terutang atas jumlah pokok Obligasi.

Sehubungan dengan penerbitan obligasi, Perusahaan harus memenuhi rasio keuangan dan persyaratan tertentu yang tercantum dalam propektus. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah mematuhi persyaratan-persyaratan tersebut.

Biaya perolehan belum diamortisasi termasuk dalam nilai tercatat obligasi serta diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 15 Maret 2024, hasil pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak ketiga, Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom IV Tahap 1 Tahun 2023 mempunyai rating idA+ (Single A Plus) dan telah diperpanjang pada tanggal 4 Maret 2025.

Pada tanggal 16 Juli 2024, Perusahaan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom IV Tahap 1 Tahun 2023 Seri A sebesar Rp597.410 juta.

b. Tahap 2

Perusahaan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom IV Tahap 2 Tahun 2024 sebesar Rp650.000 juta dengan tingkat bunga tetap terdiri dari 3 seri, yaitu Seri A yang jatuh tempo pada 1 Juli 2025 (370 hari) dengan tingkat bunga 8,75%, Seri B yang jatuh tempo pada 21 Juni 2027 (3 tahun) dengan tingkat bunga 10,25% dan Seri C sebesar yang jatuh tempo pada 21 Juni 2029 (5 tahun) dengan tingkat bunga 11%. Jumlah biaya transaksi Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom IV Tahap 2 Tahun 2024 sebesar Rp4.419 juta diamortisasi setiap bulan sampai dengan jatuh tempo.

Obligasi ditawarkan 100% dari nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Obligasi dijamin dengan sebidang tanah dan bangunan beserta sarana pelengkap lainnya seluas 32.901 m^2 yang terletak di Kebon Jeruk, Jakarta dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya 100% dari jumlah yang terutang atas jumlah pokok Obligasi.

Sehubungan dengan penerbitan obligasi, Perusahaan harus memenuhi rasio keuangan dan persyaratan tertentu yang tercantum dalam propektus. Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan telah mematuhi persyaratan-persyaratan tersebut.

Biaya perolehan belum diamortisasi termasuk dalam nilai tercatat obligasi serta diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 4 Maret 2025, hasil pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak ketiga, Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom IV Tahap 2 Tahun 2024 mempunyai rating $_{id}$A+ (*Single A Plus*).

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah mematuhi rasio keuangan dan batasan-batasan yang tercantum dalam prospektus, yaitu rasio utang bersih terhadap modal tidak lebih dari empat kali dan rasio EBITDA terhadap beban bunga tidak kurang dari dua kali.

6. **Utang Sukuk Ijarah**

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember
	2024
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I	
Nilai nominal – Tahap 1	
Seri C	-
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II	
Nilai nominal – Tahap 1	
Seri C	430
Nilai nominal – Tahap 2	
Seri B	-
Seri C	50
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III	
Nilai nominal – Tahap 1	
Seri B	269.630
Seri C	10.210
Nilai nominal – Tahap 2	
Seri B	96.600
Seri C	2.250
Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV	
Nilai nominal – Tahap 1	
Seri A	-
Seri B	442.360
Seri C	15.350
Nilai nominal – Tahap 2	
Seri A	381.705
Seri B	267.130
Seri C	1.165
Biaya transaksi sukuk ijarah yang belum diamortisasi	(6.664)
Subjumlah	1.480.216

	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Desember
	2024
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(746.633)
Jumlah bagian jangka panjang	**733.583**

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I

Perusahaan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom I Tahap 1 Tahun 2017 sebesar Rp250.000 juta yang terdiri dari 3 seri, yaitu Seri A yang jatuh tempo pada 7 Juli 2022 (5 tahun) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp24.500 juta per tahun, Seri B yang jatuh tempo pada 7 Juli 2023 (6 tahun) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp1.645 juta per tahun dan Seri C yang jatuh tempo pada 7 Juli 2024 (7 tahun) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp2.754 juta per tahun, serta Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom I Tahap 2 Tahun 2017 sebesar Rp150.000 juta yang jatuh tempo pada 19 September 2020 (3 tahun) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp16.500 juta per tahun.

Sukuk ditawarkan 100% dari nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sukuk dijamin dengan saham entitas anak yang dimiliki Perusahaan dengan nilai 125% dari jumlah yang terutang atas jumlah pokok Sukuk.

Sehubungan dengan penerbitan sukuk ijarah, Perusahaan harus memenuhi rasio keuangan dan persyaratan tertentu yang tercantum dalam propektus. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, Perusahaan telah mematuhi persyaratan-persyaratan tersebut.

Biaya perolehan belum diamortisasi termasuk dalam nilai tercatat sukuk serta diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 6 Juli 2022, Perusahaan telah melunasi seluruh Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom I Tahap 1 Tahun 2017 Seri A sebesar Rp213.050 juta.

Pada tanggal 24 Maret 2023, hasil pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak ketiga, Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom I Tahap 1 Tahun 2017 mempunyai rating $_{id}A+_{(sy)}$ (*Single A Plus Syariah*) dan telah diperpanjang pada tanggal 15 Maret 2024.

Pada tanggal 7 Juli 2023, Perusahaan telah melunasi Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom I Tahap 1 Tahun 2017 Seri B sebesar Rp14.000 juta.

Pada tanggal 7 Juli 2024, Perusahaan telah melunasi Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom I Tahap 1 Tahun 2017 Seri C sebesar Rp22.950 juta.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan II

a. Tahap 1

Perusahaan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom II Tahap 1 Tahun 2020 sebesar Rp300.000 juta yang terdiri dari 3 seri, yaitu seri A yang jatuh tempo pada 21 September 2021 (370 hari) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp32.032 juta per tahun, Seri B yang jatuh tempo pada 11 September 2023 (3 tahun) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp180 juta per tahun dan Seri C yang jatuh tempo pada 11 September 2025 (5 tahun) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp51,6 juta per tahun. Jumlah biaya transaksi Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom II Tahap 1 Tahun 2020 sebesar Rp2.587 juta diamortisasi setiap bulan sampai dengan jatuh tempo.

Sukuk ditawarkan 100% dari nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sukuk dijamin dengan saham entitas anak yang dimiliki Perusahaan dengan nilai 125% dari jumlah yang terutang atas jumlah pokok Sukuk.

Sehubungan dengan penerbitan sukuk ijarah, Perusahaan harus memenuhi rasio keuangan dan persyaratan tertentu yang tercantum dalam propektus. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah mematuhi persyaratan tersebut.

Biaya perolehan belum diamortisasi termasuk dalam nilai tercatat sukuk serta diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 24 Maret 2023, hasil pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak ketiga, Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom II Tahap 1 Tahun 2020 mempunyai rating $_{id}$A+$_{(sy)}$ (*Single A Plus Syariah*) dan telah diperpanjang pada tanggal 4 Maret 2025.

Pada tanggal 11 September 2023, Perusahaan telah melunasi Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom II Tahap 1 Tahun 2020 Seri B sebesar Rp1.600 juta.

b. Tahap 2

Perusahaan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom II Tahap 2 Tahun 2021 sebesar Rp300.000 juta yang terdiri dari 3 seri, yaitu seri A yang jatuh tempo pada 24 September 2022 (370 hari) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp27.584 juta per tahun, Seri B yang jatuh tempo pada 14 September 2024 (3 tahun) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp670 juta per tahun dan Seri C yang jatuh tempo pada 14 September 2026 (5 tahun) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp6 juta per tahun. Jumlah biaya transaksi Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom II Tahap 2 Tahun 2021 sebesar Rp1.620 juta diamortisasi setiap bulan sampai dengan jatuh tempo.

Sukuk ditawarkan 100% dari nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sukuk dijamin dengan saham entitas anak yang dimiliki Perusahaan dengan nilai 125% dari jumlah yang terutang atas jumlah pokok Sukuk.

Sehubungan dengan penerbitan sukuk ijarah, Perusahaan harus memenuhi rasio keuangan dan persyaratan tertentu yang tercantum dalam propektus. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah mematuhi persyaratan tersebut.

Biaya perolehan belum diamortisasi termasuk dalam nilai tercatat sukuk serta diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 23 September 2022, Perusahaan telah melunasi Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom II Tahap 2 Tahun 2021 Seri A sebesar Rp293.450 juta.

Pada tanggal 24 Maret 2023, hasil pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak ketiga, Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom II Tahap 2 Tahun 2021 mempunyai rating $_{id}$A+$_{(sy)}$ (*Single A Plus Syariah*) dan telah diperpanjang pada tanggal 4 Maret 2025.

Pada tanggal 14 September 2024, Perusahaan telah melunasi Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom II Tahap 2 Tahun 2021 Seri B sebesar Rp6.500 juta.

<u>Sukuk Ijarah Berkelanjutan III</u>

a. Tahap 1

Perusahaan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom III Tahap 1 Tahun 2022 sebesar Rp500.000 juta yang terdiri dari 3 seri, yaitu seri A yang jatuh tempo pada 10 Juli 2023 (370 hari) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp18.714 juta per tahun, Seri B yang jatuh tempo pada 5 Juli 2025 (3 tahun) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp26.963 juta per tahun dan Seri C yang jatuh tempo pada 5 Juli 2027 (5 tahun) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp1.123 juta per tahun. Jumlah biaya transaksi Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom III Tahap 1 Tahun 2022 sebesar Rp3.866 juta diamortisasi setiap bulan sampai dengan jatuh tempo.

Sukuk ditawarkan 100% dari nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sukuk dijamin dengan saham entitas anak yang dimiliki Perusahaan dengan nilai 125% dari jumlah yang terutang atas jumlah pokok Sukuk.

Sehubungan dengan penerbitan sukuk ijarah, Perusahaan harus memenuhi rasio keuangan dan persyaratan yang tercantum dalam propektus. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah mematuhi persyaratan tersebut.

Biaya perolehan belum diamortisasi termasuk dalam nilai tercatat sukuk serta diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 24 Maret 2023, hasil pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak ketiga, Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom III Tahap 1 Tahun 2022 mempunyai rating $_{id}A+_{(sy)}$ (*Single A Plus Syariah*) dan telah diperpanjang pada tanggal 4 Maret 2025.

Pada tanggal 10 Juli 2023, Perusahaan telah melunasi Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom III Tahap 1 Tahun 2022 Seri A sebesar Rp220.160 juta.

b. Tahap 2

Perusahaan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom III Tahap 2 Tahun 2022 sebesar Rp400.000 juta terdiri dari 3 seri, yaitu seri A yang jatuh tempo pada 21 September 2023 (370 hari) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp24.845 juta per tahun, Seri B yang jatuh tempo pada 16 September 2025 (3 tahun) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp9.660 juta per tahun dan Seri C yang jatuh tempo pada 16 September 2027 (5 tahun) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp248 juta per tahun. Jumlah biaya transaksi Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom III Tahap 2 Tahun 2022 sebesar Rp2.680 juta diamortisasi setiap bulan sampai dengan jatuh tempo.

Sukuk ditawarkan 100% dari nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sukuk dijamin dengan saham entitas anak yang dimiliki Perusahaan dengan nilai 125% dari jumlah yang terutang atas jumlah pokok Sukuk.

Sehubungan dengan penerbitan sukuk ijarah, Perusahaan harus memenuhi rasio keuangan dan persyaratan tertentu yang tercantum dalam propektus. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah mematuhi persyaratan tersebut.

Biaya perolehan belum diamortisasi termasuk dalam nilai tercatat sukuk serta diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 24 Maret 2023, hasil pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak ketiga, Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom III Tahap 2 Tahun 2022 mempunyai rating $_{id}A+_{(sy)}$ (*Single A Plus Syariah*) dan telah diperpanjang pada tanggal 4 Maret 2025.

Pada tanggal 21 September 2023, Perusahaan telah melunasi Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom III Tahap 2 Tahun 2022 Seri A sebesar Rp301.150 juta.

<u>Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV</u>

a. Tahap 1

Perusahaan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom IV Tahap 1 Tahun 2023 sebesar Rp850.000 juta yang terdiri dari 3 seri, yaitu seri A yang jatuh tempo pada 16 Juli 2024 (370 hari) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp36.287 juta per tahun, Seri B yang jatuh tempo pada 6 Juli 2026 (3 tahun) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp45.342 juta per tahun dan Seri C yang jatuh tempo pada 6 Juli 2028 (5 tahun) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp1.727 juta per tahun. Jumlah biaya transaksi Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom IV Tahap 1 Tahun 2023 sebesar Rp5.845 juta diamortisasi setiap bulan sampai dengan jatuh tempo.

Sukuk ditawarkan 100% dari nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sukuk dijamin dengan saham entitas anak yang dimiliki Perusahaan dengan nilai 125% dari jumlah yang terutang atas jumlah pokok Sukuk.

Sehubungan dengan penerbitan sukuk ijarah, Perusahaan harus memenuhi rasio keuangan dan persyaratan tertentu yang tercantum dalam propektus. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah mematuhi persyaratan tersebut.

Biaya perolehan belum diamortisasi termasuk dalam nilai tercatat sukuk serta diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 15 Maret 2024, hasil pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak ketiga, Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom IV Tahap 1 Tahun 2023 mempunyai rating $_{id}A+_{(sy)}$ (*Single A Plus Syariah*) dan telah diperpanjang pada tanggal 4 Maret 2025.

Pada tanggal 16 Juli 2024, Perusahaan telah melunasi Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom IV Tahap 1 Tahun 2023 Seri A sebesar Rp392.290 juta.

b. Tahap 2

Perusahaan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom IV Tahap 2 Tahun 2024 sebesar Rp650.000 juta yang terdiri dari 3 seri, yaitu seri A yang jatuh tempo pada 1 Juli 2025 (370 hari) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp33.399 juta per tahun, Seri B yang jatuh tempo pada 21 Juni 2027 (3 tahun) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp27.381 juta per tahun dan Seri C yang jatuh tempo pada 21 Juni 2029 (5 tahun) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp128 juta per tahun. Jumlah biaya transaksi Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom IV Tahap 2 Tahun 2024 sebesar Rp4.419 juta diamortisasi setiap bulan sampai dengan jatuh tempo.

Sukuk ditawarkan 100% dari nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sukuk dijamin dengan sebidang tanah dan bangunan beserta sarana pelengkap lainnya seluas 32.901 m^2 yang terletak di Kebon Jeruk, Jakarta dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya 100% dari jumlah yang terutang atas jumlah pokok Sukuk.

Sehubungan dengan penerbitan sukuk ijarah, Perusahaan harus memenuhi rasio keuangan dan persyaratan tertentu yang tercantum dalam propektus. Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan telah mematuhi persyaratan tersebut.

Biaya perolehan belum diamortisasi termasuk dalam nilai tercatat sukuk serta diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 4 Maret 2025, hasil pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak ketiga, Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom IV Tahap 2 Tahun 2024 mempunyai rating $_{id}A+_{(sy)}$ (*Single A Plus Syariah*).

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah mematuhi rasio keuangan dan batasan-batasan yang tercantum dalam prospektus, yaitu rasio utang bersih terhadap modal tidak lebih dari empat kali dan rasio EBITDA terhadap beban bunga tidak kurang dari dua kali.

7. **Liabilitas Imbalan Kerja**

Imbalan Pasca-kerja

Program Iuran Pasti

Grup telah menerapkan Undang - Undang Cipta Kerja ("UUCK") No. 11/2020 dan peraturan penerapan terkaitnya PP 35/2021 yang diterbitkan di bulan Februari 2021 dalam perhitungan kewajiban imbalan kerja karyawan, kecuali jika peraturan tersebut diatur berbeda di Perjanjian Kerja Bersama.

Pada bulan November 2021, Mahkamah Konstitusi ("MK") menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat. Oleh karena itu, Pemerintah wajib untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja. MK juga menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU Cipta Kerja, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali.

Grup menggunakan UU Cipta Kerja dan peraturan penerapan terkaitnya sebagai basis dalam perhitungan kewajiban imbalan kerja karyawan sampai UU Cipta Kerja dinyatakan tidak berlaku. Grup secara berkelanjutan memantau perkembangan atas putusan MK dan mengevaluasi dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

PSAK 219 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja. PSAK 219 mengharuskan Perusahaan untuk mengakui liabilitas jika karyawan telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan, dan mengakui biaya jika Perusahaan menikmati manfaat ekonomis yang dihasilkan dari jasa yang diberikan oleh karyawan yang berhak memperoleh imbalan kerja.

PSAK 219 mengharuskan penggunaan metode penilaian aktuaria *projected unit credit* untuk menghitung biaya dan kewajiban dari suatu program imbalan pasti. Metode ini mensyaratkan Perusahaan untuk melakukan atribusi atas (nilai sekarang dari) proyek imbalan, melalui jasa karyawan. Atribusi untuk masa kerja periode berjalan akan menghasilkan nilai Biaya Jasa Kini (sebagai komponen biaya dalam laporan Laba Rugi). Sementara itu, atribusi untuk masa kerja periode berjalan dan periode lalu akan menghasilkan Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti (sebagai komponen liabilitas dalam Neraca).

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 410/SK/HT-MCOM/III/2016 tanggal 24 Maret 2016, selain DANAPERA, Grup juga ikut serta dalam program pensiun yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun (BPJSK JP). Besaran iuran BPJSK JP adalah sebesar 2% dari penghasilan dasar karyawan dibayarkan oleh Perusahaan dan 1% dari gaji pokok dibayarkan oleh karyawan. Besaran iuran BPJSK JP tersebut diambil dari porsi iuran DANAPERA.

Beban pensiun Grup yang timbul dari program iuran pasti untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp29.670 juta dan Rp24.862 juta.

Program Imbalan Pasti

Grup, kecuali entitas anak asing, juga membukukan dan menghitung imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan peraturan Grup dan Undang Undang Cipta Kerja No. 11/2020 ("UUCK") yang diterbitkan di bulan Februari 2021.

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti risiko investasi, risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain

Grup memberikan imbalan kerja jangka panjang lain berupa cuti besar kepada karyawan yang memenuhi persyaratan ditentukan berdasarkan pada masa kerja. Imbalan ini didasarkan pada masa kerja.

Beban imbalan kerja yang diakui di laba rugi komprehensif atas imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lain adalah:

(dalam jutaan Rupiah)

	2024		
	Imbalan pasca-kerja	**Imbalan kerja jangka panjang lainnya**	**Jumlah**
Diakui pada laba (rugi)			
Biaya jasa kini	16.068	1.185	17.253
Biaya jasa lalu dan keuntungan atas penyelesaian	(29.757)	(279)	(30.036)
Beban bunga neto	12.731	346	13.077
Keuntungan (kerugian)aktuaria	(29)	81	52
Komponen dari biaya imbalan pasti yang diakui dalam laba rugi	**(987)**	**1.333**	**346**
Diakui pada penghasilan komprehensif lain:			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti – neto			
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul:			
dari perubahan asumsi keuangan	(139)	72	(67)
dari penyesuaian atas pengalaman	11.324	249	111.573
Komponen beban imbalan pasti yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	**11.185**	**321**	**11.506**
Jumlah	**10.198**	**1.654**	**11.852**

Jumlah tercatat di laporan posisi keuangan konsolidasian yang timbul dari liabilitas terkait dengan imbalan kerja selain pensiun iuran pasti adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember
	2024
Imbalan pasca-kerja	227.128
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	(8.847)
Jumlah	**218.281**

Mutasi nilai kini kewajiban pada tahun berjalan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	2024		
	Imbalan pasca-kerja	**Imbalan kerja jangka panjang lainnya**	**Jumlah**
Kewajiban imbalan pasti – awal	227.980	(10.051)	217.479
Biaya jasa kini	16.068	1.185	17.253
Biaya bunga	12.731	346	13.077
Keuntungan aktuarial	(29)	81	52
Pengukuran kembali (keruntungan)/kerugian:			
Kentungan dan kerugian aktuarial yang:			
timbul dari perubahan asumsi keuangan	(139)	72	(67)
timbul dari penyesuaian atas pengalaman	11.324	249	11.573
Biaya jasa lalu, termasuk kerugian (keuntungan) dari kurtailmen	(29.757)	(279)	(30.036)
Pembayaran manfaat	(11.050)	-	(11.050)
Jumlah	**227.128**	**(8.847)**	**218.281**

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode laporan, dengan semua asumsi lain konstan.

Asumsi	31 Desember 2024
Usia pensiun normal	55
Tingkat mortalita	TMI IV/2019
Tingkat sakit	% of Martality Rate
Tingkat diskonto	6,63 – 7,21%
Tingkat kenaikan gaji	5,50 – 6,50%

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

8. Ikatan dan Perjanjian Signifikan

Grup mengadakan ikatan dan perjanjian signifikan dengan pihak sebagai berikut:

1. Pada tahun 2023, MKM telah menandatangani perjanjian dengan PT Asianet Media Teknologi, para pihak sepakat melakukan penjualan dan pengalihan atas Aset MNC Play dengan nilai Rp2.423.336 juta.
2. Pada tahun 2023, MKM telah menandatangani perjanjian dengan PT Indosat Tbk, para pihak sepatkat melakukan pengalihan atas Aset Pelanggan MNC Play dengan nilai Rp876.865 juta.
3. Pada tanggal 23 Mei 2023, Perusahaan telah menandatangani akta No. 86 dari Aulia Taufani, S.H., notaris di Jakarta, mengenai perjanjian pengikatan jual beli atas tanah milik Perusahaan dan telah menandatangani akta jual beli No. 16, 17, 18, 19 dan 20 pada tanggal 14 Agustus 2023 dari Andalia Farida, S.H., M.H., PPAT di Jakarta.
4. Perjanjian International Licensing Agreement dengan Associated Press Television News Ltd., (APTN) pada tanggal 16 Maret 2020 yang berlaku efektif dari 1 Juli 2019 hingga 30 Juni 2024. Amandemen perjanjian lisensi tertanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 30 Juni 2027.
5. Perjanjian antara PT Nielsen Audience Measurement (“Nielsen”) dengan PT Media Nusantara Citra Tbk mewakili perusahaan-perusahaan terafiliasi-nya yaitu PT Rajawali Citra Televisi Indonesia, PT MNC Televisi Indonesia, PT Global Informasi Bermutu, PT MNC Televisi Network, PT Mediate Indonesia dan PT MNC Pictures, pada tanggal 25 Juli 2019, dan telah beberapa kali diaddendumkan terakhir tertanggal 5 April 2023 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 yang diperpanjang otomatis secara bulanan, kecuali disepakati lain oleh para pihak.
6. Perjanjian Lisensi dengan Asian Football Confederation (“AFC”) pada tanggal 29 Oktober 2019 untuk 14 (empat belas) kompetisi yang diselenggarakan oleh AFC, dimana kompetisi pertama akan diadakan pada tahun 2021 dan kompetisi terakhir akan diadakan pada tahun 2024. Perjanjian ini berlaku efektif dari tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan 30 (tiga puluh) hari setelah pertandingan final dari kompetisi terakhir yang diselenggarakan oleh AFC.Perjanjian dengan CJ E&M untuk beberapa musim program I Can See Your Voice Indonesia yang berlaku efektif sejak tahun 2016 dan berakhir antara tahun 2021 dan 2028.
7. Perjanjian lisensi dengan Endemol Shine International Limited (“Endemol”) untuk program Masterchef Indonesia Seri 7 yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025. Endemol

dalam perjanjian ini digantikan oleh Banijay Rights Limited berdasarkan perjanjian novasi tanggal 1 Oktober 2020 dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 2020.

8. Perjanjian lisensi dengan Banijay Rights Limited untuk program Masterchef Indonesia Seri 8 pada tanggal 23 Desember 2020 yang berlaku efektif dari tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2025, dan Seri 9 pada tanggal 8 Desember 2021, yang berlaku efektif dari tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2026.
9. Perjanjian lisensi antara Sports News Television Management Limited (SNTV) dengan PT Media Nusantara Citra Tbk mewakili perusahaan-perusahaan terafiliasi-nya yaitu PT MNC Vision Networks Tbk, PT MNC Televisi Network and PT MNC Pictures pada tanggal 15 Maret 2019 yang berlaku efektif dari tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025.
10. Amandemen Perjanjian Lisensi Format dengan ITV Studios Global Entertainment B.V. (dahulu Talpa Global B.V.) untuk beberapa program seperti The Voice Indonesia dan The Voice Kids Indonesia yang berlaku efektif sejak 2022 dan berakhir tahun 2027.
11. Perjanjian dengan PT Dunia Visitama Produksi (Freemantle Media Ltd) untuk beberapa program seperti Indonesian Idol, Family 100 dan *The Price is Right* yang berlaku efektif sejak tahun 2020 dan berakhir tahun 2028.
12. Perjanjian dengan CJ E&M untuk beberapa musim program I Can See Your Voice Indonesia yang berlaku efektif sejak tahun 2016 dan berakhir antara tahun 2021 dan 2028.
13. Perjanjian Lisensi dengan Banijay Rights Limited untuk program Masterchef Indonesia Seri 10 dan Seri 11 pada tanggal 14 Juli 2022 dan 28 Agustus 2023 yang berlaku efektif dari tanggal 1 Oktober 2022 dan 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2027 dan 31 Juli 2028.
14. Perjanjian Lisensi dengan Banijay Rights Limited untuk program Masterchef Indonesia Junior Seri 3 pada tanggal 13 Juli 2022 yang berlaku efektif dari tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2027.
15. Perjanjian Lisensi Program ”32nd SEA GAMES - CAMBODIA 2023” tertanggal 27 Februari 2023, berlaku sampai dengan 8 Oktober 2025.
16. Perjanjian Lisensi Program ”19th ASIAN GAMES HANGZHOU 2023” tertanggal 3 Maret 2023, berlaku sampai dengan 14 April 2025.
17. Perjanjian Lisensi Program Acara “Paket 27 Film Paramount” tertanggal 13 Juli 2023, berlaku sampai dengan 31 Oktober 2025.
18. Amandemen Perjanjian Lisensi “Nickelodeon” tertanggal 1 Juli 2023, berlaku sampai dengan 30 September 2025;
19. Perjanjian Lisensi Program Acara Paket Pertandingan Sepakbola AFC 2025-2029, berlaku sampai dengan 2029.
20. Sehubungan dengan peluncuran jasa penyiaran digital langsung oleh MNCSV dan penjualan dekoder digital, MNCSV melakukan perjanjian terpisah dengan:
    - Beberapa bank, sesuai dengan perjanjian, pelanggan dapat melakukan pembayaran menggunakan debet langsung untuk rekening pelanggan di bank tersebut. Sebagai imbalannya, MNCSV setuju untuk membayar biaya administrasi kepada bank.
    - Beberapa *retailer*, dimana MNCSV setuju untuk membayar komisi kepada pengecer sebagaimana diatur dalam perjanjian sesuai dengan paket acara yang dipilih oleh pelanggan.
    - Beberapa perusahaan instalasi, dimana MNCSV menunjuk beberapa perusahaan untuk memasang dekoder digital agar pelanggan dapat menerima dan menyaksikan acara televisi yang ditawarkan oleh MNCSV. Sebagai imbalannya, MNCSV setuju untuk membayar biaya pemasangan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian.
21. MKM mengadakan perjanjian dengan berbagai pemasok program untuk menyalurkan program. MKM harus membayar kompensasi tertentu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam masing-masing perjanjian dengan setiap pemasok.
22. PT Digital Vision Nusantara (”DVN”) mengadakan perjanjian dengan berbagai penyedia program untuk menyalurkan program. DVN harus membayar kompensasi tertentu sesuai ketentuan yang tercantum dalam masing-masing perjanjian dengan setiap penyedia program.
23. PT Digital Vision Nusantara (”DVN”) mengadakan perjanjian dengan berbagai penyedia program untuk menyalurkan program. DVN harus membayar kompensasi tertentu sesuai ketentuan yang tercantum dalam

masing-masing perjanjian dengan setiap penyedia program. DVN juga telah mengadakan kesepakatan dengan PT Telkom Satelit Indonesia untuk pengadaan satelit tambahan sampai dengan tahun 2030.

24. DVN mengadakan perjanjian dengan PT Indosat, Tbk. dan PT Telkom Satelit Indonesia dengan kompensasi tertentu untuk penyediaan layanannya.
25. DVN mengadakan perjanjian dengan PT Citra Global Media Nusantara untuk kerjasama penyediaan perangkat dekoder, dimana atas setiap pembelian dekoder oleh DVN, DVN harus memberikan kompensasi tertentu kepada penyedia perangkat. Perjanjian penyediaan ini berlaku selama satu tahun sampai dengan 31 Desember 2024.
26. Pada tahun 2024, MNC, entitas anak, memperoleh fasilitas pembiayaan modal kerja sebesar Rp47.900 juta dengan bunga 15,75% per tahun, melalui skema *factoring without recourse* dari PT MNC Finance.

TIDAK ADA PINJAMAN YANG DITERIMA OLEH PERSEROAN DAN/ATAU ENTITAS ANAK YANG MATERIAL DAN/ATAU UNTUK KEPENTINGAN YANG MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS.

SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAKNYA PER TANGGAL 31 DESEMBER 2024 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN DARI TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAKNYA, SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAKNYA DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini serta dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia dan Peraturan nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (KPS) *member of "Nexia International" network* dengan Opini Tanpa Modifikasian dalam laporan yang diterbitkan kembali tanggal 15 Mei 2025. Audit dilaksanakan sesuai dengan Standard Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Florus Daeli, SE., Ak., M.M., CPA., ASEAN CPA., CA., CRA., CLI (Rekan pada KAP KPS dengan Ijin AP No. 0126).

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas		
Pihak berelasi	853.462	1.468.247
Pihak ketiga	559.690	528.861
Aset keuangan lainnya – lancar	2.673.962	654.657
Piutang usaha – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai		
Pihak berelasi	22.931	21.943
Pihak ketiga	3.656.822	3.460.001
Piutang lain-lain – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai		
Pihak berelasi	78.079	90.115
Pihak ketiga	430.694	415.529
Persediaan	4.123.302	4.068.295
Uang muka	1.052.789	919.710
Biaya dibayar dimuka	172.571	215.502
Pajak dibayar dimuka	89.217	79.867
Jumlah Aset Lancar	**13.713.519**	**11.922.727**
ASET TIDAK LANCAR		
Aset pajak tangguhan – bersih	818.541	763.775
Uang muka investasi	834.688	1.271.721
Investasi pada entitas asosiasi	731.120	738.583
Aset keuangan lainnya – tidak lancar	1.037.741	752.805

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Properti investasi – bersih	9.845	10.637
Aset hak guna – bersih	73.242	93.649
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan	11.219.221	11.408.463
Goodwill	3.807.953	3.803.237
Aset tak berwujud – bersih	2.205.533	2.087.140
Tanah untuk pengembangan	825.154	825.154
Aset lain-lain	967.215	1.590.411
Jumlah Aset Tidak Lancar	**22.530.253**	**23.345.575**
JUMLAH ASET	**36.243.772**	**35.268.302**
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang bank	1.311.959	1.316.404
Utang usaha		
Pihak berelasi	7.271	6.562
Pihak ketiga	415.988	375.812
Utang lain-lain		
Pihak berelasi	15.264	13.606
Pihak ketiga	111.735	171.751
Pendapatan diterima dimuka	11.225	13.281
Utang pajak	71.095	84.494
Biaya masih harus dibayar	82.625	17.281
Uang muka pelanggan	6.331	14.668
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun		
Pinjaman bank dan lembaga keuangan - jangka panjang	808.495	1.298.860
Liabilitas sewa	27.717	32.390
Utang obligasi	656.819	658.368
Utang Sukuk Ijarah	746.633	423.605
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**4.273.157**	**4.427.082**
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabiitas pajak tangguhan – bersih	108.961	101.516
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		
Pinjaman bank dan lembaga keuangan - jangka panjang	967.382	1.176.932
Liabilita sewa/liabilitas sewa pembiayaan	49.359	50.530
Utang obligasi	813.539	817.464
Utang Sukuk Ijarah	733.583	827.293
Liabilitas imbalan kerja	218.281	217.479
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**2.891.105**	**3.191.214**
JUMLAH LIABILITAS	**7.164.262**	**7.618.296**

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
EKUITAS		
Modal saham		
Modal ditempatkan dan disetor	1.658.400	1.658.400
Tambahan modal disetor	1.810.189	1.810.189
Transaksi ekuitas dan perubahan ekuitas entitas anak	(456.864)	(666.428)
Penghasilan komprehensif lain	217.737	216.475
Saldo laba		
Ditentukan penggunaannya	16.000	15.000
Tidak ditentukan penggunaannya	13.431.856	12.895.457
Jumlah	16.677.318	15.929.093
Dikurangi harga perolehan saham diperoleh Kembali	(347.895)	(347.895)
Jumlah Ekuitas yang diatribusikan kepada pemiliki entitas induk	16.329.423	15.581.198
Kepentingan non-pengendali	12.750.087	12.068.808
JUMLAH EKUITAS	**29.079.510**	**27.650.006**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**36.243.772**	**35.268.302**

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
PENDAPATAN	**10.059.317**	**10.163.157**
BEBAN POKOK PENDAPATAN	**6.019.583**	**6.175.305**
LABA KOTOR	**4.039.734**	**3.987.852**
Beban umum dan administrasi	(2.299.985)	(2.425.012)
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing – bersih	(16.948)	1.371
Beban keuangan	(799.686)	(767.430)
Penghasilan bunga	52.479	54.748
Lain-lain - bersih	65.008	235.151
LABA SEBELUM PAJAK	**1.040.602**	**1.086.680**
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**(123.382)**	**(18.938)**
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	**917.220**	**1.067.742**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN – TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(3.109)	(7.153)

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	591	1.359
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dari kegiatan usaha luar negeri	3.780	(6.832)
Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak	**1.262**	**(12.626)**
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**918.482**	**1.055.116**
LABA YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	537.399	677.552
Kepentingan non-pengendali	379.821	390.190
Laba bersih tahun berjalan	**917.220**	**1.067.742**
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	538.661	664.926
Kepentingan non-pengendali	379.821	390.190
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	**918.482**	**1.055.116**
LABA PER SAHAM DASAR		
(dalam Rupiah penuh)	32,9	41,4

Rasio-Rasio Keuangan Konsolidasian Penting

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Rasio Usaha		
Laba Sebelum Pajak/Pendapatan	10,34%	10,69%
Laba Bersih Tahun Berjalan/ Pendapatan	9,12%	10,51%
Laba Bersih Tahun Berjalan/Jumlah Ekuitas	3,15%	3,86%
Laba Bersih Tahun Berjalan/Jumlah Aset	2,53%	3,03%
Pendapatan/Jumlah Aset	27,75%	28,82%
Rasio Keuangan		
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	3,21x	2,69x
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	0,25x	0,28x
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	0,20x	0,22x
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)[(1)]	0,69x	0,70x
Net Debt to Equity Ratio	0,16x	0,17x
Interest Service Coverage Ratio (ISCR)[(2)]	4,07x	4,72x
Rasio Pertumbuhan		
Pendapatan	-1,02%	-16,92%
Laba Bersih Tahun Berjalan	-14,10%	-48,19%
Jumlah Aset	2,77%	-1,79%
Jumlah Liabilitas	-5,96%	-17,76%

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Jumlah Ekuitas	5,17%	3,76%

Catatan:
(1) DSCR = EBITDA terhadap bunga pinjaman dan pokok pinjaman yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun = Laba sebelum bunga dan pajak / Bunga + Pokok pinjaman
(2) ISCR = EBITDA terhadap beban bunga = Laba sebelum bunga dan pajak / Beban bunga

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit Atau Liabilitas Lainnya dan Pemenuhannya

Keterangan	Persyaratan Keuangan	31 Desember	
		2024	2023
Net Debt to Equity Ratio	Maksimal 4x	0,16x	0,17x
Interest Service Coverage Ratio (ISCR)	Minimal 2x	4,07x	4,72x
Debt to EBITDA	Maksimal 3x	2,06x	2,15x

Penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah oleh Perseroan tidak akan menyebabkan terlanggarnya ketentuan dalam perjanjian kredit yang ada, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai rasio keuangan, serta tidak mengakibatkan pelanggaran terhadap financial covenants yang berlaku dalam perjanjian-perjanjian tersebut.

Perseroan menyatakan bahwa hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mematuhi seluruh ketentuan dan persyaratan keuangan (*financial covenants*) sebagaimana tercantum dalam perjanjian utang dengan para kreditur dan/atau Pemegang Obligasi dan Sukuk, termasuk namun tidak terbatas pada rasio-rasio keuangan yang disyaratkan.

SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam Bab ini harus dibaca bersama-sama dengan "Ikhtisar Data Keuangan Penting" dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini. Informasi yang disajikan di Bab ini menyajikan analisis dan pembahasan manajemen yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus ini dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia dan Peraturan nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (KPS) *member of "Nexia International" network* dengan Opini Tanpa Modifikasian dalam laporan yang diterbitkan kembali tanggal 15 Mei 2025. Audit dilaksanakan sesuai dengan Standard Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Florus Daeli, SE., Ak., M.M., CPA., ASEAN CPA., CA., CRA., CLI (Rekan pada KAP KPS dengan Ijin AP No. 0126).

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

A. UMUM

Perseroan merupakan tranformasi dari PT Bimantara Citra Tbk yang berdiri sejak 30 Juni 1981 dengan fokus awal meliputi penyelenggaraan bisnis multimedia, penyiaran, telekomunikasi, infrastruktur, transportasi & otomotif, kimia, hotel & properti, jasa keuangan dan kegiatan investasi lainnya. Perubahan nama dan logo dari PT Bimantara Citra Tbk menjadi Perseroan yang dilakukan pada tahun 2007 setelah sebelumnya melakukan *Initial Public Offering* (IPO) pada tahun 1995 dengan pencatatan saham di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya dengan kode saham BMTR. Sejak itu Perseroan mulai fokus mengembangkan bisnis medianya dengan mendirikan MNCN untuk menangani bisnis media berbasis iklan & konten dan IPTV untuk menangani bisnis media berbasis berlangganan dan *fixed broadband* & IPTV. Dengan perubahan struktur bisnis utama melalui beberapa Entitas Anak milik Perseroan, manajemen memutuskan untuk melakukan *rebranding* menjadi MNC Media untuk merepresentasikan bisnis Perseroan yang dijalankan, agar dapat mencerminkan integrasi layanan media yang lengkap, dari media konvensional dan digital di bawah naungan Perseroan.

B. ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN LABA RUGI

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
ASET		
Aset Lancar	13.713.519	11.922.727
Aset Tidak Lancar	22.530.253	23.345.575
JUMLAH ASET	36.243.772	35.268.302
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek	4.273.157	4.427.082
Liabilitas Jangka Panjang	2.891.105	3.191.214
JUMLAH LIABILITAS	7.164.262	7.618.296
JUMLAH EKUITAS	29.079.510	27.650.006

Jumlah Aset

Saldo pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2023

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp36.243.772 juta atau naik sebesar Rp975.470 juta atau 2,77% dibandingkan dengan 31 Desember 2023 yang sebesar Rp35.268.302 juta.

Aset Lancar

Saldo pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2023

Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp13.713.519 juta atau naik sebesar Rp1.790.792 juta atau 15,02% dibandingkan dengan 31 Desember 2023 yang sebesar Rp11.922.727 juta. Peningkatan aset lancar ini terutama disebabkan karena kenaikan aset keuangan lancar lainnya.

Aset Tidak Lancar

Saldo pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2023

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp22.530.253 juta atau turun sebesar Rp815.322 juta atau 3,49% dibandingkan dengan 31 Desember 2023 yang sebesar Rp23.345.575 juta. Penurunan aset tidak lancar ini terutama disebabkan karena penjualan atas aset MNC Play.

Jumlah Liabilitas

Saldo pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2023

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp7.164.262 juta atau turun sebesar Rp454.034 juta atau 5,96% dibandingkan dengan 31 Desember 2023 yang sebesar Rp7.618.296 juta. Penurunan total liabilitas ini terutama disebabkan karena penurunan liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini.

Liabilitas Jangka Pendek

Saldo pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2023

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp4.273.157 juta atau turun sebesar Rp153.925 juta atau 3,48% dibandingkan dengan 31 Desember 2023 yang sebesar Rp4.427.082 juta. Penurunan liabilitas jangka pendek ini terutama disebabkan karena penurunan atas pinjaman bank dan lembaga keuangan - jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun.

Liabilitas Jangka Panjang

Saldo pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2023

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp2.891.105 juta atau turun sebesar Rp300.109 juta atau 9,40% dibandingkan dengan 31 Desember 2023 yang sebesar Rp3.191.214 juta. Penurunan liabilitas jangka panjang ini terutama disebabkan karena pembayaran atas pinjaman bank dan lembaga keuangan - jangka panjang.

Jumlah Ekuitas

Saldo pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2023

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp29.079.510 juta atau naik sebesar Rp1.429.504 juta atau 5,17% dibandingkan dengan 31 Desember 2023 yang sebesar Rp27.650.006 juta. Peningkatan total ekuitas ini terutama disebabkan karena perolehan laba bersih konsolidasian Perseroan.

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Pendapatan	10.059.317	10.163.157
Laba Kotor	4.039.734	3.987.852
Laba Bersih Tahun Berjalan	917.220	1.067.742

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	918.482	1.055.116

Pendapatan

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp10.059.317 juta atau turun sebesar Rp103.840 juta atau 1,02% dibandingkan dengan 31 Desember 2023 yang sebesar Rp10.163.157 juta. Penurunan pendapatan dari lini usaha berbasis TV berbayar dan broadbandberdampak pada penurunan pendapatan Perseroan. Perseroan akan melakukan berbagai strategi bisnis untuk meningkatkan penjualan pada kelompok usaha media berbasis konten dan iklan dan kelompok usaha media berbasis pelanggan sebagaimana diungkapkan dalam sub-bab I-2 Bab VIII Prospektus ini untuk meningkatkan pendapatan kedepannya.

Laba Kotor

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

Laba kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp4.039.734 juta atau naik sebesar Rp51.882 juta atau 1,30% dibandingkan dengan 31 Desember 2023 yang sebesar Rp3.987.852 juta. Peningkatan laba kotor terutama disebabkan oleh penurunan beban pokok pendapatan.

Laba Bersih Tahun Berjalan

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

Laba bersih tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp917.220 juta atau turun sebesar Rp150.522 juta atau 14,10% dibandingkan dengan 31 Desember 2023 yang sebesar Rp1.067.742 juta. Penurunan keuntungan dari penjualan *fixed asset* berdampak pada penurunan laba bersih tahun berjalan Perseroan.

Upaya yang dilakukan Perseroan untuk meningkatkan laba bersih kedepannya adalah:
1. Perseroan akan melakukan berbagai strategi bisnis untuk meningkatkan penjualan sebagaimana yang dijelaskan diatas.
2. Menurunkan biaya bunga kedepannya dengan cara menerbitkan obligasi dan sukuk dengan penjaminan CGIF sehingga rating Obligasi dan Sukuk naik dari A+ menjadi AAA.

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp918.482 juta atau turun sebesar Rp136.634 juta atau 12,95% dibandingkan dengan 31 Desember 2023 yang sebesar Rp1.055.116 juta. Penurunan laba komprehensif tahun berjalan terutama disebabkan oleh penurunan laba bersih seperti yang telah dijelaskan di atas.

C. RASIO KEUANGAN

a. Rasio Likuiditas

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Rasio ini terdiri dari *Cash Ratio* dan *Current Ratio*. *Cash Ratio* didapat dengan

membandingkan antara kas dengan liabilitas lancar. Sedangkan untuk *Current Ratio* didapat dengan membandingkan antara aset lancar dengan liabilitas lancar.

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Cash Ratio (%)	33,07%	45,11%
Current Ratio (%)	320,92%	269,31%

Cash ratio Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 33,07% dan 45,11%. Penurunan *cash ratio* tersebut disebabkan karena penurunan kas dan setara kas sebesar 29,24% atau sebesar Rp583.956 juta serta penurunan liabilitas lancar sebesar 3,48% atau sebesar Rp153.925 juta.

Current ratio Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 320,92% dan 269,31%. Kenaikan *current ratio* tersebut disebabkan karena kenaikan aset lancar sebesar 15,02% atau sebesar Rp1.790.792 juta.

b. Rasio Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan untuk membayar kembali liabilitas pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang yang sudah jatuh tempo menggunakan aset yang dimiliki. Dalam perhitungan solvabilitas ini dikenal rasio-rasio keuangan seperti: rasio liabilitas terhadap ekuitas, rasio liabilitas terhadap aset dan *gearing ratio*.

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Jumlah Liabilitas/ Jumlah Ekuitas (%)	24,64%	27,55%
Jumlah Liabilitas/ Jumlah Aset (%)	19,77%	21,60%
Gearing ratio (x)	0,16x	0,17x
Debt Service Coverage Ratio (x)	0,69x	0,70x

Rasio liabilitas terhadap ekuitas adalah tingkat perbandingan jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas. Rasio liabilitas terhadap ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 24,64% dan 27,55%. Penurunan rasio liabilitas terhadap ekuitas disebabkan karena penurunan jumlah liabilitas dan kenaikan jumlah ekuitas seperti yang telah dijelaskan di atas.

Rasio liabilitas terhadap aset adalah perbandingan antara seluruh liabilitas dengan jumlah aset. Rasio liabilitas terhadap aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 19,77% dan 21,60%. Penurunan rasio liabilitas terhadap aset disebabkan karena penurunan jumlah liabilitas dan kenaikan jumlah aset seperti yang telah dijelaskan di atas.

Gearing ratio adalah ratio jumlah kewajiban yang mengandung beban bunga (pinjaman & surat berharga yang diterbitkan) dibandingkan dengan jumlah ekuitas Perseroan. *Gearing ratio* untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 0,16x dan 0,17x. Penurunan *gearing ratio* tersebut disebabkan karena penurunan pinjaman bank dan lembaga keuangan - jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun, penurunan pinjaman bank dan lembaga keuangan - jangka panjang, dan kenaikan jumlah ekuitas seperti yang telah dijelaskan di atas.

Debt Service Coverage Ratio ("DSCR") merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan pokok pinjaman menggunakan arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi.

Risiko terkait nilai DSCR < 1,0x adalah Perseroan menghadapi risiko ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan pokok pinjaman sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan**.**

Sebagaimana telah disampaikan pada tabel diatas, DSCR Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 tercatat sebesar 0,69x. Namun demikian, angka DSCR tersebut mencerminkan kondisi konservatif, di mana seluruh kewajiban pembayaran pokok pinjaman termasuk kewajiban yang sejatinya akan dilunasi melalui penerbitan instrumen baru atau diperpanjang (*rollover*) diperhitungkan sebagai pengeluaran kas aktual pada periode berjalan.

Apabila dilakukan penyesuaian berdasarkan rencana strategis Perseroan yang telah disusun dan dapat diandalkan, maka DSCR Perseroan secara proforma menjadi 1,5x, dengan mempertimbangkan dua faktor utama berikut:

1. Refinancing Melalui Penerbitan Instrumen Baru
   Perseroan akan melunasi seluruh pokok Obligasi dan Sukuk Ijarah yang akan jatuh tempo melalui hasil penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025, sehingga pembayaran pokok atas kewajiban tersebut tidak akan menjadi beban kas operasi pada tahun berjalan.
2. Perpanjangan (*Rollover*) Utang Bank Jangka Pendek
   Sejumlah fasilitas pinjaman jangka pendek yang saat ini dimiliki oleh Perseroan memiliki klausul perpanjangan (*rollover*) yang telah disepakati dengan pihak perbankan, sesuai perjanjian kredit yang berlaku. Dengan demikian, dalam hal dilakukan *rollover*, maka pembayaran atas pokok utang tersebut tidak akan direalisasikan dalam periode berjalan, dan tidak seharusnya dihitung sebagai beban kas operasional dalam perhitungan DSCR aktual.

Dengan memperhitungkan kedua skenario di atas, maka posisi keuangan dan likuiditas Perseroan yang sebenarnya mencerminkan kemampuan yang memadai dalam memenuhi seluruh kewajiban keuangan, baik atas pokok maupun bunga pinjaman. Oleh karena itu, DSCR Perseroan secara proforma yang lebih mencerminkan kondisi riil pelunasan utang telah berada di atas batas minimal 1,0x, yang umum digunakan sebagai indikator kemampuan pembayaran utang.

Untuk memitigasi risiko terkait DSCR, Perseroan telah dan akan terus mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan Kinerja Operasional
   Melalui optimalisasi proses bisnis dan penguatan lini usaha utama, Perseroan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan memperbaiki arus kas operasi.
2. Efisiensi Biaya dan Pengendalian Beban Usaha
   Perseroan secara berkelanjutan melakukan evaluasi terhadap struktur biaya guna meningkatkan margin dan memperkuat posisi keuangan.
3. Diversifikasi Sumber Pembiayaan
   Perseroan menjajaki berbagai alternatif pembiayaan jangka pendek dan jangka menengah yang dapat digunakan apabila arus kas internal tidak mencukupi.
4. Proyeksi dan Pengelolaan Arus Kas yang Ketat
   Perseroan melakukan proyeksi arus kas secara berkala dan memastikan ketersediaan dana yang memadai untuk memenuhi seluruh kewajiban keuangan.

c. Rasio Profitabilitas

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Return on Asset (ROA) – (%)	2,53%	3,03%
Return on Equity (ROE) – (%)	3,15%	3,86%

** Jumlah kewajiban yang mengandung beban bunga dibagi dengan ekuitas*

Tingkat pengembalian aset (*Return On Asset*) menunjukan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba periode berjalan dari operasi yang dilanjutkan dari aset yang dimiliki Perseroan. Tingkat pengembalian aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 2,53% dan 3,03%. Penurunan ROA Perseroan disebabkan karena penurunan pendapatan kondolidasian dan laba bersih tahun berjalan seperti yang telah dijelaskan di atas.

Tingkat pengembalian ekuitas (*Return On Equity*) menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba periode berjalan dari operasi yang dilanjutkan dari ekuitas yang ditanamkan. Tingkat pengembalian ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 3,15% dan 3,86%. Penurunan ROE Perseroan disebabkan karena penurunan pendapatan kondolidasian dan laba bersih tahun berjalan seperti yang telah dijelaskan di atas.

D. LAPORAN ARUS KAS

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan laporan arus kas Perseroan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	9.858.132	10.164.545
Pembayaran kas kepada pemasok	(6.043.469)	(6.640.935)
Pembayaran kas kepada karyawan	(1.004.139)	(1.010.155)
Kas dihasilkan dari operasi	2.810.524	2.513.455
Beban bunga dan pajak penghasilan	(912.706)	(939.597)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	1.897.818	1.573.858
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan bunga	52.479	54.748
Pengurangan (penambahan) uang muka investasi, aset keuangan lainnya dan aset lainnya	(1.338.064)	1.388.398
Kas bersih yang diperoleh pada saat akuisisi	26.288	-
Penambahan aset tetap dan aset hak guna	(1.146.131)	(1.489.782)
Hasil pelepasan aset tetap	282.562	393.531
Penurunan aset takberwujud	(259.120)	(254.463)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(2.381.986)	92.432
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penambahan utang bank	927.640	360.972
Pembayaran utang bank	(950.381)	(30.306)
Penerimaan pinjaman bank dan lembaga keuangan - jangka panjang	365.000	154.920
Pembayaran pinjaman bank dan lembaga keuangan - jangka panjang	(1.117.097)	(1.542.083)
Pembayaran liabilitas sewa/ sewa pembiayaan	(7.516)	(7.516)
Penerimaan utang obligasi	650.000	850.000
Penerimaan utang Sukuk Ijarah	650.000	850.000
Pelunasan utang obligasi	(656.715)	(1.110.615)
Pelunasan utang Sukuk Ijarah	(421.740)	(536.910)
Setoran modal pemegang saham pada entitas anak	461.021	-
Pembayaran dividen entitas anak pada kepentingan non-pengendali	-	(34.548)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(99.788)	(1.046.086)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**(583.956)**	**620.204**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	1.997.108	1.376.904
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**1.413.152**	**1.997.108**

Arus Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Operasi

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

Nilai aliran arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.897.818 juta meningkat sebesar Rp323.960 juta atau 20,58% dibandingkan pada 31 Desember 2023 yang sebesar Rp1.573.858 juta. Peningkatan arus kas dari aktivitas operasi ini terutama disebabkan oleh kenaikan kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi.

Arus Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

Nilai aliran arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar minus Rp2.381.986 juta menurun sebesar Rp2.474.418 juta atau minus 2677,01% dibandingkan pada 31 Desember 2023 yang sebesar Rp92.432 juta. Penurunan arus kas dari aktivitas investasi ini terutama disebabkan oleh penambahan uang muka investasi, aset keuangan lainnya, dan aset lainnya.

Arus Kas Bersih diperoleh dari Aktivitas Pendanaan

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

Nilai aliran arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(99.788) juta meningkat sebesar Rp946.298 juta atau 90,46% dibandingkan pada 31 Desember 2023 yang sebesar Rp(1.046.086) juta. Peningkatan arus kas dari aktivitas pendanaan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang bank.

Pola Arus Kas Dikaitkan Dengan Karakteristik dan Siklus Bisnis Perseroan

Tidak terdapat pola arus kas tertentu yang terkait dengan karakteristik dan siklus bisnis Perseroan.

E. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Likuiditas dalam perusahaan pembiayaan merupakan gambaran dan kemampuan Perseroan dalam hal mengelola perputaran arus kas dalam jangka pendek, terdiri dari arus kas masuk (*cash inflow*) ataupun arus kas keluar (*cash outflow*).

Arus kas masuk Perseroan yang utama diperoleh dari penerimaan kas pelanggan yang termasuk dalam sumber likuiditas secara internal. Sedangkan secara eksternal, arus kas masuk Perseroan yang utama didapat dari pinjaman bank, penerbitan obligasi, dan sukuk. Arus kas keluar Perseroan yang utama adalah pembayaran kas kepada pemasok serta pembayaran pinjaman dari bank maupun obligasi dan sukuk.

Perseroan mengelola likuiditasnya melalui kebijakan keuangan yang terpusat dan konsisten khususnya dalam hal penyelarasan waktu antara sumber pendanaan dengan piutang pihak ketiga.

Sumber pendanaan Perseroan pada tahun 2024 berasal dari pinjaman bank serta penerbitan obligasi dan sukuk.

Pada saat prospektus ini diterbitkan, tidak dapat permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Sumber likuiditas Perseroan terutama berasal dari pinjaman bank serta penerbitan surat utang. Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan. Sejauh ini, tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan dan komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Perseroan menyatakan memiliki modal kerja yang cukup.

Dalam hal apabila modal kerja Perseroan tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya untuk mencukupi kebutuhan modal kerja.

Pada saat prospektus ini diterbitkan, tidak ada pembatasan terhadap kemampuan Enititas Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

F. OPERASIONAL PER SEGMEN OPERASI

Perseroan membagi segmen operasinya menjadi 2 (dua) bagian, yaitu Iklan dan konten dan TV berbayar dan *broadband.* Berikut ini adalah kinerja masing-masing segmen operasi Perseroan.

Rincian pendapatan menurut segmen operasi adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			
	2024		2023	
	Nilai (Rp)	Kontribusi (%)	Nilai (Rp)	Kontribusi (%)
Iklan dan konten	8.067.789	80,20%	7.783.253	76,58%
TV Berbayar dan *broadband*	1.677.699	16,68%	2.079.475	20,46%
Lainnya	313.829	3,12%	300.429	2,96%
Jumlah Pendapatan	**10.059.317**	**100,00%**	**10.163.157**	**100,00%**

Pendapatan Berdasarkan Segmen Operasi

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan dari iklan dan konten Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp8.067.789 juta atau naik sebesar Rp284.536 juta atau 3,66% dibandingkan dengan 31 Desember 2023 yang sebesar Rp7.783.253 juta. Kenaikan pendapatan ini disebabkan karena kenaikan pendapatan dari konten dan IP.

Pendapatan dari TV berbayar dan broadband Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp1.677.699 juta atau naik sebesar Rp401.776 juta atau 19,32% dibandingkan dengan 31 Desember 2023 yang sebesar Rp2.079.475 juta. Penurunan pendapatan ini disebabkan karena divestasi bisnis fixed broadband di akhir tahun 2023. Divestasi ini merupakan strategi bisnis untuk lebih fokus pada pengembangan bisnis berupa video dan konten, daripada fixed broadband yang merupakan industri padat modal.

Pendapatan lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp313.829 juta atau naik sebesar Rp13.400 juta atau 4,46% dibandingkan dengan 31 Desember 2023 yang sebesar Rp300.429 juta. Kenaikan pendapatan ini disebabkan karena kenaikan pendapatan dari bisnis *Information and Communication Technology* (ICT).

Rincian pendapatan menurut segmen geografis adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			
	2024		2023	
	Nilai (Rp)	Kontribusi (%)	Nilai (Rp)	Kontribusi (%)
Indonesia	10.054.779	99,95%	10.163.157	100,00
Malaysia	4.538	0,05%	-	0,00
Jumlah	**10.059.317**	**100,00**	**10.163.157**	**100,00**

Pendapatan Berdasarkan Segmen Geografis

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan menurut segmen geografis Indonesia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp10.054.779 atau turun sebesar Rp108.378 juta atau 1,07% dibandingkan dengan 31 Desember 2023 yang sebesar

Rp10.163.157 juta. Penurunan pendapatan ini disebabkan karena penurunan pendapatan dari TV berbayar dan broadband yang diakibatkan oleh divestasi bisnis fixed broadband di akhir tahun 2023 seperti yang telah dijelaskan di atas.

Pendapatan menurut segmen geografis Malaysia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp4.538 atau naik sebesar Rp4.538 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2023 yang sebesar Rp0. Kenaikan pendapatan ini disebabkan karena akuisisi sebuah perusahaan yang beroperasi di Malaysia pada tahun 2024. Akuisisi ini dilakukan dengan tujuan untuk perluasan aktivitas Grup pada media TV berbayar dan broadband di Malaysia.

G. BELANJA MODAL

Pembelian aset tetap yang dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2024 dan 2023 berturut - turut adalah sebesar Rp1.135.887 juta dan Rp1.451.545 juta. Investasi tersebut dilakukan untuk memperkuat posisi aset tetap Perseroan. Pembelian aset tetap secara umum dibiayai oleh internal kas dan/ataupun pinjaman dari bank/lembaga keuangan lainnya. Sebelum dilakukan pembelian aset, Perseroan selalu meminta jaminan purna jual sesuai dengan kriteria masing-masing aset. Seluruh pembelian aset ini dalam rangka memenuhi kebutuhan investasi barang modal seperti pembelian ruko dan gudang, pembangunan jaringan distribusi, pembelian peralatan penyiaran, dan kebutuhan operasional lainnya seperti untuk meningkatkan jumlah dan kualitas produksi konten dan jangkauan penyiaran. Tidak terdapat Investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

Dalam melakukan pembelian barang modal, Perseroan dan Entitas Anak telah mempertimbangkan fungsi dan tujuan pembelian barang modal tersebut. Tujuan pembelian barang modal tersebut terutama adalah untuk meningkatkan pendapatan Perseroan dan Entitas Anak. Dengan adanya pertimbangan tersebut, Perseroan dan Entitas Anak menjadi lebih selektif dalam melakukan pembelian barang modal sehingga tidak terdapat masalah yang tidak sesuai dengan tujuan pembelian. Tidak terdapat sanksi terhadap komitmen investasi barang modal ini. Investasi barang modal ini bertujuan untuk peningkatan operasional Perseroan.

H. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Rincian aset dan liabilitas Perseroan dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

		31 Desember			
		2024		2023	
		Mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rupiah (jutaan Rupiah)	Mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rupiah (jutaan Rupiah)
Aset moneter					
Kas dan setara kas	US$	1.903.106	30.758	2.198.690	33.895
	Lainnya		7.323		6.053
Aset keuangan lainnya – lancar	US$	1.719.121	27.784	1.925.000	29.676
Piutang usaha	US$	3.186.425	51.499	3.499.481	53.948
Piutang lain-lain	US$	1.003.279	16.215	1.105.150	17.037
Aset lain-lain	US$	1.243.225	20.093	1.245.070	19.194
Jumlah aset moneter			153.672		159.803
Liabilitas moneter					
Utang bank	US$	23.500.000	379.807	-	-
Utang usaha	US$	2.321.557	37.521	4.401.920	67.860
	Lainnya		1.173		2.870
Utang lain-lain	US$	7.591.449	122.693	7.986.897	123.126
Biaya yang masih harus dibayar	US$	199.666	3.227	162.494	2.505
Uang muka pelanggan	US$	205.668	3.324	377.404	5.818
Pinjaman bank dan lembaga keuangan - jangka panjang	US$	40.553.803	655.431	92.128.803	1.420.258
Jumlah liabilitas moneter			1.203.176		1.622.634

	31 Desember			
	2024		2023	
	Mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rupiah (jutaan Rupiah)	Mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rupiah (jutaan Rupiah)
Liabilitas Moneter Bersih		**(1.049.504)**		**(1.462.634)**

- **Aset Moneter**

Saldo pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2023

Jumlah aset moneter Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah setara Rp153.672 juta atau turun sebesar Rp6.131 juta atau 38,36% dibandingkan dengan 31 Desember 2023 yang sebesar setara Rp159.803 juta. Penurunan jumlah aset moneter ini terutama disebabkan karena penurunan kas di bank dalam dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

- **Liabilitas Moneter**

Saldo pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas moneter Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah setara Rp1.049.504 juta atau turun sebesar Rp413.130 juta atau 28,85% dibandingkan dengan 31 Desember 2023 yang sebesar setara Rp1.462.634 juta. Penurunan jumlah liabilitas moneter ini terutama disebabkan karena pembayaran pinjaman bank dan lembaga keuangan - jangka panjang dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

I. MANAJEMEN RISIKO

1. Manajemen Risiko Keuangan

Fungsi *Corporate Group Treasury* adalah menyediakan jasa untuk bisnis, mengkoordinasikan akses ke pasar keuangan domestik dan internasional, memantau dan mengelola risiko keuangan yang berkaitan dengan operasi Perseroan dan Entitas Anak melalui laporan risiko internal yang menganalisis eksposur dengan derajat dan besarnya risiko. Risiko ini termasuk risiko pasar (termasuk risiko mata uang, risiko suku bunga dan risiko harga lainnya), risiko kredit, risiko likuiditas.

Perseroan dan Entitas Anak berusaha untuk meminimalkan dampak dari risiko dengan menggunakan instrumen keuangan derivatif untuk lindung nilai terhadap eksposur risiko. Penggunaan derivatif keuangan diatur oleh kebijakan Perseroan dan Entitas Anak yang disetujui oleh dewan direksi, yang memberikan prinsip-prinsip tertulis pada risiko nilai tukar, risiko suku bunga, risiko kredit, penggunaan derivatif keuangan dan instrumen derivatif non-keuangan, dan investasi atas kelebihan likuiditas. Kepatuhan terhadap batasan kebijakan dan eksposur ditinjau oleh auditor internal secara terus menerus. Perseroan dan Entitas Anak tidak melaksanakan atau memperdagangkan instrumen keuangan, termasuk instrumen keuangan derivatif,untuk tujuan spekulasi.

Fungsi *Corporate Treasury* melaporkan setiap triwulanan kepada komite manajemen risiko Grup, sebuah badan independen yang memantau risiko dan kebijakan yang diterapkan untuk mengurangi eksposur risiko.

A. Risiko Pasar

Industri media di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang berkesinambungan dari tahun ke tahun, dengan pertumbuhan ekonomi negara yang positif, ditandai oleh konsumsi domestik yang kuat dan kenaikan dalam profil investasi. Tantangan dalam sektor industri televisi adalah rencana untuk berpindah dari analog ke digital, yang mungkin terjadi secara bertahap.

Manajemen menyadari tantangan dan perkembangan yang ada dan terus memperhatikan perkembangan industri dalam rencana tahunan dan jangka panjang. Pertumbuhan pendapatan yang kuat dan peningkatan pangsa pasar penonton, digabungkan dengan fokus manajemen pada pengendalian biaya untuk mengingatkan kompetitif di industri serta terus meningkatkan teknologi, kompetensi sumber daya manusia dan proses bisnis.

B. Risiko Mata Uang Asing

Sebagian pembelian program dan peralatan siaran menggunakan nilai tukar mata uang asing, terutama mata uang dolar Amerika Serikat, dalam transaksinya. Hampir semua penempatan deposito dalam mata uang asing adalah bersifat *on call* dan bersifat jangka pendek. Dengan demikian, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki risiko atas fluktuasi mata uang asing.

Perseroan dan Entitas Anak mengelola risiko mata uang asing sebagai berikut:

- Perseroan dan Entitas Anak memanfaatkan peluang harga pasar nilai tukar mata uang lainnya (*multi-currency*) untuk menutup kemungkinan risiko melemahnya nilai tukar fungsional dan begitu sebaliknya, sehingga secara natural risiko adanya pergerakan nilai tukar uang non-fungsional bisa saling menghilangkan. Transaksi valuta mata uang biasa dilakukan dengan selalu mempertimbangkan kurs yang menguntungkan Perseroan dan Entitas Anak.
- Perseroan dan Entitas Anak mengatur risiko dengan berusaha menyeleraskan penerimaan dan pembayaran untuk setiap jenis mata uang.
- MSKY telah melakukan negosiasi ulang dengan sebagian besar pemasok konten program, dimana kedua belah pihak sepakat untuk setiap pembayaran kewajiban baik yang masih *outstanding* maupun tagihan baru selama masa *licensing period*, menggunakan nilai tukar tetap yang disepakati.

C. Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko tingkat bunga adalah risiko di mana nilai wajar arus kas di masa depan akan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga pasar. Perseroan dan Entitas Anak terpengaruh risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dengan suku bunga mengambang.

Perseroan dan Entitas Anak mengelola risiko ini dengan mempertahankan komposisi yang tepat antara tingkat suku bunga mengambang dan bunga tetap dan melakukan pinjaman dari pihak yang dapat memberikan tingkat suku bunga yang lebih rendah dari bank lain.

Selain itu, Perseroan dan Entitas Anak melakukan negosiasi dalam pinjaman dengan persyaratan yang fleksibel untuk mengelola risiko tingkat bunga, Perseroan dan Entitas Anak memiliki kebijakan dalam memperoleh pembiayaan dalam Rupiah dengan tingkat bunga bank yang rendah, *back to back* deposito dan pinjaman yang akan memberikan *spread* bunga yang kecil serta jangka waktu pinjaman yang lebih fleksibel sehingga dapat dilakukan pelunasan segera apabila tingkat bunga meningkat tinggi.

Pinjaman terkena dampak risiko suku bunga termasuk dalam risiko likuiditas dan tingkat suku bunga.

D. Risiko Kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko rekanan gagal dalam memenuhi liabilitas kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Perseroan dan Entitas Anak. Risiko kredit Perseroan dan Entitas Anak terutama melekat pada piutang usaha, simpanan bank, investasi jangka pendek dan investasi lainnya. Risiko kredit pada simpanan bank dan investasi jangka pendek diperhitungkan minimal karena ditempatkan dengan institusi keuangan terpercaya yang telah memiliki catatan yang baik. Investasi lain dan piutang usaha pihak ketiga ditempatkan pada pihak ketiga yang terpercaya dan memiliki catatan yang baik.

Eksposur Perseroan dan Entitas Anak dan *counterparties* dimonitor secara terus-menerus dan nilai agregat transaksi terkait tersebar di antara counterparties yang telah disetujui. Eksposur kredit dikendalikan oleh batasan (*limit*) *counterparty* yang direviu dan disetujui oleh komite manajemen risiko secara tahunan.

Risiko kredit pada piutang usaha adalah risiko bahwa Perseroan dan Entitas Anak akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak lawan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Tidak ada risiko kredit yang terpusat secara signifikan. Perseroan dan Entitas Anak mengelola dan mengendalikan risiko kredit pada piutang usaha dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk pelanggan individu dan memantau eksposur terkait dengan batasan-batasan tersebut.

Perseroan dan Entitas Anak melakukan hubungan usaha hanya dengan pihak ketiga yang diakui dan kredibel. Manajemen Perseroan dan Entitas Anak menetapkan peninjauan secara mingguan dan bulanan pada umur piutang dan penagihan untuk membatasi jika tidak untuk menghilangkan risiko kredit. Sesuai dengan kebijakan manajemen Perseroan dan Entitas Anak, media order pelanggan (agensi) akan dikenakan status "Hold" untuk yang telah melewati batas jatuh tempo.

Perseroan dan Entitas Anak mempunyai jaminan uang terhadap beberapa piutang usaha individu yang tercatat sebagai uang muka pelanggan dalam liabilitas jangka pendek.

Perseroan dan Entitas Anak juga memiliki aset keuangan lainnya yang diklasifikasikan sebagai FVTPL dan AFS. Aset keuangan lainnya FVTPL sebagian besar berupa reksadana yang dikelola oleh pihak berelasi yang merupakan manajemen investasi dengan peringkat kredit tinggi yang dinilai oleh lembaga pemeringkat kredit internasional, sehingga tidak menimbulkan eksposur risiko kredit yang signifikan.

Perseroan dan Entitas Anak juga memiliki aset keuangan lainnya FVTPL berupa dana kelolaan dan aset keuangan lainnya AFS berupa obligasi konversi dan obligasi wajib tukar, dimana penempatannya dilakukan dengan persetujuan dari Dewan Direksi dan dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada pada umumnya. Manajemen juga berperan aktif untuk memantau perkembangan riwayat kreditnya dan tidak mengharapkan *counterparty* gagal memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, aset keuangan lainnya yang timbul dimonitor terus-menerus untuk mengurangi eksposur risiko kredit.

Selanjutnya untuk menghindari kegagalan pembayaran dari sisi pelanggan, Perseroan dan Entitas Anak mengoptimalkan penggunaan pembayaran dengan kartu kredit dan fasilitas pembayaran auto-debet dari bank untuk menghasilkan pembayaran otomatis. Perseroan dan Entitas Anak juga memiliki Reminder Team yang berada di bawah Departemen Collection untuk membantu mengingatkan pelanggan atas kewajiban pembayaran berkala mereka.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai mencerminkan eksposur Perseroan dan Entitas Anak terhadap risiko kredit.

E. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko saat posisi arus kas Perseroan dan Entitas Anak menunjukkan bahwa pendapatan jangka pendek tidak cukup menutupi pengeluaran jangka pendek.

Industri media adalah industri yang *cash intensive* dan mensyaratkan tersedianya dana yang signifikan setiap saat. Risiko likuiditas dalam industri media di Indonesia bisa timbul karena adanya ketidakcocokan antara penerimaan uang dari pelanggan (agensi) dan pembayaran atas pembelian atau memproduksi program.

Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada manajemen, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak. Perseroan dan Entitas Anak mengelola risiko likuiditas dengan memelihara cadangan yang memadai, fasilitas perbankan dan fasilitas pinjaman cadangan, dengan terus memantau arus kas perkiraan dan actual, dan dengan cara mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Dalam mengelola risiko likuiditas, Perseroan dan Entitas Anak secara *prudent* memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perseroan dan Entitas Anak dan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas. Perseroan dan Entitas Anak juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang jangka panjang mereka, dan terus menelaah kondisi pasar keuangan untuk mengambil inisiatif penggalangan.

2. Manajemen Risiko Permodalan

Tujuan utama Perseroan dan Entitas Anak mengelola risiko modal adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha, melanjutkan keberlangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Struktur modal Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari pinjaman dan ekuitas pemegang saham induk.

Perseroan dan Entitas Anak mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, bila diperlukan, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dan Entitas Anak dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, pengembalian modal kerja kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses untuk manajemen risiko modal pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Manajemen Perseroan secara berkala melakukan reviu struktur permodalan Perseroan dan Entitas Anak. Sebagai bagian dari reviu ini, manajemen mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan. Kebijakan Perseroan dan Entitas Anak adalah tetap mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

Gearing ratio pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali gearing ratio)

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pinjaman	6.115.486	6.601.846
Kas dan Bank	1.413.152	1.997.108
Pinjaman – Bersih	4.702.334	4.604.738
Ekuitas	29.079.510	27.650.006
Gearing ratio	**16,17%**	**16,65%**

J. IKHTISAR PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Perubahan Kebijakan Akuntansi Dalam 2 (dua) Tahun Terakhir

Tidak ada perubahan kebijakan akuntansi dalam 2 (dua) tahun terakhir yang berdampak pada kegiatan usaha Perseroan.

Standar Akuntansi Baru

Efektif 1 Januari 2020, Perusahaan telah menerapkan PSAK 71 – Instrumen Keuangan PSAK 72 – Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, dan PSAK 73 – Sewa. Dampak atas penerapan PSAK 71 dan PSAK 72, Perseroan mengakui efek kumulatif dari aplikasi pertama sebagai penyesuaian pada saldo awal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya pada tanggal 1 Januari 2020. Dampak atas penerapan PSAK 73, Perseroan mengakui aset hak guna.

K. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA

Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah memberlakukan ASO secara bertahap dimulai pada bulan November 2022 di kawasan Jabodetabek.

Penerapan ASO ini berdampak secara langsung terhadap keberlangsungan unit usaha FTA TV Perseroan, dimana implementasi ini berpengaruh terhadap perilaku pengiklan untuk beriklan di FTA TV. Sebagaimana tercantum pada laporan keuangan Perseroan, pendapatan non-digital atau FTA TV turun sebesar 22,17% YoY pada tahun 2024 dibanding dengan tahun 2023.

Mayoritas dari pengiklan menerapkan pendekatan "*wait and see*" untuk dapat melihat dampak terhadap penurunan penonton atas pemberlakuan ASO. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Perseroan secara konsisten terus melakukan inisiasi dan pengembangan pada platform digitalnya, sehingga terdapat konversi belanja iklan dalam grup dari media FTA TV terhadap media digital Perseroan yang tumbuh sebesar 4,21% YoY menjadi Rp2.663 miliar pada tahun 2024.

Perseroan memiliki pandangan, dengan makin luasnya implementasi ASO, Perseroan yakin bahwa pendapatan dari digital akan melampaui pendapatan FTA TV dalam beberapa tahun kedepan dan pendapatan dari digital memiliki marjin yang lebih tinggi daripada media konvensional seperti FTA TV.

L. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal atau perubahan penting dalam ekonomi yang berdampak langsung maupun tidak langsung secara material dan signifikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.

M. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Jumlah pinjaman bank dan surat utang yang masih terutang per 31 Desember 2024 dengan analisis jatuh tempo pinjaman sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	< 1 tahun	1 – 5 tahun	> 5 tahun	Jumlah
Pinjaman jangka pendek	1.311.959	-	-	-
Pinjaman bank dan lembaga keuangan - jangka panjang	808.495	967.382	-	-
Utang obligasi - bersih	656.819	813.539	-	-
Utang sukuk ijarah - bersih	746.633	733.583	-	-
Jumlah	3.523.906	2.514.507	-	-

Informasi lebih lanjut mengenai fasilitas pinjaman dari perbankan dan surat utang dapat dilihat pada Bab III Prospektus ini mengenai Pernyataan Utang.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Selain itu, Efek yang diterbitkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini juga memiliki risiko investasi bagi investor. Beberapa potensi risiko di bawah ini dapat mempengaruhi usaha serta laba yang dihasilkan Perseroan, yang diurutkan berdasarkan bobot dari yang tertinggi hingga bobot yang terendah sebagai berikut:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Sebagai Perusahaan Induk

Sebagai perusahaan induk, Perseroan memiliki ketergantungan terhadap kegiatan dan pendapatan usaha dari Entitas Anak, terutama dari lini usaha penyiaran dan televisi berlangganan. Tidak terdapat jaminan bahwa Entitas Anak milik Perseroan akan selalu memberi kontribusi laba secara berkesinambungan. Apabila kegiatan usaha Entitas Anak mengalami penurunan, maka akan berpengaruh pada kinerja dan prospek Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. **Risiko Investasi**

   Usaha di bidang Investasi sangat dipengaruhi oleh faktor internal seperti kemampuan manajemen dalam bidang pengelolaan investasi, manajemen risiko dan kebijakan strategi dan faktor eksternal seperti kondisi perekonomian di Indonesia. Apabila investasi dilakukan pada perusahaan yang tidak menguntungkan atau apabila kondisi perekonomian Indonesia tidak kondusif, maka akan mempengaruhi pendapatan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

2. **Risiko Operasional**

   Risiko operasional dalam menjaga efektifitas dari sistem, prosedur dan kontrol di dalam lingkungan Perseroan dan Entitas Anaknya yang dapat mempengaruhi operasi dalam memproduksi, transaksi usaha, pembukuan dan laporan. Banyaknya Entitas Anak dan kurangnya pengawasan terhadap operasional Entitas Anak dapat menyebabkan Entitas Anak merugi sehingga berpengaruh terhadap pendapatan Perseroan dan Entitas Anak.

3. **Risiko Persaingan Usaha**

   Risiko persaingan usaha dapat mempengaruhi kinerja akibat perubahan preferensi konsumen, perubahan teknologi baru, dan munculnya pemain-pemain baru di industri media yang dapat menarik minat konsumen. Perseroan dan Entitas Anak mungkin tidak dapat menangkal setiap aksi dari pesaing seperti masuknya pemain baru dengan modal besar, produk baru ke pasar, perubahan keinginan pelanggan, tren demografi, kondisi ekonomi nasional dan internasional dan strategi pesaing untuk memberikan diskon dan strategi pemasaran lainnya. Jika hal ini terjadi tidak menutup kemungkinan dapat berdampak terhadap kinerja dan keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

4. **Risiko Perubahan Teknologi**

   Industri media tidak lepas dari risiko perkembangan teknologi. Teknologi berkembang semakin mutakhir seiring dengan kebutuhan konsumen. Perseroan dan Entitas Anak berkeyakinan telah menggunakan teknologi yang terbaru. Namun demikian, kelalaian dalam mencermati perkembangan teknologi pada platform yang dimiliki saat ini maupun dalam menganalisis kebutuhan akan teknologi baru yang lebih efisien dapat menyebabkan penurunan tingkat kepuasan pelanggan. Hal tersebut tentunya dapat mengakibatkan beralihnya pelanggan kepada perusahaan media lainnya. Jika hal ini terjadi maka akan berdampak pada reputasi dan kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

5. **Risiko Penurunan Belanja Iklan**

   Pendapatan terbesar Entitas Anak diperoleh dari pendapatan iklan dengan rata-rata kontribusi terhadap pendapatan usaha untuk tiga tahun terakhir lebih dari 95%. Tidak ada jaminan yang pasti bahwa media periklanan milik Entitas Anak akan menjadi pilihan mengingat meningkatnya persaingan di antara media periklanan yang timbul karena perkembangan dan bentuk-bentuk baru media iklan. Hal ini dapat berdampak terhadap kemampuan Entitas Anak untuk mempertahankan dan mengembangkan pendapatan iklan.

6. **Risiko Persaingan Program**
Entitas Anak memperoleh program-program televisi yang populer dari pihak ketiga, terutama untuk program sport. Persaingan untuk memperoleh lisensi atas program sport populer dari pihak ketiga sangat ketat, Entitas Anak berpotensi untuk tidak mendapatkan atau mempertahankan hak untuk menyiarkan program yang populer apabila tidak mampu mempertahankan kualitas pelayanan atau standar yang telah ditetapkan dalam memperoleh hak penyiaran. Hal tersebut dapat berdampak terhadap kemampuan Entitas Anak untuk menghasilkan pendapatan dan laba.

7. **Risiko Kegagalan atau Kerusakan pada Fasilitas-Fasilitas Penting**
Setiap stasiun televisi, radio, TV Berlangganan milik Entitas Anak menggunakan fasilitas-fasilitas studio, pemancar, dan uplink yang dapat rusak atau hancur karena kebakaran, gempa bumi, badai besar, kehilangan tenaga, kegagalan telekomunikasi, tindakan teroris, dan kejadian-kejadian lainnya. Kegagalan atau kerusakan pada fasilitas-fasilitas tersebut dapat secara material memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha dan hasil operasi Entitas Anak.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Perekonomian secara Makro
Kondisi perekonomian global juga berpengaruh terhadap kinerja berbagai perusahaan di Indonesia, termasuk juga bagi Perseroan dan Entitas Anak. Penguatan ataupun pelemahan perekonomian di suatu negara akan memberikan dampak secara langsung terhadap permintaan dan penawaran atau daya beli yang terjadi di suatu negara dan secara tidak langsung akan berdampak pada negara yang mempunyai hubungan kerjasama dengan negara yang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Dalam hal ini, apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian di Indonesia beserta negara lainnya yang mempunyai hubungan dagang/kerjasama dengan Indonesia, maka hal tersebut dapat berdampak bagi banyak perusahaan terutama pada perusahaan-perusahaan yang merupakan pelanggan utama Entitas Anak. Jika pelanggan Entitas Anak terimbas karena pelemahan perekonomian di Indonesia, hal ini tentu dapat berpengaruh pada kontrak pelanggan dengan Entitas Anak yang akan menurunkan pendapatan Entitas Anak.

2. Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing
Fluktuasi kurs valuta asing antara Rupiah terhadap mata uang lain akan mempengaruhi kinerja Perseroan dan Entitas Anak secara langsung maupun tidak langsung. Fluktuasi kurs dapat mempengaruhi harga pembelian program asing dan juga adanya fasilitas pinjaman Entitas Anak dalam mata uang asing. Dampak dari risiko kurs valuta asing dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak dalam hal fluktuasi kurs valuta asing yang mengakibatkan melemahnya kurs Rupiah.

3. **Risiko Kebijakan Pemerintah**
Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dan Entitas Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kebijakan Pemerintah yang terkait dengan moneter, fiskal dan lainnya terkait perekonomian Indonesia juga dapat mempengaruhi kinerja Perseroan dan Entitas Anak. Sebagai contoh, apabila (i) terjadi peningkatan suku bunga yang sangat signifikan, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam melakukan pembayaran utang dan juga mungkin akan membatasi kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam mencari alternatif pendanaan, dimana jika hal ini dapat berlangsung terus menerus dapat mempengaruhi kinerja Perseroan dan Entitas Anak (ii) terjadi perubahan kebijakan pemerintah yang dapat meningkatkan persaingan usaha yang dapat berdampak pada kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak. (iii) terjadi perubahan kebijakan pemerintah yang dapat meningkatkan persaingan usaha yang dapat berdampak pada pelanggan utama Perseroan dan Entitas Anak.

4. **Risiko Kepatuhan**
Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Perseroan dan Entitas Anak wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap Entitas Anak yang bergerak di bidang penyiaran baik berupa LPS-TV maupun LPB dan di lini usaha infrastruktur telekomunikasi, kegiatan usaha tunduk pada undang-undang dan peraturan pemerintah yang ditetapkan dari instansi terkait. Kegiatan usaha di bidang penyiaran tunduk pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran ("UU Penyiaran"), Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta ("PP 50"), dan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan ("PP 52"). Selain dari peraturan tersebut, LPS-TV

maupun LPB di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam PP 50 dan PP 52 tersebut di atas juga tunduk pada pengawasan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri pada Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia ("Menkominfo") dan Komisi Penyiaran Indonesia ("KPI"), seperti Izin Penyelenggaraan Penyiaran ("IPP"). Selain itu, Entitas Anak sebagai pelaku usaha tunduk pada Undang-undang No.5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU Anti Monopoli").

Meskipun Perseroan dan Entitas Anak berkeyakinan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan atau Entitas Anak dapat dikenakan sanksi yang bervariasi dari sanksi administratif, denda sampai dengan pencabutan ijin usaha maupun sanksi pidana. Selain itu, selalu ada kemungkinan bahwa perizinan Perseroan atau Entitas Anak tidak diperpanjang oleh lembaga yang berwenang, atau kalaupun diperpanjang maka syarat dan ketentuan yang terdapat dalam perpanjangan tersebut tidak sesuai dengan kepentingan atau berdampak negatif material terhadap Perseroan atau Entitas Anak. Ketidakpastian serta biaya-biaya yang mungkin timbul untuk memperpanjang masa berlakunya izin-izin dimaksud ataupun biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mempertahankan izin-izin dimaksud, atau bahkan kegagalan masing-masing Perseroan atau Entitas Anak untuk memperoleh perpanjangan atas perizinannya masing-masing, dapat saja berpengaruh terhadap kemampuan Perseroan atau Entitas Anak untuk menghasilkan pendapatan dan laba.

5. **Risiko Tuntutan Hukum**
   Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak tidak terlepas dari adanya risiko gugatan hukum. Gugatan hukum yang dihadapi antara lain pelanggaran kesepakatan dalam kontrak oleh salah satu pihak. Gugatan hukum dapat berasal dari pelanggan, pemasok, kreditur, instansi pemerintah, maupun masyarakat. Bila pelanggaran kontrak tersebut tidak dapat diselesaikan dengan hasil yang memuaskan setiap pihak yang terlibat dalam kontrak, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan hukum kepada pihak lainnya dan hal ini dapat merugikan para pihak yang terlibat, termasuk Perseroan dan Entitas Anak. Demikian juga terhadap risiko gugatan hukum dari pihak yang merasa dirugikan atas konten yang dibuat, disiarkan atau didistribusikan melalui berbagai saluran media yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi dan Sukuk Ijarah adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko tertundanya pembayaran disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah serta Pokok Obligasi dan/atau Sisa Imbalan Ijarah pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi dan Sukuk Ijarah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan dan Entitas Anak.
3. Risiko turun/berkurangnya nilai manfaat atas Objek Ijarah yang disebabkan karena perubahan lingkungan bisnis, perubahan regulasi, dan/atau faktor lainnya.
4. Risiko aksi korporasi dalam hal penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah bagi Perseroan meliputi terutama risiko kredit (kemampuan Perseroan untuk melunasi bunga dan pokok obligasi dan Sukuk Ijarah tepat waktu) dan risiko gagal bayar. Selain itu, Perseroan juga dapat menghadapi risiko terkait pemeringkatan efek bersifat utang yang dapat memengaruhi harga obligasi, Sukuk Ijarah dan biaya pembiayaan kedepannya.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAKNYA DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERSEBUT TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAKNYA.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan dan sampai dengan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak ada kejadian penting dan signifikan yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang perlu diungkapkan setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang diterbitkan kembali tanggal 15 Mei 2025 atas Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (KPS) *member of "Nexia International" network* dengan Opini Tanpa Modifikasian. Audit dilaksanakan sesuai dengan Standard Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Laporan audit tersebut ditandatangan oleh Florus Daeli, SE., Ak., M.M., CPA., ASEAN CPA., CA., CRA., CLI (Rekan pada KAP KPS dengan Ijin AP No. 0126).

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN, PROSPEK USAHA, DAN ENTITAS ANAK

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan dengan nama PT Bimantara Citra dan berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta No. 60 tanggal 30 Juni 1981 sebagaimana diubah dengan Akta No. 81 tanggal 29 Januari 1982, keduanya dibuat di hadapan Lukman Kirana, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/84/22 tanggal 22 Mei 1982, telah didaftarkan di dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta, masing-masing di bawah No. 1883 dan 1884, keduanya tertanggal 28 Mei 1982, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 54 tanggal 5 Juli 1985, Tambahan No. 912.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian, sesuai dengan Akta No.60 tanggal 30 Juni 1981, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.1.000.000,- per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	**100**	**100.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- Tuan Bambang Trihatmojo	10	10.000.000	50,00
- Tuan Mohamad Tachril Sapi'ie	5	5.000.000	25,00
- Tuan Rosano Barack	5	5.000.000	25,00
Jumlah modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**20**	**20.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**80**	**80.000.000**	

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, dan seluruh anggaran dasar ditegaskan kembali untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Terbuka sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 51 tanggal 20 Mei 2015 ("**Akta No. 51 Tanggal 20 Mei 2015**"), dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H. M.Kn., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0943978 tanggal 19 Juni 2015, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3522272.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 19 Juni 2015.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir telah mengalami perubahan untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 120 tanggal 28 Juli 2022 ("Akta No. 120 Tanggal 28 Juli 2022"), dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan No. AHU-0054141.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 2 Agustus 2022; didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0149266.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 2 Agustus 2022; diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0273800 tanggal 2 Agustus 2022; didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0149293.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 2 Agustus 2022, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 032529.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 Akta No. 120 Tanggal 28 Juli 2022, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha di bidang industri pengolahan; pertambangan dan penggalian; informasi dan komunikasi; real estat; konstruksi; perdagangan besar dan eceran; dan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis. Kegiatan usaha yang saat ini secara aktif dilakukan oleh Perseroan adalah perdagangan, jasa, dan investasi.

Berikut ini adalah Penyertaan Perseroan pada Entitas Anak berdasarkan DPS masing-masing Entitas Anak tertanggal Prospektus ini diterbitkan:

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Domisili	Presentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Tahun Pendirian	Status Operasional	Penyertaan Melalui
1.	MNCN	Media berbasis iklan dan konten	Jakarta	52,67%	2002	1997	Beroperasi	Langsung
2.	IPTV	Aktivitas Konsultasi Manajemen	Jakarta	63,24%	2006	2006	Beroperasi	Langsung
3.	Infokom	Infrastruktur telekomunikasi dan teknologi	Bekasi	99,99%	1997	1997	Beroperasi	Langsung
4.	MNC Shop	TV *homeshopping*	Jakarta	60,00%	2012	2012	Tidak Beroperasi	Langsung
5.	GMI	Investasi	Dubai	100,00%	2007	2007	Beroperasi	Langsung
6.	Universal	Investasi	Cayman Island	100,00%	2007	2007	Beroperasi	Langsung
7.	BML	Investasi	Hong Kong	81,06%	2020	2020	Beroperasi	Langsung
8.	BDL	Investasi	Hong Kong	81,06%	2022	2002	Beroperasi	Langsung
9.	RCTI	Penyiaran televisi	Jakarta	99,99%	2004	1987	Beroperasi	Tidak langsung (melalui MNCN dan Infokom)
10.	GIB	Penyiaran televisi	Jakarta	99,99%	2005	1999	Beroperasi	Tidak langsung (melalui MNCN dan Infokom)
11.	MNCTV	Penyiaran televisi	Jakarta	87,07%	2006	1990	Beroperasi	Tidak langsung (melalui MNCN)
12.	MTN	Penyiaran televisi	Jakarta	99,99%	2008	2006	Beroperasi	Tidak langsung (melalui MNCN dan Infokom)
13.	MMN	Stasiun radio	Jakarta	99,43%	2005	2005	Beroperasi	Tidak langsung (Melalui MNCN)
14.	MSIN	Konten	Jakarta	72,81%	2007	2000	Beroperasi	Tidak langsung (melalui MNCN)
15.	MMI	Periklanan dan Konten	Jakarta	99,99%	2016	2016	Tidak Beroperasi	Tidak langsung (melalui MNCN)
16.	MMU	Advertising	Jakarta	99,99%	2014	2014	Tidak Beroperasi	Tidak langsung (melalui MNCN)
17.	MIMEL	Investasi	Dubai	100,00%	2007	2007	Beroperasi	Tidak langsung melalui MNCN)
18.	MSKY	Media berbasis pelanggan	Jakarta	91,90%	2007	1988	Beroperasi	Tidak Langsung (melalui IPTV)
19.	NV	Media berbasis pelanggan	Jakarta	99,99%	2019	2006	Beroperasi	Tidak langsung (melalui IPTV)
20.	DVN	Media berbasis pelanggan	Jakarta	99,99%	2019	2010	Beroperasi	Tidak langsung (melalui IPTV dan Infokom)
21.	MKM	Jasa Televisi Protokol Internet	Jakarta	99,99%	2015	2013	Beroperasi	Tidak langsung (melalui IPTV dan Infokom)
22.	MOL	Aktivitas Konsultasi Manajemen	Jakarta	99,99%	2023	2012	Beroperasi	Tidak langsung (melalui IPTV dan MKM)

Mayoritas pendapatan Perseroan dikontribusikan oleh 2 Entitas Anak yaitu MNCN (79,07%) dan IPTV (16,68%).

Alasan Entitas Anak tidak beroperasi karena *business plan* setiap Entitas Anak yang tidak beroperasi tersebut tidak lagi sesuai, dikarenakan faktor-faktor eksternal diluar kendali setiap Entitas Anak.

Sampai Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan kegiatan usahanya dalam bidang industri perdagangan, jasa dan investasi. Investasi Perseroan dalam bentuk penyertaan modal dilakukan pada sebagaimana diungkapkan pada tabulasi di atas. Perseroan telah melakukan investasi pada Entitas Anak yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang, antara lain, penyiaran televisi, media berbasis pelanggan, multimedia & investasi, infrastruktur telekomunikasi & teknologi, TV *homeshopping,* rumah produksi, jasa dan pedagangan, stasiun radio, investasi, produksi & distribusi, media cetak, percetakan, agensi periklanan, manajemen bakat, lisensi, *mobile games,* dstribusi konten dan *value added service,* serta distribusi dan penjualan produk *home entertainment*.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut ini adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan saat Prospektus diterbitkan.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada tahun 2023 sehingga merujuk pada Akta No. 51 Tanggal 20 Mei 2015 *Junctis* Akta No. 21 Tanggal 9 Oktober 2020 dan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Perseroan per 31 Mei 2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan saat Prospektus diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	**55.750.000.000**	**5.575.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT MNC Asia Holding Tbk (Sebelumnya bernama PT MNC Investama Tbk)	7.520.665.000	752.066.500.000	45,99
- Drs. Lo Kheng Hong	1.067.633.500	106.763.350.000	6,53
- Masyarakat*	7.764.203.586	776.420.358.600	47,48
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Sebelum Saham Treasury)	**16.352.512.086**	**1.635.251.208.600**	**100,00**
Saham Treasury	**231.485.500**	**23.148.550.000**	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**16.583.997.586**	**1.658.399.758.600**	
Jumlah Saham dalam Portepel Sebeum dikurangi Saham Treasury	**39.166.002.414**	**3.916.600.241.400**	**70,25**
Jumlah Saham dalam Portepel Setelah dikurangi Saham Treasury	**38.934.516.914**	**3.893.451.691.400**	**69,83**

**) kepemilikan saham di bawah 5%*

3. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Perseroan melakukan penambahan sarana produksi yang penting atau penggunaan teknologi baru untuk peningkatan kinerja operasional, kualitas pelayanan dan peningkatan kinerja bisnis dengan rincian sebagai berikut:

Sarana Produksi :
Perseroan melalui Entitas Anak memiliki fasilitas studio canggih yang dipusatkan di 2 (dua) lokasi untuk mendukung kegiatan produksinya. Berlokasi di Jakarta Barat, MNC Studios melayani stasiun TV berbasis hiburan seperti RCTI, MNCTV dan GTV. Sedangkan iNews Tower melayani kebutuhan platform berita terintegrasi berpusat di Jakarta Pusat. Kedua fasilitas tersebut dilengkapi dengan sejumlah studio yang berkapasitas produksi paling lengkap dan canggih.

Pada akhir tahun 2024, MNC Media juga telah menuntaskan proyek Movieland di KEK MNC Lido City, dengan area sebesar 21 (dua puluh satu) hektar dimana fasilitas tersebut dapat mendukung proses produksi konten Perseroan yang dikhususkan untuk memproduksi konten-konten dengan basis *outdoor*. Fasilitas tersebut dilengkapi dengan sarana-sarana *shooting* dengan beragam *backlot* dan fasad.

Investasi Strategis Pada PT Tripar Multivision Tbk ("RAAM"):
Pada tanggal 13 September 2024 PT MNC Digital Entertainment Tbk ("**MSIN**") telah mengambil bagian dalam pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) PT Tripar Multivision Plus Tbk (pihak yang tidak terafiliasi) ("**MVP**") sejumlah 619.420.000 (enam ratus embilan belas juta empat ratus dua puluh ribu) lembar saham baru MVP, dengan harga pelaksanaan sebesar Rp.500,00 (lima ratus Rupiah) per saham, yang merupakan 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh MVP. Penyertaan saham MSIN dalam MVP tersebut telah disetujui oleh Dewan Komisaris MSIN berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Tanpa Mengadakan Rapat No. MDE/111/DKOM/VIII/2024 tanggal 11 September 2024.

Nilai transaksi penyertaan MSIN pada MVP adalah sebesar Rp.309.710.000.000,00 (tiga ratus sembilan miliar tujuh ratus sepuluh juta Rupiah), dimana kurang dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas MSIN berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian per Juni 2024 (Non-Audited). Oleh karena itu, pelaksanaan Investasi Strategis MSIN pada MVP tidak terkualifikasi sebagai Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 17/POJK.04/2020 dan POJK No. 42/POJK.04/2020. Dalam memenuhi ketentuan POJK No. 4 Tahun 2004 dan POJK No. 31/POJK.04/2015, MSIN telah menyampaikan laporan kepemilikan sahamnya di MVP sebagaimana dibuktikan dalam Surat No. 042/MDE-Corsec/IX/2024 tanggal 13 September 2024.

Akuisisi ini menggarisbawahi keyakinan MSIN terhadap masa depan industri hiburan dan dedikasi untuk memperluas operasinya di pasar Indonesia. Bersama RAAM, MSIN berharap dapat mengeksplorasi peluang baru, meningkatkan sinergi, dan terus memberikan pengalaman hiburan yang tak tertandingi kepada pemirsa lokal dan internasional.

Kolaborasi operasi antara MSIN dan RAAM, antara lain: (i) *Expertise* gabungan dalam pembuatan konten akan mendominasi produksi dan delivery konten di semua platform media: TV free-to-air (FTA), TV berbayar, media sosial, OTT, dan bioskop; (II) Efisiensi biaya melalui pemanfaatan Movieland sebagai fasilitas produksi utama yang akan mengurangi biaya produksi secara signifikan; (III) *Shared expertise* : MSIN dan RAAM masing-masing adalah pemimpin di industri media, dengan *sharing expertise*, kedua pihak akan meningkatkan kualitas penawaran ke depannya; (IV) Menambah alur monetisasi melalui peluang untuk konten RAAM di TV FTA, TV Berbayar, OTT, dan media sosial. Sebaliknya, bioskop milik RAAM di Indonesia akan memberi MSIN lebih banyak peluang untuk memonetisasi film-filmnya melalui perilisan film; (V) Inisiatif lainnya lebih lanjut dalam pemasaran, promosi, dan operasi akan menghasilkan manfaat yang optimal bagi MSIN dan RAAM.

4. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki izin-izin material sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak, antara lain sebagai berikut :

No.	Jenis Perizinan	Nomor/Tanggal Penerbitan Izin/Instansi Penerbit	Masa Berlaku Izin
Perseroan			
1.	NIB Perseroan	No. 9120111162607, dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 20 November 2019, dengan KBLI 46900 dan 70209 yang diklasifikasikan sebagai usaha dengan kategori risiko rendah.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha.
Entitas Anak			
MNCN			
1.	NIB MNCN	No. 9120312142226, dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 27 September 2021 (Perubahan ke-1), dengan KBLI 46900, 59112, dan 70209 yang diklasifikasikan sebagai usaha dengan kategori risiko rendah.	Berlaku selama MNCN menjalankan kegiatan usaha.
2.	Izin Usaha Perfilman (IUP) dibidang Pembuatan Film MNCN	No.03/PROD/PP-FS.RV/I/2005, dikeluarkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia pada tanggal 14 Januari 2005.	Berlaku selama MNCN masih melakukan kegiatan usaha sesuai dengan bidang usahanya.
3.	Izin Usaha Perfilman (IUP) dibidang Pengedaran Film MNCN	No.01/EDAR/PP-FS.RV/I/2007, dikeluarkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 2007.	Berlaku selama MNCN masih melakukan kegiatan usaha sesuai dengan bidang usahanya.
4.	Izin Usaha Perfilman (IUP) MNCN	dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal tanggal 19 Desember 2019, telah berlaku efektif.	Berlaku selama MNCN melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri PB-UMKU	No. 912031214222600010001, dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 31 Agustus 2024.	Berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dari tanggal penerbitan.
6.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 05102110213171115	Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.

No.	Jenis Perizinan	Nomor/Tanggal Penerbitan Izin/Instansi Penerbit	Masa Berlaku Izin
	Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR)	tanggal 7 Oktober 2021, dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	
7.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR)	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 11102110213171046 tanggal 13 Oktober 2021, dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
8.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR)	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 1110211021317035 tanggal 13 Oktober 2021, dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
IPTV			
1.	NIB IPTV	No. 9120206451887 , dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang diterbitkan pada tanggal 18 April 2019 dan dperubahan ke-1 pada tanggal 11 Maret 2022, dengan KBLI 70209 yang diklasifikasikan sebagai usaha dengan kategori risiko rendah.	Berlaku selama IPTV melakukan kegiatan usaha.
2.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (KKKPR)	KKKPR No. 17042310113171434 tanggal 20 September 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
INFOKOM			
1.	NIB INFOKOM	No. 8120110172729, dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 22 November 2018, dengan klasifikasi kategori usaha berupa KBLI 61924 – Tinggi, KBLI 61921 – Tinggi, KBLI 61300 – Tinggi, KBLI 46523 – Rendah, KBLI 46512 – Rendah, KBLI 61200 – Tinggi, dan KBLI 61100 - Tinggi.	Berlaku selama INFOKOM melakukan kegiatan usaha.
2.	Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (Network Access Point/NAP) INFOKOM	No.1086 Tahun 2017, dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Mei 2017.	Berlaku sampai jangka waktu yang tidak terbatas.
3.	Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) INFOKOM	No.1811 Tahun 2017, dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika pada tanggal 25 September 2019.	Berlaku sampai jangka waktu yang tidak terbatas.
4.	Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup INFOKOM	No.013/TEL.01.02/2019, dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika pada tanggal 8 Mei 2019.	Berlaku tanpa batas waktu.
5.	Hak Labuh INFOKOM	Perizinan Berusaha Hak Labuh Satelit No. 21/HLS/DJSDPPI.3/SP.02.04/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Menkominfo.	Berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan
6.	Izin Stasiun Radio (ISR) INFOKOM	ISR No. 01911670-000SU/2620162021, dikeluarkan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika **Keterangan:** Telah diperpanjang, namun Kominfo tidak mengeluarkan bukti perpanjangan ISR. Infokom telah memenuhi kewajibannya dengan membayarkan tagihan pembayaran atas ISR tersebut kepada Kominfo.	Berlaku sampai dengan 06 Desember 2025
7.	Izin Stasiun Radio (ISR) INFOKOM	ISR No. 01911671-000SU/2620162021, dikeluarkan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika **Keterangan:** Telah diperpanjang, namun Kominfo tidak mengeluarkan bukti perpanjangan ISR. Infokom telah memenuhi kewajibannya dengan membayarkan tagihan pembayaran atas ISR tersebut kepada Kominfo.	Berlaku sampai dengan 06 Desember 2025
MNC SHOP			
1.	NIB MNC Shop	No. 9120305172641, dikeluarkan oleh Lembaga Penyelenggaran dan Pengelola OSS pada tanggal 24 Januari 2019, dengan klasifikasi kategori usaha berupa	Berlaku selama MNC Shop menjalankan kegiatan usaha.

No.	Jenis Perizinan	Nomor/Tanggal Penerbitan Izin/Instansi Penerbit	Masa Berlaku Izin
		KBLI 59112 – Rendah, KBLI 52101 – Rendah, KBLI 82200 – Tinggi, KBLI 73100 – Rendah, KBLI 47914 – Rendah, dan KBLI 63122 – Tinggi.	
2.	Izin Usaha Perdagangan MNC Shop	No. 86/1/IU/I/PMA/PERDAGANGAN/2013, dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 30 Januari 2013.	Berlaku selama MNC Shop melakukan kegiatan usaha.
3.	Izin Usaha Perluasan	No. 57/1/IU-PL/PMA/2016 tanggal 28 Maret 2016, dikeluarkan oleh Lembaga Penyelenggaran dan Pengelola OSS	Berlaku selama MNC Shop melakukan kegiatan usaha.
4.	Izin Usaha Industri MNC Shop	dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	Berlaku selama MNC Shop menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
5.	Izin Usaha Perfilman MNC Shop	dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	Berlaku selama MNC Shop menjalankan kegiatan usaha dan/atau kegiatannya.
6.	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (Domestik)	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik No. 005698.01/DJAI.PSE/07/2022 tanggal 20 Juli 2022, diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	Masa berlaku tidak diatur.

5. TRANSAKSI DENGAN PIHAK KETIGA

Berikut ini merupakan perjanjian Entitas Anak dengan pihak ketiga yang dianggap penting oleh Perseroan:

No.	Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
1.	*Endemol Shine International Format Licence Agreement Masterchef Indonesia Series 7* tanggal 6 Oktober 2020 jo. *Deed of Novation* tanggal 1 Oktober 2020	- Banijay Rights Limited (Pemberi Lisensi) - MNCN (Penerima Lisensi)	Penayangan: 1 Juli 2020 s/d 30 Juni 2025	Pemberian Lisensi atas hak ekslusif (i) *all standard TV; (ii) all non-standard TV* dan (iii) *Over The Top (OTT), Free Video On Demand Rights (FVOD), Subscription Video On Demand Rights (SVOD), Video On Demand Rights – Advertising Supported (AVOID), Transactional Video On Demand Rights (TVOD) yang diberikan secara ekslusif untuk 2 tahun dan non-ekslusif untuk sisa masa lisensi.*
2.	*Endemol Shine International Format Licence Agreement Masterchef Indonesia Series 7* tanggal 6 Oktober 2020 jo. *Deed of Novation* tanggal 1 Oktober 2020	- Banijay Rights Limited (Pemberi Lisensi) - MNCN (Penerima Lisensi)	Penayangan: 31 Desember 2020 s/d 30 Desember 2025	Pemberian Lisensi atas hak ekslusif (i) *all standard TV; (ii) all non-standard TV;* (iii) *Over The Top (OTT), Free Video On Demand Rights (FVOD), Subscription Video On Demand Rights (SVOD), Video On Demand Rights – Advertising Supported (AVOID), Transactional Video On Demand Rights (TVOD) yang diberikan secara ekslusif untuk 2 tahun dan non-ekslusif untuk sisa masa lisensi*;(iv) Hak Produksi; (v) Hak Promosi dan (vi) Hak Sekunder
3.	Perjanjian Layanan Komunikasi Data dan Manage Service Antara Infokom dengan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Nomor: 029/PKS/LGL-IE/EXT/VIII/2022 Nomor DIR/1625, tanggal 5 Agustus 2022, dibuat dibawah tangan bermaterai cukup.	- PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara; - INFOKOM	5 Agustus 2022 s/d 5 Agustus 2025	Penyediaan Layanan Komunikasi Data dan Manage Service sesuai dengan Konfigurasi Teknis
4.	Perjanjian Kerjasama Antara Infokom Dengan PT Bank Pembangunan Daerah Papua Tentang Layanan Komunikasi Data Dan Manage Service Nomor:	- PT Bank Pembangunan Daerah Papua; - INFOKOM	Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan akan	Penyediaan Layanan Komunikasi Data dan Manage Service sesuai dengan Konfigurasi Teknis

No.	Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
	50/PKS-BPD/VI/2022 Nomor: 024/PKS/LGL-IE/EXT/VI/2022, tanggal 10 Juni 2022, , dibuat dibawah tangan bermaterai cukup		diperpanjang secara otomatis selama 3 (tiga) tahun sampai dengan diakhir oleh Para Pihak	
5.	Perjanjian Penggantian Biaya dan Ganti Rugi (*Reimbursement And Indemnity Agreement*) ("Perjanjian") tanggal 16 Juni 2025, dibuat dibawah tangan	- Perseroan ("Emiten" / "Obligor"); - PT Media Nusantara Citra Tbk, PT MNC Vision Networks Tbk (masing-masing disebut sebagai "Obligor") (dan secara bersama-sama dengan Emiten disebut sebagai "Para Obligor") - Credit Guarantee and Investment Facility ("CGIF") -	Perjanjian ini akan berlaku pada saat efektifnya Penanggungan dan akan berakhir setelah pembayaran semua Biaya Penanggungan terkait semua Tahap-Tahap Yang Ditanggungan telah dilakukan, pengakhiran Penanggungan-Penanggungan sesuai dengan ketentuan masing-masing, dan kewajiban penggantian kerugian setiap Obligor sepenuhnya dilaksanakan atau dilunasi berdasarkan Perjanjian ini	Berdasarkan RIA, Perseroan, MNCN dan IPTV berkewajiban untuk mengganti nilai yang ditanggung CGIF dalam hal terjadi kegagalan pembayaran oleh Perseroan dan CGIF telah melakukan pembayaran kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Penanggungan. Sehubungan dnegan kewajiban tersebut, Perseroan akan memberikan jaminan kepada CGIF berupa hak tanggungan atas tanah dan bangunan berupa gedung iNews Tower , suatu bangunan perkantoran yang berlokasi di Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 36-38, RT. 15, RW. 7, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340, yang dimiliki oleh MNCN dan berdiri diatas tanah yang disewa oleh MNCN dari PT GLD Property, dan fidusia atas mesin dan peralatan yang dimiliki oleh MNCN. Perjanjian Penggantian Biaya dan Ganti Rugi tersebut tidak terkualifikasi sebagai Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK No.17/POJK.04/2020 karena nilai transaksi tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan per 31 Desember 2024 (Audited) dan/atau Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/POJK.04/2020 karena CGIF tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan. **Hukum Yang Mengatur** Perjanjian ini dan setiap kewajiban non-kontrak yang timbul dari Perjanjian ini diatur dengan hukum Inggris. **Penyelesaian Sengketa** Setiap perselisihan, klaim, perbedaan, atau kontroversi yang timbul dari, berkaitan dengan, atau memiliki hubungan apa pun dengan Perjanjian ini harus dirujuk ke dan diselesaikan secara final melalui arbitrase yang dikelola oleh Singapore International Arbitration Centre (SIAC) berdasarkan Aturan Arbitrase SIAC.

Tidak ada pembatasan dari perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga diatas yang dapat merugikan pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah.

6. TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi. Transaksi-transaksi tersebut telah dilaksanakan dengan syarat wajar dan kondisi yang sama sebagaimana bila dilaksanakan dengan pihak ketiga. Transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Para Pihak	Sifat Hubungan	Masa Berlaku	Nilai	Deskripsi Singkat
1.	Konfirmasi Perpanjangan Sewa Ruang Lantai 27 Suite 2702 DAN 2703 di MNC Tower No. 234-MCOM/GLDP-MKT/X/24 tanggal 22 Oktober 2024	- PT GLD Property - Perseroan	Afiliasi Karena Pengendalian secara tidak langsung oleh Pihak yang sama	01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2026	Biaya Sewa sebesar Rp165.000/m2/bulan, dengan biaya layanan sebesar Rp90.000/m2/bulan	Perseroan setuju untuk melakukan sewa ruang di Gedung MNC Tower (Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat 10340, Indonesia), yang terletak di Lantai 27, Suite 2702 dan Suite 2703, dengan total luas bangunan sebesar 703,52 m2.
2.	Perjanjian Sewa Tanah Untuk Proyek MNC News Center No. 16A/GLDP-MNC/IX/11 oleh dan antara PT GLD Property dengan PT Media Nusantara pada tanggal 29 September 2011 Jis. Perubahan Pertama tanggal 13 Januari 2013 dan Perubahan Kedua tanggal 1 Februari 2013	- PT GLD Property - MNCN	Afiliasi Karena Pengendalian secara tidak langsung oleh Pihak yang sama	1 Oktober 2011 sampai dengan 30 September 2041	Biaya sewa sebesar Rp373.452.806 per tahun untuk tanah seluas 4.918 m2 dan Rp69.785.101 per tahun untuk tanah seluas 919 m2	Sewa menyewa tanah seluas 5.837 m2 yang berlokasi di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 20, 22, 24, dan 28, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Tanah tersebut akan digunakan untuk membangun Gedung perkantoran dan studio dengan nama MNC News Centre atau sekarang dikenal dengan nama Gedung iNews Tower.
3.	Konfirmasi Perpanjangan Sewa Ruang Lantai 12A di MNC Tower No. 089-MNC KM/GLDP-MKT/XII/23 tanggal 28 Desember 2023	- PT GLD Property - IPTV	Afiliasi Karena Pengendalian secara tidak langsung oleh Pihak yang sama	4 Januari 2024 sampai dengan 3 Januari 2026	Biaya sewa adalah sebesar Rp165.000/m2/bulan dan biaya layanan sebesar Rp90.000/m2/bulan.	Sewa ruang kantor di MNC Tower Lantai 12A dengan luas 50m2
4.	Perjanjian Sewa Operasi Nomor: 191-A/MNCL-OPL/09/2022 tanggal 19 September 2022	- PT MNC Guna Usaha Indonesia - INFOKOM	Afiliasi Karena Pengendalian secara tidak langsung oleh Pihak yang sama	19 September 2022 s/d 20 September 2025	Biaya sewa selama masa sewa adalah Rp12.600.000	Sewa menyewa kendaraan operasional.

Transaksi tersebut di atas merupakan transaksi yang sifatnya operasional dan bertujuan untuk menunjang kegiatan operasional dari Entitas Anak. Tidak terdapat pembatasan yang berlaku sehubungan dengan transaksi-transaksi tersebut di atas. Perjanjian dengan pihak afiliasi dilakukan dengan wajar seperti apabila dilakukan dengan pihak ketiga.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau Pemegang Saham Utama Perseroan, atau afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau Pemegang Saham Utama Perseroan tidak memiliki kepentingan dalam perusahaan lain yang menjalankan bisnis yang sama atau menghasilkan produk yang sama dengan Perseroan atau Kelompok Usaha Perseroan.

7. PERJANJIAN PINJAMAN

No	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas/ Tujuan Fasilitas	Plafond (Rp)	Suku Bunga	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Fasilitas Perbankan Nomor 233/PFP-DBSI/IX/1-2/2023 tanggal 25 September 2023 Juncto Perubahan Pertama atas Perjanjian Fasilitas Perbankan Nomor 266/PFPA-DBSI/X/1-2/2023 tanggal 25 Oktober 2023 dan sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Kedua atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 240/PFPA-DBSI/IX/1-2/2024 tanggal 24 September 2024, yang keduanya dibuat di bawah tangan	a. Perseroan ("Nasabah"); b. PT Bank DBS Indonesia ("Bank")	Fasilitas yang diberikan oleh Bank adalah Revolving Credit Facility ("Fasilitas RCF") dengan tujuan penggunaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Nasabah	Jumlah pokok fasilitas sebesar Rp200.000.000.000,00	- Bunga: tingkat bunga sebesar JIBOR ditambah 4% (empat persen) per tahun dari Pokok Fasilitas. - Upfront fee: sebesar 1,10% (satu koma sepuluh persen) per tahun dari Pokok Fasilitas. - Commitment fee: sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen) per tahun dari jumlah Pokok Fasilitas yang belum ditarik.	Jangka waktu berlaku 12 bulan sejak 26 September 2024 s/d 25 September 2025
2.	Perjanjian Fasilitas Tanggal 26 Agustus 2024 USD 26.000.000,, dibuat dan ditandatangani para pihak dibawah tangan	a. MNCN ("Debitur"); b. Deutsche Bank AG, Singapore Branch. ("Kreditur Awal")	Fasilitas Kredit dengan total yang sama dengan Total Komitmen untuk tujuan pendanaan Rekening Cadangan Bunga, membiayai pengeluaran sehubungan Dokumen Pembiayaan, dan pelunasan utang fasilitas yang ada.	Fasilitas Kredit sebesar USD26.000.000	6,35% pa	Tanggal Pengakhiran Awal berarti tanggal jatuh tempo 12 Bulan setelah Tanggal Penggunaan Fasilitas Kredit yaitu 30 September 2024
3.	Perjanjian Kredit yang dibuat oleh dan antara PT Bank Nationalnobu Tbk dan MNCN di hadapan Edison Jingga, S.H., M.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara pada tanggal 25 Agustus 2023 jo. Akta Addendum I No. 71 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Agustine Irianti, S.H., M.H., pada tanggal 23 Agustus 2024	a. MNCN ("Debitur") b. PT Bank Nationalnobu, Tbk ("Kreditur")	Kredit Modal Kerja untuk pengembangan Konten Digital dan Pengembangan Artificial Intelligent (AI) Digital Streaming Platform.	Fasilitas kredit induk sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berbentuk Fasilitas Pinjaman Tetap	9,75% pa	Jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dimulai sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan 25 Agustus 2025.
4.	Akta Perjanjian Kredit No. 20 tanggal 10 Desember 2020	a. IPTV ("Debitur") b. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten ("Kreditur")	Tujuan Kredit adalah untuk modal kerja dan belanja modal anak perusahaan	Fasilitas Kredit sebesar Rp250.000.000.000,00 dalam bentuk Kredit Investasi	Debitur dikenakan biaya provisi sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari plafond dan dibayarkan secara sekaligus pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit; Debitur dikenakan biaya administrasi sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima	Jangka waktu kredit adalah selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit, yaitu sejak tanggal 10 Desember 2020 dan berakhir atau harus dibayar lunas pada tanggal 10 Desember 2025.

No	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas/ Tujuan Fasilitas	Plafond (Rp)	Suku Bunga	Jangka Waktu
					juta Rupiah) dan wajib dibayar Debitur secara sekaligus saat penandatanganan Perjanjian Kredit; Debitur dikenakan biaya commitment fee sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) / tahun dari plafond (1 tahun adalah 360 hari), apabila tidak terdapat penarikan fasilitas selama jangka waktu kredit dan pembayarat Commitment Fee dilaksanakan pada saat berakhirnya jangka waktu kredit.	
5.	Akta Surat Hutang No. 03 tanggal 5 November 2021 Juncto Akta Persesuaian No. 0107/Pers/AOO/V/2022 tanggal 11 Mei 2022, yang dibuat dihadapan Sunarni, S.H. Notaris di Jakarta dan sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Persesuaian No. 3 tanggal 7 September 2023, yang dibuat dihadapan Muhammad Rizky Ashary Suryopranoto, S.H., Notaris di Jakarta.	a. IPTV ("Debitur") b. PT Bank Mayapada Internasional Tbk ("Kreditur")	Kreditur memberikan pinjaman uang dengan fasilitas tersebut kepada Debitur untuk tujuan modal kerja.	Fasilitas Kredit sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) dalam bentuk Fasilitas Pinjaman Tetap Angsuran (PTA).	Debitur wajib membayar bunga sebesar 12% per tahun. Besarnya suku bunga tersebut dapat diubah sewaktu-waktu oleh Kreditur secara sepihak, sesuai tingkat suku bunga yang berlaku pada Kreditur dan ditetapkan oleh Kreditur;	Jangka waktu selama 60 bulan, sejak 19 November 2021 sampai dengan 19 November 2026
6.	Akta Perjanjian Kredit No.78 tanggal 31 Januari 2019, yang dibuat dihadapan Suwami Sukiman, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, beserta dengan perubahan-perubahannya sebagaimana tercantum dalam Pengubahan Perjanjian Kredit No. 006/PPK-BOI/BD/I/2023 tanggal 31 Januari 2023, dan Pengubahan Perjanjian Kredit No. 010/PPK-BOI/BD/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 dan sebagaimana terakhir dirubah dengan Pengubahan Perjanjian Kredit No. 011/PPK-BOI/BD/I/2025 tanggal 31 Januari 2025	a. PT Bank Oke Indonesia Tbk ("Bank") b. Infokom ("Debitur")	Fasilitas Kredit untuk keperluan Modal Kerja Debitur	Fasilitas Pinjaman rekening Koran dengan pagu fasilitas sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah).	debitur akan dikenakan Bungan dengan tingkat bunga 11% efektif pertahun yang di hitung dari pokok fasilitas yang diterima.	31 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari 2026

No	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas/ Tujuan Fasilitas	Plafond (Rp)	Suku Bunga	Jangka Waktu
7.	Akta Perjanjian Fasilitas Kredit Investasi No.66 tanggal 29 Maret 2022 Junctis (i) Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Jangka Pendek No.67 tanggal 29 Maret 2022, (ii) Akta Perjanjian Kredit Investasi No.56 tanggal 29 September 2022, ketiganya dibuat dihadapan Yohanes Wilion, S.E., S.H., M.M., Notaris di Jakarta, (iii) Perubahan (Addendum) Perjanjian Fasilitas Kredit 058/JTRUST-AGR/LBS-JKT/III/2023 tanggal 29 Maret 2023, dibuat dibawah tangan, (iv) Akta Perubahan Perjanjian Fasilitas Kredit No.7 tanggal 4 Agustus 2023, dibuat dihadapan Yohanes Wilion, S.E., S.H., M.M., Notaris di Jakarta, (v) Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 114/JTRUST-AGR/LBS/IV/2024 tanggal 25 April 2024, (vi) Surat Pemberitahuan Keputusan Kredit (offering letter) No. 059/JTRUST-JKT/SPK-CSME/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 dibuat dibawah tangan	a. PT Bank Jtrust Indonesia Tbk ("Bank") a. Infokom ("Debitur")	Modal kerja untuk kebutuhan operasional & pembayaran ke supplier	Kredit diberikan dalam beberapa fasilitas sebagai berikut: a. Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) sebesar Rp.20.000.000.000; b. Fasilitas Kredit Atas Permintaan (KAP 1) sebesar Rp.20.000.000.000; c. Fasilitas Kredit Atas Permintaan (KAP 2) sebesar Rp.10.000.000.000; d. Fasilitas Kredit Investasi 1 (KIN 1) sebesar Rp.90.000.000.000; e. Fasilitas Kredit Investasi 2 (KIN 2) sebesar Rp.90.000.000.000;	12% p.a	Jangka waktu berlaku sesuai ketentuan masing-masing fasilitas: a. Fasilitas KRK sampai dengan 30 Maret 2026; b. Fasilitas KAP 1 sampai dengan 30 Maret 2026; c. Fasilitas KAP 2 sampai dengan 30 Maret 2026; d. Fasilitas KIN 1 sampai dengan 1 April 2030; e. Fasilitas KIN 2 sampai dengan 4 Oktober 2030
8.	Akta Perjanjian Kredit Nomor 1 tanggal 2 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Hilda Yulistiawati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 044/pjpk/KRD/KCU/2024 tanggal 2 Juli 2024 dibuat dibawah tangan	a. PT Bank Ganesha Tbk ("Bank") b. Infokom ("Debitur")	Short Term Loan untuk keperluan Modal Kerja	*Plafond* sebesar Rp 13.500.000.000	10,50% per annum	Jangka waktu fasilitas sampai dengan 2 Juni 2025 ***Keterangan:*** *Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian tersebut masih dalam proses perpanjangan*
9.	Akta Surat Hutang No. 8 tanggal 8 Februari 2022, yang dibuat dihadapan Sunarni, S.H., Notaris di Jakarta Jis. (i) Perjanjian Penyesuaian No. 0050/Pers/AOO/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 (ii) Perjanjian Penyesuaian No. 0180/Pers/AOO/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 (iii) Persesuaian 0089/Pers/AOO/IV/2025 tanggal 16 April 2025, yang ketiganya dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup	a. PT Bank Mayapada Internasional Tbk ("Bank"); b. Infokom ("Debitur").	Keperluan Modal Kerja Debitur	Pagu fasilitas sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) yang terdiri: (i) sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) dalam bentuk fasilitas Pinjaman Tetap Anguran (PTA) Line; dan (ii) sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah) dalam bentuk fasilitas Pinjaman Tetap On Demand (PTX-OD)	Bunga untuk PTX-OD line sebesar 10% pa dan bunga PTA Line sebesar 12% pa	-Jangka waktu untuk fasilitas Pinjaman Tetap Angsuran (PTA) Line terhitung mulai tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2027; -Jangka waktu untuk fasilitas Pinjaman Tetap On Demand terhitung mulai tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Februari 2026

8. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN DAN ASET BERGERAK PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Perseroan tidak memiliki aset tetap sehingga aset tetap hanya dimiliki oleh Entitas Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memiliki dan/atau menguasai aset tetap dan/atau aset bergerak dengan sah, antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap

Entitas Anak memiliki dan/atau menguasai beberapa Aset Tetap berupa tanah dan/atau bangunan sebagai berikut:

No.	No. Sertifikat	Luas (M2)	Lokasi	Tanggal berakhirnya Hak	Nama Pemilik atas Aset	Peruntukan Tanah	Nilai Aset	Tahun Buku
1.	HGB No. 12 tanggal 21 Februari 2006	2.000	Desa Kutuh Kab. Badung Provinsi Bali	10 November 2038	INFOKOM	Belum ada kegiatan	800.000.000	2016
2.	HGB No. 106 tanggal 30 Juli 2007	1.760	Kel. Sungai Lulut Kab Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan	24 September 2027	INFOKOM	Belum ada kegiatan	480.000.000	2016
3.	HGB No. 890 tanggal 20 Maret 1999	6.294	Desa Pasirsari Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat	24 September 2026	INFOKOM	Gudang Peralatan	1.074.892.000	2022
4.	HGB No. 01152 tanggal 24 April 2015	111	Kel. Helvetia Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara	17 Maret 2035	INFOKOM	Belum ada kegiatan	52.396.000	2016
5.	HGB No. 00002 tanggal 3 Januari 2007	500	Desa Penung-kulan Kab. Purworejo Provinsi Jawa Tengah	3 Januari 2037	INFOKOM	Belum ada kegiatan	75.000.000	2016
6.	HGB No. 9 tanggal 18 Agustus 2005	786	Desa Panei Tongah Kab. Simalungun Provinsi Sumatera Utara	Tidak disebutkan dalam SHGB. Keterangan: Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agaria, jangka waktu HGB adalah 30 tahun.	INFOKOM	Belum ada kegiatan	66.810.000	2016
7.	HGB No. 30 tanggal 14 Juni 2006	1.958	Desa Sudajaya-girang Kab. Sukabumi Provinsi Jawa Barat	6 Juni 2036	INFOKOM	Tower	300.000.000	2016
8.	HGB No. 276 tanggal 1 Agustus 2006	975	Desa Licin Kab. Sumedang Provinsi Jawa Barat	3 Juli 2036	INFOKOM	Tower	27.000.000	2016
9.	HGB No. 919 tanggal 1	8.345	Kel. Sungai Bambu Kota Jakarta Utara	30 November 2044	INFOKOM	Untuk operasional INFOKOM (	208.316.235.000	2006

No.	No. Sertifikat	Luas (M2)	Lokasi	Tanggal berakhirnya Hak	Nama Pemilik atas Aset	Peruntukan Tanah	Nilai Aset	Tahun Buku
	Desember 2004		Provinsi DKI Jakarta			monitoring sistem, monitoring kelayakan sistem internet dan fungsinya yang dilakukan melalui kantor yang terletak di lokasi Sunter)		
10.	HGB No. 1532 tanggal 7 Januari 2010*	2.954	Kel. Rungkut Menanggal Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur	6 Januari 2030	INFOKOM	Gudang	4.057.021.140	2006
11.	HGB No. 3 tanggal 26 Mei 2008	1.062	Desa Karangjati Kab. Tegal Provinsi Jawa Tengah	26 Mei 2028	INFOKOM	Tower	72.240.000	2016
12.	HGB No. 5 tanggal 7 Mei 2008	1.939	Desa Gantungan Kab. Tegal Provinsi Jawa Tengah	7 Mei 2028	INFOKOM	Tower	336.000.000	2016
13.	HGB No. 547 tanggal 14 Januari 1998*	1.996	Kel. Sungai Bambu Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta	13 Januari 2038	INFOKOM	Operasional PT Infokom Elektrindo	49.618.435.001	2006
14.	HGB No. 108 tanggal 21 Mei 2008	4.320	Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Kec. Banjarmasin Timur, Desa Sungai Lulut	24 September 2028	INFOKOM	Tower	Tercatat gabung dengan nomor 9	2016
15.	HGB No. 0002 tanggal 11 Februari 2020	745	Maluku Utara, Ternate, Kota Ternate Tengah, Kelurahan Tongole	5 Desember 2039	INFOKOM	Belum ada kegiatan	61.090.000	2020
16.	HGB No. 4 tanggal 25 Februari 2008	67	Jawa Tengah, Kab. Tegal, Kec. Tarub, Desa Karangjati	11 Juni 2028	INFOKOM	Belum ada kegiatan	Tercatat gabung dengan nomor 18	2016

Keterangan:

- *HGB No. 919/Sungai Bambu sedang dibebankan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama dan Peringkat Kedua berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.01490/2022 kepada PT Bank Jtrust Indonesia Tbk sehubungan dengan pinjaman/kredit yang diterima INFOKOM dari PT Bank Jtrust Indonesia Tbk;*
- *HGB No. 547/Sungai Bambu sedang dibebankan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama dan Peringkat Kedua berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.04737/2022 kepada PT Bank Jtrust Indonesia Tbk sehubungan dengan pinjaman/kredit yang diterima INFOKOM dari PT Bank Jtrust Indonesia Tbk;*
- *HGB No. 1532/Rungkut Menanggal sedang dibebankan dengan Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 15/2021 tanggal 4 Juni 2021 kepada PT Bank Ganesha Tbk sehubungan dengan pinjaman/kredit yang diterima INFOKOM dari PT Bank Ganesha Tbk*

Aset Bergerak

Perseroan dan Entitas Anak memiliki beberapa Aset Bergerak berupa kendaraan sebagai berikut:

NO.	TERDAFTAR A/N	NO. STNK	NO. POLISI	MERK, TYPE	TAHUN
1.	Perseroan	15463009	B 2816 POF	Nissan Livina VL AT	2021
2.	Perseroan	16359319	B 1233 PAK	Mercedes Benz C-200 AMG	2021
3.	Perseroan	16027186	B 2860 POH	Mitsubishi Xpander Cross AT	2021
4.	Perseroan	16496425	B 1441 PJT	Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2A/T	2021
5.	Perseroan	10546092	B 1448 PIO	Chevrolet Trailblazer 25LLTZ2W	2017
6.	Perseroan	17183040	B 1720 PRX	Toyota New Avanza 1.5 G MT	2015
7.	Perseroan	13498787	B 2583 PFK	Honda H MODD4 1.5EM CVT	2018
8.	Perseroan	19395888	B 1277 PYD	Honda HRV	2015
9.	Perseroan	20029380	B 8108 IS	Toyota Avanza 1.3 G	2007
10.	Perseroan	17183040	B 1720 PRX	Toyota New Avanza 1.5G MT	2015
11.	Perseroan	19326839	B 495 RI	BMW 530i	2020
12.	Perseroan	D82404280	B 2835 SXF	Toyota Fortuner 2.7 AT	2005
13.	Perseroan	D8776492G	B 8740 GW	Suzuki APV DLX	2006
14.	Perseroan	B0497295G	B 8924 ZF	Toyota Kijang LGX	2001
15.	Perseroan	I11050886	B 1923 POL	Nissan Livina XV AT	2012
16.	Perseroan	C0980581G	B 8410 ZN	Mitsubishi Lancer	2001
17.	Perseroan	E2185965G	B 8678 KX	Toyota Avanza 1.3 G	2006
18.	Perseroan	K06262609	B 1109 PZT	Kijang Innova GAT	2013
19.	Perseroan	E3146523G	B 2213 PZC	Toyota Avanza 1.5 S AT	2006
20.	Perseroan	D4294332G	B 6758 PEA	Honda Karisma X 125 D	2005
21.	Perseroan	2621057/MJ/2015	B 6759 PEA	Honda Karisma X 125 D	2005
22.	Perseroan	D4294331G	B 6760 PEA	Honda Karisma X 125 D	2005
23.	Perseroan	05463912/MJ/2016	B 1038 PYZ	Toyota Avanza Veloz 1.3 AT	2016
24.	Perseroan	N.05282073	B 1065 PIW	Toyota Sienta 1.5 G MT	2017
25.	Perseroan	L07842497	B 14 SMN	Toyota Camry 2.5 G	2014
26.	Perseroan	O-07332609	B 2149 PFP	Toyota Kijang Innova 2.0 G AT	2018
27.	Perseroan	9117588	B 6298 ZB	Kawazaki Kaze R	2000
28.	Perseroan	767127	B 8180 IS	Toyota Avanza 1300	2007
29.	Perseroan	15255713	B 1672 PIR	Honda Brio RS 1.2 CVT CKD	2017
30.	Perseroan	13103917	B 2437 PZH	Toyota Avanza Veloz	2022
31.	Perseroan	13102885	B 2057 PZH	Toyota Zenix	2023
32.	Perseroan	14962398	B 2224 PZI	Honda WR-V	2023
33.	Perseroan	14393856	B 2421 PZT	Honda WR-V	2022
34.	MNCN	15469488	B 2913 POG	Toyota Rush 1.5 G AT	2021
35.	MNCN	15629533	B 2920 POG	Toyota Innova 2.4 G AT DSL LUX	2021
36.	MNCN	16495246	B 1251 PAK	Mercedes Benz E 300 AMG Line Facelift	2021
37.	MNCN	16183442	B 2839 POI	Honda City HB 1.5 L RS CVT	2021
38.	MNCN	16189272	B 1006 PJT	Mitsubishi All New Pajero Exceed 4X2 AT	2021
39.	MNCN	04428493	B 1974 PAJ	Toyota Altis V 1.8 AT	2021
40.	MNCN	7074738	B 8491 PO	Suzuki APV DLX-GC 415	2007
41.	MNCN	15297383	B 2150 UBF	Toyota Fortuner 2,5 GAT	2013
42.	MNCN	L-1395990	B 1669 PRY	Toyota New Avanza Veloz 1,5 A/T	2015
43.	MNCN	L-13934174	B 1167 PRY	Toyota Kijang Innova J	2015
44.	MNCN	M-00809450	B 1293 PJJ	Mitsubishi Outlander Sport 2,0 PX-S AT	2015
45.	MNCN	N-01565853	B 1758 PAH	Honda CIVIC 1,5	2016
46.	MNCN	04457583	B 2086 SBK	BMW X1 SDRIVE 181	2016
47.	MNCN	L-0937	B 1410 PRU	Nissan Grand Livina 1,5 XV AT	2014
48.	MNCN	I-02399758	B 1640 PKV	Nissan X-TRAIL 2.0 CVT A/T	2011
49.	MNCN	H-04053859	B 1810 TJB	Toyota Harrier 2.4 A/T	2010
50.	MNCN	N-02789391	B 1939 PIK	HONDA BR-V 1.5	2017
51.	MNCN	L-00274929	B 1945 PAF	Honda Accord CR 2.4 VT1 AT	2013
52.	MNCN	E-7324702	B E209 PIU	Honda NF 100 SL	2007
53.	MNCN	L-02933787	B 9863 PBC	Isuzu TFSGX D-MAX DC 2,5 L AT	2018
54.	MNCN	K-02600937	B 1782 PJF	Mitsubishi Pajero Sport 2,5D EXC AT	2013
55.	MNCN	J- 06440049	B 1304 PZO	Nissan X-TRAIL 2.0 CVT A/T	2012
56.	MNCN	H-11420658	B 1870 PKQ	Chevrolet Captiva 2.41 A/T	2011

NO.	TERDAFTAR A/N	NO. STNK	NO. POLISI	MERK, TYPE	TAHUN
57.	MNCN	K-02574311	B 9792 PBB	Isuzu D-MAX DC 3 MT	2012
58.	MNCN	20029381	B 2 MNC	Lexus LX 570 AT	2012
59.	MNCN	19328616	B 1837 PJQ	Nissan New Terra VL 2.5	2019
60.	MNCN	19165866	B 2464 PKT	Kia Seltos 1.4 AT	2020
61.	MNCN	328950 /MJ/2011	B 6725 PHV	Honda NF 125 SC	2007
62.	MNCN	3289506 /MJ/2011	B 6754 PHY	Honda NF 125 SD	2007
63.	MNCN	09060621	B 2437 POU	Toyota Kijang Innova 2.0 G	2022
64.	MNCN	08151574	B 2920 POR	Toyota Rush 1.55 AT	2022
65.	MNCN	2806671	B 1286 PJU	Honda CRV	2022
66.	MNCN	0720329	B 2157 PZC	Honda Brio Satya 1.2	2022
67.	MNCN	09293300	B 2466 POU	Mitsubishi Xpadner 1.5 ULT	2022
68.	MNCN	V-02269325	B 1968 PLP	Toyota Fortuner 2.4	2019
69.	MNCN	02648425	B 2910 PZJ	Toyota Raize	2023
70.	MNCN	15151065	B 2822 PZR	Toyota Zenix	2023
71.	MNCN	02719388	B 2807 PZM	Mitsubishi Xpander Cross	2023
72.	MNCN	15148486	B 2455 PZU	Honda Brio Satya	2023
73.	MNCN	14395713	B 2449 PZT	Mitsubishi Xpander Ultimate	2023
74.	MNCN	15146788	B 2582 PZR	Toyata Avanza	2023
75.	MNCN	09084022	B 1731 PNP	Wuling E260REVKW333LV1XID	2024
76.	MNCN	0083567	B 2288 PIF	Toyota A251RAGBXFJ12GCVT	2024
77.	MNCN	18082649	B 2415 PIL	Toyota Rush 1.5 G AT	2024
78.	MNCN	09082337	B 2433 PIE	Toyota A251RAGMXFJ12GMT	2024
79.	INFOKOM	MHKAB1BA GMJ007244	B 2644 POJ	Toyota A251RA-GMXFJ 126 MIT	2021
80.	INFOKOM	AMH20B020 744	B 1987 EK	Toyota Alphard 2.4 2WD AT	2008
81.	INFOKOM	06036640	B 2417 PKJ	Honda H MOBDD4 1.5EMCVTCKD	2019
82.	INFOKOM	04559621	B 2894 PKG	Honda HRV RU115SCVTCKD	2019
83.	INFOKOM	15749557	B 8334 IT	Toyota Crown IYL3.0AT (CBU)	2006

9. KETERANGAN MENGENAI ASURANSI

No.	No. Polis	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Objek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Total Premi	Jangka Waktu
1.	10.03.02.24 .08.0.00909	PT MNC Asuransi Indonesia	Perseroan	Kendaraan Bermotor	Chevrolet Trailblazer 25LL TZ2W	Rp.270.000.000	Rp.5.566.950	29 Agustus 2024 s/d 29 Agustus 2025
2.	10.03.02.24 .09.0.00042	PT MNC Asuransi Indonesia	Perseroan	Kendaraan Bermotor	Nissan Grand Livina XV AT 2012	Rp86.000.000	Rp.3.283.895	3 September 2024 s/d 3 September 2025
3.	10.03.02.24 .08.0.00113	PT MNC Asuransi Indonesia	Perseroan	Kendaraan Bermotor	BMW 530I CKD AT 2019	Rp.850.000.000	Rp.9.570.000	31 Agustus 2024 s/d 31 Agustus 2025
4.	10.03.02.24 .08.0.00114	PT MNC Asuransi Indonesia	Perseroan	Kendaraan Bermotor	Toyota Veloz 1.3 AT 2016	Rp.129.000.000	Rp.3.354.683,75	29 Agustus 2022 s/d 29 Agustus 2023
5.	10.03.02.24 .08.0.00544	PT MNC Asuransi Indonesia	Perseroan	Kendaraan Bermotor	a. 1 Unit Toyota Crown 3.0 Royal Sallon tahun 2006; b. 1 Unit Toyota Kijang Innova V AT Tahun 2006;	a. Rp.201.000.000; b. Rp.74.000.000; c. Rp.47.000.000; d. Rp.63.000.000; e. Rp.131.000.000; f. Rp.220.000.000; g. Rp.125.010.000; h. Rp.1.800.000;	Rp.68.973.476,40	31 Agustus 2024 s/d 31 Agustus 2025

No.	No. Polis	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Objek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Total Premi	Jangka Waktu
					c. 1 Unit Mitsubishi Lancer GLXI Tahun 2001; d. 1 Unit Toyota Avanza 1.3 G Tahun 2007; e. 1 Unit Toyota Fortuner 2.7 G AT Tahun 2005; f. 1 Unit Toyota Camry 2.5 G/AT Tahun 2014; g. 1 Unit Toyota New Avanza 1.5 G/MT Tahun 2015; h. 1 Unit Kawasaki Kaze 110 Tahun 2000; i. 1 Unit Honda Karisma 125 D Tahun 2005; j. 1 Unit Honda Karisma 125 D Tahun 2005; k. 1 Unit Honda Karisma 125 D Tahun 2005; l. 1 Unit Toyota Avanza G MT Tahun 2006; m. 1 Unit Toyota Kijang LGX Tahun 2001; n. 1 Unit Toyota Kijang	i. Rp.3.000.000; j. Rp.3.000.000; k. Rp.3.000.000; l. Rp.62.000.000; m. Rp.58.000.000; n. Rp.80.000.000; o. Rp.79.000.000; p. Rp.83.000.000; q. Rp.135.000.000; r. Rp.126.500.000;		

No.	No. Polis	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Objek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Total Premi	Jangka Waktu
					GRD Tahun 2003; o. 1 Unit Suzuki APV GX AT Tahun 2006; p. 1 Unit Toyota Avanza 1.5 S AT Tahun 2006; q. 1 Unit Toyota Innova GAT Tahun 2013; r. 1 Unit Toyota Yaris 1.5 G AT Tahun 2015;			
6.	10.03.02.24.10.0.00559	PT MNC Asuransi Indonesia	Perseroan	Kendaraan Bermotor	Mercedes Benz C200 AT CKD 2021	Rp.635.000.000	Rp.7.740.000	22 Oktober 2024 s/d 22 Oktober 2025
7.	10.03.02.24.12.0.00110	PT MNC Asuransi Indonesia	Perseroan	Kendaraan Bermotor	Toyota Kijang Innova G AT 2018	Rp.225.000.000	Rp.4.508.000	07 Desember 2024 s/d 07 Desember 2025
8.	10.03.02.24.09.0.00538	PT MNC Asuransi Indonesia	Perseroan	Kendaraan Bermotor	Nissan Livina VL 1.5 4x2 AT 2021	Rp.210.000.000	Rp.4.064.750	15 September 2024 s/d 15 September 2025
9.	10.03.02.24.09.0.00538	PT MNC Asuransi Indonesia	Perseroan	Kendaraan Bermotor	Nissan Livina VL 1.5 4x2 AT 2012	Rp.86.000.000	Rp.3.283.895	26 November 2024 s/d 26 November 2025
10.	10.03.02.24.11.0.00472	PT MNC Asuransi Indonesia	Perseroan	Kendaraan Bermotor	Mitsubishi Xpander Cross 15PLWA 2021	Rp.236.000.000	Rp.4.528.850	26 November 2024 s/d 26 November 2025
11.	10.03.02.22.12.0.00357	PT MNC Asuransi Indonesia	MNCN	Kendaraan Bermotor	Honda CRV Hitam Nomor Mesin L15BJ1202138	Rp 1.627.200.000	Rp 22.167.200	5 Desember 2022 s/d 5 Desember 2025
12.	10.03.02.22.11.0.00875	PT MNC Asuransi Indonesia	MNCN	Kendaraan Bermotor	Honda All New Satya S M/T Nomor Mesin L12B34733413	Rp 465.000.000	Rp 12.256.000	29 November 2022 s/d 29 November 2025
13.	10.03.02.22.11.0.00738	PT MNC Asuransi Indonesia	MNCN	Kendaraan Bermotor	Toyita Fortuner Putih B 1968 PLP	Rp 1.154.000.000	Rp 21.974.200	23 November 2022 s/d 23 November 2025
14.	10.03.02.22.08.0.01052	PT MNC Asuransi Indonesia	MNCN	Kendaraan Bermotor	Mitshubishi Xpander Black Nomor Mesin 4A91KAX11	Rp 780.900.000	Rp 17.526.070	30 Agustus 2022 s/d 30 Agustus 2025

No.	No. Polis	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Objek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Total Premi	Jangka Waktu
					46			
15.	10.03.02.23 .06.0.01020	PT MNC Asuransi Indonesia	MNCN	Kendaraan Bermotor	Toyota Raize dengan Nomor Polisi B 2910 PZJ	Rp 587.600.000	Rp 14.813.720	27 Juni 2023 s/d 27 Juni 2026
16.	10.03.02.23 .12.0.01081	PT MNC Asuransi Indonesia	MNCN	Kendaraan Bermotor	Honda Brio Hitam dengan Nomor Polisi B 2455 PZU	Rp 457.600.000	Rp 12.289.120	21 Desember 2023 s/d 21 Desember 2026
17.	10.03.02.23 .12.0.01082	PT MNC Asuransi Indonesia	MNCN	Kendaraan Bermotor	Toyota Zenix dengan Nomor Polisi B 2822 PZR	Rp 1.388.400.000	Rp 19.043.400	15 Desember 2023 s/d 15 Desember 2026
18.	10.03.02.23 .11.0.00941	PT MNC Asuransi Indonesia	MNCN	Kendaraan Bermotor	Mitsubishi Expander dengan Nomor Polisi B 2449 PZT	Rp 752.700.000	Rp 17.085.210	29 November 2023 s/d 29 November 2026
19.	10.03.02.23 .12.0.00671	PT MNC Asuransi Indonesia	MNCN	Kendaraan Bermotor	Toyota Grand New Avanza dengan Nomor Polisi B 2582 PZR	Rp 526.500.000	Rp 13.304.550	18 Desember 2023 s/d 18 Desember 2026
20.	10.03.02.23 .06.0.00907	PT MNC Asuransi Indonesia	MNCN	Kendaraan Bermotor	Mitsubishi Expander dengan Nomor Polisi B 2807 PZM	Rp 842.400.000	Rp 19.085.520	27 Juni 2023 s/d 27 Juni 2026
21.	10.03.02.24 .07.0.00304	PT MNC Asuransi Indonesia	MNCN	Kendaraan Bermotor	Toyota Kijang Innova 2.0V dengan Nomor Polisi B 1758 PYQ	Rp 200.010.000	Rp 4.388.576	26 Juli 2024 – 26 Juli 2025
22.	10.03.02.24 .07.0.00099	PT MNC Asuransi Indonesia	MNCN	Kendaraan Bermotor	Mercedes Benz E 400 dengan Nomor Polisi B 171 GWT	Rp 500.000.000	Rp 6.885.375	22 Juli 2024 – 22 Juli 2025
23.	10.03.02.24 .11.0.00471	PT MNC Asuransi Indonesia	MNCN	Kendaraan Bermotor	Mitsubishi Pajero Sport dengan Nomor Polisi B 1006 PJT	Rp 405.000.000	Rp 4.872.500	30 November 2024 – 30 November 2025
24.	10.03.02.24 .11.0.00474	PT MNC Asuransi Indonesia	MNCN	Kendaraan Bermotor	Mercedes Benz E 300 dengan Nomor Polisi B 1251 PAK	Rp 1.000.000.000	Rp 10.451.250	29 November 2024 – 29 November 2025
25.	10.03.02.24 .09.0.00041	PT MNC Asuransi Indonesia	MNCN	Kendaraan Bermotor	Mitsubishi Outlander dengan Nomor Polisi B 1293 PJJ	Rp 160.000.000	Rp 4.113.050	11 September 2024 – 11 September 2025

No.	No. Polis	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Objek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Total Premi	Jangka Waktu
26.	10.03.02.24.09.0.00483	PT MNC Asuransi Indonesia	MNCN	Kendaraan Bermotor	Nissan New Terra dengan Nomor Polisi B 18733 PJQ	Rp 325.000.000	Rp 6.371.250	30 September 2024 – 30 September 2025
27.	10.03.02.25.01.0.00016	PT MNC Asuransi Indonesia	MNCN	Kendaraan Bermotor	Toyota Corolla Alt dengan Nomor Polisi B 1974 PAJ	Rp 345.000.000	Rp 6.743.250	11 January 2025 – 11 January 2026
28.	10.03.02.24.07.0.00201	PT MNC Asuransi Indonesia	MNCN	Kendaraan Bermotor	Toyota Kijang Innova dengan Nomor Polisi B 2748 POB	Rp 408.000.000	Rp 4.906.250	13 Juli 2024 – 13 Juli 2025
29.	10.03.02.24.11.0.00476	PT MNC Asuransi Indonesia	MNCN	Kendaraan Bermotor	Honda City HB dengan Nomor Polisi B 2839 POI	Rp 225.000.000	Rp 4.332.500	26 November 2024 – 26 november 2025
30.	10.03.02.24.10.0.00351	PT MNC Asuransi Indonesia	MNCN	Kendaraan Bermotor	Toyota Rush dengan Nomor Polisi B 2913 POG	Rp 205.000.000	Rp 3.975.500	13 Oktober 2024 – 13 Oktober 2025
31.	10.03.02.24.10.0.00352	PT MNC Asuransi Indonesia	MNCN	Kendaraan Bermotor	Toyota Kijang Innova dengan Nomor Polisi B 2920 POG	Rp 325.000.000	Rp 6.127.500	26 Oktober 2024 – 26 Oktober 2025
32.	10.03.02.24.08.0.00127	PT MNC Asuransi Indonesia	MNCN	Kendaraan Bermotor	Kia Seltos dengan Nomor Polisi B 2464 PKT	Rp 239.000.000	Rp 4.761.650	17 Agustus 2024 – 17 Agustus 2025
33.	10.03.02.24.08.0.00700	PT MNC Asuransi Indonesia	MNCN	Kendaraan Bermotor	1. 1 Unit Toyota Harrier 2.4 AT Tahun 2010, No. Polisi B 1810 TJB; 2. 1 Unit Lexus LX 580 AT Tahun 2012, No. Polisi B 7 MNC; 3. 1 Unit Mitsubishi Pajero Sport 4x2 Tahun 2012, No. Polisi B 1782 PJF; 4. 1 Unit Nissan Elgrand	1. Rp 198.000.000.00 untuk Toyota Harrier 2.4 AT Tahun 2010, No. Polisi B 1810 TJB; 2. Rp 698.000.000.00 untuk Lexus LX 580 AT Tahun 2012, No. Polisi B 7 MNC; 3. Rp 201.000.000.00 untuk Mitsubishi Pajero Sport 4x2 Tahun 2012, No. Polisi B 1782 PJF; 4. Rp 270.000.000.00 untuk Nissan Elgrand 2.5 Highway Star AT Tahun	Rp 84.528.565	31 Agustus 2024 – 31 Agustus 2025

No.	No. Polis	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Objek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Total Premi	Jangka Waktu
					2.5 Highway Star AT Tahun 2012, No. Polisi B 2527 SXW; 5. 1 Unit Suzuki APV GL Tahun 2007, No. Polisi B 8491 PO; 6. 1 Unit Isuzu Double Cabin 4x4 MT Tahun 2013, No. Polisi B 9383 PBC; 7. 1 Unit Isuzu TFS85HD 4x4 M/T Tahun 2012, No. Polisi B 9792 PBB; 8. 1 Unit Chevrolet Captiva 2.4L A/T Tahun 2011, No. Polisi B 1870 PKQ; 9. 1 Unit Nissan X Trail 2.0 CVT 4x2 AT Tahun 2011, No. Polisi B 1640 PKV; 10. 1 Unit Honda Accord VTI AT VC Tahun 2014, No. Polisi B 1945 PAF; 11. 1 Unit Nissan Livina X Gear 1.5 AT 4x2 Tahun	2012, No. Polisi B 2527 SXW; 5. Rp 56.000.000.00 untuk Suzuki APV GL Tahun 2007, No. Polisi B 8491 PO; 6. Rp 125.500.000.00 untuk Isuzu Double Cabin 4x4 MT Tahun 2013, No. Polisi B 9383 PBC; 7. Rp 116.000.000.00 untuk Isuzu TFS85HD 4x4 M/T Tahun 2012, No. Polisi B 9792 PBB; 8. Rp 125.010.000.00 untuk Chevrolet Captiva 2.4L A/T Tahun 2011, No. Polisi B 1870 PKQ; 9. Rp 117.000.000.00 untuk Nissan X Trail 2.0 CVT 4x2 AT Tahun 2011, No. Polisi B 1640 PKV; 10. Rp 215.000.000.00 untuk Honda Accord VTI AT VC Tahun 2014, No. Polisi B 1945 PAF; 11. Rp 78.000.000.00 untuk Nissan Livina X Gear 1.5 AT 4x2 Tahun 2011, No. Polisi B 3 MNC; 12. Rp 127.000.000.00 untuk Toyota All New Avanza Veloz 1.5 Tahun 2015, No. Polisi B 1669 PRY; 13. Rp 112.000.000.00 untuk Honda Mobilio E CVT AT Prestige Tahun 2014, No. Polisi B 1969 PRH; 14. Rp 198.000.000.0		

No.	No. Polis	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Objek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Total Premi	Jangka Waktu
					2011, No. Polisi B 3 MNC; 12. 1 Unit Toyota All New Avanza Veloz 1.5 Tahun 2015, No. Polisi B 1669 PRY; 13. 1 Unit Honda Mobilio E CVT AT Prestige Tahun 2014, No. Polisi B 1969 PRH; 14. 1 Unit Honda HRV CVT CKD Tahun 2015, No. Polisi B 1161 PYC; 15. Toyota Kijang Innova J Tahun 2014, No. Polisi B 1167 PRY; 16. 1 Unit BMW All New X1 S Drive Sport Tahun 2016, No. Polisi B 2086 SBK; 17. 1 Unit Nissan Xtrail 2.0 CVT AT Tahun 2012, No. Polisi B 1304 PZD; 18. 1 Unit Nissan Gr Livina 1.5xV4x2 AT Tahun 2014, No. Polisi B 1410 PRU; 19. 1 Unit	0 untuk Honda HRV CVT CKD Tahun 2015, No. Polisi B 1161 PYC; 15. Rp 126.500.000.00 untuk Toyota Kijang Innova J Tahun 2014, No. Polisi B 1167 PRY; 16. Rp 405.000.000.00 untuk BMW All New X1 S Drive Sport Tahun 2016, No. Polisi B 2086 SBK; 17. Rp 126.500.000.00 untuk Nissan Xtrail 2.0 CVT AT Tahun 2012, No. Polisi B 1304 PZD; 18. Rp 125.010.000.00 untuk Nissan Gr Livina 1.5xV4x2AT Tahun 2014, No. Polisi B 1410 PRU; 19. Rp 207.000.000.00 untuk Toyota Fortuner 2.5 G AT TRD Diesel Tahun 2013, No. Polisi B 2150 UBF; 20. Rp 3.000.000.00 untuk Honda Supra X Motorcycle Tahun 2007, No. Polisi B 6209 PIU.		

No.	No. Polis	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Objek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Total Premi	Jangka Waktu
					Toyota Fortuner 2.5 G AT TRD Diesel Tahun 2013, No. Polisi B 2150 UBF; 20. 1 unit Honda Supra X Motorcycle Tahun 2007, No. Polisi B 6209 PIU.			
34.	10.03.02.24.12.0.00521	PT MNC Asuransi Indonesia	MNCN	Kendaraan Bermotor	Toyota Rush dengan Nomor Mesin 2NR4D49739	Rp 681.200.000	Rp 16.292.110	23 Desember 2024 – 23 Desember 2027
35.	10.03.02.22.12.0.00357	PT MNC Asuransi Indonesia	MNCN	Kendaraan Bermotor	Honda CRV dengan Nomor Mesin L15BJ1202138	Rp 1.617.200.000	Rp 22.167.200	5 Desember 2022 – 5 Desember 2025
36.	10.03.02.22.10.0.00801	PT MNC Asuransi Indonesia	MNCN	Kendaraan Bermotor	Toyota Alphard dengan Nomor Mesin 2AR2827504	Rp 3.473.200.000	Rp 41.581.400	24 Oktober 2022 – 24 Oktober 2025
37.	10.03.02.24.07.0.01034	PT MNC Asuransi Indonesia	MNCN	Kendaraan Bermotor	Toyota Raize dengan Nomor Polisi B 2433 PIE, dan Nomor Mesin WAA113502	Rp 555.620.000	Rp 14.058.814	23 Juli 2024 – 23 Juli 2025
38.	10.03.02.22.07.0.00683	PT MNC Asuransi Indonesia	MNCN	Kendaraan Bermotor	Toyota Raize dengan Nomor Mesin WAA113502	Rp 960.700.000	Rp 21.758.610	26 Juli Oktober 2022 – 26 Juli 2025
39.	10.03.02.22.07.0.00377	PT MNC Asuransi Indonesia	MNCN	Kendaraan Bermotor	Toyota Rush dengan Nomor Polisi B 2920 POR, Nomor Mesin 2NRG838445	Rp 738.244.000	Rp 16.797.841	6 Juli 2022 – 6 Juli 2025
40.	10.03.02.22.04.0.00633	PT MNC Asuransi Indonesia	MNCN	Kendaraan Bermotor	ToyotaKijang Innova 2.0 G AT dengan Nomor Mesin	Rp 945.620.000	Rp 21.422.326	26 April 2022 – 26 April 2025 ***Keterangan**: Dalam proses perpanjangan*

No.	No. Polis	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Objek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Total Premi	Jangka Waktu
					1TRA989345			
41.	10.03.02.24.07.0.01073	PT MNC Asuransi Indonesia	MNCN	Kendaraan Bermotor	Wuling Binguo dengan Nomor Polisi B1731 PNP	Rp 829.400.000	Rp 21.022.360	24 Juli 2024 – 24 Juli 2027
42.	10.03.02.24.10.0.00589	PT MNC Asuransi Indonesia	MNCN	Kendaraan Bermotor	Toyota Raize dengan Nomor Polisi 2288 PIF dan Nomor Mesin WAA133570	Rp 590.200.000	Rp 14.912.940	23 Oktober 2024 – 23 Oktober 2027
43.	01082012401892	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk dan PT MNC Asuransi Indonesia	MNCN	Property All Risk	Gedung MNC News Centre	Rp892.140.570.011	Rp974.267.502	5 Desember 2022 – 5 Desember 2025
44.	10.03.01.24.12.0.00360	PT MNC Asuransi Indonesia	INFOKOM	Property All Risk	Gedung di Cikarang, Kawasan Industri Karya Deka, Jl. Karya Deka Blok C, Kav. No. 2, Desa Pasir Sari, Kec. Lemahabang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	Rp4.120.000.000	Rp4.551.776	31 Desember 2024 – 31 Desember 2025
45.	D10101162500442	PT Asuransi Buana Independent	INFOKOM	Property All Risk	Private Warehouse /Newspaper Printers/Kantor di Jl. Yos Sudarso No. 55B RT.03/RW.03, Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok – Jakarta Utara	Rp4.191.000.000	Rp4.754.095,20	31 Januari 2025 – 31 Januari 2026
46.	Cover Note No. 0460/ABI/J-TRUST/III/2025 tanggal 25 Maret 2025	PT Asuransi Buana Independent	INFOKOM	Property All Risk	Private Warehouse /Ruang Server di Jl. Yos Sudarso No. 55A, Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok – Jakarta Utara	Rp10.660.500.000	Rp17.344.847	30 Maret 2025 – 30 Maret 2026
47.	Quotation Slip No. 10-0101-2401943	PT Asuransi Buana Independent	INFOKOM	Asuransi Kebakaran	Percetakan Koran, di Jl. Rungkut Industri III,	Rp3.202.203.000	Rp3.774.162,09	31 Desember 2024 – 31 Desember 2025

No.	No. Polis	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Objek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Total Premi	Jangka Waktu
	tanggal 20 Oktober 2024				No. 49, Kel. Rungkut Menanggal, Kec. Gunungany ar, Surabaya 60293, Indonesia			
48.	10-0131-00065-24-11	PT Daya Mitra Tbk	INFOKOM	Asuransi Gempa Bumi	Jl. Rungkut Industri III, No. 49, Kel. Rungkut Menanggal, Kec. Gunungany ar, Surabaya 60293, Indonesia	Rp3.202.203.000	Rp3.202.203	31 Desember 2024 – 31 Desember 2025
49.	Cover Note No. 0460/ABI/J-TRUST/III/2025 tanggal 25 Maret 2025	PT Asuransi Buana Independent	INFOKOM	Property All Risk	Private Warehouse /Ruang Server di Jl. Yos Sudarso No. 55A, Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok – Jakarta Utara	Rp10.660.500.000	Rp15.650.362	30 Maret 2025 – 30 Maret 2026

Keterangan :

- *Perseroan dan Anak Perusahaannya telah mengasuransikan seluruh asset material Perseroan dan jumlah pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.*
- *Perjanjian-perjanjian asuransi yang dibuat antara Perseroan dan Entitas Anak dengan PT MNC Asuransi Indonesia terkualifikasi sebagai Transaksi Afiliasi, karena pengendalian secara tidak langsung oleh pihak yang sama. Oleh karenanya, transaksi tersebut merupakan suatu transaksi afiliasi yang tunduk pada Peraturan OJK No. 42/2020.*

10. KETENTUAN HUKUM DAN KEBIJAKAN TERKAIT PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Perseroan menyadari kegiatan usaha yang dijalankan perlu memperhatikan adanya tantangan dan risiko terkait dampak perubahan iklim, pengelolaan lingkungan serta perubahan perilaku pemangku kepentingan. Perseroan telah berupaya untuk mengelola risiko ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan baik dalam rantai bisnis perusahaan. Perseroan juga berupaya meningkatkan kesadaran semua pemangku kepentingan, dari mitra kerja, *vendor*, pihak ketiga, hingga pelanggan untuk menerapkan proses rantai bisnis yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

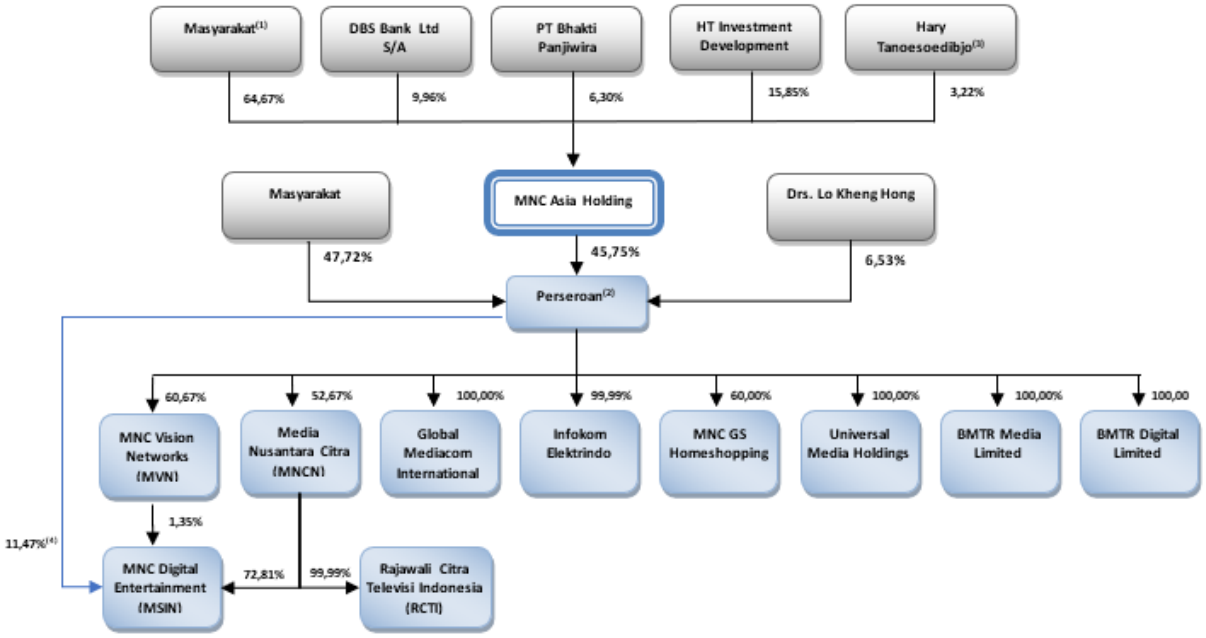
Seluruh kegiatan operasi Perseroan telah sejalan dengan prinsip kelestarian lingkungan hidup. Sejak tahun 2021, tidak terdapat sanksi dan denda yang diberikan kepada Perseroan terkait pelanggaran terhadap hukum dan peraturan lingkungan. Komitmen terhadap kelestarian lingkungan hidup telah sejalan dengan berbagai undang-undang dan standar yang ditaati Perseroan, antara lain:

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan;
3. ISO 31000:2009 Sistem Manajemen Risiko.

Biaya yang telah dikeluarkan Perseroan atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp98.539.000,00 dan Rp81.500.000,00.

11. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM, PERUSAHAAN ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI

Hubungan Kepemilikan antara Perseroan dengan Entitas Anak berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Desember 2024:



(1) Kepemilikan dibawah 5%.

(2, 3) Pihak yang menjadi pengendali Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 3/POJK.04/2021 sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 45 Tahun 2024 jo. POJK No. 9/POJK.04/2017 adalah PT MNC Asia Holding Tbk (dahulu Bernama PT MNC Investama Tbk). Orang Perseroangan yang menjadi pemilik manfaat akhir (Ultimate Beneficial Owner/"UBO") sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("Perpres No. 13/2018") adalah Hary Tanoesoedibjo. Perseroan telah melakukan pengkinian informasi UBO sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 21 Perpres No. 13/2018 kepada Instansi Berwenang (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) dan pengkinian informasi UBO terakhir pada tanggal 13 Mei 2024, sebagaimana ternyata dalam bukti Informasi Penyampaian Data tanggal 13 Mei 2024.

(4) Saat ini Perseroan telah memiliki sejumlah 6.957.083.060 (enam miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu enam puluh) lembar saham MSIN, yang merupakan 11,47% (sebelas koma empat puluh tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor MSIN, sebagaimana dimuat dalam Daftar Pemegang Saham MSIN tanggal 31 Desember 2024

Terkait struktur kepemilikan saham kelompok usaha Perseroan yang dibuat dalam bentuk diagram dapat mengacu ke Sub-bab I-1 Bab VIII Prospektus ini.

Hubungan Afiliasi Pengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Entitas Anak

Dewan Komisaris dan Dewan Direksi	Perseroan	MNCN	IPTV	GMI	Universal
Hary Tanoesoedibjo	DU	KU		D	
Syafril Nasution	D	K	DU		
Ruby Panjaitan	D	D	KU		
Christophorus Taufik Siswandi	D				
Indra Pudjiastuti	D				
Rosano Barack	KU				
Mohamed Idwan Ganie	KI				
Rachmat Nurhadi			D		
Beti Puspitasari Santoso	KI				
Noersing		DU			
Kanti Mirdiati Imansyah		WDU			
Valencia Herliani Tanoesoedibjo		D			
Joel Richard Hogarth		KI			
Cahyarina Agustina Asri		D			
Tantan Sumartana		D			
Dini Aryanti Putri		D			
Muhammad Zainul Majdi		WKU/KI			
Herman Kusno			D		

Dewan Komisaris dan Dewan Direksi	Perseroan	MNCN	IPTV	GMI	Universal
Vera Tanamihardja			D		
Mashudi Hamka			K		
Agus Mulyanto			KI		
Sandy Wiguna			KI		
Jiohan Sebastian				D	
Adhyatmasari Yudhawati					D
Gadis Ratnasari J Sjahrir			D		

Keterangan :
KU : Komisaris Utama
WKU : Wakil Komisaris Utama
KI : Komisaris Independen
K : Komisaris
DU : Direktur Utama
WDU : Wakil Direktur Utama
D : Direktur

B. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum adalah sebagai berikut ini:

PT MNC Asia Holding Tbk (dahulu PT MNC Investama Tbk)

Riwayat Singkat

PT MNC Asia Holding Tbk ("**MNC Asia Holding**") sebelumnya bernama PT MNC Investama Tbk dan didirikan dengan Akta Perseroan Terbatas No. 22 tanggal 2 Nopember 1989, dibuat di hadapan Soetjipto, S.H, Notaris di Surabaya ***juncto*** Akta Perubahan No. 193 tanggal 15 Nopember 1989, dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta, yang keduanya telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat Keputusannya No. C2-10673.HT.01.01.Th.89 tanggal 22 Nopember 1989, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 19 Desember 1989, berturut-turut di bawah No. 1850/1989 dan No. 1851/1989, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 18 tanggal 2 Maret 1990, Tambahan No. 813.

Anggaran Dasar MNC Asia Holding telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah mengenai: (i) perubahan pasal 20 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 148 tanggal 28 Juni 2023, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Akta No. 148 tanggal 28 Juni 2023**"), yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09.0138111 Tahun 2023 tanggal 10 Juli 2023; dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0129021.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 10 Juli 2023 dan diumumkan dalam Berita Negara RI No. 57 Tambahan Berita Negara RI No. 021093 Tahun 2023.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MNC Asia Holding, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha MNC Asia Holding adalah berusaha dalam bidang aktivitas keuangan dan asuransi, aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi dan penunjang usaha lainnya, pendidikan, informasi dan komunikasi, aktivitas jasa lainnya, perdagangan, industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, pertanian, kehutanan dan perikanan, pengangkutan dan pergudangan, konstruksi, dan real estat, namun kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah Aktivitas Perusahaan Holding. Perusahaan merupakan induk perusahaan dari beberapa entitas anak termasuk Perseroan.

Alamat kantor pusat MNC Asia Holding berlokasi di MNC Financial Center, lantai 21, Jalan Kebon Sirih Nomor 21 – 27, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10340.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 97 tanggal 26 Juni 2024, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0221675

tanggal 3 Juli 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0133042.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 3 Juli 2024, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNC Asia Holding yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Hary Tanoesoedibjo
Wakil Direktur Utama	:	Susanty Tjandra Sanusi
Direktur	:	Tien
Direktur	:	Natalia Purnama
Direktur	:	Henry Suparman
Direktur	:	Mashudi Hamka
Direktur	:	Santi Paramita

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen	:	Agung Firman Sampurna
Wakil Komisaris Utama	:	Darma Putra Wati
Komisaris	:	Liliana Tanaja Tanoesoedibjo
Komisaris	:	Valencia Herliani Tanoesoedibjo
Komisaris Independen	:	Herbert Parulian Sitohang

Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 29 tanggal 24 Agustus 2022 ('**Akta No. 29 tanggal 24 Agustus 2022**"), dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Keputusan No. AHU-0060365.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 24 Agustus 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0166506.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 24 Agustus 2022 *Jo.* Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BHIT per tanggal 28 Februari 2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MNC Asia Holding dengan kepemilikan saham sebesar 5% (lima persen) atau lebih per 31 Maret 2025 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	**205.000.000.000**	**20.500.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- HT Investment Development Ltd	13.238.835.716	1.323.883.571.600	15,85
- DBS Bank Ltd S/A	8.321.109.800	832.110.980.000	9,96
- PT Bhakti Panjiwira	5.262.220.112	526.222.011.200	6,3
- Masyarakat*	54.034.097.831	5.403.409.783.100	64,67
- Hary Tanoesoedibjo	2.686.468.300	268.646.830.000	3,22
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Sebelum Saham Treasury)	**83.542.741.759**	**8.354.274.175.900**	**100,00**
Saham Treasury	**2.525.414.946**	**252.541.494.600**	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**86.068.156.705**	**8.606.815.670.500.00**	
Saham dalam Portepel	**118.931.843.295**	**11.893.184.329.500**	

**) kepemilikan saham di bawah 5%*

C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah mengalami perubahan sebagaimana termaktub dalam Berdasarkan Akta Pernyataan Rapat No. 77 tanggal 19 Juni 2023, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0132593 tanggal 27 Juni 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0121125.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 27 Juni 2023. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Susunan Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Rosano Barack
Komisaris Independen : Mohamed Idwan Ganie

Komisaris Independen : Beti Puspitasari Santoso

Susunan Direksi :
Direktur Utama : Hary Tanoesoedibjo
Direktur : Ruby Panjaitan
Direktur : Syafril Nasution
Direktur : Christophorus Taufik Siswandi
Direktur : Indra Pudjiastuti

Keterangan:
Bahwa seluruh Susunan Direksi dan Dewan Komisaris diatas telah diangkat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, dan menjabat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatan.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Rosano Barack
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 71 tahun. Lahir di Jakarta pada 26 Desember 1953. Beliau menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 29 Mei 1998 berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 2 Juni 1998. Beliau juga menjadi Direktur Utama PT Plaza Indonesia Realty Tbk (1998-sekarang).

Beliau menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1979 dari Universitas Waseda yang berlokasi di Tokyo, Jepang.



DR. Moh. Idwan Ganie, S.H.
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 69 tahun. Lahir di Amsterdam, 23 Mei 1955. Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen PT Global Mediacom Tbk sejak tanggal 19 Juni 2006 berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 73 tanggal 19 Juni 2006.

Dr. Ganie lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (SH), memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum dari Universitas Hamburg (Dr.) dan gelar Fellow dari Singapore Institute of Arbitrators (FSIArb).

Dr. Ganie mempunyai ijin praktek hukum sebagai Advokat dan ijin sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal. Pada saat ini, beliau juga Chairman pada firma hukum Ganie and Partners (GAP) di Jakarta.

Dr. Ganie adalah Ketua Perhimpunan Konsultan Hukum Persaingan Usaha (PERKUMPUS) dan Ketua Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI). Dr. Ganie adalah anggota berbagai organisasi profesi dalam dan luar negeri dan juga anggota dewan Global Leadership Board pada US-ASIA Institute (USAI) di Washington DC.

Dalam bidang peradilan, Dr. Ganie adalah arbiter pada lembaga arbitrase domestik dan internasional, antara lain pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Singapore International Arbitration Centre (SIAC), Asian

International Arbitration Centre (AIAC) di Kuala Lumpur dan Court of Arbitration for Sport (CAS) di Lausanne. Dr. Ganie juga secara teratur bertindak sebagai saksi ahli hukum Indonesia di badan peradilan dalam dan luar negeri.

Di bidang akademik Dr. Ganie adalah pengajar mata kuliah Penulisan Hukum, Pendapat Hukum dan Keterampilan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) selama lebih dari 25 tahun. Dr. Ganie telah banyak mempublikasikan tulisan hukum di dalam dan luar negeri, terakhir di tingkat internasional edisi ke-4 buku "Corporate Acquisitions and Mergers in Indonesia" (Kluwer-Belanda) dan secara teratur adalah pembicara di dalam dan luar negeri tentang berbagai materi hukum Indonesia dan internasional.

Dr. Ganie secara teratur menerima berbagai penghargaan dalam dan luar negeri di bidang profesi sebagai konsultan hukum di bidang arbitrase/litigasi dan manajemen kantor hukum, antara lain dari Lawyers Monthly di London beberapa kali sebagai salah satu dari 100 lawyer terbaik di dunia, dari Asian Legal Business di Singapura sebagai Indonesian Managing Partner of the Year (2017), pada tahun 2020 dari Asia Mena Inhouse sebagai "External Counsel of the Year" (untuk daerah Asia, Africa dan Timur Tengah) dan dari Leaders In Law sebagai "Global Awards Winner" Indonesia untuk bidang Dispute Resolution pada tahun 2023.



Beti Puspitasari Santoso
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 65 tahun. Lahir di Cirebon 31 Juli 1959. Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2015.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Pimpinan Cabang PT Bank Dagang Nasional Indonesia sejak tahun 1987 – 1995, Direktur PT PT MNC Asia Holding Tbk (dahulu PT MNC Investama Tbk) sejak tahun 1996 – 1999 dan dilanjutkan pada tahun 2000 - 2002, Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk. sejak tahun 2002 – 2004, Komite Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) sejak tahun 2001 – 2005, Direktur PT Rajawali Citra Televisi Indonesia sejak tahun 2004 – 2007 kemudian dilanjutkan pada tahun 2009 – 2013, dan Wakil Direktur Utama PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) sejak tahun 2013 – 2014.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Parahyangan, Bandung pada tahun 1985.

Direksi



Hary Tanoesoedibjo
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Lahir di Surabaya pada 26 September 1965. Beliau menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2002. Selain itu beliau juga menjabat Komisaris Utama PT Global Informasi Bermutu (Global TV) sejak tahun 2009, Wakil Presiden Direktur PT Nusa Dua Graha International sejak tahun 2016, Komisaris Utama PT MNC Televisi Indonesia (MNCTV) sejak tahun 2011, , Direktur Utama PT MNC Televisi Network (iNewsTV) sejak tahun 2020, Komisaris Utama PT Media Nusantara Citra Tbk sejak tahun 2016, Direktur Utama PT MNC OTT Network sejak tahun 2020, Komisaris Utama pada PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) sejak tahun 2019, Koordinator Pengawas Koperasi Karyawan MNC Grup sejak tahun 2017, Direktur Utama PT MNC Digital Indonesia sejak tahun 2017, Komisaris Utama PT MNC Land Tbk sejak tahun 2022, Direktur Utama PT MNC Asia Holding Tbk sejak tahun 2022.

Beliau memperoleh gelar *Bachelor of Commerce (Honours)* dari Carleton University, Ottawa, pada tahun 1988 dan gelar *Master of Business Administration* dari Ottawa University, Ottawa, pada tahun 1989.



Syafril Nasution
Direktur

Warga Negara Indonesia, 63 tahun. Lahir di Medan pada 17 April 1961. Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2015.

Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT MNC Multimedia Network (2024 – sekarang); serta Komisaris dari PT Infokom Elektrindo (2021 – sekarang), PT Media Nusantara Citra Tbk (2018 – sekarang), dan PT MNC Televisi Indonesia (2015 – sekarang). Selain itu, beliau juga menduduki posisi sebagai Direktur Utama dari PT MNC Vision Networks Tbk (2024 – sekarang), PT iNews Digital Indonesia (2024 – sekarang), PT MNC Okezone Network (2024 – sekarang), PT Sindonews Portal Indonesia (2024 – sekarang), dan PT Visi Citra Mulia (2024 – sekarang); Wakil Direktur Utama dari PT MNC Televisi Networks (2024 – sekarang) dan PT MNC Portal Indonesia (2024 – sekarang) serta Direktur *Corporate Secretary* MNC Group (2016 – sekarang), PT Global Mediacom Tbk (2015 – sekarang), dan PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (2009 – sekarang).

Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Komisaris Utama dari berbagai perusahaan yaitu PT Bhakti Migas Resources (2022 – 2023), PT Indonesia Air Transport (2021 – 2024), PT MNC Televisi Network (iNewsTV) (2020 – 2022, 2015 – 2016 dan 2013 – 2014), PT MNC Portal Indonesia (2020 – 2021), PT MNC Vision Networks Tbk (2019 -2024), PT iNews Digital Indonesia (iNews.id) (2019 – 2020), PT Bhakti Coal Resources (2017 – 2022), PT MNC Energy Investment Tbk (2016 - 2022), dan PT MNC Energi (2015 – 2023). Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama PT Media Nusantara Informasi (2014 – 2023) dan Komisaris dari PT MNC Portal Indonesia (2022 – 2024), PT Suara Digital Indonesia (2021 – 2024), PT MNC Media Baru (Buddyku) (2021-2023), PT iNews Digital Indonesia (2020 - 2024), PT MNC Okezone Network (2018 -2024), PT MNC Televisi Network (iNewsTV) (2016 – 2020, 2022 - 2024), PT MNC Vision Networks Tbk (2015 – 2019), PT Sindonews Portal Indonesia (2014 – 2024). Beliau juga pernah menduduki posisi sebagai Direktur Utama dari berbagai perusahaan yaitu PT MNC Tol Investama (2013 – 2017), PT MNC Infrastruktur Utama (2013 –

2014), PT MNC Televisi Network (iNewsTV) (2010 – 2013), PT Indonesia Air Transport (2009 – 2016), PT Hikmat Makna Aksara (2009 – 2011), PT Media Nusantara Informasi (2008 – 2012), PT Media Nusantara Press (2008 – 2009), PT Bima Sepaja Abadi (1993 – 2000) serta Wakil Direktur Utama PT Media Nusantara Informasi (2008), Direktur Komersil PT Multi Nitrotama Kimia (1999 – 2008) dan Direktur PT Bimantara Siti Wisesa (1995 – 1997).

Selain menduduki berbagai posisi penting di perusahaan-perusahaan tersebut, beliau juga terlibat aktif dalam berbagai organisasi, seperti Wakil Ketua Umum II Yayasan Jalinan Kasih – MNC Peduli (2025 - sekarang), Ketua Harian Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB.POBSI) (2024 - sekarang), Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) (2023 – sekarang), Ketua Asosiasi Produsen dan Distributor Bahan Peledak Indonesia (Asprodispa) (2021 – sekarang), Ketua Yayasan Peduli Pesantren (2015 – sekarang). Sebelumnya beliau pernah menjabat Ketua Yayasan Jalinan Kasih – MNC Peduli (2016 – 2025), Wakil Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) (2014 – 2024), Wakil Ketua Umum PB.POBSI (2019-2023), Ketua Umum ATVSI (2019 – 2023), Wakil Ketua ATVSI (2015 – 2019), Ketua Bidang Penerbangan Berjadwal untuk *Indonesian National Air Carriers Association* (INACA) (2010 – 2014) dan Wakil Ketua Umum INACA (2009 – 2010).

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1998 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas (STIE Perbanas).



Christophorus Taufik Siswandi
Direktur

Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Lahir di Malang, 25 Februari 1967. Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2015.

Pengalamannya dalam bidang hukum meliputi beberapa posisi penting, yaitu Senior Vice President Legal Counsel Group of CEO di PT Media Nusantara Citra Tbk (2011-2015), Legal Deputy Director and Corporate Secretary di PT Mobile-8 Telecom Tbk (2005-2008) dan Legal General Manager PT Natrindo Telepon Selular (Axis) (2005). Beliau juga pernah menjabat sebagai Corporate Lawyer di PT Excelcomindo Pratama Tbk (1999-2005), Manager of Plant Property Acquisition (1998-1999) dan Pengacara (1996-1998). Beliau juga pernah menjadi Legal Supervisor di PT Jan Darmadi Corporation (1993-1996).

Beliau meraih gelar Sarjana Hukum, jurusan Hukum Perdata dari Universitas Trisakti pada tahun 1992.



Indra Pudjiastuti Prastomiyono
Direktur

Warga Negara Indonesia, 63 tahun. Lahir di Surabaya pada 24 November 1961. Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2008.

Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris PT IPTV Vision Networks Tbk (2019 – Juni 2024). Sebelum bergabung dengan MNC Group, beliau bekerja di Citibank Indonesia sebagai Credit Risk & Operations Director dan HR Director (2001 – 2008). Beliau juga pernah menjabat sebagai Principal Consultant di Pricewaterhouse Coopers (PwC Indonesia) di tahun 1997 – 2000 dan sebagai GM Learning & Development di PT Excelcomindo Pratama Tbk. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Research Assistant di Notre Dame University, Indiana, Amerika Serikat tahun 1993 – 1994.

Di awal karir, beliau dipercaya sebagai Product Manager dan R&D Manager di PT Kemfoods, Jakarta. Setelahnya sebagai GM Divisi Public Training di Institut Pendidikan PPM Manajemen, Jakarta, yang berperan aktif sebagai pembicara di berbagai seminar Leadership & Human Resources Management (HRM) yang diselenggarakan di universitas-universitas atau Forum Publik.

Beliau memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) di tahun 1992, Jurusan Marketing dari Strathclyde Graduate Business School (SGBS), Glasgow, United Kingdom.

Beliau mempunyai "passion" dalam mengembangkan generasi muda untuk tumbuh dan berkembang menjadi pemimpin yang efektif. Beliau juga aktif menjadi Pembicara Tamu di berbagai seminar untuk berbagi pengalamannya tentang manajemen sumber daya manusia dan kepemimpinan. Beliau menerima berbagai apresiasi atas kepiawaiannya sebagai seorang pemimpin, antara lain pada Juni 2022, ia mendapat penghargaan sebagai **"Best Wanita Inspiratif Perubahan 2022"** oleh Seven Media Asia.



Ruby Panjaitan
Direktur

Warga Negara Indonesia, 55 tahun. Lahir di Padang, 16 Mei 1969. Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2020.

Saat ini, beliau menjabat sebagai Direktur PT Media Nusantara Citra Tbk (2018 – sekarang), Komisaris Utama PT MNC Vision Networks Tbk (Juni 2024 – sekarang) dan Komisaris Utama PT MNC Sky Vision Tbk (Juni 2024 – sekarang). Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT MNC Televisi Network, Komisaris PT Rajawali Citra Televisi Indonesia dan Komisaris PT Infokom Elektrindo.

Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris PT MNC Televisi Network (2020 - Desember 2024), Direktur PT Media Nusantara Informasi (2008 – 2009), Direktur PT MNC Televisi Indonesia (2009 – 2018) dan Direktur PT MNC Televisi Network (2017 – 2018). Sebelum bergabung dengan MNC Group, beliau berkarir sebagai auditor selama 12 tahun di Deloitte Touche Tohmatsu Auditing Firm Indonesia.

Beliau meraih gelar Magister Manajemen (MM/MBA) dari IPMI International Business School Indonesia pada tahun 1994, setelah lulus dan mendapat gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 2010.

Beliau terdaftar sebagai anggota Ikatan Akuntan Indonesia serta anggota Ikatan Kuasa Hukum dan Advocat Pajak Indonesia. Beliau memperoleh gelar *Chartered Accountant* (CA) di Indonesia, sertifikat Register Negara Akuntan (RNA) dan *Fellow Certified Public Accountant* (FCPA) Australia serta Asean CPA. Beliau juga mendapatkan gelar *Chartered Global Management Accountant* (CGMA) dan *Associated Chartered Management Accountant* (ACMA) dari *Chartered Institute of Management Accountant* (CIMA), United Kingdom.

Tidak terdapat manajemen maupun pemegang saham Perseroan yang memiliki kepentingan dengan perusahaan lain.

Manajemen Perseroan tidak memiliki kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitas sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Tidak terdapat hal-hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

D. TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/GCG) secara konsisten dan berkesinambungan merupakan komitmen penuh dari Perseroan, dimana dalam pengelolaan aktivitas Perseroan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang saham dengan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Implementasi prinsip-prinsip GCG, yakni: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran, dalam aktivitas Perseroan diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan dan keberhasilan Perseroan serta mampu meningkatkan reputasi sebagai perusahaan yang terpercaya di mata pemangku kepentingan.

Untuk mempertahankan posisi dalam industri media yang sangat dinamis dan kompetitif, Perseroan terus berusaha untuk menunjang budaya Perseroan, yang berlandaskan pada etika kerja dan bisnis yang telah disepakati dan dijunjung tinggi bersama.

Struktur tata kelola Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundangan yang berlaku, tergambarkan pada organ-organ utama Perseroan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Setiap organ memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan yang berlandaskan prinsip independensi serta memiliki peranan yang penting dalam upaya Perseroan untuk menerapkan GCG secara efektif.

RUPS menjadi wadah bagi pemegang saham yang memiliki kewenangan dalam pembuatan keputusan Perseroan, yang tidak dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk keputusan pengangkatan dan pemberhentian jabatan Dewan Komisaris dan Direksi itu sendiri. Dewan Komisaris melakukan pengawasan yang memadai terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan arahan untuk mendorong kinerja Perseroan agar menjadi lebih baik yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab penuh Direksi sesuai amanah yang diberikan oleh pemegang saham.

1. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan baik mengenai Perseroan maupun kegiatan usaha dan memberikan nasihat dan saran kepada Direksi sehubungan dengan usaha Perseroan, manajemen risiko, GCG dan masalah-masalah yang dihadapi Perseroan.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris diatur dalam Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:

a. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

    1. Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan serta memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan visi, misi dan tujuan Perseroan.

2. Berkaitan dengan tugasnya tersebut di atas, Dewan Komisaris membuat laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku yang baru lampau untuk disampaikan kepada RUPS.

3. Dewan Komisaris setiap waktu dapat memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.

4. Setiap waktu dalam jam kerja kantor berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;

5. Dalam menjalankan tugasnya berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.

6. Menjaga kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS.

7. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Nominasi, Komite Remunerasi, dan komite lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

8. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.

b. Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris wajib menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

2. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

Dewan Komisaris telah melaksanakan kegiatan utama sepanjang tahun 2024 dengan melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan baik mengenai Perseroan maupun kegiatan usaha dan memberikan nasihat dan saran kepada Direksi sehubungan dengan usaha Perseroan, manajemen risiko, GCG dan masalah-masalah yang dihadapi Perseroan.

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan, untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi diatur dalam Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:

a. Tugas dan Wewenang Direksi

1. Direksi memiliki kewenangan untuk mengurus Perseroan dan menentukan kebijakan serta mengambil keputusan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

2. Direksi mengurus kekayaan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi menyusun rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.

3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian.

4. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, maka Wakil Direktur Utama (jika ada) berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, dan dalam hal Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

5. Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

6. Direksi wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

b. Tanggung Jawab Direksi

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengurusan Perseroan. Direksi wajib mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi PT Global Mediacom Tbk.

Direktur Utama

- Memimpin MNC Grup untuk membangun dan mempertahankan kepemimpinan pasar di industri media.
- Mengembangkan, mengidentifikasi dan memimpin langsung implementasi strategi bisnis Perseroan.
- Menjaga reputasi baik Perseroan mewakili para stakeholders termasuk pemegang saham Perseroan.
- Mengembangkan rencana strategis untuk mencapai misi dan tujuan Perseroan dan untuk meningkatkan pendapatan, keuntungan, dan pertumbuhan.
- Merencanakan, mengembangkan dan mengimplementasikan seluruh strategi Perseroan untuk menghasilkan sumber daya dan/atau pendapatan.
- Memperbarui tujuan dan rencana kerja Perseroan sesuai dengan kondisi terkini.
- Menjalankan tanggung jawab Perseroan sesuai dengan ketentuan hukum dan etika standar yang berlaku.
- Membangun hubungan yang baik dengan perusahaan finansial guna mencari pendanaan untuk mengembangkan Perseroan.
- Melakukan pengawasan atas semua aktivitas manajemen keuangan Perseroan dan seluruh unit usaha Perseroan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan manajemen keuangan.

Direktur Keuangan

- Mengelola dan/atau melakukan pengawasan atas semua aktivitas manajemen keuangan Perseroan dan/atau seluruh unit usaha yang meliputi perencanaan keuangan, pengawasan keuangan, manajemen keuangan dan administrasi keuangan.
- Melakukan pengawasan terhadap tinjauan usaha serta anggaran Perseroan dan unit usaha untuk memastikan bahwa kinerja telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
- Memastikan bahwa proses pelaporan akuntasi Perseroan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Menetapkan asumsi anggaran Perseroan dan unit-unit usaha serta petunjuk penyusunan anggaran untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun realistis.

- Menyelesaikan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku serta kaidah-kaidah *Good Corporate Governance*.

Direktur MNC Grup Sekretariat Perusahaan

- Mengembangkan strategi dan kebijakan komunikasi internal dan eksternal dengan semua pemangku kepentingan, untuk secara terbuka dan akuntabilitas menyampaikan berita dari Perseroan.
- Mengawasi dan mengkoordinasi fungsi-fungsi terkait di tingkat MNC Grup dan menjamin keselarasan komunikasi internal Perseroan dalam tanggung jawab dan pelaksanaan tugas.
- Memberi masukan kepada Direksi Perseroan dan perwakilan dari Perseroan dalam hubungannya dengan semua pemangku kepentingan dalam melakukan komunikasi kegiatan Perseroan.
- Memastikan dan membangun citra baik Perseroan serta menjalin hubungan baik dengan pemerintah dan pemangku kepentingan.
- Bertanggung jawab dalam mengatur rapat Direksi dengan Dewan Komisaris dengan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Mengelola dan/atau melakukan pengawasan kegiatan *Corporate Social Responsibility* perusahaan yang selaras dengan visi, misi dan nilai-nilai Perseroan.
- Mengusulkan dan mempersiapkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
- Membantu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diusulkan oleh Direktur Utama atau Dewan Komisaris.

Direktur MNC Grup Hukum Korporasi

- Membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia terkait dengan status Perseroan sebagai perusahaan publik, antara lain dengan memberikan pendapat hukum berkaitan dengan pelaporan dan keterbukaan informasi, penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, serta membantu dalam pembuatan laporan tahunan.
- Memberikan bantuan dan pendapat hukum dalam kegiatan korporasi (corporate action), antara lain, penerbitan obligasi (bond issuance), restrukturisasi, right issue, merger and acquisition, dan lain-lain.
- Memastikan tersedianya dokumen korporasi yang terkini, antara lain, Anggaran Dasar, Daftar Pemegang Saham, Surat Saham, dan lain-lain.
- Bertanggung jawab atas semua aspek hukum komersial yang berhubungan dengan kegiatan usaha/operasional Perseroan dan Unit Bisnis.
- Bertanggung jawab atas semua aspek hukum acara/litigasi di Perseroan dan Unit Bisnis.

Direktur Kebijakan MNC Grup dan Pengembangan Organisasi

- Mengawasi kegiatan sumber daya manusia, kebijakan, dan pelatihan MNC Grup dan mengkoordinasi kegiatan pengendalian internal/internal audit di seluruh unit usaha.
- Mengembangkan kebijakan Perseroan yang selaras dengan visi, misi dan nilai-nilai Perseroan untuk menjadi acuan bagi unit-unit usaha.
- Memastikan kepatuhan atas kebijakan Perseroan maupun kebijakan operasional yang harus dilaksanakan di seluruh unit-unit usaha.
- Memimpin dan mengkoordinasi fungsi-fungsi yang terkait sumber daya manusia dan kebijakan di tingkat MNC Grup serta menjamin keselarasan komunikasi dan kejelasan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas.
- Mengembangkan strategi dan kebijakan manajemen sumber daya manusia di tingkat korporasi sebagai acuan untuk membangun sumber daya manusia di unit-unit usaha, meliputi kebijakan perekrutan, pembelajaran dan pengembangan, pengembangan karir, manajemen kinerja dan kompensasi/tunjangan, dan manajemen bakat.
- Memastikan Perseroan serta seluruh unit usaha mempunyai kompetensi untuk melakukan audit dan pengendalian internal, melaksanakan self-assessment di setiap tingkat dan melakukan eskalasi ke MNC Grup kapan saja diperlukan untuk perbaikan proses.
- Memastikan agar pelatihan berjalan dengan baik untuk mendukung pencapaian tujuan Perseroan.

2. FREKUENSI RAPAT DAN TINGKAT KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi serta rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi ("Rapat Gabungan") mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik serta Anggaran Dasar Perseroan.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris dilakukan secara berkala sedikitnya 6 (enam) kali dalam setahun. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris, dimana kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat dapat melalui telekonferensi (virtual).

Tingkat kehadiran pada tahun 2024:

Nama	Tingkat Kehadiran/Jumlah Rapat Komisaris Tahun 2024
Rosano Barack	100%
Mohamed Idwan Ganie	100%
Beti Puspitasari Santoso	100%

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Direksi

Rapat Direksi dilakukan secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali setiap bulan yaitu setelah tanggal 20 atau sewaktu-waktu di luar rapat yang telah dijadwalkan. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi, dimana kehadiran anggota Direksi dalam rapat dapat melalui telekonferensi (virtual).

Daftar Kehadiran dan rapat anggota Direksi selama 2024 adalah sebagai berikut:

Nama	Tingkat Kehadiran/Jumlah Rapat Direksi Tahun 2024
Hary Tanoesoedibjo	100%
Syafril Nasution	100%
Christophorus Taufik Siswandi	100%
Indra Pudjiastuti	100%
Ruby Panjaitan	100%

Frekuensi rapat gabungan dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat Gabungan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, yaitu pada minggu ketiga pada bulan Maret, Juni dan Oktober atau sewaktu-waktu di luar rapat yang telah dijadwalkan. Secara umum agenda Rapat Gabungan membahas hal-hal penting terkait kinerja operasional maupun finansial Perseroan dan entitas anak. Selain itu, di dalam forum tersebut Dewan Komisaris dapat memberikan masukan dan saran mengenai pelaksanaan fungsi hubungan investor, rencana aksi korporasi yang disiapkan oleh pihak manajemen serta isu lainnya.

Sepanjang tahun 2024, rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan sebanyak 3 kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase (%)
Dewan Komisaris				
Rosano Barack	Komisaris Utama	3	3	100
M. Idwan Ganie	Komisaris Independen	3	3	100
Beti Puspitasari Santoso	Komisaris Independen	3	3	100
Direksi				
Hary Tanoesoedibjo	Direktur Utama	3	3	100
Ruby Panjaitan	Direktur	3	3	100

Syafril Nasution	Direktur	3	3	100
Christophorus Taufik Siswandi	Direktur	3	3	100
Indra Pudjiastuti	Direktur	3	3	100

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi untuk Anggota Direksi

Nama	Pelatihan yang diikuti tahun 2024
• Hary Tanoesoedibjo	- kegiatan MNC Forum 2022 yang diselenggarakan oleh Perseroan – sebagai pimpinan/pembicara;
• Ruby Panjaitan	- berbagai program pengembangan kompetensi (pelatihan) berupa kegiatan MNC Forum 2022 yang diselenggarakan oleh Perseroan.
• Syafril Nasution	- Focus Group Discussion “Masa Depan Penyiaran Pasca ASO & Disrupsi Digital”, yang diselenggarakan oleh Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel); - IDX Channel ESG 2024 Workshop & Discussion Panel, yang diselenggarakan oleh IDX Channel bekerja sama dengan PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia; - Workshop Artificial Intelligence (AI) Ecosystem Development, yang diselenggarakan oleh Mastel; - Seminar Pemangku Kepentingan KSEI 2024 "Strategic Cyber Resilience in Indonesia's Capital Market", yang diselenggarakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI); - Berbagai program pengembangan kompetensi (pelatihan) berupa kegiatan MNC Forum 2024 yang diselenggarakan oleh Perseroan.
• Christophorus Taufik Siswandi	Berbagai program pengembangan kompetensi (pelatihan) berupa kegiatan MNC Forum 2024 yang diselenggarakan oleh Perseroan.
• Indra Pudjiastuti	- Berbagai program pengembangan kompetensi (pelatihan) berupa kegiatan MNC Forum 2024 yang diselenggarakan oleh Perseroan – sebagai penyelenggara dan peserta.

3. REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi berupa gaji/honorarium dan tunjangan yang diberikan kepada Dewan Komisaris pada tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.483.513.000,- dan Rp2.909.670.000,00.

Remunerasi berupa gaji/honorarium dan tunjangan yang diberikan kepada Direksi Perseroan pada tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.370.316.600,- dan Rp3.321.669.600,00.

Prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dari Komite Nominasi & Remunerasi.

4. SEKRETARIS PERUSAHAAN

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik (“Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014”), Perseroan melalui Surat Keputusan Direksi No. 1355-SK/HT-MCOM/IV/23 tanggal 13 April 2023 tentang Penunjukan dan Perubahan Tanggung Jawab Fungsi Corporate Secretary MNC Media telah mengangkat Bapak Christophorus Taufik Siswandi sebagai

Sekretaris Perusahaan, dan telah dilaporkan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Perseroan No. 028-OJK/MCOM-CS/INT/IV/2023 tanggal 17 April 2023 tentang Penggantian *Corporate Secretary* PT Global Mediacom Tbk. Bapak Christophorus Taufik Siswandi efektif menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan pada tanggal 13 April 2023.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan Perseroan adalah:

- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
    - Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
    - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
    - Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
    - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
    - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
    - Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Sebagai penghubung antara Perseroan dengan Pemegang Saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Riwayat singkat pejabat dan pelatihan serta pengembangan kompetensi Sekretaris Perusahaan Perseroan dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan Pengawasan serta pada bagian Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi untuk Anggota Direksi.

Sekretaris Perusahaan
PT Global Mediacom Tbk
MNC Tower Lantai 27
Jl. Kebon Sirih No.17-19, Jakarta Pusat 10340
Telepon: (021) 390-9211, 390-0310, Faksimili: (021) 392-7859
Email : corsec.mncmedia@mncgroup.com

5. KOMITE AUDIT

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan OJK No.55/POJK.04.2015, Perseroan atau Perusahaan Publik wajib memiliki Komite Audit. Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris Perseroan dan guna mencapai hasil kerja Komite Audit secara efisien dan efektif, Perseroan telah menyusun dan mengesahkan pedoman kerja dalam bentuk Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*).

Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan terdiri dari pihak-pihak independen, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.010/Kep.Kom/MCOM-CL/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021, sebagai berikut:

Ketua	: Beti Puspitasari Santoso (Komisaris Independen)
Anggota	: Mohamed Idwan Ganie (Komisaris Independen)
Anggota	: Agus Mulyanto

Susunan Komite Audit sebagaimana tersebut di atas telah diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana ternyata dalam Surat Perseroan No.101-OJK/MCOM-CS/INT/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tanggung jawab Komite Audit dalam membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan di Perseroan, secara garis besar tercantum dalam Piagam Komite Audit sebagai berikut:

1. Melakukan penelahaan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.

3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Auditor Internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:
1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan Publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Sesuai dengan Piagam Komite Audit Perseroan, pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
1. Komite Audit melakukan penelaahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh Auditor Eksternal, Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (KPS) dan Rekan. Pembahasan terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian mencakup dampak implementasi PSAK dan ISAK yang berlaku efektif tahun 2024. Auditor Eksternal bersama-sama dengan Komite Audit juga melakukan pembahasan perihal pertimbangan kritis akuntansi pada anak perusahaan, estimasi akuntansi signifikan, kasus hukum, serta isu dan transaksi signifikan pada tahun terkait. Laporan Keuangan Konsolidasian Audit telah terbit dengan Opini Tanpa Modifikasian.
   Atas perikatan audit yang dilakukan dengan Auditor Eksternal, Komite Audit berpendapat bahwa proses audit dilakukan dengan tingkat integritas dan profesionalisme yang tinggi sehingga tidak ada alasan untuk mempercayai adanya benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi independensi dari pihak Auditor.
   Komite Audit juga melakukan penelaahan atas aktivitas operasional dan kondisi keuangan Perseroan yang tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian kuartal I, II, III dan IV di tahun berjalan.
2. Komite Audit melakukan penelahaan atas aktivitas legal yang mencakup ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundangan yang berlaku termasuk ketaatan penyampaian atas keterbukaan informasi kepada badan regulasi pasar modal. Komite Audit juga melakukan pembahasan atas proses litigasi Perseroan baik yang baru muncul di tahun berjalan maupun perkembangan kasus yang muncul dari tahun sebelumnya.
3. Komite Audit melakukan penelaahan atas aktivitas audit internal tahun 2024, serta pelaksanaan tindak lanjut atas temuan yang dilakukan oleh Unit Audit Internal. Aktivitas audit yang dilakukan Unit Audit Internal sampai dengan kuartal IV tahun 2024 dikelompokkan berdasarkan penugasan per lini usaha.
4. Komite Audit melakukan penelaahan atas efektivitas risk assessment dan Whistleblowing System (WBS).
5. Komite Audit menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
6. Komite Audit telah menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Rapat Komite Audit

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Piagam Komite Audit Perseroan, rapat Komite Audit dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Seluruh rapat dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Pada tahun 2024 rapat Komite Audit dilaksanakan sebanyak 4 kali, yaitu pada bulan Maret, April, Juli dan Oktober.

Catatan kehadiran rapat adalah sebagai berikut:

Nama	Tingkat Kehadiran / Jumlah Rapat Komite Audit Tahun 2024
Beti Puspitasari Santoso, Ketua Komite Audit	4/4
Mohamed Idwan Ganie, Anggota Komite Audit	4/4
Agus Mulyanto, Anggota Komite Audit	4/4

Berikut disajikan keterangan singkat mengenai Anggota Komite Audit Perseroan:

Beti Puspitasari Santoso
Ketua Komite

Warga Negara Indonesia, lahir di Cirebon pada tahun 1959. Beti Puspitasari Santoso menjabat sebagai Komisaris Independen PT Global Mediacom Tbk sejak 27 Juli 2015 berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dan dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 95 tanggal 27 Juli 2015. Sebelumnya beliau pernah menjabat di Bank Dagang Nasional Indonesia (1987-1995) dengan jabatan terakhir sebagai Pimpinan Cabang, Associate Director PT MNC Asia Holding Tbk (dahulu PT MNC Investama Tbk) (1996-1999) dan Direktur PT MNC Asia Holding Tbk (dahulu PT MNC Investama Tbk) (2000-2002). Beliau juga pernah menjabat sebagai Komite Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) (2001- 2005) dan Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk (2002-2004). Pada tahun 2004-2007, beliau menjabat sebagai Direktur PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) kemudian menjabat kembali selaku Direktur RCTI (2009-2013) dan sebagai Wakil Direktur Utama RCTI (2013-2014). Beliau meraih gelar sarjana di bidang Ekonomi dari Universitas Parahyangan Bandung pada tahun 1985.

Mohamed Idwan Ganie
Anggota Komite

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1955. Mohamed Idwan Ganie menjabat sebagai Komisaris Independen PT Global Mediacom Tbk sejak tanggal 19 Juni 2006 berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 73 tanggal 19 Juni 2006. Dr. Ganie lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (SH), memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum dari Universitas Hamburg (Dr.) dan gelar Fellow dari Singapore Institute of Arbitrators (FSIArb).

Dr. Ganie mempunyai ijin praktek hukum sebagai Advokat dan ijin sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal. Pada saat ini, beliau juga Chairman pada firma hukum Ganie and Partners (GAP) di Jakarta. Dr. Ganie adalah Ketua Perhimpunan Konsultan Hukum Persaingan Usaha (PERKUMPUS) dan Ketua Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI). Dr. Ganie adalah anggota berbagai organisasi profesi dalam dan luar negeri dan juga anggota dewan Global Leadership Board pada US-ASIA Institute (USAI) di Washington DC.

Dalam bidang peradilan, Dr. Ganie adalah arbiter pada lembaga arbitrase domestik dan internasional, antara lain pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Singapore International Arbitration Centre (SIAC), Asian International Arbitration Centre (AIAC) di Kuala Lumpur dan Court of Arbitration for Sport (CAS) di Lausanne. Dr. Ganie juga secara teratur bertindak sebagai saksi ahli hukum Indonesia di badan peradilan dalam dan luar negeri.

Di bidang akademik Dr. Ganie adalah pengajar mata kuliah Penulisan Hukum, Pendapat Hukum dan Keterampilan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) selama lebih dari 25 tahun. Dr. Ganie telah banyak mempublikasikan tulisan hukum di dalam dan luar negeri, terakhir di tingkat internasional edisi ke-4 buku “Corporate Acquisitions and Mergers in Indonesia” (Kluwer-Belanda) dan secara teratur adalah pembicara di dalam dan luar negeri tentang berbagai materi hukum Indonesia dan internasional.

Dr. Ganie secara teratur menerima berbagai penghargaan dalam dan luar negeri di bidang profesi sebagai konsultan hukum di bidang arbitrase/litigasi dan manajemen kantor hukum, antara lain dari Lawyers Monthly di London beberapa kali sebagai salah satu dari 100 lawyer terbaik di dunia, dari Asian Legal Business di Singapura sebagai Indonesian Managing Partner of the Year (2017), pada tahun 2020 dari Asia Mena Inhouse sebagai “External Counsel of the Year” (untuk daerah Asia, Africa dan Timur Tengah) dan dari Leaders In Law sebagai “Global Awards Winner” Indonesia untuk bidang Dispute Resolution pada tahun 2023.

Agus Mulyanto
Anggota Komite

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1948. Beliau meraih *Doctor of Philisophy (Ph.D) in Telecommunication Engineering* pada tahun 1982 dan *Master of Science (M.Sc) degree in Telecommunication Engineering with a Minor in Business Management* dari University of Wisconsin Madison, USA pada tahun 1978. Selain itu beliau meraih gelar *Master in Telecommunication* dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1976 dan Sarjana Teknik Elektro jurusan Telekomunikasi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) pada tahun 1972. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 40 tahun di bisnis media penyiaran dan televisi berlangganan.

Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Direktur Utama, Senior Executive dan Anggota Dewan Direksi PT Surya Citra Televisi (SCTV) (1989-2003). Di MNC Group, beliau pernah menjabat sebagai Komisaris (2004-2007) dan Direktur (2007-2013) di PT Media Nusantara Citra Tbk, Komisaris PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) (2009- 2013), Komisaris PT MNC Sky Vision Tbk (2009-2012), Komisaris PT MNC Land Tbk (2011-2013), Direktur Utama PT Media Citra Indostar (2006-2014), Direktur Utama PT Infokom Elektrindo (2009-2011), (2012-2013) dan (2014-2016), dan Komisaris Utama PT MNC Kabel Mediacom (2013 – 2024). Saat ini beliau menjabat Komisaris Independen PT MNC Vision Networks Tbk (2019-sekarang) dan sebagai Komisaris PT Infokom Elektrindo (2015-sekarang).

6. INTERNAL AUDIT

Perseroan memiliki Unit Audit Internal sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Unit Audit Internal bertugas memberikan pandangan, keyakinan (assurance) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan proses GCG Perseroan dan unit-unit usaha.

Berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan No. 673/SK/HT-Perseroan/VI/18 tanggal 22 Juni 2018 tentang Perubahan Tanggung Jawab dan Penunjukan Internal Audit di MNC Media Group, Direksi Perseroan telah menunjuk dan mengangkat Harangan Pokki Pangaribuan sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan terhitung sejak tanggal 22 Juni 2018. Pengangkatan tersebut telah diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana ternyata dalam Surat Perseroan No.Ref:068-OJK/Perseroan-CS/INT/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018.

Struktur dan Kedudukan Unit Audit Internal

- Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal/*Chief Audit Executive* (CAE).
- CAE diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
- CAE bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan secara administratif bertanggung jawab kepada Direktur *Group Governance & Organization Development*.
- CAE melakukan komunikasi dengan Anggota Komite Audit melalui rapat Komite Audit secara kuartal dalam satu tahun untuk melaporkan proses-proses audit yang telah diselesaikan maupun yang masih berjalan.

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal

Sesuai dengan Piagam Unit Audit Internal Perseroan, secara garis besar tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal antara lain:

1. Menyusun serta melaksanakan rencana audit internal tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
4. Melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundangan terkait.
5. Memberi saran perbaikan dan informasi yang objektif mengenai kegiatan yang diperiksa pada seluruh tingkat manajemen.
6. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
7. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
8. Bekerja sama dengan Komite Audit dan mendukung pelaksanaan tugas Komite Audit.
9. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu Audit Internal.

10. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Pelaksanaan Kegiatan Unit Audit Internal

Pelaksanaannya antara lain:

1. Unit Audit Internal telah menyusun rencana audit internal tahunan dengan menggunakan pendekatan risiko (risk based audit).
2. Dalam melaksanakan proses audit, Unit Audit Internal telah menguji dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan dan telah menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
3. Unit Audit Internal telah melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya juga kepatuhan terhadap peraturan perundangan terkait dengan berpegang teguh pada kode etik profesi yang mengacu pada International Standards for The Professional Practices of Internal Auditing yang dibuat oleh The Institute of Internal Auditors, antara lain mencakup integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi.
4. Unit Audit Internal telah melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundangan terkait.
5. Unit Audit Internal telah memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif mengenai kegiatan yang diperiksa pada seluruh tingkat manajemen.
6. Unit Audit Internal telah membuat laporan hasil audit atas penugasan audit yang telah selesai dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
7. Unit Audit Internal telah melakukan proses pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan rencana tindak lanjut terkait dengan temuan agar dapat diselesaikan tepat waktu dan juga membuat laporan setiap bulannya kepada Manajemen.
8. Unit Audit Internal telah mengatur dan juga menyelenggarakan pelaksanaan Rapat Komite Audit sesuai dengan ketentuan.
9. Unit Audit Internal secara berkelanjutan melakukan evaluasi mutu Audit Internal.
10. Unit Audit Internal telah melakukan pemeriksaan khusus dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

7. KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi, Perseroan telah memiliki fungsi remunerasi dan fungsi nominasi yang dijalankan oleh Komite Remunerasi sebagaimana ditegaskan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 001.KepKom/MCOM-CL/II/2025 tanggal 03 Februari 2025.

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan atau Perusahaan Publik.

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi yaitu:

1. Terkait dengan fungsi Nominasi:

    a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
        - komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
        - kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
        - kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

    b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;

    c. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
    d. memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

2. Terkait dengan fungsi Remunerasi:

   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      - Struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
      - Kebijakan atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
      - Besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan

   b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Susunan Komite Remunerasi Perseroan sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris No. 001.KepKom/MCOM-CL/II/2025 tanggal 03 Februari 2025 adalah sebagai berikut:

Ketua : Mohamed Idwan Ganie
Anggota : Rosano Barack
Anggota : Beti Puspitasari Santoso
Anggota : Yuliani Kurniawan

Masa jabatan anggota Komite Remunerasi Perseroan adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal penetapan sampai dengan tanggal 17 Desember 2029.

Yuliani Kurniawan
Anggota Komite

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1966. Saat ini beliau menjabat sebagai *Vice President of Payroll* MNC Grup di PT MNC Asia Holding Tbk (dahulu PT MNC Investama Tbk). Sebelum bergabung dengan MNC Grup, beliau pernah menjadi Kepala Bagian Keuangan & Akuntansi di PT Borland Nusantara (1993-1997) dan Staff Accounting Management di Kantor Akuntan Publik J. Tansil di Surabaya (1990-1992).

Beliau diangkat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia. Dalam jabatannya saat ini, beliau bertanggung jawab kepada Direktur Kebijakan MNC Grup dan Pengembangan Organisasi Perseroan dengan lingkup tugas dan tanggung jawab terkait sistem remunerasi dan *payroll* anggota Direksi di lingkungan MNC Grup.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi

Berikut sekilas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi pada tahun 2024:

1. Memberikan usulan dan rekomendasi perubahan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan karyawan serta penyesuaian yang diperlukan sejalan dengan telah diberlakukannya perubahan ketentuan Pajak Penghasilan Orang Pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022, dan berbagai peraturan terkait lainnya.

2. Mengajukan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan pelatihan (*workshop/ training*) anggota Direksi.

Pada tahun 2024, Komite Remunerasi telah mengadakan Rapat sebanyak 3 kali dengan tingkat kehadiran Komite Remunerasi sebagai berikut:

Komite Remunerasi	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Mohamed Idwan Ganie	3	3	100%
Rosano Barack	3	2	66,67%
Beti Puspitasari Santoso	3	3	100%
Yuliani Kurniawan	3	3	100%

8. UPAYA PENGELOLAAN RISIKO

Sebagaimana halnya dengan bidang-bidang usaha lainnya, bidang usaha yang dilakukan Perseroan juga tidak terlepas dari risiko yang disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi secara negatif kegiatan usaha Perseroan. Di bawah ini adalah upaya yang telah dilakukan untuk mengelola risiko-risiko yang diungkapkan pada Bab VI mengenai Faktor Risiko, yaitu sebagai berikut:

- **Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan**

  a. Risiko Sebagai Perusahaan Induk

  Dalam mengelola risiko sebagai Perusahaan Induk, maka Perseroan akan:
  - Secara rutin mengevaluasi dan memantau kinerja keuangan dan operasional Entitas Anak untuk mengidentifikasi potensi masalah untuk meminimalisir kerugian.
  - Menyusun strategi keuangan yang fleksibel, termasuk cadangan kas dan perencanaan anggaran yang matang, untuk menghadapi fluktuasi pendapatan.
  - Memantau tren pasar dan perubahan industri untuk menyesuaikan strategi bisnis dan mengantisipasi pergeseran yang dapat mempengaruhi pendapatan.

- **Risiko Usaha yang Bersifat Material baik Secara Langsung maupun Tidak Langsung yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan dan Entitas Anak**

  a. Risiko Investasi

  Perseroan melakukan pengawasan atas investasi yang dilakukan oleh Entitas Anak untuk pengembangan bisnisnya masing-masing dan juga menggunakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan investasi atau bisnis baru dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan.

  b. Risiko Operasional

  Guna meminimalisir terjadinya risiko operasional, Perseroan mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi informasi untuk memantau kegiatan operasional Entitas Anak. Selain itu juga membantu tersedianya dan memantau berjalannya SOP di masing-masing Entitas Anak.

  c. Risiko Persaingan Usaha

  Dalam mengelola risiko persaingan usaha , Perseroan selalu berusaha untuk menjadi yang terdepan dalam dengan menawarkan produk kompetitif, inovatif, menarik, terjangkau dan terdiferensiasi dengan memanfaatkan keunggulan dan kemampuan produksi konten lokal dan orisinial yang dimiliki MNC Grup. Perseroan akan selalu mengikuti perkembangan pasar termasuk juga melalui penyediaan layanan *video streaming* bagi pelanggan sehingga dapat menikmati siaran TV dan video streaming dimana saja dan kapan yang merupakan pelengkap dari bisnis FTA dan media berlangganan Perseroan.

  Perseroan akan terus melakukan inovasi di bidang teknologi digital terkini sehingga bisa menjadi yang terdepan di bidang industri. Selain itu, Perseroan telah mempunyai dan memgimplementasikan SOP dalam penerapan manajemen pengamanan dan risiko IT yang *prudent*, perawatan dan pemeliharaan sistem secara berkala untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya malfungsi. Perseroan akan menawarkan produk kompetitif, inovatif, menarik, terjangkau dan terdiferensiasi.

  d. Risiko Perubahan Teknologi

  Dalam mengelola risiko terkait perubahan teknologi, Perseroan melalui MNC Innovation Center akan terus melakukan inovasi di bidang teknologi digital terkini sehingga bisa menjadi yang terdepan di bidang industri. Selain itu, Perseroan telah mempunyai dan memgimplementasikan SOP dalam penerapan manajemen pengamanan dan risiko IT yang *prudent*, serta perawatan dan pemeliharaan sistem secara berkala untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya malfungsi.

e. Risiko Penurunan Belanja Iklan

Untuk mengantisipasi penurunan belanja iklan konvensional, MNCN telah memperluas pendapatan iklannya ke digital inisiatif, khususnya melalui siaran digital, portal berita, monetisasi media sosial dan yang terpenting MNCN sendiri berhasil meluncurkan MCN dan RCTI+.

f. Risiko Persaingan Program

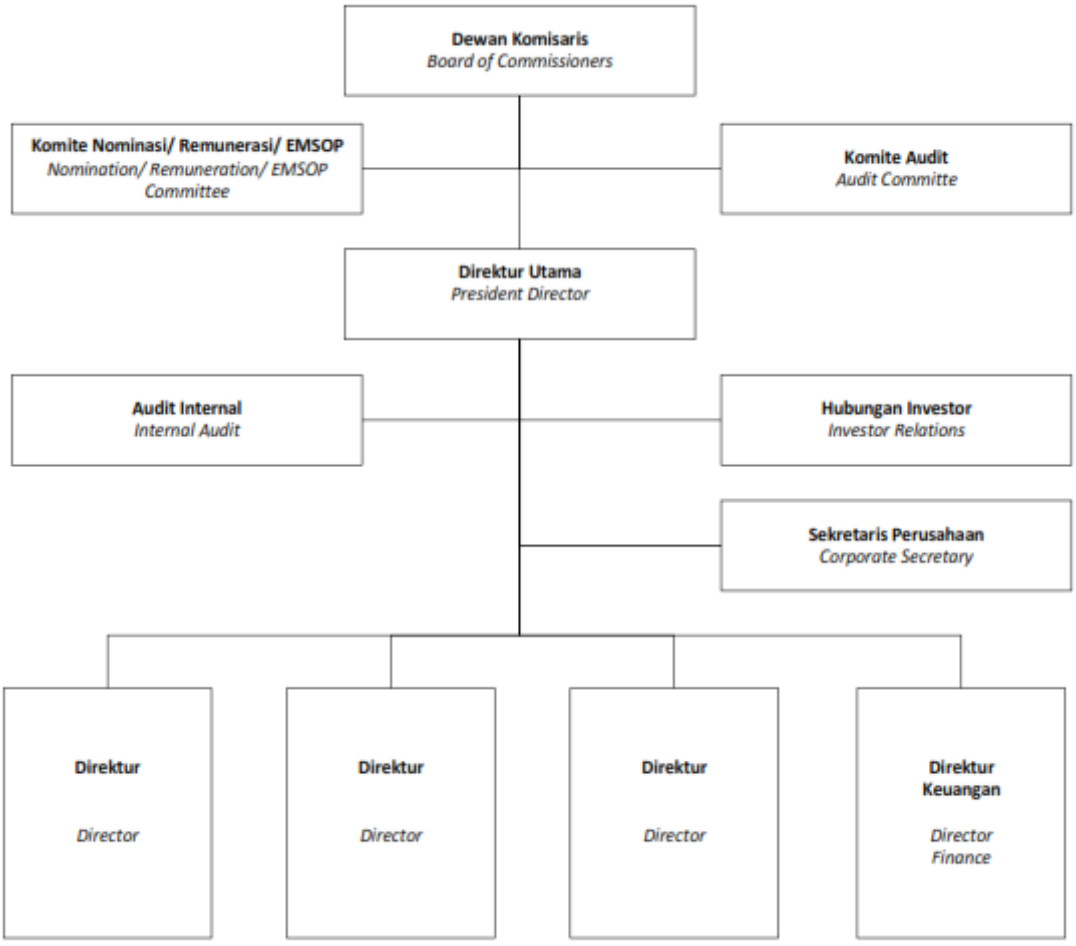
Untuk mengatasi risiko Persaingan Program, MNCN lebih berfokus untuk memproduksi konten inhouse yang menghasilkan rating tinggi. MNCN memiliki strategi pemrograman yang komprehensif dimana program televisi yang diproduksi sesuai dengan strategi terpadu yang memberikan MNCN kendali penuh atas pengelolaan artis, produksi, serta hak tayang, dan kekayaan intelektual. Strategi ini memberikan nilai maksimal bagi para pemegang saham dan pemirsa. MNCN memiliki fasilitas terpadu untuk pembuatan program yang sangat lengkap dari syuting hingga editing sehingga kualitas program lebih terjamin. MNCN memiliki tim riset yang dedicated untuk menganalisa habit dari audience dan selalu berkomunikasi intensif dengan tim produksi.

g. Risiko Kegagalan atau Kerusakan pada Fasilitas Penting

Dalam mengatasi risiko tersebut, Entitas Anak secara rutin telah menjaga dan melakukan perawatan berkala terhadap seluruh fasilitas- fasilitas studio, pemancar dan uplink perusahaan yang dimilikinya. Selain itu Entitas Anak juga telah menempatkan security untuk menjaga fasilitas-fasilitas tersebut. Dengan demikian risiko kegagalan dan kerusakan pada fasilitas-fasilitas penting dapat diminimalisir.

9. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Berikut struktur organisasi Perseroan per tanggal 31 Desember 2024:



E. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

MNC Grup mendirikan lembaga sosial bernama Yayasan Jalinan Kasih dalam menampung dana pemirsa yang fokus dalam kegiatan sosial pendidikan dan kesehatan. Dalam kegiatan CSR, Yayasan Jalinan Kasih menggunakan nama MNC Peduli.

Selain menggunakan dana pemirsa, Perseroan juga melakukan berbagai kegiatan sosial baik yang dilakukan oleh Perseroan maupun unit-unit dibawah Perseroan. Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang media, maka kegiatannya pun disesuaikan dengan bidang usahanya. Kegiatan sosial dilakukan secara integrasi dengan unit-unit lain di bawah Perseroan dan MNC Grup.

Perseroan meyakini bahwa kegiatan soial perusahaan merupakan tanggung jawab dan menjadi salah satu tolok ukur penting keberhasilan Perseroan yang tidak dapat melepaskan diri dari keberadaannya di tengah masyarakat. Perseroan bersama unit usaha lain di bawah Perseroan dan MNC Grup melaksanakan berbagai kegiatan sosial di bawah MNC Peduli.

Pada tahun 2024, pelaksanaan kegiatan sosial dimaksud di antaranya adalah:
Bidang Kesehatan:

Kegiatan CSR Tahun 2024		**Jumlah Penerima Manfaat**
Bantuan Kesehatan lainnya	Pemeriksaan kesehatan umum serta penyuluhan kesehatan gizi anak dan ibu hamil dalam rangka pencegahan stunting di berbagai posyandu, puskesmas dan klinik wilayah di Indonesia	16.955
	Kegiatan bakti sosial operasi gratis seperti operasi katarak, sumbing dan hernia	292
	Pemeriksaan mata dan pembagian kaca mata gratis untuk anak-anak Sekolah Dasar	14,703
	Aksi donor darah MNC Group	2,819
	Edukasi Kanker dan Penyaluran bantuan alat kesehatan seperti masker dan alas anti bocor (perlak/underpad) bagi masyarakat melalui berbagai posyandu, rumah sakit, rumah singgah dan panti asuhan di wilayah di Indonesia	5,040
	Penyaluran bantuan makanan bergizi dan berprotein hewani (menu sehat berbasis ikan), serta bantuan makanan sehat berupa ikan lele dalam rangka pencegahan stunting di berbagai wilayah di Indonesia	191,700
	Aksi Kesehatan bersama Palang Merah Indonesia Jakarta Pusat	1,200

Bidang Sosial, Keagamaan, Pendidikan dan Lingkungan:

Kegiatan CSR Tahun 2024		**Jumlah Penerima Manfaat**
Pendidikan	Penyaluran bantuan perlengkapan sekolah, alat belajar dan donasi buku bacaan untuk berbagai sekolah, rumah baca dan taman baca	1,771
	Pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Pahlawan di SDN Menteng 01 Jakarta	429
	Kegiatan literasi media kepada siswa dan mahasiswa dari berbagai sekolah dan universitas di Indonesia	308
	Kegiatan literasi media melalui nonton bareng film di bioskop bersama anak-anak pejuang kanker dan anak-anak yatim piatu	87
Bantuan Kebencanaan	Penyaluran bantuan untuk masyarakat terdampak bencana erupsi Gunung Lewotobi, Flores Timur	1,200
	Penyaluran donasi untuk korban kebakaran di Manggarai, Jakarta Selatan	1,530

Kegiatan CSR Tahun 2024		Jumlah Penerima Manfaat
Pengentas Kemiskinan dan Bakti Sosial	Penyaluran bantuan daging hewan qurban	2,250
	Donasi dan kepedulian untuk anak-anak berkebutuhan khusus di berbagai panti di wilayah Indonesia	147
	Penyaluran sembako, obat-obatan serta berbagai kebutuhan sehari hari kepada masyarakat umum di berbagai wilayah di Indonesia	223
	- Santunan anak yatim dan dhuafa, bantuan kebutuhan masjid dan kegiatan buka puasa bersama ke berbagai panti asuhan dan masjid	17,185
	Penyaluran sumbangan untuk perayaan HUT ke-79 RI di beberapa wilayah di Indonesia	300
Penanaman Pohon	Penanaman pohon dan edukasi lingkungan bersama anak-anak di Bekasi, Jawa Barat	20
	Penanaman pohon di Desa Cimenyang, Bandung Utara	1,000
	Pembibitan mangrove di Lampung Timur	100,000
	Penanaman bibit mangrove di Pantai Eco Marine Park Lampung	20,000
Pemanfaatan Sampah Organik	Serah terima pupuk kasgot hasil bio-konversi sampah organik dari MNC Center kepada Panti Asuhan Kemah Beth Shalom di Tangerang Selatan	100
Bakti Sosial	Pemberian fasiltas perlengkapan rumah baca di wilayah Jakarta Utara	100

Bidang Infrastruktur:

Kegiatan CSR Tahun 2024		Jumlah Penerima Manfaat
Infrastruktur	Pembangunan dan pemberian fasilitas perlengkapan rumah baca serta renovasi MCK di Cianjur	4,625

F. SUMBER DAYA MANUSIA

Di "Era Percepatan Digital" yang terus berkembang, peran Direktorat Sumber Daya Manusia ("**HR**") semakin penting dalam mengelola sumber daya manusia secara lebih efektif dan efisien. Tahun 2024 tidak hanya menandai kemajuan teknologi yang sangat pesat tetapi juga pergeseran paradigma dalam pengelolaan tenaga kerja termasuk di MNC Grup.

Adanya perkembangan teknologi informasi memperkenalkan HR kepada berbagai alat-alat baru yang dapat mempercepat dan mempermudah pekerjaan. Proses administratif menjadi lebih cepat dan akurat. Penerapan otomatisasi, analitik, dan *Artificial intelligence* ("**AI**") dapat membantu HR dalam melakukan analisis dan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Dengan teknologi, data karyawan dapat diakses kapan saja, memungkinkan HR untuk merespons masalah dengan cepat.

Di Era percepatan digital dan AI ini, peran HR semakin mengarah ke peran yang strategis dan analitis dan bukan lagi sekedar administratif. Hal tersebut diterapkan di berbagai bagian dari HR seperti rekrutmen dan seleksi berbasis data, pengembangan Sumber Daya Manusia ("**SDM**") dan pelatihan berbasis digital. Analisis kinerja dengan *big data* yang dapat memahami tren kinerja dan menemukan area yang memerlukan perbaikan. Otomatisasi data HR yang memudahkan HR maupun karyawan dalam melakukan berbagai kegiatan sehingga dapat lebih efisien baik dari segi waktu maupun biaya.

Kebijakan-kebijakan strategis yang dilakukan HR sebagai *strategic business partner* tentu saja bertujuan pada peningkatan produktivitas kinerja perusahaan yang diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan karyawan.

Beberapa program strategis yang dilakukan HR selama tahun 2024 dalam melakukan perannya sebagai "*Strategic Business Partner*" adalah sebagaimana di bawah ini.

Pengembangan Organisasi
Seiring dengan perkembangan industri yang dinamis, inovasi menjadi faktor kunci bagi perusahaan untuk tetap kompetitif dan relevan di pasar. Pertumbuhan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui adopsi teknologi terbaru, pengembangan model bisnis yang lebih fleksibel, serta peningkatan pengalaman pelanggan.

Perseroan melalui IPTV dan unit usahanya terus berusaha meningkatkan kualitas produk untuk pasar TV satelit berbayar (*C-Band* dan *KU-Band*) di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian kinerja yang luar biasa dalam hal peningkatan jumlah pelanggan aktif yang sangat signifikan. Kekuatan dari konten berkualitas menjadi pendorong yang sangat efektif dalam peningkatan basis pelanggan.

Pengembangan konten-konten berkualitas berbasis *news* dan *entertainment* juga menjadi fokus utama perseroan melalui grup *Free To Air (FTA)* dan *iNews Media Group*. Peningkatan kualitas program-program spesial, promosi yang efektif, penggunaan teknologi AI di berbagai *platform* dan dukungan fasilitas produksi konten yang terintegrasi merupakan langkah strategis perseroan dalam penguatan eksistensi di industri media.

Divisi *Organization Development* berperan aktif dalam berkoordinasi dengan HR di setiap unit bisnis untuk merancang desain organisasi yang efektif dan efisien, berdasarkan model bisnis yang telah dikembangkan. Desain organisasi yang selaras dengan model bisnis perusahaan ini akan menentukan pengelolaan SDM yang lebih efisien.

Peran HR adalah mempersiapkan karyawan untuk memiliki kompetensi yang berdaya saing, yang memiliki *hard skill*, *soft skill* dan *digital skill* yang relevan dengan dinamika industri yang terus berkembang. Promosi dan/atau rotasi antar fungsi dan unit usaha dalam Perseroan dilakukan sebagai bagian dari proses pengembangan karir karyawan potensial, sehingga proses kaderisasi berjalan selaras dengan kebutuhan Perseroan.

Pengembangan Kebijakan SDM dan *Employee Engagement*
Sebagai keberlanjutan proses percepatan digitalisasi dalam industri media secara menyeluruh, kebijakan SDM berbasis *smart technology* sangat diperlukan oleh organisasi untuk melakukan peningkatan produktivitas karyawan. Atas dasar tersebut, setiap pembaharuan kebijakan SDM tahun 2024 dilakukan bersama dengan Divisi *Human Resources Information System* ("**HRIS**"), yang dapat memberikan input digitalisasi dan otomatisasi proses administrasi yang ada dalam setiap kebijakan.

Penggunaan *Odoo HR System* yang didukung dengan aplikasi *Employee Portal* atau Myhrservices dalam pengembangan *information system* yang terintegrasi antar unit-unit usaha di bawah Perseroan merupakan salah satu keberlanjutan perubahan ke arah digitalisasi proses administrasi yang dilakukan oleh Perseroan. Didukung oleh aplikasi *employee self services* yang dapat memberikan kemudahan untuk karyawan sebagai transparansi informasi atau data yang dapat digunakan dalam melakukan *employee transaction* seperti eProfile, eLeave, ePermit, ePA, dan sistem Koperasi (My Koperasi). Di samping itu, HR bersama dengan *IT Support* mengembangkan *Identity Management System* (IDMS) untuk mengelola data-data karyawan yang mengacu kepada sistem Myhrservices.

Dalam hal *employee engagement* perseroan secara berkelanjutan terus melakukan kerjasama dengan Yayasan Tanoesoedibjo dan MNC University memberikan beasiswa kepada karyawan yang berprestasi baik dan baik sekali untuk dapat mengembangkan *soft skill*. Tidak sedikit karyawan yang pada tahun 2024 sudah memasuki tahapan akhir dalam memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, dimana hal ini tentunya merupakan tiket bagi karyawan untuk bisa mendapatkan promosi level. Hal ini sejalan dengan kebijakan internal Perseroan, di mana MNC Grup menerapkan kebijakan pendidikan minimum kepada karyawan yang akan dipromosi, sebagai salah satu bentuk tanggung jawab Perseroan dalam mencerdaskan bangsa Indonesia, terutama pada saat gaya hidup digital sudah tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari bangsa ini.

Selain itu Perseroan juga menyediakan dan memberikan berbagai kemudahan yang berlaku bagi karyawan maupun keluarga karyawan melalui program *The Power Of Your ID* (POID) dengan pemberian harga khusus atau diskon khusus seperti berbagai macam produk yang ditawarkan oleh MNC Grup.

Semua hal mengenai *employee engagement* di atas dilakukan Perseroan secara berkelanjutan sebagai usaha dalam menjaga angka *turnover* karyawan, dengan adanya loyalitas karyawan yang berkualitas terhadap Perseroan dapat berdampak positif bagi produktivitas Perseroan.

Manajemen rekrutmen yang terintegrasi
Di era percepatan digital yang terus berkembang saat ini, rekrutmen sumber daya manusia yang berkualitas merupakan awal dari proses pengembangan SDM dalam Perseroan. Perseroan memprioritaskan inisiatif rekrutmen internal, termasuk rotasi, penugasan dan promosi yang memberikan kontribusi terhadap pembelajaran dan pengembangan karir pekerja.

Kendati demikian, untuk mendukung ekosistem dan pengembangan bisnis yang terus berkembang, Perseroan tetap melakukan rekrutmen eksternal. Seluruh kegiatan *hiring* dilakukan dengan sistem *hybrid*, yaitu mengimplementasi proses perekrutan secara *online* dan *offline* (*screening* profil kandidat, tes kemampuan, dan wawancara).

Model *online recruitment* tanpa kontak langsung dan tatap muka inilah yang mempercepat proses rekrutmen konvensional sebelumnya. Tidak dapat dihindari lagi bahwa teknologi digital menjadi tulang punggung Perseroan dalam proses mencari talenta terbaik. Ketatnya persaingan di bisnis berbasis digital untuk menjaring talenta-talenta dengan latar belakang digital/*IT* serta *content creators*, mendorong Perseroan untuk terus melakukan peninjauan terhadap strategi rekrutmennya.

Grup Hiring juga melakukan proses rekrutmen berbasis *website* yang dapat diakses di www.jobsmnc.co.id yang tertaut di *corporate website*, dimana para pencari kerja dapat mengetahui informasi terkini mengenai rekrutmen MNC Grup dan lowongan yang terbuka untuk umum.

Percepatan pemenuhan talenta-talenta di berbagai bisnis unit digital yang berkembang pesat di Perseroan antara lain *Free to Air Digital Platform* (RCTI+), *OTT Digital Platform* (Vision+), *Multi-Channel Network*, iNews Media Grup dan *E-Commerce* (Misteraladin dan Aladintravel).

Sistem Remunerasi dan Manajemen Kinerja
Bergaya hidup digital bagi gen Z dan generasi akhir milenial berdampak langsung terhadap persaingan pemberian kompensasi dan remunerasi, dimana persaingan ini membuat Perseroan terus menerapkan *clean wages salary*, dimana Perseroan tidak lagi membagi remunerasi karyawan ke dalam beberapa *benefit*, melainkan dengan memberikan remunerasi seutuhnya kepada karyawan, agar karyawan dapat dengan bebas menentukan pembagian remunerasi yang diperlukan berdasarkan kebutuhan karyawan masing-masing, tentunya dengan tetap memberikan *benefit* standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kebijakan remunerasi yang berlaku diterapkan selain untuk menjalankan dan mendukung program pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Jaminan Pensiun, Perseroan juga mengikutsertakan karyawan dalam program asuransi kesehatan yang berlaku sesuai dengan ketentuan, program dana pensiun, program kepemilikan mobil COP (*Car Ownership Program*), dan program kepemilikan *Notebook (Notebook Ownership Program)*. Sejalan dengan program pemerintah dalam rangka meningkatkan inklusi pasar modal Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Perseroan juga berpartisipasi dalam memberikan sosialisasi atau edukasi untuk menabung saham melalui program kepemilikan saham. Program ini dimulai dari level *supervisor* ke atas. Selain itu, adanya penggunaan *eWallet* Motion Pay sebagai aplikasi layanan dompet digital yang dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bertransaksi bagi seluruh karyawan..

"***Pay for performance***" merupakan sistem *reward* yang dilaksanakan oleh Perseroan. Perseroan secara konsisten menerapkan sistem *bell curve* atas hasil penilaian kinerja guna menjaga distribusi pemberian *salary increment* dan bonus bagi karyawan sebagai bentuk apresiasi lebih bagi *high performer.* Penyesuaian gaji karyawan dilakukan secara terpadu sesuai dengan *review performance* masing-masing karyawan.

Penyesuaian kompensasi dan *benefit* pada seluruh level disesuaikan berdasarkan kinerja organisasi dan kinerja individu. Perusahaan secara konsisten menerapkan sistem *Balance Score Cards* (BSC) untuk tingkat *supervisor* ke atas. Hal ini yang digunakan oleh Perseroan untuk melakukan penilaian kinerja yang mencakup perencanaan target KPI, pelatihan dan konseling evaluasi kinerja karyawan. Melalui mekanisme BSC format ini, rencana pengembangan karyawan juga diidentifikasi dalam format *Individual Development Plan* (IDP), yang pada akhirnya dapat diwujudkan dalam proses pengembangan karyawan baik *soft skills* maupun *hard skills*.

Pemberian insentif untuk memotivasi dan mengukur kinerja karyawan sudah diterapkan dalam Perseroan bagi karyawan yang terlibat langsung dalam operasional (*sales* dan *marketing*), sementara pemberian bonus baik dalam bentuk tunai maupun saham diperuntukkan bagi fungsi-fungsi yang memberikan *support* di dalam Perseroan.

Pelatihan dan Pengembangan
Perkembangan bisnis yang semakin masif di era digital telah memberikan dampak transformatif di berbagai sektor, termasuk industri media dan hiburan. Sebagai salah satu pemain utama di industri ini, MNC Grup terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan yang cepat, terutama dalam hal pengembangan SDM. Keunggulan kompetitif perusahaan kini tidak hanya ditentukan oleh konten yang dihasilkan, tetapi juga oleh penguasaan *Data Analytics*, Digitalisasi Model Bisnis, Produk & Layanan Digital, serta Integrasi Rantai Nilai yang efisien.

Setiap pengembangan program pelatihan dilakukan dengan didasari *Training Need Analysis* ("**TNA**") secara komprehensif untuk mendapatkan gambaran program kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan unit bisnis baik kemampuan teknis dan non-teknis. Program training yang sifatnya "*hard skills"* diterapkan dalam bentuk *academy program*, yaitu *Programming Academy, Production Academy, News Academy, Sales Academy, Service Academy* dan *Digital Academy* (*IT/Tech*). Dalam pelatihan digitalisasi, MNC *Learning Center* menggunakan aplikasi *online* untuk menjalankan program pengembangan khusus yang terkait digitalisasi, sedangkan program "*technical*" dan sertifikasi yang dikembangkan oleh MNC *Learning Center* seperti program sertifikasi jurnalistik yang mengacu kepada lembaga jurnalistik Indonesia.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan keunggulan kompetitif, MNC *Learning Center* terus melakukan peningkatan berkelanjutan dan menciptakan inovasi dalam program pengembangan SDM. Salah satunya adalah dengan mengembangkan program pelatihan berbasis TNA yang komprehensif, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan unit bisnis baik dalam hal kemampuan teknis dan non-teknis. Di samping itu, Perseroan secara periodik mengundang para *supervisor* hingga direktur untuk menghadiri *Townhall Meeting* ("**MNC Forum**") yang dipimpin oleh Bapak Hary Tanoesoedibjo selaku *Executive Chairman* MNC Group. MNC Forum bertujuan untuk mengintegrasikan visi dan misi serta evaluasi kinerja Perseroan, dimana studi kasus dari beberapa unit usaha diangkat di setiap pertemuannya sehingga menambah wawasan dan memperkaya *knowledge*, *skills*, dan *business updates*.

Studi kasus yang diangkat menjadi proses belajar bagi seluruh jajaran pimpinan yang ada di Perseroan. Perseroan juga mengundang beberapa pembicara ternama dari eksternal yang memiliki spesialisasi sesuai dengan tema yang dipilih di setiap *event*, sehingga peserta MNC Forum mendapatkan informasi terkini terkait situasi, kondisi ekonomi, dan bisnis terkini.

Di tahun 2024, MNC Grup telah menjadi pelopor dalam transformasi digital industri media dan hiburan. Melalui program pengembangan SDM yang inovatif, kolaborasi strategis, dan pemanfaatan teknologi terkini, MNC Grup tidak hanya mempertahankan keunggulan kompetitifnya tetapi juga membawa industri media dan hiburan Indonesia ke panggung global. Dengan visi yang jelas dan komitmen terhadap inovasi, MNC Grup siap menghadapi masa depan yang penuh tantangan dan peluang.

HRIS dan Laporan SDM yang Terintegrasi
Perkembangan Perseroan yang bersamaan dengan perkembangan teknologi di era digital memberikan dampak kepada pengelolaan HRIS. Perseroan secara terpadu dan terus-menerus telah melakukan pengembangan terhadap HRIS baik di level *holding* maupun di unit-unit usaha.

Sepanjang 2024 telah dilakukan pengembangan dan penyempurnaan terhadap HRIS. Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem tersebut mulai dari proses *recruitment* karyawan melalui aplikasi JobsMNC sampai dengan *hire* karyawan yang terintegrasi dengan sistem Odoo sebagai sistem utama pengolahan dan penyimpanan data karyawan. Kemudian karyawan dapat melihat *profile*, *update profile*, mengajukan cuti dan mengajukan pinjaman koperasi melalui aplikasi Employee Portal atau Myhrservices. Melalui fitur-fitur tersebut karyawan memperoleh kemudahan dalam melakukan akses terhadap kebutuhannya dalam hal kepegawaian. Sistem ini berbasis digital atau *online* sehingga dapat diakses kapanpun dan dimanapun.

Implementasi HRIS telah kami lakukan di unit-unit usaha Perseroan. Hal ini bertujuan agar semua proses kepegawaian unit-unit usaha tersebut dapat terintegrasi dalam satu sistem, sehingga memberikan kemudahan dalam proses pembaruan dan penyesuaian terhadap kebijakan Perseroan dan kebijakan pemerintah.

Serikat Pekerja
Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja.

Asuransi Jiwa
Perseroan memiliki fasilitas program Asuransi Jiwa dari MNC Life, dimana kepersertaan karyawan sesuai dengan kebijakan Perseroan yang berlaku.

Koperasi
Perseroan memiliki koperasi yang bernama Koperasi Karyawan MNC Grup ("**KKMG**") yang didirikan berdasarkan Akta No. 54 tanggal 11 Desember 2017, dimana telah diperbaharui sesuai dengan Akta No. 6 tanggal 3 Juli 2024 mengenai Perubahan Pengawas dan Pengurus Koperasi.

Beranggotakan para karyawan Perseroan. Koperasi KKMG menjalankan kegiatan yang dapat memberikan manfaat bagi para karyawan Perseroan, antara lain seperti penjualan barang konsumsi, simpan pinjam serta layanan lainnya yang dapat memberikan manfaat kepada karyawan Perseroan. KKMG dikelola oleh pengawas dan pengurus yang dipilih dari dan oleh anggota yang memenuhi syarat dalam rapat anggota untuk masa jabatan lima (5) tahun.

Komposisi Karyawan
Total karyawan Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2024 berjumlah 6.430 orang, terdiri dari 4.076 orang karyawan tetap dan 2.354 orang karyawan tidak tetap. Komposisi karyawan menurut jenjang jabatan, tingkat pendidikan, jenjang usia, status karyawan, aktivitas utama dan lokasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Menurut Status Karyawan

Keterangan	31 Des 2024		31 Des 2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Perseroan				
Tetap	40	76,92%	42	79,25%
Tidak Tetap	12	23,08%	11	20,75%
Total	52	100,00%	53	100,00%
Entitas Anak				
Tetap	4.036	63,28%	4.619	60,51%
Tidak Tetap	2.342	36,72%	3.014	39,49%
Total	6.378	100,00%	7.633	100,00%

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Menurut Jenjang Jabatan

Keterangan	31 Des 2024		31 Des 2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Perseroan				
Direktur	3	5,77%	3	5,66%
Senior VP / VP / General Manager	5	9,61%	4	7,55%
Manajer Senior	2	3,85%	3	5,66%
Manajer	6	11,54%	6	11,32%
Asisten Manajer / Supervisor	26	50,00%	27	50,94%
Staff	10	19,23%	10	18,87%
Total	52	100,00%	53	100,00%
Entitas Anak				
Direktur	52	0,82%	56	0,73%
Senior VP / VP / General Manager	101	1,58%	126	1,65%
Manajer Senior	73	1,14%	81	1,06%
Manajer	304	4,77%	338	4,43%
Asisten Manajer / Supervisor	1.294	20,29%	1.547	20,27%
Staff	4.554	71,40%	5.485	71,86%
Total	6.378	100,00%	7.633	100,00%

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Menurut Tingkat Pendidikan

Keterangan	31 Des 2024		31 Des 2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Perseroan				
Sarjana S-2 dan S-3	12	23,08%	13	24,53%
Sarjana S-1	32	61,54%	30	56,61%
Diploma	3	5,77%	5	9,43%
Non Akademi	5	9,61%	5	9,43%
Total	52	100,00%	53	100,00%
Entitas Anak				
Sarjana S-2 dan S-3	241	3,77%	231	3,03%
Sarjana S-1	4.927	77,25%	5.932	77,72%
Diploma	892	13,99%	1.046	13,70%
Non Akademi	318	4,99%	424	5,55%
Total	6.378	100,00%	7.633	100,00%

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Des 2024		31 Des 2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Perseroan				
Dibawah 18 Tahun	-	0,00%	-	0,00%
18 – 30	7	13,46%	10	18,87%
31 – 40	19	36,54%	18	33,96%
41 – 50	13	25,00%	11	20,75%
Diatas 50	13	25,00%	14	26,42%
Total	52	100,00%	53	100,00%
Entitas Anak				
Dibawah 18 Tahun	-	0,00%	-	0,00%
18 – 30	1.720	26,97%	2.383	31,22%
31 – 40	2.428	38,07%	2.791	36,56%
41 – 50	1.650	25,87%	1.951	25,56%
Diatas 50	580	9,09%	508	6,66%
Total	6.378	100,00%	7.633	100,00%

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Menurut Aktivitas Utama Perseroan

Keterangan	31 Des 2024		31 Des 2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Perseroan				
Investasi	52	100,00%	53	100,00%
Total	52	100,00%	53	100,00%
Entitas Anak				
Media berbasis iklan dan konten	5.456	85,54%	6.421	84,12%
Media berbasis pelanggan	922	14,46%	1.212	15,88%
Media berbasis online	-	0,00%	-	0,00%
Lainnya	-	0,00%	-	0,00%
Total	6.378	100,00%	7.633	100,00%

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Menurut Lokasi Perseroan

Keterangan	31 Des 2024		31 Des 2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Perseroan				
Kantor Pusat	52	100,00%	53	100,00%
Total	52	100,00%	53	100,00%
Entitas Anak				
Kantor Pusat	5.986	93,85%	7.026	92,05%
Kantor Regional	392	6,15%	607	7,95%
Total	6.378	100,00%	7.633	100,00%

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing dan tidak mempunyai pegawai yang memiliki keahlian khusus.

G. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK YANG MEMILIKI KONTRIBUSI 10% (SEPULUH PERSEN) ATAU LEBIH DARI TOTAL ASET, TOTAL LIABILITAS, ATAU LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK DARI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

i. PT Media Nusantara Citra Tbk

a. Riwayat Singkat

MNCN merupakan anak perusahaan Perseroan yang diperoleh pada tahun 2002, MNCN berkedudukan di Jakarta, didirikan pertama kali dengan nama PT Panca Andika Mandiri berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 48 tanggal 17 Juni 1997, dibuat di hadapan Haji Parlindungan Lumban Tobing, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-15092.HT.01.01.Th.2000 tanggal 25 Juli 2000 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 1706/BH.09.03/XII/2001 pada tanggal 4 Desember 2001 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 23 tanggal 19 Maret 2002, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia di bawah No. 2780.

Anggaran Dasar MNCN telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik, hal mana sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 46 tanggal 20 Mei 2015 ("**Akta No. 46 Tanggal 20 Mei 2015**"), dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0943955 tanggal 19 Juni 2015; didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-352223.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 19 Juni 2015; dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 27 November 2015, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia di bawah No. 1566/L.

Anggaran Dasar MNCN juga telah melakukan penyesuaian Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risikosebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 116 tanggal 27 Juli 2022 ("**Akta No. 116 Tanggal 27 Juli 2022**"), dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan No. AHU-0056184.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 9 Agustus 2022, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0155031.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 9 Agustus 2022, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76, Tambahan Berita Negara No. 032528.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar MNCN adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 139 tanggal 27 Juni 2023 ("**Akta No. 139 tanggal 27 Juni 2023**"), dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-

AH.01.03-0089796 tanggal 11 Juli 2023; dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0129824.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023.

Alamat kantor pusat MNCN berlokasi di MNC Tower, lantai 27, Jalan Kebon Sirih Nomor 17 – 19, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10340.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar MNCN yang tercantum dalam Pasal 3 Akta No. 116 Tanggal 27 Juli 2022, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha MNCN adalah berusaha di bidang perdagangan besar dan eceran; konstruksi; real estat; industri pengolahan; informasi dan komunikasi; dan aktivitas professional, ilmiah dan teknis. Kegiatan usaha yang dijalankan MNCN saat ini adalah bergerak dalam bidang media berbasis iklan serta memproduksi dan mendistribusikan konten baik di media televisi maupun di platform lainnya.

MNCN memiliki dan mengoperasikan 4 (empat) stasiun TV FTA bernama RCTI, MNCTV, GTV dan iNews yang mendominasi pasar dengan pangsa pemirsa terbesar. Dari sisi konten, MNCN menghasilkan berbagai konten dari beragam kategori *genre* untuk semua generasi, yaitu lebih dari 20.000 (dua puluh ribu) jam konten setiap tahunnya serta memiliki lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) jam pustaka konten. Sebagai tambahan, di media sosial, MNCN juga terus menunjukkan pencapaiannya yang kuat dengan rata-rata sekitar 1,5 (satu koma lima) setiap bulan dan lebih dari 600 juta *subscribers/followers* di YouTube, Facebook, dan TikTok per akhir tahun 2024.

Selain itu, MNCN juga telah membangun Movieland yang dapat meningkatkan kemampuan produksi kontennya, serta peningkatan kualitas *on-screen*, berlokasi di kawasan MNC Lido City, Jawa Barat. Proyek yang mengusung konsep industri film dan serial drama terintegrasi ini akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas produksi seperti lokasi pengambilan gambar, peralatan dengan teknologi kelas dunia, mulai dari kamera, *sound* hingga peralatan canggih lainnya untuk mendukung seluruh proses produksi.

MNCN juga fokus dan konsisten dengan pengembangan bisnis digital melalui *superapp* AVOD RCTI+, *superapp* SVOD Vision+ yang dikelola oleh unit usaha khusus. Selain itu, MNCN juga memiliki 4 (empat) portal berita dan hiburan unggulan yaitu okezone.com, sindonews.com, inews.id, dan idxchannel.com, di bawah iNews Media Group. iNews Media Group merupakan pusat pemberitaan terbesar dan terintegrasi yang berfokus pada konten pemberitaan dan informasi melalui platform portal online, saluran FTA & berbayar, radio, dan media sosial, untuk mengoptimalkan pendapatan Perseroan melalui upaya cross-selling antar platform.

c. Struktur Modal

Berdasarkan Akta No. 46 Tanggal 20 Mei 2015 *Junctis* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar MNCN No. 87 tanggal 31 Agustus 2021, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 87 tanggal 31 Agustus 2021**"), yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0442763 tanggal 31 Agustus 2021; didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0148156.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 31 Agustus 2021; dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81, Tambahan Berita Negara No. 031245 dan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek MNCN per 31 Mei 2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MNCN per 31 Mei 2025 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham		Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
	Seri A @Rp100,- per saham	Seri B @Rp100,- per saham		
Modal Dasar				
Seri A	**5.700.000.000**	**-**	**570.000.000.000**	
Seri B	**-**	**34.300.000.000**	**3.430.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
- PT Global Mediacom Tbk	5.700.000.000	-	570.000.000.000	
	-	1.267.133.504	126.713.350.400	
		Total	**696.713.350.400**	**52,67**
Masyarakat*	-	6.260.028.006	626.002.800.600	

Keterangan	Saham		Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
	Seri A @Rp100,- per saham	Seri B @Rp100,- per saham		
		Total	**626.002.800.600**	**47,33**
Saham Treasury	-	**1.822.626.200**	**182.262.620.000**	
Jumlah modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**5.700.000.000**	**9.349.787.710**	**1.504.978.771.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel (Seri B)	-	**24.950.212.290**	**2.495.021.229.000**	

**) kepemilikan saham di bawah 5%*

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat MNCN Nomor 77 tanggal 26 Juni 2024, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0226822 tanggal 16 Juli 2024, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0143369.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 16 Juli 2024, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MNCN yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Hary Tanoesoedibjo
Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	: Muhammad Zainul Majdi
Komisaris	: Syafril Nasution
Komisaris Independen	: Joel Richard Hogarth

Direksi

Direktur Utama	: Noersing
Wakil Direktur Utama	: Kanti Mirdiati Imansyah
Direktur	: Valencia Herliani Tanoesoedibjo
Direktur	: Ruby Panjaitan
Direktur	: Tantan Sumartana
Direktur	: Dini Aryanti Putri
Direktur	: Cahyarina Agustina Asri

Keterangan:
Bahwa seluruh susunan Direksi dan Dewan Komisaris diatas telah diangkat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar MNCN, dan menjabat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatan.

e. Ikhtisar Data Keuangan

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting dari MNCN untuk tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Jumlah Aset	24.642.848	22.765.563
Jumlah Liabilitas	2.061.372	1.844.417
Jumlah Ekuitas	22.581.476	20.921.146

Perbandingan 31 Desember 2024 dan 2023

Jumlah Aset
Jumlah aset MNCN pada 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp24.642.848 juta atau naik sebesar 8.25% dari Rp22.765.563 juta pada 31 Desember 2023. Kenaikan aset terutama disebabkan oleh kenaikan pada aset keuangan tidak lancar lainnya.

Jumlah Liabilitas
Jumlah liabilitas MNCN pada 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp2.061.372 juta atau naik sebesar 11,76% dari Rp1.844.417 juta pada 31 Desember 2023. Kenaikan liabilitas terutama disebabkan oleh kenaikan pada utang bank jangka panjang.

Jumlah Ekuitas
Jumlah ekuitas MNCN pada 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp22.581.476 juta atau naik sebesar 7,94% dari Rp20.921.146 juta pada 31 Desember 2023. Kenaikan ekuitas terutama disebabkan oleh kontribusi laba bersih yang diperoleh di tahun 2024.

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Pendapatan Usaha	7.953.812	7.783.253
Beban Langsung	4.295.266	4.169.793
Laba Kotor	3.658.546	3.613.460
Laba Sebelum Pajak	1.344.726	1.320.181
Laba Bersih Tahun Berjalan	1.141.475	1.091.547
Laba Bersih Tahun Berjalan yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	1.073.222	1.032.715

Perbandingan 31 Desember 2024 dan 2023

Pendapatan Usaha
Pendapatan usaha MNCN naik sebesar Rp170.559 juta atau sebesar 2,19% menjadi sebesar Rp7.953.812 juta pada tahun 2024 dari sebelumnya sebesar Rp7.783.253 juta pada tahun 2023. Peningkatan pendapatan usaha tersebut disebabkan oleh kenaikan pendapatan dari *subscription*, konten dan IP.

Kontribusi pendapatan MNCN terhadap Perseroan pada 31 Desember 2024 adalah sebesar 79,07%.

Beban Langsung
Beban langsung MNCN naik sebesar Rp125.473 juta atau sebesar 3,01% menjadi sebesar Rp4.295.266 juta pada tahun 2024 dari sebelumnya sebesar Rp4.169.793 juta pada tahun 2023. Peningkatan beban langsung tersebut disebabkan oleh kenaikan beban program dan konten.

Laba Kotor
Laba kotor MNCN naik sebesar Rp45.086 juta atau sebesar 1,25% menjadi sebesar Rp3.658.546 juta pada tahun 2024 dari sebelumnya sebesar Rp3.613.460 juta pada tahun 2023. Peningkatan laba kotor tersebut disebabkan oleh kenaikan pendapatan usaha seperti yang telah dijelaskan di atas.

Laba Sebelum Pajak
Laba sebelum pajak MNCN naik sebesar Rp24.545 juta atau sebesar 1,86% menjadi sebesar Rp1.344.726 juta pada tahun 2024 dari sebelumnya sebesar Rp1.320.181 juta pada tahun 2023. Peningkatan laba sebelum pajak tersebut disebabkan oleh kenaikan laba kotor seperti yang telah dijelaskan di atas.

Laba Bersih Tahun Berjalan yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk
Laba bersih tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk MNCN naik sebesar Rp49.928 juta atau sebesar 4,57% menjadi sebesar Rp1.141.475 juta pada tahun 2024 dari sebelumnya sebesar Rp1.091.547 juta pada tahun 2023. Peningkatan laba bersih tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk MNCN tersebut disebabkan oleh kenaikan laba sebelum pajak seperti yang telah dijelaskan di atas.

ii. PT MNC Vision Networks Tbk (IPTV)

a. Riwayat Singkat

IPTV merupakan anak perusahaan Perseroan yang diperoleh pada tahun 2006, IPTV merupakan suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat, yang didirikan dengan nama PT Sumber Primautama

berdasarkan Akta Pendirian No. 65 tanggal 27 Desember 2006, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta Pusat ("Akta Pendirian"), yang mana telah Memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") melalui Surat Keputusannya No. W7-01119 HT.01.01-TH.2007 tanggal 30 Januari 2007 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 6 November 2017,Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 10953.

Anggaran dasar IPTV sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian telah beberapa kali mengalami perubahan. Anggaran Dasar IPTV kemudian diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 7 tanggal 2 April 2019 **("Akta No. 7 tanggal 2 April 2019")**, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani., S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU0018492.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 4 April 2019, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0186951 tanggal 4 April 2019, dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0186954 tanggal 4 April 2019, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU0055920.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 4 April 2019.

Anggaran Dasar IPTV juga telah disesuaikan dengan Klasfikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 56 tanggal 15 Juli 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("Akta No. 56 tanggal 15 Juli 2022"), yang telah: disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya No. AHU-0052966.AH.01.02.TAHUN 2022, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0271818 tanggal 28 Juli 2022, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0146176.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 Juli 2022, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 032526..

Perubahan terakhir Anggaran Dasar IPTV adalah untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 86 tanggal 20 Juni 2023 ("Akta No. 86 tanggal 20 Juni 2023"), dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0084149 tanggal 27 Juni 2023; telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0120863.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 27 Juni 2023; dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 53, Tambahan Berita Negara No. 019217.

Alamat kantor pusat IPTV berlokasi di MNC Tower, lantai 27, Jalan Kebon Sirih Nomor 17 – 19, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10340.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar IPTV yang tercantum dalam Pasal 3 Akta No. 56 tanggal 15 Juli 2022, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha IPTV adalah berusaha di bidang perdagangan; konstruksi; industri, pengangkutan; informasi dan komunikasi; dan aktivitas professional, ilmiah dan teknis. Kegiatan usaha yang saat ini dilakukan IPTV adalah Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

Kegiatan usaha yang dijalankan IPTV saat ini adalah menjalankan usaha di bidang media berbasis langganan di Indonesia antara lain untuk layanan TV berlangganan, *fixed broadband*, serta layanan televisi berbasis internet (IPTV).

Sebagai grup media berbasis langganan terbesar di Indonesia, IPTV memiliki bisnis utama dalam menghadirkan konten siaran terbaik dan berkualitas tinggi pada semua *platform* TV berbayar yang tersedia saat ini, melalui DTH Pay-TV dan layanan televisi berbasis internet (IPTV), dengan jumlah pelanggan per Desember 2022 sebesar 12 juta. Perseroan juga menawarkan layanan *fixed broadband* yang saat ini merambah di kota-kota besar di Indonesia. Bisnis utama Perseroan didukung oleh unit produksinya, yang memproduksi berbagai *genre*

konten mulai dari hiburan hingga konten berita yang dikemas dalam saluran TV berbayar. IPTV juga menghasilkan sebagian kecil pendapatannya dari iklan yang ditempatkan pada konten yang disiarkan dalam platform TV berbayarnya.

Pada tahun 2021, Perseroan melakukan investasi strategis dengan kepemilikan minoritas yang cukup signifikan di Migo, yang merupakan *online – to – offline hub* yang mempenetrasi warung (toko kecil) di seluruh Indonesia untuk menghadirkan berbagai jenis layanan online secara *offline*.

c. Struktur Modal

Berdasarkan Akta No. 7 tanggal 2 April 2019 *Junctis* Akta No. 56 tanggal 15 Juli 2022 dan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek IPTV per 31 Mei 2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham IPTV per 31 Mei 2025 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham		Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
	Seri A @Rp500,- per saham	Seri B @Rp100,- per saham		
Modal Dasar				
Seri A	**20.807.078.184**	**-**	**10.403.539.092.000**	
Seri B	**-**	**75.964.609.080**	**7.596.460.908.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
- PT Global Mediacom Tbk	20.806.078.184	-	10.403.039.092.000	
	-	5.879.998.507	587.999.850.700	
		Total	**10.991.038.942.700**	**63,24**
Masyarakat*	1.000.000	-	500.000.000	
		-		
	-	15.510.874.150	1.551.087.415.000	
		Total	**1.551.587.415.000**	**36,76**
Jumlah modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**20.807.078.184**	**21.390.872.657**	**12.542.626.357.700**	**100,00**
Saham dalam Portepel (Seri B)	**-**	**54.573.736.423**	**5.457.373.642.300**	

**) kepemilikan saham di bawah 5%*

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat IPTV No. 112 tanggal 27 Juni 2024, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0225607 tanggal 12 Juli 2024, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0140848.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 12 Juli 2024, susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris IPTV yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Ruby Panjaitan
Komisaris : Mashudi Hamka
Komisaris Independen : Agus Mulyanto
Komisaris Independen : Sandy Wiguna

Direksi
Direktur Utama : Syafril Nasution
Direktur : Herman Kusno
Direktur : Vera Tanamihardja
Direktur : Verta Tanamihardja
Direktur : Gadis Ratnasari

Keterangan:
Bahwa seluruh susunan Direksi dan Dewan Komisaris diatas telah diangkat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar IPTV, dan menjabat untuk jangka waktu terhitung

sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatan.

e. Ikhtisar Data Keuangan

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting dari IPTV untuk tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta periode dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Jumlah Aset	8.770.332	9.478.405
Jumlah Liabilitas	1.286.958	1.760.387
Jumlah Ekuitas	7.483.374	7.718.018

Perbandingan 31 Desember 2024 dan 2023

Jumlah Aset
Jumlah aset IPTV pada 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp8.770.332 juta atau turun sebesar 7,47% dari Rp9.478.405 juta pada 31 Desember 2023. Penurunan aset terutama disebabkan oleh penjualan aset MNC Play.

Jumlah Liabilitas
Jumlah liabilitas IPTV pada 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp1.286.958 juta atau turun sebesar 26,89% dari Rp1.760.387 juta pada 31 Desember 2023. Penurunan liabilitas terutama disebabkan oleh pembayaran pinjaman bank.

Jumlah Ekuitas
Jumlah ekuitas IPTV pada 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp7.483.374 juta atau turun sebesar 3,04% dari Rp7.718.018 juta pada 31 Desember 2023. Penurunan ekuitas terutama disebabkan oleh kontribusi rugi bersih yang diperoleh di tahun 2024.

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Pendapatan Usaha	1.677.699	2.079.478
Beban Pokok Pendapatan	1.654.300	1.897.057
Laba Kotor	23.399	182.419
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(319.829)	(264.640)
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	(259.061)	(94.921)

Perbandingan 31 Desember 2024 dan 2023

Pendapatan Usaha
Pendapatan usaha IPTV turun sebesar Rp401.779 juta atau sebesar 19,32% menjadi sebesar Rp1.677.699 juta pada tahun 2024 dari sebelumnya sebesar Rp2.079.478 juta pada tahun 2023. Penurunan pendapatan usaha tersebut terutama disebabkan oleh divestasi bisnis broadband MNC Play.

Kontribusi pendapatan IPTV terhadap Perseroan pada 31 Desember 2024 adalah sebesar 16,68%.

Beban Pokok Pendapatan
Beban pokok pendapatan IPTV turun sebesar Rp242.757 juta atau sebesar 12,80% menjadi sebesar Rp1.654.300 juta pada tahun 2024 dari sebelumnya sebesar Rp1.897.057 juta pada tahun 2023. Penurunan beban pokok pendapatan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban penyusutan dan amortisasi karena divestasi bisnis broadband MNC Play.

Laba Kotor

Laba kotor IPTV turun sebesar Rp159.020 juta atau sebesar 87,17% menjadi sebesar Rp23.399 juta pada tahun 2024 dari sebelumnya sebesar Rp182.419 juta pada tahun 2023. Penurunan laba kotor tersebut disebabkan oleh penurunan pendapatan usaha yang lebih tinggi daripada penurunan beban langsung.

Rugi Sebelum Pajak

Rugi sebelum pajak IPTV turun sebesar Rp55.189 juta atau sebesar 20,85% menjadi sebesar Rp319.829 juta pada tahun 2024 dari sebelumnya sebesar Rp264.640 juta pada tahun 2023. Kenaikan rugi sebelum pajak tersebut terutama disebabkan oleh penurunan laba kotor seperti yang telah dijelaskan di atas.

Rugi Bersih Tahun Berjalan

Rugi bersih tahun berjalan IPTV turun sebesar Rp164.140 juta atau sebesar 172,93% menjadi sebesar Rp259.061 juta pada tahun 2024 dari sebelumnya sebesar Rp94.921 juta pada tahun 2023. Peningkatan rugi bersih tahun berjalan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan laba kotor seperti yang telah dijelaskan di atas.

H. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Perseroan dan Entitas Anak

Sampai pada tanggal Prospektus ini diterbitkan dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan tanggal 27 Maret 2025, Perseroan dan Entitas Anak: (i) tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, (ii) tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (iii) tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, (iv) tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (v) tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (vi) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa dibidang persaingan usaha, (vii) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, dan (viii) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan, somasi dan/atau klaim.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak

Sampai pada tanggal Prospektus ini diterbitkan dan didukung oleh Surat Pernyataan tanggal 27 Maret 2025, masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak dalam kapasitasnya selaku anggota Direktur dan anggota Dewan Komisaris serta pribadi: (i) tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, (ii) tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (iii) tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, (iv) tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (v) tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (vi) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa dibidang persaingan usaha, (vii) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, dan (viii) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan, somasi dan/atau klaim, kecuali Hary Tanoesoedibjo selaku pribadi sedang menghadapi Perkara Perdata No.142/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Februari 2025 antara PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk selaku Penggugat dengan antara lain Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo selaku Tergugat I, PT MNC Asia Holding Tbk selaku Tergugat II, yang saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

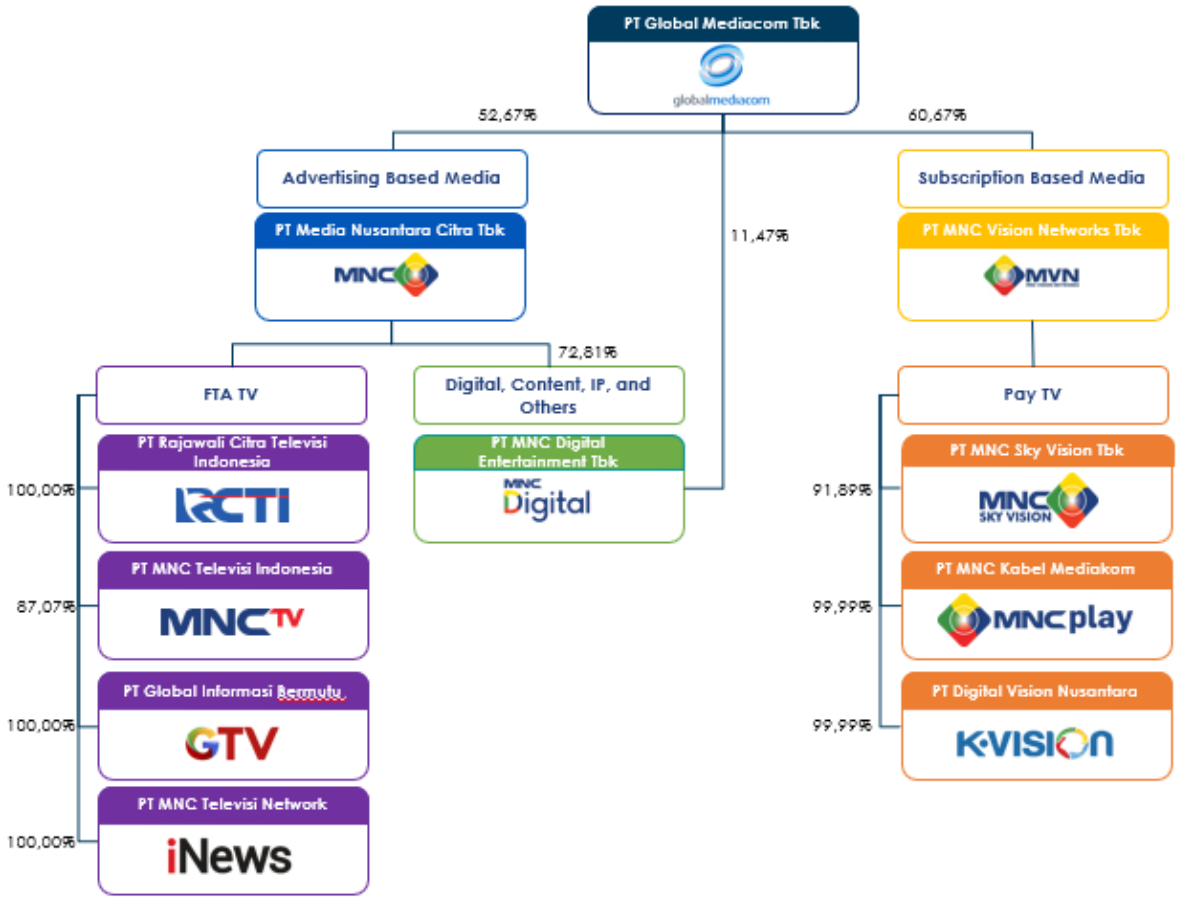
Berdasarkan Surat Pernyataan Hary Tanoesoedibjo dan BHIT tersebut, yang bersangkutan berkeyakinan perkara yang sedang dihadapi tidak akan berdampak negatif secara material terhadap kelangsungan usaha dan/atau operasional Perseroan, MNCN, Infokom, MNC Shop, RCTI, GIB, MNCTV, MMI, DVN, MKM, BHIT maupun rencana Perseroan untuk melakukan PUB V Tahap I serta penggunaan dananya.

I. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. KEGIATAN USAHA

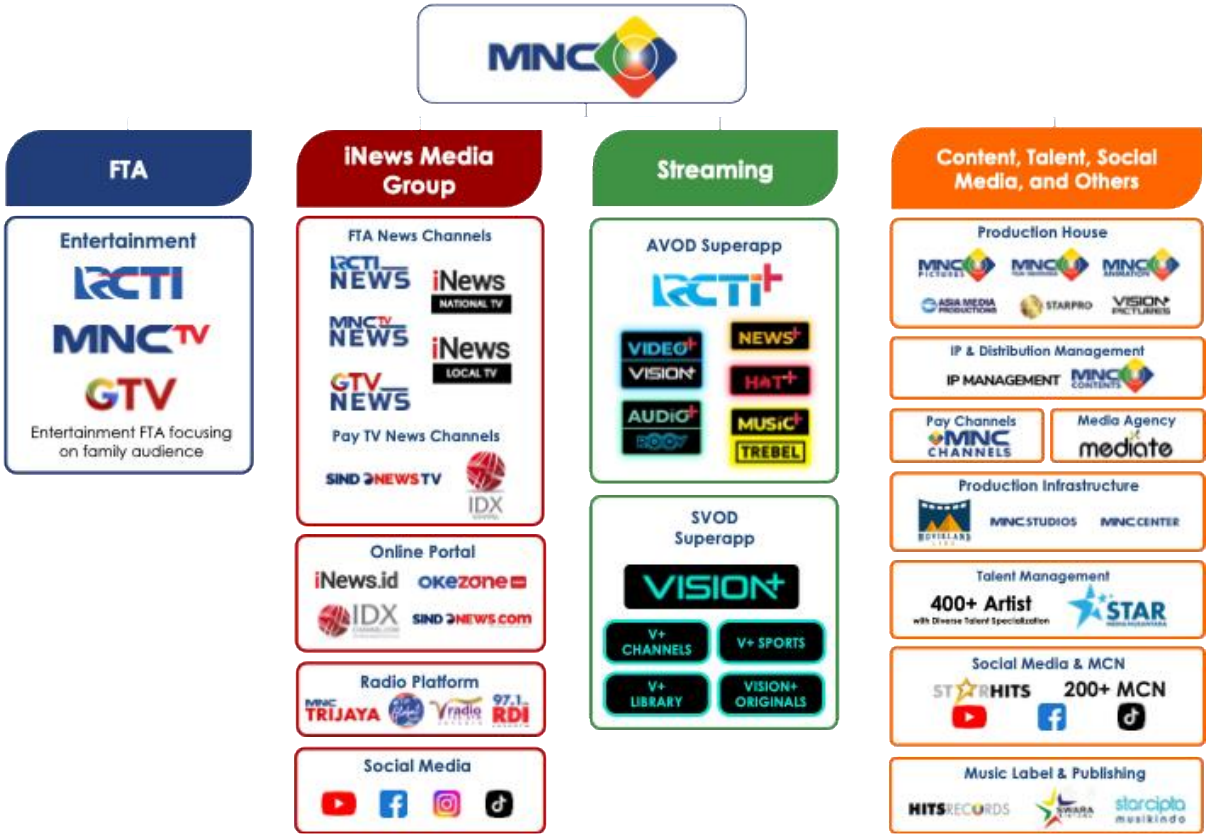
Mayoritas pendapatan Perseroan dikontribusikan oleh dua lini bisnis utama, yaitu bisnis media berbasis iklan dan konten, yang dikelola oleh MNCN, yang saat ini menghasilkan pendapatan bagi Perseroan sebesar 79,07% dan bisnis media berbasis pelanggan, yang dikelola oleh IPTV yang saat ini berhasil menghasilkan pendapatan sebesar 16,68% bagi Perseroan.

Berikut adalah struktur Perseroan per tanggal 31 Desember 2024:



Berikut adalah klasifikasi lini usaha dibawah Perseroan, yaitu:

1.1. Bisnis Media Berbasis Iklan dan Konten melalui MNCN



A. Umum

MNCN adalah grup perusahaan media terbesar dan paling terintegrasi di Asia Tenggara yang mencakup 4 saluran televisi *Free-To-Air* (FTA) nasional, produksi & distribusi konten termasuk rumah produksi, manajemen artis, manajemen media sosial termasuk *multi-channel networks,* serta layanan *digital entertainment* melalui 2 (dua) *platform Superapp,* dan operasi pemberitaan terbesar yang berfokus pada konten pemberitaan dan informasi melalui platform portal *online*, saluran FTA & berbayar, radio, dan media sosial.

1. Penyiaran Televisi FTA

MNCN memiliki dan mengoperasikan 4 FTA nasional di Indonesia, yaitu RCTI, MNCTV, GTV dan iNews. Peringkat stasiun televisi MNCN masih kuat dan stabil dengan pangsa pemirsa *prime time* rata-rata per tahun 2024 adalah 35,9% pada slot *prime time* dan 36,7% pada slot *all time*.

RCTI

Didirikan pada 24 Agustus 1989, RCTI merupakan stasiun TV *Free-to-Air* (FTA) swasta pertama di Indonesia dengan jangkauan siaran yang paling luas. Sebagai salah satu stasiun TV FTA nasional terbesar, RCTI menawarkan deretan program acara yang bervariasi, mencakup sinetron, film *box office*, olahraga, pencarian bakat, *reality and game show, program anniversary*, *awarding* dan program hiburan lainnya.

Pada 2024, RCTI menunjukkan kinerja yang luar biasa bagus dengan membukukan pangsa pemirsa *prime time* 15,3% sementara pangsa pemirsa *all time* mencapai 12,7% berdasarkan Nielsen.

MNCTV
MNCTV adalah stasiun televisi FTA nasional, yang didirikan pada 23 Januari 1991. MNCTV melayani segmen demografi yang luas dengan menayangkan berbagai sinetron keluarga, animasi, program olahraga, dan *variety show.*

Pada tahun 2024, rata-rata pangsa pemirsa *all time* MNCTV mencapai 13,8%, dengan pangsa pemirsa *prime time* sebesar 11,9% berdasarkan Nielsen. MNCTV telah menjadi salah satu stasiun FTA Indonesia dengan pertumbuhan tercepat yang didukung oleh deretan program serial drama dan animasi yang populer.

GTV
Sebelumnya dikenal sebagai Global TV, didirikan pada 22 Maret 1999, Perseroan mengganti nama stasiun televisi ini menjadi GTV pada Desember 2017. Dengan perubahan ini, GTV juga memperbarui posisinya sebagai jaringan FTA nasional dengan target demografi keluarga muda dan modern. Program-program GTV berpusat pada drama, animasi, *variety show, reality show, game show* serta program-program pencarian bakat.

Pada 2024, pangsa pemirsa *all time* rata-rata GTV mencapai 6,5% berdasarkan Nielsen. Kedepannya GTV akan dapat memanfaatkan sinergi dan fasilitas-fasilitas berteknologi tinggi di studio yang berlokasi di kawasan Kebon Jeruk, melalui program yang diproduksi secara *in-house*.

iNews
Sebagai stasiun TV berita terbesar di Indonesia, iNews menawarkan program-program acara yang memikat dengan terus mempertahankan efisiensi operasional. Demi meningkatkan *rating* dan *viewership*, iNews saat ini menyediakan programnya untuk ditayangkan di portofolio FTA hiburan milik MNCN, yaitu RCTI, MNCTV dan GTV. Dengan menyajikan program berita dan olahraga terkini kepada pemirsa Indonesia, iNews adalah satu-satunya TV berita yang menjangkau pemirsa di platform TV lain.

iNews memiliki rata-rata pangsa pemirsa *all time* mencapai 3,9% dengan pangsa pemirsa *prime time* sebesar 3,5% berdasarkan Nielsen.

2. Bisnis Konten dan Media Sosial

Bisnis konten merupakan salah satu bisnis inti MNCN. Sampai dengan akhir Desember 2024, MNCN memiliki pustaka konten terbesar di Indonesia dengan lebih dari 300.000 jam program dan terus bertumbuh lebih dari 20.000 jam setiap tahunnya. Pustaka konten ini sangat berpotensi menjadi sumber pendapatan bagi MNCN. Konten dan *Intellectual Property* ("**IP**") di dalamnya dapat dijual kembali melalui lisensi untuk *platform* distribusi lain baik di Indonesia maupun di luar negeri.

MNCN juga mendapatkan penghasilan dari penayangan koten-konten hasil produksinya yang diunggah secara *online* ke dalam platform media sosial. Per bulan Desember 2024, akun media sosial yang dimiliki oleh MNC memiliki lebih dari 600 juta *subscribers/followers* dengan sekitar 1,5 miliar *views* setiap bulannya.

- **Rumah Produksi**

MNC Pictures
Sejak didirikan pada tahun 2007, setiap tahun MNC Pictures (MNCP) memproduksi konten drama dalam bentuk seri drama dan FTV yang ditayangkan di stasiun TV FTA MNCN. MNCP memiliki kapasitas produksi yang mewakili lebih dari 33% dari seluruh konten drama Indonesia. MNCP juga memproduksi *web series* dan *produksi* konten orisinil yang didistribusikan melalui *platform* digital yang membidik generasi *millenials*.

Sepanjang tahun 2024, MNCP memproduksi banyak sinetron unggulan, seperti "Cinta Tanpa Karena", "Tukang Bubur Pengen Naik Haji", "TOP Tukang Ojek Preman", "Aku Mencintaimu Karena Allah", "Cinta Berakhir Bahagia", "Setulus Hati", "Cinta Yasmin", dan "Terbelenggu Rindu".

Selain memproduksi konten untuk FTA TV milik MNCN, MNCP juga memproduksi film-film Indonesia yang berkualitas.

MNC Animation
MNC Animation ("MNCA") didirikan pada Mei 2011. MNCA berfokus pada pengembangan IP menjadi produksi animasi dan bisnis terkait IP. MNCA telah menyelesaikan beberapa serial animasi seperti Entong season 1 & 2, KIKO pre-season, season 1 - 3, Bima S Season 1 - 2 dan juga film teatrikal, seperti Titus - Mystery of the Engyma, KIKO In The Deep Sea, dan Zanna : Whisper of Volcano Isle.

KIKO telah mempertahankan statusnya sebagai serial animasi lokal paling populer di negara ini dan mendapatkan minat yang luar biasa dari berbagai daerah di pasar internasional. KIKO kini ditayangkan di 64 negara dan telah diterjemahkan & di-dubbing ke dalam 4 bahasa.

Pada Januari 2020, MNCA merilis film animasi teatrikal pertamanya yang berjudul "TITUS - Mystery of the Engyma" di bioskop Indonesia dan pada bulan November, "TITUS - Mystery of the Enygma" telah tersedia untuk penonton di Asia Tenggara melalui Netflix (SEA). Ditahun yang sama KIKO series juga mulai tayang di MNCTV.

MNCA memperkenalkan Serial TV Animasi 3D berjudul "Bima S" yang tayang perdana pada bulan Oktober 2020, yang memperoleh kinerja luar biasa dengan mencatatkan pangsa pemirsa sebesar 15,6% di RCTI.

Pada tahun 2023, film animasi layar lebar "KIKO In the Deep Sea" tayang diseluruh bioskop Indonesia. Di tahun yang sama, Bima S Series juga tayang di MNCTV dan mendapatkan 1 penghargaan bergengsi, Asian Academy Creative Awards 2023 (Regional) sebagai "Best Program atau Animation Series (2D or 3D)".

Pada tahun 2024, Serial Animasi Titus The Detective mulai tayang di RCTI tepatnya pada tanggal 22 September 2024. Selain itu Serial Animasi Bima S ini juga mulai tayang di GTV.

Di awal tahun 2025, MNC Animasi merilis film layar lebar animasi yang berjudul Zanna : Whisper of Volcano Isle diseluruh bioskop Indonesia tepatnya pada tanggal 2 Januari 2025. MNC Animation juga meluncurkan komik dengan judul Eagle di platform Klaklik pada tanggal 15 Januari 2025. Pada Tanggal 16 Februari 2025, KIKO Season 4 mulai tayang di RCTI dan MNCTV.

MNCA saat ini sedang memproduksi Kiko season 4, Titus the Detective series dan komik Eagle.

Starpro
Sebagai rumah produksi, Starpro memproduksi berita dari dunia hiburan (*infotainment*) untuk MNC Grup FTA TV (RCTI, MNCTV, GTV dan iNews) dan saluran *infotainment* pada *platform* TV berlangganan. Starpro memproduksi 1423 jam konten *infotainment* pada tahun 2024, menjadi produsen *infotainment* paling produktif dengan pangsa pasar sebesar 33%.

Starpro menghasilkan program seperti Go Spot, Barista, Obsesi, Seleb on News, iSeleb, Intens Reborn, dan Emang Boleh.

Asia Media *Productions*
Asia Media Productions (AMP) adalah perusahaan *joint venture* antara PT MNC Digital Entertainment Tbk dan Triwarsana. Rumah produksi tersebut saat ini menjadi penyedia konten *reality* dan *game show* terbesar di Indonesia. Pada tahun 2024, AMP telah memproduksi 994 jam program *reality* yang mewakili 71% pangsa pasar.

Selama tahun 2024, AMP telah memproduksi berbagai program reality terbaik, seperti Kilau Uang Kaget, Bedah Rumah Lagi, Lingkar Takdir, Hati Sang Bidadari, dan lainnya.

- **Manajemen Artis**
  Sebagai unit manajemen artis terbesar di Indonesia, Star Media Nusantara (SMN) memiliki 400 artis dengan kontrak eksklusif dari berbagai latar belakang seperti penyanyi, presenter, aktor, aktris, comedian, dan lainnya.

  SMN merupakan manajemen artis resmi untuk semua program pencarian bakat MNC Grup seperti Indonesian Idol, Indonesian Idol Junior, X-Factor, The Voice, The Voice Kids, Raising Star, KDI, Master Chef Indonesia, Miss Indonesia, dan lain-nya. Selain itu, SMN juga memiliki *records* label bernama Hits Records (*pop*) & Swara

Bintang (dangdut & melayu), unit publishing bernama Swara Cipta Musikindo, dan juga operasional MCN melalui StarHits.

3. Bisnis Digital

Pada lini bisnis digital, MNCN memiliki platform *superapp* AVOD (RCTI+), SVOD (Vision+), dan beberapa operasi portal online.

- **RCTI+**
  RCTI+ adalah AVOD *superapp* terbesar di tahun 2024. Aplikasi ini terdiri dari 5 kategori konten yang meliputi layanan video (*streaming, video on demand*, dan konten kreatif lainnya), berita, audio (*audio series, audio book, podcast* dan *aggregator* radio), UGC, dan musik. Hingga Desember 2024, RCTI+ telah mengumpulkan lebih dari 70 juta pengguna aktif bulanan.

- **Vision+**
  Vision+ adalah SVOD *Superapp* dengan pertumbuhan terpesat di tahun 2024 yang memberikan pengguna akses ke lebih dari 20.000 jam konten *video on demand* ekslusif, lebih dari 110 saluran linear premium lokal & internasional, program olahraga pilihan, dan konten orisinil yang diproduksi oleh Vision Pictures. Hingga Desember 2024, Vision+ telah memiliki sekitar 40 juta pengguna aktif bulanan dan 2,85 juta pelanggan berbayar. Sebagai informasi tambahan, Vision+ memiliki pertumbuhan transaksi terpesat selama 2024, dengan 5,4 juta transaksi dibandingkan dengan 1,1 juta transaksi pada 2023.

- **Portal *Online***
  MNCN memiliki dan mengoperasikan 4 portal umum dan berita *online*, yaitu okezone.com (portal yang memberikan informasi dan berita tercepat dan terakurat), sindonews.com (portal yang memberikan informasi/berita mendalam), iNews.id (portal yang memberikan informasi mengenai berita nasional dan regional), dan idxchannel.com (memberikan informasi mengenai ekonomi, bisnis, keuangan dan pasar modal). Portal *online* ini telah memperoleh pengguna aktif bulanan secara kolektif sebesar 38,6 juta.

B. Sumber Pendapatan

Sumber pendapatan MNCN berasal dari penjualan iklan di berbagai media. MNCN yakin bahwa posisinya sebagai perusahaan media yang terintegrasi akan memberikan sinergi antar bisnis sehingga dapat menawarkan penjualan iklan dan promosi melalui berbagai media yang dimiliki Perseroan, termasuk televisi, media platform digital dan media pendukung lainnya. Pendapatan perseroan dari lini bisnis yang dimiliki selama 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Untuk rincian segmen pendapatan dari MNCN dalam 2 tahun terakhir, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Item	2023	2024
Total Pendapatan	7.783.252	7.953.813
Segmen:		
Iklan	6.633.101	5.836.420
Langganan	498.013	714.811
Konten	1.279.738	1.765.117
Lainnya	137.107	119.070
Eliminasi	(764.706)	(481.606)

1) Televisi
Sampai saat ini, salah satu sumber pendapatan utama MNCN adalah pendapatan iklan di FTA TV. Pendapatan ini diperoleh melalui penjualan spot iklan di jaringan FTA MNCN, yaitu RCTI, MNCTV, GTV, dan iNews. Slot iklan ini umumnya berdurasi 30 detik dan terbatas 20% dari total jam siaran tiap harinya sesuai peraturan Pemerintah. Hal ini yang disebut dengan jenis tipe iklan regular.

Dengan mengandalkan posisi jaringan FTA MNCN, Perseroan menerapkan beberapa jenis tipe iklan lain (*non-regular*) melalui *non time consuming ads*, yakni iklan yang termuat pada saat jalannya acara.

Tabel dibawah ini memperlihatkan distribusi pendapatan iklan diantara jaringan televisi di Indonesia untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 yang diambil berdasarkan *Marketing Corporate Analyst Data Source* (*Report Adex Nett Estimation*).

Jaringan Televisi	Distribusi Pendapatan Iklan	
	2024 (% Total)	2023 (% Total)
RCTI	18,8%	20,0%
MNCTV	13,3%	15,4%
GTV	4,6%	5,8%
INEWS	3,7%	3,8%
Total MNC Grup	**40,3%**	**45,0%**
SCTV	22,6%	20,2%
IVM	14,2%	12,5%
Total EMTEK Group	**36,8%**	**32,7%**
TRANS	5,2%	5,4%
TRANS7	7,1%	5,8%
Total Trans Group	**12,3%**	**11,2%**
ANTV	3,4%	4,4%
TVONE	4,2%	3,9%
Total VIVA Group	**7,6%**	**8,3%**
METRO TV	3,0%	2,7%
Jumlah	**100,0%**	**100,0%**

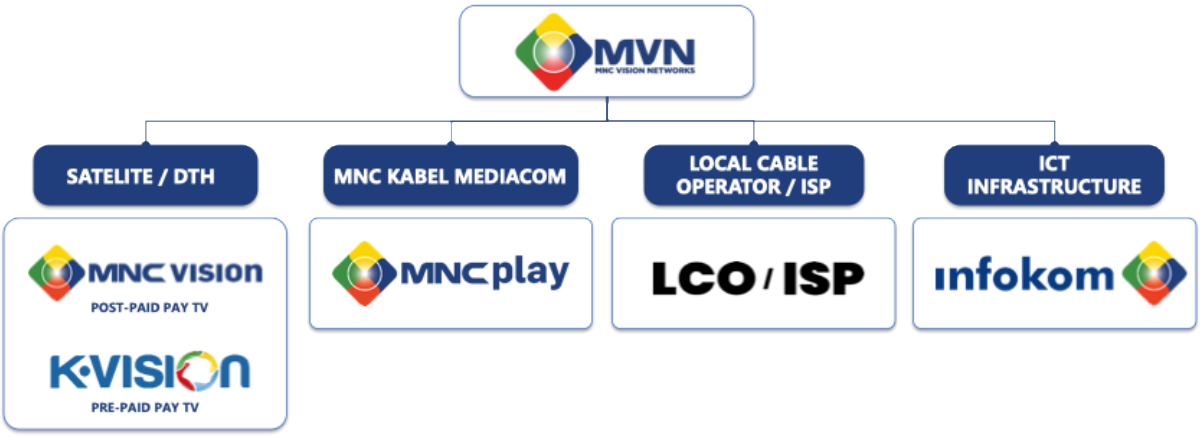
Berikut tabel 10 pemasang iklan terbesar di 4 FTA TV MNCN pada tahun 2023 - 2024:

2023	2024
MAYORA INDAH TBK, PT	MAYORA INDAH TBK, PT
UNILEVER INDONESIA TBK, PT	WINGS GROUP, PT
INDOFOOD GROUP	UNILEVER INDONESIA TBK, PT
DANONE GROUP	DANONE GROUP
WINGS GROUP, PT	INDOFOOD GROUP
GARENA INDONESIA, PT	HM SAMPOERNA TBK, PT
PROCTER & GAMBLE INDONESIA, PT	NESTLE INDONESIA, PT
HM SAMPOERNA TBK, PT	GARENA INDONESIA, PT
SANTOS JAYA ABADI, PT	TEMPO SCAN PACIFIC, PT
NESTLE INDONESIA, PT	GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA, PT

2) *Platform* Digital

MNCN mendapatkan penghasilan dari iklan digital (RCTI+, media sosial, dan portal) dan langganan (Vision+) melalui tayangan untuk konten-konten yang diunggah secara *online* ke *platform* digital milik Perseroan, seperti 4 portal *online*, 2 *Superapp* (RCTI+ dan Vision+), dan *platform* media sosial.

1.2. Bisnis Media Berbasis Pelanggan melalui IPTV



IPTV merupakan bagian dari bisnis media MNC Grup. IPTV merupakan perusahaan publik sejak Juli 2019 dengan kode saham IPTV. Bisnis utama IPTV terdiri dari TV Berlangganan DTH pascabayar ("**MNC Vision**") & DTH prabayar ("**K-Vision**"), layanan TV Berlangganan berbasis *Fiber Optic* ("**MNC Play**"), dan layanan bisnis ICT ("**Infokom**").

Adapun lini usaha Entitas Anak IPTV adalah sebagai berikut:

a. Jasa penyedia layanan *postpaid* televisi berbayar melalui PT MNC Sky Vision Tbk (MNC Vision)

MNC Vision merupakan penyedia layanan TV berlangganan pasca bayar terbesar di Indonesia dengan lebih dari 1,2 juta pelanggan. Prestasi ini menunjukkan pencapaian yang luar biasa mengingat ekonomi Indonesia yang berfluktuasi, peningkatan pembajakan video, dan persaingan sengit di antara operator TV berbayar lokal (sumber: data internal Perseroan).

b. Jasa penyedia layanan prabayar televisi berbayar melalui PT Digital Vision Nusantara (K-Vision)

K-Vision merupakan TV berlangganan prabayar terbesar di Indonesia, yang melayani segmen pasar menengah ke bawah yang membutuhkan kualitas lebih baik dan pilihan saluran FTA yang beragam (FTA lokal dan internasional) dan saluran eksklusif berlangganan milik Perseroan.

c. Jasa IPTV melalui PT MNC Kabel Mediakom (MNC Play)

MNC Play fokus pada layanan video dengan menggunakan jaringan FTTH. MNC Play menyediakan layanan IPTV dengan pilihan program *channel* berbayar terbesar dilengkapi dengan fitur-fitur interaktif, seperti TVOD, dan saluran siaran ulang (*catch up* TV).

d. Jasa layanan ICT melalui Infokom

Infokom telah berkembang menjadi penyedia layanan terkelola dan penyedia solusi Teknologi Informasi & Komunikasi di Indonesia. Dengan cakupan area jaringan yang luas, Infokom terus berkomitmen untuk menyediakan solusi ICT untuk sektor publik dan swasta.

C. Sinergi Antara Entitas Anak Perseroan

Sebagai Perusahaan Induk yang mengelola Entitas Anak dengan pangsa pasar terbesar di industri media, Perseroan dapat mengelola sinergi dan integrasi bisnis dan operasional antara MNCN dan IPTV sebagai berikut:

1. Memaksimalkan penjualan iklan melalui Entitas Anak Perseroan dengan upaya *upselling, cross selling* dan *bundling*.
2. Pembelian *programming* dapat lebih efisien karena *bundling* dan skala ekonomi yang lebih besar.
3. Retensi pelanggan dapat dioptimalkan dengan mensinergikan *bundling* produk-produk yang dimiliki Entitas Anak.
4. Kegiatan operasional Entitas Anak dapat lebih efisien dan menghilangkan tumpang tindih dalam operasional.
5. Penggunaan infrastruktur dan peralatan oleh Entitas Anak secara optimal dikarenakan digunakan bersama-sama.

TIDAK ADA KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN.

TIDAK ADA KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG.

2. STRATEGI PERSEROAN

Strategi umum Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Menjaga posisi sebagai pemimpin dalam industri media.
2. Mempertahankan pertumbuhan jangka panjang melalui kombinasi dari pertumbuhan organik dan akusisi dari kegiatan usaha baru khususnya pada bidang digital yang saat ini memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat pesat.
3. Mengoptimalkan pendapatan dan mengatur pengeluaran biaya demi meraih laba yang memadai dengan terus menciptakan sinergi antar unit bisnis.
4. Konsolidasi semua aset digital media dan entertainment yang memiliki pertumbuhan jauh lebih tinggi.

Strategi dalam Bisnis Media Berbasis Konten dan Iklan melalui MNCN

1. Memperkuat portfolio 4 FTA

Selama bertahun-tahun, saluran FTA MNCN telah menjadi yang paling populer di Indonesia karena penyesuaian target program untuk demografi yang tepat. MNCN akan terus memproduksi dan meningkatkan kualitas konten melalui RCTI, MNCTV, GTV dan iNews untuk mempertahankan posisinya.

Stasiun TV unggulan MNCN, RCTI tetap konsisten sebagai salah satu saluran yang paling populer dan paling banyak ditonton di Indonesia. Tayangan sinetron berorientasi keluarga dan ajang pencarian bakat di RCTI dinikmati oleh semua penduduk Indonesia.

MNCN telah menyiapkan serangkaian program-program *in-house* unggulan menarik yang tentunya dapat mencapai rating dan pangsa pemirsa yang baik pada tahun 2025. MNCTV akan terus memberikan program dengan serial drama orisinal, *variety show*, dan program hiburan lainnya.

Sementara itu, GTV akan terus lebih fokus kepada demografi keluarga modern dan progresif melalui berbagai film & serial, reality & game show, animasi, dan banyak lagi. Terakhir, iNews yang menyiarkan program berita dan olahraga ke seluruh stasiun FTA milik MNCN akan terus menghadirkan program-program terkini dalam format yang dinamis dan *fresh*.

2. Produksi *In-House* dan Monetisasi Pustaka Konten

Selama bertahun-tahun, kualitas dan kinerja konten produksi internal MNCN tidak perlu dipertanyakan lagi. MNCN memproduksi konten-konten dengan raihan performa tertinggi tahun demi tahun selama 1 dekade terakhir.

Produksi in-house ini juga berkontribusi pada bertambahnya pustaka konten MNCN, di mana dapat memberikan aliran pendapatan tambahan melalui distribusi konten dan monetisasi IP. MNCN berupaya ekstra untuk fokus pada 2 area ini karena MNCN melihat potensi peningkatan yang besar tumbuh. Banyaknya pemain OTT global yang masuk ke pasar Indonesia memberikan Perseroan peluang untuk memanfaatkannya, baik melalui lisensi pustaka konten MNCN yang saat ini telah mencapai lebih dari 300.000 jam atau permintaan untuk produksi orisinil.

3. Membangun monetisasi dari Aset Digital MSIN

Dalam beberapa tahun terakhir, MNCN (melalui MSIN) membangun monetisasi platform digital dari media sosial, portal online, dan 2 super-app, RCTI+ dan Vision+. Kinerja baik dari platform ini akan memberikan sarana untuk MNCN yang diperlukan dengan mendiversifikasi aliran pendapatannya.

Strategi utama untuk operasi digital MNCN:

a) Meningkatkan jumlah *traffic* pada media sosial untuk memberikan penghasilan tambahan dari penempatan iklan di konten MNCN.
b) Meningkatkan kontribusi dari operasi multi-channel network MNCN, yang akan mendorong pendapatan yang dihasilkan dari *content creator* pihak ketiga di media sosial.
c) Dengan berbagai portal online yang dimilikinya,MNCN akan fokus pada peningkatan kualitas konten, kecepatan dalam menggungah, eksklusivitas konten, dan menempatkan video dalam setiap artikel berita.
d) Menyediakan variasi dalam 5 kategori konten utama utama di RCTI+: Video, Audio, Berita, kompetisi UGC, dan musik untuk mendorong pengguna aktif bulanan.
e) Menyediakan variasi dalam konten dan program terbaik pada Vision+ untuk meningkatkan jumlah pelanggan berbayar.
f) Optimalisasi strategi bundling Iklan di semua aset digital MNCN.

Strategi dalam Bisnis Media Berbasis Pelanggan melalui IPTV

1. **Mendorong Pelanggan Berlangganan Berbayar Secara Rutin Melalui Pembuatan Paket Saluran yang Menarik**
   Strategi Perseroan berfokus pada peningkatan pertumbuhan pelanggan berlangganan berbayar secara berkelanjutan dengan menyusun paket saluran yang disesuaikan dengan beragam minat audiens. Dengan menawarkan paket yang menarik dan berbasis *targeted*, Perseroan bertujuan untuk memastikan setiap pelanggan menemukan kombinasi konten yang sesuai dengan preferensi menonton mereka, mulai dari olahraga premium, hiburan, hingga program lainnya yang relevan.

   Perseroan akan terus merancang paket berlangganan yang fleksibel untuk berbagai segmen pelanggan, memberikan pengalaman yang personal yang mendorong keterlibatan jangka panjang. Paket-paket yang disusun ini akan mencakup campuran konten eksklusif, saluran yang paling diminati, dan penawaran unik yang tidak dapat ditemukan di tempat lain.

2. **Meningkatkan Penjualan Iklan di Platform TV Berbayar**
   Strategi Perseroan untuk mendorong penjualan iklan di platform Pay TV berfokus pada penyediaan solusi iklan yang sangat terarah, menarik, dan efektif yang memaksimalkan peluang pendapatan sambil meningkatkan pengalaman pemirsa. Dengan memanfaatkan data analitik, segmentasi audiens, dan format iklan yang inovatif.

   Kami akan mendorong penjualan iklan melalui kombinasi slot iklan tradisional, iklan terarah dan dapat ditargetkan, konten bersponsor, serta pengalaman iklan interaktif, semuanya disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan spesifik para pengiklan

3. **Pengembangan *Corporate Sales***
   Mendorong corporate sales berfokus pada perluasan pasar pelanggan baru melalui kemitraan strategis dengan berbagai institusi bisnis, seperti rumah sakit, hotel, kantor, perkantoran, dan fasilitas komersial lainnya. Dengan menawarkan paket langganan khusus yang disesuaikan untuk kebutuhan institusi tersebut, Perseroan bertujuan untuk memperkenalkan layanan Pay TV kepada audiens baru yang belum terjangkau sebelumnya.

   Melalui paket bundling yang fleksibel dan harga yang kompetitif, Perseroan akan memberikan solusi yang menarik bagi perusahaan-perusahaan dan fasilitas komersial untuk menawarkan TV berbayar sebagai fasilitas tambahan untuk pemangku kepentingan mereka. Pendekatan ini memungkinkan Perseroan untuk memperluas pangsa pasar, meningkatkan adopsi di kalangan pelanggan korporat, dan menciptakan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan

3. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Keunggulan Kompetitif Media Berbasis Iklan dan Konten melalui MNCN:

1. Perusahaan media Indonesia terbesar dan satu-satunya perusahaan media terintegrasi dengan berbagai platform media yang saling mendukung dan memiliki peluang *cross selling* dengan berbagai unit lain dalam MNC Grup.
2. Pemimpin dalam pasar TV FTA di Indonesia berdasarkan pangsa pemirsa dan pangsa belanja iklan, yang memberikan basis yang kuat untuk mengambil manfaat dari ekspektasi tumbuhnya belanja iklan di Indonesia..

3. Memiliki tim produksi inhouse terbaik dan rumah produksi terbesar di Indonesia yang secara konsisten memproduksi program-program televisi unggulan dengan didukung oleh fasilitas produksi terbesar dan tercanggih.
4. Memiliki pustaka konten terbesar di Indonesia yang dapat digunakan oleh berbagai platform media termasuk pihak ketiga.
5. Memiliki berbagai portfolio digital dengan pertumbuhan pengguna terpesat yang pada akhirnya akan memberikan aliran pendapatan yang signifikan untuk Perseroan .
6. Memiliki hubungan jangka panjang yang baik dengan sejumlah pemasang iklan besar .
7. Profil keuangan yang kuat dengan memiliki cash flow positif dan rendahnya rasio hutang.
8. Manajemen yang kuat dengan sejarah sukses dan pengalaman yang luas dalam industri media.
9. Inisiasi digital yang komprehensif, sehingga dapat mendapatkan porsi yang signifikan dari pertumbuhan pendapatan digital di industri yang pesat.

Keunggulan Kompetitif dalam Bisnis Media Berbasis Pelanggan melalui IPTV:

1. Perusahaan media berlangganan terbesar dan terlengkap di Indonesia dengan jumlah pelanggan Pay TV terbesar di Indonesia.
2. Besarnya jumlah pelanggan memberikan keunggulan ekonomis dalam melakukan negosiasi harga berlangganan dengan *content provider*, harga pembelian peralatan dengan *supplier* dan negosisasi komisi dengan *dealer* pihak ketiga.
3. Tayangan konten Pay TV terlengkap dan paling bervariasi di Indonesia meliputi saluran konten lokal dan internasional termasuk lebih dari 110 saluran premium lokal dan internasional, termasuk 4 saluran FTA MNC Grup yang hanya tersedia di jaringan MNC Group.
4. Didukung oleh teknologi terbaik yaitu S-Band (MNC Vision) dan KU-band (K-Vision) DTH yang dapat menjangkau seluruh kawasan di Indonesia dan layanan IPTV terkomprehensif yang menjamin kualitas produk dan layanan yang optimal untuk pelanggan..
5. Jaringan distribusi penjualan terluas di Indonesia dengan bermitra bersama ribuan *dealer* pihak ketiga di seluruh Indonesia.
6. Rekam jejak pertumbuhan yang terbukti dan kinerja keuangan yang atraktif.

4. PENGENDALIAN MUTU

Untuk memastikan Perseroan selalu menghasilkan produk dan jasa sesuai dengan tuntutan pelanggan, penerapan Sistem Manajemen Mutu menjadi kunci keberhasilan Perseroan dilapangan. Sistem Manajemen Mutu Perseroan terdiri dari:

Setiap produksi program acara yang akan ditayangkan di TV harus melalui proses *Quality Control* dan mengacu kepada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang dikeluarkan oleh KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) serta telah lolos sensor dari Lembaga Sensor Film (LSF).

Setiap produk digital juga diluncurkan melalui tahapan *User Acceptance Training* (UAT), *Quality Control* dan *IT Security Test.*

5. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN LISENSI

Perseroan dan Entitas Anak telah mendaftarkan sejumlah hak kekayaan intelektual yang terdiri dari merek dagang dan hak cipta di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai berikut:

HAK CIPTA

No.	Hak Cipta	Pemilik Hak Cipta	No. Permohonan	Jenis Ciptaan	Tanggal Pengumuman
1.	PT. GLOBAL MEDIACOM Tbk	Perseroan	C00200704715	Karya Tulis	29 Agustus 2007
2.	TANDA TANDANYA	MNCN	000347612	Karya Siaran	7 Juni 2021
3.	RUMAH TEKA-TEKI	MNCN	000347611	Karya Siaran	17 Mei 2021
4.	RISING STAR INDONESIA DANGDUT	MNCN	000268861	Karya Siaran	19 April 2021
5.	AMAZING CONCERT	MNCN	000286837	Karya Siaran	30 Agustus 2020

No.	Hak Cipta	Pemilik Hak Cipta	No. Permohonan	Jenis Ciptaan	Tanggal Pengumuman
6.	AMAZING MAGICIAN	MNCN	000286838	Karya Siaran	9 April 2021
7.	DUO KOMEDIAN	MNCN	000286839	Karya Siaran	22 Agustus 2021
8.	HIGHENDTEEN STARTEEN	MNCN	000286840	Karya Siaran	9 September 2021
9.	MITOLOGI	MNCN	000286842	Karya Siaran	8 Maret 2021
10.	SING LIKE MAMA	MNCN	000286841	Karya Siaran	18 Juni 2021
11.	RCTI ADS	MNCN	000287256	Karya Tulis	9 November 2020
12.	AKU INGIN PULANG	MNCN	000288808	Karya Siaran	9 April 2021
13.	INDONESIA MUSIC AWARDS	MNCN	000296892	Karya Siaran	12 November 2021
14.	INDONESIA MUSIC AWARDS	MNCN	000296893	Naskah Karya Siaran	12 November 2021
15.	BUCIN BUMBU CINTA	MNCN	000311285	Karya Siaran	9 September 2021
16.	MAKAN KUY	MNCN	000311288	Karya Siaran	6 September 2021
17.	OBSESI AWARDS	MNCN	000311295	Karya Siaran	17 September 2021
18.	RAZIA	MNCN	000311314	Karya Siaran	6 September 2021
19.	VIDEO CONTENT CREATOR AWARDS	MNCN	000311315	Karya Siaran	4 September 2021
20.	DISINI ADA CINTA	MNCN	000321451	Karya Siaran	21 Januari 2005
21.	KARENA CINTA	MNCN	000321452	Karya Siaran	1 Oktober 2004
22.	CANDAAN ASYIK	MNCN	000222681	Karya Siaran	1 Desember 2019
23.	GOYANG IN	MNCN	000216313	Karya Siaran	18 Januari 2020
24.	KEBULKAN DOAKU YA ALLAH	MNCN	000216335	Karya Siaran	7 Mei 2019
25.	LETS PLAY	MNCN	000218159	Karya Siaran	24 Desember 2013
26.	RUMAH SELEB	MNCN	000216336	Karya Siaran	6 Mei 2019
27.	SEBENING MATA AIR	MNCN	000216333	Karya Siaran	5 Mei 2019
28.	SELEB ON NEWS	MNCN	000216332	Karya Siaran	5 Februari 2015
29.	SIRAMAN QOLBU	MNCN	000236001	Karya Siaran	4 Mei 2008
30.	AMBYAR AWARDS	MNCN	000221177	Naskah Karya Siaran	28 Agustus 2020
31.	OB	MNCN	000216348	Naskah Karya Siaran	17 April 2006
32.	FUNTASTIK	MNCN	000216346	Naskah Karya Siaran	11 Juli 2005
33.	SERGAP	MNCN	000216349	Karya Siaran	9 Oktober 2001
34.	LIONTIN	MNCN	000216347	Karya Siaran	6 Juni 2005
35.	INDONESIA MUSIC AWARDS	MNCN	000204044	Naskah Karya Siaran	26 Februari 2020
36.	INDONESIA AWARDS	MNCN	000204046	Naskah Karya Siaran	26 Februari 2020
37.	INDONEISIA AWARDS CELEBRATION	MNCN	000204045	Naskah Karya Siaran	26 Februari 2020
38.	INDONESIA MUSIC AWARDS	MNCN	000207585	Karya Siaran	26 Februari 2020
39.	AMBYAR AWARDS	MNCN	000216334	Karya Siaran	28 Februari 2020
40.	E-TV MALL LANGSUNG SCAN LANGSUNG BELANJA	MNCN	000229769	Naskah Karya Siaran	24 Oktober 2020
41.	INDONESIAN ESPORT AWARDS	MNCN	000222668	Karya Siaran	14 Oktober 2014
42.	INDONESIAN ESPORT AWARDS	MNCN	000220872	Naskah Karya Siaran	14 Oktober 2014
43.	KISAH VIRAL	MNCN	000239321	Karya Siaran	6 Oktober 2020
44.	KUY!	MNCN	000239322	Karya Siaran	15 Juli 2020
45.	Seni Gambar LOLA	MNCN	000505440	Seni Gambar	2 Januari 2017
46.	LMAC MUSIC FORALL FEST	MNCN	000521409	Karya Tulis	27 Juli 2023
47.	PRIMADONA PANTURA	MNCN	000529475	Karya Tulis	18 Januari 2023
48.	INDONESIAN TRENDING AWARDS	MNCN	000578695	Karya Siaran	21 Desember 2023
49.	TUKANG MAKAN	MNCN	000578694	Karya Siaran	27 Mei 2023
50.	I LOVE INDONESIA	MNCN	000578693	Karya Siaran	8 Juli 2023
51.	AMAZING KIDS FAVORITE AWARDS	MNCN	000578692	Karya Siaran	17 November 2023
52.	TRAKTIR BOSS!!	MNCN	000600360	Karya Siaran	16 Desember 2023
53.	CFD – CARI FAEDAH	MNCN	000600362	Karya Siaran	22 Januari 2024
54.	BERKAH CINTA RAMADAN	MNCN	000606587	Lagu (Musik dengan teks)	10 Februari 2024

No.	Hak Cipta	Pemilik Hak Cipta	No. Permohonan	Jenis Ciptaan	Tanggal Pengumuman
55.	LMAC CONCERT	MNCN	000608133	Karya Tulis	27 Desember 2023
56.	LMAC RUN	MNCN	000608112	Karya Tulis	27 Desember 2023
57.	KONTES SWARA BINTANG	MNCN	000625269	Naskah Karya Siaran	4 Juli 2023
58.	KONTES SWARA BINTANG	MNCN	000625270	Karya Siaran	4 Juli 2023
59.	PERANG DAPUR	MCNN	000632862	Karya Siaran	4 Juni 2023
60.	PERANG DAPUR	MNCN	000632861	Karya Siaran	4 Juni 2024
61.	KULINER ANAK NUSANTARA	MNCN	000632861	Karya Siaran	10 Juni 2024
62.	AMAZING DANCE INDONESIA	MNCN	000676240	Karya Siaran	4 September 2024
63.	SENI LUKIS KARAKTER "KIKO" - SEASON 4	MNCN	000766032	Seni Lukis	25 September 2024
64.	BAZ - KIKO SEASON 4	MNCN	000766186	Seni Lukis	25 September 2024
65.	POLI - KIKO SEASON 4	MNCN	000766037	Seni Lukis	25 September 2024
66.	LOLA - KIKO SEASON 4	MNCN	000766133	Seni Lukis	25 September 2024
67.	QUIZZIE - KIKO SEASON 4	MNCN	000766137	Seni Lukis	25 September 2024
68.	PATINO - KIKO SEASON 4	MNCN	000766174	Seni Lukis	25 September 2024
69.	REVOLT - KIKO SEASON 4	MNCN	000766180	Seni Lukis	25 September 2024
70.	PUFFY - KIKO SEASON 4	MNCN	000766184	Seni Lukis	25 September 2024
71.	NEON - KIKO SEASON 4	MNCN	000766185	Seni Lukis	25 September 2024
72.	KIKO SEASON 4	MNCN	000766188	Karya Sinematografi	25 September 2024
73.	KIKO SEASON 4	MNCN	000766194	Naskah Karya Sinematografi	25 September 2024
74.	SENI LOGO 3D "KIKO" SEASON 4	MNCN	000766199	Karya Tulis	25 September 2024
75.	TINGTING - KIKO SEASON 4	MNCN	000766182	Seni Lukis	25 September 2024
76.	SIENNA - KIKO SEASON 4	MNCN	000766183	Seni Lukis	25 September 2024
77.	KUIS LANGSUNG DEAL	MNCN	000790325	Naskah Karya Siaran	25 September 2024
78.	KUIS LANGSUNG DEAL	MNCN	000790322	Karya Siaran	25 September 2024
79.	Amazing Dance Indonesia	MNCN	000676240	Karya Siaran	4 September 2024
80.	CLAY - KOMIK EAGLE	MNCN	000790255	Seni Lukis	4 November 2024
81.	EAGLE GUN - KOMIK EAGLE	MNCN	000790262	Seni Lukis	4 November 2024
82.	SAMARTHA - KOMIK EAGLE	MNCN	000790251	Seni Lukis	4 November 2024
83.	SKYLAR - KOMIK EAGLE	MNCN	000790258	Seni Lukis	4 November 2024
84.	FINCH - KOMIK EAGLE	MNCN	000790135	Seni Lukis	4 November 2024
85.	GHOST - KOMIK EAGLE	MNCN	000790119	Seni Lukis	4 November 2024
86.	HOLYHAWK - KOMIK EAGLE	MNCN	000790138	Seni Lukis	4 November 2024
87.	KAI TSAR - KOMIK EAGLE	MNCN	000790133	Seni Lukis	4 November 2024
88.	KOMIK EAGLE	MNCN	000790166	Komik	4 November 2024
89.	SENI LOGO 3D "EAGLE BY MNC ANIMATION"	MNCN	000790173	Karya Tulis	4 November 2024
90.	KOMIK EAGLE	MNCN	000790161	Karya Tulis	4 November 2024
91.	NERIS - KOMIK EAGLE	MNCN	000790122	Seni Lukis	4 November 2024
92.	SCRAPER - KOMIK EAGLE	MNCN	000790127	Seni Lukis	4 November 2024
93.	UNTUNG ADA RUDY	MNCN	000865603	Naskah Karya Siaran	27 Februari 2025
94.	UNTUNG ADA RUDY	MNCN	000865604	Karya Siaran	27 Februari 2025
95.	TEKA TEKI KATA	MNCN	000870011	Naskah Karya Siaran	11 Maret 2025

No.	Hak Cipta	Pemilik Hak Cipta	No. Permohonan	Jenis Ciptaan	Tanggal Pengumuman
96.	TEKA TEKI KATA	MNCN	000870012	Karya Siaran	11 Maret 2025

Keterangan:

Berdasarkan Pasal 58 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, jangka waktu perlindungan atas hak cipta yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Tanggal Pengumuman.

MEREK

No.	Merek	Pemilik Merek	No. Pendaftaran/ No. Permohonan	Tanggal Penerimaan/Perpanjangan	Kelas
1.	globalmediacom + logo = Nama Perusahaan	Perseroan	IDM000205673/ D002007028769	29 Agustus 2017	18
2.	globalmediacom = Nama Perusahaan	Perseroan	IDM000195049/ D002007028766	29 Agustus 2017	25
3.	GLOBALMEDIACOM = Suatu Penamaan	Perseroan	IDM000194759/ J002007028758	29 Agustus 2017	35
4.	GLOBALMEDIACOM = suatu penamaan	Perseroan	IDM000197498/ J002007028754	29 Agustus 2017	38
5.	GLOBALMEDIACOM = suatu penamaan	Perseroan	IDM000197498/ J002007028754	29 Agustus 2017	38
6.	globalmediacom = nama perusahaan	Perseroan	IDM000194762/ J002007028764	29 Agustus 2017	40
7.	globalmediacom = nama perusahaan	Perseroan	IDM000197499/ J002007028762	29 Agustus 2017	41
8.	GLOBALMEDIACOM + LOGO = Suatu penamaan	Perseroan	IDM000194687/ J002007028760	29 Agustus 2017	42
9.	Aladintrevel	Perseroan	JID2021079238/ IDM001005864	16 November 2021	42
10.	Aladintrevel	Perseroan	JID2021079224/ IDM001005875	16 November 2021	39
11.	AladinMall	Perseroan	JID2021089418/ IDM001023418	17 Desember 2021	38
12.	AladinMall	Perseroan	JID2021089424/ IDM001023417	17 Desember 2021	42
13.	Aladin Mall	Perseroan	JID2021089400/ IDM001032075	17 Desember 2021	35
14.	Mister Aladin	Perseroan	JID2023005827/ IDM001159321	20 Januari 2023	35
15.	Mister Aladin + Lukisan	Perseroan	JID2023005835/ IDM001187158	20 Januari 2033	43
16.	MNC TRAVEL	MNCN	IDM000890829/ JID2020003834	22 Januari 2020	42
17.	MNC VISION NETWORKS + LOGO	IPTV	IDM000782272	27 Mei 2019	16,21,9
18.	MNC VISION NETWORKS + LOGO	IPTV	IDM001147270/ ID2023026665	29 Maret 2023	21
19.	MNC VISION NETWORKS + LOGO	IPTV	IDM001149190/ ID2023026540	29 Maret 2023	9
20.	MNC VISION NETWORKS + LOGO	IPTV	IDM001149176/ ID2023026630	29 Maret 2023	16

No.	Merek	Pemilik Merek	No. Pendaftaran/ No. Permohonan	Tanggal Penerimaan/Perpanjangan	Kelas
21.	LCLD LOMBA CIPTA LAGU DANGDUT	MNCN	JID2021025637/ IDM000966775	13 April 2021	41
22.	LCLD LOMBA CIPTA LAGU DANGDUT	MNCN	JID2021025635/ IDM000966777	13 April 2021	38
23.	NGEDANGDUTIN	MNCN	JID2021025629/ IDM000966883	13 April 2021	41
24.	NGEDANGDUTIN	MNCN	JID2021025605/ IDM000967142	13 April 2021	38
25.	KRIBO KRIMINAL HEBOH	MNCN	JID2021025628/ IDM000966884	13 April 2021	41
26.	KRIBO KRIMINAL HEBOH	MNCN	JID2021025600/ IDM000967165	13 April 2021	38
27.	KONTES DE PARPOL	MNCN	JID2021025621/ IDM000966918	13 April 2021	41
28.	KONTES DE PARPOL	MNCN	JID2021025599/ IDM000967166	13 April 2021	38
29.	KOKI KIKUK	MNCN	JID2021025613/ IDM000967139	13 April 2021	41
30.	INDONESIAN DRAMA SERIES AWARDS	MNCN	JID2021028408/ IDM000967615	23 April 2021	41
31.	INDONESIAN DRAMA SERIES AWARDS	MNCN	JID2021028401/ IDM000967621	23 April 2021	38
32.	PITUNG THE MASTER	MNCN	JID2021028175/ IDM000967794	22 April 2021	41
33.	PITUNG THE MASTER	MNCN	JID2021028145/ IDM000967808	22 April 2021	38
34.	ORKES MANTEN	MNCN	JID2021028171/ IDM000967797	22 April 2021	41
35.	ORKES MANTEN	MNCN	JID2021028139/ IDM000967811	22 April 2021	38
36.	RONALDOWATI	MNCN	JID2021028162/ IDM000967800	22 April 2021	38
37.	RIANG JENAKA	MNCN	JID2021028153/ IDM000967806	22 April 2021	38
38.	NIKMATNYA SEDEKAH	MNCN	JID2021028128/ IDM000967815	22 April 2021	38
39.	TABIR MIMPI	MNCN	JID2021029808/ IDM000969442	22 April 2021	41
40.	TABIR MIMPI	MNCN	JID2021029765/ IDM000969529	28 April 2021	38
41.	DA'IAH	MNCN	JID2021029742/ IDM000969533	28 April 2021	38
42.	DA'IAH	MNCN	JID2021029781/ IDM000978511	28 April 2021	41
43.	KELUARGA MANJA – DUMA LOVE JUDIKA	MNCN	JID2021034922/ IDM000970575	24 Mei 2021	41
44.	KELUARGA MANJA – DUMA LOVE JUDIKA	MNCN	JID2021034919/ IDM000970576	24 Mei 2021	38
45.	SI BOPAK PEPPY	MNCN	JID2021034876/ IDM000970637	24 Mei 2021	41

No.	Merek	Pemilik Merek	No. Pendaftaran/ No. Permohonan	Tanggal Penerimaan/Perpanjangan	Kelas
46.	SI BOPAK PEPPY	MNCN	JID2021034874/ IDM000970642	24 Mei 2021	38
47.	TEBAR PESONA	MNCN	JID2021032053/ IDM000972217	7 Mei 2021	41
48.	TEBAR PESONA	MNCN	JID2021031956/ IDM000972441	6 Mei 2021	38
49.	TAWA KADABRA	MNCN	JID2021032045/ IDM000972227	7 Mei 2021	41
50.	TAWA KADABRA	MNCN	JID2021031961/ IDM000972432	6 Mei 2021	38
51.	LANGSUNG BEKEN	MNCN	JID2021031972/ IDM000972332	6 Mei 2021	41
52.	LANGSUNG BEKEN	MNCN	JID2021031953/ IDM000972443	6 Mei 2021	38
53.	ALA'MAK	MNCN	JID2021031967/ IDM000972344	6 Mei 2021	41
54.	ALA'MAK	MNCN	JID2021031932/ IDM000978565	6 Mei 2021	38
55.	SERBU KAMPUNG	MNCN	JID2021029750/ IDM000971587	28 April 2021	38
56.	SERBU KAMPUNG	MNCN	JID2021029801/ IDM000976295	28 April 2021	41
57.	LEGENDA SANG PENUNGGU	MNCN	JID2021034885/ IDM000976492	24 Mei 2021	41
58.	LEGENDA SANG PENUNGGU	MNCN	JID2021034880/ IDM000976503	24 Mei 2021	38
59.	SUPERKIDZ	MNCN	JID2021029755/ IDM000976302	28 April 2021	38
60.	TAFSIR	MNCN	JID2021029775/ IDM000978745	28 April 2021	38
61.	MNC TRAVEL	MNCN	IDM000890829/ JID2020003834	22 Januari 2020	42
62.	#THEATERTAWA	MNCN	IDM000892251/ JID2020013640	9 Maret 2020	38
63.	#THEATERTAWA	MNCN	IDM000892252/ JID2020013642	9 Maret 2020	41
64.	ALLCHESTRA	MNCN	IDM000891151/ JID2020005962	3 Februari 2020	38
65.	ALLCHESTRA	MNCN	IDM000891157/ JID2020005965	3 Februari 2020	41
66.	ADA ADA AJA	MNCN	IDM000891160/ JID2020005973	3 Februari 2020	38
67.	ADA ADA AJA	MNCN	IDM000891231/ JID2020006023	3 Februari 2020	41
68.	ASLI KENA JEBAK	MNCN	IDM000891234/ JID2020006036	3 Februari 2020	38
69.	ASLI KENA JEBAK	MNCN	IDM000891235/ JID2020006042	3 Februari 2020	41
70.	DUO PEDANG	MNCN	IDM000891420/ JID2020006811	6 Februari 2020	38
71.	DUO PEDANG	MNCN	IDM000891422/ JID2020006818	6 Februari 2020	41

No.	Merek	Pemilik Merek	No. Pendaftaran/ No. Permohonan	Tanggal Penerimaan/Perpanjangan	Kelas
72.	JEJAK KEBESARANMU NEGERI PARA NABI	MNCN	IDM000891424/ JID2020006833	6 Februari 2020	38
73.	JEJAK KEBESARANMU NEGERI PARA NABI	MNCN	IDM000891430/ JID2020006859	6 Februari 2020	41
74.	DUNIA HAND MADE	MNCN	IDM000891432/ JID2020006865	6 Februari 2020	38
75.	DUNIA HAND MADE	MNCN	IDM000891436/ JID2020006878	6 Februari 2020	41
76.	BE A MAN	MNCN	IDM000891226/ JID2020007105	7 Februari 2020	38
77.	BE A MAN	MNCN	IDM000891227/ JID2020007111	7 Februari 2020	41
78.	ESPORTS STAR INDONESIA	MNCN	IDM000894290/ JID2020027506	8 Juni 2020	38
79.	ESPORTS STAR INDONESIA	MNCN	IDM000894297/ JID2020027510	8 Juni 2020	41
80.	MISS INDONESIA	MNCN	IDM000895615/ JID2020029594	18 Juni 2020	41
81.	ANAK JALANAN	MNCN	IDM000895713/ JID2020032854	30 Juni 2020	38
82.	ANAK JALANAN	MNCN	IDM000895714/ JID2020032857	30 Juni 2020	41
83.	KETIKA CINTA BERTASBIH	MNCN	IDM000895719/ JID2020032881	30 Juni 2020	38
84.	KETIKA CINTA BERTASBIH	MNCN	IDM000895721/ JID2020032897	30 Juni 2020	41
85.	PUTRI YANG DITUKAR	MNCN	IDM000895722/ JID2020032899	30 Juni 2020	38
86.	PUTRI YANG DITUKAR	MNCN	IDM000895724/ JID2020032902	30 Juni 2020	41
87.	ESPORT STAR	MNCN	IDM000896531/ JID2020036813	13 Juli 2020	41
88.	MNCTV+	MNCN	IDM000890201/ JID2020001349	9 Januari 2020	35
89.	MNCTV+	MNCN	IDM000890202/ JID2020001364/	9 Januari 2020	38
90.	MNCTV+	MNCN	IDM000890205/ JID2020001367	9 Januari 2020	41
91.	MNCTV+	MNCN	IDM000890206/ JID2020001369	9 Januari 2020	42
92.	AMBYAR AWARDS	MNCN	IDM000913171/ JID2020047696	24 Agustus 2020	38
93.	AMBYAR AWARDS	MNCN	IDM000913175/ JID2020047700	24 Agustus 2020	41
94.	7 MANUSIA HARIMAU	MNCN	IDM000895704/ JID2020328112	29 Juni 2020	38
95.	7 MANUSIA HARIMAU	MNCN	IDM000895706/ JID2020032814	30 Juni 2020	41
96.	100% CUCOK BANGET	MNCN	IDM000904296/ JID2020039062	21 Juli 2020	38

No.	Merek	Pemilik Merek	No. Pendaftaran/ No. Permohonan	Tanggal Penerimaan/Perpanjangan	Kelas
97.	100% CUCOK BANGET	MNCN	IDM000905293/ JID2020039064	21 Juli 2020	41
98.	1001 MASJID	MNCN	IDM000894008/ JID2020019944	13 April 2020	38
99.	1001 MASJID	MNCN	IDM000894010/ JID2020019947	13 April 2020	41
100.	ASLI USIL	MNCN	IDM000913144/ JID2020047679	24 Agustus 2020	38
101.	ASLI USIL	MNCN	IDM000913147/ JID2020047682	24 Agustus 2020	41
102.	AWAS ADA SULE!!! PRIKITIEW	MNCN	IDM000913154/ JID2020047686	24 Agustus 2020	38
103.	AWAS ADA SULE!!! PRIKITIEW	MNCN	IDM000913163/ JID2020047691	24 Agustus 2020	41
104.	BAPER	MNCN	IDM000904290/ JID2020039045	21 Juli 2020	38
105.	BISA GITU YAK	MNCN	IDM000896518/ JID2020036807	13 Juli 2020	38
106.	BISA GITU YAK	MNCN	IDM000896521/ JID2020036809	13 Juli 2020	41
107.	BUKAN BUKAAN	MNCN	IDM000908445/ JID2020027725	9 Juni 2020	38
108.	BUKAN HOAX	MNCN	IDM000894021/ JID2020019987	13 April 2020	38
109.	BUKAN HOAX	MNCN	IDM000894022/ JID2020019988	13 April 2020	41
110.	CATATAN HATI SEORANG ISTRI	MNCN	IDM000895716/ JID2020032864	20 Juni 2020	38
111.	CATATAN HATI SEORANG ISTRI	MNCN	IDM000895717/ JID2020032866	30 Juni 2020	41
112.	DANGDUT MANIA DADAKAN	MNCN	IDM000909278/ JID2020042299	31 Juli 2020	38
113.	DANGDUT MANIA DADAKAN	MNCN	IDM000909279/ JID2020042300	31 Juli 2020	41
114.	DANGDUT NEVER DIES	MNCN	IDM000896507/ JID2020036789	13 Juli 2020	38
115.	DANGDUT NEVER DIES	MNCN	IDM000896508/ JID2020036790	13 Juli 2020	41
116.	D'GOYANG	MNCN	IDM000909277/ JID2020042298	31 Juli 2020	38
117.	D'GOYANG	MNCN	IDM000909276/ JID2020042297	31 Juli 2020	41
118.	HYPHENING	MNCN	IDM000896536/ JID2020036814	13 Juli 2020	38
119.	HYPHENING	MNCN	IDM000896550/ JID2020036815	13 Juli 2020	41
120.	JANGAN BOBO DULU	MNCN	IDM000896862/ JID2020027731	9 Juni 2020	38
121.	JANGAN BOBO DULU	MNCN	IDM000896864/ JID2020027735	9 Juni 2020	41
122.	JELAJAH RASA	MNCN	IDM000894643/ JID2020020103	14 April 2020	38

No.	Merek	Pemilik Merek	No. Pendaftaran/ No. Permohonan	Tanggal Penerimaan/Perpanjangan	Kelas
123.	JELAJAH RASA	MNCN	IDM000894645/ JID2020020107	14 April 2020	41
124.	KAMPUNG RAMADAN	MNCN	IDM000891241/ JID2020007120	7 Februari 2020	38
125.	KAMPUNG RAMADAN	MNCN	IDM000891243/ JID2020007120	7 Februari 2020	41
126.	KEPOPEDIA	MNCN	IDM000913120/ JID2020047674	24 Agustus 2020	38
127.	KEPOPEDIA	MNCN	IDM000913122/ JID2020047676	24 Agustus 2020	41
128.	KONON KATANYA	MNCN	IDM000893763/ JID2020009711	20 Februari 2020	38
129.	KONON KATANYA	MNCN	IDM000893755/ JID2020009711	20 Februari 2020	41
130.	KONTES DANGDUT INDONESIA	MNCN	IDM000909280/ JID2020042301	31 Juli 2020	38
131.	KONTENS DANGDUT INDONESIA	MNCN	IDM000909282/ JID2020042303	31 Juli 2020	41
132.	KRINGKRING SAHUR	MNCN	IDM000894026/ JID2020020003	13 April 2020	38
133.	KRING KRING SAHUR	MNCN	IDM000894027/ JID2020020006	13 April 2020	41
134.	LUCKY SHOW	MNCN	IDM000904292/ JID2020039052	21 Juli 2020	38
135.	LUCKY SHOW	MNCN	IDM000904294/ JID2020039054	21 Juli 2020	41
136.	MORNING BEIB	MNCN	IDM000893787/ JID2020013261	6 Maret 2020	38
137.	MORNING BEIB	MNCN	IDM000893805/ JID2020013266	6 Maret 2020	41
138.	NGEMEAL	MNCN	IDM000892760/ JID2020016919	24 Maret 2020	38
139.	NGEMEAL	MNCN	IDM000892761/ JID2020016923	24 Maret 2020	41
140.	RINDU SUARA ADZAN	MNCN	IDM000893338/ JID2020013243	6 Maret 2020	41
141.	SANTRI CILIK	MNCN	IDM000893806/ JID2020013271	6 Maret 2020	38
142.	SANTRI CILIK	MNCN	IDM000893809/ JID2020013271	6 Maret 2020	41
143.	SONG HUNTER	MNCN	IDM000891244/ JID2020007125	7 Februari 2020	41
144.	SONG HUNTER	MNCN	IDM000891246/ JID2020007131	7 Februari 2020	38
145.	TAHUKAH KAMU	MNCN	IDM000893815/ JID2020013287	6 Maret 2020	41
146.	TAHUKAH KAMU	MNCN	IDM000893831/ JID2020013296	6 Maret 2020	38
147.	TANTANGAN 60 DETIK	MNCN	IDM000896554/ JID2020036817	13 April 2020	41
148.	TANTANGAN 60 DETIK	MNCN	IDM000896558/ JID2020036819	13 Juli 2020	38

No.	Merek	Pemilik Merek	No. Pendaftaran/ No. Permohonan	Tanggal Penerimaan/Perpanjangan	Kelas
149.	TRAVELASIA	MNCN	IDM000894017/ JID2020019974	13 April 2020	41
150.	TRAVELASIA	MNCN	IDM000894018/ JID2020019975	13 April 2020	38
151.	THE GREAT MAGICIAN	MNCN	IDM000906950/ JID2020032176	26 Juni 2020	41
152.	THE GREAT MAGICIAN	MNCN	IDM000904293/ JID2020032190	26 Juni 2020	38
153.	INDONESIA AWARDS	MNCN	IDM000906962/ JID2020053121	11 September 2020	38
154.	INDONESIA AWARDS	MNCN	IDM000906974/ JID2020053139	11 September 2020	41
155.	INDONESIA MUSIC AWARDS	MNCN	IDM000907054/ JID2020053156	11 September 2020	38
156.	INDONESIA AWARDS CELEBRATION	MNCN	IDM000907062/ JID2020053166	11 September 2020	38
157.	INDONESIA AWARDS CELEBRATION	MNCN	IDM000907106/ JID2020053175	11 September 2020	41
158.	CANDAAN ASYIK	MNCN	IDM000909879/ JID2020055744	22 September 2020	41
159.	KABULKAN DOAKU YA ALLAH	MNCN	IDM000909915/ JID2020055753	22 September 2020	41
160.	RUMAH SELEB	MNCN	IDM000909959/ JID2020055762	22 September 2020	41
161.	SEBENING MATA AIR	MNCN	IDM000909974/ JID2020055767	22 September 2020	41
162.	SELEB ON NEWS	MNCN	IDM000909974/ JID2020055772	22 September 2020	41
163.	MAAFKAN AKU	MNCN	IDM000910182/ JID2020055787	22 September 2020	41
164.	OB	MNCN	IDM000910270/ JID2020055794	22 September 2020	41
165.	LIONTIN	MNCN	IDM000910866/ JID2020055813	22 September 2020	41
166.	ETV MALL LANGSUNG SCAN LANGSUNG BELANJA	MNCN	IDM000915386/ JID2020065081	26 Oktober 2020	9, 38, 41,42
167.	RUMAH SELEB	MNCN	IDM000915569/ JID2020054173	15 September 2020	38
168.	SEBENING MATA AIR	MNCN	IDM000915596/ JID2020054176	15 September 2020	38
169.	LETS PLAY	MNCN	IDM000915561/ JID2020054160	15 September 2020	38
170.	SELEB ON NEWS	MNCN	IDM000915606/ JID2020054186	15 September 2020	38
171.	CANDAAN ASYIK	MNCN	IDM000915480/ JID2020054112	15 September 2020	38
172.	GOYANG IN	MNCN	IDM000915493/ JID2020054123	15 September 2020	38
173.	KABULKANLAH DOAKU	MNCN	IDM000915522/ JID2020054143	15 September 2020	38

No.	Merek	Pemilik Merek	No. Pendaftaran/ No. Permohonan	Tanggal Penerimaan/Perpanjangan	Kelas
	YA ALLAH				
174.	SERGAP	MNCN	IDM000917703/ JID2020054205	15 September 2020	38
175.	OB	MNCN	IDM000917696/ JID2020054198	15 September 2020	38
176.	MAAFKAN AKU	MNCN	IDM000917623/ JID2020054196	15 September 2020	38
177.	SIRAMAN QOLBU	MNCN	IDM000917612/ JID2020054191	15 September 2020	38
178.	ETV MALL	MNCN	IDM000917725/ DID2020063336	20 Oktober 2020	9, 38, 41, 42
179.	LANGSUNG SCAN LANGSUNG BELANJA	MNCN	IDM000917730/ DID2020063341	20 Oktober 2020	9, 38, 41, 42
180.	ARISAN DANGDUT	MNCN	IDM000938530/ JID2020081665	18 Desember 2020	38
181.	E M SHOP + LOGO	MNCN	IDM000940575/ JID2021004648	21 Januari 2021	38
182.	M SHOP HOMESHOPPING TERPERCAYA	MNCN	IDM000939820/ JID2021004576	21 Januari 2021	9
183.	M SHOP HOMESHOPPING TERPERCAYA	MNCN	IDM000939903/ JID2021004599	21 Januari 2021	35
184.	M SHOP HOMESHOPPING TERPERCAYA	MNCN	IDM000939906/ JID2021004602	21 Januari 2021	38
185.	RCTI ADS	MNCN	IDM000940864/ JID2020067364	4 November 2020	9, 35
186.	LIONTIN	MNCN	IDM000910866/ JID2020055813	22 September 2020	41
187.	AUDISI PELAWAK INDONESIA	MNCN	IDM000941285/ JID2020081659	18 Desember 2020	38
188.	REPUBLIK DANGDUT	MNCN	IDM000943687/ JID2020081730	18 Desember 2020	41
189.	3 KEMBANG CARI KUMBANG	MNCN	IDM000943688/ JID2020081731	18 Desember 2020	41
190.	AUDISI BAND GELO	MNCN	IDM000943692/ JID2020081751	18 Desember 2020	41
191.	CURHAT ON AIR	MNCN	IDM000943684/ JID2020081722	18 Desember 2020	38
192.	E MSHOP THE BEST ONLINE SPECIALITY STORE	MNCN	IDM000942862/ JID2021004641	21 Januari 2021	35
193.	E MSHOP THE BEST ONLINE SPECIALITY STORE	MNCN	IDM000943527/ JID2020004655	21 Januari 2021	42
194.	ARISAN DANGDUT	MNCN	IDM000943691/ JID2020081746	18 Desember 2020	41
195.	API AUDISI PELAWAK INDONESIA	MNCN	IDM000943690/ JID2020081743	18 Desember 2020	41
196.	REPUBLIK DANGDUT	MNCN	IDM000944177/ JID2020081549	18 Desember 2020	38

No.	Merek	Pemilik Merek	No. Pendaftaran/ No. Permohonan	Tanggal Penerimaan/Perpanjangan	Kelas
197.	CURHAT ON AIR	MNCN	IDM000944054/ JID2020081772	18 Desember 2020	41
198.	AKU & BINTANG	MNCN	IDM000944049/ JID2020081737	18 Desember 2020	41
199.	FUNTASTIK	MNCN	IDM000945008/ JID2020059020	2 Oktober 2020	38
200.	FUNTASTIK	MNCN	IDM000945007/ JID2020059013	2 Oktober 2020	41
201.	AUDISI BAND GELO	MNCN	IDM000947083/ JID2020081672	18 Desember 2020	38
202.	KISAH VIRAL	MNCN	IDM000947675/ JID2021004435	21 Januari 2021	41
203.	E MSHOP THE BEST ONLINE SPECIALITY STORE	MNCN	IDM000947982/ DID2021004637	21 Januari 2021	9
204.	SIRAMAN QOLBU	MNCN	IDM000944829/ JID2020055781	22 September 2020	41
205.	GOYANG IN	MNCN	IDM000945159/ JID2020055747	22 September 2020	41
206.	SERGAP	MNCN	IDM000944830/ JID2020055804	22 September 2022	41
207.	3 KEMBANG CARI KUMBANG	MNCN	IDM000948213/ JID2020081577	18 Desember 2020	38
208.	MSHOP HOMESHOPPING TERPERCAYA	MNCN	IDM000948575/ JID2021004604	21 Januari 2021	39
209.	MSHOP HOMESHOPPING TERPERCAYA	MNCN	IDM000948578/ JID2021004607	21 Januari 2021	42
210.	LET'S PLAY	MNCN	IDM000949189/ JID2020055757	22 September 2022	41
211.	MNC AWARDS	MNCN	IDM000497303/ J002013012028	18 Maret 2013 (Telah diperpanjang hingga 18 Maret 2033)	41
212.	MNC AWARDS	MNCN	IDM000497302/ J002013012025	18 Maret 2013 (Telah diperpanjang hingga 18 Maret 2033)	38
213.	PATINO + LUKISAN ANAK LAKI-LAKI	MNCN	IDM000643628/ D002016009594	1 Maret 2016	28
214.	JAKARTA CONCERT HALL	MNCN	IDM000586963/ J002014059624	23 Desember 2014	43
215.	LOLA + LUKISAN ANAK WANITA	MNCN	IDM000643644/ D002016009613	1 Maret 2016	28
216.	PATINO + LUKISAN ANAK LAKI-LAKI	MNCN	IDM000643642/ D002016009608	1 Maret 2016	24
217.	TINGTING + LUKISAN ANAK LAKI-LAKI	MNCN	IDM000643651/ D002016009606	1 Maret 2016	24
218.	Tafsir	MNCN	IDM000990261/ JID2021029810	28 April 2021	41
219.	Rising Star Indonesia Dangdut	MNCN	JID2021022488/ IDM001002978	1 April 2021	38
220.	Rising Star Indonesia Dangdut	MNCN	JID2021022481/ IDM001002979	1 April 2021	41

No.	Merek	Pemilik Merek	No. Pendaftaran/ No. Permohonan	Tanggal Penerimaan/Perpanjangan	Kelas
221.	Sing Like Mama	MNCN	JID2021066054/ IDM000998106	1 April 2021	41
222.	Duo Komedian	MNCN	JID2021066046/ IDM000998109	1 Oktober 2021	41
223.	Video Content Creator Awards 2021	MNCN	JID2021076839/ IDM001007460	8 November 2021	41
224.	Video Content Creator Awards 2021	MNCN	JID2021076785/ IDM001007611	8 November 2021	38
225.	Razia	MNCN	JID2021076778/ IDM001007636	8 November 2021	38
226.	Razia	MNCN	JID2021076832/ IDM001022099	8 November 2021	41
227.	Makan Kuy	MNCN	JID2021076794/ IDM001007605	8 November 2021	41
228.	Makan Kuy	MNCN	JID2021076750/ IDM000999495	8 November 2021	38
229.	Obsesi Awards	MNCN	JID2021076770/ IDM001007656	8 November 2021	38
230.	Amazing Concert	MNCN	JID2021066035/ IDM000998114	1 Oktober 2021	41
231.	Amazing Magician	MNCN	JID2021066038/ IDM000998113	1 Oktober 2021	41
232.	Bumbu Cinta	MNCN	JID2021076747/ IDM000999516	8 November 2021	38
233.	Aku Ingin Pulang	MNCN	JID2021076682/ IDM001007702	8 November 2021	41
234.	Mitologi	MNCN	JID2021066051/ IDM001004892	1 Oktober 2021	41
235.	Esports Star Indonesia	MNCN	DID2021080329/ IDM001005958	18 November 2021	9
236.	Esports Star Indonesia	MNCN	DID2021080333/ IDM001005955	18 November 2021	16
237.	Esports Star Indonesia	MNCN	DID2021080334 /IDM001005954	18 November 2021	18
238.	Esports Star Indonesia	MNCN	DID2021080499/ IDM001007327	19 November 2021	21
239.	Esports Star Indonesia	MNCN	DID2021080507/ IDM001007320	19 November 2021	24
240.	Esports Star Indonesia	MNCN	DID2021080656/ IDM001009004	19 November 2021	25
241.	Esports Star Indonesia	MNCN	DID2021080453/ IDM001012487	19 November 2021	20
242.	Esports Star Indonesia	MNCN	DID2021080705/ IDM001011993	19 November 2021	28
243.	Karena Cinta	MNCN	JID2021094848/ IDM001012528	30 Desember 2021	38
244.	Karena Cinta	MNCN	JID2021094932/ IDM001044486	30 Desember 2021	41
245.	Di Sini Ada Cinta	MNCN	JID2021094836/ IDM001012529	30 Desember 2021	38

No.	Merek	Pemilik Merek	No. Pendaftaran/ No. Permohonan	Tanggal Penerimaan/Perpanjangan	Kelas
246.	Di Sini Ada Cinta	MNCN	JID2021094857/ IDM001012151	30 Desember 2021	41
247.	Indonesian Music Awards	MNCN	JID2021085469/ IDM001021185	6 Desember 2021	38
248.	Lord Kraken	MNCN	DID2022002713/ IDM001028805	12 Januari 2022	18, 21, 25, 28, 38, 41
249.	Red Tigers	MNCN	DID2022002715/ IDM001028797	12 Januari 2022	18, 21, 25, 28, 38, 41
250.	Alpha Dragon	MNCN	DID2022002680/ IDM001029326	12 Januari 2022	18, 21, 25, 28, 38, 41
251.	Blue Rhinos	MNCN	DID2022002695/ IDM001029281	12 Januari 2022	18, 21, 25, 28, 38, 41
252.	Dark Phoenix	MNCN	DID2022002704/ IDM001029207	12 Januari 2022	18, 21, 25, 28, 38, 41
253.	Iron Pegasus	MNCN	DID2022002706/ IDM001029187	12 Januari 2022	18, 21, 25, 28, 38, 41
254.	MNC Digital	MNCN	JID2022007764/ IDM001030820	29 Januari 2022	38
255.	MNC Digital	MNCN	DID2022007759/ IDM001030822	29 Januari 2022	9
256.	MNC Digital	MNCN	JID2022007765/ IDM001030816	29 Januari 2022	41
257.	MNC Digital	MNCN	JID2022007781/ IDM001032710	29 Januari 2022	42
258.	MNC Digital	MNCN	JID2022007777/ IDM001042509	29 Januari 2022	35
259.	Shark Raiders	MNCN	DID2022022339/ IDM001040964	25 Maret 2022	18, 21, 25, 28, 38, 41
260.	Rhino Warriors	MNCN	DID2022022334/ IDM001040968	25 Maret 2022	18, 21, 25, 28, 38, 41
261.	Eagle Forces	MNCN	DID2022022325/ IDM001041022	25 Maret 2022	18, 21, 25, 28, 38, 41
262.	Indonesia Comedy Awards	MNCN	JID2022018618/ IDM001042289	11 Maret 2022	38
263.	Indonesia Comedy Awards	MNCN	JID2022018621/ IDM001042287	11 Maret 2022	41
264.	Baper	MNCN	JID2020039048/ IDM001049080	21 Juli 2020	41
265.	Syair Ramadan	MNCN	JID2022022346/ IDM001049273	25 Maret 2022	38
266.	Syair Ramadan	MNCN	JID2022022348/ IDM001049271	25 Maret 2022	41
267.	Lola Bakery	MNCN	DID2022040976/ IDM001053709	14 Juni 2022	9
268.	Tanda Tandanya	MNCN	JID2022031678/ IDM001049014	28 April 2022	38

No.	Merek	Pemilik Merek	No. Pendaftaran/ No. Permohonan	Tanggal Penerimaan/Perpanjangan	Kelas
269.	Aku Ingin Pulang	MNCN	JID2021076675/ IDM001018971	8 November 2021	38
270.	Sing Like Mama	MNCN	JID2021066027/ IDM001018594	1 Oktober 2021	38
271.	Mitologi	MNCN	JID2021066023/ IDM001024637	1 Oktober 2021	38
272.	Duo Komedian	MNCN	JID2021066016/ IDM001004898	1 Oktober 2021	38
273.	Amazing Magician	MNCN	JID2021066011/ IDM001025747	1 Oktober 2021	38
274.	Amazing Concert	MNCN	JID2021066008/ IDM001024671	1 Oktober 2021	38
275.	Anak Jalanan Reborn	MNCN	JID2021080078/ IDM001006337	18 November 2021	41
276.	Anak Jalanan Reborn	MNCN	JID2021080040/ IDM001006338	18 November 2021	38
277.	Anak Jalanan Reborn	MNCN	JID2021080032/ IDM001006339	18 November 2021	35
278.	Anak Jalanan Reborn	MNCN	DID2021080026/ IDM001006340	18 November 2021	9
279.	Anak Jalanan Reborn	MNCN	JID2021080338/ IDM001006336	18 November 2021	42
280.	ZANNA	MNCN	IDM001104403/ JID2022089174	7 November 2022	41
281.	ZANNA	MNCN	IDM001104404/ JID2022089173	7 November 2022	38
282.	ZANNA	MNCN	IDM001104416/ DID2022089171	7 November 2022	28
283.	ZANNA	MNCN	IDM001104417/ DID2022089169	7 November 2022	25
284.	ZANNA	MNCN	IDM001104420/ DID2022089165	7 November 2022	24
285.	ZANNA	MNCN	IDM001105324/ DID2022089163	7 November 2022	21
286.	ZANNA	MNCN	IDM001105330/ DID2022089154	7 November 2022	18
287.	ZANNA	MNCN	IDM001105363/ DID2022089143	7 November 2022	16
288.	ZANNA	MNCN	IDM001105367/ DID2022089136	7 November 2022	9
289.	INDONESIAN ESPORTS AWARDS	MNCN	IDM001119387/ JID2022101739	9 Desember 2022	41
290.	INDONESIAN ESPORTS AWARDS	MNCN	IDM001119390/ JID2022101729	9 Desember 2022	38
291.	MNC ANIMATION	MNCN	IDM001126390/ JID2023006655	24 Januari 2023	42
292.	MNC ANIMATION	MNCN	IDM001126389/ JID2023006653	24 Januari 2023	41
293.	MNC ANIMATION	MNCN	IDM001126388/ JID2023006652	24 Januari 2023	38
294.	MNC ANIMATION	MNCN	IDM001126387/ JID2023006648	24 Januari 2023	35

No.	Merek	Pemilik Merek	No. Pendaftaran/ No. Permohonan	Tanggal Penerimaan/Perpanjangan	Kelas
295.	MNC ANIMATION	MNCN	IDM001126385/ DID2023006645	24 Januari 2023	9
296.	MNC ANIMATION + LUKISAN	MNCN	IDM001126384/ JID2023006638	24 Januari 2023	42
297.	MNC ANIMATION + LUKISAN	MNCN	IDM001126383/ JID2023006633	24 Januari 2023	41
298.	MNC ANIMATION + LUKISAN	MNCN	IDM001126386/ JID2023006619	24 Januari 2023	38
299.	MNC ANIMATION + LUKISAN	MNCN	IDM001126366/ JID2023006609	24 Januari 2023	35
300.	MNC ANIMATION + LUKISAN	MNCN	IDM001126363/ DID2023006590	24 Januari 2023	9
301.	MNC E-COMMERCE	MNCN	IDM001129246/ JID2023005808	20 Januari 2023	35
302.	MNC LICENSING	MNCN	IDM001130111/ JID2023009393	2 Februari 2023	41
303.	MNC LICENSING	MNCN	IDM001130112/ JID2023009392	2 Februari 2023	35
304.	MNC LICENSING	MNCN	IDM001130122/ DID2023009383	2 Februari 2023	9
305.	MNC LICENSING	MNCN	IDM001130120/ JID2023009388	2 Februari 2023	38
306.	MNC LICENSING	MNCN	IDM001133274/ JID2023009397	2 Februari 2023	42
307.	PRIMADONA PANTURA	MNCN	IDM001130766/ JID2023009283	2 Februari 2023	38
308.	PRIMADONA PANTURA	MNCN	IDM001130759/ JID2023009286	2 Februari 2023	41
309.	MNC DIGITAL MARKETING & ANALYTICS	MNCN	IDM001141033/ JID2023018862	3 Maret 2023	35
310.	MNC DIGITAL MARKETING & ANALYTICS	MNCN	IDM001141034/ JID2023018861	3 Maret 2023	35
311.	INDONESIA MUSIC AWARDS	MNCN	IDM001171894/ JID2023037823	12 Mei 2023	41
312.	KIKO	MNCN	IDM001193632/ DID2023069634	18 Agustus 2023	9
313.	KARKUS	MNCN	IDM001198701	21 Agustus 2023	29
314.	Ting Ting	MNCN	IDM001198699/ DID2023070771	22 Agustus 2023	29
315.	PATINO	MNCN	IDM001198698/ DID2023070772	22 Agustus 2023	29
316.	POLI	MNCN	IDM001198697/ DID2023070774	22 Agustus 2023	29
317.	BUBA	MNCN	IDM001198695/ DID2023070779	22 Agustsu 2023	29
318.	PUPUS	MNCN	IDM001198692/ DID2023070782	22 Agustus 2023	29
319.	LMAC	MNCN	IDM001218601/ JID2023092326	22 Agustus 2023	42

No.	Merek	Pemilik Merek	No. Pendaftaran/ No. Permohonan	Tanggal Penerimaan/Perpanjangan	Kelas
320.	LMAC	MNCN	IDM001208154/ JID2023088779	2 OKtober 2023	41
321.	LMAC	MNCN	IDM001208171/ JID2023088765	2 Oktober 2023	38
322.	LMAC	MNCN	IDM001208187/ JID2023088755	2 Oktober 2023	35
323.	TUKANG MAKAN	MNCN	IDM001237145/ JID2023117972	13 Desember 2023	38
324.	TUKANG MAKAN	MNCN	IDM001237142/ JID2023117974	13 Desember 2023	41
325.	Amazing Kids Favorite Awards	MNCN	IDM001237140/ JID2023117976	13 Desember 2023	38
326.	Amazing Kids Favorite Awards	MNCN	IDM001237135/ JID2023117986	13 Desember 2023	41
327.	Indonesia Trending Awards	MNCN	IDM001237052/ JID2023117991	13 Desember 2023	41
328.	Indonesia Trending Awards	MNCN	IDM001292759/ JID2023117990	13 Desember 2023	38
329.	i love indonesia	MNCN	IDM001237051/ JID2023117994	13 Desember 2023	38
330.	MNC MUSIC	MNCN	IDM001235068/ JID2023121571	21 Desember 2023	41
331.	Tukang Bubur Pengen Naik Haji	MNCN	IDM001240497/ DID2023123932	28 Desember 2023	9
332.	LMAC Concert	MNCN	IDM001240821/ JID2023123188	27 Desember 2023	35
333.	LMAC Run	MNCN	IDM001240828/ JID2023123178	27 Desember 2023	35
334.	LAMC Concert	MNCN	IDM001240817/ JID2023123194	27 Desember 2023	38
335.	LMAC Run	MNCN	IDM001240826/ JID2023123182	27 Desember 2023	38
336.	LMAC Concert	MNCN	IDM001240813/ JID2023123202	27 Desember 2023	41
337.	LMAC Concert	MNCN	IDM001240657/ JID2023123213	27 Desember 2023	42
338.	LMAC Concert	MNCN	IDM001240818/ JID2023123192	27 Desember 2023	41
339.	LMAC Concert	MNCN	IDM001240651/ JID2023123219	27 Desember 2023	35
340.	LMAC Run	MNCN	IDM001240814/ JID2023123201	27 Desember 2023	42
341.	Tukang Bubur Pengen Naik Haji	MNCN	IDM001240470/ JID2023123941	28 Desember 2023	35
342.	LMAC Concert	MNCN	IDM001240643/ JID2023123229	27 Desember 2023	38
343.	LMAC Run	MNCN	IDM001240811/ JID2023123205	27 Desember 2023	35
344.	LMAC Concert	MNCN	IDM001240641/ JID2023123231	27 Desember 2023	41
345.	LMAC Run	MNCN	IDM001240807/ JID2023123211	27 Desember 2023	38

No.	Merek	Pemilik Merek	No. Pendaftaran/ No. Permohonan	Tanggal Penerimaan/Perpanjangan	Kelas
346.	LMAC Concert	MNCN	IDM001240638/ JID2023123239	27 Desember 2023	42
347.	LMAC Run	MNCN	IDM001240650/ JID2023123220	27 Desember 2023	41
348.	LMAC Run	MNCN	IDM001240644/ JID2023123228	27 Desember 2023	42
349.	Tukang Bubur Pengen Naik Haji	MNCN	IDM001240500/ JID2023123928	27 Desember 2023	38
350.	Tukang Bubur Pengen Naik Haji	MNCN	IDM001240502/ JID2023123926	27 Desember 2023	42
351.	Tukang Bubur Pengen Naik Haji	MNCN	IDM001240505/ JID2023123923	27 Desember 2023	41
352.	CFD	MNCN	IDM001274692/ JID2024015673	21 Februari 2024	38
353.	CFD	MNCN	IDM001246776/ JID2024015676	21 Februari 2024	41
354.	Traktir Boss	MNCN	IDM001246773/ JID2024015680	21 Februari 2024	41
355.	Traktir Boss	MNCN	IDM001246774/ JID2024015678	21 Februari 2024	38
356.	OKEZONE TV	MNCN	IDM001260881/ JID2024020230	4 Maret 2024	38
357.	OKEZONE TV	MNCN	IDM001247403/ JID2024020368	4 Maret 2024	41
358.	Inews Premium Sports	MNCN	IDM001275707/ JID2024034156	24 April 2024	41
359.	RCTI Premium Sports	MNCN	IDM001272127/ JID2024034577	25 April 2024	38
360.	RCTI Premiun Sports	MNCN	IDM001272192/ JID2024034572	25 April 2024	41
361.	RCTI Premium Sports + Lukisan	MNCN	IDM001267951/ JID2024038361	7 Mei 2024	38
362.	RCTI Premium Sports + Lukisan	MNCN	IDM001267946/ JID2024038378	7 Mei 2024	41
363.	MNCTV Premium Sports	MNCN	IDM001269002/ JID2024035667	29 April 2024	38
364.	MNCTV Premium Sports	MNCN	IDM001272389/ JID2024034570	25 April 2024	41
365.	Perang Dapur	MNCN	IDM001283574/ JID2024056324	26 Juni 2024	41
366.	Perang Dapur	MNCN	IDM001283577/ JID2024056329	26 Juni 2024	38
367.	Amazing Dance Indonesia	MNCN	IDM001279715/ JID2024061642	9 Juli 2024	38
368.	Amazing Dance Indonesia	MNCN	IDM001277400/ JID2024061640	9 Juli 2024	41
369.	ENT ENTERTAIMENT	MNCN	IDM001279703/ JID2024061757	9 Juli 2024	38
370.	OK TV	MNCN	IDM001279702/ JID2024061750	9 Juli 2024	38
371.	OK TV	MNCN	IDM001279701/ JID2024061748	9 Juli 2024	41

No.	Merek	Pemilik Merek	No. Pendaftaran/ No. Permohonan	Tanggal Penerimaan/Perpanjangan	Kelas
372.	SINDONEWS TV	MNCN	IDM001279671/ JID2024061747	9 Juli 2024	38
373.	SOCCER CHANNEL	MNCN	IDM001279669/ JID2024061754	9 Juli 2024	38
374.	VISION PRIME	MNCN	IDM001279626/ JID2024061842	9 Juli 2024	41

Keterangan:

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, seluruh Pendaftaran merek yang sudah terdaftar mendapatkan perlindungan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal didaftarkan.

6. PENGHARGAAN

Penghargaan yang pernah diterima Perseroan beserta Entitas Anak dalam kurun waktu 2 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

No	Penghargaan Tahun 2024	Tanggal	Penyelenggara	Kategori
MNCN				
1	Indeks Integritas Bisnis Lestari 2024	10 Desember 2024	TEMPO – Data Science	Kontribusi dalam penerapan Environment, Social and Governance (ESG)
RCTI				
1	Anugerah Syiar Ramadan 2024	8 Mei 2024	Komisi Penyiaran Indonesia, Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama	Program Ajang Bakat "Hafiz Indonesia 2024"
2	Anugerah Penyiaran Ramah Anak 2024	25 Juli 2024	Komisi Penyiaran Indonesia	Program Anak Terfavorit 2024 "Hafiz Indonesia"
MNCTV				
1	Anugerah Syiar Ramadan 2024	8 Mei 2024	Komisi Penyiaran Indonesia, Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama	Program Animasi Asing "Upin & Ipin"
2	Anugerah Kementerian Perhubungan RI	29 Mei 2024	Kementerian Perhubungan RI	Kategori Media TV Straight News "Antisipasi Kecelakaan Mudik Balik"
3	Lomba Karya Jurnalistik Jasa Marga dalam Berita 2024	10 Juni 2024	PT Jasa Marga	Ayu Pratiwi, Jurnalis MNCTV sebagai Juara 2 untuk kategori feature news televisi dengan judul karya jurnalistik "Jasa Marga Luncurkan Fitur Baru Travoy Journey".
4	Lomba Karya Jurnalistik Jasa Marga dalam Berita 2024	10 Juni 2024	PT Jasa Marga	Maro Geordano Pakpahan, Jurnalis MNCTV sebagai Juara 3 kategori hard news televisi, dengan judul "1,86 Juta Kendaraan Diprediski Padati Arus Mudik, Jasa Marga Matangkan Pelayanan".
5	KSAU Awards 2024	10 Juli 2024	TNI Angkatan Udara RI	Maro Pakpahan, Jurnalis MNCTV sebagai Juara 3 untuk kategori Feature Televisi
6	Anugerah Penyiaran Ramah Anak 2024	25 Juli 2024	Komisi Penyiaran Indonesia	Program Animasi Asing "Upin & Ipin Season 18 Eps 7 - 9"
GTV				
1	Anugerah Penyiaran Ramah Anak 2024	25 Juli 2024	Komisi Penyiaran Indonesia	Program Pendidikan Anak "Dunia Hand Made"
INEWS				

No	Penghargaan Tahun 2024	Tanggal	Penyelenggara	Kategori
1	Anugerah Penyiaran Tahun 2024 KPID Jawa Timur	12 November 2024	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur	Program Siaran Lokal Terbaik Kategori Televisi: iNews Surabaya (iBreak Edisi Bondowoso Ijen Geopark & Republik Kopi)
2	Anugerah KPID Jawa Tengah 2024	25 November 2024	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah	Juara 3 untuk Program Talshow Televisi Terbaik: “Dialog Khusus Eps. Dukungan Pemda Dalam Pencepatan Penurunan Stunting melalui PAUD Holistik Integratif"
3	KPID Award Sulsel 2024	12 Desember 2024	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan	Program Berita Terbaik: iNews Makassar
MNC PICTURES				
1	Silet Award	13 Mei 2024	RCTI	• Pemenang Sinetron Tersilet: Aku Mencintaimu Karena Allah • Pemenang Aktris Sinetron Tersilet: Lesti Kejora - Aku Mencintaimu Karena Allah • Pemenang Aktor Sinetron Tersilet: Rizky Billar - Aku Mencintaimu Karena Allah • Pemenang Pasangan Sinetron Tersilet: Arsy - Raja - Aku Mencintaimu Karena Allah
2	Indonesia Television Award	10 Juni 2024	RCTI	Pemenang Program Prime Time Drama Terpopuler: Aku Mencintaimu Karena Allah
3	Seoul Drama Awards	25 September 2024	Seoul Drama Awards Organizing Committee, Korean Broadcasters Association	Winner of Outstanding Asian Star - Indonesia: Ochi Rosdiana
4	Asian Academy Creative Awards	26 September 2024	Asian Academy of Creative Arts	National Winners of Best Comedy Programme: Tukang Bubur Pengen Naik Haji
5	Indonesian Movie Actors Awards	15 Oktober 2024	RCTI	• Pemenang Pemeran Utama Pria Terbaik: Bio One - Srimulat Hidup Memang Komedi • Pemenang Ansambel Terbaik: Srimulat - Hidup Memang Komedi • Nominasi Film Terfavorit: Srimulat - Hidup Memang Komedi • Nominasi Pemeran Pendukung Terfavorit: Elang El Gibran - Srimulat - Hidup Memang Komedi
6	Festival Film Bandung	9 November 2024	Forum Film Bandung	• Nominasi Pemeran Wanita Terpuji Serial Televisi: Lesti Kejora - Aku Mencintaimu Karena Allah • Nominasi Pemeran Wanita Terpuji Serial Televisi: Angela Gilsha - Cinta Berakhir Bahagia • Nominasi Pemeran Pria Terpuji Serial Televisi: Omara Esteghlal - Mengejar Maghrib

No	Penghargaan Tahun 2024	Tanggal	Penyelenggara	Kategori
				• Nominasi Pemeran Pria Terpuji Serial Televisi: Naufal Samudra - Seindah Cinta Mutiara
7	Festival Fim Wartawan Indonesia 2024	16 November 2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Direktorat Perfilman, Musik, dan Media, Ditjen Kebudayaan.	• Nominasi Film Terbaik Genre Komedi: Srimulat Hidup Memang Komedi • Nominasi Sutradara Terbaik Genre Komedi: Fajar Nugros – Srimulat Hidup Memang Komedi • Nominasi Aktor Utama Terbaik: Bio One – Srimulat Hidup Memang Komedi • Nominasi Aktor Pendukung Terbaik Genre Komedi: Teuku Rifky Wikana – Srimulat Hidup Memang Komedia • Nominasi Aktor Pendukung Terbaik Genre Komedi: Erick Estrada – Srimulat Hidup Memang Komedi • Nominasi Aktris Pendukung Terbaik Genre Komedi: Zulfa Maharani – Srimulat Hidup Memang Komedi
8	Asian Television Awards	29-30 November 2024	Contineo Media	Nominasi Best Comedy Programme: Tkang Bubur Pengen Naik Haji
9	Indonesian Trending Awards	4 Desember 2024	GTV	Winner of 'Movie of The Year'
STAR MEDIA NUSANTARA				
1	Spotify	10 Mei 2024	Spotify	Spotify Radar dan terpampang di Time Square, New York: Salma Salsabil
2	SCTV Music Awards 2024	14 Mei 2024	SCTV	Penyanyi Solo Pria Paling Ngetop: Ronny Parulian
3	SCTV Music Awards 2024	14 Mei 2024	SCTV	Penyanyi Pendatang Baru Paling Ngetop: Nabila Taqiyyah
4	SCTV Music Awards 2024	14 Mei 2024	SCTV	Kolaborasi Paling Ngetop: Lyodra & Afgan – Ada
5	SCTV Music Awards 2024	14 Mei 2024	SCTV	Penyanyi Solo Wanita Paling Ngetop: Lyodra
6	SCTV Music Awards 2024	14 Mei 2024	SCTV	Video
7	SCTV Music Awards 2024	14 Mei 2024	SCTV	Lagu Pop Paling Ngetop: Lyodra – Tak Dianggap Ciptaan Mario G Klau
8	SCTV Music Awards 2024	14 Mei 2024	SCTV	Artis Sportify Equal dan Terpampang di Time Square, New York: Nabila Taqiyyah
9	SCTV Music Awards 2024	14 Mei 2024	SCTV	Selebritis Wanita Terobsesi: Lyodra
10	Vision+ Awards 2024	31 Mei 2024	Vision+	Crolatte "Theme Song Paling Kelas": Nuca
11	The Alpha Under 40 2024	14 November 2024	HIGHEND Magazine	"The Alpha Under 40" Creating Next Generation HIGHEND Magazine 2024: Mahalini Raharja
12	Indonesia Music Award 2024	25 November 2024	Nuon Digital Indonesia, Langit Musik dan RCTI	Breakthrough Artist of The Year Female Artist of The Year: Salma Salsabil

No	Penghargaan Tahun 2024	Tanggal	Penyelenggara	Kategori
13	Indonesia Music Award 2024	25 November 2024	Nuon Digital Indonesia, Langit Musik dan RCTI	Song of The Year "KUPU KUPU": Tiara Andini
14	Asian Television Awards 2024	1 Desember 2024	Asian Television Awards dan SCM	Most Popular Solo Female Performer di Asian Television Awards 2024: Salma Salsabil
15	Asian Television Awards 2024	1 Desember 2024	Asian Television Awards dan SCM	Hottest Trending Rookie di Penghargaan Asian Television Awards 2024: Anggis Devaki
16	Youtube Music Academy 2024	4 Desember 2024	Youtube	"Pop Music Video of The Year – Jiwa Yang Bersedih: Tiara Andini
17	Youtube Music Academy 2024	4 Desember 2024	Youtube	"Pop Artist of The Year – Youtube Music Academy 2024: Ghea Indrawari
18	Anugerah Musik Indonesia Awards 2024	4 Desember 2024	Yayasan Anugerah Musik Indonesia	Karya Produksi Kolaborasi Terbaik: Tiara Andini – Masih Hatiku
19	Anugerah Musik Indonesia Awards 2024	4 Desember 2024	Yayasan Anugerah Musik Indonesia	Karya Produksi Original Soundtrack Terbaik: Lyodra – Tak Selalu Memiliki OST. Ipar Adalah Maut
20	Anugerah Musik Indonesia Awards 2024	4 Desember 2024	Yayasan Anugerah Musik Indonesia	Karya Produksi Re-Aransemen Terbaik: Andi Rianto & Rony Parulian – Sepenuh Hati
21	Anugerah Musik Indonesia Awards 2024	4 Desember 2024	Yayasan Anugerah Musik Indonesia	Artist Solo Wanita Pop Terbaik: Salma Salsabil
22	Anugerah Musik Indonesia Awards 2024	4 Desember 2024	Yayasan Anugerah Musik Indonesia	Karya Produksi Terbaik Terbaik: Salma Salsabil
23	Spotify Wrapped 2024	5 Desember 2024	Spotify	Pendatang Baru Terbaik Terbaik: Nyoman Paul
24	Spotify Wrapped 2024	5 Desember 2024	Spotify	Posisi 5 sebagai Indonesia to RADAR Artist o 2024: Gery Gany
25	Spotify Wrapped 2024	5 Desember 2024	Spotify	Peringkat #3 Indonesia Top RADAR Artist of 2024: Nyoman Paul
26	Spotify Wrapped 2024	5 Desember 2024	Spotify	Peringkat #4 Indonesia Top RADAR Artist of 2024: Anggis Devaki
27	Spotify Wrapped 2024	5 Desember 2024	Spotify	Indonesia Top Female Artist of 2024: Tiara Andini
28	Spotify Wrapped 2024	5 Desember 2024	Spotify	Indonesia Top Artist 2024: Tiara Andini
29	Spotify Wrapped 2024	5 Desember 2024	Spotify	Peringkat #3 Indonesia Top RADAR Artist of 2024: Nyoman Paul
30	Spotify Wrapped 2024	5 Desember 2024	Spotify	Peringkat #3 Indonesia Top Song of 2024: Lyodra – Pesan Terakhir
31	Spotify Wrapped 2024	5 Desember 2024	Spotify	Peringkat #5 Indonesia Top Song of 2024: Lyodra – Tak Dianggap
32	Spotify Wrapped 2024	5 Desember 2024	Spotify	Peringkat #3 Indonesia Top Female Artist of 2024: Mahalini Raharja
33	Spotify Wrapped 2024	5 Desember 2024	Spotify	Peringkat #3 Indonesia Top Album 2024: Album Mahalini Fabula - Mahalini Raharja
34	Spotify Wrapped 2024	5 Desember 2024	Spotify	Peringkat #5 Indonesia Top Artist 2024: Mahalini Raharja
35	Spotify Wrapped 2024	5 Desember 2024	Spotify	Peringkat #1 Indonesia Top RADAR Artist of 2024: Salma Salsabil

No	Penghargaan Tahun 2023	Tanggal	Penyelenggara	Kategori
MNCN				
1	PPKM Awards 2023	8 Mei 2023	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Penghargaan atas kontribusi terhadap penanganan COVID-19 di Indonesia untuk kategori Swasta Dalam Negeri
2	Malam Apresiasi Emiten: Launching Indeks TEMPO – IDNFinancials 52	23 Juni 2023	TEMPO – IDNFinancials	High Growth
RCTI				
1	Anugerah Syiar Ramadan 2023	26 Mei 2023	Komisi Penyiaran Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia	• Program Sinetron: "Amanah Wali 7" • Program Film & FTV Religi: "Cintaku di Kampung Tandus" • Program Dakwah Talk Show (Dialog): "Kultum 2023"
2	Anugerah Lembaga Sensor Film 2023	14 September 2023	Lembaga Sensor Film	TV Peduli Kebudayaan Culture Caring TV
MNCTV				
1	Anugerah Penyiaran KPID Sulawesi Tengah 2023	15 Februari 2023	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Tengah	Program Iklan Layanan Masyarakat TV
2	PLN Journalist Awards 2022	21 Juni 2023	PT PLN (Persero)	Audio Visual Hard News
3	Anugerah Penyiaran Ramah Anak 2023	28 Juli 2023	Komisi Penyiaran Indonesia	Program Animasi Asing
4	Anugerah Penyiaran KPID Bengkulu 2023	15 November 2023	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bengkulu	Program Televisi Berita Terbaik
5	Anugerah Penyiaran KPID Bali 2023	24 November 2023	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali	Penyiar Berita Televisi Terbaik
INEWS				
1	SPS Awards 2023	20 Maret 2023	Serikat Pekerja Pers (SPS) Indonesia	• Gold Winner Indonesia Young Readers Awards (IYRA) 2023: Koran Sindo edisi Sabtu, 6 Agustus 2023, rubrik Gen Sindo ("Jangan Asal Main di Medsos") • Silver Winner Print Media Awards (IPMA) 2023: Sub Kategori Cover Media Cetak Indonesia, cover Koran Sindo edisi Rabu, 2 Februari 2022 • Bronze Winner Print Media Awards (IPMA) 2023: Sub Kategori Media Cetak Nasional Indonesia, cover Koran Sindo edisi Kamis, 6 Oktober 2022 dan edisi Jumat, 30 Desember 2022
2	Baznas Award 2023	21 Maret 2023	Badan Amil Zakat Indonesia	• Media Cetak Pewarta Gerakan Zakat Terbaik: Koran Sindo • Radio Pewarta Gerakan Zakat Terbaik: Trijaya FM Media Online Pewarta Gerakan Zakat Terbaik: Okezone.com
3	Anugerah Syiar Ramadan 2023	26 Mei 2023	Komisi Penyiaran Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia	Program Dakwah Non-Talk Show "Tabligh Akbar"

4	Media Brand Awards 2023	14 Agustus 2023	Serikat Perusahaan Pers (SPS) Indonesia	SINDOnews.com mendapatkan Penghargaan Media Brand Awards 2023, Kategori Media Nasional
MNC PICTURES				
1	Piala Maya 2023	12 April 2023	Festival Film Indonesia	• Pemenang Aktor Pendukung Terpilih: Elang El Gibran ("Srimulat: Hil yang Mustahal Babak Pertama") • Pemenang Tata Rias Wajah & Rambut Terpilih: Jerry Octavianus ("Srimulat: Hil yang Mustahal Babak Pertama")
2	Indonesian Television Award 2023	25 September 2023	RCTI	• Program Prime Time Drama Terpopuler: "Cinta Tanpa Karena" • Program Ramadan Drama Terpopuler: "Amanah Wali 7 Menukar Takdir" • Aktris Sinetron Terpopuler: Amanda Manopo ("Cinta Tanpa Karena")
3	Asian Academy Creative Awards 2023	7 Desember 2023	Asian Academy Creative Awards	Best Actress in A Leading Role for Indonesia (National): Adinia Wirasti ("Kamu Tidak Sendiri")
MNC ANIMATION				
1	Asian Academy Creative Awards 2023	7 Desember 2023	Asian Academy Creative Awards	Best Animated Programme Or Series (2D or 3D) for Indonesia (National): "BIMA S Season 2: Mad Scientist"
STAR MEDIA NUSANTARA				
1	The 2022 Pinnacle Year End Awards	28 Januari 2023	WPVR New York Platinum Vibes Radio	Indie Pop Song of The Year: Sorenza Nuryanti ("Reality Show" - F.F Version)
2	SCTV Awards 2023	10 Mei 2023	SCTV	• Penyanyi Solo Wanita Paling Ngetop: Tiara Andini • Kolaborasi Paling Ngetop & Lagu Pop Paling Ngetop: Lyodra & Andi Rianto
3	Indonesia's Beautiful Women of 2023	24 Mei 2023	High End Magazine	• Woman Impact Woman: Mahalini Raharja • Woman Impact Woman: Audrey Vanessa • Woman Impact Woman: Anneth Delliecia Nasution

4	Dahsyat Awards 2023	29 Mei 2023	RCTI	• Pendatang Baru Terdahsyat: Salma Salsabil
				• Lagu Terdahsyat: Lyodra, Tiara Andini, Ziva Magnolya ("Menyesal")
				• Soundtrack Sinetron Terdahsyat: Mahalini ("Sial")
				  • Special Awards: Mahalini
				  • Bucin Terdahsyat: Mahalini

5	Ambyar Awards 2023	25 Juni 2023	MNCTV	• Pendatang Baru Terambyar: Laila Ayu • Penyanyi Pria Ambyar Terbaik: Wahid Darjo

6	Spotify: A new face in News York's Times Square	19 Agustus 2023	Spotify	Andmesh Kamaleng di Billboard Times Square New York sebagai cover playlist "Spotify Suara Indonesia"
7	Spotify Wrapped Live Indonesia 2023	20 September 2023	Spotify	• Lagu Indonesia Teratas 2023: Tak Segampang Itu ("Anggi Marito") • Artis Perempuan Indonesia Teratas 2023: Mahalini • Album Indonesia Teratas 2023: Fabula ("Mahalini") • Artis RADAR Indonesia Teratas 2023: Anggi Marito • Artis EQUAL Indonesia Teratas 2023: Ghea Indrawari
8	Indonesian Television Awards 2023	26 September 2023	RCTI	Pendatang Baru Televisi Terpopuler: Salma Salsabil
9	Anugerah Komedi Indonesia 2023	27 September 2023	iNews	• Seniman Komedi Wanita Terfavorit: Ayu Ting Ting • Seniman Komedi Wanita Terpilih: Ayu Ting Ting

Selain penghargaan tersebut di atas, Perseroan juga telah menerima berbagai penghargaan terkait aspek keberlanjutan *(Sustainability Aspect Award)* dalam kurun waktu 2 tahun terakhir sebagai berikut:

No	Penghargaan Aspek Keberlanjutan Tahun 2024	Tanggal	Penyelenggara	Kategori
1	Indonesia Green Awards 2024	17 Januari 2024	La Tofi School of Social Responsibility	Pelopor pencegahan polusi dalam program Cegah Polusi Bersama MNC Peduli
2	Indonesia Green Awards 2024	17 Januari 2024	La Tofi School of Social Responsibility	Pengembangan Wisata Konservasi Alam dalam program Penataan Kawasan di Area Pusat Jakarta
3	Indonesia Green Awards 2024	17 Januari 2024	La Tofi School of Social Responsibility	Pengorganisasian tanggung jawab sosial perusahaan dalam program Organisasi MNC Peduli
4	Indonesia Green Awards 2024	17 Januari 2024	La Tofi School of Social Responsibility	Penanganan sampah plastik dalam program Pemberdayaan UMKM dan Edukasi Generasi Muda melalui Daur Ulang Sampah Plastik
5	Indonesia Green Awards 2024	17 Januari 2024	La Tofi School of Social Responsibility	Pengembangan edukasi perubahan iklim dalam program Edukasi melalui Tayangan Televisi dan Sosial Media
6	Indonesia Green Awards 2024	17 Januari 2024	La Tofi School of Social Responsibility	Penghitungan jejak karbon dalam program Kompensasi Emisi melalui Puluhan Ribu Pohon
7	Indonesia Green Awards 2024	17 Januari 2024	La Tofi School of Social Responsibility	Pengembangan pegoahan sampah terpadu dalam program MNC Towards Zero Food Taste
8	Indonesia Green Awards 2024	17 Januari 2024	La Tofi School of Social Responsibility	Penyelamatan sumber daya air dalam program Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kawasan MNC Group
9	TOP CSR Awards 2024	29 Mei 2024	Majalah Top Business	Hary Tanoesoedibjo, Executive Chairman MNC Group sebagai TOP Leader on CSR Commitment 2024
10	TOP CSR Awards 2024	29 Mei 2024	Majalah Top Business	TOP CSR Awards 2023 on Stars 5

No	Penghargaan Aspek Keberlanjutan Tahun 2024	Tanggal	Penyelenggara	Kategori
11	Penanaman 20.000 Pohon Mangrove	5 November 2024	Gubernur Lampung	Apresiasi kepada MNC Peduli atas peran serta pelestarian lingkungan melalui kegiatan penanaman pohon mangrove
12	Indonesia SDGs Award (ISDA) 2024	14 November 2024	Corporate Forum for CSR Development (CFCD)	The Corporate Leadership on SDGs
13	Indonesia SDGs Award (ISDA) 2024	14 November 2024	Corporate Forum for CSR Development (CFCD)	The Most Committed Corporate to SDGs on Social Pillar
14	Indonesia SDGs Award (ISDA) 2024	14 November 2024	Corporate Forum for CSR Development (CFCD)	The Most Committed Corporate to SDGs on Environment
15	Indonesia SDGs Award (ISDA) 2024	14 November 2024	Corporate Forum for CSR Development (CFCD)	MNC Peduli Percepatan Pemulihan Covid -19
16	Indonesia SDGs Award (ISDA) 2024	14 November 2024	Corporate Forum for CSR Development (CFCD)	MNC Peduli Perempuan dan Kesetaraan Gender
17	Indonesia SDGs Award (ISDA) 2024	14 November 2024	Corporate Forum for CSR Development (CFCD)	MNC Center Lingkungan Hijau Ramah Interaksi
18	Indonesia SDGs Award (ISDA) 2024	14 November 2024	Corporate Forum for CSR Development (CFCD)	Air Bersih & MCK dalam Mewujudkan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat
19	Indonesia SDGs Award (ISDA) 2024	14 November 2024	Corporate Forum for CSR Development (CFCD)	Pengelolaan Limbah MNC Center untuk Kesejahteraan Masyarakat
20	Indonesia SDGs Award (ISDA) 2024	14 November 2024	Corporate Forum for CSR Development (CFCD)	Pengelolaan Limbah Non B3 di Komplek Perkantoran MNC
21	Indonesia SDGs Award (ISDA) 2024	14 November 2024	Corporate Forum for CSR Development (CFCD)	Pengelolaan Limbah Non B3 di Komplek Perkantoran MNC
22	Indonesia SDGs Award (ISDA) 2024	14 November 2024	Corporate Forum for CSR Development (CFCD)	Penanggulangan Stunting untuk Generasi Sehat Generasi Cerdas Anak Bangsa
23	Bulan Dana PMI 2024	27 Desember 2024	Pemerintah Kota Jakarta Pusat	Apresiasi kepada MNC Peduli atas partisipasi dalam kegiatan Bulan Dana PMI 2024
24	Bulan Dana PMI 2024	27 Desember 2024	Palang Merah Indonesia Kota Jakarta Pusat	Apresiasi atas kontribusi MNC Group melalui MNC Peduli, sebagai pengumpul dana terbesar tingkat perusahaan
25	Volunteer of the Year 2024	27 Desember 2024	Palang Merah Indonesia Kota Jakarta Pusat	MNC Peduli sebagai Volunteer of the Year 2024

7. POSISI DAN DAYA SAING

Indonesia merupakan pangsa iklan media terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2024 dengan total netto sebesar US$3,219 miliar. Indonesia juga menjadi pasar periklanan *Free-to-Air* (FTA) TV terbesar di Asia Tenggara dengan jangkauan sekitar 70 juta rumah tangga dan total pendapatan iklan TV sekitar US$1,25 miliar berdasarkan *report* Media Partners Asia.

Menurut proyeksi Media Partners Asia (MPA), penjualan bersih iklan TV FTA di Indonesia akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk 2,4% antara 2022 dan 2027. Pertumbuhan ini masih digerakkan secara mayoritas

melalui permintaan iklan dari perusahaan *Fast Moving Consumer Goods* (FMCG). TV dan media digital mendominasi media iklan dengan pangsa pasar sekitar 90,9% pada 2024 dan MPA memprediksi akan meningkat menjadi 94% pada tahun 2027.

Bisnis TV berlangganan di bawah IPTV tetap beroperasi dengan baik meskipun terdapat beberapa pengaruh yang dapat mengganggu perkembangannya seperti peningkatan pembajakan video dan persaingan sengit di antara operator TV berlangganan lainnya.

Media digital menjadi semakin penting di Indonesia sebagai pasar yang potensial untuk pertumbuhan belanja media *online* dan video seiring dengan peningkatan ketersediaan inventaris video (melalui layanan *streaming*) serta pertumbuhan dalam *e-commerce*. MPA memproyeksikan segmen digital tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk 13,4% antara 2022 dan 2027.

a. Televisi FTA

Dalam bisnis TV nasional saat ini terdapat 5 pemain utama, yaitu MNCN yang memiliki RCTI, MNCTV, GTV, dan iNews; SCMA, memiliki SCTV dan Indosiar; Trans Group memiliki Trans TV dan Trans 7; Viva Group memiliki ANTV dan TV One; serta Metro Group melalui Metro TV. Dengan hanya lima pemain utama maka persaingan pasar iklan untuk TV nasional menjadi lebih minimal atau terkontrol. Dari kelima pemain utama ini, MNCN memiliki pangsa pasar pemirsa dan iklan terbesar.

Berikut ini adalah data distribusi pendapatan iklan dan *Average Audience Share Prime time* selama tahun 2024, dimana MNCN memiliki distribusi pendapatan iklan dan rata-rata *audience share* terbesar dibandingkan dengan Group atau Stasiun TV lainnya.

No	Station	Target Audience	Tahun 2024	*Average* Jan-Dec 2024
			Distribusi pendapatan iklan	*Audience Share*
1	RCTI	ABC	18,8%	15,3%
2	MNCTV	ABCD	13,3%	11,7%
3	GTV	ABC	4,6%	5,4%
4	iNews	AB	3,7%	3,5%
Total MNC Grup			**40,3%**	**35,9%**
5	IVM	ABCD	22,6%	15,2%
6	SCTV	ABCD	14,2%	20,6%
Total EMTEK Group			**36,8%**	**35,8%**
7	Trans 7	ABC	7,1%	11,5%
8	Trans TV	ABC	5,2%	6,74%
Total VIVA Group			**12,3%**	**18,2%**
9	ANTV	ABC	3,4%	6,2%
10	TV ONE	ABC	4,2%	2,2%
Total TRANS Corp			**7,6%**	**8,4%**
11	Metro TV	AB	3,0%	1,2%

Sumber: *Nielsen, Jan-Des Tahun 2024, Data Upper Middle Terrestrial*
Catatan: Target Audience dalam tabel tersebut adalah berdasarkan SEC (*Social Economic Status*) dari Nielsen, dengan klasifikasi; A = *upper class*, B = *upper middle class*, C = *middle class*, D = *lower middle class*, dan E = *lower class*.

b. Digital

Perseroan berkompetisi langsung dengan para pesaingnya, baik dengan korporasi besar lainnya maupun secara individual pada beberapa lini bisnis digital. Untuk kedua *superapp* Perseroan, melalui RCTI+ dan Vision+, *platform* AVOD dan SVOD *superapp* adalah yang terbesar di indonesia dari segi pengguna aktif bulanan, berdasarkan sumber dari Comscore. Platform SVOD superapp, Vision+, juga merupakan yang terbesar dengan sekitar 2,85 juta pelanggan dan 40 juta pengguna aktif bulanan. Performa operasi media sosial milik Perseroan, termasuk MCN, juga yang terbesar dengan memiliki 600 *juta subscribers/followers* dan 124,7 miliar *views* dari Youtube, Facebook, dan TikTok. Terakhir, dari keempat portal online Perseroan, dengan nama okezone.com,

sindonews.com, iNews.id, dan idxchannel.com, telah mengumpulkan lebih dari 40 juta pengguna aktif bulanan, berdasarkan data Google Analytics.

8. PROSPEK USAHA

Prospek Media Berbasis Iklan dan Konten melalui MNCN

Saat ini pasar iklan media di Indonesia merupakan pasar yang terbesar di Asia Tenggara dengan belanja iklan bersih diperkirakan sekitar 3,436 miliar dolar AS pada tahun 2025 berdasarkan hasil survei Media Partners Asia. Kondisi tersebut ditopang oleh perkiraan pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 5,1% pada tahun 2025. Dengan PDB yang diproyeksikan tumbuh, Indonesia mengharapkan ekonomi yang lebih stabil untuk mempertahankan pemulihan yang sangat dibutuhkan untuk seluruh industri periklanan. Sebagai tambahan, terdapat korelasi yang positif antara pertumbuhan PDB dengan konsumsi domestik yang pada akhirnya akan mengakibatkan naiknya anggaran pemasaran bagi perusahaan consumer goods demi menggambil bagian dalam peningkatan kebutuhan konsumen

Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, industri periklanan di masa mendatang diprediksi akan semakin membaik. Beberapa indikator berikut mendukung perkiraan prospek tersebut, yakni:

- Potensi kenaikan signifikan untuk pertumbuhan belanja iklan karena rasio belanjaiklan terhadap PDB adalah dibawah 0,2%, salah satu yang terendah di Asia.
- Pasar domestik yang besar, dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta, tumbuh sekitar 3-4 juta orang setiap tahun selama 15 tahun ke depan. Selain itu komposisi penduduk pada usia yang produktif akan menjadi target pasar potensial bagi produk konsumsi seperti produk Fast Moving Consumer Goods (FMCG).
- Belanja iklan di FTA Nasional dan Digital akan tumbuh menjadi 93,7% dari belanja iklan nasional dalam 2 tahun ke depan.
- Indonesia sebagai negara kepulauan menjadikan FTA sebagai media iklan termurah dibandingkan dengan media iklan lainnya, karena jangkauan FTA yang lebih luas apabila dibandingkan dengan media iklan lainnya sedangkan penetrasi internet masih terbatas hanya pada kota-kota besar.
- Terbatasnya jumlah FTA TV yang mempunyai jangkauan luas secara nasional sedangkan kebutuhan produk-produk untuk beriklan di TV nasional semakin besar.

Sumber : Media Partners Asia

Sektor media Perseroan diperkirakan akan terus bertumbuh pada tahun 2025 didorong oleh:

- Adanya empat FTA Nasional dengan pangsa pemirsa terbesar sebesar 35,9% dan pangsa belanja iklan sebesar 40,3%, 35,9% pangsa pemirsa diterjemahkan ke lebih dari 100 juta pemirsa setiap harinya.
- Pertumbuhan yang kuat dalam Iklan jenis *Non-Time Consuming Ads* (iklan NTC) yang membawa keuntungan bagi 4 FTA milik MNCN.
- Produksi konten terbesar dengan memproduksi 20 ribu jam konten setiap tahun dalam berbagai format:
  a) 33% pangsa pasar di kategori drama atau sekitar 2.000 jam produksi drama pada tahun 2024;
  b) 80%+ pangsa pasar di kategori pencarian bakat & lebih dari 90% pangsa pasar animasi;
- Pustaka konten terbesar dengan lebih dari 300 ribu jam, dimana mayoritas berbasis konten hiburan (*non-news*);
- Pertumbuhan kuat dalam pendapatan iklan digital dan pelanggan berbayar yang berasal dari aplikasi *superapp* (RCTI+ dan Vision+), portal berita, dan media sosial;
- Manajemen Bakat Terbesar, dengan lebih dari 400 artis yang dikelola dengan kontrak selama 10 tahun;
- MCN (*Multi Channel Network*) yang telah menghasilkan 57,4 miliar *views* dan 140,6 juta *subscribers*, termasuk konten digital lain di YouTube, Facebook, dan TikTok, dengan jumlah total views yang mencapai 124,7 miliar, dengan 600 juta *subscribers* pada akhir Desember 2024.

Sumber : Nielsen dan data internal Perseroan

Prospek Media Berbasis Pelanggan melalui IPTV

Selain tingkat pertumbuhan penduduk yang konsisten setiap tahunnya, beberapa indikator berikut mendukung prospek TV Berlangganan, yakni:

1. Pasar domestik yang besar, dengan jumlah rumah tangga berpenghasilan menengah yang terus meningkat.
2. Terbatasnya pilihan hiburan televisi di Indonesia dimana hanya terdapat 11 saluran TV nasional, sedangkan orang Indonesia memiliki kebiasaan menonton TV sekitar 7 jam per hari.
3. Penetrasi TV berlangganan di Indonesia saat ini merupakan salah satu yang terendah dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya.
4. Indonesia sebagai negara kepulauan menjadikan TV berlangganan berbasis satelit (DTH) memiliki jangkauan lebih luas dibandingkan Cable TV dan/atau IPTV yang terbatas hanya di kota-kota besar.

5. Populasi penduduk usia muda produktif yang cukup besar memberikan peluang pertumbuhan pengguna internet yang cukup besar setiap tahunnya.

a) Perkembangan Industri TV-Berbayar di Indonesia

Pada tahun 2024, pasar TV berbayar di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang stabil, meskipun penetrasi pasar masih terbilang rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Layanan TV kabel masih mendominasi pasar, tetapi teknologi lain seperti IPTV, DTH, dan platform OTT juga semakin berkembang, memberikan lebih banyak pilihan tontonan yang fleksibel kepada konsumen. Meskipun sebagian besar pelanggan TV berbayar berasal dari langganan rumah tangga, sektor ini tetap menghadapi persaingan ketat, baik dari layanan streaming maupun alternatif tontonan lainnya.

Melihat ke depan, pasar TV berbayar Indonesia diperkirakan akan terus berkembang, berkat kemajuan teknologi seperti 4G, 5G, dan ekspansi layanan broadband fiber. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan serta menarik lebih banyak pelanggan. Namun, untuk mempertahankan dan mempercepat pertumbuhan, investasi dalam infrastruktur dan teknologi akan sangat penting, di samping adaptasi terhadap preferensi konsumen yang semakin berubah dan permintaan akan konten yang lebih bervariasi

Prospek Media Video berbasis Internet (OTT)

Prospek OTT di Indonesia sangat cerah, mengingat perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen yang semakin mengarah ke preferensi untuk menonton konten secara fleksibel (kapam saja dan dimana saja). Seiring dengan peningkatan penetrasi internet dan penggunaan perangkat mobile, platform OTT semakin populer, memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai jenis konten tanpa terikat pada jadwal tayang tradisional. Konsumen Indonesia juga semakin terbuka dengan model langganan berbasis digital, yang membuat platform OTT semakin relevan, terutama di kalangan generasi muda.

Selain itu, peningkatan aksesibilitas internet 4G dan 5G, serta berkembangnya layanan broadband fiber, akan semakin mendukung pertumbuhan platform OTT di Indonesia. Penyedia konten OTT juga semakin berfokus pada produksi konten lokal yang merupakan konten pilihan utama bagi audiens Indonesia, termasuk serial, film, dan olahraga. Dengan begitu, platform OTT di Indonesia diprediksi akan terus berkembang, menghadirkan lebih banyak pilihan konten yang sesuai dengan selera lokal, serta menawarkan kenyamanan bagi konsumen yang ingin menonton kapan saja dan di mana saja.

DATA DAN INFORMASI YANG DIPERSIAPKAN UNTUK DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI MERUPAKAN KOMBINASI DATA INTERNAL PERUSAHAAN PER TANGGAL 31 DESEMBER 2024 YANG TELAH DIAUDIT DAN JUGA TELAH DIVERIFIKASI OLEH PIHAK KETIGA YANG RELEVAN PADA INDUSTRINYA.

IX. PERPAJAKAN

A. PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto Obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) yaitu:

a. sebesar jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan obligasi, untuk bunga dari obligasi dengan kupon;
b. sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan, untuk diskonto dari obligasi dengan kupon;
c. sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, untuk diskonto dari obligasi tanpa bunga;
d. Dalam hal terdapat diskonto negatif atau rugi pada saat penjualan obligasi dengan kupon, diskonto negatif atau rugi tersebut dapat diperhitungkan dengan dasar pengenaan pajak penghasilan atas bunga obligasi berjalan.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
2. Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan di luar BEI dan tidak dilaporkan perdagangannya di BEI. tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana berdasarkan pasal 23 atau pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:
1. Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga, dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
2. Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
3. Perusahaan efek, dealer, bank, dana pensiun, dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.

Pada tanggal 2 Februari 2021, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah menetapkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP No. 9/2021"). Berdasarkan Pasal 3 PP No. 9/2021, tarif pemotongan pajak atas penghasilan bunga obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain BUT diturunkan menjadi sebesar 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B. Bunga obligasi sebagaimana dimaksud termasuk bunga obligasi dengan kupon, diskonto obligasi dengan kupon dan diskonto obligasi tanpa bunga. Tarif pemotongan pajak berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya PP No. 9/2021.

CALON PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA ATAU CICILAN IMBALAN IJARAH, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI.

B. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai wajib pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

X. PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 dengan Jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp850.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh miliar Rupiah) yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 dengan Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp550.000.000.000,- (lima ratus lima puluh miliar Rupiah) yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah. Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah serta Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.

Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi "Obligasi Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025" dan "Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025" telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Susunan Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam rangka Penawaran "Obligasi Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025" dan "Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025" adalah sebagai berikut:

Obligasi

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Penjaminan			Total Penjaminan (Rp)	Persentase (%)
	Seri A (Rp)	Seri B (Rp)	Seri C (Rp)		
PT MNC Sekuritas	4.310.000.000	30.000.000.000	50.000.000	34.360.000.000	4,04
PT Bahana Sekuritas	95.005.000.000	170.000.000.000	50.000.000.000	315.005.000.000	37,06
PT Mandiri Sekuritas	180.035.000.000	210.600.000.000	-	390.635.000.000	45,96
PT CIMB Niaga Sekuritas	-	50.000.000.000	10.000.000.000	60.000.000.000	7,06
PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia	-	-	30.000.000.000	30.000.000.000	3,53
PT KB Valbury Sekuritas	-	20.000.000.000	-	20.000.000.000	2,35
Jumlah	**279.350.000.000**	**480.600.000.000**	**90.050.000.000**	**850.000.000.000**	**100,00**

Sukuk Ijarah

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah	Penjaminan			Total Penjaminan (Rp)	Persentase (%)
	Seri A (Rp)	Seri B (Rp)	Seri C (Rp)		
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah					
PT MNC Sekuritas	287.005.000.000	34.000.000.000	5.000.000.000	326.005.000.000	59,27
PT Bahana Sekuritas	20.515.000.000	10.000.000	-	20.525.000.000	3,73
PT Mandiri Sekuritas	750.000.000	-	1.000.000.000	1.750.000.000	0,32
PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia	90.000.000.000	5.000.000.000	20.000.000.000	115.000.000.000	20,90
PT KB Valbury Sekuritas	6.720.000.000	50.000.000.000	-	56.720.000.000	10,32
Penjamin Emisi Sukuk Ijarah					
PT Maybank Sekuritas Indonesia	30.000.000.000	-	-	30.000.000.000	5,46
Jumlah	**434.990.000.000**	**89.010.000.000**	**26.000.000.000**	**550.000.000.000**	**100,00**

Selanjutnya, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai peraturan No. IX.A.7.

Perseroan dengan PT MNC Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah adalah pihak terafiliasi secara tidak langsung melalui kepemilikan saham oleh PT MNC Asia Holding Tbk. Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah lainnya yaitu PT Bahana Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia, PT Maybank Sekuritas Indonesia, dan PT KB Valbury Sekuritas tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan.

Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT Bahana Sekuritas.

Metode Penentuan Tingkat Bunga Tetap Obligasi Dan Cicilan Imbalan Sukuk Ijarah

Tingkat bunga tetap dan Cicilan Imbalan Ijarah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini ditetapkan pada saat Penawaran Awal (*bookbuilding*) dengan mengumpulkan lembar minat dari calon investor. Dalam lembar minat tersebut, calon investor telah menyampaikan indikasi tingkat bunga tetap dan Cicilan Imbalan Ijarah yang diinginkan. Tingkat bunga tetap dan Cicilan Imbalan Ijarah kemudian ditetapkan dengan melakukan pemetaan atas kompilasi lembar minat dari berbagai calon investor tersebut.

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : **KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono (KPS)**
Wisma Bumiputera, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Setiabudi Jakarta, 12910
P. 021-5224-581 F. 021-5224-582

No. STTD	:	STTD.AP-190/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018
Surat Penunjukkan	:	No. 038/QUO/FD/KPS-SUD/II/2025 tanggal 4 Februari 2025
Keanggotaan Asosiasi	:	Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. 0126
Nama Rekan	:	Florus Daeli, SE., AK., MM., CA., CPA., CRA., CLI., CFI., CACP., ASEAN CPA.
Pedoman Kerja	:	Standar Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan Jasa Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan
Tugas Pokok	:	Melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("**IAPI**"). Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum : **Jusuf Indradewa & Partners**
Menara BCA (Grand Indonesia) Lt. 50
Jl. M.H.Thamrin No. 1, Jakarta Pusat 10310, Indonesia
Phone : (62-21) 22544117 (Hunting)
Fax : (62-21) 22544367

No. STTD	:	STTD.KH-21/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 8 Februari 2023 - Dr. Cecilia Teguh Ayu Sianawati, S.H, M.A STTD.KH-22/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 20 Februari 2023 - Swanyta Gunadi, S.H
Surat Penunjukkan	:	No. 002-KH/MCOM-CL/II/2025 tanggal 05 Februari 2025
Keanggotaan Asosiasi	:	Kartu Tanda Pengenal Advokat No. 92.10415 a.n Cecilia Teguh Ayusianawati S.H. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") No. 92036 a.n Cecilia Teguh Ayu Sianawati S.H. Kartu Tanda Pengenal Advokat No. 00.12335 a.n Swanyta Gunadi S.H.
Nama Rekan	:	Dr. Cecilia Teguh Ayu Sianawati, S.H, M.A Swanyta Gunadi, S.H.
Pedoman Kerja	:	Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021

Tugas Pokok	:	Melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Notaris : **Aulia Taufani**
Menara Sudirman Lt.18 ABD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Jakarta – 12190

No. STTD	:	STTD.N-5/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 9 Februari 2023
Surat Penunjukkan	:	No. 003-NOT/MCOM-CL/II/2025 tanggal 5 Februari 2025.
Keanggotaan Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia ("**INI"**) No.0060219710719.
Pedoman Kerja	:	Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Tugas Pokok	:	Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan Penawaran Umum Obligasi, antara lain Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, dan Perjanjian Agen Pembayaran.

Wali Amanat : **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**
Investment Services Division
Trust & Corporate Services Department
Gedung BRI II Lt.6
Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210 - Indonesia
Tel. (021) 575 8143
www.bri.co.id

No. STTD	:	08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996
Surat Penunjukkan	:	No. 001-BRI/MCOM-CL/II/2025 tanggal 5 Februari 2025
Pedoman Kerja	:	Standar prosedur operasi Wali Amanat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Tugas Pokok	:	Mewakili kepentingan pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemeringkat Efek : **PT Pemeringkat Efek Indonesia**
Equity Tower Lantai 30
Sudirman Central Business District Lot. 9
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190, Indonesia
Telp : (021) 509 684 69
Fax : (021) 509 684 68

Surat Penunjukkan	:	No.Ref: 05/CFO-MCOM/I/2025 tanggal 24 Januari 2025
Tugas Pokok	:	Ruang lingkup Pemeringkat Efek adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeringkat Efek juga wajib menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM sebagaimana diubah dengan UU No. 4/2023.

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah telah ditandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selaku Wali Amanat.

Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 ("Obligasi") dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 ("Sukuk Ijarah") adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang telah terdaftar di OJK dengan No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996 sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan UU No. 4/2023 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Berdasarkan:

- Surat pernyataan No. B. 160-INV/TCS/TCB/03/2025 tanggal 26 Maret 2025, Wali Amanat menyatakan bahwa:
  i. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan;
  ii. tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah yang diwaliamanati, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020;
  iii. tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dan menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020;
  iv. tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020;
- Surat pernyataan No. B. 159-INV/TCS/TCB/03/2025 tanggal 26 Maret 2025, Wali Amanat menyatakan telah melakukan *due diligence* terhadap Perseroan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020.
- Surat pernyataan No. B. 161-INV/TCS/TCB/03/2025 tanggal 26 Maret 2025, Wali Amanat menyatakan bahwa mempunyai penanggung jawab kegiatan yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah dan/atau tenaga ahli di bidang perwaliamanatan dalam penerbitan Sukuk yang memahami kegiatan dan jenis usaha serta transaksi yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.18/POJK.04/2015.
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan.

1. Riwayat Singkat

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (untuk selanjutnya disebut BRI) didirikan dengan nama De Poerwokertosche Sparbank der Inslandsche Hoofden atau Bank Priyayi yang didirikan oleh Raden Wiriadmadja dan kawan-kawan pada tanggal 16 Desember 1895. Anggaran dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. BRI berubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992. Dengan Akta No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, SH., Notaris di Jakarta, maka BRI diberi nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155-1992 tanggal 15 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3a tahun 1992. Perubahan terakhir anggaran dasar BRI sebagaimana termaktub dalam Akta No. 15 tanggal 22 April 2025 dibuat di hadapan Fathiah Helmi. S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0126510 Tahun 2025 tanggal 08 Mei 2025.

a. Permodalan

Berdasarkan laporan kepemilikan saham per 31 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BRI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham		Persentase Kepemilikan Saham (%)
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	
Modal Dasar			
Saham Seri A Dwiwarna	1	50	0,00
Saham Biasa Seri B	299.999.999.999	14.999.999.999.950	100,00
Jumlah Modal Dasar	**300.000.000.000**	**15.000.000.000.000**	**100,00**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Negara Republik Indonesia			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	50	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	80.610.976.875	4.030.548.843.750	53,19
Masyarakat			
- Saham Biasa Atas Nama Seri B (masing-masing dibawah 5%)*	70.948.024.728	3.547.401.236.400	46,81
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh *	**151.559.001.604**	**7.577.950.080.200**	**100,00**

b. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No.14 tanggal 22 April 2025 atas hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen	: Parman Nataatmadja*
Komisaris	: Awan Nurmawan Nuh
Komisaris	: Helvi Yuni Moraza*
Komisaris Independen	: Edi Susianto*
Komisaris Independen	: Lukmanul Khakim*

Direksi

Direktur Utama	: Hery Gunardi*
Wakil Direktur Utama	: Agus Noorsanto*
Direktur *Human Capital & Compliance*	: Ahmad Solichin Lutfiyanto
Direktur *Operations*	: Hakim Putratama*
Direktur *Corporate Banking*	: Riko Tasmaya (Riko Adythia)*
Direktur *Network* dan *Retail Funding*	: Aquarius Rudianto*
Direktur *Treasury* dan *International Banking*	: Farida Thamrin*
Direktur *Micro*	: Akhmad Purwakajaya*
Direktur *Commercial Banking*	: Alexander Dippo Paris Y S*
Direktur *Consumer Banking*	: Nancy Adistyasari*
Direktur *Finance & Strategy*	: Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari
Direktur Manajemen Risiko	: Mucharom*
Direktur *Information Technology*	:Saladin Dharma Nugraha Effendi*

**Efektif setelah mendapat persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test).*

c. Kegiatan Usaha

Selaku Bank Umum, BRI melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 berikut perubahannya dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam rangka mendukung dan mengembangkan kegiatan usahanya, BRI juga melakukan penyertaan pada entitas anak sebagai berikut:

No.	Perusahaan Anak	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan
1.	PT Bank Raya Indonesia Tbk (Bank Raya)	Bank Umum Swasta Nasional	86,85%
2.	BRI Remittance Co. Ltd.	Perusahaan Remittance	100,00%
3.	PT Asuransi BRI Life	Asuransi	54,77%
4.	PT BRI Multifinance Indonesia	Pembiayaan	99,88%
5.	PT BRI Danareksa Sekuritas	Sekuritas	67,00%
6.	PT BRI Ventura Investama	Perusahaan Ventura	99,97%
7.	PT BRI Asuransi Indonesia	Asuransi	90,00%
8.	PT Permodalan Nasiional Madani	Pembiayaan	99,99%
9.	PT Pegadaian	Pembiayaan, Emas, Aneka Jasa	99,99%
10.	PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI)	Pengelolaan Portofolio	65,00%

Dalam rangka mengembangkan *Fee Based Income* dan pengembangan Pasar Modal di Indonesia, Bank BRI saat ini melayani jasa Wali Amanat *(Trustee),* Agen Pembayaran *(Paying Agent),* Agen Jaminan (*Security Agent*).

- **Jasa Wali Amanat (*Trustee*)**

Efek bersifat Utang yang menggunakan Jasa Wali Amanat BRI selama tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

No	Nama Efek Bersifat Utang	Tanggal Emisi
1	Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022	10 Januari 2023
2	Medium Term Notes (MTN) III PT PNM Venture Capital Tahun 2022	25 Januari 2023
3	Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap IV Tahun 2023	22 Februari 2023
4	Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap V Tahun 2023	24 Februari 2023
5	Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2023	8 Maret 2023
6	Obligasi Berkelanjutan IV SANF Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2023	16 Maret 2023
7	Obligasi Berkelanjutan I Provident Investasi Bersama Tahap I Tahun 2023	28 Maret 2023
8	Obligasi Berkelanjutan II Spindo Tahap I Tahun 2023	4 April 2023
9	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Spindo Tahap I Tahun 2023	4 April 2023
10	Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap III Tahun 2023	11 April 2023
11	Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2023	17 Mei 2023
12	Obligasi Berkelanjutan I Provident Investasi Bersama Tahap II Tahun 2023	7 Juni 2023
13	EBAS-SP SMFBRIS01	8 Juni 2023
14	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Mandala Multifinance Tahap III Tahun 2023	22 Juni 2023
15	MTN I PT LEN Industri (Persero) Tahun 2023 Tahap I	22 Juni 2023
16	Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2023	27 Juni 2023
17	Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2023	6 Juli 2023
18	Obligasi Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap I Tahun 2023	6 Juli 2023
19	Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap I Tahun 2023	6 Juli 2023
20	Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2023	11 Juli 2023
21	Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Tahap I Tahun 2023	11 Juli 2023
22	Obligasi II Hino Finance Indonesia Tahun 2023	11 Juli 2023
23	Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap I Tahun 2023	11 Juli 2023
24	Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023	4 Agustus 2023
25	Obligasi Berkelanjutan II Spindo Tahap II Tahun 2023	8 Agustus 2023
26	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Spindo Tahap II Tahun 2023	8 Agustus 2023
27	Obligasi Berkelanjutan I JACCS MPM Finance Indonesia Tahap II Tahun 2023	11 Agustus 2023
28	EBAS-SP SMFBRIS01	26 September 2023
29	Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2023	27 September 2023
30	Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun 2023	3 Oktober 2023
31	Obligasi Berkelanjutan I MNC Energy Investments Tahap I Tahun 2023	6 Oktober 2023
32	Sukuk Wakalah Berkelanjutan I MNC Energy Investments Tahap I Tahun 2023	6 Oktober 2023
33	Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap II Tahun 2023	19 Oktober 2023

No	Nama Efek Bersifat Utang	Tanggal Emisi
34	Obligasi Berkelanjutan VII Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2023	20 Oktober 2023
35	Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2023	25 Oktober 2023
36	Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Tahap II Tahun 2023	16 November 2023
37	Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap I Tahun 2023	22 November 2023
38.	MTN INKA Multi Solusi II Tahun 2023	22 November 2023
39.	Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2023	19 Januari 2024
40	Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap V Tahun 2024	23 Februari 24
41.	Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap II Tahun 2024	21 Maret 24
42.	Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Tahap III Tahun 2024	2 April 24
43.	Obligasi Berkelanjutan I JACCS MPM Finance Indonesia Tahap III Tahun 2024	19 April 24
44.	Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2024	23 April 24
45.	Obligasi I Merdeka Battery Materials Tahun 2024	3 April 24
46.	Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2024	28 May 24
47.	Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap III Tahun 2024	4 Juni 24
48.	Obligasi Berkelanjutan IV SANF Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2024	20 Juni 24
49.	Obligasi Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap II Tahun 2024	21 Juni 24
50.	Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2024	2 Juli 24
51.	Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap I Tahun 2024	2 Juli 24
52.	Obligasi III Hino Finance Indonesia Tahun 2024	5 Juli 24
53.	Obligasi Berkelanjutan IV Maybank Finance Tahap I Tahun 2024	5 Juli 24
54.	Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap III Tahun 2024	9 Juli 24
55.	Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap I Tahun 2024	9 Juli 24
56.	Obligasi Terkait Keberlanjutan I SPINDO Tahun 2024	9 Juli 24
57.	Obligasi Berkelanjutan I Sumber Global Energy Tahap I Tahun 2024	10 Juli 24
58.	Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap VI Tahun 2024	30 Juli 24
59.	Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap III Tahun 2024	18-Sep-24
60.	Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Tahap IV Tahun 2024	6-Sep-24
61.	Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2024	2-Oct-24
62.	Obligasi II BUMA Tahun 2024	8-Oct-24
63.	Obligasi II Merdeka Battery Materials Tahun 2024	8-Oct-24
64.	Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap IV Tahun 2024	26-Nov-24
65.	Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap IV Tahun 2024	19-Nov-24
66.	Obligasi Berkelanjutan II Hartadinata Abadi Tahap I Tahun 2024	26-Nov-24
67.	Medium Term Notes (MTN) V PT PNM Venture Capital Tahun 2024 Tahap I	4-Dec-24
68.	Obligasi I Sarana Mitra Luas Tahun 2024	10-Dec-24
69.	Sukuk Mudharabah Jangka Menengah IV PT PNM Ventura Syariah Tahun 2024	5-Dec-24
70.	MTN I PT Mitra Bisnis Madani Tahun 2024 Tahap I	27-Dec-24
71.	Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2024	24-Dec-24
72.	Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap III Tahun 2024	18-Des-24
73.	Obligasi I Indonesian Paradise Property Tahun 2025	8 Januari 25
74.	Obligasi Berkelanjutan V MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2024	10 Januari 25
75.	Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap IV Tahun 2025	13 Februari 25
76.	Sukuk Mudharabah Jangka Menengah V PT PNM Ventura Syariah Tahun 2025	14 Februari 25
77.	Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2025	25 Februari -25
78.	Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap V Tahun 2025	28 Februari 25
79.	Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap II Tahun 2025	13 Maret 25
80.	Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap V Tahun 2025	14 Maret 25
81.	Obligasi Berkelanjutan I Hino Finance Indonesia Tahap I Tahun 2025	20 Maret 25
82.	Medium Term Notes I PT Mitra Prima Lancar Tahun 2025 Tahap I	17 Maret 25
83.	Sukuk Ijarah I BUMA Tahun 2025	26 Maret 25

- **Jasa Agen Pembayaran *(Paying Agent)***

  Wali Amanat BRI dapat memberikan jasa berupa layanan pembukaan rekening dan pengadministrasian rekening *sinking fund* ataupun transaksi pendistribusian dana pembayaran kupon dan/atau pokok *Medium Term Notes* kepada investor dalam penerbitan Efek bersifat Utang.

- **Jasa Agen Jaminan (*Security Agent*)**

  Wali Amanat BRI dapat memberikan jasa penatausahaan atas dokumen jaminan yang terkait dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dokumen pengikatan lainnya serta surat – surat jaminan yang terkait dengan penerbitan Efek bersifat Utang.

d. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Pasar Modal, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

e. Penunjukan, Penggantian dan Berakhirnya Tugas Wali Amanat

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2020, ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan;
b. Penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab sebagai berikut:
   - Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
   - Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
   - Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
   - Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/ atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
   - Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
   - Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan Pasar Modal;
   - Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
   - Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 19/POJK.04/2020; atau
   - Atas permintaan Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah;
c. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
   - Obligasi dan Sukuk Ijarah telah dilunasi baik pokok, bunga termasuk denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Perseroan;
   - Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo pokok Obligasi dan Sukuk Ijarah;
   - Setelah diangkatnya Wali Amanat baru.

f. Ikhtisar Laporan Keuangan Wali Amanat

Berikut ini adalah kutipan dari Ikhtisar Laporan Keuangan Konsolidasian BRI per tanggal 31 Desember 2024, 31 Desember 2023, dan 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Total Aset	1.992.983.447	1.965.007.030	1.865.639.010
Total Liabilitas	1.669.749.400	1.648.534.888	1.562.243.693
Total Ekuitas	323.189.047	316.472.142	303.395.317

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Pendapatan Bunga dan Syariah – neto	142.057.190	135.183.487	124.597.073
Pendapatan Premi – neto	3.250.480	2.161.392	1.577.323
Pendapatan Operasional lainnya	58.857.740	45.625.785	47.302.800
Laba Operasional	78.578.018	76.828.737	64.306.037
Laba Sebelum Beban Pajak	77.599.110	76.429.712	64.596.701
Laba Tahun Berjalan	60.643.808	60.425.048	51.408.207

Rasio Penting

(dalam %)

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Capital Adequate Ratio (CAR)	26,63	27,27	25,51
Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) - *gross*	2,78	2,95	2,67
Loan to Deposits Ratio (LDR)	88,85	84,73	78,82
Return On Asset (ROA)	3,06	3,24	3,79
Return On Equity (ROE)	19,01	19,95	19,59
Net Interest Margin (NIM)	7,74	7,95	7,85
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	67,64	68,07	69,10

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Investment Services Division
Trust & Corporate Services Department
Gedung BRI II Lt.6
Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210 - Indonesia
Tel. (021) 575 8143
www.bri.co.id

XIII. KETERANGAN MENGENAI PENANGGUNG

CGIF, merupakan lembaga dana perwalian (*trust fund*) dari Asian Development Bank, yang didirikan oleh 10 anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ("ASEAN") bersama dengan Republik Rakyat Tiongkok ("RRT"), Jepang, Republik Korea ("ASEAN+3") dan Asian Development Bank ("ADB") pada tahun 2010. Ke-10 anggota ASEAN terdiri dari Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos ("Laos"), Malaysia, Republik Persatuan Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Kantor CGIF berlokasi di Asian Development Bank Building, 6 ADB Ave, Mandaluyong, 1550 Metro Manila, Philippines

CGIF didirikan pada November 2010 untuk mempromosikan, stabilitas keuangan dan untuk mendorong investasi jangka panjang di kawasan ASEAN+3 (Kawasan). Fungsi utama CGIF adalah memberikan penjaminan kredit kepada entitas-entitas lokal untuk menerbitkan obligasi berdenominasi mata uang lokal.

Pemerintah Republik Indonesia telah menyetujui pendirian CGIF sebagai penanggung/penjamin kredit berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 sehubungan dengan pengesahan Pasal Persetujuan Fasilitas Penjaminan Kredit dan Investasi (“Perpres 23 Tahun 2017”).

Untuk menanggung pembayaran secara penuh dan tepat waktu dari Perseroan, CGIF telah setuju untuk memberikan penanggungan dan Kafalah kepada Wali Amanat secara tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan sesuai dengan Perjanjian Penanggungan dan Akad Kafalah. CGIF memiliki kesanggungan untuk memberikan penanggungan dan Kafalah kepada Wali Amanat sesuai dengan Perjanjian Penanggungan dan Akad Kafalah. CGIF sebagai penanggung tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

1. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PENANGGUNG

Penanggungan CGIF didukung oleh modal disetor sejumlah USD1.158.000.000 dari para pemerintah berdaulat dan ADB selaku para kontributor. Baik ADB maupun kontributor lainnya tidak bertanggung jawab atas kewajiban CGIF.

Susunan struktur kepemilikan CGIF per tanggal 15 Mei 2025 adalah sebagai berikut:

Pihak Kontributor CGIF	Modal disetor (dalam Dollar US)	Persentase Kepemilikan Modal (%)
Republik Rakyat Tiongkok	342.800.000	29,60
Jepang	342.800.000	29,60
Asian Development Bank	180.000.000	15,54
Republik Korea	171.400.000	14,80
Indonesia	30.600.000	2,64
Malaysia	17.600.000	1,52
Filipina	21.600.000	1,87
Singapura	21.600.000	1,87
Thailand	21.600.000	1,87
Brunei Darussalam	5.600.000	0,48
Vietnam	1.900.000	0,16
Kamboja	200.000	0,02
Laos PDR	200.000	0,02
Republik Persatuan Myanmar	100.000	0,01
Jumlah	**1.158.000.000**	**100,00**

2. KEGIATAN USAHA

Tujuan CGIF adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi, meningkatkan ketahanan pasar keuangan, dan mencegah gangguan terhadap tatanan keuangan internasional, dengan mengembangkan pasar obligasi mata uang lokal di kawasan yang dalam dan likuid. Hal ini akan menghasilkan alokasi yang efisien dari dana negara Asia di dalam

kawasan dengan memfasilitasi akses bagi entitas yang memiliki rating Peringkat Investasi ke pasar obligasi sekaligus mendorong penerbitan surat utang dengan waktu jatuh tempo yang lebih panjang disesuaikan dengan masa proyek investasi.

Yang dimaksud dengan "Peringkat Investasi" adalah peringkat investasi minimum yang berlaku kepada perseroan-perseroan di negara ASEAN+3 oleh (i) lembaga pemeringkat efek lokal, atau (ii) pengganti lembaga pemeringkat efek sebagaimana yang ditetapkan oleh CGIF apabila tidak terdapat lembaga pemeringkat efek di negara tersebut.

Fungsi pengembangan CGIF berikut dilaksanakan berdasarkan ketentuan komersial di dalam negara-negara ASEAN+3:

1. Menjamin obligasi yang berdenominasi dalam mata uang lokal dan diterbitkan oleh entitas yang tergolong dalam Peringkat Investasi (dalam pasar obligasi lokal) dengan sedemikian rupa untuk mengurangi ketidaksesuaian mata uang dan waktu jatuh tempo;
2. Menjamin obligasi yang tidak berdenominasi mata uang lokal yang diterbitkan oleh entitas yang memiliki rating Peringkat Investasi (dalam pasar obligasi mata uang asing), sepanjang entitas yang bersangkutan secara alami atau secara keuangan telah terlindung nilai dalam mata uang tersebut berdasarkan bisnis utama mereka saat ini;
3. Melakukan investasi untuk mendukung pengembangan pasar obligasi; dengan ketentuan tidak ada investasi yang dilakukan sampai dengan Pertemuan Kontributor telah memutuskan bahwa CGIF berada dalam posisi untuk memulai jenis kegiatan tersebut; dan
4. Melakukan kegiatan lainnya dan menyediakan jasa lainnya yang sesuai dengan tujuannya (termasuk pengaturan peringkat kredit pengganti yang tepat untuk Brunei Darussalam dan negara-negara anggota ASEAN baru yaitu Kamboja, Republik Demokratik Rakyat Laos, Republik Persatuan Myanmar dan Vietnam).

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, CGIF bertindak sebagai Penanggung untuk sejumlah penerbitan surat utang korporasi di Kawasan ASEAN yang diantaranya sebagai berikut:

Tanggal Penerbitan	Nama Emiten	Negara Penerbitan	Nilai Penerbitan[1]	% Penanggungan oleh CGIF	Peringkat Instrumen	Tenor
24-Apr-2025	PT Hartadinata Abadi TBK.	Indonesia	Indonesial Rupiah 100 billion	100%	AAA (Pefindo)	3 tahun
28-Mar-25	SchneiTec Dynamic Co., Ltd.	Cambodia	KHR 60 billion	100%	Unrated	15 tahun
28-Mar-25	SchneiTec Dynamic Co., Ltd.	Cambodia	KHR 80 billion	100%	Unrated	15 tahun
07-Mar-2025	CIA First International School Co. Ltd	Cambodia	Cambodian Riel 41.0 billion	100%	AAA (RAC)	5 tahun
27-Jan-2025	China Water Affairs Group Limited	Singapore	Offshore Renminbi (CNH) 1,000 million	100%	AA (S&P)	5 tahun
8-Jan-2025	PT Indonesian Paradise Property TBK.	Indonesia	Indonesia Rupiah 12.5 billion	100%	AAA (Pefindo)	3 tahun
8-Jan-2025	PT Indonesian Paradise Property TBK.	Indonesia	Indonesia Rupiah 487.5 billion	100%	AAA (Pefindo)	5 tahun
20-Dec-2024	Northeast Rubber Public Company Limited	Thailand	Thai Baht 1,500 million	100%	AAA (Tris)	5 tahun
10-Dec-2024	PT Sarana Mitra Luas TBK.	Indonesia	Indonesian Rupiah 147.1 billion	100%	AAA (Pefindo)	3 tahun
10-Dec-2024	PT Sarana Mitra Luas TBK.	Indonesia	Indonesian Rupiah 152.9 billion	100%	AAA (Pefindo)	5 tahun

Tanggal Penerbitan	Nama Emiten	Negara Penerbitan	Nilai Penerbitan[1]	% Penanggungan oleh CGIF	Peringkat Instrumen	Tenor
27-Nov-2024	PowerDC HoldCo Pte. Ltd.	China	Hong Kong Dollar 300 million	100%	AA (S&P)	3 tahun
27-Nov-2024	BIWASE – Long An Water – Joint Stock Company	Vietnam	Vietnamese Dong 700 billion	100%	AAA (FiinRatings)	10 tahun
26-Nov-2024	PT Hartadinata Abadi TBK.	Indonesia	Indonesia Rupiah 59.5 billion	100%	AAA (Pefindo)	3 years
26-Nov-2024	PT Hartadinata Abadi TBK.	Indonesia	Indonesia Rupiah 840.5 billion	100%	AAA (Pefindo)	5 tahun
20-Nov-2024	Singapore Medical Group Limited	Singapore	Singapore Dollar 90 million	100%	AA (S&P)	5 tahun
8-Nov-2024	PowerDC Holdco Pte. Ltd.	Singapore	Singapore Dollar 100 million	100%	AA (S&P)	5 tahun
18-Oct-2024	Precious Shipping Public Company Limited	Thailand	Thai Baht 680 million	100%	AAA (TRIS Rating)	5 tahun
18-Oct-2024	Precious Shipping Public Company Limited	Thailand	THB 680 million	100%	AAA (TRIS Rating)	10 tahun
08-Aug-24	Vongsayam Korsang Co., Ltd	Thailand	THB 342.9 million	100%	AAA (Fitch)	3 tahun
08-Aug-24	Vongsayam Korsang Co., Ltd	Thailand	THB 634.8 million	100%	AAA (Fitch)	5 tahun
08-Aug-24	Vongsayam Korsang Co., Ltd	Thailand	THB 488.5 million	100%	AAA (Fitch)	7 tahun
08-Aug-24	Vongsayam Korsang Co., Ltd	Thailand	THB 489.6 million	100%	AAA (Fitch)	10 tahun
9-Jul-24	PT Steel Pipe Industry of Indonesia TBK	Indonesia	IDR33.78 billion	100%	AAA (Pefindo)	3 tahun
9-Jul-24	PT Steel Pipe Industry of Indonesia TBK	Indonesia	IDR766.22 billion	100%	AAA (Pefindo)	5 tahun
9-Jul-24	PT Steel Pipe Industry of Indonesia TBK	Indonesia	IDR200 billion	100%	AAA (Pefindo)	7 tahun
25-Jun-24	HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited, as Trustee of Sabana Industrial Real Estate Investment Trust ("Sabana Industrial REIT")	Singapore	SGD100 million	100%	AA (S&P)	5 tahun
20- Jun-24	Royal Group Phnom Penh SEZ Plc.	Cambodia	KHR 41 billion	100%	khAAA (RAC)	5 tahun

Tanggal Penerbitan	Nama Emiten	Negara Penerbitan	Nilai Penerbitan[1]	% Penanggungan oleh CGIF	Peringkat Instrumen	Tenor
30-Mei-2024	Thonburi Healthcare Group Public Company Limited	Thailand	THB 700 million	100%	AAA (tha) (Fitch)	3 tahun
30-Mei-2024	Thonburi Healthcare Group Public Company Limited	Thailand	THB 1 billion	100%	AAA (tha) (Fitch)	5 tahun
05-Mar-24	Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd.	Singapura	SGD150 million	100%	AA (S&P)	5 tahun
15-Feb-24	Hektar Real Estate Investment Trust	Malaysia	MYR215 million	100%	AAA (RAM)	5 tahun
29-Des-23	Telcotech Limited	Kamboja	KHR82.08 billion	100%	khAAA (RAC)	5 tahun
28-Des-23	Tecomen Joint Stock Company	Vietnam	VND200 billion	100%	-	5 tahun
15-Des-23	CIA First International School Co. Ltd	Kamboja	KHR41.25 billion	100%	khAAA (RAC)	5 tahun
14-Des-23	A&A Green Phoenix Group Joint Stock Company	Vietnam	VND600 billion	100%	-	7 tahun
14-Des-23	A&A Green Phoenix Group Joint Stock Company	Vietnam	VND300 billion	100%	-	7 tahun
8-Des-23	PT Adhi Commuter Properti Tbk	Indonesia	IDR15.7 billion	100%	AAA (Pefindo)	3 tahun
8-Des-23	PT Adhi Commuter Properti Tbk	Indonesia	IDR484.2 billion	100%	AAA (Pefindo)	5 tahun
22-Nov-23	Yoma Strategic Holdings Ltd	Thailand	THB 1.275 billion	100%	AAA (Tris Rating)	3 tahun
22-Nov-23	Yoma Strategic Holdings Ltd	Thailand	THB 425 million	100%	AAA (Tris Rating)	5 tahun
02-Nov-23	INTI Universal Holdings Sdn Bhd	Malaysia	MYR165 million	100%	AAA (RAM)	5 tahun
24-Agt-23	Erajaya Digital Pte Ltd.	Singapura	SGD50 million	100%	AA (S&P)	3 tahun
23-Jun-23	Apeiron Agrocommodities Pte Ltd.	Singapura	SGD50 million	100%	AA (S&P)	5 tahun
19-Apr- 23	China Education Group Holdings Limited	Singapura	Offshore Renminbi (CNY) 500 million	100%	AA (S&P)	3 tahun
27-Jan-23	SNC Former Public Company Limited	Thailand	THB1 billion	100%	AAA (Tris Rating)	5 tahun
7-Apr-22	First Real Estate Investment Trust	Singapura	SGD100 million	100%	AA (S&P)	5 tahun
4-Mar-22	PT Polytama Propindo	Indonesia	Rp 110.25 billion**	100%	AAA (Pefindo)	5 tahun
1-Des-21	SCGJWD Logistics Public Company	Thailand	THB 1.2 billion	100%	AAA (Fitch)	9 tahun

Tanggal Penerbitan	Nama Emiten	Negara Penerbitan	Nilai Penerbitan[1]	% Penanggungan oleh CGIF	Peringkat Instrumen	Tenor
	Limited[2]					
11-Nov-21	Thaifoods Group Public Company Limited	Thailand	THB 1 billion	100%	AAA (TRIS)	5 tahun
8-Sep-21	PT Polytama Propindo	Indonesia	Rp 223 billion	100%	AAA (Pefindo)	5 tahun
8-Sep-21	PT Polytama Propindo	Indonesia	Rp 56 billion**	100%	AAA (Pefindo)	5 tahun
25-Agt-21	Telcotech Ltd	Kamboja	KHR 80 billion	100%	-	5 tahun
5 – Mar - 21	SCGJWD Logistics Public Company Limited	Thailand	THB700 million	100%	AAA (Fitch Thailand)	10 tahun
8-Jan-21	PT Ketrosden Triasmitra	Indonesia	IDR 168 billion	100%	AAA (Pefindo)	5 tahun
24-Des-20	GLP Pte. Ltd.	Jepang	JPY15.4 billion	100%	AA (S&P)	9 tahun
10-Jan-20	Energy Absolute Public company Limited	Thailand	THB 3.0 billion	50% (risk participation with ADB)	A (Tris Rating)	7 tahun
31-Des-19	GELEX Group Joint Stock Company	Vietnam	VND 1.15 trillion	100%	-	10 tahun
24-Des-19	Hong Phong 1 Energy JSC	Vietnam	VND 2.15 trillion	100%	-	15 tahun
3-Des-19	Nexus International School (Singapore) Pte Ltd	Singapura	SGD 150 million	100%	AA (S&P)	12 tahun
28-Jan-19	Refrigeration Electrical Engineering Corporation	Vietnam	VND 2.318 trillion	100%	Unrated	10 tahun
5-Okt-18	Hoan My Medical Corporation	Vietnam	VND 1.4 trillion	100%	-	7 tahun
18-Feb-16	Vingroup Joint Stock Company	Vietnam	VND 1.05 trillion	100%	-	10 tahun
7-Okt-15	IVL Singapore Pte. Ltd., a subsidiary of Indorama Ventures Public Company Limited	Singapura	SGD 195 million	100%	AA (S&P)	10 tahun

Catatan:

(1) IDR mengacu pada Rupiah Indonesia, PHP mengacu pada Peso Filipina, SGD mengacu pada dolar Singapura, THB mengacu pada Baht Thailand, VND mengacu pada Dong Vietnam, KHR mengacu pada Riel Kamboja, JPY mengacu pada Yen Jepang, CNY mengacu pada Renminbi Luar Negeri, dan MYR mengacu pada Ringgit Malaysia.

(2) Perubahan penerbit obligasi dari JWD InfoLogistics Public Company Limited menjadi SCGJWD Logistics Public Company Limited efektif tanggal 14 Februari 2023.

*(3) *Perubahan penerbit obligasi dari Protelindo Finance B.V. menjadi PT Professional Telekomunikasi Indonesia efektif tanggal 3 Agustus 2016.*

*(4) **Mengacu pada penerbitan sukuk ijarah.*

3. PENGURUS DAN PENGAWASAN

CGIF memiliki struktur tata kelola dan pengawasan yang terdiri atas: (i) Pertemuan Para Kontributor (*Meeting of Contributors*); (ii) Direksi (*Board of Directors*); and (iii) Komite Direksi (Komite Audit, Komite Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi). Pertemuan Para Kontributor adalah badan pengambil keputusan tertinggi di CGIF.

Direksi adalah badan pengambil keputusan tertinggi kedua CGIF dan bukan sebuah badan eksekutif. Direksi bertanggung jawab dan melaporkan kepada Pertemuan Para Kontributor tentang kegiatan dankinerja dari manajemen dan CGIF.

Direksi CGIF terdiri dari delapan (8) anggota yang ditentukan oleh Kontributor, termasuk *Chief Executive Officer*. Republik Rakyat Tiongkok dan Jepang masing-masing berhak mencalonkan dua Direktur. Republik Korea berhak mengangkat seorang Direktur. ADB, dan negara-negara ASEAN yang mewakili Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, masing-masing berhak mencalonkan satu Direktur.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, komposisi Direksi CGIF adalah sebagai berikut:

Nama Anggota Direksi	Kontributor yang Diwakili
Ms. Shuo Zhang	Republik Rakyat Tiongkok
Ms. Minweng Zhang	Republik Rakyat Tiongkok
Ms. Kazuko Sakuma (Chairperson)	Jepang
Mr. Shunichi Takenaka	Jepang
Mr. Sang Hun Kim	Korea Selatan
Mr. Shum Jin-Chyi Kevin	ASEAN: Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam
Mr. Craig Roberts	Asian Development Bank
Mr. Hongwei Wang	Manajemen CGIF

CGIF dipimpin oleh tim manajemen yang direkrut secara internasional dengan pengalaman dalam kegiatan perbankan untuk pengembangan, manajemen risiko, dan penilaian kredit melalui posisi senior di Export- Import Bank of China, Asian Development Bank, DB, Mitsubishi UFJ Financial Group, Bank of the Philippines Islands, Danajamin Nasional Berhad, Hong Leong Bank Berhad, Standard Chartered Bank, Citibank, Citigroup, Inc. dan Societe Generale.

Wewenang pengambilan keputusan eksekutif, dan pengelolaan CGIF sehari-hari diamanatkan kepada *Chief Executive Officer*. Selaku perwakilan resmi CGIF, *Chief Executive Offic*er direkomendasikan oleh Direksi dan disetujui oleh Rapat Kontributor. *Chief Executive Officer* memimpin tim manajemen yang saat ini terdiri *dari Deputy CEO/Chief Risk Officer, Chief Credit-risk Officer, Vice President Operations, Chief Financial Officer, General Counsel & Board Secretary, Corporate Planner and Head of Budget, Planning, Personnel and Management System (BPPMS)* dan *Internal Auditor*.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, komposisi Pejabat Eksekutif CGIF adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Mr. Hongwei Wang	Ketua Pejabat Eksekutif/*Chief Executive Officer*
Mr. Mitsuhiro Yamawaki	Deputy *Chief Executive Officer/ Chief Risk Officer*
Mr. Aarne Dimanlig	*Chief Credit-risk Officer*
Mr. Gene Soon Park	*General Counsel and Board Secretary*
Mr. Hou Hock Lim	*Corporate Planner and Head of Budget, Planning, Personnel and Management Systems (BPPMS)*
Ms. Jackie Jeong-Ae Bang	*Internal Auditor*
Mr. Dong Woo Rhee	*Chief Financial Officer*
Mr. Anuj Awasthi	*Vice President Operations*

4. PROFIL KREDIT

CGIF telah meraih peringkat idAAA oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dan telah diperingkat oleh lembaga pemeringkat efek lainnya dalam skala domestik dan internasional. Pada tanggal 14 Agustus 2024, Pefindo menetapkan peringkat kekuatan finansial “idAAA” kepada CGIF. Prospek dari peringkat CGIF adalah “stabil“.

Lembaga Pemeringkat	Skala	Peringkat	*Outlook*	Periode Waktu
Standard & Poor's ("**S&P**")	Global Jangka Panjang/Jangka Pendek	AA/A-1+	*Stable*	27-Feb-25
RAM Ratings	Nasional	AAA	*Stable*	13-Des-24
TRIS Ratings	Nasional	AAA	*Stable*	20-Nov-24
Fitch Ratings Indonesia	Nasional	AAA	*Stable*	16-Des-24
Pefindo Credit Rating Agency	Nasional	idAAA	*Stable*	14-Agus-24

Perusahaan pemberi penjaminan dengan peringkat idAAA memiliki karakteristik keamanan keuangan yang superior relatif terhadap perusahaan lainnya di Indonesia. idAAA adalah peringkat tertinggi atas kekuatan keuangan perusahaan pemberi penjaminan yang diberikan oleh Pefindo.

Peringkat mencerminkan dukungan yang kuat dari pemegang saham CGIF, mandat yang penting dalam mengembangkan pasar obligasi regional, profil permodalan yang superior, likuiditas dan fleksibilitas keuangan yang superior, dan kriteria underwriting yang konservatif. Peringkat dibatasi oleh performa operasional yang moderat.

Peringkat dapat diturunkan jika terdapat bukti CGIF kehilangan atau mendapatkan penurunan yang signifikan atas mandat yang diterima dalam pengembangan pasar obligasi. Penurunan dukungan yang materiil dari pemegang saham juga dapat memberikan tekanan pada peringkat perusahaan. Peringkat juga dapat diturunkan jika terjadi pemburukan yang signifikan pada performa keuangan, yang dapat mempengaruhi keinginan pemegang saham untuk tidak memberikan suntikan modal. Namun, Pefindo menganggap skenario ini sangat kecil kemungkinan terjadi di masa yang akan datang.

5. PERIZINAN

Di dalam menjalankan kegiatan usahanya, CGIF memiliki izin berdasarkan akta pendiriannya. Secara khusus, di dalam konteks Indonesia, kegiatan pemberian penanggungan/Kafalah yang dilakukan oleh CGIF adalah berdasarkan Perpres 23 Tahun 2017.

6. SENGKETA

Pada tanggal Prospektus ini, CGIF tidak sedang memiliki sengketa dengan pihak manapun.

7. TUGAS POKOK PENANGGUNG

Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Penanggungan Obligasi dan Sukuk Ijarah, CGIF bertanggung jawab untuk membayar suatu Jumlah Yang Dijamin sehubungan dengan Tranche Yang Ditanggung (*Guaranteed Tranche*) kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagai pihak yang dijamin berdasarkan permintaan pembayaran dari Wali Amanat.

8. PENUNJUKAN, KEBERLAKUAN PENANGGUNGAN DAN KAFALAH, PENGGANTIAN DAN BERAKHIRNYA TUGAS PENANGGUNG

Penunjukkan

Penunjukan CGIF sebagai penanggung dibuat berdasarkan Perjanjian Penanggungan Obligasi dan Akad Kafalah Sukuk Ijarah.

Penganggungan sehubungan dengan suatu Tahap Yang Ditanggung akan efektif sejak tanggal pertama di mana kedua:

(i) Tanggal Emisi Obligasi sehubungan dengan Tahap Yang Ditanggung tersebut terjadi; dan
(ii) CGIF telah menerbitkan sertifikat CGIF sehubungan dengan Tahap Yang Ditanggung tersebut

Keberlakuan Penanggungan dan Kafalah serta berakhirnya keberlakuan Penanggungan dan Kafalah.

Penanggungan sehubungan dengan suatu Tahap Yang Ditanggung akan efektif sejak tanggal di mana kedua: (i) Tanggal Emisi Obligasi sehubungan dengan Tahap Yang Ditanggung tersebut telah terjadi, dan (ii) CGIF telah menerbitkan sertifikat CGIF sehubungan dengan Tahap Yang Ditanggung tersebut.

Penanggungan/ Kafalah akan selesai pada mana yang lebih awal dari: (i) tanggal di mana seluruh Jumlah Yang Dijamin telah dibayar, dilunasi atau dibayar lebih awal secara penuh, atau kewajiban pembayaran Perseroan sehubungan dengan seluruh Jumlah Yang Dijamin telah dilepaskan atau dibebaskan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Sukuk Ijarah atau pengaturan lainnya antara Perseroan dan Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah; (ii) tanggal pelunasan pokok, penetapan atau pembatalan Obligasi dan Sukuk Ijarah; (iii) terjadinya Peristiwa Gagal Bayar, penutupan hari kerja pada hari terakhir Periode Klaim; (iv) tanggal saat Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah Yang Ditanggung melakukan Langkap Percepatan selain sehubungan dengan Peristiwa Gagal Bayar CGIF; (v) tanggal saat Obligasi dan Sukuk Ijarah menjadi harus dibayarkan berdasarkan Syarat dan Ketentuan Obligasi dan Sukuk Ijarah karena alasan percepatan yang diakibatkan oleh Perseroan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Obligasi dan Sukuk Ijarah; dan (vi) tanggal efektif dari salah satu pengakhiran Perjanjian Penanggungan dan Akad Kafalah.

Pembayaran oleh CGIF atas Jumlah Yang Dijamin setelah permintaan pembayaran dari Wali Amanat akan melepaskan kewajiban pembayaran CGIF sejauh pembayaran telah dilakukan.

Penggantian atau pengalihan

CGIF tidak dapat melakukan pengalihan kewajibannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah Yang Ditanggung, namun CGIF mengalihkan atau mentransfer hak-haknya dan keuntungan-keuntungannya berdasarkan Perjanjian Penanggungan dan Akad Kafalah tanpa persetujuan Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah Yang Ditanggung atau pihak lain mana pun.

9. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING PENANGGUNG

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting CGIF, yang angka-angkanya diambil dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan CGIF pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2024, yang telah diaudit oleh Deloitte & Touche LLP (Singapura) sesuai dengan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS).

Laporan Keuangan Independen dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2024 dari CGIF tersedia di situs *web: http://www.cgifabmi.org/investors/financial-statements.*

Audited Financial Statement for the Years ended 31 December 2024 and 2023

Statement of Financial Position Summary

	As at 31 December	
	2024	2023
	(in thousands of U.S. dollars)	
Statement of Financial Position:		
Assets:		
Cash	6,622	5,811
Investments	1,308,336	1,261,641
Accrued interest income	10,240	9,166
Guarantee fee receivable, net	71,121	54,724
Guarantee receivable, net	74,900	54,087
Other assets, net	3,288	1,987
Total assets	**1,474,507**	**1,387,416**
Liabilities and Member's equity:		
Guarantee liability, net	95,491	65,081

	As at 31 December	
	2024	2023
	(in thousands of U.S. dollars)	
Other liabilities	23,609	19,868
Total liabilities	**119,100**	**84,949**
Member's equity:		
Capital stock (Paid-in capital)	1,158,000	1,158,000
Accumulated other comprehensive income:		
Investment revaluation reserve	(48,562)	(52,608)
Reserves & retained earnings	245,969	197,075
Total member's equity	**1,355,407**	**1,302,467**
Total liabilities and members' equity	**1,474,507**	**1,387,416**

Statement of Net Income and Comprehensive Income Summary

	For the years ended 31 December	
	2024	2023
	(in thousands of U.S. dollars)	
Statement of Net Income:		
Guarantee fees	22,739	20,535
Interest income	43,794	37,451
Miscellaneous income	2,544	511
Total revenue	69,077	58,497
Total expenses	(19,543)	(13,582)
Net operating income	49,534	44,915
Loss from foreign exchange	(640)	(923)
Net income	48,894	43,992
Statement of Comprehensive Income:		
Net unrealised gain on investments measured at FVTOCI	4,046	26,142
Total comprehensive income	**52,940**	**70,134**

Statement of Cash Flow Summary

	For the years ended 31 December	
	2024	2023
	(in thousands of U.S. dollars)	
Statement of Cash Flow:		
Net cash flows from operating activities	6,396	8,530
Net cash flows from investing activities	(5,385)	(20,968)
Net cash flows from financing activities	(134)	8,927
Effect of exchange rate changes on cash	(66)	(20)
Net cash movement	811	(3,531)
Cash at beginning of period	5,811	9,342
Cash at end of period	**6,622**	**5,811**

Semua informasi tentang Penanggung pada bagian ini disediakan oleh CGIF. Informasi mengenai Perseroan yang tercantum dalam Prospektus ini belum diverifikasi oleh Penanggung. Baik Penanggung, pengurus maupun karyawannya tidak bertanggung jawab, baik tersurat maupun tersirat, atas segala informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, selain informasi yang terdapat dalam Bagian yang berjudul "Keterangan tentang Penanggung". Selain itu, tidak satu pun dari pihak-pihak tersebut di atas yang melakukan tindakan apa pun untuk memverifikasi keakuratan informasi apa pun yang tercantum dalam Prospektus ini, selain informasi yang terdapat dalam Bagian ini yang berjudul "Keterangan tentang Penanggung", dan tidak ada pernyataan atau jaminan, baik secara tegas maupun tersirat, dibuat oleh pihak-pihak tersebut mengenai kebenaran atau kelengkapan informasi yang terkandung dalam Prospektus ini.

Alamat penanggung adalah sebagai berikut:

Credit Guarantee and Investment Facility,
a trust fund of the Asian Development Bank
Asian Development Bank Building
6 ADB Avenue, Mandaluyong City 1550 Metro Manila
Tel. +63 2 5322 7660
Fax. +63 2 5322 7661
Website: http://www.cgif-abmi.org/

XIV. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing di manapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga atau badan usaha Indonesia ataupun asing di manapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi dan Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat, kecuali pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan Bursa Efek yang berlaku di negara atau yurisdiksi di luar wilayah Indonesia tersebut.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah

Proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Prospektus. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("**FPPO**") dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah ("**FPPSI**") dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum pada Bab XIV Prospektus mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah. Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dilakukan dengan menggunakan FPPO atau FPPSI yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Efek yang dapat diperoleh *softcopy*-nya melalui email terlebih dahulu sesuai ketentuan Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah. Setelah FPPO atau FPPSI ditandatangani oleh pemesan, *scan* FPPO atau FPPSI tersebut wajib disampaikan kembali melalui email atau faksimili dan aslinya dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Pelaksana Emisi. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah

Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2025 pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Ijarah Ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah Di KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut di KSEI, maka atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah. Obligasi dan Sukuk Ijarah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi dan Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya Tanggal Emisi.
b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek.
c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening.
d. Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah yang berhak atas pembayaran bunga dan Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah, memberikan suara dalam RUPO dan RUPSI serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan Sukuk Ijarah.

e. Pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran bunga maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran bunga dan Cicilan Imbalan Ijarah serta pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi atau Sukuk Ijarah yang berhak atas bunga Dan Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Rekening yang memiliki Obligasi atau Sukuk Ijarah pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga (P-4).
f. Hak untuk menghadiri RUPO atau RUPSI dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi atau Sukuk Ijarah dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO atau RUPSI adalah Pemegang Obligasi atau Sukuk Ijarah di Rekening Efek pada Hari Kerja ketiga sebelum pelaksanaan RUPO atau RUPSI (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO atau Sukuk Ijarah, seluruh Obligasi atau Sukuk Ijarah di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi atau Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO atau RUPSI akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO atau RUPSI.
g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi atau Sukuk Ijarah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah

Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dengan mengajukan FPPO dan FPPSI selama jam kerja yang umum berlaku melalui email kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dimana pemesan memperoleh FPPO dan/atau FPPSI.

Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah serta Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah apabila FPPO dan/atau FPPSI tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian Sukuk Ijarahnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah

Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang menerima pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan dari FPPO dan/atau FPPSI yang telah ditandatangani sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi dan Sukuk Ijarah

Dalam melakukan penjatahan, Manajer Penjatahan akan melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing sedangkan kebijakannya akan ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Perseroan. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini, baik secara langsung maupun tidak

langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. Tanggal penjatahan adalah tanggal 20 Juni 2025. Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT Bahana Sekuritas.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah

Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah selambat-lambatnya 23 Juni 2025 kecuali Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran yang ditujukan pada rekening di bawah ini:

Obligasi:

PT MNC Sekuritas (Terafiliasi)	**PT Bahana Sekuritas**	**PT Mandiri Sekuritas**
Bank MNC Internasional Cabang Kebon Sirih No. Rekening: 100010000108611 a.n.: PT MNC Sekuritas	Bank CIMB Niaga Cabang Graha CIMB Niaga No. Rekening: 800029698900 a.n.: PT. Bahana Sekuritas	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Sudirman No. Rekening: 1020005566028 a.n.: PT Mandiri Sekuritas
PT CIMB Niaga Sekuritas	**PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia**	**PT KB Valbury Sekuritas**
Bank CIMB Niaga Cabang Graha CIMB Niaga No. Rekening: 800163442600 a.n.: PT CIMB Niaga Sekuritas	PT Bank Central Asia Tbk Cabang KCU SCBD No. Rekening: 0067875153 a.n.: PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia	PT Bank Central Asia Tbk Cabang Kuningan No. Rekening: 217 313 0554 a.n.: PT KB Valbury Sekuritas

Sukuk Ijarah:

PT MNC Sekuritas (Terafiliasi)	**PT Bahana Sekuritas**	**PT Mandiri Sekuritas**
Bank Syariah Indonesia Cabang Pembantu Kementerian BUMN No. Rekening: 1056423857 a.n.: PT MNC Sekuritas	Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Victoria No. Rekening: 860002080100 a.n: PT. Bahana Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang Arteri Pondok Indah Jakarta No. Rekening: 00971134003 a.n.: PT Mandiri Sekuritas
PT Maybank Sekuritas Indonesia	**PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia**	**PT KB Valbury Sekuritas**
PT Bank Maybank Indonesia Unit Usaha Syariah Cabang Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 2739 000 019 a.n.: PT Maybank Sekuritas Indonesia	PT Bank BCA Syariah Cabang Jatinegara No. Rekening: 0018818898 a.n.: PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia	KB Bank Syariah Cabang Melawai No. Rekening: 8800981019 a.n.: PT KB Valbury Sekuritas

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek dan bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 23 Juni 2025 (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas.

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan KSEI.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dan Sukuk Ijarah dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang bersangkutan.

11. Penundaan Atau Pembatalan Penawaran Umum

a. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

   1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu:
      i) Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
      ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
      iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No.IX.A.2 lampiran 11; dan

   2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
      i) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
      ii) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
      iii) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
      iv) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

i. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1 poin i), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
ii. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1 poin i), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
iii. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
iv. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. Pengembalian Uang Pemesanan

a. Dalam hal pemesanan ditolak sebagian atau seluruhnya, jika Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah telah menerima uang pemesanan, maka wajib mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan.
b. Dalam hal Pencatatan Obligasi dan Sukuk di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Obligasi dan Sukuk Ijarah batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum.

Jika terjadi keterlambatan, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan/ atau Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda/ kompensasi kerugian untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) diatas tingkat Bunga Obligasi/ ekuivalen tingkat Cicilan Imbalan Ijarah per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda/ kompensasi kerugian tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda/ kompensasi kerugian dikenakan pada hari kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan atau sejak tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan.

Pengembalian uang dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dan bukti jati diri. Apabila uang pemesanan telah diterima Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah sudah disediakan, namun pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Penjatahan atau sejak tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut, maka Emiten/ Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Ijarah.

13. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dapat diperoleh tanggal 19 Juni 2025 pada kantor atau melalui *email* para Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT MNC Sekuritas (Terafiliasi)

MNC Bank Tower Lantai 16
Jl. Kebon Sirih No.21 – 27
Jakarta 10340
Tel. (021) 2980 3111
Fax. (021) 3983 6868
www.mncsekuritas.id
email: ib.mncs@mncgroup.com

PT Bahana Sekuritas

Graha CIMB Niaga Lantai 19
Jl Jendral Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telepon: (021) 250 5081
Faksimili: (021) 522 5869
www.bahanasekuritas.id
email: bs_ibcm@bahana.co.id

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I, Lantai 24 -25
Jl. Jend Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telp.: +62 21 526 3445
Faks.: +62 21 526 3521
www.mandirisekuritas.co.id
Email: divisi-fi@mandirisekuritas.co.id

PT CIMB Niaga Sekuritas

Graha CIMB Niaga Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telp.: (+6221) 5084 7847
www.cns.co.id
Email: jk.dcmproject@cimbniaga-ibk.co.id

PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia

Equity Tower Lt. 9 & 22
Suite A7E, SCBD Lot 9
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel.: +62 21 2991 1888
www.kisi.co.id
Email: fixedincome@kisi.co.id

PT KB Valbury Sekuritas

Sahid Sudirman Center Lantai 41
Jl. Jenderal Sudirman No. 86
Jakarta 10220
Tel. (021) 2509 8300
Fax. (021) 2509 8400
Email: dcm.ib@kbvalbury.com

PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH

PT MNC Sekuritas (Terafiliasi)

MNC Bank Tower Lantai 16
Jl. Kebon Sirih No.21 – 27
Jakarta 10340
Tel. (021) 2980 3111
Fax. (021) 3983 6868
www.mncsekuritas.id
email: ib.mncs@mncgroup.com

PT Bahana Sekuritas

Graha CIMB Niaga Lantai 19
Jl Jendral Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telepon: (021) 250 5081
Faksimili: (021) 522 5869
www.bahanasekuritas.id
email: bs_ibcm@bahana.co.id

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I, Lantai 24 -25
Jl. Jend Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telp.: +62 21 526 3445
Faks.: +62 21 526 3521
www.mandirisekuritas.co.id
Email: divisi-fi@mandirisekuritas.co.id

PT KB Valbury Sekuritas

Sahid Sudirman Center Lantai 41
Jl. Jenderal Sudirman No. 86
Jakarta 10220
Tel. (021) 2509 8300
Fax. (021) 2509 8400
Email: dcm.ib@kbvalbury.com

PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia

Equity Tower Lt. 9 & 22
Suite A7E, SCBD Lot 9
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel.: +62 21 2991 1888
www.kisi.co.id
Email: fixedincome@kisi.co.id

PENJAMIN EMISI SUKUK IJARAH

PT Maybank Sekuritas Indonesia

Sentral Senayan III, Lantai 22
Jl. Asia Afrika No. 8
Gelora Bung Karno
Senayan, Jakarta 10270
Tel.: +6221 8066 8500
www.maybank-ke.co.id
Email:
fixedincome.indonesia@maybank.com

XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Jusuf Indradewa & Partners
Legal Consultant
ISO 9001: 2015
No. FS 689855

Menara BCA, Grand Indonesia Lt.50
Jl. MH. Thamrin No.1, Jakarta Pusat
Indonesia, 10310
Phone: (021) 58903993
Email : jip@jusufind.com
: marketing@jusufind.id
Web. : http://www.jusufind.com

No. : 011-R8/CS-SG-DA-MJ-AL/II-G/VI/2025

Jakarta, 18 Juni 2025

Kepada Yang Terhormat,
PT GLOBAL MEDIACOM Tbk
MNC Tower Lantai 27
Jalan Kebon Sirih No. 17-19
Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng
Kota Jakarta Pusat

Perihal: **Pendapat Dari Segi Hukum Terhadap PT Global Mediacom Tbk dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan "Obligasi Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025" dan "Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025".**

PT Global Mediacom Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, MNC Tower Lantai 27, Jalan Kebon Sirih No. 17-19, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng bermaksud untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan **"Obligasi Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025"** dan **"Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025"**, yang terdiri dari:

1. **Obligasi Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 dengan nilai Pokok Obligasi sebesar Rp850.000.000.000,00 (delapan ratus lima puluh miliar Rupiah)**, yang merupakan sebagian dari jumlah keseluruhan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp.1.750.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari:

   a. Seri A **:** Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp.279.350.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,60% (tujuh koma enam puluh persen) per tahun, jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi;

   b. Seri B **:** Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp.480.600.000.000,00 (empat ratus delapan puluh miliar enam ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,85% (tujuh koma delapan puluh lima persen) per tahun, jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi;

   c. Seri C **:** Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp.90.050.000.000,00 (sembilan puluh miliar lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,90% (tujuh koma sembilan puluh persen) per tahun, jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi;

2. **Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 dengan nilai Sukuk Ijarah sebesar Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar Rupiah)**, yang merupakan sebagian dari jumlah keseluruhan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp.1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari:

a. Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A yang ditawarkan sebesar Rp434.990.000.000,00 (empat ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp33.059.240.000,00 (tiga puluh tiga miliar lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah) per tahun, jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi;

b. Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B yang ditawarkan sebesar Rp89.010.000.000,00 (delapan puluh sembilan miliar sepuluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp6.987.285.000,00 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) per tahun, jangka waktu Sukuk Ijarah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi;

c. Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C yang ditawarkan sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp2.054.000.000,00 (dua miliar lima puluh empat juta Rupiah) per tahun, jangka waktu Sukuk Ijarah 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi;

Satuan pemindahbukuan sebesar Rp.1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya, dan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yaitu *idAAAcg* (*Triple A, Corporate Guarantee*) untuk Obligasi berdasarkan Surat Pefindo No.RC-399/PEF-DIR/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 dan *idAAAcg* (*sy*) (*Triple A, Corporate Guarantee Syariah*) untuk Sukuk Ijarah berdasarkan Surat Pefindo No.RC-400/PEF-DIR/III/2025 tanggal 24 Maret 2025. Pemeringkatan tersebut telah mencakup keseluruhan nilai Pokok Obligasi yang direncanakan yaitu sebesar Rp.1.750.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dan mencakup keseluruhan nilai Sukuk Ijarah yang direncanakan yaitu sebesar Rp.1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah), sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 12 POJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020. Obligasi dan Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan kebendaan khusus dari Perseroan.

Dalam PUB V Tahap I ini atas permohonan Perseroan, Credit Guarantee and Investment Facility, Lembaga Dana Perwaliamanatan (Trust Fund) dari Asian Development Bank ("**CGIF**") telah menyetujui untuk bertindak sebagai Penanggung (Guarantor). CGIF dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("**BRI**") selaku Wali Amanat dalam PUB V Tahap I telah membuat dan menandatangani Perjanjian Penanggungan tanggal 26 Maret 2025 ***Jis.*** Perubahan Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penanggungan tanggal 29 April 2025 dan Perubahan Dan Pernyataan Kembali Kedua Perjanjian Penanggungan tanggal 13 Juni 2025, yang dibuat dibawah tangan.

Sehubungan dengan maksud Perseroan untuk melakukan PUB V Tahap I tersebut, kami, Konsultan Hukum Jusuf Indradewa & Partners, selaku konsultan hukum independen dalam hal ini diwakili oleh Cecilia Teguh Ayu Sianawati, S.H., dengan STTD.KH-21/PJ-1/PM.02/2023, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Perseroan No.002-KH/MCOM-CL/II/2025 tanggal 05 Februari 2025, untuk melakukan Uji Tuntas Dari Segi Hukum ("**Uji Tuntas**") yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum dan memberikan Pendapat Dari Segi Hukum ("**Pendapat Hukum**") mengenai aspek-aspek hukum dari Perseroan dan aspek hukum dari PUB V Tahap I ini sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai Pasar Modal dan dengan berpedoman pada Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (dahulu dikenal dengan nama Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal atau HKHPM) ("**HKHSK**") Lampiran Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami mendasarkan sepenuhnya pada hasil Uji Tuntas sebagaimana tertuang dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum No.010-R8/CS-SG-DA-MJ-AL/II-H/VI/2025 tanggal 18 Juni 2025 (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Laporan Uji Tuntas**").

Dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini maka Pendapat Hukum No.011-R7/CS-SG-DA-MJ-AL/II-G/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025 menjadi tidak berlaku lagi.

Asumsi

Dalam menjalankan Uji Tuntas untuk kepentingan Pendapat Hukum ini kami menganggap dan mendasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya, maka fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai dengan aslinya.
2. Tanda tangan yang terdapat pada suatu dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami, baik asli maupun fotokopinya atau salinannya, adalah tanda tangan otentik dari pihak-pihak yang disebutkan dalam dokumen itu dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
3. Pihak-pihak yang menandatangani dokumen-dokumen milik pihak ketiga yang tidak termasuk dalam lingkup Uji Tuntas kami mempunyai dan telah memperoleh kewenangan untuk menandatangani dokumen tersebut.
4. Dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan, baik tertulis ataupun lisan, yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan atau pihak ketiga kepada kami adalah benar, akurat, dan sesuai dengan keadaan sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan dikeluarkannya Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum ini.
5. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian-perjanjian dengan Perseroan, atau para Pejabat Pemerintah yang mengeluarkan surat-surat keterangan atau perijinan kepada Perseroan, berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut.

Kualifikasi

Pendapat Hukum yang didasarkan pada Laporan Uji Tuntas diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia dan tidak berkenaan atau ditafsirkan menurut hukum atau yuridiksi negara lain dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum dibuat sesuai dengan prinsip keterbukaan dan berdasarkan data-data, dokumen-dokumen dan informasi-informasi yang kami peroleh, sebagaimana layaknya konsultan hukum yang bebas dan tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan.
2. Dalam hal terdapat kemungkinan mengenai adanya fakta-fakta, data-data, dokumen-dokumen atau informasi-informasi yang tidak kami ketahui tidak mengakibatkan Pendapat Hukum menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.
3. Pendapat Hukum secara tegas hanya meliputi aspek hukum yang disebutkan didalamnya dan tidak meliputi aspek-aspek lainnya yang mungkin secara implisit dianggap termasuk di dalamnya.
4. Pendapat Hukum ini hanya memuat aspek pendapat dari segi hukum saja, mengingat pemeriksaan hukum telah termuat dalam Laporan Uji Tuntas yang dijadikan sebagai dasar pembuatan Pendapat Hukum.
5. Pendapat Hukum ditujukan semata-mata dalam rangka PUB V Tahap I dan tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum independen atas Pendapat Hukum kami adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Uji Tuntas terhadap dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam Laporan Uji Tuntas dan asumsi-asumsi dan kualifikasi-kualifikasi yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, maka dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum kami sebagai berikut :

1. Perseroan, yang berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan secara sah dan dijalankan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Perseroan didirikan di Jakarta dengan nama PT Bimantara Citra berdasarkan Akta Pendirian No. 60 tanggal 30 Juni 1981 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 81 tanggal 29 Januari 1982, keduanya dibuat di hadapan Lukman Kirana, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian**"), yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Y.A 5/84/22 tanggal 22 Mei 1982, didaftarkan dalam buku register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 28 Mei 1982, masing-masing dibawah No. 1883 dan No. 1884 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 54 tanggal 5 Juli 1985, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia di bawah No. 912.

   Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami perubahan-perubahan sebagaimana tercantum dalam Laporan Uji Tuntas.

3. Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku saat ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

4. Berdasarkan Akta No. 120 Tanggal 28 Juli 2022, maksud dan tujuan Perseroan adalah industri pengolahan; pertambangan dan penggalian; informasi dan komunikasi; real estat; konstruksi; perdagangan besar dan eceran; aktivitas profesional, ilmiah dan teknis.

   Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan telah disesuaikan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI 2020") dan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kegiatan usaha yang saat ini dilakukan Perseroan adalah perdagangan, jasa dan investasi. Kegiatan usaha Perseroan tersebut berkategori risiko rendah.

5. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 51 tanggal 20 Mei 2015, dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0943978 tanggal 19 Juni 2015, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3522272.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 19 Juni 2015, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.95 tanggal 27 November 2015, Tambahan 1499/L ***Junctis*** **(i)** Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahaan Anggaran Dasar No. 21 tanggal 9 Oktober 2020, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0400965 tanggal 23 Oktober 2020, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0178814.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 23 Oktober 2020, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 45, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 019235 dan **(ii)** Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 31 Mei 2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 100,00 per saham	%
Modal Dasar	**55.750.000.000**	**5.575.000.000.000,00**	**-**
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT MNC Asia Holding Tbk	7.520.655.000	752.065.500.000,00	45,99
Drs. Lo Kheng Hong	1.067.633.500	106.763.350.000,00	6,53
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	7.764.223.586	776.422.358.600,00	47,48
Saham *Treasury*	231.485.500	23.148.550.000,00	0,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**16.583.997.586**	**1.658.399.758.600,00**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**39.166.002.414**	**3.916.600.241.400,00**	

Keterangan:

Perseroan melakukan pembelian kembali saham Perseroan melalui Bursa Efek Indonesia pada April 2020 sejumlah 231.485.500 lembar saham. Pelaksanaan pembelian Kembali dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dalam POJK No. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Jo SEOJK No. 3/SEOJK.04/2020 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik. Berdasarkan Pasal 4 POJK No. 2/POJK.04/2013, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali saham tanpa persetujuan RUPS. Dalam pelaksanaan pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan publik, serta berdasarkan ketentuan Pasal 12 POJK No. 2/POJK.04/2013, perusahaan terbuka yang masih menguasai saham hasil pembelian kembali wajib melakukan pengalihan saham tersebut dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) tahun. Namun, mempertimbangkan penurunan signifikan Indeks Harga Saham Gabungan sebagai akibat wabah Covid-19, sesuai Surat Edaran OJK No. 20 /SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 ("SEOJK No. 20/2021"), khususnya Ketentuan 10, OJK menetapkan relaksasi waktu atas kewajiban pemenuhan pengalihan saham sesuai dengan Pasal 12 POJK No. 2/POJK.04/2013. Kebijakan relaksasi ini diakhiri OJK melalui suratnya No. S-68/D.04/2023 tanggal 2 Maret 2023, yang menetapkan bahwa kebijakan tersebut berakhir pada 31 Maret 2023. Berdasarkan hasil Uji Tuntas kami, batas waktu pengalihan saham Perseroan adalah pada November 2027 sebagai akumulasi dari seluruh kondisi yang diatur dalam undang-undang.

Riwayat struktur permodalan Perseroan baik dalam 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas tidak mengalami perubahan.

6. Orang Perseorangan yang menjadi pemilik manfaat akhir (*Ultimate Beneficial Owner*/"UBO") sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No.13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres No. 13/2018**") adalah **Hary Tanoesoedibjo.** Perseroan telah melakukan pengkinian informasi UBO sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 21 Perpres No.13/2018 kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam bukti Informasi Penyampaian Data tanggal 13 Mei 2024. Harry Tanoesoedibjo sebagai UBO telah memenuhi kriteria sebagai Pemilik Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf e Perpres No.13/2018.

Pengendali Perseroan adalah PT MNC Asia Holding Tbk.

7. Susunan anggota Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama	: Hary Tanoesoedibjo
Direktur	: Ruby Panjaitan
Direktur	: Syafril Nasution
Direktur	: Christophorus Taufik Siswandi
Direktur	: Indra Pudjiastuti

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama	: Rosano Barack
Komisaris Independen	: Mohamed Idwan Ganie
Komisaris Independen	: Beti Puspitasari Santoso

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diatas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta menjabat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatan.

8. PT MNC Asia Holding Tbk (dahulu bernama PT MNC Investama Tbk) ("**BHIT**") yang didirikan dengan nama PT Bhakti Investama, sebagai Pengendali Perseroan adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan telah memperoleh ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya, yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini perijinan tersebut masih berlaku.

Anggaran Dasar BHIT telah mengalami perubahan-perubahan sebagaimana tercantum dalam Laporan Uji Tuntas dan Anggaran Dasar BHIT yang berlaku saat ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU PT dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan hasil Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan BHIT tanggal 27 Maret 2025, BHIT : (i) tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, (ii) tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (iii) tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, (iv) tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (v) tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (vi) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa dibidang persaingan usaha, (vii) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, dan (viii) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan, somasi dan/atau klaim, kecuali untuk Perkara Perdata No.142/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Februari 2025 antara PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk selaku Penggugat dengan antara lain Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo selaku Tergugat I, PT MNC Asia Holding Tbk selaku Tergugat II, yang saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Pernyataan BHIT tersebut, BHIT berkeyakinan perkara tidak akan berdampak negatif secara material terhadap kelangsungan usaha dan/atau operasional BHIT maupun rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2025 serta penggunaan dananya.

9. Pembentukan Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Komite Remunerasi dan Unit Audit Internal Perseroan, telah sesuai dengan POJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik, POJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dan POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

10. Perseroan telah memperoleh ijin-ijin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan ijin-ijin yang telah diperoleh tersebut telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perijinan Perseroan tersebut sampai dengan Pendapat Hukum ini masih berlaku dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

11. Aspek ketenagakerjaan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Perseroan telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, telah melakukan pemenuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan berdasarkan Undang-Undang No. 78 Tahun 1981, telah melaksanakan ketentuan mengenai Upah Minimum Provinsi yang berlaku pada provinsi ditempat kedudukan Perseroan berada, serta telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta ("**Disnakertrans**") dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan masih berlaku. Perseroan telah membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit ("**LKS Bipartit**") yang telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta.

12. Pada tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan tidak memiliki harta tetap berupa tanah dan/atau bangunan. Pemilikan dan/atau penguasaan harta kekayaan Perseroan baik yang berupa harta bergerak (kendaraan bermotor) maupun HAKI telah dilakukan sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku, telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah menurut hukum dan kebiasaan hukum, tidak sedang dalam sengketa, tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga manapun baik untuk kepentingan Perseroan, Perusahaan Anak maupun Perusahaan Cucu.

    Berdasarkan hasil Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 27 Maret 2025, Perseroan telah mengasuransikan aset material Perseroan dengan jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungan yang sampai dengan tanggal pendapat hukum ini masih berlaku.

13. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga maupun dengan pihak Terafiliasi yang masih berlaku telah ditandatangani secara sah oleh Perseroan, telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan karenanya mengikat Perseroan. Sehubungan dengan rencana PUB V tahap I, berdasarkan hasil Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 27 Maret 2025, Perseroan (i) tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur dan/atau pemberitahuan kepada kreditur Perseroan, kecuali dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat dalam PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II dan PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2024, dan (ii) tidak memiliki perjanjian-perjanjian yang memuat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang dapat menghambat rencana PUB V Tahap I dan/atau penggunaan dana hasil PUB V Tahap I Perseroan serta yang berpotensi merugikan hak pemegang saham publik dan pemegang Obligasi V Tahap I dan pemegang Sukuk V Tahap I.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak Terafiliasi telah dilakukan secara wajar (*arms length*) dan tidak mengandung benturan kepentingan, serta terkualifikasi sebagai Transaksi Afiliasi yang wajib dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 setelah Tanggal Transaksi sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2) POJK No.42/2020.

14. Sampai dengan Pendapat Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan hasil Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan pula dalam Surat Pernyataan Perseroan, anggota Direksi Perseroan, anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing tertanggal 27 Maret 2025, Perseroan, masing-masing Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris baik dalam kapasitas selaku anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun selaku pribadi (i) tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, (ii) tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (iii) tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, (iv) tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (v) tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (vi) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa dibidang persaingan usaha, (vii) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, dan (viii) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan, somasi dan/atau klaim, kecuali Hary Tanoesoedibjo selaku pribadi sedang menghadapi Perkara Perdata No.142/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Februari 2025 antara PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk selaku Penggugat dengan antara lain Hary Tanoesoedibjo selaku Tergugat I dan PT MNC Asia Holding Tbk selaku Tergugat II, yang saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    Berdasarkan Surat Pernyataan Hary Tanoesoedibjo tersebut, yang bersangkutan berkeyakinan perkara yang sedang dihadapi tidak akan berdampak negatif secara material terhadap kelangsungan usaha dan/atau operasional BHIT maupun rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2025 serta penggunaan dananya.

15. Dalam rangka PUB V Tahap I ini, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

    a. Perjanjian Penanggungan tanggal 26 Maret 2025 ***Jis.*** Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penanggungan tanggal 29 April 2025 dan Perubahan dan Pernyataan Kembali Kedua Perjanjian Penanggungan tanggal 13 Juni 2025, berkaitan dengan Obligasi-Obligasi dengan tingkat bunga tetap dari Tahap (-Tahap) Yang Ditanggung yang diterbitkan oleh PT Global Mediacom Tbk berdasarkan Program Obligasi sampai dengan Rp.1.750.000.000 tanggal 29 April 2025, dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Credit Guarantee and Investment Facility ("**CGIF**") selaku Penanggung dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat ("**Perjanjian Penanggungan Obligasi**").
    b. Perjanjian Penanggungan tanggal 26 Maret 2025 ***Jis.*** Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penanggungan tanggal 29 April 2025 dan Perubahan dan Pernyataan Kembali Kedua Perjanjian Penanggungan tanggal 13 Juni 2025, berkaitan dengan Sukuk Ijarah dari Tahap (-Tahap) Yang Ditanggung yang diterbitkan oleh PT Global Mediacom Tbk berdasarkan Program Sukuk sampai dengan Rp.1.250.000.000 tanggal 29 April 2025, dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Credit Guarantee and Investment Facility ("**CGIF**") selaku Penanggung dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat ("**Perjanjian Penanggungan Sukuk Ijarah**").
    c. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahun 2025 No. 62 tanggal 26 Maret 2025 ***Junctis*** Akta

Addendum Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahun 2025 No. 73 tanggal 20 Mei 2025 dan Akta Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahun 2025 No.44 tanggal 13 Juni 2025 ("**Pernyataan PUB**") oleh Perseroan selaku Emiten, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

d. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 No. 63 tanggal 26 Maret 2025 ***Junctis*** Akta Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 No. 73 tanggal 29 April 2025, Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 No. 74 tanggal 20 Mei 2025 dan Akta Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 No.45 tanggal 13 Juni 2025, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H.,Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi**").

e. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 No. 65 tanggal 26 Maret 2025 ***Junctis*** Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 No.74 tanggal 29 April 2025, Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 No.75 tanggal 20 Mei 2025 dan Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 No.46 tanggal 13 Juni 2025, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dan PT MNC Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT KB Valbury Sekuritas dan PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia masing-masing selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi**").

f. Akta Perjanjian Agen pembayaran No.60 tanggal 26 Maret 2025, oleh dan antara Perseroan selaku Penerbit Efek dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

g. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-027/OBL/KSEI/0225 tanggal 26 Maret 2025, oleh dan antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Perseroan selaku Penerbit Efek, yang dibuat dibawah tangan.

h. Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 No.47 tanggal 13 Juni 2025, oleh Perseroan selaku Emiten, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Akta Pengakuan Utang Obligasi**").

i. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 No. 64 tanggal 26 Maret 2025 ***Junctis*** Akta Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 No.75 tanggal 29 April 2025, Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 No. 76 tanggal 20 Mei 2025 dan Akta Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 No.48 tanggal 13 Juni 2025, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat Sukuk Ijarah, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah**").

j. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 No. 66 tanggal 26 Maret 2025 ***Junctis*** Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 No.76 tanggal 29 April 2025, Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 No. 77 tanggal 20 Mei 2025 dan Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 No.49 tanggal 13 Juni 2025 , oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dan PT MNC Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT KB Valbury Sekuritas,

dan PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia, masing-masing selaku Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah**").

k. Akta Perjanjian Agen pembayaran No.61 tanggal 26 Maret 2025, oleh dan antara Perseroan selaku Penerbit Efek dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

l. Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-014/SKK/KSEI/0225 tanggal 26 Maret 2025, oleh dan antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Perseroan selaku Penerbit Efek, yang dibuat dibawah tangan.

m. Akta Pengakuan Kewajiban Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 No.50 tanggal 13 Juni 2025, oleh Perseroan selaku Emiten, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Akta Pengakuan Kewajiban Sukuk Ijarah**").

n. Akad Wakalah Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 tanggal 26 Maret 2025, oleh dan antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Muwakkil dan Perseroan selaku Wakil, yang dibuat dibawah tangan ("**Akad Wakalah**").

o. Akad Ijarah Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 tanggal 26 Maret 2025, oleh dan antara PT Rajawali Citra Televisi Indonesia selaku Pihak Pertama (Pemilik Gedung Tower 2, MNC Studios) dan Perseroan selaku Pihak Kedua (Penyewa Gedung Tower 2, MNC Studios), yang dibuat dibawah tangan ("**Akad Ijarah I**").

p. Akad Ijarah Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 tanggal 26 Maret 2025, oleh dan antara Perseroan selaku Pihak Pertama dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Pihak Kedua, yang dibuat dibawah tangan ("**Akad Ijarah II**").

q. Akad Kafalah Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacim Tahap I Tahun 2025 tanggal 26 Maret 2025 ***Juncto*** Akad Kafalah Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacim Tahap I Tahun 2025 tanggal 13 Juni 2025, oleh dan antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Makful Lahu dan Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) selaku Penanggung/Kafil ("**Akad Kafalah**").

Pernyataan dan Perjanjian-perjanjian tersebut di atas seluruhnya telah dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya untuk Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah telah sesuai dengan POJK No.20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No.20/2020**").

Perjanjian Penanggungan Obligasi dan Perjanjian Penanggungan Sukuk Ijarah yang telah dibuat dan ditandatangani oleh dan antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat dan CGIF tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya POJK No.20/2020, dan akan berlaku efektif setelah tanggal diterbitkannya Obligasi dan Sukuk dan tanggal diterbitkannya Sertifikat CGIF oleh CGIF berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Penanggungan.

Perjanjian Penanggungan Obligasi dan Perjanjian Penanggungan Sukuk Ijarah tidak terkualifikasi sebagai Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK No.17/POJK.04/2020 karena nilai transaksi tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan per 31 Desember 2024 (*Audited*) dan/atau Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/POJK.04/2020 karena CGIF tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

Perseroan, PT Media Nusantara Citra Tbk ("**MNCN**"), PT MNC Vision Networks Tbk ("**IPTV**") dengan CGIF telah membuat dan menandatangani Perjanjian Penggantian Biaya dan Ganti Rugi

(*Reimbursement and Indemnity Agreement)* tanggal 16 Juni 2025 ("**RIA**"), yang mengatur antara lain kewajiban Perseroan, MNCN, IPTV masing-masing selaku Obligor untuk mengganti nilai yang ditanggung CGIF dalam hal terjadi kegagalan pembayaran oleh Perseroan dan CGIF telah melakukan pembayaran kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Penanggungan Obligasi dan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Penanggungan Sukuk Ijarah.

Berdasarkan RIA, penerbitan Sertifikat CGIF akan dilakukan setelah Perseroan memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan untuk menerbitkan Sertifikat CGIF (*Conditions Precedent*). Pemenuhan tersebut wajib dilakukan oleh Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Emisi. Namun apabila Perseroan pada batas waktu yang ditentukan belum memenuhi kondisi sebagaimana disyaratkan tersebut, CGIF tidak dapat menerbitkan Sertifikat CGIF dan Perjanjian Penanggungan menjadi batal atau tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan RIA, Perseroan akan memberikan jaminan kepada CGIF berupa Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan berupa Gedung iNews yang dimiliki oleh PT Media Nusantara Citra Tbk ("**MNCN**") dan berdiri diatas tanah Sertipikat Elektronik Hak Guna Bangunan NIB.09.01.000009478.0 dan Sertipikat Elektronik Hak Guna Bangunan NIB.09.01.000009479.0, yang keduanya terdaftar atas nama PT GLD Property, serta Fidusia atas Mesin dan Peralatan milik MNCN.

16. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, seluruh Obligasi yang diterbitkan ini dijamin dengan kesanggupan penuh *(full commitment)* oleh Penjamin Emisi Obligasi, dalam pengertian bahwa apabila masih terdapat Obligasi yang ditawarkan yang tidak habis terjual kepada Masyarakat, maka sisa Obligasi tersebut wajib dibeli sendiri oleh Penjamin Emisi Obligasi pada Tanggal Pembayaran dengan Harga Penawaran sesuai dengan Bagian Penjaminan masing-masing.

    Bahwa sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, seluruh Sukuk Ijarah yang diterbitkan ini dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh Penjamin Emisi Sukuk Ijarah, dalam pengertian bahwa apabila masih terdapat Sukuk Ijarah yang ditawarkan yang tidak habis terjual kepada Masyarakat, maka sisa Sukuk Ijarah tersebut wajib dibeli sendiri oleh Penjamin Emisi Sukuk Ijarah pada Tanggal Pembayaran dengan Harga Penawaran sesuai dengan Bagian Penjaminan masing-masing.

17. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi maka Obligasi yang dibeli kembali oleh Perseroan dengan maksud untuk pelunasan mengakibatkan hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, yaitu hak untuk menghadiri RUPO, hak suara dan hak memperoleh Bunga Obligasi.

    Bahwa sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah maka Sukuk Ijarah yang dibeli kembali oleh Perseroan dengan maksud untuk pelunasan mengakibatkan hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, yaitu hak untuk menghadiri RUPSI, hak suara dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah.

18. Dalam rangka PUB V Tahap I ini, Perseroan telah mendapatkan:

    1. Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Persetujuan Komisaris Perseroan No. 002.KepKom/MCOM-CL/II/2025 tanggal 05 Februari 2025;
    2. Persetujuan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat dalam PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II dan PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2024 sebagaimana ternyata dalam suratnya No.B.139-INV/TCS/TCB/03/2025 tanggal 14 Maret 2025, Perihal : Persetujuan Atas Penerbitan PUB V PT Global Mediacom Tahap I Tahun 2025;
    3. Persetujuan Prinsip dari Bursa Efek Indonesia berdasarkan Suratnya No. S-04662/BEI.PP2/05-2025 tanggal 16 Mei 2025, Perihal : Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dan Sukuk.

19. Perseroan dan Wali Amanat, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut dengan "**UUPM**") dan hubungan kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (3) UUPM dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.

20. Perseroan dan PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), sampai dengan Pendapat Hukum ini dikeluarkan tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

21. Antara Perseroan dengan PT Bahana Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT KB Valbury Sekuritas dan PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sedangkan antara Perseroan dengan PT MNC Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

22. Berdasarkan hasil Uji Tuntas kami sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 26 Maret 2025, Perseroan dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak pernah mengalami gagal bayar, yaitu suatu kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan terhadap kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor sebagaimana dimaksud dalam POJK No.36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**").

23. Obligasi dan Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan memiliki peringkat *idAAAcg (Triple A, Corporate Guarantee)* untuk Obligasi berdasarkan Surat Pefindo No.RC-399/PEF-DIR/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 dan *idAAAcg (sy) (Triple A, Corporate Guarantee Syariah)* untuk Sukuk Ijarah berdasarkan Surat Pefindo No.RC-400/PEF-DIR/III/2025 tanggal 24 Maret 2025. Sehingga, Efek yang diterbitkan dalam PUB V Tahap I ini telah memenuhi persyaratan Efek sebagaimana diatur dalam Pasal 5 POJK No. 36/2014, yaitu merupakan Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

24. Sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus, seluruh dana yang diperoleh dari hasil **Penawaran Umum Obligasi** ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi Obligasi, akan digunakan seluruhnya untuk :

    1. Sebesar Rp300.235.000.000,00 (tiga ratus miliar dua ratus tiga puluh lima juta Rupiah) akan digunakan seluruhnya untuk pelunasan Obligasi Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap II Tahun 2024 Seri A. Sumber dana untuk membayar bunga Obligasi adalah kas dari aktivitas usaha Perseroan.

    2. Sebesar Rp217.825.000.000,00 (dua ratus tujuh belas miliar delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah) akan digunakan seluruhnya untuk pelunasan Obligasi Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022 Seri B. Sumber dana untuk membayar bunga obligasi adalah kas dari aktivitas usaha Perseroan.

    3. Sebesar Rp1.075.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh lima juta Rupiah) akan digunakan seluruhnya untuk pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 Seri C. Sumber dana untuk membayar bunga obligasi adalah kas dari aktivitas usaha Perseroan.

4. Sebesar Rp139.160.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar seratus enam puluh juta Rupiah) akan digunakan seluruhnya untuk pelunasan Obligasi Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap II Tahun 2022 Seri B. Sumber dana untuk membayar bunga obligasi adalah kas dari aktivitas usaha Perseroan.

5. Sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta Rupiah) akan digunakan seluruhnya untuk pelunasan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 Seri C.
Sumber dana untuk membayar cicilan imbalan ijarah adalah kas dari aktivitas usaha Perseroan.

6. Sebesar Rp96.600.000.000,00 (sembilan puluh enam miliar enam ratus juta Rupiah) akan digunakan seluruhnya untuk pelunasan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap II Tahun 2022 Seri B. Sumber dana untuk membayar cicilan imbalan ijarah adalah kas dari aktivitas usaha Perseroan.

7. Sisanya setelah dikurangi dengan biaya emisi Obligasi akan digunakan seluruhnya untuk pelunasan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022 Seri B. Sumber dana untuk membayar cicilan imbalan ijarah adalah kas dari aktivitas usaha Perseroan.

Dalam hal dana hasil penawaran umum Obligasi tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan dan/atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Uraian secara rinci mengenai Obligasi dan Sukuk Ijarah yang akan dilunasi adalah sebagaimana tercantum dalam Prospektus.

Sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus, seluruh dana yang diperoleh dari hasil **Penawaran Umum Sukuk Ijarah** ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi Sukuk Ijarah, akan digunakan seluruhnya untuk :

1. Sebesar Rp381.705.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus lima juta Rupiah) akan digunakan seluruhnya untuk pelunasan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap II Tahun 2024 Seri A.

   Sumber dana untuk membayar cicilan imbalan ijarah adalah kas dari aktivitas usaha Perseroan.

2. Sisanya setelah dikurangi dengan biaya emisi Sukuk Ijarah akan digunakan seluruhnya untuk pelunasan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022 Seri B. Sumber dana untuk membayar cicilan imbalan ijarah adalah kas dari aktivitas usaha Perseroan

Dalam hal dana hasil penawaran umum Sukuk Ijarah tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan dan/atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 18/POJK.04/2015.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas sebagaimana diatur dalam POJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK**

No.30/2015"). Serta khusus untuk dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah harus ditempatkan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sesuai dengan POJK 30/2015 Perseroan berkewajiban menyampaikan realisasi penggunaan dana hasil PUB IV Tahap I secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai seluruh dana hasil PUB V Tahap I telah direalisasikan. Perseroan juga wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana tersebut secara berkala kepada pemegang saham Perseroan melalui RUPS Tahunan.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil PUB V Tahap I kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO/RUPSI dan memperoleh persetujuan dari RUPO/RUPSI, serta wajib menyampaikan hasil RUPO/RUPSI kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPO/RUPSI sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 30/2015.

Rencana penggunaan dana hasil hasil PUB V Tahap I yang akan digunakan untuk pelunasan Obligasi dan Sukuk Ijarah, tidak terkualifikasi sebagai Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**") dan POJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**").

25. Penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 ini telah mendapat Opini dari Tim Ahli Syariah Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 berdasarkan Pernyataan Kesesuaian Syariah sebagaimana tercantum dalam surat tanggal 25 Maret 2025, yang menetapkan bahwa Perjanjian dan Akad yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Utama Indonesia.

26. Perseroan memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut :

<u>Penyertaan secara langsung</u> (Perusahaan Anak) :

a. PT Media Nusantara Citra Tbk ("**MNCN**"), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan persentase kepemilikan sebesar **52,67%** (lima puluh dua koma enam puluh tujuh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh MNCN per 31 Maret 2025.

b. PT MNC Vision Networks Tbk ("**IPTV**"), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan persentase kepemilikan sebesar **63,24%** (enam puluh tiga koma dua puluh empat persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh IPTV per 31 Maret 2025.

c. PT Infokom Elektrindo ("**Infokom**"), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan persentase kepemilikan sebesar **99,99%** (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh Infokom.

d. PT MNC GS Homeshopping ("**MNC Shop**"), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan persentase kepemilikan sebesar **60%** (enam puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh MNC Shop.

e. Global Mediacom International Ltd ("**GMI**"), berkedudukan di Dubai, Uni Emirat Arab, dengan persentase kepemilikan sebesar **100%** (seratus persen) dari seluruh modal saham GMI

f. Universal Media Holding Corp ("**Universal**"), berkedudukan di Cayman Island, dengan persentase kepemilikan sebesar **100%** (seratus persen) dari seluruh modal saham Universal.

g. BMTR Media Limited ("**BML**"), berkedudukan di Hong Kong, dengan persentase kepemilikan sebesar **81,06%** (delapan puluh satu koma nol enam persen) dari seluruh modal saham BML.

h. BMTR Digital Limited ("**BDL**"), berkedudukan di Hong Kong, dengan persentase kepemilikan sebesar **81,06**% (delapan puluh satu koma nol enam persen) dari seluruh modal saham BDL.

i. PT MNC Digital Entertainment Indonesia Tbk ("**MSIN**"), berkedudukan di Jakarta Barat, dengan persentase kepemilikan sebesar 5,11% (lima koma sebelas persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh MSIN per 28 Februari 2025 (**Perusahaan Asosiasi**). Dimana saham MSIN yang dimiliki oleh Perseroan ini sedang dijaminkan dengan jaminan gadai saham untuk PUB III Tahap I Tahun 2022, PUB III Tahap II Tahun 2022, PUB IV Tahap I 2023 Perseroan dan ke Deutsche Bank AG, Singapore Branch sehubungan dengan Fasilitas Kredit yang diterima oleh MNCN dari Deutsche Bank AG, Singapore Branch berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 26 Agustus 2024.

Penyertaan saham Perseroan dalam Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

Penyertaan secara tidak langsung melalui MNCN (Perusahaan Cucu) :

a. PT Rajawali Citra Televisi Indonesia ("**RCTI**"), berkedudukan di Jakarta Barat, dimana persentase kepemilikan MNCN di RCTI adalah sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh RCTI.

b. PT Global Indonesia Bermutu ("**GIB**"), berkedudukan di Jakarta Barat, dimana persentase kepemilikan MNCN di GIB adalah sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh GIB.

c. PT MNC Televisi Indonesia ("**MNCTV**"), berkedudukan di Jakarta Barat, dimana persentase kepemilikan MNCN di MNCTV adalah sebesar 87,07% (delapan puluh tujuh koma nol tujuh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh MNCTV.

d. PT MNC Televisi Network ("**MTN**"), berkedudukan di Jakarta Pusat, dimana persentase kepemilikan MNCN di MTN adalah sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh MTN.

e. PT MNC Multimedia Network ("**MMN**"), berkedudukan di Jakarta Pusat, dimana persentase kepemilikan MNCN di MMN adalah sebesar 99,43% (sembilan puluh sembilan koma empat puluh tiga persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh MMN.

f. PT MNC Digital Entertainment Tbk ("**MSIN**"), berkedudukan di Jakarta Barat, dimana persentase kepemilikan MNCN di MSIN adalah sebesar 72,81% (tujuh puluh dua koma delapan puluh satu persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh MSIN per 28 Februari 2025.

g. PT MNC Media Investasi ("**MMI**"), berkedudukan di Jakarta Pusat, dimana persentase kepemilikan MNCN di MMI adalah sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh MMI.

h. PT MNC Media Utama ("**MMU**"), berkedudukan di Jakarta Pusat, dimana persentase kepemilikan MNCN di MMU adalah sebesar 99,90% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh MMU.

i. MNC International Middle East Ltd, ("**MIMEL**"), berkedudukan di Dubai, Uni Emirat Arab, dimana persentase kepemilikan MNCN di MIMEL sebesar 100% (serratus persen) dari modal saham MIMEL.

Penyertaan saham MNCN dalam Perusahaan Anaknya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar MNCN.

Penyertaan secara tidak langsung melalui IPTV (Perusahaan Cucu) :

a. PT MNC Sky Vision Tbk ("**MSKY**"), berkedudukan di Jakarta Barat, dimana persentase kepemilikan IPTV di MSKY adalah sebesar 91,90% (sembilan puluh satu koma sembilan puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh MSKY per 31 Maret 2025.

b. PT Nusantara Vision ("**NV**"), berkedudukan di Jakarta Pusat, dimana persentase kepemilikan IPTV di NV sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh NV.

c. PT Digital Vision Nusantara ("**DVN**"), berkedudukan di Jakarta Pusat, dimana persentase kepemilikan IPTV di DVN sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh DVN.

d. PT MNC Kabel Mediacom ("**MKM**"), berkedudukan di Jakarta Pusat, dimana persentase kepemilikan IPTV di MKM sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh MKM.

e. PT Mitra Operator Lokal ("**MOL**"), berkedudukan di Jakarta Pusat, dimana persentase kepemilikan IPTV di MOL sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh MOL.

Penyertaan saham IPTV dalam Perusahaan Anaknya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar IPTV.

Saham-saham Perseroan dalam Perusahaan Anak dan Perusahaan Cucu sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain (kreditur) baik untuk kepentingan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan Cucu maupun pihak lain, kecuali sebagian saham-saham Perseroan di MNCN, IPTV, MSIN, MKM.

27. Pendapat Hukum mengenai Perusahaan Anak

a. MNCN, IPTV, Infokom, MNC Shop adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan telah memperoleh ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya, yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini perijinan tersebut masih berlaku.

Anggaran Dasar MNCN, IPTV, Infokom, MNC Shop yang berlaku saat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dan secara khusus untuk MNCN dan IPTV juga telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

b. Riwayat struktur permodalan MNCN, IPTV, Infokom, MNC Shop, baik yang mengenai modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor dalam 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas telah dilakukan secara sah dan berkesinambungan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCN, IPTV, Infokom, MNC Shop telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasarnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan secara khusus untuk MNCN dan IPTV selaku Emiten dan/atau Perusahaan Publik telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 33/2014")

d. Pengungkapan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha MNCN, IPTV, Infokom, MNC Shop sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan KBLI 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Kegiatan usaha yang saat ini dilakukan oleh Perusahaan Anak adalah sebagai berikut :
- Kegiatan usaha yang dilakukan MNCN adalah media berbasis iklan dan konten (KBLI 59112) dan berkategori risiko rendah;
- Kegiatan usaha yang saat ini dilakukan IPTV adalah aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209) dan berkategori risiko rendah.
- Kegiatan usaha yang saat ini dilakukan Infokom adalah Jasa Interkoneksi Internet (NAP) (KBLI 61924), Jasa Internet Service Provider (KBLI 61921) dan Kegiatan usaha Infokom tersebut berkategori risiko tinggi.
- MNC Shop saat ini sudah tidak beroperasi (non operating).

e. Kecuali MNC Shop yang tidak memiliki karyawan, MNCN, IPTV, Infokom telah memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan termasuk diantaranya (i) mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, (ii) telah melakukan pemenuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan berdasarkan Undang-Undang No. 78 Tahun 1981, (iii) telah melaksanakan ketentuan mengenai Upah Minimum Propinsi yang berlaku pada provinsi ditempat kedudukan MNCN, IPTV dan Infokom berada, (iv) telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku.

MNCN dan Infokom yang memiliki karyawan lebih dari 50 (lima puluh) orang telah membentuk LKS Bipartit yang telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta,

f. Pada tanggal Pendapat Hukum ini MNCN, IPTV, Infokom yang memiliki asset-aset material berupa tanah dan/atau bangunan dan/atau berupa harta bergerak (kendaraan bermotor) serta Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) telah dilakukan secara sah menurut hukum dan kebiasaan hukum, tidak sedang dalam sengketa, serta tidak sedang dijaminkan, kecuali asset Infokom sebegai berikut :

- SHGB No.919/ Sungai Bambu sedang dibebankan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama dan Peringkat Kedua berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.01490/2022 kepada PT Bank Jtrust Indonesia Tbk sehubungan dengan pinjaman/kredit yang diterima Infokom dari PT Bank Jtrust Indonesia Tbk;
- SHGB No.1532/ Rungkut Menanggal sedang dibebankan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.15/2021 tanggal 4 Juni 2021, yang dibuat dihadapan Anggraeni Sari Megawati, S.H., PPAT di Surabaya kepada PT Bank Ganesha Tbk sehubungan dengan pinjaman/kredit yang diterima Infokom dari PT Bank Ganesha Tbk; dan
- SHGB No.547/Sungai Bambu sedang dibebankan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama dan Peringkat Kedua berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.04737/2022 kepada PT Bank Jtrust Indonesia Tbk sehubungan dengan pinjaman/kredit yang diterima Infokom dari PT Bank Jtrust Indonesia Tbk.

Harta kekayaan Infokom yang sedang dijaminkan kepada PT Bank Jtrust Indonesia Tbk dan PT Bank Ganesha Tbk selaku kreditur sebagaimana tersebut diatas apabila harus dilakukan eksekusi maka, eksekusi tersebut tidak akan berdampak secara material terhadap kelangsungan usaha/operasional Infokom.

Pembangunan Gedung iNews dilakukan sepenuhnya oleh MNCN yang tanahnya disewa dari PT GLD Property ("**GLD**") selaku pemilik tanah dengan Sertipikat Elektronik Hak Guna Bangunan NIB.09.01.000009478.0 (ex Sertipikat Hak Guna Bangunan No.867/Kebon Sirih) dan Sertipikat Elektronik Hak Guna Bangunan NIB.09.01.000009479.0 (ex Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1032/Kebon Sirih) berdasarkan Perjanjian Sewa Tanah Untuk Proyek MNC News Center No. 16A/GLDP-MNC/IX/11 tanggal 29 September 2011 ***Jis***. Perubahan Pertama tanggal 13 Januari 2013 dan Perubahan Kedua tanggal 1 Februari 2013, yang dibuat oleh dan antara PT GLD Property dengan MNCN ("**Perjanjian Sewa Menyewa**"). Dalam Perjanjian Sewa Menyewa tersebut telah disepakati bahwa MNCN menyewa tanah tersebut untuk membangun gedung perkantoran dan studio. Pembiayaan/pendanaan pembangunan Gedung iNews Tower beserta segala bentuk biaya terkait perpajakan bumi dan bangunan serta utilitas Gedung tersebut sepenuhnya dilakukan oleh MNCN dan menjadi beban serta tanggung jawab MNCN. Bahwa pembangunan Gedung yang dilaksanakan oleh MNCN telah memperoleh persyaratan administratif yakni Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Surat Keputusan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta No. 82/8/1A/31/-1.785.51/2016 tanggal 6 April 2016 dan telah dinyatakan laik fungsi berdasarkan Sertifikat Laik Fungsi No. 014/C.39a/31.71.06.1005.03.001.K.1/1/-1.785.51.2019 tanggal 4 Juli 2019.
Berdasarkan Surat Pernyataan GLD yang juga ditandatangani oleh MNCN tertanggal 24 Mei 2025, GLD menyatakan dan mengakui bahwa Gedung iNews adalah sepenuhnya milik MNCN dan pernyataan serta pengakuan akan kepemilikan Gedung iNews tetap diberlakukan meskipun apabila dikemudian hari Tanah akan dialihkan kepada pihak lain.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas kami berpendapat bahwa Gedung iNews adalah sah milik MNCN hal ini didasari dengan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang bunyinya: "*Setiap bangunan Gedung harus didirikan pada tanah yang status kepemilikannya jelas, baik milik sendiri maupun milik pihak lain dan dalam hal tanahnya milik pihak lain, bangunan Gedung hanya dapat didirikan dengan izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pemilik bangunan Gedung"* , yang mana kepemilikan bangunan Gedung disini dibuktikan berdasarkan perjanjian tertulis antara MNCN dengan PT GLD Property yang ditandatangani pada tanggal 29 September 2011. Adapun ketentuan mengenai bukti kepemilikan Gedung diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ("**PP 16/2021**") Jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Surat Bukti Kepemilikan Gedung ("**Permen PUPR 12 Tahun 2024**"). Sampai dengan saat ini, MNCN belum memiliki Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) sebagaimana dimaksud sehingga mengacu pada Pasal 12 PP 16/2021 MNCN dapat dikenakan sanksi administratif berupa (a) peringatan tertulis; (b) pembatasan kegiatan pembangunan; (c) penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; (d) penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung; (e) pembekuan PBG; (f) pencabutan PBG; (g) pembekuan SLF Bangunan Gedung; (h) pencabutan SLF Bangunan Gedung; dan/atau (i) perintah Pembongkaran Bangunan Gedung.

Berdasarkan konfirmasi dari MNCN, sampai dengan saat ini, MNCN tidak pernah menerima pemberitahuan tentang adanya sanksi adminstratif dimaksud. Berdasarkan Surat Perrnyataan MNCN tertanggal 26 Mei 2025, MNCN berkomitmen untuk mengurus SBKBG selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Pernyataan dibuat.

g. Berdasarkan Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan MNCN, IPTV dan Infokom masing-masing tertanggal 27 Maret 2025 asset materialnya telah diasuransikan dan jumlah pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.

h. Sampai dengan Pendapat Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan hasil Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan pula dalam Surat Pernyataan MNCN, IPTV, Infokom, MNC Shop, beserta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya tertanggal 27 Maret 2025, MNCN, IPTV, Infokom, MNC Shop beserta dengan anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya baik dalam kapasitas selaku anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun selaku pribadi (i) tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, (ii) tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (iii) tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, (iv) tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (v) tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (vi) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa dibidang persaingan usaha, (vii) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, dan (viii) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan, somasi dan/atau klaim, kecuali Hary Tanoesoedibjo selaku pribadi sedang menghadapi Perkara Perdata No.142/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Februari 2025 antara PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk selaku Penggugat dengan antara lain Hary Tanoesoedibjo selaku Tergugat I dan PT MNC Asia Holding Tbk selaku Tergugat II, yang saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Pernyataan Hary Tanoesoedibjo tersebut, yang bersangkutan berkeyakinan perkara yang sedang dihadapi tidak akan berdampak negatif secara material terhadap kelangsungan usaha dan/atau operasional MNCN, Infokom, MNC Shop maupun rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2025 serta penggunaan dananya.

Sampai dengan Pendapat Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan hasil Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan pula dalam Surat Pernyataan IPTV beserta masing-masing anggota

Direksi dan Dewan Komisarisnya tertanggal 27 Maret 2025, IPTV beserta dengan anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya baik dalam kapasitas selaku anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun selaku pribadi (i) tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, (ii) tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (iii) tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, (iv) tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (v) tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (vi) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa dibidang persaingan usaha, (vii) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, dan (viii) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan, somasi dan/atau klaim.

i. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh MNCN, IPTV, Infokom (Perusahaan Anak) dengan pihak ketiga dan/atau dengan Pihak Terafiliasi telah ditandatangani secara sah oleh masing-masing Perusahaan Anak, mengikat Perusahaan Anak dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dari perjanjian-perjanjian tersebut yang dapat membatasi maksud dari Perseroan untuk melakukan PUB V Tahap I ini dan penggunaan dananya serta berpotensi merugikan hak pemegang saham publik Perseroan. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku, kecuali Perjanjian Kredit antara Infokom dan PT Bank Ganesha Tbk yang sedang dalam proses perpanjangan.

28. Pendapat Hukum Mengenai Perusahaan Cucu

RCTI, GIB, MNCTV, MTN. MMN, MMI, MMU, MSKY, NV, DVN, MKM, MOL adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kecuali, MMI, MMU yang merupakan perusahaan *Non Operating* (tidak beroperasi), Perusahaan Cucu telah melakukan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasarnya dan telah memiliki ijin usaha untuk melakukan kegiatan usahanya tersebut yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku.
ISR untuk Satelit 3A milik DVN sudah tidak diperpanjang lagi dan hal ini tidak berdampak negatif secara material bagi kelangsungan usaha DVN mengingat saat ini DVN sudah mengajukann permohonan ISR untuk Satelit 3B, dengan No.099708052025 dan No.099719052025.

Perusahaan Cucu yang memiliki karyawan telah memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan termasuk diantaranya mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, telah melakukan pemenuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan berdasarkan Undang-Undang No. 78 Tahun 1981, telah melaksanakan ketentuan mengenai Upah Minimum Propinsi yang berlaku pada provinsi ditempat kedudukan Perusahaan Cucu, serta telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Peraturan Perusahaan tersebut sampai dengan Pendapat Hukum ini dikeluarkan masih berlaku, kecuali Peraturan Perusahaan MTN yang sedang dalam proses perpanjangan di Disnakertrans berdasarkan bukti proses perpanjangan Nomor Pengurusan #241001016.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan Cucu dengan pihak ketiga dan/atau dengan pihak Terafiliasi telah ditandatangani oleh masing-masing perusahaan tersebut secara sah berdasarkan Anggaran Dasar masing-masing perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dari perjanjian-perjanjian

tersebut yang dapat membatasi rencana dari Perseroan untuk melakukan PUB V Tahap I dan penggunaan dananya serta yang berpotensi merugikan hak pemegang saham publik Perseroan. Perjanjian-perjanjian tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku, kecuali Perjanjian Kredit antara MTN dan PT Bank Mayapada Internasional Tbk yang sedang dalam proses perpanjangan.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan MTN, MMN, MMU, MSKY, NV, MOL beserta dengan anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya seluruhnya tertanggal 27 Maret 2025, MTN, MMN, MMU, MSKY, NV, MOL beserta dengan anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya dalam kedudukannya sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun sebagai pribadi tidak sedang (i) tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, (ii) tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (iii) tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, (iv) tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (v) tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (vi) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, (vii) tidak sedang terlibat dalam perkara di bidang persaingan usaha di Komisi Persaingan Usaha (KPPU), (viii) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan dan/atau klaim.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan RCTI, GIB, MNCTV, MMI, DVN, MKM beserta dengan anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya seluruhnya tertanggal 27 Maret 2025, RCTI, GIB, MNCTV, MMI, DVN, MKM beserta dengan anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya dalam kedudukannya sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun sebagai pribadi tidak sedang (i) tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, (ii) tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (iii) tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, (iv) tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (v) tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (vi) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, (vii) tidak sedang terlibat dalam perkara di bidang persaingan usaha di Komisi Persaingan Usaha (KPPU), (viii) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan dan/atau klaim, kecuali Hary Tanoesoedibjo selaku pribadi sedang menghadapi Perkara Perdata No.142/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Februari 2025 antara PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk selaku Penggugat dengan antara lain Hary Tanoesoedibjo selaku Tergugat I dan PT MNC Asia Holding Tbk selaku Tergugat II, yang saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Pernyataan Hary Tanoesoedibjo tersebut, yang bersangkutan berkeyakinan perkara yang sedang dihadapi tidak akan berdampak negatif secara material terhadap kelangsungan usaha dan/atau operasional RCTI, GIB, MNCTV, MMI, DVN, MKM maupun rencana Perseroan untuk melakukan PUB V Tahap I serta penggunaan dananya.

Harta kekayaan RCTI berupa SHGB NIB No.09.03.000001436.0 saat ini sedang dijaminkan oleh RCTI dalam rangka PUB IV Tahap II PT Global Mediacom Tbk Tahun 2024 dan SHGB No.1367 saat ini sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia Tbk. Apabila harta kekayaan yang sedang dijaminkan tersebut harus dilakukan eksekusi oleh kreditur maka pelaksanaan eksekusi tersebut tidak akan berdampak secara material terhadap kelangsungan usaha/operasional RCTI maupun Perseroan.

29. Informasi yang disajikan dalam Prospektus dalam rangka PUB V Tahap I yang berkaitan dengan aspek hukum telah sesuai dengan hasil Uji Tuntas yang kami lakukan.

Demikian Pendapat Hukum ini kami buat sesuai dengan prinsip keterbukaan dan berdasarkan data-data, dokumen-dokumen dan informasi-informasi yang kami peroleh, sebagaimana layaknya konsultan hukum yang bebas dan tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan, serta ditujukan dalam rangka PUB V Tahap I PT Global Mediacom Tbk dan kami bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
KONSULTAN HUKUM JUSUF INDRADEWA & PARTNERS

Cecilia Teguh Ayu Sianawati, S.H	Swanyta Gunadi, S.H.
STTD.KH-21/PJ-1/PM.02/2023	STTD.KH-22/PJ-1/PM.02/2023
Anggota HKHPM No. 92036	Anggota HKHPM No.200022
Nomor Induk Advokat PERADI No. 92.10415	Nomor Induk Advokad PERADI No.00.12335

Tembusan:
1. Yang Terhormat Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yang Terhormat PT Bursa Efek Indonesia.
3. Yang Terhormat PT MNC Sekuritas.
4. Yang Terhormat PT Bahana Sekuritas.
5. Yang Terhormat PT Mandiri Sekuritas.
6. Yang Terhormat PT CIMB Niaga Sekuritas.
7. Yang Terhormat PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia.
8. Yang Terhormat PT KB Valbury Sekuritas.

XVIII. LAPORAN KEUANGAN

PT GLOBAL MEDIACOM TBK DAN ENTITAS ANAK/
AND ITS SUBSIDIARIES

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Pada dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023/
As of and For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023

dan/*and*

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

globalmediacom

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PT GLOBAL MEDIACOM Tbk DAN ENTITAS ANAK

DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
PT GLOBAL MEDIACOM Tbk AND ITS SUBSIDIARIES

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama/*Name* : Hary Tanoesoedibjo
   Alamat kantor/*Office Address* : MNC Tower Jl. Kebon Sirih 17-19, Jakarta
   Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/ *Domicile as stated in ID Card* : Jl. Ciranjang No. 33 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
   Nomor Telepon/*Phone Number* : 021-3900310
   Jabatan/*Position* : Direktur Utama/President Director

2. Nama/*Name* : Ruby Panjaitan
   Alamat kantor/*Office Address* : MNC Tower Jl. Kebon Sirih 17-19, Jakarta
   Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/ *Domicile as stated in ID Card* : Mediterania Regency Blok A No.53 Jatibening, Pondok Gede, Bekasi
   Nomor Telepon/*Phone Number* : 021-3900310
   Jabatan/*Position* : Direktur/*Director*

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian;
2. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
   b. Laporan keuangan konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan entitas anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned:

state that:

1. Responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements;
2. The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information contained in the consolidated financial statements is complete and correct; and
   b. The consolidated financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts.
4. Responsible for the Company and its subsidiaries' internal control system.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 15 Mei/*May 15*, 2025

Direktur Utama/ *President Director*	Direktur/ *Director*
(Hary Tanoesoedibjo)	**(Ruby Panjaitan)**

PT GLOBAL MEDIACOM TBK DAN ENTITAS ANAK/
AND ITS SUBSIDIARIES

DAFTAR ISI/ *TABLE OF CONTENTS*

	Halaman/ *Pages*
SURAT PERNYATAAN DIREKSI/ ***STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS***	
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/ ***INDEPENDENT AUDITORS' REPORT***	i – vi
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/ ***CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***	
Pada dan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023/ *As of and for the years ended December 31, 2024 and 2023*	
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN/ *CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION*	1 – 2
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN/ *CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME*	3
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN/ *STATEMENT OF CHANGES IN CONSOLIDATED EQUITY*	4
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN/ *CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS*	5
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/ *NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS*	6 – 115

KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO
Branch Jakarta Pusat
Branch Licence No. 561/KM.1/2019
Wisma Bumiputera, 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Setiabudi
Jakarta 12910
P. 62 - 21 5224581 **F.** 62 - 21 5224581
E. nexiasudirman@nexia.id
www.nexia.co.id

Laporan Auditor Independen

Independent Auditor's Report

00215/3.0409/AU.1/05/0126-4/1/V/2025

Para Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi
PT Global Mediacom Tbk dan Entitas Anak

The Shareholders, Commissioners and Directors of
PT Global Mediacom Tbk and Its Subsidiaries

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Global Mediacom Tbk dan Entitas Anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Global Mediacom Tbk and its subsidiaries ("the Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2024 and 2023, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2024 and 2023, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia. Dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

MEMBER OF THE FORUM OF FIRMS

NEXIA KPS - KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO is a member firm of the "Nexia International" network. © 2015 Nexia International Limited. All right reserved. Nexia International Limited does not deliver services in its own name or otherwise. Nexia International Limited and the member firms of the Nexia International Network (including those members which trade under a name which includes the word NEXIA) are not part of a worldwide partnership. Member Firms of the Nexia International Network are independently owned and operated. Nexia International Limited does not accept any responsibility for the commission of any act, or omission to act by, or the liabilities of, any of its members. Nexia International Limited does not accept liability for any loss arising from any action taken, or omission, on the basis of content in this document or any documentation and external links provided. The trade marks NEXIA INTERNATIONAL, NEXIA and the NEXIA logo are owned by Nexia International Limited and used under licence. Reference to Nexia or Nexia International are to Nexia International Limited or to the "Nexia International" network firms, as the context may dictate. for more information visit www.nexia.com

| Jakarta Pusat | Jakarta Barat | Jakarta Selatan | Medan | Surabaya | Semarang |

Pengakuan Pendapatan

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2 (Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Material) dan Catatan 38 (Pendapatan) atas laporan keuangan konsolidasian, pada tanggal 31 Desember 2024, Grup telah mengakui pendapatan sebesar Rp10.059.317 juta yang terdiri dari iklan dan konten, konten dan IP, subscription, TV berbayar dan broadband.

Kami berfokus kepada pengakuan pendapatan, karena adanya risiko bawaan pengakuan pendapatan tersebut mengingat adanya kewajiban pelaksanaan kontrak, penentuan harga transaksi, alokasi harga transaksi untuk kewajiban pelaksanaan dan kesesuaian dasar yang digunakan untuk mengukur pendapatan yang diakui sepanjang waktu atau waktu tertentu.

Tanggapan audit atas hal audit utama

Bagaimana audit kami merespon hal audit utama, kami melakukan prosedur audit atas hal ini termasuk:

- Memahami dan mengevaluasi pengendalian yang relevan atas pengakuan pendapatan berdasarkan kebijakan akuntansi Perusahaan dan persyaratan PSAK 115;
- Mendapatkan rincian pendapatan dan mencocokan nilainya dengan pendapatan yang telah tercatat pada catatan keuangan;
- Melakukan uji petik atas pendapatan dan memahami persyaratan pada kontrak untuk mengevaluasi ketepatan perlakuan akuntansi atas kontrak tersebut;
- Melakukan penilaian atas penentuan harga transaksi, termasuk imbalan variable terhadap ketentuan kontrak;
- Melakukan uji petik atas pendapatan dan memeriksa dokumen pendukung untuk memastikan pisah batas dan bahwa pendapatan yang telah diakui didukung oleh bukti yang sesuai;
- Menilai pengungkapan atas laporan keuangan konsolidasian dengan mengacu pada persyaratan akuntansi keuangan di Indonesia.

Hal Lain

Laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan aksi korporasi Perusahaan, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Revenue recognition

As disclosed in Note 2 (Summary of Material Accounting Policies) and Note 38 (Revenues) to the consolidated financial statements, on December 31, 2024, the Group recognized revenue of Rp10,059,317 million consisting of advertising and content, content and IP, subscriptions, pay TV and broadband.

We focused on revenue recognition, as there is an inherent risk related to the recognition of these revenue given the existence of distinct performance obligations, determination of the transaction prices, allocation of transaction prices to performance obligations and the appropriateness of the basis used to measure revenue recognition over time or at a point in time.

Audit response to key audit matters

How our audit addressed to key audit matters, we perform audit procedures on this including:

- *Understand and evaluate relevant controls over revenue recognition based on the Company's accounting policies and the requirements of PSAK 115;*
- *Obtain details of income and match the value with the income recorded in the financial records;*
- *Perform spot checks on revenue and understand the terms of the contract to evaluate the appropriateness of the accounting treatment of the contract;*
- *Conduct assessments on transaction pricing, including variable compensation against contract provisions;*
- *Perform spot checks on revenue and examine supporting documentation to ensure cutoff and that recognized revenue is supported by appropriate evidence;*
- *Assess the disclosure of consolidated financial statements with reference to financial accounting requirements in Indonesia.*

Other Matter

This consolidated financial report is published for the purpose of inclusion in the prospectus in connection with in the Company's corporate actions, and is not intended, and is not permitted to be used, for any other purpose.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No.00185/3.0409/AU.1/05/0126-4/1/IV/2025 tanggal 30 April 2025 atas laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Sehubungan dengan rencana aksi korporasi Perusahaan tersebut, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut dengan perubahan dan penambahan seperti diungkapkan pada catatan 57 atas laporan keuangan konsolidasian Grup.

Prior to this report, we have issued an independent auditor's report No.00185/3.0409/AU.1/05/0126-4/1/IV/2025 dated April 30, 2025 on the Group's consolidated financial statements as of December 31, 2024 and for the year then ended. In connection with in the Company's corporate actions, the Company is reissuing the consolidated financial statements with changes and additions as disclosed in note 57 to the Group's consolidated financial statements.

Informasi lain

Others Information

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Management is responsible for other information. Other information consists of information contained in the annual report, but does not include our consolidated financial statements and auditor's report. The annual report is expected to be available to us after the date of this auditor's report.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak dan tidak akan menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Our opinion on the consolidated financial statements does not include other information, and therefore, we do not and will not express any form of confidence in such other information.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidak konsistensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

In connection with our audit of the consolidate financial statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether such other information contains material inconsistencies with the financial statements or the understanding we obtained during the audit, or contains material information misstatement.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata Kelola dan mengambil Tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate this to those charged with governance and take appropriate action based on the Auditing Standards established by the Institute of Public Accountants.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya. Hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami, keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standard on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

As part of an audit based on the Auditing Standards, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material atas laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut. Serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

  Identify and assess the risk of material misstatement of the consolidated financial statements, whether caused by fraud or error, design and implement audit procedures that are responsive to these risks. And obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement due to fraud is higher than that caused by error, because fraud may involve collusion, forgery, omission, misrepresentations, or the override of internal control.

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.

  Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajiban estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

  Evaluate the appropriateness of the accounting policies used and the accounting estimation obligations and related disclosures made by management.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan audit kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengkomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

- *Conclude on the appropriateness of management's use the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengkomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO

KANTOR AKUNTAN PUBLIK KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO

Florus Daeli, SE., AK., MM., CA., CPA., CRA., CLI., CFI., CACP., ASEAN CPA.
Nomor Izin Akuntan Publik/ *License of Public Accountant*
AP. 0126

Jakarta, 15 Mei / *May 15*, 2025
00215/3.0409/AU.1/05/0126-4/1/V/2025

00215

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	2k,4			*Cash and cash equivalents*
Pihak berelasi	2g	853.462	1.468.247	*Related parties*
Pihak ketiga		559.690	528.861	*Third parties*
Aset keuangan lainnya – lancar	2h,5	2.673.962	654.657	*Other financial assets – current*
Piutang usaha – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai Rp132.889 juta pada 31 Desember 2024 dan Rp131.568 juta pada 31 Desember 2023	6			*Trade accounts receivable – net of allowance for impairment losses of Rp132,889 million at December 31, 2024 and Rp131,568 million at December 31, 2023*
Pihak berelasi	2g,49	22.931	21.943	*Related parties*
Pihak ketiga		3.656.822	3.460.001	*Third parties*
Piutang lain-lain – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai Rp15.372 juta pada 31 Desember 2024 dan Rp15.363 juta pada 31 Desember 2023	7			*Other accounts receivable – net of allowance for impairment losses of Rp15,372 million at December 31, 2024 and Rp15,363 million at December 31, 2023*
Pihak berelasi	2g,49	78.079	90.115	*Related parties*
Pihak ketiga		430.694	415.529	*Third parties*
Persediaan	2m,8	4.123.302	4.068.295	*Inventories*
Uang muka	9	1.052.789	919.710	*Advances*
Biaya dibayar dimuka	2n,10	172.571	215.502	*Prepaid expenses*
Pajak dibayar dimuka	11	89.217	79.867	*Prepaid taxes*
Jumlah Aset Lancar		13.713.519	11.922.727	*Total Current Assets*
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Aset pajak tangguhan – bersih	43	818.541	763.775	*Deferred tax assets – net*
Uang muka investasi	12	834.688	1.271.721	*Investment advances*
Investasi pada entitas asosiasi dan lainnya	2l,13	731.120	738.583	*Investments in associates and other*
Aset keuangan lainnya – tidak lancar	2h,14	1.037.741	752.805	*Other financial assets – non-current*
Properti investasi – bersih	15	9.845	10.637	*Investment properties – net*
Aset hak guna – bersih	2r,16	73.242	93.649	*Right-of-use assets – net*
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp14.537.002 juta pada 31 Desember 2024 dan Rp13.979.052 juta pada 31 Desember 2023	2o,17	11.219.221	11.408.463	*Property and equipment – net of accumulated depreciation of Rp14,537,002 million at December 31, 2024 and Rp13,979,052 million at December 31, 2023*
Goodwill	2p,18	3.807.953	3.803.237	*Goodwill*
Aset takberwujud – bersih	2t,19	2.205.533	2.087.140	*Intangible assets – net*
Tanah untuk pengembangan	2q,20	825.154	825.154	*Land for development*
Aset lain-lain	2u,21	967.215	1.590.411	*Other assets*
Jumlah Aset Tidak Lancar		22.530.253	23.345.575	*Total Non-current Assets*
JUMLAH ASET		**36.243.772**	**35.268.302**	***TOTAL ASSETS***

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang bank	22	1.311.959	1.316.404	*Bank loan*
Utang usaha	23			*Trade accounts payable*
Pihak berelasi	2g,49	7.271	6.562	*Related parties*
Pihak ketiga		415.988	375.812	*Third parties*
Utang lain-lain	24			*Other accounts payable*
Pihak berelasi	2g,49	15.264	13.606	*Related parties*
Pihak ketiga		111.735	171.751	*Third parties*
Pendapatan diterima dimuka	25	11.225	13.281	*Unearned revenues*
Utang pajak	26	71.095	84.494	*Taxes payable*
Biaya masih harus dibayar	27	82.625	17.281	*Accrued expenses*
Uang muka pelanggan	28	6.331	14.668	*Customer deposits*
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun				*Current maturities of long-term liabilities*
Pinjaman bank dan lembaga keuangan – jangka panjang	2w,29	808.495	1.298.860	*Bank and financial institution loans – long-term*
Liabilitas sewa pembiayaan	16	27.717	32.390	*Finance lease liabilities*
Utang obligasi	2w,30	656.819	658.368	*Bonds payable*
Utang Sukuk Ijarah	2w,31	746.633	423.605	*Sukuk Ijarah payable*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		4.273.157	4.427.082	*Total Current Liabilities*
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas pajak tangguhan – bersih	43	108.961	101.516	*Deferred tax liabilities – net*
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun				*Long-term liabilities – net of current maturities*
Pinjaman bank dan lembaga keuangan – jangka panjang	2w,29	967.382	1.176.932	*Bank and financial institution loans – long-term*
Liabilitas sewa pembiayaan	16	49.359	50.530	*Finance lease liabilities*
Utang obligasi	2w,30	813.539	817.464	*Bonds payable*
Utang Sukuk Ijarah	2w,31	733.583	827.293	*Sukuk Ijarah payable*
Liabilitas imbalan kerja	2z,46	218.281	217.479	*Employee benefits obligation*
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		2.891.105	3.191.214	*Total Non-Current Liabilities*
JUMLAH LIABILITAS		**7.164.262**	**7.618.296**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk				***Equity attributable to the owners of the Company***
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham. Modal dasar – 55.750.000.000 saham. Modal ditempatkan dan disetor – 16.583.997.586 saham pada 31 Desember 2024 dan 2023	32	1.658.400	1.658.400	*Capital stock - Rp100 par value per share. Authorized – 55,750,000,000 shares. Issued and paid-up – 16,583,997,586 shares at December 31, 2024 and 2023*
Tambahan modal disetor	33	1.810.189	1.810.189	*Additional paid-up capital*
Transaksi ekuitas dan perubahan ekuitas entitas anak	34	(456.864)	(666.428)	*Equity transaction and change in equity of subsidiaries*
Penghasilan komprehensif lain	35	217.737	216.475	*Other comprehensive income*
Saldo laba				*Retained earnings*
Ditentukan penggunaannya	45	16.000	15.000	*Appropriated*
Tidak ditentukan penggunaannya		13.431.856	12.895.457	*Unappropriated*
Jumlah		16.677.318	15.929.093	*Total*
Dikurangi harga perolehan saham diperoleh kembali	36	(347.895)	(347.895)	*Less cost of treasury stocks*
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk		16.329.423	15.581.198	*Total equity attributable to the owners of the Company*
Kepentingan non-pengendali	37	12.750.087	12.068.808	*Non-controlling interests*
JUMLAH EKUITAS		**29.079.510**	**27.650.006**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**36.243.772**	**35.268.302**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

	Catatan/ *Notes*	2024	2023	
PENDAPATAN	2x,38	10.059.317	10.163.157	***REVENUES***
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2x,39	6.019.583	6.175.305	***COST OF REVENUE***
LABA KOTOR		**4.039.734**	**3.987.852**	***GROSS PROFIT***
Beban umum dan administrasi	40	(2.299.985)	(2.425.012)	*General and administrative expenses*
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing – bersih		(16.948)	1.371	*Gain (loss) on foreign exchange – net*
Beban keuangan	41	(799.686)	(767.430)	*Finance charges*
Penghasilan bunga		52.479	54.748	*Interest income*
Lain-lain – bersih	42	65.008	235.151	*Other – net*
LABA SEBELUM PAJAK		**1.040.602**	**1.086.680**	***PROFIT BEFORE TAX***
Beban pajak penghasilan	2aa,43	(123.382)	(18.938)	*Income tax expenses*
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		**917.220**	**1.067.742**	***NET INCOME FOR THE YEAR***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR, NET OF TAX***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss:*
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti		(3.109)	(7.153)	*Remeasurement of defined benefit obligation*
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		591	1.359	*Related income tax items that will not be reclassified subsequently to profit or loss*
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that may be reclassified subsequently to profit or loss:*
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dari kegiatan usaha luar negeri		3.780	(6.832)	*Exchange difference on translating foreign operations*
Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak		**1.262**	**(12.626)**	***Total other comprehensive income for the year, net of tax***
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**918.482**	**1.055.116**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
LABA BERSIH YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***NET INCOME ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk		537.399	677.552	*Owners of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali		379.821	390.190	*Non-controlling interests*
Laba bersih tahun berjalan		**917.220**	**1.067.742**	***Profit for the year***
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk		538.661	664.926	*Owners of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali		379.821	390.190	*Non-controlling interests*
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan		**918.482**	**1.055.116**	***Total comprehensive income for the year***
LABA PER SAHAM DASAR (dalam Rupiah penuh)	2bb,44	32,9	41,4	***BASIC EARNINGS PER SHARE*** *(in full Rupiah amount)*

	Catatan/ *Notes*	Modal ditempatkan dan disetor/ *Issued and paid-up capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-up capital*	Transaksi ekuitas dan perubahan ekuitas entitas anak/ *Equity transaction and change in equity of subsidiaries*	Penghasilan komprehensif lain/ *Other comprehensive income*	Saldo laba/ *Retained earnings*		Modal saham diperoleh kembali/ *Treasury stocks*	Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ *Equity attributable to the owners of parent entity*	Kepentingan non-pengendali/ *Non-controlling interests*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
						Ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Tidak ditentukan penggunaanya/ *Unappropriated*					
Saldo per 1 Januari 2023		**1.658.400**	**1.810.189**	**(646.949)**	**229.101**	**14.000**	**12.218.905**	**(347.895)**	**14.935.751**	**11.713.166**	**26.648.917**	***Balance at January 1, 2023***
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	-	677.552	-	677.552	390.190	1.067.742	*Net income for the year*
Penghasilan komprehensif lain		-	-	-	(12.626)	-	-	-	(12.626)	-	(12.626)	*Other comprehensive income*
Pembentukan cadangan umum	45	-	-	-	-	1.000	(1.000)	-	-	-	-	*Allocation for general reserve*
Perubahan ekuitas entitas anak		-	-	(19.479)	-	-	-	-	(19.479)	-	(19.479)	*Change in equity of subsidiaries*
Pembagian dividen entitas anak ke kepentingan non-pengendali		-	-	-	-	-	-	-	-	(34.548)	(34.548)	*Dividend distributed by subsidiaries to non-controlling interest*
Saldo per 31 Desember 2023		**1.658.400**	**1.810.189**	**(666.428)**	**216.475**	**15.000**	**12.895.457**	**(347.895)**	**15.581.198**	**12.068.808**	**27.650.006**	***Balance at December 31, 2023***
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	-	537.399	-	537.399	379.821	917.220	*Net income for the year*
Penghasilan komprehensif lain		-	-	-	1.262	-	-	-	1.262	-	1.262	*Other comprehensive income*
Pembentukan cadangan umum	45	-	-	-	-	1.000	(1.000)	-	-	-	-	*Allocation for general reserve*
Perubahan ekuitas entitas anak		-	-	209.564	-	-	-	-	209.564	301.458	511.022	*Change in equity of subsidiaries*
Saldo per 31 Desember 2024		**1.658.400**	**1.810.189**	**(456.864)**	**217.737**	**16.000**	**13.431.856**	**(347.895)**	**16.329.423**	**12.750.087**	**29.079.510**	***Balance at December 31, 2024***

	Catatan/ *Notes*	2024	2023	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari pelanggan		9.858.132	10.164.545	*Cash receipts from customers*
Pembayaran kas kepada pemasok		(6.043.469)	(6.640.935)	*Cash paid to supplier*
Pembayaran kas kepada karyawan		(1.004.139)	(1.010.155)	*Cash paid to employees*
Kas dihasilkan dari operasi		2.810.524	2.513.455	*Cash generated from operations*
Beban bunga dan pajak penghasilan		(912.706)	(939.597)	*Income tax and Interest charges*
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		1.897.818	1.573.858	*Net Cash Provided by Operating Activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penerimaan bunga		52.479	54.748	*Interest received*
Pengurangan (penambahan) uang muka investasi, aset keuangan lainnya dan aset lainnya		(1.338.064)	1.388.398	*Deduction (addition) of investment advances, other financial assets and other assets*
Kas bersih yang diperoleh pada saat akuisisi	47	26.288	-	*Net cash obtained during acquisition*
Penambahan aset tetap dan aset hak guna		(1.146.131)	(1.489.782)	*Addition of property and equipment and right-of-use assets*
Hasil pelepasan aset tetap	17	282.562	393.531	*Proceeds from disposal of property and equipment*
Penurunan aset takberwujud		(259.120)	(254.463)	*Acquisitions of intangible assets*
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi		(2.381.986)	92.432	*Net Cash Provided from (Used in) Investing Activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penambahan utang bank	22	927.640	360.972	*Proceeds from bank loans*
Pembayaran utang bank	22	(950.381)	(30.306)	*Payment of bank loans*
Penerimaan pinjaman jangka panjang	29	365.000	154.920	*Proceeds from long-term loans*
Pembayaran pinjaman jangka panjang	29	(1.117.097)	(1.542.083)	*Payment of long-term loans*
Pembayaran liabilitas sewa/ sewa pembiayaan		(7.516)	(7.516)	*Payments of lease liabilities/ finance lease obligation*
Penerimaan utang obligasi	30	650.000	850.000	*Proceeds from bonds issuance*
Penerimaan utang Sukuk Ijarah	31	650.000	850.000	*Proceeds from Sukuk Ijarah issuance*
Pelunasan utang obligasi	30	(656.715)	(1.110.615)	*Settlement of bonds payable*
Pelunasan utang Sukuk Ijarah	31	(421.740)	(536.910)	*Settlement of Sukuk Ijarah payable*
Setoran modal pemegang saham pada entitas anak		461.021	-	*Capital contribution from a shareholder of subsidiary*
Pembayaran dividen entitas anak pada kepentingan non-pengendali		-	(34.548)	*Dividends paid by subsidiary to non-controlling interests*
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan		(99.788)	(1.046.086)	*Net Cash Used in Financing Activities*
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		**(583.956)**	**620.204**	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		1.997.108	1.376.904	*CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR*
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		**1.413.152**	**1.997.108**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR***

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Global Mediacom Tbk (Perusahaan) didirikan di Jakarta berdasarkan akta No. 60 tanggal 30 Juni 1981 dan diubah dengan akta No. 81 tanggal 29 Januari 1982 keduanya dari Lukman Kirana, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. Y.A. 5/84/22 tanggal 22 Mei 1982 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 54 tanggal 5 Juli 1985, Tambahan No. 912.

Anggaran Dasar Perusahaan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 120 tanggal 28 Juli 2022 dari Aulia Taufani, S.H., notaris di Jakarta, mengenai perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan. Akta perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) berdasarkan Keputusan No. AHU-0054141.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 2 Agustus 2022, terdaftar dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0149266.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 2 Agustus 2022 dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0273800 tanggal 2 Agustus 2022, terdaftar dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0149293.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 2 Agustus 2022.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah di bidang industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, informasi dan komunikasi, real estat, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, dan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di MNC Tower, Jalan Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat. Perusahaan memulai kegiatan komersial pada Desember 1982. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak (Grup) masing-masing sebanyak 6.430 karyawan dan 7.686 karyawan.

Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha MNC Grup. Pemilik manfaat akhir dari Perusahaan yaitu Hary Tanoesoedibjo dan pengendali Perusahaan adalah PT MNC Asia Holding Tbk. Susunan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Global Mediacom Tbk (the Company) was established in Jakarta based on deed No. 60 dated June 30, 1981 as amended by deed No. 81 dated January 29, 1982, both from Lukman Kirana, S.H., notary in Jakarta. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Right of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. Y.A. 5/84/22 dated May 22, 1982 and was published in Supplement No. 912 to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 54 dated July 5, 1985.

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by deed No. 120 dated July 28, 2022 of Aulia Taufani, S.H., notary in Jakarta concerning the article 3 of the Company's Articles of Association. This notarial deed has been approved by the Minister of Laws and Human Rights (the MOLHR) pursuant to Decree No. No. AHU-0054141.AH.01.02.TAHUN 2022 dated August 2, 2022, registered in the Company Register No. AHU-0149266.AH.01.11.TAHUN 2022 dated August 2, 2022 and notified to the MOLHR pursuant to Letter No. AHU-AH.01.03-0273800 dated August 2, 2022, registered in the Company Register No. AHU-0149293.AH.01.11.TAHUN 2022 dated August 2, 2022.

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its activities is in the fields of manufacturing industry, mining and quarrying, information and communication, real estate, construction, wholesale and retail trade, and professional, scientific and technical activities.

The Company's head office is located at MNC Tower, Jalan Kebon Sirih No. 17-19, Central Jakarta. The Company started its commercial operations in December 1982. At December 31, 2024 and 2023 the Company and its subsidiaries (the Group) had total employees of 6,430 and 7,686, respectively.

The Company is under MNC Group. The Company's ultimate beneficial owner is Hary Tanoesoedibjo and the Company's controlling interest is PT MNC Asia Holding Tbk. The Company's Commissioners, Directors, Audit Committee, Corporate Secretary and Internal Audit as of December 31, 2024 and 2023 consisted of the following:

		31 Desember/ *December 31, 2024*	31 Desember/ *December 31,* 2023		
Komisaris					*Commissioners*
Komisaris Utama	:	Rosano Barack	Rosano Barack	:	*President Commissioner*
Komisaris Independen	:	Beti Puspitasari Santoso Mohamed Idwan Ganie	Beti Puspitasari Santoso Mohamed Idwan Ganie	:	*Independent Commissioners*

		31 Desember/ *December 31, 2024*		31 Desember/ *December 31,* 2023		
Direksi						*Directors*
Direktur Utama	:	Hary Tanoesoedibjo		Hary Tanoesoedibjo	:	*President Director*
Direktur	:	Indra Pudjiastuti Syafril Nasution Christophorus Taufik Siswandi Ruby Panjaitan		Indra Pudjiastuti Syafril Nasution Christophorus Taufik Siswandi Ruby Panjaitan	:	*Directors*
Komite Audit						*Audit Committee*
Ketua	:	Beti Puspitasari Santoso		Beti Puspitasari Santoso	:	*Chairman*
Anggota	:	Agus Mulyanto Mohamed Idwan Ganie		Agus Mulyanto Mohamed Idwan Ganie	:	*Members*
Sekretaris Perusahaan	:	Christophorus Taufik Siswandi		Christophorus Taufik Siswandi	:	*Corporate Secretary*
Audit Internal	:	Harangan Pokki		Harangan Pokki	:	*Internal Audit*

Personil manajemen kunci Grup adalah anggota dewan komisaris dan direksi Perusahaan dan entitas anak.

Key management personnel of the Group are members of the board of commissioners and board of directors of the Company and subsidiaries.

b. Perizinan

Entitas anak telah memperoleh perizinan dalam bidang industri media sebagai berikut:

MNCSV telah memperoleh izin dari Menteri Penerangan dengan surat keputusan No. 1848/RTF/K/XI/1993 tanggal 3 November 1993 dan No. 2142/RTF/K/XII/1995 tanggal 14 Desember 1995, untuk menyalurkan program televisi seperti CNN, HBO, ESPN, Discovery, TNT& Cartoon Network, Star Plus General Entertainment, Prime Sports, BBC World Service TV, CNBC Asia News Service, NBC Superchannel, Discovery, Channel (V) Int'l Music, Channel (V) Indo/English Contermp Music, Star TV Movies International, Bahasa Indonesia Movie Channel. Keputusan ini telah diperbaharui dengan izin dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 40/KEP/M.KOMINFO/01/2010 tanggal 27 Januari 2010.

Pada tahun 2014, MNCSV mengajukan permohonan rencana penambahan program siaran dan telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika telah mencatat perubahan tersebut dalam Database Perizinan Penyiaran berdasarkan surat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. B-275/M.KOMINFO/PI.03.02/3/2015 tanggal 27 Maret 2015.

Pada tahun 2020, MNCSV telah mengajukan permohonan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) Nomor 439/T.04.03/2019 dengan masa berlaku IPP Tanggal 27 Januari 2020 s.d Januari 2030.

b. License

Subsidiaries obtained their media industry licenses as follows:

MNCSV has obtained approvals from the Ministry of Information in his Decision Letter No. 1848/RTF/K/XI/1993 dated November 3, 1993 and Decision Letter No. 2142/RTF/K/XII/1995 dated December 14, 1995, to broadcast television programs such as CNN, HBO, ESPN, Discovery, TNT& Cartoon Network, Star Plus General Entertainment, Prime Sports, BBC World Service TV, CNBC Asia News Service, NBC Superchannel, Discovery, Channel (V) Int'l Music, Channel (V) Indo/English Contermp Music, Star TV Movies International, Bahasa Indonesia Movie Channel. This approvals have been renewed with approval from the Ministry of Comunication and Information of Republic Indonesia with Decision Letter No. 40/KEP/M.KOMINFO/01/2010 dated January 27, 2010.

In 2014, MNCSV has applied for the additional of broadcasting programs and has been approved by the Directorate General of Post and Information. Directorate General of Post and Information had been recorded those changes in the Broadcasting License Database based on the letter from the Minister of Communications and Information of the Republic of Indonesia No. B-275/M.KOMINFO/PI.03.02/3/2015 dated March 27, 2015.

In 2020, MNCSV has applied for an extension of the Broadcasting Implementation License (IPP) with the Decree of the Minister of Communication and Informatics of the Republic of Indonesia (Kominfo) Number 439/T.04.03/2019 with the validity period of IPP dated January 27, 2020, to January 2030.

PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) telah memperoleh izin dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 105/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tanggal 16 Oktober 2006 tentang izin penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi. Izin tersebut telah diperpanjang dengan Surat Keputusan No. 1813 Tahun 2016 tanggal 13 Oktober 2016.	*PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) has obtained a license from the Ministry of Communication and Information of Republic Indonesia with Decision Letter No. 105/KEP/M.KOMINFO/10/2006 dated October 16, 2006 to engage in private television broadcast activities. This license has been renewed through Decision Letter No. 1813 Year 2016 dated October 13, 2016.*
PT MNC Televisi Indonesia (d/h. PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (MNCTV)) telah memperoleh izin dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 154/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tanggal 16 Oktober 2006 tentang izin penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi. Izin tersebut telah diperpanjang dengan Surat Keputusan No. 1814 Tahun 2016 tanggal 13 Oktober 2016.	*PT MNC Televisi Indonesia (formerly PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (MNCTV)) has obtained a license from the Ministry of Communication and Information of Republic Indonesia with Decision Letter No. 154/KEP/M.KOMINFO/10/2006 dated October 16, 2006 to engage in private television broadcast activities. This license has been renewed through Decision Letter No. 1814 Year 2016 dated October 13, 2016.*
PT Global Informasi Bermutu (GTV) telah memperoleh izin dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 106/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tanggal 16 Oktober 2006 tentang izin penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi. Izin tersebut telah diperpanjang dengan Surat Keputusan No. 1815 Tahun 2016 tanggal 13 Oktober 2016.	*PT Global Informasi Bermutu (GTV) has obtained a license from the Ministry of Communication and Information of Republic Indonesia with Decision Letter No. 106/KEP/M.KOMINFO/10/2006 dated October 16, 2006 to engage in private television broadcast services activities. This license has been renewed through Decision Letter No. 1815 Year 2016 dated October 13, 2016.*
PT Deli Media Televisi (DTV) telah memperoleh izin dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 707 Tahun 2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang izin penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi. Izin tersebut telah diperpanjang dengan Surat Keputusan No. 337/T.02.02/2023 Tahun 2023 tanggal 7 Juni 2023.	*PT Deli Media Televisi (DTV) has obtained a license from the Ministry of Communication and Information of Republic Indonesia with Decision Letter No. 707 Year 2013 dated August 12, 2013 to engage in private television broadcast services activities. This license has been renewed through Decision Letter No. 337/T.02.02/202 Year 2023 dated June 7, 2023.*
PT Global Telekomunikasi Terpadu (GTT) telah memperoleh izin dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 644/KEP/M.KOMINFO/12/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang izin penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi. Izin tersebut telah diperpanjang dengan Surat Keputusan No. 79/T.02.03/2021 tanggal 14 Desember 2021.	*PT Global Telekomunikasi Terpadu (GTT) has obtained a license from the Ministry of Communication and Information of Republic Indonesia with Decision Letter No. 644/KEP/M.KOMINFO/12/2011 dated December 14, 2011 to engage in private television broadcast services activities. This license has been renewed through Decision Letter No. 79/T.02.03/2021 dated December 14, 2021.*
Izin penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk entitas anak di atas berlaku selama 10 tahun sejak tanggal Surat Keputusan diterbitkan dan dapat diperpanjang.	*Permission to engage in private television broadcast activities issued by the Ministry of Communication and Information of Republic Indonesia for subsidiaries have a term of 10 years since the date of Decision Letter issued and could be renewed.*

c. Penawaran Umum Efek Perusahaan

Pada tanggal 20 Juni 1995, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) dengan suratnya No. S-795/PM/1995 untuk melakukan Penawaran Umum kepada masyarakat atas 200 juta saham Perusahaan dengan nilai nominal Rp500 per saham dan harga penawaran Rp1.250 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Juli 1995.

Pada tanggal 8 Juni 2004, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) dengan suratnya No. S-1648/PM/2004 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas I dengan hak memesan efek terlebih dahulu kepada para pemegang saham sebanyak-banyaknya 308.798.987 saham Perusahaan dengan nilai nominal Rp500 per saham dan harga penawaran Rp2.500 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 Juni 2004.

Pemecahan nilai nominal saham dari Rp500 per saham menjadi Rp100 per saham telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia tanggal 27 April 2007 sehingga jumlah saham Perusahaan menjadi 13.018.201.550 lembar.

Penambahan saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu sebanyak 685.168.503 saham telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia tanggal 22 Juni 2007.

Penambahan saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu masing-masing sebanyak 811.267.755 saham dan 324.622.109 saham telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 Januari 2019 dan 28 Maret 2019 (Catatan 33).

Penambahan saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu masing-masing sebanyak 700.000.000 saham dan 549.486.300 saham telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 Agustus 2020 dan 17 September 2020 (Catatan 33).

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, saham Perusahaan masing-masing sebanyak 16,583,997,586 saham telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

c. Public Offering of the Company's Shares

On June 20, 1995, the Company obtained the effective notice from the Chairman of The Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (presently the Financial Services Authority) in his letter No. S-795/PM/1995 for the Initial Public Offering of 200 million shares with par value of Rp500 per share, at an offering price of Rp1,250 per share. These shares were listed on the Indonesia Stock Exchange on July 17, 1995.

On June 8, 2004, the Company obtained the effective notice from the Chairman of The Capital Market Supervisory Agency (presently the Financial Services Authority) in his letter No. S-1648/PM/2004 for the Limited Offering I of a maximum of 308,798,987 shares through Rights Issue with preemptive rights to the stockholders with par value of Rp500 per share, at an offering price of Rp2,500 per share. These shares were listed on the Indonesia Stock Exchange on June 23, 2004.

Stock split through reduction of par value per share from Rp500 per share to Rp100 per share were listed on the Indonesia Stock Exchange on April 27, 2007, therefore the number of shares become 13,018,201,550 shares.

Addition of new shares without pre-emptive rights amounted to 685,168,503 shares have been listed on the Indonesia Stock Exchange on June 22, 2007.

Addition of new shares without pre-emptive rights amounted to 811,267,755 shares and 324,622,109 shares have been listed on the Indonesia Stock Exchange on January 28, 2019 and March 28, 2019, respectively (Note 33).

Addition of new shares without pre-emptive rights amounted to 700,000,000 shares and 549,486,300 shares have been listed on the Indonesia Stock Exchange on August 24, 2020 and September 17, 2020, respectively (Note 33).

As of December 31, 2024 and 2023, the Company's shares totaling to 16,583,997,586 shares, respectively, have been listed on the Indonesian Stock Exchange.

d. Penawaran Umum Obligasi

Pada tanggal 21 Juni 2017, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dengan suratnya No. S-342/D.04/2017 untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahun 2017 dengan Tingkat Bunga Tetap dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp1.100.000 juta, dimana Obligasi tersebut tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dalam rangka penerbitan obligasi ini, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bertindak sebagai wali amanat (Catatan 30).

Pada tanggal 21 Juni 2017, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dengan suratnya No. S-342/D.04/2017 untuk melakukan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahun 2017 dengan Cicilan Ijarah dengan jumlah sebesar Rp400.000 juta, dimana Sukuk tersebut tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dalam rangka penerbitan obligasi dan sukuk ini, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bertindak sebagai wali amanat (Catatan 31).

Pada tanggal 31 Agustus 2020, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dengan suratnya No. S-235/D.04/2020 untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahun 2020 dengan Tingkat Bunga Tetap dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp1.400.000 juta, dimana Obligasi tersebut tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dalam rangka penerbitan obligasi ini, PT Bank Bukopin Tbk bertindak sebagai wali amanat (Catatan 30).

Pada tanggal 31 Agustus 2020, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dengan suratnya No. S-235/D.04/2020 untuk melakukan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Global Mediacom Tahun 2020 dengan Cicilan Ijarah dengan jumlah sebesar Rp600.000 juta, dimana Sukuk tersebut tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dalam rangka penerbitan obligasi dan sukuk ini, PT Bank Bukopin Tbk bertindak sebagai wali amanat (Catatan 31).

Pada tanggal 24 Juni 2022, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dengan suratnya No. S-106/D.04/2022 untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Global Mediacom Tahun 2022 dengan Tingkat Bunga Tetap dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp1.300.000 juta, dimana Obligasi tersebut tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dalam rangka penerbitan obligasi ini, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bertindak sebagai wali amanat (Catatan 30).

d. Public Offering of Bonds

On June 21, 2017, the Company obtained an effective notice from the Financial Services Authority in his letter No. S-342/D.04/2017 for the Public Offering of Global Mediacom Sustainable Bonds I Year 2017 with Fixed Interest Rate and maximum principal amount of Rp1,100,000 million which Bond and Sukuk Ijarah were listed on the Indonesia Stock Exchange. In relation to the issuance of the bonds, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk acted as trustee (Note 30).

On June 21, 2017, the Company obtained an effective notice from the Financial Services Authority in his letter No. S-342/D.04/2017 for the Public Offering of Global Mediacom Sustainable Sukuk Ijarah I Year 2017 with Installment Ijarah amounting Rp400,000 million, which Sukuk Ijarah were listed on the Indonesia Stock Exchange. In relation to the issuance of the bonds, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk acted as trustee (Note 31).

On August 31, 2020, the Company obtained an effective notice from the Financial Services Authority in his letter No. S-235/D.04/2020 for the Public Offering of Global Mediacom Sustainable Bonds II Year 2020 with Fixed Interest Rate and maximum principal amount of Rp1,400,000 million which Bond were listed on the Indonesia Stock Exchange. In relation to the issuance of the bonds, PT Bank Bukopin Tbk acted as trustee (Note 30).

On August 31, 2020, the Company obtained an effective notice from the Financial Services Authority in his letter No. S-235/D.04/2020 for the Public Offering of Global Mediacom Sustainable Sukuk Ijarah II Year 2020 with Installment Ijarah amounting Rp600,000 million, which Sukuk Ijarah were listed on the Indonesia Stock Exchange. In relation to the issuance of the bonds, PT Bank Bukopin Tbk acted as trustee (Note 31).

On June 24, 2022, the Company obtained an effective notice from the Financial Services Authority in his letter No. S-106/D.04/2022 for the Public Offering of Global Mediacom Sustainable Bonds III Year 2022 with Fixed Interest Rate and maximum principal amount of Rp1,300,000 million which Bond were listed on the Indonesia Stock Exchange. In relation to the issuance of the bonds, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk acted as trustee (Note 30).

Pada tanggal 24 Juni 2022, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dengan suratnya No. S-106/D.04/2022 untuk melakukan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Global Mediacom Tahun 2022 dengan Cicilan Ijarah dengan jumlah sebesar Rp900.000 juta, dimana Sukuk tersebut tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dalam rangka penerbitan sukuk ini, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bertindak sebagai wali amanat (Catatan 31).

On June 24, 2022, the Company obtained an effective notice from the Financial Services Authority in his letter No. S-106/D.04/2022 for the Public Offering of Global Mediacom Sustainable Sukuk Ijarah III Year 2022 with Installment Ijarah amounting to Rp900,000 million which Sukuk Ijarah were listed on the Indonesia Stock Exchange. In relation to the issuance of the bonds, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk acted as trustee (Note 31).

Pada tanggal 27 Juni 2023, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dengan suratnya No. S-165/D.04/2023 untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahun 2023 dengan Tingkat Bunga Tetap dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp1.500.000 juta, dimana Obligasi tersebut tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dalam rangka penerbitan obligasi ini, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bertindak sebagai wali amanat (Catatan 30).

On June 27, 2023, the Company obtained an effective notice from the Financial Services Authority in his letter No. S-165/D.04/2023 for the Public Offering of Global Mediacom Sustainable Bonds IV Year 2023 with Fixed Interest Rate and maximum principal amount of Rp1,500,000 million which Bond were listed on the Indonesia Stock Exchange. In relation to the issuance of the bonds, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk acted as trustee (Note 30).

Pada tanggal 27 Juni 2023, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dengan suratnya No. S-165/D.04/2023 untuk melakukan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahun 2023 dengan Cicilan Ijarah dengan jumlah sebesar Rp1.500.000 juta, dimana Sukuk tersebut tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dalam rangka penerbitan sukuk ini, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bertindak sebagai wali amanat (Catatan 31).

On June 27, 2023, the Company obtained an effective notice from the Financial Services Authority in his letter No S-165/D.04/2023 for the Public Offering of Global Mediacom Sustainable Sukuk Ijarah IV Year 2023 with Installment Ijarah amounting to Rp1,500,000 million which Sukuk Ijarah were listed on the Indonesia Stock Exchange. In relation to the issuance of the bonds, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk acted as trustee (Note 31).

e. Entitas Anak

e. Consolidated Subsidiaries

Rincian entitas anak Perusahaan pada akhir periode pelaporan adalah sebagai berikut:

Details of the Company's subsidiaries at the end of the reporting period are as follows:

Entitas anak/ *The subsidiaries*	Domisili/ *Domicile*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* 31 Desember/ *December 31,* 2024 (%)	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* 31 Desember/ *December 31,* 2023 (%)	Tahun operasi komersial/ *Start of commercial operations*	Jumlah aset sebelum eliminasi *Total assets before elimination* 31 Desember/ *December 31,* 2024	Jumlah aset sebelum eliminasi *Total assets before elimination* 31 Desember/ *December 31,* 2023
FTA dan konten/*FTA and content*						
PT Media Nusantara Citra Tbk (MNC) dan entitas anak/*and its subsidiaries*	Jakarta	52,67	52,67	1997	24.642.848	22.765.563
PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) *)	Jakarta	100,00	100,00	1989	6.375.836	6.419.746
PT Global Informasi Bermutu (GTV) *)	Jakarta	100,00	100,00	2002	1.777.278	1.865.513
PT MNC Televisi Indonesia (MNCTV) *)	Jakarta	87,07	87,07	1990	5.725.170	5.583.883
PT MNC Televisi Network (MTN) dan entitas anak/ *and its subsidiaries *)*	Jakarta	100,00	100,00	2008	2.150.984	2.204.100
PT Deli Media Televisi (DTV) *)	Medan	90,00	90,00	2008	5.724	6.271
PT Global Telekomunikasi Terpadu (GTT) *)	Semarang	49,00	49,00	2008	3.118	2.828
PT Tivi Bursa Indonesia (TBI) *)	Jakarta	55,00	55,00	2015	39.417	22.736
PT Media Semesta Sumatera *)	Jakarta	99,99	99,99	2017	47.988	122.078
PT Media Semesta Bangka *)	Jakarta	99,99	99,99	2017	32.455	100.449
PT Media Semesta Lampung *)	Jakarta	99,99	99,99	2017	48.768	54.698
PT Media Semesta Jakarta *)	Jakarta	99,99	99,99	2017	221.023	257.036
PT Media Semesta Jabar *)	Jakarta	99,99	99,99	2017	45.475	50.712
PT Media Semesta Matahari *)	Jakarta	99,99	99,99	2017	16.112	16.112
PT Media Semesta Bali *)	Jakarta	99,99	99,99	2017	63.086	70.054
PT Media Semesta Nusa *)	Jakarta	99,99	99,99	2017	40.465	79.938
PT Media Semesta Kalimantan *)	Jakarta	99,99	99,99	2017	73.161	115.845
PT Media Semesta Sulawesi *)	Jakarta	99,99	99,99	2017	34.402	44.544
PT Media Semesta Makassar *)	Jakarta	99,99	99,99	2017	30.961	38.128
PT Media Semesta Permata *)	Jakarta	99,99	99,99	2017	48.246	91.363

Entitas anak/ *The subsidiaries*	Domisili/ *Domicile*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* 31 Desember/ *December 31,* 2024 (%)	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* 31 Desember/ *December 31,* 2023 (%)	Tahun operasi komersial/ *Start of commercial operations*	Jumlah aset sebelum eliminasi *Total assets before elimination* 31 Desember/ *December 31,* 2024	Jumlah aset sebelum eliminasi *Total assets before elimination* 31 Desember/ *December 31,* 2023
FTA dan konten/*FTA and content*						
PT MNC Multimedia Networks (MMN) dan entitas anak/ *and its subsidiaries *)*	Jakarta	99,43	99,43	2005	183.359	186.728
PT Radio Trijaya Shakti (RTS) dan entitas entitas/*and its subsidiaries* *)	Jakarta	95,00	95,00	1971	35.956	37.278
PT Radio Prapanca Buana Suara (RPBS) *)	Medan	91,60	91,60	1978	1.094	1.355
PT Radio Mancasuara (RM) *)	Bandung	100,00	100,00	1971	1.221	1.518
PT Radio Swara Caraka Ria (RSCR) *)	Semarang	100,00	100,00	1971	607	824
PT Radio Efkindo (RE) *)	Yogyakarta	70,00	70,00	1999	1.020	1.184
PT Radio Tjakra Awigra (RCA) *)	Surabaya	100,00	100,00	1971	1.573	2.320
PT Radio Suara Monalisa (RSM) *)	Jakarta	90,00	90,00	1971	11.873	11.917
PT Mediawisata Sariasih (MS) *)	Bandung	100,00	100,00	2007	204	262
PT Radio Arief Rahman Hakim (RARH) *)	Jakarta	100,00	100,00	2007	17.003	15.990
PT Radio Sabda Sosok Sohor (RSSS) *)	Jakarta	100,00	100,00	1981	6.401	7.060
PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) dan entitas anak/*and its subsidiaries* *)	Jakarta	72,81	72,81	2001	7.612.135	6.739.478
PT Mediate Indonesia (MI) *) dan entitas anak/ *and its subsidiaries*	Jakarta	99,90	99,90	2001	267.073	177.005
PT Multi Media Integrasi (MMI) *)	Jakarta	99,00	99,00	2018	17.998	6.984
PT MNC Pictures (MNCP) *) dan entitas anak/ *and its subsidiaries*	Jakarta	90,00	99,99	2009	2.677.637	2.620.367
PT MNC Movieland Indonesia (MVI) *)	Bogor	99,99	99,99	2014	1.215.437	1.197.430
PT Star Media Nusantara (SMN) *) dan entitas anak/ *and its subsidiaries*	Jakarta	99,99	99,99	2007	280.527	225.782
PT Star Cipta Musikindo (SCM) *)	Jakarta	90,00	90,00	2016	10.426	7.892
PT Suara Mas Abadi (SMA) *)	Jakarta	92,00	92,00	2011	120.146	89.185
PT Swara Bintang Abadi (SBA) *)	Jakarta	80,00	80,00	2020	2.098	1.653
PT MNC Infotainment Indonesia (MII) *)	Jakarta	99,99	99,99	2017	51.184	47.597
PT MNC Animasi Indonesia (MAI) (d/h / *formerly* PT MNC Film Indonesia) *)	Jakarta	99,99	99,99	2017	43.001	21.908
PT Asia Media Productions (AMP) *)	Jakarta	70,00	70,00	2018	44.475	54.323
PT MNC Lisensi Internasional (MLI) *)	Jakarta	99,99	99,99	2013	27.391	13.415
PT Blockbuster Media Visual (BMV) *)	Jakarta	98,82	98,82	2020	19.496	19.834
PT Esports Star Indonesia (ESI) *)	Jakarta	80,00	80,00	2021	57.353	64.364
PT MNC Digital Indonesia (MNCD) *) dan entitas anak/*and its subsidiaries*	Jakarta	99,99	99,99	2018	1.627.381	1.637.854
PT MNC Metube Indonesia *)	Jakarta	99,99	99,99	Belum beroperasi	10.000	10.000
MNC Digital Limited (MDL) *)	British Virgin Islands	100,00	100,00	2022	283.134	192.947
PT MNC Portal Indonesia dan entitas anak/ *and its subsidiaries* *)	Jakarta	99,99	99,99	2020	670.485	1.064.997
PT MNC Okezone Networks (Okezone) *)	Jakarta	99,99	99,99	2006	230.343	206.334
PT Media Nusantara Informasi (MNI) dan PT Sindonews Portal Indonesia (SPI) *)	Jakarta	99,99	99,99	2005	187.951	175.031
PT Inews Digital Indonesia *)	Jakarta	99,99	99,99	2019	181.909	174.025
PT Highend Multimedia Indonesia (MNIE) *)	Jakarta	60,00	60,00	2008	5.108	4.354
PT MNC OTT Network (OTT) *) dan entitas anak/ *and its subsidiaries*	Jakarta	99,99	99,99	2011	1.278.146	1.237.981
PT Anak Muda Group *)	Jakarta	57,14	57,14	2013	24.297	17.028
PT MNC Media Utama (MMU) *)	Jakarta	99,99	99,99	Belum beroperasi	15.000	15.000
PT MNC Media Investasi (MMI) *)	Jakarta	99,99	99,99	2016	581.088	742.489
MNC International Middle East Limited (MIMEL)	British Virgin Islands	100,00	100,00	2007	2.334.431	2.229.736
TV Berbayar dan broadband/ Pay TV and broadband						
PT MNC Vision Networks Tbk (MVN) dan entitas anak/*and its subsidiary* *)	Jakarta	60,67	60,67	2007	8.770.332	9.478.405
PT MNC Sky Vision Tbk (MNCSV) *) dan entitas anak/*and its subsidiaries*	Jakarta	91,89	91,89	1988	2.643.528	3.033.491
PT Media Citra Indostar (MCI) *)	Jakarta	99,99	99,99	1999	607.001	613.687
PT Mitra Operator Lokal (MOL) *) dan entitas anak/*and its subsidiaries*	Jakarta	99,99	99,99	2001	159.063	150.250
PT AMG Kundur Vision *)	Batam	80,00	80,00	2019	22.028	23.107
PT Punggawa Utama Sorong Media (Punggawa) *)	Sorong	80,00	80,00	2020	1.284	1.344
PT MNC Kabel Mediakom (MKM) *)	Jakarta	99,99	99,99	2014	4.080.389	4.407.504
PT Nusantara Vision (NV) *)	Jakarta	99,99	99,99	2006	23.243	27.158
PT Digital Vision Nusantara (DVN) *)	Jakarta	99,99	99,99	2013	541.447	244.931
Ansat Broadcast Sdn. Bhd. (ABSB) *)	Malaysia	56,00	-	1998	21.785	-
Lain-lain/*Others*						
Global Mediacom International Ltd. (GMI) dan entitas anak/*and its subsidiaries*	Dubai	100,00	100,00	2012	113.986	143.543
PT Infokom Elektrindo (Infokom)	Jakarta	99,99	99,99	1998	1.072.517	1.174.954
PT MNC GS Homeshopping (MNC Shop)	Jakarta	60,00	60,00	2013	39.252	39.252
Universal Media Holding Corporation (Universal)	Cayman Islands	100,00	100,00	2007	202.915	39.355
BMTR Media Limited (BML) *)	Hong Kong	81,06	81,06	2020	41.131	468.859
BMTR Digital Limited (BDL) *)	Hong Kong	81,06	81,06	2002	302.473	298.998

*) Pemilikan tidak langsung/*Indirect ownership*

RCTI, GTV, MNCTV dan MTN memiliki secara langsung dan tidak langsung entitas anak, yang didirikan dengan tujuan untuk jasa penyiaran televisi.

RCTI, GTV, MNCTV and MTN have direct and indirect ownership in the following subsidiaries which are established to engage in television broadcasting service.

Pengembangan Usaha

Development of Business

Pada bulan September 2022, Perusahaan mengakuisisi 60% saham pada BMTR Digital Limited (BDL) atau 240.000 lembar saham.

In September 2022, the Company acquired 60% shares of BMTR Digital Limited (BDL) equity ownership or 240,000 shares.

Pada bulan Oktober 2023, MKM entitas anak MVN, melakukan transaksi dengan PT Asianet Media Teknologi dan PT Indosat Tbk, sebagai bagian dari strategi bisnis MKM untuk lebih fokus pada pengembangan binsis berupa video dan konten dengan melepaskan bisnis jasa penyelenggara jaringan *fixed broadband* yang merupakan industri padat modal. Dengan transaksi ini, MVN dan/atau MKM dapat merealisasikan keuntungan dari nilai investasi atas aset dan membuka peluang investasi bisnis baru dengan menggunakan realisasi keuntungan atas nilai investasi tersebut yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan konsolidasian MVN yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham MVN.

In October 2023, MKM a subsidiary of MVN, entered into a transaction with PT Asianet Media Teknologi and PT Indosat Tbk, as part of MKM's business strategies to focus on developing the video and content business by selling the fixed broadband network provider services business which is a capital-intensive industry. Through this transaction, MVN and/or MKM will be able to realize gains from the investment value of the assets and use those gains to open up new business investment opportunities which is expected to improve the Company's consolidated financial performance which will ultimately be expected to add value for all shareholders of MVN.

Pada tahun 2024, MVN, entitas anak, mengakuisisi 56% saham pada Ansat Broadcast Sdn. Bhd. (ABSB) atau 350.000.000 lembar saham (Catatan 47).

In 2024, MVN, a subsidiary, acquired 56% shares of Ansat Broadcast Sdn. Bhd. (ABSB) equity ownership or 350.000.00 shares (Note 47).

Pada bulan September 2024, MSIN, entitas anak, membeli 619.420.000 lembar saham PT Tripar Multivision Plus Tbk.

In September 2024, MSIN, a subsidiary, purchased 619,420,000 shares of PT Tripar Multivision Plus Tbk.

Penawaran Umum Saham Anak Perusahaan

Public Offering of the Company's Subsidiary Shares

Pada tanggal 25 Mei 2018, MSIN, entitas anak, memperoleh pernyataan efektif dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Keputusannya No. S-57/D.04/2018 untuk melakukan Penawaran Umum Saham kepada masyarakat atas 1.560.000.000 saham baru Perusahaan dengan nilai nominal Rp100 per saham dan harga penawaran Rp500 per saham. Saham - saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Juni 2018.

On May 25, 2018, MSIN, a subisidiary, obtained the effective notice from Commissioner Board of Financial Service Authority in his Decision Letter No.S-57/D.04/2018 for the Initial Public Offering of 1,560,000,000 shares with par value of Rp100 per share, at an offering price of Rp500 per share. These shares were listed on the Indonesia Stock Exchange on June 8, 2018.

Pada tanggal 27 Juni 2019, MVN, entitas anak, memperoleh pernyataan efektif dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Keputusannya No. S-101/D.04/2019 untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebesar 3.522.000.000 Saham baru seri B dengan nilai nominal Rp100 per saham dan harga penawaran Rp240 per saham dan penerbitan 3.522.000.000 Waran Seri I yang diberikan kepada setiap 1 saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp288 per saham dan periode pelaksanaan mulai tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan 8 Juli 2021. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadarluasa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Saham-saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Juli 2019.

On June 27, 2019, MVN, a subisidiary, obtained the effective notice from Commissioner Board of Financial Service Authority in his Decision Letter No. S-101/D.04/2019 for the Initial Public Offering of 3,522,000,000 new shares B Series with par value of Rp100 per share, at an offering price of Rp240 per share and issued 3,522,000,000 Warrants Series I to each holder of 1 new shares at an exercise price of Rp288 per share within exercise period from January 8, 2020 until July 8, 2021. If Warrants Series I are not exercised until the expiration date, then Warrants Series I become expired, worthless and invalid. These shares were listed on the Indonesia Stock Exchange on Juli 8, 2019.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") dari Ikatan Akuntan Indonesia serta Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah biaya historis, kecuali properti dan instrumen keuangan tertentu yang diukur pada jumlah revaluasian atau nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif pada atau setelah 1 Januari 2024

SAK berikut telah diterbitkan dan efektif pada tahun buku 2024, namun dampaknya tidak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian:

- Amendemen PSAK 116 - "Sewa terkait liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik"
- Amandemen PSAK 201 - "Penyajian laporan keuangan tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan"
- Amendemen PSAK 207 - "Laporan arus kas tentang pengaturan pembiayaan pemasok"

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of Compliance

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards ("SAKs"), which comprise the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAKs") and Interpretations to Financial Accounting Standards ("ISAKs") issued by the Financial Accounting Standards Board ("DSAK") of the Indonesian Institute of Accountants and the Regulations No. VIII.G.7 regarding Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies. These policy's have been consistently applied to all years presented, unless otherwise stated.

b. Basis of Preparation

The consolidated financial statements have been prepared on the historical cost basis except for certain properties and financial instruments that are measured at revalued amounts or fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below.

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

Financial Accounting Standards ("SAKs") andInterpretation to Financial Accounting Standards ("ISAKs") Issued Effective on or after January 1, 2024

The following SAK were issued and effective in 2024, but did not have a significant effect on the consolidated financial statements:

- *Amendments to SFAS 116 – "Leases related to lease* liabilities *in sale and lease back transactions"*
- *Amendment SFAS 201 - "Presentation of Financial Statements related to Non-current Liabilities with the Covenant"*
- *Amendment to SFAS 207 - "Cash flow statement on supplier financing arrangements"*

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif pada atau setelah 1 Januari 2025

- Amendemen PSAK 117 - "Kontrak Asuransi tentang penerapan awal PSAK 117 dan PSAK 109 - informasi komparatif"
- Amandemen PSAK 221 - "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang kekurangan ketertukaran"

Pada tanggal diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, Grup masih mengevaluasi dampak penerapan standar-standar yang relevan di atas terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Financial Accounting Standards ("SAKs") and Interpretation to Financial Accounting Standards ("ISAKs") Issued But Effective on or after January 1, 2025

- *Amendment to SFAS 117 - "Insurance Contracts regarding the initial application of SFAS 117 and SFAS 109 - comparative information"*
- *Amendment to SFAS 221 - "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates on exchangeability shortfalls"*

As at the issuance date of these consolidated financial statements, the Group is still evaluating the impact of the above relevant standards on the consolidated financial statements.

c. Dasar Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan dan entitas anak (termasuk entitas terstruktur). Pengendalian tercapai jika Perusahaan memiliki kekuasaan atas *investee*; eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Perusahaan menilai kembali apakah entitas tersebut adalah *investee* jika fakta keadaan yang mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian yang disebutkan di atas.

Ketika Perusahaan memiliki hak suara kurang dari mayoritas di-*investee*, ia memiliki kekuasaan atas *investee* ketika hak suara investor cukup untuk memberinya kemampuan praktis untuk mengarahkan aktivitas relevan secara sepihak. Perusahaan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah hak suara Perusahaan cukup untuk memberikan Perusahaan kekuasaan, termasuk (i) ukuran kepemilikan hak suara Perusahaan relatif terhadap ukuran dan penyebaran kepemilikan pemilik hak suara lain; (ii) hak suara potensial yang dimiliki oleh Perusahaan, pemegang suara lain atau pihak lain; (iii) hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan (iv) setiap fakta dan keadaan tambahan apapun mengindikasikan bahwa Perusahaan memiliki, atau tidak memiliki, kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas yang relevan pada saat keputusan perlu dibuat, termasuk pola suara pemilikan dalam RUPS sebelumnya.

c. Basis of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities (including structured entities) controlled by the Company and its subsidiaries. Control is achieved where the Company has the power over the investee; is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee; and has the ability to use its power to affect its returns.

The Company reassesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control listed above.

When the Company has less than a majority of the voting rights of an investee, it has power over the investee when the voting rights are sufficient to give it the practical ability to direct the relevant activities of the investee unilaterally. The Company considers all relevant facts and circumstances in assessing whether or not the Company's voting rights in an investee are sufficient to give it power, including (i) the size of the Company's holding of voting rights relative to the size and dispersion of holding of the other vote holders; (ii) potential voting rights held by the Company, other vote holders or other parties; (iii) rights arising from other contractual arrangements; and (iv) any additional facts and circumstances that indicate that the Company has, or does not have, the current ability to direct the relevant activities at the time that decisions need to be made, including voting patterns at previous shareholders' meetings.

Konsolidasi entitas anak dimulai ketika Perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas anak dan akan dihentikan ketika Perusahaan kehilangan pengendalian pada entitas anak. Secara khusus, pendapatan dan beban entitas anak diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi konsolidasian dan penghasilan komprehensif lain dari tanggal diperolehnya pengendalian Perusahaan sampai tanggal ketika Perusahaan berhenti mengendalikan entitas anak.

Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Specifically, income and expense of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Company gains control until the date when the Company ceases to control the subsidiary.

Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan untuk kepentingan non-pengendali. Perusahaan juga mengatribusikan total laba komprehensif entitas anak kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non-pengendali memiliki saldo defisit.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Company and to the non-controlling interest. Total comprehensive income of subsidiaries is attributed to the owners of the Company and the non-controlling interest even if this results in the non-controlling interest having a deficit balance.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup.

When necessary, adjustment are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies in line with the Group's accounting policies.

Seluruh aset dan liabilitas dalam intra-grup, ekuitas, pendapatan, biaya dan arus kas yang berkaitan dengan transaksi dalam Grup dieliminasi secara penuh pada saat konsolidasian.

All intragroup assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

Perubahan kepemilikan Grup pada entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian Grup atas entitas anak dicatat sebagai transaksi ekuitas. Jumlah tercatat dari kepemilikan Grup dan kepentingan non-pengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kepentingan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah tercatat kepentingan non-pengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan dengan pemilik entitas induk.

Changes in the Group's ownership interest in existing subsidiaries that do not result in the Group losing control over the subsidiaries are accounted for as equity transactions. The carrying amounts of the Group's interest and the non-controlling interest are adjusted to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interest are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to owners of the Company.

Ketika Grup kehilangan pengendalian pada entitas anak, keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi dan dihitung sebagai perbedaan antara (i) agregat nilai wajar pembayaran yang diterima dan nilai wajar sisa kepemilikan (*retained interest*) dan (ii) jumlah tercatat sebelumnya dari aset (termasuk goodwill), dan liabilitas dari entitas anak dan setiap kepentingan non-pengendali. Seluruh jumlah yang diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas anak yang dicatat seolah-olah Grup telah melepaskan secara langsung aset atau liabilitas terkait entitas anak (yaitu direklasifikasi ke laba rugi atau ditransfer ke kategori lain dari ekuitas sebagaimana ditentukan/diizinkan oleh standar akuntansi yang berlaku). Nilai wajar setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal untuk akuntansi berikutnya dalam PSAK 109, Instrumen Keuangan atau, ketika berlaku, biaya perolehan pada saat pengakuan awal dari investasi pada entitas asosiasi.

When the Group losses control of a subsidiary, a gain or loss is recognized in profit or loss and is calculated as the difference between (i) the aggregate of the fair value of the consideration received and the fair value of any retained interest and (ii) the previous carrying amount of the assets (including goodwill), and liabilities of the subsidiary and any non-controlling interest. All amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that subsidiary are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities of the subsidiary (i.e. reclassified to profit or loss or transferred to another category of equity as specified/permitted by applicable accounting standards). The fair value of any investment retained in the former subsidiary at the date when control is lost is regarded as the fair value on initial recognition for subsequent accounting under PSAK 109, Financial Instruments or, when applicable, the cost on initial recognition of an investment in an associate.

d. Kombinasi Bisnis

Akuisisi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Grup, liabilitas yang diakui oleh Grup kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui di dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan standar yang relevan.

Goodwill diukur sebagai selisih lebih dari nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada) atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih pada tanggal akuisisi. Jika, setelah penilaian kembali, jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih pada tanggal akuisisi melebihi jumlah imbalan yang dialihkan, jumlah dari setiap kepentingan non pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada), selisih lebih diakui segera dalam laba rugi sebagai pembelian dengan diskon.

Bila imbalan yang dialihkan oleh Grup dalam suatu kombinasi bisnis termasuk aset atau liabilitas yang berasal dari pengaturan imbalan kontinjen (*contingent consideration arrangement*), imbalan kontinjen tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan termasuk sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis.

Perubahan dalam nilai wajar atas imbalan kontinjen yang memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap goodwill. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang berasal dari informasi tambahan yang diperoleh selama periode pengukuran (yang tidak melebihi satu tahun sejak tanggal akuisisi) tentang fakta-fakta dan kondisi yang ada pada tanggal akuisisi.

d. Business Combinations

Acquisitions of businesses are accounted for using the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Group, liabilities incurred by the Group to the former owners of the acquiree, and the equity interests issued by the Group in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized in profit or loss as incurred.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant standards.

Goodwill is measured as the excess of the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree, and the fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquire (if any) over the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and the liabilities assumed. If, after the reassessment, the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and liabilities assumed exceeds the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree and the fair value of the acquirer's previously held interest in the acquiree (if any), the excess is recognized immediately in profit or loss as a bargain purchase option.

When the consideration transferred by the Group in a business combination includes assets or liabilities resulting from a contingent consideration arrangement, the contingent consideration is measured at its acquisition-date fair value and included as part of the consideration transferred in a business combination.

Changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as measurement period adjustments are adjusted retrospectively, with corresponding adjustments against goodwill. Measurement period adjustments are adjustments that arise from additional information obtained during the measurement period (which cannot exceed one year from the acquisition date) about facts and circumstances that existed at the acquisition date.

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Grup atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugian dihasilkan, jika ada, diakui dalam laba rugi. Jumlah yang berasal dari kepemilikan sebelum tanggal akuisisi yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi dimana perlakuan tersebut akan sesuai jika kepemilikan tersebut dilepas/dijual.

When a business combination is achieved in stages, the Group's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. Amounts arising from interests in the acquiree prior to the acquisition date that have previously been recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss where such treatment would be appropriate if that interests were disposed of.

Akuntansi berikutnya untuk perubahan nilai wajar dari imbalan kontinjensi yang tidak memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran tergantung pada bagaimana imbalan kontinjensi diklasifikasikan. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali pada setiap tanggal pelaporan dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas diukur kembali pada nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan, dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

The subsequent accounting for changes in the fair value of the contingent consideration that do not qualify as measurement period adjustments depends on how the contingent consideration is classified. Contingent consideration that is classified as equity is not remeasured at subsequent reporting dates and its subsequent settlement is accounted for within equity. Contingent consideration that is classified as an asset or liability is remeasured subsequent to reporting dates at fair value, with changes in fair value recognised in profit or loss.

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Grup atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugian dihasilkan, jika ada, diakui dalam laba rugi. Jumlah yang berasal dari kepemilikan sebelum tanggal akuisisi yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi dimana perlakuan tersebut akan sesuai jika kepemilikan tersebut dilepas/dijual.

When a business combination is achieved in stages, the Group's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. Amounts arising from interests in the acquiree prior to the acquisition date that have previously been recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss where such treatment would be appropriate if that interests were disposed of.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Grup melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period, or additional assets or liabilities are recognized, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have affected the amount recognized as of that date.

e. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

e. Business Combination Under Common Control

Kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan dimana aset dan liabilitas yang diperoleh dari kombinasi bisnis dicatat oleh pengakuisisi pada jumlah tercatatnya. Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat disajikan sebagai tambahan modal disetor dan tidak diakui ke laba rugi.

Business combination of entities under common control that qualifies as a business are accounted for under pooling of interest method where assets and liabilities acquired in the business combination are recorded by the acquirer at their book values. The difference between the transfer price and the book value is presented as Additional Paid in Capital and is not recycled to profit or loss.

Metode penyatuan kepemilikan diterapkan seolah-olah entitas telah bergabung sejak periode dimana entitas yang bergabung berada dalam sepengendali.

The pooling of interest method is applied as if the entities had been combined from the period when the merging entities were placed under common control.

f. Transaksi dan Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing

Laporan keuangan individu masing-masing entitas Grup diukur dan disajikan dalam mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan konsolidasian dari grup dan laporan posisi keuangan Perusahaan disajikan dalam mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan mata uang penyajian untuk laporan keuangan konsolidasian.

Dalam penyusunan laporan keuangan setiap entitas individual grup, transaksi dalam mata uang asing selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap akhir perode pelaporan, pos moneter dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos-pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos nonmoneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing tidak dijabarkan kembali.

Selisih kurs atas pos moneter diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya kecuali untuk:

- Selisih kurs atas pinjaman valuta asing yang berkaitan dengan aset dalam konstruksi untuk penggunaan yang produktif di masa depan, termasuk dalam biaya perolehan aset tersebut ketika dianggap sebagai penyesuaian atas biaya bunga atas pinjaman valuta asing.
- Selisih kurs atas pos moneter piutang atau utang pada kegiatan dalam valuta asing yang penyelesaiannya tidak direncanakan atau tidak mungkin terjadi (membentuk bagian dari investasi bersih dalam kegiatan usaha luar negeri), yang pada awalnya diakui pada penghasilan komprehensif lain dan direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi pada pembayaran kembali pos moneter.

Untuk tujuan penyajian laporan keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas kegiatan usaha luar negeri Grup dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan. Pos penghasilan dan beban dijabarkan menggunakan kurs rata-rata untuk periode tersebut, kecuali kurs berfluktuasi secara signifikan selama periode tersebut, dalam hal ini kurs yang berlaku pada tanggal transaksi yang digunakan. Selisih kurs yang timbul diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam ekuitas (dan diatribusikan pada kepentingan non-pengendali).

f. Foreign Currency Transactions and Translation

The individual financial statements of each Group entity are measured and presented in the currency of the primary economic environment in which the entity operates (its functional currency). The consolidated financial statements of the group and the statement of financial position of the company are presented in Indonesian Rupiah, which is the functional currency of the company and the presentation currency for the consolidated financial statements.

In preparing the financial statements of each individual group entity, transactions in currencies other than the entity's functional currency (foreign currencies) are recognized at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions. At the end of each reporting period, monetary items denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at that date. Non-monetary items carried at fair value that are denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at the date when the fair value was determined. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not retranslated.

Exchange differences on monetary items are recognized in profit or loss in the period in which they arise except for:

- *Exchange differences on foreign currency borrowing relating to assets under construction for future productive use, which are included in the cost of those assets when they are regarded as an adjustment to interest costs on those foreign currency borrowing.*
- *Exchange differences on monetary items receivable from or payable to a foreign currency operation for which settlement is neither planned nor likely to occur (therefore forming part of the net investment in the foreign operation), which are recognized initially in other comprehensive income and reclassified from equity to profit or loss on repayment of the monetary items.*

For the purposes of presenting these consolidated financial statements, the assets and liabilities of the Group's foreign operations are translated into Indonesian Rupiah using exchange rates prevailing at the end of each reporting period. Income and expense items are translated at the average exchange rates for the period, unless exchange rates fluctuate significantly during that period, in which case the exchange rates at the dates of the transactions are used. Exchange differences arising, if any, are recognized in other comprehensive income and accumulated in equity (and attributed to non-controlling interests as appropriate).

Goodwill dan penyesuaian nilai wajar aset teridentifkasi yang diperoleh dan liabilitas yang dalihkan melalui akuisisi dari kegiatan usaha luar negeri diperlakukan sebagai aset dan liabilitas dari kegiatan usaha luar negeri dan dijabarkan pada kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan. Selisih kurs yang timbul diakui pada penghasilan komprehensif lain.

Goodwill and fair value adjustments to identifiable assets acquired and liabilities assumed through acquisition of a foreign operation are treated as assets and liabilities of the foreign operation and translated at the rate of exchange prevailing at the end of each reporting period. Exchange differences arising are recognized in other comprehensive income.

g. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

g. Transactions with Related Parties

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup (entitas pelapor):

A related party is a person or entity that is related to the Group (the reporting entity):

a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

   i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama entitas pelapor;
   ii. memiliki pengaruh signifikan entitas pelapor; atau
   iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:

   i. has control or joint control over the reporting entity;
   ii. has significant influence over the reporting entity; or
   iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
   iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
   v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
   vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
   vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:

   i. The entity, and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
   ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
   iii. Both entities are joint ventures of the same third party.
   iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
   v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
   vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
   vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).

viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian.

h. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai berikut:

- Biaya perolehan diamortisasi
- Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain (FVOCI)
- Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)

Biaya perolehan diamortisasi dan metode suku bunga efektif

Aset keuangan yang memenuhi kondisi berikut diukur pada biaya perolehan diamortisasi:

- aset keuangan dimiliki dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Kas dan setara kas, piutang pelanggan dan piutang lain-lain dan deposito berjangka diklasifikasi sebagai biaya perolehan diamortisasi, yang diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai.

Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the consolidated financial statements.

h. Financial Assets

All financial assets are recognised and derecognised on trade date where the purchase or sale of a financial asset is under a contract whose terms require delivery of the financial asset within the time frame established by the market concerned, and are initially measured at fair value plus transaction costs, except for those financial assets classified as at fair value through profit or loss, which are initially measured at fair value.

The Group's' financial assets are classified as follows:

- *Amortised cost*
- *Fair value through other comprehensive income (FVOCI)*
- *Fair value through profit or loss (FVTPL)*

Amortized cost and effective interest method

Financial assets that meet the following conditions are subsequently measured at amortized cost:

- *the financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and*
- *the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.*

Cash and cash equivalents, receivable from customers, other receivables and time deposits are classified as amortized cost, which are measured using the effective interest method less impairment.

Interest is recognized by applying the effective interest method, except for short-term receivables when the recognition of interest would be immaterial.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas dan pembayaran di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) tidak termasuk kerugian kredit yang diharapkan, selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

The effective interest method is a method of calculating the amortised cost of a financial instrument and of allocating interest income over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts or payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) excluding expected credit losses, through the expected life of the financial instrument, or where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen utang selain dari instrumen keuangan FVTPL.

Income is recognised on an effective interest basis for debt instruments other than those financial instruments at FVTPL.

Untuk instrumen keuangan selain yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, pendapatan bunga dihitung dengan menggunakan suku bunga efektif terhadap jumlah tercatat bruto dari aset keuangan (basis bruto), kecuali untuk aset keuangan yang kemudian mengalami penurunan nilai kredit tahap 3 dengan basis neto. Jika, pada periode pelaporan berikutnya, risiko kredit atas instrumen keuangan yang mengalami penurunan nilai kredit membaik sehingga aset keuangan tidak lagi mengalami penurunan nilai kredit, maka pendapatan bunga diakui dengan menerapkan suku bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto aset keuangan.

For financial instruments other than purchased or originated credit-impaired financial assets, interest income is calculated by applying the effective interest rate to the gross carrying amount of a financial asset (gross basis), except for financial assets that have subsequently become stage 3 credit-impaired by net bases. If, in subsequent reporting periods, the credit risk on the credit-impaired financial instrument improves so that the financial asset is no longer credit-impaired, interest income is recognized by applying the effective interest rate to the gross carrying amount of the financial asset.

Untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, pendapatan bunga diakui dengan menerapkan suku bunga kredit efektif yang disesuaikan terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut sejak pengakuan awal. Penghitungan tidak kembali ke basis bruto meskipun risiko kredit dari aset keuangan kemudian membaik sehingga aset keuangan tidak lagi memburuk.

For purchased or originated credit-impaired financial assets, the Group recognizes interest income by applying the credit-adjusted effective interest rate to the amortized cost of the financial asset from initial recognition. The calculation does not revert to the gross basis even if the credit risk of the financial asset subsequently improves so that the financial asset is no longer credit-impaired.

Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain (FVOCI)

Fair value through other comprehensive income (FVOCI)

Aset keuangan yang memenuhi ketentuan berikut ini selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain (FVOCI):

Financial assets that meet the following conditions are subsequently measured at fair value through other comprehensive income (FVOCI):

- aset keuangan dimiliki dalam model bisnis yang tujuannya dicapai dengan mengumpulkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

- *the financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial assets; and*
- *the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.*

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya dan diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi dalam ekuitas kecuali untuk kerugian penurunan nilai, bunga yang dihitung dengan metode suku bunga efektif dan laba rugi selisih kurs atas aset moneter yang diakui pada laba rugi. Jika investasi dilepas atau mengalami penurunan nilai, akumulasi laba atau rugi yang sebelumnya diakumulasi pada cadangan revaluasi investasi dalam pendapatan komprehensif lain, direklasifikasi ke laba rugi.

Gains and losses arising from changes in fair value are recognised in other comprehensive income and accumulated in investment revaluation reserve in equity, with the exception of impairment losses, interest calculated using the effective interest method, and foreign exchange gains and losses on monetary assets, which are recognised in profit or loss. Where the investment is disposed of or is determined to be impaired, the cumulative gain or loss previously accumulated in investment revaluation reserve in other comprehensive income is reclassified to profit or loss.

Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)

Fair value through profit or loss (FVTPL)

Semua aset keuangan lain yang tidak diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI selanjutnya diukur pada FVTPL.

All other financial assets that are not classified as amortized cost or FVOCI are subsequently measured at FVTPL.

Opsi nilai wajar untuk aset yang akan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI dapat ditetapkan yang tidak dapat dibatalkan, hanya pada pengakuan awal, untuk diukur pada FVTPL, jika penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas keuangan dan mengakui laba atau rugi dengan basis yang berbeda.

Fair value option for an asset which would otherwise be measured at amortized cost or FVOCI can be irrevocably designated, at initial recognition only, to be measured at FVTPL, if such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency that would otherwise arise from measuring any financial assets or liabilities and recognizing any gains or losses on them on different bases.

Aset keuangan FVTPL disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada Catatan 5.

Financial assets at FVTPL are stated at fair value, with any resulting gain or loss recognized in profit or loss. The net gain or loss recognized in profit or loss incorporates any dividend or interest earned on the financial asset. Fair value is determined in the manner described in Note 5.

Investasi ekuitas secara default diklasifikasi sebagai FVTPL. Namun, jika investasi ekuitas tidak dimiliki untuk diperdagangkan, terdapat opsi yang tidak dapat dibatalkan, pada pengakuan awal , untuk diklasifikasi sebagai FVOCI, dengan hanya pendapatan dividen yang diakui dalam laba rugi. Perubahan lainnya diakui dalam pendapatan komrehensif lain tanpa reklasifikasi ke laba rugi pada penghentian pengakuan dan penurunan nilai tidak diakui. Penetapan tersebut dilakukan atas dasar instrumen-demi-instrumen.

Equity investment, by default, is classified as FVTPL. However, if an equity investment is not held for trading, there are irrevocably option, at initial recognition only, to classify it at FVOCI, with only dividend income recognized in profit or loss. Other Changes are recognized in other comprehensive income without reclassification to profit or loss on de-recognition and no impairment recognised. Such designation is done on an instrument-by-instrument basis.

Investasi efek diperdagangkan, reksadana, unit link merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai FVTPL.

Investment equity securities held for trading, mutual funds, unit-linked are financial assets held for trading and are classified as at FVTPL.

Grup tidak memiliki aset keuangan, selain aset keuangan yang diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal.

The Group does not have financial assets, other than for trading purpose, that are designated as at FVTPL upon initial recognition.

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dievaluasi terhadap kerugian kredit ekspektasian (ECL) pada setiap tanggal pelaporan. Jumlah kerugian kredit ekspektasian diperbarui pada setiap tanggal pelaporan untuk mencerminkan perubahan risiko kredit sejak pengakuan awal atas instrumen keuangan tersebut.

ECL sepanjang umur diakui ketika terdapat peningkatan yang signifikan dalam risiko kredit sejak pengakuan awal. Sebaliknya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diukur untuk instrumen keuangan tersebut dengan jumlah yang sama dengan ECL 12 bulan (12mECL). Penilaian apakah ECL sepanjang umur harus diakui didasarkan pada peningkatan signifikan dalam kemungkinan atau risiko gagal bayar yang terjadi sejak pengakuan awal alih-alih pada bukti aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit pada tanggal pelaporan atau terjadi gagal bayar yang sebenarnya.

ECL sepanjang umur merupakan kerugian kredit ekspektasian yang dihasilkan dari semua kemungkinan peristiwa gagal bayar (*default*) selama perkiraan umur instrumen keuangan. Sebaliknya, 12mECL merupakan porsi ECL sepanjang umur yang diharapkan dihasilkan dari peristiwa gagal bayar (*default*) pada instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Dalam menilai apakah risiko kredit pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Grup membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pengakuan awal. Dalam melakukan penilaian ini, Grup mempertimbangkan informasi kuantitatif dan kualitatif yang wajar dan dapat didukung, termasuk pengalaman historis dan informasi berwawasan ke depan yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya. Informasi berwawasan ke depan yang dipertimbangkan mencakup prospek masa depan industri tempat debitur Grup beroperasi, yang diperoleh dari pertimbangan berbagai sumber eksternal actual dan memperkirakan informasi ekonomi yang terkait dengan operasi inti Grup.

Grup secara berkala memantau efektivitas kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan dan merevisinya sesuai kebutuhan untuk memastikan bahwa kriteria tersebut mampu mengidentifikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan sebelum jumlah tersebut jatuh tempo.

Impairment of financial assets

Financial assets, other than those at FVTPL, are assessed for expected credit losses (ECL) at each reporting date. The amount of expected credit losses is updated at each reporting date to reflect changes in credit risk since initial recognition of the respective financial instrument.

Lifetime ECL is recognized when there has been a significant increase in credit risk since initial recognition. If, on the other hand, the credit risk on the financial instrument has not increased significantly since initial recognition, the loss allowance is measured for that financial instrument at an amount equal to 12 month ECL (12mECL). The assessment of whether lifetime ECL should be recognised is based on significant increases in the likelihood or risk of a default occurring since initial recognition instead of on evidence of a financial asset being credit-impaired at the reporting date or an actual default occurring.

Lifetime ECL represents the expected credit losses that will result from all possible default events over the expected life of a financial instrument. In contrast, 12mECL represents the portion of lifetime ECL that is expected to result from default events on a financial instrument that are possible within 12 months after the reporting date.

In assessing whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition. In making this assessment, the Group considers both quantitative and qualitative information that is reasonable and supportable, including historical experience and forward-looking information that is available without undue cost or effort. Forward-looking information considered includes the future prospects of the industries in which the Group's debtors operate, obtained from consideration of various external sources of actual and forecast economic information that relate to the Group's core operations.

The Group regularly monitors the effectiveness of the criteria used to identify whether there has been a significant increase in credit risk and revises them as appropriate to ensure that the criteria are capable of identifying significant increase in credit risk before the amount becomes past due.

Grup mengakui ECL sepanjang umur untuk piutang usaha dan aset kontrak. Kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan ini diestimasi dengan menggunakan matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historis Grup, disesuaikan untuk faktor-faktor yang spesifik bagi debitur, kondisi ekonomi secara umum dan penilaian terhadap arah saat ini maupun arah kondisi perkiraan kerugian pada tanggal pelaporan, termasuk nilai waktu uang jika sesuai.

The Group always recognizes lifetime ECL for trade receivables and contract assets. The expected credit losses on these financial assets are estimated using a provision matrix based on the Group's historical credit loss experience, adjusted for factors that are specific to the debtors, general economic conditions and an assessment of both the current as well as the forecast direction of conditions at the reporting date, including time value of money where appropriate.

Grup mengakui keuntungan atau kerugian penurunan nilai dalam laporan laba rugi untuk semua instrumen keuangan dengan penyesuaian yang sesuai dengan nilai tercatatnya melalui akun penyisihan kerugian, kecuali untuk investasi dalam instrumen utang yang diukur pada FVOCI, di mana penyisihan kerugian diakui pada penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi, dan tidak mengurangi nilai tercatat aset keuangan pada laporan posisi keuangan.

The Group recognizes an impairment gain or loss in profit or loss for all financial instruments with a corresponding adjustment to their carrying amount through a loss allowance account, except for investments in debt instruments that are measured at FVOCI, for which the loss allowance is recognized in other comprehensive income and accumulated in the investment revaluation reserve, and does not reduce the carrying amount of the financial asset in the statement of financial position.

Grup menghapus aset keuangan jika terdapat informasi yang menunjukkan bahwa debitur berada dalam kesulitan keuangan yang parah dan tidak ada prospek pemulihan yang realistis. Aset keuangan yang dihapuskan mungkin masih tunduk pada aktivitas penegakan hukum berdasarkan prosedur pemulihan Grup, dengan mempertimbangkan advis hukum jika sesuai. Setiap pemulihan yang dilakukan diakui dalam laporan laba rugi.

The Group writes off a financial asset when there is information indicating that the debtor is in severe financial difficulty and there is no realistic prospect of recovery. Financial assets written off may still be subject to enforcement activities under the Group's recovery procedures, taking into account legal advice where appropriate. Any recoveries made are recognized in profit or loss.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, tidak diturunkan secara individual, namun akan dinilai penurunan nilainya secara kolektif. Penilaian penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Grup atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kedepan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan gagal bayar atas piutang.

For certain categories of financial asset, such as receivables, are not impaired individually are, However, to be assessed for impairment on a collective basis. Impairment assessment for a portfolio of receivables could include the Group's past experiences of collecting payments, an increase in the number of delayed payments in the portfolio past the average credit period, as well as forward looking observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Derecognition of financial assets

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Grup masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

The Group derecognises a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expires, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Group neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Group recognises its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Group continues to recognise the financial asset and also recognises a collateralised borrowing for the proceeds received.

Penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi. Sebaliknya, pada penghentian pengakuan investasi dalam instrumen ekuitas yang telah ditetapkan Grup pada pengakuan awal untuk diukur pada FVOCI, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi tidak direklasifikasi ke laba rugi, tetapi dipindahkan ke saldo laba.

On derecognition of financial asset in its entirety, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is recognized in profit or loss. In contrast, on derecognition of an investment in equity instrument which the Group has elected on initial recognition to measure at FVOCI, the cumulative gain or loss previously accumulated in the investments revaluation reserve is not reclassified to profit or loss, but is transferred to retained earnings.

Penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Grup masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Grup mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan, dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

On derecognition of financial asset other than its entirety (e.g., when the Group retains an option to repurchase part of a transferred asset), the Group allocates the previous carrying amount of the financial asset between the part it continues to recognize under continuing involvement, and the part it no longer recognizes on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer. The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognized and the sum of the consideration received for the part no longer recognized and any cumulative gain or loss allocated to it that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss. A cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is allocated between the part that continues to be recognized and the part that is no longer recognized on the basis of the relative fair values of those parts.

i. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

i. Financial Liabilities and Equity Instruments

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Classification as debt or equity

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Grup diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Financial liabilities and equity instruments issued by the Group are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Instrumen ekuitas

Equity instruments

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Grup setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Group after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Pembelian kembali instrumen ekuitas Perusahaan (saham treasuri) diakui dan dikurangkan secara langsung dari ekuitas. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan atau pembatalan instrumen ekuitas Perusahaan tersebut tidak diakui dalam laba rugi.

Repurchase of the Company's own equity instruments (treasury shares) is recognized and deducted directly in equity. No gain or loss is recognized in profit or loss on the purchase, sale, issue or cancellation of the Company's own equity instrument.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan Grup diklasifikasikan sebagai pada "biaya perolehan diamortisasi".

Liabilitas keuangan meliputi utang usaha dan lain-lain, dan pinjaman lainnya, pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Financial liabilities

The Group's financial liabilities are classified as "at amortized cost".

Financial liabilities, which include trade and other accounts payable and borrowings, are initially measured at fair value, net of transaction costs, and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Grup telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

Derecognition of financial liabilities

The Group derecognizes financial liabilities when, and only when, the Group's obligations are discharged, cancelled or expires. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

j. Saling hapus antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan Grup saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika:

- saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan
- berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

j. Netting of Financial Assets and Financial Liabilities

The Group only offsets financial assets and liabilities and presents the net amount in the statements of financial position where they:

- *currently has a legal enforceable right to set off the recognized amount; and*
- *intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.*

k. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

k. Cash and Cash Equivalents

For cash flow presentation purposes, cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement.

l. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Grup mempunyai pengaruh yang signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investee tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Penghasilan dan aset dan liabilitas dari entitas asosiasi digabungkan dalam laporan keuangan konsolidasian dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sesuai dengan PSAK 105, Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan.

l. Investments in Associates

An associate is an entity over which the Group has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies.

The results of operations and assets and liabilities of associates are incorporated in these consolidated financial statements using the equity method of accounting, except when the investment is classified as held for sale, in which case, it is accounted for in accordance with PSAK 105, Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations.

Dengan metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan Grup atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi yang terjadi setelah perolehan. Ketika bagian Grup atas kerugian entitas asosiasi melebihi kepentingan Grup pada entitas asosiasi (yang mencakup semua kepentingan jangka panjang, yang secara substansi, membentuk bagian dari investasi bersih Grup dalam entitas asosiasi), Grup menghentikan pengakuan bagiannya atas kerugian selanjutnya. Kerugian selanjutnya diakui hanya apabila Grup mempunyai kewajiban bersifat hukum atau konstruktif atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

Under the equity method, an investment in an associate is initially recognized in the consolidated statement of financial position at cost and adjusted thereafter to recognize the Group's share of the profit or loss and other comprehensive income of the associate. When the Group's share of losses of an associate exceeds the Group's interest in that associate (which includes any long-term interests that, in substance, form part of the Group's net investment in the associate), the Group discontinues recognizing it's share of further losses. Additional losses are recognized only to the extent that the Group has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate.

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas dari tanggal pada saat investee menjadi entitas asosiasi. Setiap kelebihan biaya perolehan investasi atas bagian Grup atas nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontinjen dari entitas asosiasi yang diakui pada tanggal akuisisi, diakui sebagai goodwill. Goodwill termasuk dalam jumlah tercatat investasi, dan diuji penurunan nilai sebagai bagian dari investasi. Setiap kelebihan dari kepemilikan Grup dari nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontinjen atas biaya perolehan investasi, sesudah pengujian kembali segera diakui di dalam laba rugi pada periode di mana investasinya diperoleh.

An investment in an associate is accounted for using the equity method from the date on which the investee becomes an associate. Any excess of the cost of acquisition over the Group's share of the net fair value of identifiable assets, liabilities and contingent liabilities of the associate recognized at the date of acquisition, is recognized as goodwill, which is included within the carrying amount of the investment. Any excess of the Group's share of the net fair value of the identifiable assets, liabilities and contingent liabilities over the cost of acquisition, after reassessment, is recognized immediately in profit or loss in the period in which the investment is acquired.

Rugi penurunan nilai yang diakui pada keadaan tersebut tidak dialokasikan pada setiap aset yang membentuk bagian dari nilai tercatat investasi pada entitas asosiasi. Setiap pembalikan dari penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK 236 sepanjang jumlah terpulihkan dari investasi tersebut kemudian meningkat.

Any impairment loss recognized forms part of the carrying amount of the investment. Any reversal of that impairment loss is recognized in accordance with PSAK 236 to the extent that the recoverable amount of the investment subsequently increases.

Jika Grup mengurangi bagian kepemilikan pada entitas asosiasi tetapi Grup tetap menerapkan metode ekuitas, Grup mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan pengurangan bagian kepemilikan (jika keuntungan atau kerugian tersebut akan direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan aset atau liabilitas yang terkait).

When the group reduces its ownership interest in an associate but the Group continues to use the equity method, the Group reclassifies to profit or loss the proportion of the gain that had previously been recognized in other comprehensive income relating to that reduction in ownership interest (if that gain or loss would be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities).

Ketika Grup melakukan transaksi dengan entitas asosiasi dari Grup, keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi dengan entitas asosiasi diakui dalam laporan keuangan konsolidasian Grup hanya sepanjang kepemilikan dalam entitas asosiasi yang tidak terkait dengan Grup.

When a group entity transacts with an associate of the Group, profits and losses resulting from the transactions with the associate are recognized in the Group's consolidated financial statements only to the extent of its interest in the associate that are not related to the Group.

m. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Nilai realisasi bersih merupakan estimasi harga jual dari persediaan dikurangi seluruh biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Biaya perolehan ditentukan dengan metode sebagai berikut:

1) Metode identifikasi khusus untuk persediaan program media dan penyiaran sebagai berikut:

   - Biaya perolehan persediaan program film yang dibeli dibebankan sebanyak-banyaknya 2 kali tayang, masing-masing sebesar 70% pada penayangan pertama dan 30% pada penayangan kedua.
   - Persediaan program non-film dan non-sinetron dibebankan seluruhnya pada penayangan pertama.
   - Persediaan animasi yang diproduksi sendiri diamortisasi selama 10 tahun.

2) Metode masuk pertama keluar pertama untuk persediaan non-program dan persediaan lainnya. Nilai realisasi bersih merupakan estimasi harga jual dari persediaan dikurangi seluruh biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

m. Inventories

Inventories are stated at cost or net realizable value, whichever is lower. Net realizable value represents the estimated selling price for inventories less all estimated costs of completion and costs necessary to make the sale. Cost is determined using the following method:

1) Specific identification method for media and broadcasting program inventories as follows:

   - *Cost of purchased film program is charged to expense in maximum of two telecasts, at 70% for the first telecast and 30% for the second telecast.*
   - *Non-film inventory programs and non-sinetron inventory programs are charged to expense at the first telecast.*
   - *In house animated inventory was amortized for 10 years.*

2) First-in first-out method for other non-program inventories. Net realizable value represents the estimated selling price for inventories less all estimated costs of completion and costs necessary to make the sale.

n. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

n. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

o. Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Revaluasi aset tetap dilakukan dengan keteraturan yang memadai untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal laporan posisi keuangan. Kenaikan yang berasal dari revaluasi tanah diakui pada penghasilan komprehensif lain dan dalam ekuitas.

Penyusutan diakui sebagai penghapusan biaya perolehan aset dikurangi nilai residu dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

o. Property and Equipment

Property and equipment held for use in the production or supply of goods or services, or for administrative purposes, are stated at cost, less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Revaluation of fixed assets is made with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from the determined fair value as at reporting date. Any increase arising from revaluation of such land is recognised in other comprehensive income and accumulated in equity.

Depreciation is recognized so as to write-off the cost of the asset less residual values using the straight-line method based on the estimated useful life of the assets as follows:

	Tahun/*Year*	
Bangunan dan prasarana	4 – 50	*Buildings and infrastructures*

	Tahun/*Year*	
Peralatan kantor, instalasi dan komunikasi	2 – 8	*Office equipments, installations and Communications*
Kendaraan bermotor	4 – 8	*Motor vehicles*
Peralatan penyiaran	4 – 15	*Broadcast equipments*

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direviu setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Land is stated at cost and is not depreciated.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

The cost of maintenance and repairs is charged to operations as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of property and equipment, are recognized as asset if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

Aset tetap yang dihentikan pengakuannya atau yang dijual nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laba rugi.

When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values are removed from the accounts and any resulting gain or loss is reflected in profit or loss.

Aset dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

Construction in progress is stated at cost and transferred to the respective property, plant and equipment account when completed and ready for use.

p. Goodwill

p. Goodwill

Goodwill timbul atas akuisisi dari suatu bisnis yang dicatat pada biaya perolehan yang ditetapkan pada tanggal akuisisi dari bisnis tersebut dikurangi akumulasi penurunan nilai, jika ada.

Goodwill arising on an acquisition of a business is carried at cost as established at the date of acquisition of the business less accumulated impairment losses, if any.

Untuk tujuan uji penurunan nilai, goodwill dialokasikan pada setiap unit penghasil kas dari Grup (atau kelompok unit penghasil kas) yang diperkirakan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut. Unit penghasil kas yang telah memperoleh alokasi goodwill diuji penurunan nilainya setiap tahun, atau lebih sering jika terdapat indikasi bahwa unit penghasil kas tersebut mungkin mengalami penurunan nilai. Jika jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai dialokasikan pertama kali untuk mengurangi jumlah tercatat atas setiap goodwill yang dialokasikan pada unit penghasil kas dan kemudian ke aset lain dari unit penghasil kas secara prorata berdasarkan jumlah tercatat dari setiap aset dalam unit penghasil kas tersebut. Setiap kerugian penurunan nilai goodwill diakui secara langsung dalam laba rugi pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Rugi penurunan nilai yang diakui atas goodwill tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

For the purpose of impairment testing, goodwill is allocated to each of the Group's cash-generating units (or group of cash-generating units) expected to benefit from the synergies of the combination. A cash-generating unit to which goodwill has been allocated is tested for impairment annually, or more frequently when there is an indication that the unit may be impaired. If the recoverable amount of the cash-generating unit is less than its carrying amount, the impairment loss is allocated first to reduce the carrying amount of any goodwill allocated to the unit and then to the other assets of the unit pro-rata on the basis of the carrying amount of each asset in the unit. Any impairment loss for goodwill is recognized directly in profit or loss in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. An impairment loss recognized for goodwill is not reversed in subsequent periods.

Pada pelepasan unit penghasil kas yang relevan, jumlah yang dapat diatribusikan dari goodwill termasuk dalam penentuan laba rugi atas pelepasan.

On disposal of the relevant cash-generating unit, the attributable amount of goodwill is included in the determination of the profit or loss on disposal.

q. Tanah Untuk Pengembangan

q. Land For Development

Tanah untuk pengembangan dinyatakan berdasarkan nilai revaluasi yang merupakan nilai wajar pada tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang memadai untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Land for development are stated at their revaluated amounts, being the fair value at the date of revaluation. Revaluation is made with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from the determined fair value as at reporting date.

Kenaikan yang berasal dari revaluasi tanah dalam pengembangan terakumulasi dalam ekuitas pada akun "surplus revaluasi aset tetap". Surplus revaluasi tanah yang telah disajikan dalam ekuitas akan dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Any increase arising from revaluation of such land for development is accumulated in equity under the "revaluation surplus of fixed assets" account. The revaluation surplus in respect of land will be directly transferred to retained earnings when the asset is derecognised.

Sesuai dengan Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik No. 27 tentang Revaluasi Aset, huruf (d) Aset yang mengalami perubahan Nilai Wajar secara signifikan dan fluktuatif wajib direvaluasi secara tahunan, dan huruf (e) Aset yang tidak mengalami perubahan Nilai Wajar secara signifikan wajib direvaluasi paling kurang setiap 3 (tiga) tahun.

In accordance with the Regulations No. VIII.G.7. regarding Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies No. 27 concerning Assets Revaluation, letter (d) Assets that experience significant and fluctuating changes in Fair Value must be revaluated annualy, and letter (e) Assets that do not experience significant changes in Fair Value must be revaluated at least every 3 (three) years.

r. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan kecuali Goodwill

r. Impairment of Non-Financial Asset Except Goodwill

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Grup mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

At the end of each reporting period, the Group reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Group estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan. Jika jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted. If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately against earnings.

Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan dijelaskan dalam Catatan 2h; penurunan nilai untuk goodwill dijelaskan dalam Catatan 2p.

Accounting policy for impairment of financial assets is discussed in Note 2h; while impairment for goodwill is discussed in Note 2p.

s. Sewa

s. Leases

Sebagai Penyewa

As lessee

Pada insepsi kontrak, Penyewa menilai apakah kontrak adalah, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak adalah atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang identifikasian selama suatu jangka waktu waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

At the inception of a contract, the lessee assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang identifikasian, penyewa harus menilai apakah:

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the lessee shall assess whether:

- Penyewa memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset identifikasian selama periode penggunaan; dan
- Penyewa memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Penyewa memiliki hak ini ketika penyewa memiliki hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah cara dan tujuan penggunaan aset telah ditentukan sebelumnya:
  1. Penyewa memiliki hak untuk mengoperasikan aset identifikasian;
  2. Penyewa mendesain aset identifikasian dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset itu akan digunakan.

- *The lessee has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the identified asset throughout the period of use; and*
- *The lessee has the right to direct the use of the identified asset. The lessee Group has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined:*
  1. *The lessee has the right to operate the identified asset;*
  2. *The lessee has designed the identified asset in a way that predetermined how and for what purpose it will be used.*

Pada insepsi atau penilaian kembali kontrak yang berisi komponen sewa, penyewa mengalokasikan imbalan dalam kontrak untuk setiap komponen sewa atas dasar harga tersendiri relative dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa.

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the lessee allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

Pada saat permulaan sewa, penyewa mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna awalnya diukur pada harga perolehan, yang terdiri dari jumlah awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah biaya langsung awal yang timbul dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, dikurangi insentif sewa yang diterima.

Upon lease commencement, a lessee recognizes a right-of-use asset and a lease liability. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

Setelah tanggal permulaan, penyewa mengukur aset hak-guna dengan menggunakan model biaya yang berkaitan aset tetap sesuai PSAK 216.

After lease commencement, a lessee measures the right-of-use asset using a cost model that relates to Property, Plant and Equipment under PSAK 216.

Berdasarkan model biaya, aset hak-guna diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada penyewa pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna mencerminkan bahwa penyewa akan mengeksekusi opsi beli, penyewa mendepresiasi hak-guna sejak tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, penyewa mendepresiasi aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Under the cost model, a right-of-use asset is measured at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment. If the lease transfers ownership of the underlying assets to the lessee at the end of the lease period or if the acquisition cost of the right-of-use asset reflects that the lessee will make a purchase option, the lessee depreciates the right-of-use asset from the commencement date until the end of the useful life of the asset underlying assets.

Liabilitas sewa pada awalnya diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang terutang selama masa sewa, didiskontokan pada suku bunga implisit dalam sewa jika hal itu dapat segera ditentukan. Jika suku bunga implisit tersebut tidak dapat segera ditentukan, penyewa menggunakan suku bunga pinjaman inkremental.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments payable over the lease term, discounted at the rate implicit in the lease if that can be readily determined. If that rate cannot be readily determined, the lessee uses its incremental borrowing rate.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri dari:

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara-substansi dikurangi piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga, awalnya diukur menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli yang cukup pasti penyewa akan mengeksekusi; dan
- pembayaran penalti untuk penghentian sewa lebih awal kecuali penyewa cukup pasti untuk tidak menghentikan kontrak lebih awal.

- *fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable;*
- *variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*
- *amounts expected to be payable by the lessee under a residual value guarantee;*
- *the exercise price under a purchase option that the lessee is reasonably certain to exercise; and*
- *penalties payment for early termination of a lease unless the lessee is reasonably certain not to terminate early.*

Pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu terjadinya pembayaran, kecuali biaya tersebut dimasukkan dalam nilai tercatat aset lain menurut Pernyataan lain.

Variable lease payments that are not included in the measurement of the lease liability are recognized in profit or loss in the period in which the event or condition that triggers payment occurs, unless the costs are included in the carrying amount of another asset under another Standard.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur kembali untuk mencerminkan perubahan dalam:

The lease liability is subsequently remeasured to reflect changes in:

- masa sewa (menggunakan tingkat diskonto yang direvisi);
- penilaian opsi beli (menggunakan tingkat diskonto yang direvisi); dan
- pembayaran sewa masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau suku bunga yang digunakan untuk menentukan pembayaran tersebut (menggunakan tingkat diskonto yang tidak berubah).

- *the lease term (using a revised discount rate);*
- *the assessment of a purchase option (using a revised discount rate); and*
- *future lease payments resulting from a change in an index or a rate used to determine those payments (using an unchanged discount rate).*

Modifikasi sewa

Modifikasi sewa juga dapat meminta pengukuran kembali liabilitas sewa kecuali jika diperlakukan sebagai sewa terpisah.

Penyewa mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika keduanya:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu atau lebih aset pendasar; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat terhadap harga tersendiri tersebut untuk mencerminkan kondisi kontrak tertentu.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, penyewa:

- mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan dalam kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa yang direvisi menggunakan tingkat diskonto revisian atas dasar sisa masa sewa dan sisa pembayaran sewa dengan penyesuaian yang sesuai dengan aset hak-guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal efektif modifikasi;
- menurunkan nilai tercatat aset hak-guna untuk mencerminkan penghentian parsial atau penuh dari sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Penyewa mengakui dalam laba rugi setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan penghentian parsial atau penuh sewa tersebut; dan
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak-guna untuk semua modifikasi sewa lainnya.

Lease modification

Lease modifications may also prompt remeasurement of the lease liability unless they are to be treated as separate leases.

The lessee accounts for a lease modification as a separate lease if both:

- *the modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and*
- *the consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.*

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification, the lessee:

- *remeasure and allocate the consideration in the modified contract;*
- *determine the lease term of the modified lease;*
- *remeasure the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate on the basis of the remaining lease term and the remaining lease payment with a corresponding adjustment to the right-of-use assets. The revised discount rate is determined as the lessee's incremental borrowing rate at the effective date of the modification;*
- *decrease the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The lessee recognizes in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease; and*
- *make a corresponding adjustment to the right-of-use asset for all other lease modifications.*

t. Aset Takberwujud

Biaya Perolehan Pelanggan

Biaya insentif sehubungan dengan perolehan pelanggan, ditangguhkan dan diamortisasi berdasarkan tingkat penurunan pelanggan.

Tingkat penurunan pelanggan ditinjau secara periodik untuk merefleksikan tingkat penurunan pelanggan aktual pada periode tersebut, dan kerugian penurunan nilai dibebankan pada laba rugi pada periode yang bersangkutan.

t. Intangible Assets

Subscriber Acquisition Cost

Incentive expense incurred in relation to the subscriber acquisition is deferred and amortized based on subscriber's churn rate.

Churn rate is reviewed periodically to reflect actual churn rate of subscribers for the period and additional impairment losses are charged to current operations, if appropriate.

Lisensi

Biaya penyediaan fasilitas kepada pengguna untuk dapat mengakses ke satelit. Biaya dinyatakan dalam present value berupa biaya lisensi dikurangi akumulasi amortisasi dengan metode garis lurus selama 10 tahun.

License

Cost of providing facility to user to access the satellite. Cost are carried at present value of license cost less accumulated amortization with straight-line method for 10 years.

Biaya Perolehan Chanel

Biaya perolehan chanel dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan apabila terdapat akumulasi rugi penurunan nilai. Amortisasi diakui dengan metode garis lurus selama 20-40 tahun.

Channel Acquisition Cost

Channel acquisition cost are carried at cost less accumulated amortization and any accumulated impairment losses. Amortization is recognized on a straight-line basis over 20-40 years.

Izin Penyelenggaraan Penyiaran

Izin penyelenggaraan penyiaran timbul dari akuisisi bisnis yang diakui dan diukur dengan nilai wajar pada saat akuisisi dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan apabila terdapat akumulasi rugi penurunan nilai. Amortisasi diakui dalam laba rugi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis selama 8 tahun.

Taksiran masa manfaat dan metode amortisasi direviu minimum setiap akhir tahun buku, dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi akuntansi diterapkan secara prospektif.

Broadcast Activities License

Broadcast activities licensed arising from business acquisitions is recognized and measured at fair value upon acquisition less accumulated amortization and any accumulated impairment losses. Amortization is recognized in profit or loss using the straight line method based on its estimated useful life of 8 years.

The estimated useful life and amortization method are reviewed at the end of each annual reporting period, with the effect of any changes in estimate being accounted for on a prospective basis.

Digital Streaming Platform

Digital streaming platform dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Amortisasi diakui dengan metode garis lurus selama 8-20 tahun.

Digital Streaming Platform

Digital streaming platform are carried at cost less accumulated amortization and any accumulated impairment losses. Amortization is recognized on a straight-line basis over 8 to 20 years.

u. Aset Lain-lain

u. Other Assets

Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual

Sesuai PSAK 105, Grup mengklasifikasikan suatu aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) sebagai dimiliki untuk dijual jika jumlah tercatatnya akan dipulihkan secara prinsip melalui transaksi penjualan daripada melalui pemakaian berlanjut. Rencana penjualan yang mengakibatkan entitas kehilangan pengendalian juga harus mengklasifikasikan seluruh aset dan liabilitas Perseroan tersebut sebagai dimiliki untuk dijual ketika kriteria dalam PSAK tersebut terpenuhi, meskipun entitas masih memiliki kepentingan bukan pengendali setelah pelepasan tersebut.

Non-Current Assets Held for Sale

In accordance with PSAK 105, the Group classifies a non-current asset (or disposal group) as held for sale if the carrying amount is recovered in principle through a sales transaction rather than through continuing use. A plan for sale that results in the entity losing control must also classify all of the Company assets and liabilities as held for sale when the criteria in this PSAK are met, even though the entity still has a non-controlling interest after the disposal.

Grup mengklasifikasikan suatu aset dimiliki untuk dijual jika jumlah tercatatnya akan dipulihkan terutama melalui transaksi penjualan daripada melalui pemakaian berlanjut.

The Group classifies an asset held for sale if the carrying amount will be realized through sale transaction rather than continuous usage.

Grup mengukur aset dimiliki untuk dijual pada nilai yang lebih rendah antar jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual.

The Group recognized assets held for sale at book value or fair value less cost to sell, whichever is lower.

v. Provisi

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Grup diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

v. Provisions

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Group will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

w. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian, merupakan aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual, ditambahkan pada biaya perolehan aset tersebut, sampai dengan saat selesainya aset secara substansial siap untuk digunakan atau dijual.

Penghasilan investasi diperoleh atas investasi sementara dari pinjaman yang secara spesifik belum digunakan untuk pengeluaran aset kualifikasian dikurangi dari biaya pinjaman yang dikapitalisasi.

Semua biaya pinjaman lainnya diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

w. Borrowing Costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, which are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such time as the assets are substantially ready for their intended use or sale.

Investment income earned on the temporary investment of specific borrowings pending their expenditure on qualifying assets is deducted from the borrowing costs eligible for capitalization.

All other borrowing costs are recognized in profit or loss in the period in which they are incurred.

x. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Grup mengakui pendapatan pada saat dan sejauh pengalihan barang atau jasa kepada pelanggan akan mencerminkan jumlah yang diharapkan akan diterima Grup dalam pertukaran untuk barang atau jasa tersebut. Dalam menerapkan Pernyataan ini, Grup mempertimbangkan syarat-syarat kontrak dan semua fakta dan keadaan yang relevan. Pendapatan diakui menggunakan penilaian 5 langkah:

1. Identifikasi Kontrak dengan Pelanggan

Kontrak adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan.

x. Revenues and Expenses Recognition

The Group recognizes revenue at the time and to the extent that the transfer of goods or services to customers would reflect an amount that the Group expects to receive in exchange for those goods or services. In applying this Standard, the Group takes into account the terms of the contract and all relevant facts and circumstances. Revenue is recognized using the 5-step assessment:

1. Identification of the Contract with the Customer

Contract is an agreement between two or more parties that creates enforceable rights and obligations.

2. Identifikasi Kewajiban Pelaksanaan dalam Kontrak

Kewajiban pelaksanaan adalah janji kepada pelanggan untuk mengalihkan barang atau jasa (atau sekumpulan barang atau jasa) yang berifat dapat dibedakan; atau serangkaian barang atau jasa bersifat dapat dibedakan yang secara substansial sama dan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan. Bersifat dapat dibedakan artinya dapat dipisahkan, atau dapat diidentifikasi secara terpisah.

2. Identification of the Performance Obligation in the Contract

A performance obligation is a promise to a customer to transfer good or service (or a bundle of goods or services) that is distinct; or a series of distinct goods or services that are substantially the same and that have the same pattern of transfer to the customer. Distinct means separable, or separately identifiable.

3. Penetapan Harga Transaksi

Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak Kelompok Usaha dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan, tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga (misalnya, pajak pertambahan nilai). Jika imbalan yang dijanjikan dalam kontrak mencakup jumlah variabel, Kelompok Usaha mengestimasi jumlah imbalan yang diharapkan menjadi haknya dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dikurangi estimasi jumlah variabel yang akan dibayar selama kontrak.

3. Determination of the Transaction Price

The transaction price is the amount of consideration that the Group expects to be entitled to in exchange for the goods or services to a customer, excluding amounts collected on behalf of third parties (for example, value added tax). If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated variable amount which will be paid during the contract period.rd

4. Alokasi Harga Transaksi untuk Kewajiban Pelaksanaan

Alokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan berdasarkan harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Jika hal ini tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relative perlu diestimasi.

4. Allocation Transaction Price to Performance Obligations

Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling price is required to be estimated.

5. Pengakuan Pendapatan ketika Kewajiban Pelaksanaan Dipenuhi

Pendapatan dari penjualan diakui sebagai representasi penyerahan barang atau jasa dengan jumlah yang secara tepat mewakili kewajiban yang dilakukan dan hak untuk menerima imbalan sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa tersebut. Pengakuan pendapatan tergantung pada apakah pengalihan diselesaikan sepanjang waktu atau pada waktu tertentu. Pengalihan kendali diperhitungkan.

5. Recognition of Revenue when Performance Obligation is Satisfied

Revenue from sales is recognized as a representation of the delivery of goods or the rendering of services at the amount that correctly represents the performed obligation and the right to receive consideration in exchange for the goods and/or services. Revenue recognition depends on whether the transfer is being settled over time or at a certain point in time. In any case, the transfer of control is taken into account.

Untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu, pendapatan diakui dengan mengukur kemajuan penyelesaian kewajiban pelaksanaan tersebut berdasarkan pengukuran kemajuan yang tepat baik "Metode Keluaran" atau "Metode Masukan".

For each performance obligation that is satisfied over time, revenue is recognized by measuring progress towards completion of that performance obligation based on appropriate measurement of progress either "Output Method" or "Input Method".

Biaya Mendapatkan Kontrak

Biaya inkremental untuk mendapatkan kontrak dengan pelanggan diakui sebagai aset jika Grup mengharapkan untuk memulihkan biaya tersebut. Biaya inkremental tersebut adalah biaya yang timbul untuk mendapatkan kontrak dengan pelanggan yang tidak akan terjadi jika kontrak tersebut tidak berhasil diperoleh.

Costs of Obtaining a Contract

The incremental costs of obtaining a contract with a customer are recognized as an asset if the Group expects to recover those costs. Those incremental costs are costs incurred to obtain a contract with a customer that would not have been incurred if the contract had not been successfully obtained.

Biaya Pemenuhan Kontrak

Suatu aset diakui untuk biaya yang timbul untuk memenuhi kontrak hanya jika biaya tersebut memenuhi semua kriteria berikut:

a) biaya terkait langsung dengan kontrak atau kontrak yang diantisipasi yang secara spesifik dapat diidentifikasi oleh Grup;
b) biaya menghasilkan atau meningkatkan sumber daya Grup yang akan digunakan untuk memenuhi (atau terus memenuhi) kewajiban pelaksanaan di masa depan; dan
c) biaya diharapkan dapat dipulihkan.

Aset yang dihasilkan akan diamortisasi secara sistematis selama periode kontrak. Ketika biaya yang timbul dalam memenuhi kontrak dengan pelanggan berada dalam lingkup Pernyataan lain, biaya tersebut diperhitungkan sesuai dengan Pernyataan lainnya.

Pendapatan diukur berdasarkan imbalan yang ditentukan dalam kontrak dengan pelanggan dan tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga seperti PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Grup mengakui pendapatan saat mengalihkan kendali atas produk atau jasa kepada pelanggan.

Secara khusus, pendapatan diakui sebagai berikut:

1) Pendapatan dari jasa diakui pada saat jasa diserahkan atau secara signifikan diberikan dan manfaat jasa tersebut telah dinikmati oleh pelanggan. Penerimaan dimuka untuk jasa yang belum diberikan, ditangguhkan dan dicatat sebagai pendapatan diterima dimuka.
2) Pendapatan iklan diakui pada saat iklan ditayangkan. Penjualan program diakui pada saat program diserahkan dan hak telah beralih kepada pelanggan. Pendapatan manajemen artis, penggunaan studio dan jasa layanan pesan singkat diakui pada saat jasa diberikan kepada pelanggan. Uang muka diterima atas iklan dan penggunaan studio dicatat sebagai pendapatan diterima dimuka. Pendapatan dari penjualan koran diakui berdasarkan estimasi koran dijual. Pendapatan dan hasil penjualan koran konsinyasi diakui pada saat barang konsinyasi terjual.

Costs of Fulfilling a Contract

An asset is recognized for the costs incurred to fulfil a contract only if those costs meet all of the following criteria:

a) the costs relate directly to a contract or to an anticipated contract that the Group can specifically identify;
b) the costs generate or enhance resources of the Group that will be used in satisfying (or in continuing to satisfy) performance obligations in the future; and
c) the costs are expected to be recovered.

Any resulting asset would be amortized on a systematic basis over period of the contract. When costs incurred in fulfilling a contract with a customer are within the scope of other Standards, they are accounted for in accordance with those other Standards.

Revenue is measured based on the consideration specified in a contract with a customer and excludes amounts collected on behalf of third parties such as VAT (Value Added Tax). The Group recognizes revenue when it transfers control of a product or service to a customer.

Specifically, revenues are recognized as follows:

1) Revenue from service is recognized when the service is rendered or significantly provided and the benefits have been received by the customer. Payments received in advance for uncompleted services are deferred and recorded as unearned revenue.
2) Revenue from advertisement is recognized when the advertisement is aired. Sale of program is recognized when the program is delivered and title has passed to the customer. Revenue from artists' management, studio and short-messaging services is recognized when the services have been rendered. Advance received from advertisement and studio usage is recorded as unearned revenue. Revenue from sale of daily newspapers is recognized based on the estimated newspapers sold. Revenue from consignment sale of newspapers is recognized when consignment newspapers is sold.

3) Pendapatan jasa pemanfaatan ruang, jasa pemanfaatan peralatan smartcom dan perangkat oracle, serta jasa pemeliharaan diakui atas dasar waktu yang telah berjalan. Pembayaran diterima tetapi belum jatuh tempo dicatat sebagai pendapatan diterima dimuka.

Beban diakui pada saat terjadinya adalah sebagai berikut:

- Beban diakui pada saat terjadinya atau sesuai dengan masa manfaatnya (metode akrual).
- Beban program diakui pada saat film atau program ditayangkan. Beban film atau program belum ditayangkan dicatat sebagai persediaan (Catatan 2m).

y. Pengaturan Pembayaran Berbasis Saham

Pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas kepada karyawan dan pihak lain yang memberikan jasa serupa yang diukur pada nilai wajar instrumen ekuitas pada tanggal pemberian kompensasi. Rincian sehubungan dengan penetapan nilai wajar dari transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas ditetapkan dalam Catatan 48.

Nilai wajar yang ditentukan pada tanggal pemberian dari pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas dibebankan secara garis lurus sepanjang periode vesting, berdasarkan estimasi Grup dari instrumen ekuitas yang pada akhirnya vest, dengan peningkatan yang sesuai ekuitas. Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup merevisi estimasi jumlah instrumen ekuitas yang diekspektasi akan vest dan dampaknya, jika ada, diakui dalam laba rugi sehingga biaya kumulatif mencerminkan estimasi yang direvisi, dengan penyesuaian yang terkait dengan cadangan ekuitas-menetap imbalan kerja.

z. Imbalan Kerja

Imbalan Pasca-kerja

Program Iuran Pasti

Grup, kecuali entitas anak asing, menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetap yang dikelola oleh Dana Pensiun Bimantara (DANAPERA) yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 382/KM.17/1996 tanggal 15 Oktober 1996. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan, dan Perusahaan berdasarkan persentase tertentu dari penghasilan dasar karyawan, tergantung masa kerjanya, yang ditetapkan oleh program.

Pembayaran kepada program dana pensiun pasti dibebankan pada saat jatuh tempo. Pembayaran kepada program dana pensiun didasarkan pada iuran pasti tertentu yang ditentukan program.

3) Revenue from space untilization services, utilization of smartcom and oracle equipment services, and maintenance services are recognized based on the passage of time. Payment received in advance is recorded as unearned revenues.

Expenses recognized are as follows:

- *Expenses are recognized when incurred or according to the beneficial period (accrual method).*
- *Program expense is recognized when the movie or program is aired. Film expense or program not yet aired is recorded as inventory (Note 2m).*

y. Share-based Payment Arrangements

Equity-settled share-based payments to employees and others providing similar services are measured at the fair value of the equity instruments at the grant date. Details regarding the determination of the fair value of equity-settled share-based transactions are set out in Note 48.

The fair value determined at the grant date of the equity-settled share-based payments is expensed on a straight-line basis over the vesting period, based on the Group's estimate of equity instruments that will eventually vest, with a corresponding increase in equity. At the end of each reporting period, the Group revises its estimate of the number of equity instruments expected to vest and the impact, if any, is recognised in profit or loss such that the cumulative expense reflects the revised estimate, with a corresponding adjustment to the equity-settled employee benefits reserve.

z. Employee Benefits

Post-employment Benefits

Defined Contribution Plan

The Group, except foreign subsidiaries, provides a defined contribution pension plan for all of its permanent employees which is managed by Dana Pensiun Bimantara (DANAPERA) whose deed of establishment was approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. 382/KM.17/1996 dated October 15, 1996. Contribution by the employee and by the Company to the pension plan based on certain percentage of employee basic salary, depending on years of service, which was determined by the pension plan.

Payments made to defined contribution plan are charged as an expense as they fall due. Payments made to pension plan are dealt with as payments to defined contribution plans.

Program Imbalan Pasti

Grup, kecuali entitas anak asing, membukukan dan menghitung imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan peraturan Grup dan Undang Undang Cipta Kerja No. 11/2020 ("UUCK") yang diterbitkan di bulan Februari 2021. Tidak terdapat pedanaan yang disisihkan oleh Grup sehubungan dengan imbalan pasca kerja ini.

Pada bulan April 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK IAI") menerbitkan siaran pers atas persyaratan pengatribusian imbalan pada periode jasa sesuai PSAK 219: Imbalan Kerja yang diadopsi dari IAS No. 19: Employee Benefits. Siaran pers tersebut menyampaikan informasi bahwa pola fakta umum dari rogram pension berbasis undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki pola fakta serupa dengan yang ditanggapi dan disimpulkan dalam IFRS Interpretation Committee ("IFRIC") Agenda Decision Attributing Benefit to Periods of Service IAS No. 19. Kelompok Usaha telah menerapkan siaran pers tersebut dan dengan demikian merubah kebijakan akuntansi terkait atribusi imbalan kerja pada periode jasa dari kebijakan yang diterapkan sebelumnya.

Biaya dan kewajiban program imbalan pasti dihitung berdasarkan PSAK 219 yang mengharuskan penggunaan metode penilaian aktuaria "*Projected Unit Credit*". Metode ini mensyaratkan Perusahaan untuk melakukan atribusi atas (nilai sekarang dari) proyek imbalan, melalui jasa karyawan. Atribusi untuk masa kerja periode berjalan akan menghasilkan nilai Biaya Jasa Kini (sebagai komponen biaya dalam laporan Laba Rugi). Sementara itu, atribusi untuk masa kerja periode berjalan dan periode lalu akan menghasilkan Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti (sebagai komponen liabilitas dalam laporan posisi keuangan).

Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian atas perubahan asumsi, keuntungan dan kerugian atas penyesuaian pengalaman, imbal hasil atas aset program (tidak termasuk pendapatan bunga) dan perubahan dampak batas atas aset (jika ada), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang dibebankan atau dikreditkan dalam penghasilan komprehensif lain periode terjadinya.

Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin segera dalam saldo laba dan tidak akan direklas ke laba rugi.

Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian).

Defined Benefits Plan

The Group, except foreign subsidiaries, record and calculates post-employment benefits as required under the Group's regulations a Omnibus Law No. 11/2020 ("UUCK") which was issued in February 2021. No funding has been made by the Group to this defined benefit plan.

In April 2022, the Institute of Indonesia Chartered Accountants' Accounting Standard Board ("DSAK IAI") issued a press release regarding attribution of benefits to periods of service in accordance with PSAK 219: Employee Benefits which was adopted from IAS No. 19: Employee Benefits. The press release conveyed the information that the fact pattern of the pension program based on the Labor Law currently enacted in Indonesia is similar to those responded and concluded in the IFRS Interpretation Commite ("IFRIC") Agenda Decision Attributing Benefit to Periods of Service IAS No. 19. The Group has adopted the said press release and accordingly changed its accounting policy regarding attribution of benefits to periods of service previously applied.

The cost and liability of defined benefit plan is calculated under PSAK 219 which require the use of "Projected Unit Credit" valuation method. This method requires the Company to attribution to the (present value of) benefit projects, through employee services. Attribution for the period of service for the current period will result in the value of Current Service Cost (as a component of costs in the statement of profit or loss). Meanwhile, the attribution for the current period and prior period will result in the Present Value of Defined Benefit Obligations (as a component of liabilities in the statement of financial position).

Remeasurement, comprising gains and losses on changes in assumption, gains and losses on experience adjustment, the return on plan assets (excluding interest) and the effect of the changes to the asset ceiling (if applicable), is reflected immediately in the consolidated statement of financial position with a charge or credit recognised in other comprehensive income in the period in which they occur.

Remeasurement recognised in other comprehensive income is reflected immediately in retained earnings and will not be reclassified to profit or loss.

Defined benefit costs are categorised as follows:

- *Service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements).*

- Beban atau pendapatan bunga neto.
- Pengukuran kembali.

Grup menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi, Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Liabilitas imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan defisit aktual dalam program imbalan pasti Grup.

Liabilitas untuk pesangon diakui pada lebih awal ketika entitas tidak dapat lagi menarik tawaran imbalan tersebut dan ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi terkait.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Grup memberikan penghargaan masa kerja kepada karyawan yang memenuhi persyaratan.

Perhitungan imbalan kerja jangka panjang lainnya ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Jumlah diakui sebagai provisi untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti.

aa. Pajak Penghasilan

Pajak saat terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (bukan kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal goodwill.

- *Net interest expense or income.*
- *Remeasurement.*

The Group presents the first two components of defined benefit costs in profit or loss. Curtailment gains and losses are accounted for as past service costs.

The retirement benefit obligation recognised in the consolidated statement of financial position represents the actual deficit in the Group's defined benefit plans.

A liability for a termination benefit is recognized at the earlier of when the entity can no longer withdraw the offer of the termination benefit and when the entity recognizes any related restructuring costs.

Other long-term benefits

The Group also provides long service award for all qualified employees.

The cost of providing other long-term benefits is determined using the Projected Unit Credit Method. The provision for long-term employee benefits recognized in the consolidated statements of financial position represents the present value of the defined benefits obligation.

aa. Income Tax

The tax currently payable is based on taxable profit to the year. Taxable profit differs from profit before tax as reported in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income because of items of income or expense that are taxable or deductible in other years and items that are never taxable or deductible. Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the consolidated financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit. Deferred tax liabilities are generally recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are generally recognized for all deductible temporary differences to the extent that is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilized. Such deferred tax assets and liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition (other than in a business combination) of assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit. In addition, deferred tax liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition of goodwill.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities.

Untuk tujuan pengukuran liabilitas pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan untuk properti investasi yang diukur dengan menggunakan model nilai wajar, nilai tercatat properti tersebut dianggap dipulihkan seluruhnya melalui penjualan, kecuali praduga tersebut dibantah. Praduga tersebut dibantah ketika properti investasi dapat disusutkan dan dimiliki dalam model bisnis yang bertujuan untuk mengonsumsi secara substansial seluruh manfaat ekonomis atas investasi properti dari waktu ke waktu, bukan melalui penjualan. Direksi Perusahaan mereviu portofolio properti investasi Grup dan menyimpulkan bahwa tidak ada properti investasi Grup yang dimiliki dalam model bisnis yang bertujuan untuk mengonsumsi secara substansial seluruh manfaat ekonomik atas investasi properti dari waktu ke waktu, daripada melalui penjualan. Oleh karena itu, direksi telah menentukan bahwa praduga penjualan yang ditetapkan dalam PSAK 212 tidak dibantah. Akibatnya, Grup tidak mengakui pajak tangguhan atas perubahan nilai wajar properti investasi karena Grup tidak dikenakan pajak penghasilan atas perubahan nilai wajar properti investasi.

For the purposes of measuring deferred tax liabilities and deferred tax assets for investment properties that are measured using the fair value model, the carrying amounts of such properties are presumed to be recovered entirely through sale, unless the presumption is rebutted. The presumption is rebutted when the investment property is depreciable and is held within a business model whose objective is to consume substantially all of the economic benefits embodied in the investment property over time, rather than through sale. The directors of the Company reviewed the Group's investment property portfolios and concluded that none of the Group's investment properties are held under a business model whose objective is to consume substantially all of the economic benefits embodied in the investment properties over time, rather than through sale. Therefore, the directors have determined that the sale presumption set out in the PSAK 212 is not rebutted. As a result, the Group has not recognized any deferred taxes on changes in fair value of the investment properties as the Group is not subject to any income taxes on the fair value changes of the investment properties.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui, di luar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi atau yang timbul dari akuntansi awal kombinasi bisnis. Dalam kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

Current and deferred tax are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside of profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside of profit or loss, or where they arise from the initial accounting for a business combination. In the case of a business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income tax levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities when there is an intention to settle its current tax assets and current tax liabilities on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

bb. Laba Per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

bb. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding as adjusted for the effects of all dilutive potential ordinary shares.

cc. Informasi Segmen

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Grup yang secara regular direview oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
b) yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
c) dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penillaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

cc. Segment Information

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Group that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

An operating segment is a component of an entity:

a) that engages in business activities from which it may earn revenues and incurred expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);

b) whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and

c) for which discrete financial information is available.

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of performance is more specifically focused on the category of each product.

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG MATERIAL

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, yang dijelaskan dalam Catatan 2, direksi diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi ketidakpastian utama lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

Menentukan Penilaian Model Bisnis

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan bergantung pada hasil pengujian semata pembayaran pokok dan bunga (SPPI) atas jumlah pokok terutang dan model bisnis. Grup menentukan model bisnis pada tingkat yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian ini mencakup penilaian yang mencerminkan semua bukti yang relevan termasuk bagaimana kinerja aset dievaluasi dan kinerjanya diukur, risiko yang memengaruhi kinerja aset dan bagaimana pengelolaannya. Grup memantau aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain yang dihentikan pengakuannya sebelum jatuh tempo untuk memahami alasan pelepasannya dan apakah alasan tersebut konsisten dengan tujuan bisnis di mana aset tersebut dimiliki. Pemantauan adalah bagian dari penilaian berkelanjutan Grup tentang apakah model bisnis yang memiliki aset keuangan yang tersisa masih sesuai dan jika tidak sesuai apakah telah terjadi perubahan model bisnis dan oleh karena itu terdapat perubahan prospektif terhadap klasifikasi aset keuangan tersebut.

Menentukan Peningkatan Risiko Kredit yang Signifikan

Kerugian kredit ekspektasian (ECL) diukur sebagai penyisihan yang setara dengan ECL 12-bulan (12mECL) untuk aset tahap 1, atau ECL sepanjang umur untuk aset tahap 2 atau tahap 3. Suatu aset bergerak ke tahap 2 ketika risiko kreditnya telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Dalam menilai apakah risiko kredit suatu aset telah meningkat secara signifikan, Grup mempertimbangkan informasi berwawasan ke depan yang wajar dan dapat didukung secara kualitatif dan kuantitatif.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND MATERIAL ACCOUNTING ESTIMATES

In the application of the Group accounting policies, which are described in Note 2, the directors are required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period in which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Key Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:

Determining Business Model Assessment

Classification and measurement of financial assets depends on the results of the solely payment of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding and the business model test. The Group determines the business model at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve a particular business objective. This assessment includes judgment reflecting all relevant evidence including how the performance of the assets is evaluated and their performance measured, the risks that affect the performance of the assets and how these are managed. The Group monitors financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income that are derecognized prior to their maturity to understand the reason for their disposal and whether the reasons are consistent with the objective of the business for which the asset was held. Monitoring is part of the Group's continuous assessment of whether the business model for which the remaining financial assets are held continues to be appropriate and if it is not appropriate whether there has been a change in business model and so a prospective change to the classification of those assets.

Determining Significant Increase in Credit Risk

Expected credit losses (ECL) are measured as an allowance equal to 12-months ECL (12mECL) for stage 1 assets, or lifetime ECL for stage 2 or stage 3 assets. An asset moves to stage 2 when its credit risk has increased significantly since initial recognition. In assessing whether the credit risk of an asset has significantly increased the Group takes into account qualitative and quantitative reasonable and supportable forward looking information.

Menentukan dan Menghitung Penyisihan Kerugian

Ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian (ECL), Grup menggunakan informasi berwawasan ke depan yang wajar dan dapat didukung, yang didasarkan pada asumsi untuk pergerakan masa depan dari berbagai pendorong ekonomi dan bagaimana pendorong ini akan saling memengaruhi.

Loss given default adalah estimasi kerugian yang timbul karena gagal bayar (default). Hal ini didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo dan yang diharapkan akan diterima pemberi pinjaman, dengan mempertimbangkan arus kas dari agunan dan peningkatan kredit integral.

Probabilitas default merupakan input utama dalam mengukur ECL. Probabilitas gagal bayar (*default*) adalah estimasi kemungkinan gagal bayar (*default*) selama jangka waktu tertentu, yang penghitungannya mencakup data historis, asumsi, dan ekspektasi kondisi masa depan.

Penilaian Instrumen Keuangan

Seperti dijelaskan dalam Catatan 55, Grup menggunakan teknik penilaian yang meliputi input yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi untuk mengestimasi nilai wajar dari beberapa jenis instrumen keuangan. Catatan 55 memberikan informasi yang rinci mengenai asumsi utama yang digunakan dalam menentukan nilai wajar instrumen keuangan, serta analisis sensitivitas yang rinci untuk asumsi tersebut.

Direksi berpendapat bahwa teknik penilaian yang dipilih dan asumsi yang digunakan adalah tepat dalam menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan.

Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan

Grup membuat penyisihan penurunan nilai persediaan berdasarkan estimasi persediaan yang digunakan pada masa mendatang. Walaupun asumsi yang digunakan dalam mengestimasi penyisihan penurunan nilai persediaan telah sesuai dan wajar, namun perubahan signifikan atas asumsi ini akan berdampak material terhadap penyisihan penurunan nilai persediaan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil usaha Grup. Nilai tercatat persediaan diungkapkan dalam Catatan 8.

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Grup ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Determining and Calculation of Loss Allowance

When measuring expected credit losses (ECL), the Group uses reasonable and supportable forward-looking information, which is based on assumptions for the future movement of different economic drivers and how these drivers will affect each other.

Loss given default is an estimate of the loss arising on default. It is based on the difference between the contractual cash flows due and those that the lender would expect to receive, taking into account cash flows from collateral and integral credit enhancements.

Probability of default constitutes a key input in measuring ECL. Probability of default is an estimate of the likelihood of default over a given time horizon, the calculation of which includes historical data, assumptions and expectations of future conditions.

Valuation of financial instruments

As described in Note 55, the Group uses valuation techniques that include inputs that are not based on observable market data to estimate the fair value of certain types of financial instruments. Note 55 provides detailed information about the key assumptions used in the determination of the fair value of financial instruments, as well as the detailed sensitivity analysis for these assumptions.

The directors believe that the chosen valuation techniques and assumptions used are appropriate in determining the fair value of financial instruments.

Allowance for Decline in Value of Inventories

The Group provides allowance for decline in value of inventories based on estimated future usage of such inventories. While it is believed that the assumptions used in the estimation of the allowance for decline in value of inventories are appropriate and reasonable, significant changes in these assumptions may materially affect the assessment of the allowance for decline in value of inventories, which ultimately will impact the result of the Group's operations. The carrying amount of inventories is disclosed in Note 8.

Estimated Useful Lives of Property and Equipment

The useful life of each item of the Group's property and equipment is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

Perubahan masa manfaat aset tetap dan properti investasi dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut.

A change in the estimated useful life of any item of property and equipment and investment properties would affect the recorded depreciation expense and decrease in the carrying values of these assets.

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 17.

The carrying amounts of property and equipment are disclosed in Note 17.

Penurunan Nilai Goodwill

Impairment of Goodwill

Menentukan apakah suatu goodwill turun nilainya mengharuskan estimasi nilai pakai unit penghasil kas dimana goodwill dialokasikan. Perhitungan nilai pakai mengharuskan manajemen untuk mengestimasi arus kas masa depan yang diharapkan timbul dari unit penghasil kas yang menggunakan tingkat pertumbuhan yang tepat dan tingkat diskonto yang sesuai untuk perhitungan nilai kini. Dimana aktual arus kas masa depan kurang dari yang diharapkan, kerugian penurunan nilai material mungkin timbul.

Determining whether goodwill is impaired requires an estimation of the value in use of the cash-generating units to which goodwill has been allocated. The value in use calculation requires the management to estimate the future cash flows expected to arise from the cash-generating unit using an appropriate growth rate and a suitable discount rate in order to calculate present value. Where the actual future cash flows are less than expected, a material impairment loss may arise.

Nilai tercatat goodwill diungkapkan dalam Catatan 18.

The carrying amount of goodwill is disclosed in Note 18.

Penurunan Nilai Aset Bukan Keuangan Selain Goodwill

Impairment of Non-Financial Asset Other Than Goodwill

Aset berwujud dan tidak berwujud, selain goodwill, dilakukan uji penurunan nilai ketika terdapat indikasi penurunan nilai. Sedangkan untuk goodwill, uji penurunan nilai harus dilakukan minimal setiap tahun, baik ada atau tidak adanya indikasi penurunan nilai. Penentuan nilai pakai aset memerlukan estimasi mengenai arus kas yang diharapkan untuk dihasilkan dari penggunaan aset (unit penghasil kas) dan penjualan aset tersebut serta tingkat diskonto yang sesuai untuk menentukan nilai sekarang.

Tangible and intangible assets, other than goodwill, are reviewed for impairment whenever impairment indicators are present. While for goodwill, impairment testing is required to be performed at least annually irrespective of whether or not there are indicators of impairment. Determining the value in use of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets (cash generating unit) and a suitable discount rate in order to calculate the present value.

Walaupun asumsi yang digunakan dalam mengestimasi nilai pakai aset yang tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian dianggap telah sesuai dan wajar, namun perubahan signifikan atas asumsi ini akan berdampak material terhadap penentuan jumlah yang dapat dipulihkan dan akibatnya kerugian penurunan nilai yang timbul akan berdampak terhadap hasil usaha.

While it is believed that the assumptions used in the estimation of the value in use of assets reflected in the consolidated financial statements are appropriate and reasonable, significant changes in these assumptions may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material adverse impact on the results of operations.

Nilai Wajar Atas Aset dan Liabilitas yang Dapat Diidentifikasi yang Diperoleh dari Akuisisi Bisnis

Fair Value of Acquired Identifiable Assets and Liabilities from Business Acquisition

Nilai wajar atas aset dan liabilitas yang dapat diidentifikasi yang diperoleh dari akuisisi bisnis ditentukan dengan menggunakan pertimbangan tertentu dalam memilih suatu metode dan membuat asumsi-asumsi yang didasarkan pada kondisi pasar pada tanggal akuisisi.

The fair value of acquired identifiable assets and liabilities in a business acquisition are determined by using valuation techniques. The company and its subsidiaries used their judgement to select a variety of methods and make assumption that are mainly based on market condition existing at the acquisition date.

Apabila penentuan nilai wajar atas aset dan liabilitas yang dapat diidentifikasi yang diperoleh dari akuisisi bisnis dibuat dengan menggunakan asumsi dan kondisi pasar yang berbeda, maka nilai tercatat goodwill, aset tidak berwujud dan aset serta liabilitas yang dapat diidentifikasi yang diperoleh dari akuisisi bisnis dapat terpengaruh. Nilai wajar atas aset dan liabilitas atas akuisisi telah diungkapkan pada Catatan 55.

To the extent that the determination of fair value of acquired identifiable assets and liabilities are made based on different assumption and market condition, the carrying amount of goodwill, intangible assets and other acquired identifiable assets and liabilities from such business acquisition may be affected. Fair value of assets and liabilities from acquisition was disclosed in Note 55.

Menentukan Apakah Suatu Pengaturan adalah atau Mengandung Sewa

Penentuan apakah suatu pengaturan merupakan atau mengandung sewa memerlukan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah pengaturan tersebut memberikan hak untuk memperoleh secara substansial semua manfaat ekonomik dari penggunaan aset selama periode penggunaan dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset, bahkan jika pengaturan tersebut hak tidak secara eksplisit ditentukan dalam pengaturan.

Determining Whether an Arrangement is or Contains a Lease

Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use and right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

Penentuan Opsi Masa Sewa

Masa sewa merupakan komponen signifikan dalam pengukuran aset hak-guna dan liabilitas sewa. Pertimbangan dilakukan dalam menentukan apakah terdapat opsi untuk memperpanjang sewa atau membeli aset pendasar cukup pasti akan dieksekusi, atau opsi untuk mengakhiri sewa tidak akan dieksekusi, ketika memastikan periode yang akan disertakan dalam masa sewa. Dalam menentukan masa sewa, semua fakta dan keadaan yang menciptakan insentif ekonomik untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak untuk menggunakan opsi penghentian, dipertimbangkan pada tanggal insepsi sewa.

Faktor-faktor yang dipertimbangkan dapat mencakup pentingnya aset untuk operasi Grup; perbandingan syarat dan ketentuan dengan harga pasar yang berlaku; timbulnya penalti yang signifikan; adanya perbaikan hak penyewaan yang signifikan; dan biaya serta masalah gangguan untuk mengganti aset. Grup menilai kembali apakah cukup pasti untuk mengeksekusi opsi perpanjangan, atau tidak mengeksekusi opsi penghentian, jika terdapat peristiwa signifikan atau perubahan keadaan yang signifikan.

Determination Lease Term Option

The lease term is a significant component in the measurement of both the right-of-use asset and lease liability. Judgment is exercised in determining whether there is reasonable certainty that an option to extend the lease or purchase the underlying asset will be exercised, or an option to terminate the lease will not be exercised, when ascertaining the periods to be included in the lease term. In determining the lease term, all facts and circumstances that create an economical incentive to exercise an extension option, or not to exercise a termination option, are considered at the lease inception date.

Factors considered may include the importance of the asset to the Group's operations; comparison of terms and conditions to prevailing market rates; incurrence of significant penalties; existence of significant leasehold improvements; and the costs and disruption to replace the asset. The Group reassesses whether it is reasonably certain to exercise an extension option, or not exercise a termination option, if there is a significant event or significant change in circumstances.

Menentukan Suku Bunga Pinjaman Inkremental

Jika suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat segera ditentukan, suku bunga pinjaman inkremental diestimasi untuk mendiskontokan pembayaran sewa di masa mendatang untuk mengukur nilai kini liabilitas sewa pada tanggal permulaaan sewa. Suku bunga tersebut didasarkan pada estimasi Grup yang harus dibayarkan oleh Grup kepada pihak ketiga untuk meminjam dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak-guna, dengan persyaratan, keamanan, dan lingkungan ekonomi yang serupa.

Determining Incremental Borrowing Rate

Where the interest rate implicit in a lease cannot be readily determined, an incremental borrowing rate is estimated to discount future lease payments to measure the present value of the lease liability at the lease commencement date. Such a rate is based on what the Group estimates it would have to pay a third party to borrow the funds necessary to obtain an asset of a similar value to the right-of-use asset, with similar terms, security and economic environment.

Realisasi atas Aset Pajak Tangguhan

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan direviu pada setiap akhir periode pelaporan dan dikurangi sejauh yang tidak lagi kemungkinan bahwa laba kena pajak akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset untuk dipulihkan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan diungkapkan dalam Catatan 43.

Realizability of Deferred Tax Assets

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

The carrying amounts of deferred tax assets are disclosed in Note 43.

Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas imbalan kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Perubahan dampak batas atas aset (jika ada) dan dari imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang dibebankan atau dikreditkan dalam penghasilan komprehensif lain periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin segera dalam saldo laba dan tidak akan direklasifkasi ke laba rugi.

Nilai tercatat liabilitas imbalan kerja diungkapkan dalam Catatan 46.

Employee Benefits

The determination of employee benefits obligations is dependent on selection of certain assumptions used by actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate and rate of salary increase. The effect of the changes to the asset ceiling (if applicable) and the return on plan assets (excluding interest), is reflected immediately in the consolidated statement of financial position with a charge or credit recognised in other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurement recognised in other comprehensive income is reflected immediately in retained earning and will not be reclassified to profit or loss.

The carrying amount of employee benefits obligation is disclosed in Note 46.

4. KAS DAN SETARA KAS / *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Kas	4.785	5.042	*Cash on hand*
Bank			*Cash in bank*
Pihak berelasi -			*Related party -*
Rupiah			*Rupiah*
Bank MNC Internasional	139.899	468.621	*Bank MNC Internasional*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Bank MNC Internasional	34.903	35.271	*Bank MNC Internasional*
Pihak ketiga			*Third parties*
Rupiah			*Rupiah*
Bank BJB	412.689	410.663	*Bank BJB*
Lainnya	100.737	85.599	*Others*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Bank Mandiri	339	1.560	*Bank Mandiri*
Lainnya	15.700	573	*Others*
Deposito berjangka			*Time deposits*
Pihak berelasi -			*Related party -*
Rupiah			*Rupiah*
Bank MNC Internasional	678.660	964.355	*Bank MNC Internasional*
Pihak ketiga			*Third parties*
Rupiah			*Rupiah*
Bank Victoria Internasional	25.000	25.000	*Bank Victoria Internasional*
Bank BJB	100	100	*Bank BJB*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Lainnya	340	324	*Others*
Jumlah	1.413.152	1.997.108	*Total*

Tingkat suku bunga tahunan atas deposito berjangka (≥ 1 bulan) sepanjang periode adalah sebagai berikut:

Annual interest rate throughout the period of time deposits (≥ 1 month) are as follows:

	2024	2023	
Tingkat bunga per tahun			*Interest rates per annum*
Deposito berjangka			*Time deposits*
Rupiah	2,00% - 8,00%	0,10% - 6,00%	*Rupiah*
Mata uang asing	0,20% - 3,25%	0,10% - 1,75%	*Foreign currencies*

5. ASET KEUANGAN LAINNYA – LANCAR / *5. OTHER FINANCIAL ASSETS – CURRENT*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)			*Fair value to profit or loss (FVTPL)*
Dana kelolaan	2.333.453	391.452	*Managed funds*
Efek diperdagangkan	241.019	165.344	*Equity securities held for trading*
Piutang surat sanggup	50.000	-	*Promissory note receivable*
Unit link	4.915	24.755	*Unit-Linked*
Reksadana	2.041	1.930	*Mutual funds*
Bank yang dibatasi penggunaannya dan deposito berjangka	42.534	71.176	*Restricted cash in banks and time deposits*
Jumlah	2.673.962	654.657	*Total*

Dana Kelolaan

MVN mengadakan perjanjian pengelolaan dana dengan manajer investasi untuk melakukan investasi dalam bentuk investasi pada saham entitas publik dan non publik dan/atau pada surat berharga. Perjanjian dilakukan dengan jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun mendatang atau lebih sesuai persetujuan tertulis dari kedua belah pihak. Nilai wajar dari dana kelolaan berdasarkan nilai aset bersih pada tanggal pelaporan.

Managed Funds

MVN entered into fund management agreement with several investment managers to manage investment in shares of public or private companies and/or other security instruments. These contracts have a term of one year and can be extended for another year or longer as agreed by both parties in writing. The fair value of managed funds are based on respective net asset value as of the reporting date.

Efek Diperdagangkan

Nilai wajar efek diperdagangkan didasarkan pada harga pasar efek yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Equity Securities Held for Trading

The fair values of the trading securities are based on the quoted market price in the Indonesia Stock Exchange on December 31, 2024 and December 31, 2023.

Piutang Surat Sanggup

Akun ini merupakan Surat Sanggup Bayar (”Promissory Note”) yang diterbitkan oleh PT Tripar Multivision Plus Tbk. kepada MSIN, entitas anak.

Promissory Note Receivable

This account represents a Promissory Note issued by PT Tripar Multivision Plus Tbk. to MSIN, a subsidiary.

Unit Link

Grup melakukan investasi pada unit link yang dikelola oleh PT MNC Life Assurance, pihak berelasi. Nilai wajar unit link ditentukan berdasarkan nilai aset bersih unit link pada tanggal pelaporan.

Unit-Linked

The Group invested in unit-linked managed by PT MNC Life Assurance, a related party. The fair values of unit-linked are based on net asset value of unit-linked as of reporting date.

Reksadana

Nilai wajar unit penyertaan reksadana ditentukan berdasarkan nilai aset bersih unit penyertaan reksadana pada tanggal pelaporan.

Mutual Funds

The fair values of mutual funds are based on net asset value of the funds as of reporting date.

Bank yang Dibatasi Penggunaannya dan Deposito Berjangka

Restricted Cash in Banks and Time Deposits

Merupakan deposito berjangka jatuh tempo lebih dari tiga bulan dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya yang digunakan sebagai jaminan sebagai berikut:

Represents time deposits with maturities of more than three months and restricted cash in banks which were used as collaterals as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Bank yang dibatasi penggunaannya (Catatan 29)			*Restricted cash in banks (Note 29)*
Dolar Amerika Serikat			*US Dollar*
Investment Opportunities V Pte. Limited	27.784	29.676	*Investment Opportunities V Pte. Limited*
Rupiah			*Rupiah*
Bank BJB	14.750	14.750	*Bank BJB*
Deposito berjangka			*Time deposits*
Rupiah			*Rupiah*
Bank MNC Internasional	-	26.750	*Bank MNC Internasional*
Jumlah	42.534	71.176	*Total*

	2024	2023	
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun			*Interest rates on time deposits per annum*
Rupiah	3,75% - 5,50%	5,25% - 5,50%	*Rupiah*

6. PIUTANG USAHA / *6. TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
a. Berdasarkan pelanggan			*a. By debtors*
Pihak Berelasi (Catatan 49)	22.931	21.943	*Related parties (Note 49)*
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Wira Pamungkas Pariwara	254.240	568.710	*PT Wira Pamungkas Pariwara*
PT Inter Pariwara Global	80.854	101.879	*PT Inter Pariwara Global*
PT Dwi Sapta Pratama	50.686	78.876	*PT Dwi Sapta Pratama*
Lainnya (dibawah Rp50 miliar)	3.403.931	2.842.104	*Others (each below Rp50 billion)*
Subjumlah	3.789.711	3.591.569	*Subtotal*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(132.889)	(131.568)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah	3.656.822	3.460.001	*Total*
Bersih	3.679.753	3.481.944	*Net*
b. Umur piutang usaha			*b. Aging of trade accounts receivable*
Belum jatuh tempo	2.044.612	1.986.691	*Not yet due*
Sudah jatuh tempo			*Past due*
1 - 30 hari	777.192	699.578	*1 - 30 days*
31 - 60 hari	565.420	537.114	*31 - 60 days*
61 - 90 hari	149.407	146.653	*61 - 90 days*
> 91 hari	143.122	111.908	*> 91 days*
Bersih	3.679.753	3.481.944	*Net*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
c. Berdasarkan mata uang			*c. By currency*
Rupiah	3.761.143	3.559.564	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	51.499	53.948	*US Dollar*
Jumlah	3.812.642	3.613.512	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(132.889)	(131.568)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	3.679.753	3.481.944	*Net*

Jangka waktu rata-rata penjualan kredit pada umumnya 30 sampai dengan 90 hari. Penjualan kredit iklan melalui agensi iklan membutuhkan waktu penagihan yang lebih lama dari waktu rata-rata penjualan kredit karena agensi iklan harus menunggu pembayaran iklan dari para pemasang iklan terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran kepada Grup. Tidak ada bunga yang dibebankan pada piutang usaha yang telah jatuh tempo.

The average period of credit sales is 30 days until 90 days. The credit sales through advertising agency takes longer time to collect than the average credit period since the agency needs to wait for payment from advertiser before it pays the Group. No interest is charged on trade accounts receivable which are already due.

Piutang usaha yang diungkapkan di atas termasuk jumlah yang telah lewat jatuh tempo pada akhir periode pelaporan. Penyisihan penurunan nilai piutang Grup menggunakan model kerugian kredit ekspektasian, yang menggantikan model kerugian kredit yang terjadi, untuk mengukur penyisihan penurunan nilai piutang usaha. Dalam menentukan kerugian kredit ekspetasian (ECL), manajemen telah memperhitungkan posisi keuangan pelanggan terkait, disesuaikan dengan faktor-faktor spesifik dari pelanggan dan kondisi ekonomi umum industri, dalam memperkirakan kemungkinan terjadinya gagal bayar pinjaman serta kerugian saat terjadinya gagal bayar. Manajemen menentukan bahwa piutang usaha dari pihak berelasi dan pihak ketiga memiliki kerugian kredit yang tidak material.

Trade receivables disclosed above include amounts that are past due at the end of the reporting period. The allowance for impairment of the Group's receivables is using the expected credit loss model, which replaced the incurred credit loss model, to measure the allowance for impairment of accounts receivables. In determining the ECL, management has taken into account the financial position of the customer, adjusted for factors that are specific to the customer and general economic conditions of the industry, in estimating the probability of default of the other accounts receivable as well as the loss upon default. Management determines the trade accounts receivable from both related parties and third parties are subject to immaterial credit loss.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

The movements of the allowance for impairment losses for trade accounts receivable are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Pada awal periode	131.568	126.138	*At the beginning of the period*
Penambahan cadangan - bersih	1.321	5.430	*Increase in allowance - net*
Pada akhir periode	132.889	131.568	*At the end of the period*

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha kepada pihak ketiga adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha. Tidak diadakan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha kepada pihak berelasi karena manajemen berpendapat seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

Management believes that the allowance for impairment losses for trade accounts receivable from third parties is sufficient to cover possibility losses from uncollectible trade receivables. No allowance for impairment loss was provided on trade accounts receivable from related parties as management believes that all such receivables are collectible.

7. PIUTANG LAIN-LAIN / *7. OTHER ACCOUNTS RECEIVABLE*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Pihak berelasi (Catatan 49)	78.079	90.115	*Related parties (Note 49)*
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Media Televisi Indonesia	13.821	12.453	*PT Media Televisi Indonesia*
PT Garuda Graha Tirta	4.939	4.208	*PT Garuda Graha Tirta*
PT Surya Citra Televisi	-	5.544	*PT Surya Citra Televisi*
Lainnya	427.306	408.687	*Others*
Subjumlah	446.066	430.892	*Subtotal*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(15.372)	(15.363)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah	430.694	415.529	*Total*
Bersih	508.773	505.644	*Net*

Berdasarkan penelaahan atas kolektibilitas masing-masing piutang lain-lain pada akhir periode, manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain adalah cukup karena tidak terdapat perubahan signifikan terhadap kualitas kredit atas piutang.

Based on the review of the collectibility of other accounts receivable at the end of each period, management believes that the allowance for impairment losses for other accounts receivable is sufficient because there are no significant changes in credit quality of the receivables.

8. PERSEDIAAN - BERSIH / *8. INVENTORIES - NET*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Program			*Program*
Persediaan lokal	5.386.146	6.239.414	*Inventory local*
Persediaan impor	255.319	244.913	*Inventory import*
Subjumlah	5.641.465	6.484.327	*Subtotal*
Dikurangi yang dibebankan pada tahun berjalan	(1.894.316)	(2.810.332)	*Less charges to current year expense*
Bersih	3.747.149	3.673.995	*Net*
Non Program	376.153	394.300	*Non Program*
Jumlah	4.123.302	4.068.295	*Total*

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, persediaan non program diasuransikan bersamaan dengan aset tetap (Catatan 17). Manajemen berpendapat bahwa persediaan tersebut telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan memadai.

As of December 31, 2024 and 2023, non program inventories were insured along with property and equipment (Note 17). Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the inventories insured.

Persediaan program tidak diasuransikan terhadap risiko kerugian atas kebakaran atau pencurian karena nilai wajar persediaan tidak dapat ditentukan untuk tujuan asuransi. Bila terjadi kebakaran atau pencurian atas persediaan program, Grup dapat meminta kembali salinan film dari distributor selama film tersebut belum ditayangkan dan masa berlakunya belum berakhir.

Inventories for program were not insured against risk of loss from fire of theft because the fair value of inventories could not be established for the purpose of insurance. In the event of fire and theft, the Group can request a new copy of the film from distributor, as long as the film is not yet aired and has not yet expired.

9. UANG MUKA / *9. ADVANCES*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Uang muka program	653.455	559.832	*Program advances*
Uang muka lainnya	399.334	359.878	*Other advances*
Jumlah	1.052.789	919.710	*Total*

Uang Muka Program

Uang muka program merupakan pembayaran dimuka atas pembelian program lokal dan asing dan pembuatan program produksi sendiri.

Program Advances

Program advances represent advance payment for purchases of local and foreign programs and in-house production program.

Uang Muka Lainnya

Uang muka lainnya merupakan uang muka yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional.

Other Advances

Other advances represent advances which are used to support operational activities.

10. BIAYA DIBAYAR DIMUKA / *10. PREPAID EXPENSES*

Biaya dibayar dimuka merupakan pembayaran dimuka atas antara lain asuransi, sewa dan lainnya. Grup memiliki biaya dibayar dimuka sebesar Rp172.571 juta dan Rp215.502 juta masing-masing pada 31 Desember 2024 dan 2023.

Prepaid expenses represent advance payment for insurances, rents and others. The Group has prepaid expenses amounted to Rp172,571 million and Rp215,502 million as of December 31, 2024 and 2023, respectively.

11. PAJAK DIBAYAR DIMUKA / *11. PREPAID TAXES*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Pajak penghasilan badan	15.383	17.117	*Corporate income tax*
Lainnya	73.834	62.750	*Others*
Jumlah	89.217	79.867	*Total*

Pajak dibayar dimuka lainnya merupakan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan Grup.

Others prepaid taxes consist of the Group's value added taxes and income taxes.

12. UANG MUKA INVESTASI / *12. INVESTMENT ADVANCES*

Grup memiliki uang muka investasi pada beberapa perusahaan guna mendukung kegiatan usaha Grup sebesar Rp834.688 juta dan Rp1.271.721 juta masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

The Group has investment advances in companies in relation to the business of the Group amounted to Rp834,688 million and Rp1,271,721 million as of December 31, 2024 and 2023, respectively.

13. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN LAINNYA / *13. INVESTMENT IN ASSOCIATE AND OTHER*

Nama Entitas/*Name of Entities*	Domisili/ *Domicile*	% kepemilikan dan hak suara/ *% of ownership and voting rights* 2024/2023 %	31 Desember/ *December 31,* 2023	Bagian atas rugi komprehensif/ *Share of comprehensive loss*	31 Desember/ *December 31,* 2024
Investasi asosiasi/*Investment in associate*					
PT Teknologi Migo Indonesia	Jakarta	40,0	552.583	(7.463)	545.120
Investasi lainnya/*Investment other*					
PT MNC Wahana Wisata	Jakarta	5,0	186.000	-	186.000
Jumlah/*Total*			738.583	(7.463)	731.120

MVN, entitas anak, memiliki investasi pada entitas asosiasi yaitu PT Teknologi Migo Indonesia (MIGO) sejak bulan Desember 2021.

MVN, a subsidiary, has an investment in associate in PT Teknologi Migo Indonesia (MIGO) since December 2021.

Investasi lainnya diperoleh entitas anak terutama untuk tujuan potensi pertumbuhan jangka panjang Perusahaan dan entitas anak.

Other investment is held by subsidiary primarily for long-term growth potential for the Company and its subsidiaries.

14. ASET KEUANGAN LAINNYA – TIDAK LANCAR / *14. OTHER FINANCIAL ASSETS – NON-CURRENT*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Investasi saham	1.036.298	751.362	*Investment in stocks*
Bank yang dibatasi penggunaannya	1.443	1.443	*Restricted cash in bank*
Jumlah	1.037.741	752.805	*Total*

Investasi Saham / ***Investment in Stocks***

Perusahaan dan anak perusahaan memiliki investasi pada perusahaan *start-up, equity linked,* pengembangan digital platform dan perusahaan rumah produksi dengan investasi Rp1.036.298 juta dan Rp751.362 juta masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

The company and its subsidiaries have investment in start-up companies, equity linked, development in digital platform and production house company amounted to Rp1,036,298 million and Rp751,362 million as of December 31, 2024 and 2023, respectively.

15. PROPERTI INVESTASI / *15. INVESTMENT* PROPERTIES

Akun ini merupakan properti investasi milik anak perusahaan berupa prasarana dan infrastruktur menara transmisi, sebagai berikut:

This account represents investment properties owned by a subsidiary which was infrasructure facilities and transmission tower, as follows:

	1 Januari/ *January 1,* 2024	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Biaya perolehan	15.185	-	-	-	15.185	*Acquisition costs*
Akumulasi penyusutan	4.548	792	-	-	5.340	*Accumulated depreciation*
Jumlah tercatat	10.637				9.845	*Net book value*

	1 Januari/ *January 1,* 2023	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Biaya perolehan	19.812	-	-	(4.627)	15.185	*Acquisition costs*
Akumulasi penyusutan	11.467	714	-	(7.633)	4.548	*Accumulated depreciation*
Jumlah tercatat	8.345				10.637	*Net book value*

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 seluruh properti investasi telah diasuransikan bersama-sama dengan aset tetap (Catatan 17).

As of December 31, 2024 and 2023, all investment properties are insured along with fixed assets (Note 17).

Pada tahun 2023, Infokom mereklasifikasi dari akun aset tetap (Catatan 17).

In 2023, Infokom reclassed from property and equipment (Note 17).

16. ASET HAK GUNA / *16. RIGHT-OF-USE ASSETS*

	1 Januari/ *January 1,* 2024	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Biaya perolehan	193.834	10.244	2.332	(1.036)	200.710	*Acquisition costs*
Akumulasi penyusutan	100.185	30.349	2.310	(756)	127.468	*Accumulated depreciation*
Jumlah tercatat	93.649				73.242	*Net book value*

	1 Januari/ *January 1,* 2023	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Biaya perolehan	305.356	38.237	-	(149.759)	193.834	*Acquisition costs*
Akumulasi penyusutan	215.833	34.111	-	(149.759)	100.185	*Accumulated depreciation*
Jumlah tercatat	89.523				93.649	*Net book value*

Liabilitas sewa terdiri dari: *Lease liabilities consist of:*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Liabilitas sewa pembiayaan			*Finance lease liabilities*
Jatuh tempo dalam satu tahun	27.717	32.390	*Current maturities*
Setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	49.359	50.530	*Net of current maturities*
Jumlah	77.076	82.920	*Total*

17. ASET TETAP / *17. PROPERTY AND EQUIPMENT*

	1 Januari/ *January 1,* 2024	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Biaya perolehan						*Acquisition costs*
Pemilikan langsung						*Direct acquisitions*
Tanah	1.047.968	2.632	2.906	-	1.047.694	*Land*
Bangunan dan prasarana	5.081.998	15.300	45.257	148.401	5.200.442	*Buildings and infrastructures*
Peralatan kantor, instalasi dan komunikasi	2.755.086	111.415	88.511	851.665	3.629.655	*Office equipments, installations and communications*
Kendaraan bermotor	282.909	12.255	60.465	31.203	265.902	*Motor vehicles*
Peralatan penyiaran	12.807.753	401.046	335.684	739	12.873.854	*Broadcast equipments*
Subjumlah	21.975.714	542.648	532.823	1.032.008	23.017.547	*Subtotal*
Aset tetap kerjasama	32.349	-	-	-	32.349	*Property and equipment under joint operations*
Aset dalam pembangunan	3.379.452	593.239	235.392	(1.030.972)	2.706.327	*Construction in progress*
Jumlah biaya perolehan	25.387.515	1.135.887	768.215	1.036	25.756.223	*Total acquisition costs*
Akumulasi penyusutan						*Accumulated depreciation*
Pemilikan langsung						*Direct acquisitions*
Bangunan dan prasarana	1.765.646	200.184	44.791	(36.910)	1.884.129	*Buildings and infrastructures*
Peralatan kantor, instalasi dan komunikasi	2.187.311	67.533	86.001	35.814	2.204.657	*Office equipments, installations and communications*
Kendaraan bermotor	267.537	14.688	59.601	756	223.380	*Motor vehicles*
Peralatan penyiaran	9.728.720	777.795	313.147	1.096	10.194.464	*Broadcast equipments*
Subjumlah	13.949.214	1.060.200	503.540	756	14.506.630	*Subtotal*
Aset tetap kerjasama	29.838	534	-	-	30.372	*Property and equipment under joint operations*
Jumlah akumulasi penyusutan	13.979.052	1.060.734	503.540	756	14.537.002	*Total accumulated depreciation*
Jumlah tercatat	11.408.463				11.219.221	*Net book value*

	1 Januari/ *January 1,* 2023	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Biaya perolehan						*Acquisition costs*
Pemilikan langsung						*Direct acquisitions*
Tanah	1.042.010	7.803	1.845	-	1.047.968	*Land*
Bangunan dan prasarana	4.877.771	6.079	82	198.230	5.081.998	*Buildings and infrastructures*
Peralatan kantor, instalasi dan komunikasi	5.117.374	573.906	123.721	(2.812.473)	2.755.086	*Office equipments, installations and communications*
Kendaraan bermotor	280.792	14.007	11.890	-	282.909	*Motor vehicles*
Peralatan penyiaran	12.402.891	348.712	12.342	68.492	12.807.753	*Broadcast equipments*
Subjumlah	23.720.838	950.507	149.880	(2.545.751)	21.975.714	*Subtotal*
Aset tetap kerjasama	32.349	-	-	-	32.349	*Property and equipment under joint operations*
Aset dalam pembangunan	4.222.290	501.038	890	(1.342.986)	3.379.452	*Construction in progress*
Jumlah biaya perolehan	27.975.477	1.451.545	150.770	(3.888.737)	25.387.515	*Total acquisition costs*
Akumulasi penyusutan						*Accumulated depreciation*
Pemilikan langsung						*Direct acquisitions*
Bangunan dan prasarana	1.536.282	221.731	-	7.633	1.765.646	*Buildings and infrastructures*
Peralatan kantor, instalasi dan komunikasi	2.565.549	430.021	17.866	(790.393)	2.187.311	*Office equipments, installations and communications*
Kendaraan bermotor	262.562	10.415	5.440	-	267.537	*Motor vehicles*
Peralatan penyiaran	9.091.708	641.681	4.669	-	9.728.720	*Broadcast equipments*
Subjumlah	13.456.101	1.303.848	27.975	(782.760)	13.949.214	*Subtotal*
Aset tetap kerjasama	29.736	102	-	-	29.838	*Property and equipment under joint operations*
Jumlah akumulasi penyusutan	13.485.837	1.303.950	27.975	(782.760)	13.979.052	*Total accumulated depreciation*
Jumlah tercatat	14.489.640				11.408.463	*Net book value*

Rincian keuntungan pengurangan aset tetap yang dimiliki langsung oleh Grup adalah sebagai berikut:

Details of gains from the deduction of fixed assets which were directly owned by the Group are as follows:

	2024	2023	
Harga jual	282.562	393.531	*Proceeds*
Nilai tercatat	(264.675)	(122.795)	*Carrying value*
Keuntungan	17.887	270.736	*Gain*

Beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.091.083 juta masing-masing berasal dari aset tetap sebesar Rp1.060.734 juta dan aset hak guna sebesar Rp30.349 juta. Beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.338.061 juta.

Depreciation expense for the year ended December 31, 2024 amounted to Rp1,091,083 million which from property and equipment amounted to Rp1,060,734 million and right-of-use assets amounted to Rp30,349 million, respectively. Depreciation expenses for the year ended December 31, 2023 amounted to Rp1,338,061 million.

Reklasifikasi pada tahun 2023 dengan jumlah tercatat sebesar Rp3.105.977 juta yang terdiri dari Rp3.102.971 juta dengan biaya perolehan Rp3.893.363 juta dan akumulasi penyusutan Rp790.392 juta ke akun aset dimiliki untuk dijual (Catatan 21) dan Rp3.006 juta ke akun properti investasi (Catatan 15).

Reclassification in 2023 with net book value amounted to Rp3,105,977 million which consists of Rp3,102,971 million with an acquisition cost of Rp3,893,363 million and accumulated depreciation of Rp790,392 million to assets held for sale (Note 21) and Rp3,006 million to investment properties (Note 15).

Reklasifikasi pada tahun 2024 dengan jumlah tercatat sebesar Rp280 juta dengan biaya perolehan sebesar Rp1.036 juta dan akumulasi penyusutan Rp756 juta dari akun aset hak guna (Catatan 16).

Reclassification in 2024, with net book value amounted to Rp280 million with an acquisition cost of Rp1,036 million and accumulated depreciation of Rp756 million from right-of-use assets (Note 16).

Jumlah tercatat aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan oleh Grup pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp8.114.708 juta dan Rp7.286.410 juta.

Carrying amount of property and equipment which were fully depreciated but still used by the Group as of December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp8,114,708 million and Rp7,286,410 million, respectively.

Aset tetap kerjasama merupakan aset tetap yang dibiayai secara bersama-sama oleh RCTI dan SCTV untuk kegiatan operasional siaran nasional *(nation wide)*. RCTI dan SCTV masing-masing menanggung sebesar 50% biaya perolehan stasiun *relay* yang dibangun bersama-sama dengan penyediaan tanah, gedung dan fasilitas stasiun transmisi. RCTI, SCTV dan INDOSIAR juga melakukan perjanjian kerja sama kegiatan operasional siaran nasional *(nation wide)* di Jember, Madiun dan Banyuwangi. RCTI, SCTV dan INDOSIAR masing-masing menanggung 1/3 biaya perolehan stasiun *relay* yang dibagi bersama-sama.

Property and equipment under joint operations represent assets financed by RCTI and SCTV for nationwide operations. RCTI and SCTV will each assume 50% of the cost of all relay stations of the joint operations which are developed along with the provision of land, construction of building and relay station facilities which were shared together. RCTI, SCTV and INDOSIAR also have joint nationwide operations in Jember, Madiun and Banyuwangi. RCTI, SCTV and INDOSIAR each assumed 1/3 of the cost of relay stations which were shared together.

Aset dalam pembangunan diperkirakan akan selesai dalam 1-2 tahun dengan persentase penyelesaian antara 25%-90% pada tanggal 31 Desember 2024.

Construction in progress are estimated to be completed within 1-2 years, percentage of completion range is 25% to 90% as of December 31, 2024.

Grup memiliki beberapa bidang tanah dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan berjangka waktu 20 dan 30 tahun, jatuh tempo sampai dengan tahun 2045. Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti pemilikan yang memadai.

The Group owns several parcels of land with Building Use Rights for period of 20 to 30 years until 2045. Management believes that there will be no difficulty in the extension of land rights since the land were acquired legally and supported by sufficient evidence of ownership.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, aset tetap termasuk aset tetap kerjasama, kecuali tanah telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya kepada beberapa perusahaan asuransi yang merupakan pihak ketiga, kecuali PT MNC Asuransi Indonesia, pihak berelasi.

As of December 31, 2024 and 2023, property and equipment including property and equipment under joint operations, except land were insured against fire, theft and other possible risks to various insurance companies which are third parties, except to PT MNC Asuransi Indonesia, a related party.

Tabel berikut ini berisi informasi mengenai jumlah aset tercatat yang diasuransikan dan nilai pertanggungan:

The following table details the information in regards to total assets insured and sum insured:

	31 Desember/ *December 31,* 2024		31 Desember/ *December 31,* 2023		
Jumlah tercatat aset yang diasuransikan	Rp	7.406.239	Rp	7.186.060	*Carrying amount of insured assets*
Jumlah pertanggungan asuransi					*Total sum insured*
Rupiah (dalam jutaan)	Rp	6.850.710	Rp	6.732.865	*Rupiah (in million)*
Dolar Amerika Serikat	US$	10.575.000	US$	17.500.000	*US Dollar*

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Management believes that the insurance coveragse is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Berdasarkan penelaahan manajemen Grup, nilai wajar aset tetap pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 mendekati nilai tercatatnya.

Based on the Group management's assessment, the fair value of property and equipment as of December 31, 2024 and 2023, approximates its net book value.

Beberapa aset tetap digunakan sebagai jaminan atas utang bank, pinjaman jangka panjang (Catatan 22 dan 29) dan liabilitas sewa pembiayaan.

Several property and equipment are used as collateral for bank loans, long-term loans (Note 22 and 29) and finance lease liabilities.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat indikasi adanya penurunan nilai aset tetap.

As of December 31, 2024 and 2023, there was no indication of impairment in value of property and equipment.

18. GOODWILL / *18. GOODWILL*

Akun ini merupakan selisih lebih antara biaya perolehan dan bagian Perusahaan atas nilai wajar aset bersih entitas anak.

This account represents the excess of acquisition cost over the Company's interest in the fair value of the net assets of subsidiaries acquired.

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Perusahaan			*The Company*
MNCSV	2.171.705	2.171.705	*MNCSV*
MNC	41.395	41.395	*MNC*
Subjumlah	2.213.100	2.213.100	*Subtotal*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Entitas anak			*Subsidiaries*
MTN dan entitas anak	695.045	695.045	*MTN and its subsidiaries*
Digital Vision Nusantara	279.652	279.652	*Digital Vision Nusantara*
MNC Okezone Networks	211.393	211.393	*MNC Okezone Networks*
MNCTV	188.106	188.106	*MNCTV*
Nusantara Vision	155.826	155.826	*Nusantara Vision*
MMN dan entitas anak	52.162	52.162	*MMN and its subsidiaries*
AMG Kundur Vision	7.534	7.534	*AMG Kundur Vision*
Ansat Broadcast Sdn. Bhd.	4.716	-	*Ansat Broadcast Sdn. Bhd.*
Punggawa Utama Sorong Media	419	419	*Punggawa Utama Sorong Media*
Subjumlah	1.594.853	1.590.137	*Subtotal*
Jumlah tercatat	3.807.953	3.803.237	*Net carrying amount*

Dalam melakukan pengujian penurunan nilai goodwill, nilai terpulihkan dinilai dengan mengacu pada nilai pakai unit kas yang dihasilkan.

In performing goodwill impairment testing, the recoverable amount was assessed by reference to the cash generating unit's value in use.

19. ASET TAKBERWUJUD – BERSIH / *19. INTANGIBLE ASSETS – NET*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Biaya perolehan			*Acquisition Cost*
Digital streaming platform	2.656.323	2.389.733	*Digital streaming platform*
Biaya perolehan pelanggan	1.311.951	1.354.922	*Subscriber acquisition cost*
Biaya perolehan chanel	310.644	310.644	*Channel acquisition cost*
Izin penyelenggaraan penyiaran	51.669	51.669	*Broadcast activities license*
Lainnya	150.553	115.052	*Others*
Jumlah	4.481.140	4.222.020	*Total*
Akumulasi amortisasi	2.275.607	2.134.880	*Accumulated amortization*
Jumlah tercatat	2.205.533	2.087.140	*Net carrying amount*

Beban amortisasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp140.727 juta dan Rp173.670 juta dicatat pada beban langsung dan beban umum dan administrasi.

Amortization expense for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp140,727 million and Rp173,670 million, respectively, recorded in direct cost and general and administrative expense.

Digital Streaming Platform / *Digital Streaming Platform*

Digital streaming platform merupakan biaya perolehan atas pengembangan perangkat lunak termasuk aplikasi *superapps* RCTI+, lisensi, dan penayangan program konten entitas anak.

Digital streaming platform acquisition cost is development cost of softwareinclude application superapps RCTI+, license and displaying content program of subsidiaries.

Biaya Perolehan Pelanggan / *Subscriber Acquisition Cost*

Penambahan biaya perolehan pelanggan termasuk jumlah yang dibayarkan untuk setiap pelanggan baru yang berhasil diperoleh.

Additions to subscriber acquisition cost include the amount paid for each new aquisition of subscriber.

Biaya Perolehan Chanel / *Channel Acquisition Cost*

Biaya perolehan chanel merupakan biaya perolehan beberapa chanel seperti: *Sport, Soccer, Comedy, Drama, Infotainment, Fashion, Kids, Home and Living, Muslim, Entertainment, News dan Music Channel* yang dibeli seharga US$ 35 juta untuk seluruh chanel.

Channel acquisition cost represents cost of channels, such as: Sport, Soccer, Comedy, Drama, Infotainment, Fashion, Kids, Home and Living, Muslim, Entertainment, News and Music Channel which was bought with total price of US$ 35 million.

Izin Penyelenggaraan Penyiaran

Izin penyelenggaraan penyiaran yang timbul dari akuisisi entitas anak merupakan izin atas penyelenggaraan penyiaran televisi milik entitas anak MTN.

Broadcast Activities License

Broadcast activities license arising from acquisition of subsidiary represent license to broadcast television activities owned by MTN's subsidiaries.

20. TANAH UNTUK PENGEMBANGAN / *20. LAND FOR DEVELOPMENT*

Pada tanggal 31 Desember 2022, PT MNC Movieland Indonesia anak perusahaan MSIN merevaluasi tanah untuk pengembangan seluas 21,05 Ha berlokasi di kawasan PT MNC Lido City, Sukabumi, Bogor. Tanah ini akan dikembangkan sebagai Movieland yang memiliki sarana infrastruktur produksi terintegrasi khususnya untuk produksi movie, OTT dan drama televisi dengan biaya perolehan tanah Rp92.743 juta yang dibeli pada tahun 2020. Pada tahun 2022, anak perusahaan melakukan revaluasi tanah untuk pengembangan tersebut dan mengakui nilai wajar pada tanggal revaluasi dengan metode pendekatan nilai pasar sesuai dengan peraturan yang berlaku, berdasarkan laporan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dino Suharianto & Rekan (Penilai Publik Dino Suharianto No. STTD.PP-200/PM.223/2012) tanggal 8 Maret 2023 sebesar Rp825.154 juta.

As of December 31, 2022, PT MNC Movieland Indonesia subsidiary of MSIN revalued its 21.05 Ha of land for development located in PT MNC Lido City area, Sukabumi, Bogor. The land will be developed as a Movieland with an integrated production infrastructure particularly for movie production, OTT and television drama with acquisition cost Rp92,743 million which was acquired in 2020. In 2022, the subsidiary revalued the land for this development and recognized the fair value at the date of revaluation using the market value approach in accordance with the regulations, based on a report from Public Appraisal Services Office (KJPP) Dino Suharianto & Rekan (Public Appraiser Dino Suharianto No. STTD.PP-200/PM.223/2012) dated March 8, 2023 amounting to Rp825,154 million.

21. ASET LAIN-LAIN / *21. OTHER ASSETS*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Aset dimiliki untuk dijual	263.496	1.123.177	*Assets held for sale*
Uang muka pembelian aset tetap	82.025	66.708	*Advances of purchase property and equipment*
Uang muka operasional	60.985	36.985	*Advances for operating activities*
Uang jaminan	68.971	57.399	*Refundable deposit*
Lain-lain	491.738	306.142	*Others*
Jumlah	967.215	1.590.411	*Total*

Pada tahun 2023, MKM, entitas anak MVN, memiliki aset dimiliki untuk dijual yang merupakan reklasifikasi dari akun aset tetap sebesar Rp3.102.971 juta (Catatan 17). MKM telah menjual sebagian aset dimiliki untuk dijual kepada PT Asianet Media Teknologi dan PT Indosat Tbk dengan nilai tercatat sebesar Rp1.979.796 juta dan mencatat laba penjualan aset dimiliki untuk dijual sebesar Rp33.858 juta yang disajikan sebagai bagian dari akun penghasilan (beban) lain-lain bersih pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

In 2023, MKM, a subsidiary of MVN, has assets held for sale which is reclassified from fixed assets account amounted to Rp3,102,971 million (Note 17). MKM sold a part of assets held for sale to PT Asianet Media Teknologi and PT Indosat Tbk with carrying amount of Rp1,979,796 million and recorded gain on sale of assets held for sale amounted to Rp33,858 million which presented as part of the other income (expense) – net in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2023.

Pada tahun 2024, MKM, entitas anak MVN, telah menjual sebagian aset lain-lain – aset dimiliki untuk dijual kepada PT Asianet Media Teknologi dengan nilai tercatat Rp859.681 juta dan mencatat laba penjualan aset dimiliki untuk dijual sebesar Rp21.972 juta yang disajikan sebagai bagian dari akun penghasilan (beban) lain-lain bersih pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

In 2024, MKM, a subsidiary of MVN, has sold a partial of other assets – assets held for sale to PT Asianet Media Teknologi with carrying value of Rp859,681 million and recorded gain on sale of assets held for sales amounted to Rp21,972 million which presented as part of the other income (expense) – net in the statements of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2024.

22. UTANG BANK / *22. BANK LOAN*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Bank Mayapada	475.000	475.000	*Bank Mayapada*
Deutsche Bank AG	379.807	-	*Deutsche Bank AG*
Bank DBS Indonesia	200.000	200.000	*Bank DBS Indonesia*
Pinjaman Sindikasi	135.000	-	*Syndicated Loan*
Bank Nationalnobu	50.000	50.000	*Bank Nationalnobu*
Bank MNC International	15.400	148.400	*Bank MNC International*
Bank BJB	13.000	13.000	*Bank BJB*
Bank Ganesha	12.500	5.000	*Bank Ganesha*
Bank Jtrust Indonesia	12.043	15.000	*Bank Jtrust Indonesia*
Bank Central Asia	9.826	9.903	*Bank Central Asia*
Bank Oke Indonesia	9.383	101	*Bank Oke Indonesia*
Bank Sinarmas	-	400.000	*Bank Sinarmas*
Jumlah	1.311.959	1.316.404	*Total*

Bank Mayapada / ***Bank Mayapada***

GTV / *GTV*

Pada tanggal 23 November 2018 dan 26 November 2018, GTV memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank Mayapada dengan maksimum pinjaman Rp250.000 juta. Selama tahun 2020, fasilitas pinjaman tersebut dikenakan tingkat bunga 13% per tahun dan jatuh tempo dalam 7 bulan. Pinjaman ini telah di perpanjang pada tanggal 23 Oktober 2024 dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 Oktober 2025, dan tidak terdapat batasan-batasan keuangan tertentu. Pinjaman tersebut dijamin dengan aset anak perusahaan dan penjaminan perusahaan.

On November 23, 2018 and November 26 , 2018, GTV obtained a Working Capital Credit Facility at a maximum of Rp250,000 million from Bank Mayapada. During 2020, the loan facility bears interest of 13% per annum and will be due in 7 months. This loan facility has been extended on October 23, 2024 and will be due on October 23, 2025, and there are no particular financial covenants. The loan is secured by subsidiary's assets and corporate guarantee.

MTN / *MTN*

Pada tanggal 15 April 2019, MTN memperoleh fasilitas pinjaman dari Bank Mayapada dengan maksimum pinjaman sebesar Rp100.000 juta dengan bunga 14% per tahun, dan tidak terdapat batasan-batasan keuangan tertentu. Pinjaman ini dijamin dengan hak guna bangunan dan penjaminan perusahaan dari PT MNC Land Tbk.

On April 15, 2019, MTN obtained a loan facility from Bank Mayapada at a maximum of Rp100,000 million, bear interest of 14% per annum, and there are no particular financial covenants. This loan facility is secured by land rights and corporate guarantee from PT MNC Land Tbk.

Selanjutnya, berdasarkan adendum perjanjian tanggal 13 Februari 2023, pinjaman tersebut diperpanjang dengan tambahan fasilitas Rp25.000 juta, berlaku selama 12 (duabelas) bulan sejak tanggal 22 April 2023 atau fasilitas kredit dinyatakan lunas oleh Bank. Pinjaman ini telah diperpanjang pada tanggal 22 April 2024 dengan tingkat bunga 12% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 April 2025.

The loan facility has been amended on February 13, 2023 with additional facility of Rp25,000 million, valid for 12 (twelve) months from April 22, 2023 or the credit facility is declared fully paid by the Bank. This loan facility has been extended on April 22, 2024 which bears interest of 12% per annum and will be due on April 22, 2025.

Infokom / *Infokom*

Pada tanggal 15 Februari 2022, Infokom telah memperoleh fasilitas Pinjaman Tetap *On-Demand* (PTX OD) dari Bank Mayapada sebesar Rp150.000 juta, jangka waktu 12 bulan, dengan tingkat bunga 10% per tahun, dan tidak terdapat batasan-batasan keuangan tertentu. Perjanjian tersebut dijamin dengan aset tetap berupa mesin-mesin. Fasilitas pinjaman ini telah diperpanjang pada tanggal 15 Februari 2025 dan akan jatuh tempo tanggal 15 Februari 2026.

On February 15, 2022, Infokom, has obtained a Fixed On-Demand Loan facility (PTX OD) from Bank Mayapada amounting to Rp150,000 million, with a term of 12 months, with an interest rate of 10% per annum, and there are no particular financial covenants. The agreement is secured by machineries of fixed assets. This loan facility has been extended on February 15, 2025 and will be due on February 15, 2026.

Deutsche Bank AG

Pada tanggal 26 Agustus 2024, MNC memperoleh fasilitas kredit dari Deutsche Bank AG, Singapore Branch sebesar US$ 26 juta dengan tingkat bunga SOFR 3 bulan + marjin 5,85% per tahun, dimana marjin tersebut meningkat 0,5% setiap 3 bulan sejak tangal utilisasi. Pinjaman ini memiliki jangka waktu selama 12 bulan. Saldo pinjaman atas fasilitas pinjaman Deutsche Bank adalah US$ 23,5 juta (setara dengan Rp379.807 juta) pada 31 Desember 2024.

Deutsche Bank AG

On August 26, 2024, MNC obtained a credit facility from Deutsche Bank AG, Singapore Branch, amounting to US$ 26 million with an interest rate of 3month SOFR + margin of 5.85% per annum, provided that the margin shall increased by 0.5% per annum on the date falling 3 monthly interval from the utilization date. The loan has a term of 12 months. The outstanding loan balance on the Deutsche Bank facility was US$ 23.5 million (equivalent to Rp379,807 million) as of December 31, 2024.

Bank DBS Indonesia (DBS)

Pada tanggal 25 September 2023, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas perbankan dalam bentuk Commited Revolving Credit Facility ("Fasilitas RCF") sebesar Rp200.000 juta dengan DBS. Bunga yang dikenakan adalah sebesar JIBOR + 4% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 (dua belas) bulan sejak ditandatanganinya Fasilitas RCF. Fasilitas ini telah diperpanjang pada tanggal 25 September 2024 dan akan jatuh tempo tanggal 25 September 2025.

Bank DBS Indonesia (DBS)

On September 25, 2023, the Company has signed a banking facility agreement in the form of a Committed Revolving Credit Facility ("RCF Facility") amounted to Rp200,000 million with DBS. The interest charged is JIBOR + 4% per annum with a loan term of 12 (twelve) months from the signing of the RCF Facility. This facility has been extended on September 25, 2024 and will be due on September 25, 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah mematuhi rasio keuangan dan batasan-batasan sebagaimana tercantum dalam Fasilitas RCF, yaitu *debt-to-ebitda ratio* kurang dari tiga kali dan *interest service coverage ratio* lebih besar dari 1,25 kali.

On December 31, 2024 and 2023, the Company has complied with the financial ratios and covenants as stated in the RCF Facility, such as debt-to-ebitda ratio no more than three times and internet service coverage ratio is higher than 1.25 times.

Pinjaman Sindikasi

Pada tanggal 13 September 2024, RCTI, entitas anak, menandatangani perjanjian pinjaman sindikasi dengan (i) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebagai mandated lead arrangers; (ii) PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Kalteng, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT Bank MNC Internasional Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sebagai para kreditur sebesar Rp 135.000 juta. Jangka waktu fasilitas pinjaman adalah 12 bulan. Suku bunga pinjaman per tahun adalah 10,5%. Pinjaman ini dijamin dengan tanah beserta bangunan gedung, tagihan dan persediaan, serta jaminan MNC.

Syndicated Loan

On September 13, 2024, RCTI, a subsidiary, have entered into a syndicated loan agreement amongs (i) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk as mandated lead arrangers; (ii) PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Kalteng, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT Bank MNC Internasional Tbk and PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara as creditors Rp 135,000 million. The term of the loan facility is 12 months. Interest rate per annum is 10.5%. The loan is secured by land and building, trade receivable and inventory, and corporate guarantee of MNC.

Bank Nationalnobu

Pada tanggal 25 Agustus 2023, MNC memperoleh fasilitas pinjaman tetap dari Bank Nationalnobu sebesar Rp50.000 juta. Jangka waktu perjanjian kredit ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal dimulai perjanjian dengan tingkat bunga 9,75% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 25 Agustus 2024. Pinjaman ini dijamin dengan aset MNC. Pinjaman ini telah di perpanjang pada tanggal 23 Agustus 2024 dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Agustus 2025.

Bank Nationalnobu

On August 25, 2023, MNC obtained a fixed loan facility from Bank Nationalnobu with amount of Rp50,000 million. The term of this credit agreement is valid for 12 (twelve) months from the date of agreement starts, with interest rate each at 9.75% per annum and due on August 25, 2024. This loan facility is secured by MNC's assets. This loan facility has been extended on August 23, 2024 and will be due on August 25, 2025.

Bank MNC Internasional

MPI

Pada tanggal 10 Mei 2021, MPI memperoleh fasilitas pinjaman dari Bank MNC Internasional dengan pinjaman sebesar Rp26.000 juta. Jangka waktu perjanjian kredit ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal di mulai perjanjian, dengan tingkat bunga >10% per tahun, dan tidak terdapat batasan-batasan keuangan tertentu. Perjanjian ini telah diperpanjang pada tanggal 10 Mei 2024 dan akan jatuh tempo tanggal 10 Mei 2025.

Pada tanggal 30 Desember 2024, MPI telah membayar luans fasilitas kredit tersebut sebesar Rp26.000 juta.

MNI

Pada tanggal 3 September 2021, MNI memperoleh fasilitas pinjaman dari Bank MNC Internasional dengan pinjaman sebesar Rp4.750 juta dan pada tanggal 10 Desember 2021, MNI memperoleh tambahan fasilitas pinjaman dari Bank MNC Internasional dengan pinjaman sebesar Rp18.750 juta. Jangka waktu perjanjian kredit ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal di mulai perjanjian dengan tingkat bunga deposito ditambah marjin tertentu dan jatuh tempo pada tanggal 3 September 2023, serta tidak terdapat batasan-batasan keuangan tertentu. Para pihak telah menyetujui untuk memperpanjang jatuh tempo menjadi 3 September 2024.

Pada tanggal 9 Juli 2024, MNI telah membayar lunas fasilitas kredit tersebut sebesar Rp23.500 juta.

MTN

Pada tanggal 10 Mei 2022, MTN memperoleh fasilitas pinjaman dari Bank MNC Internasional dengan pinjaman sebesar Rp58.500 juta. Jangka waktu perjanjian kredit ini berlaku selama 12 (duabelas) bulan sejak tanggal di mulai perjanjian, dengan tingkat bunga >10% per tahun dan jatuh tempo pada 10 Mei 2023, dan tidak terdapat batasan-batasan keuangan tertentu. Perjanjian ini telah diperpanjang pada tanggal 6 Mei 2024 dan akan jatuh tempo tanggal 17 Mei 2025.

Pada tanggal 17 Mei 2022, MTN memperoleh fasilitas pinjaman dari Bank MNC Internasional dengan pinjaman sebesar Rp3.300 juta. Jangka waktu perjanjian kredit ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal di mulai perjanjian, dengan tingkat bunga >10% per tahun dan jatuh tempo pada 17 Mei 2023, dan tidak terdapat batasan-batasan keuangan tertentu. Perjanjian ini telah diperpanjang pada tanggal 6 Mei 2024 dan akan jatuh tempo tanggal 17 Mei 2025.

MNC

Pada tanggal 15 Juni 2023, MNC memperoleh fasilitas pinjaman dari Bank MNC Internasional dengan pinjaman sebesar Rp12.100 juta. Jangka waktu perjanjian kredit ini berlaku selama 12 (duabelas) bulan sejak tanggal di mulai perjanjian, dengan tingkat bunga 10,5% per tahun dan jatuh tempo pada 15 Juni 2024. Pinjaman ini telah di perpanjang pada tanggal 22 Mei 2024 dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Juni 2025.

Bank MNC Internasional

MPI

On May 10, 2021, MNI obtained a loan facility from Bank MNC Internasional with amount of Rp26,000 million. The term of this credit agreement is valid for 12 (twelve) months from the date of agreement starts, with interest rate each at >10% per annum, and there are no particular financial covenants. This loan facility has been extended on May 10, 2024 and will be due on May 10, 2025.

On December 30, 2024, MPI had fully paid the credit facility amounted to Rp26,000 million.

MNI

On September 3, 2021, MNI obtained a loan facility from Bank MNC Internasional with amount of Rp4,750 million and on December 10, 2021, MNI obtained additional loan facility from Bank MNC Internasional with amount of Rp18,750 million. The term of this credit agreement is valid for 12 (twelve) months from the date of agreement starts, with a deposit interest rate plus a certain margin and due on September 3, 2023, and there are no particular financial covenants. The parties has agreed to renewable the maturity date to September 3, 2024.

On July 9, 2024, MNI had fully paid the credit facility amounted to Rp23,500 million.

MTN

On May 10, 2022, MTN obtained a loan facility from Bank MNC Internasional with amount of Rp58,500 million. The term of this credit agreement is valid for 12 (twelve) months from the date of agreement starts, with interest rate each at > 10% per annum and due on May 10, 2023, and there are no particular financial covenants. This loan facility has been extended on May 6, 2024 and will be due on May 17, 2025.

On May 17, 2022, MTN obtained a loan facility from Bank MNC Internasional with amount of Rp3,300 million. The term of this credit agreement is valid for 12 (twelve) months from the date of agreement starts, with interest rate each at > 10% per annum and due on May 17, 2023, and there are no particular financial covenants. This loan facility has been extended on May 6, 2024 and will be due on May 17, 2025.

MNC

On June 15, 2023, MNC obtained a loan facility from Bank MNC Internasional with amount of Rp12,100 million. The term of this credit agreement is valid for 12 (twelve) months from the date of agreement starts, with interest rate each at 10.5% per annum and due on June 15, 2024. This loan facility has been extended on May 22, 2024 and will be due on june 15, 2025.

Bank JTrust Indonesia

Pada tanggal 29 Maret 2022, Infokom menandatangani perjanjan fasilitas pinjaman kredit rekening koran sebesar Rp10.000 juta dengan PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Bunga yang dikenakan sebesar 10,50% per tahun dan jangka waktu pinjaman 12 (dua belas) bulan dari tanggal ditandatangani fasilitas kredit, dan tidak terdapat batasan-batasan keuangan tertentu. Fasilitas pinjaman dijamin dengan surat jaminan fidusia dengan obyek jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan. Fasilitas pinjaman ini telah diperpanjang pada tanggal 30 Maret 2025 dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2026.

Pada tanggal 29 September 2022, Infokom menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman kredit rekening koran sebesar Rp10.000 juta dengan PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Bunga yang dikenakan sebesar 10,50% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 1 tahun dari tanggal ditandatangani fasilitas kredit, dan tidak terdapat batasan-batasan keuangan tertentu. Fasilitas Pinjaman diatas dijamin dengan surat jaminan fidusia dengan obyek jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan.

Pada tanggal 4 Agustus 2023, Infokom menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman kredit atas permintaan sebesar Rp20.000 juta dengan PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Bunga yang dikenakan sebesar 11% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 1 tahun dari tanggal ditandatangani fasilitas kredit, dan tidak terdapat batasan-batasan keuangan tertentu. Fasilitas Pinjaman diatas dijamin dengan surat jaminan fidusia dengan obyek jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan. Fasilitas pinjaman ini telah diperpanjang pada tanggal 30 Maret 2025 dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2026.

Bank JTrust Indonesia

On March 29, 2022, Infokom entered into overdraft loans facility agreement amounting to Rp10,000 million with PT Bank JTrust IndonesiaTbk. The interest is charged at 10.50% per annum with loan term of 12 (twelve) months from the date of the credit facility was signed, and there are no particular financial covenants. Such loan facilities is secured with fiduciary guarantee with collateral inthe form of Building Use Rights. This loan facility has been extended on March 30, 2025 and will be due on March 30, 2026.

On September 29, 2022, Infokom signed overdraft loans facility agreement amounting to Rp10,000 million with PT Bank JTrust Indonesia Tbk. The interest charged is 10.50% per annum with a loan term of 1 year from the date the credit facility was signed, and there are no particular financial covenants. The loan facility is secured by a fiduciary guarantee with the object of collateral in the form of Building Use Rights.

On August 4, 2023, Infokom signed demand loans facility agreement amounting to Rp20,000 million with PT Bank JTrust Indonesia Tbk. The interest charged is 11% per annum with a loan term of 1 year from the date the credit facility was signed, and there are no particular financial covenants. The loan facility is secured by a fiduciary guarantee with the object of collateral in the form of Building Use Rights. This loan facility has been extended on March 30, 2025 and will be due on March 30, 2026.

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB)

RCTI

Pada tanggal 11 Oktober 2019, RCTI memperoleh fasilitas kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (BJB). Fasilitas pinjaman ini memiliki batas maksimum sebesar Rp100.000 juta dengan tingkat bunga 11% per tahun. Jangka waktu perjanjian kredit ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal di mulai perjanjian. Pinjaman ini dijamin dengan aset MNC dan penjaminan MNC. Selanjutnya, berdasarkan adendum perjanjian tanggal 15 Oktober 2021, pinjaman tersebut diperpanjang dengan tambahan fasilitas Rp50.000 juta, berlaku selama 12 (dua belas) bulan sampai 16 Oktober 2022 atau fasilitas kredit dinyatakan lunas oleh Bank. Pinjaman ini telah di perpanjang pada tanggal 15 Oktober 2022 dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 Oktober 2023.

Pada tanggal 7 September 2023, RCTI menandatangani adendum perjanjian kredit senilai Rp150.000 juta yang mengubah jangka waktu kredit menjadi 48 (empat puluh delapan) bulan sehingga RCTI mengklasifikasikan pada pinjaman jangka panjang (Catatan 29).

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB)

RCTI

On October 11, 2019, RCTI obtained credit facilities from PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (BJB). This loan facility has a máximum limit of Rp100,000 million with interest rate 11% per annum. The term of this credit agreement is valid for 12 (twelve) months from the date of agreement starts. This loan facility is secured by assets and corporate guarantee of MNC. The loan facility has been amended on October 15, 2021 with additional facility of Rp50,000 million, valid for 12 (twelve) months up to October 16, 2022 or the credit facility is declared fully paid by the Bank. This loan facility has been extended on October 15, 2022 and will be due on October 16, 2023.

On September 7, 2023, RCTI signed addendum of credit loan agreement amounted to Rp150,000 which amended loan term to 48 (fourty eight) months, therefore RCTI classified as long-term loan (Note 29).

DVN

Pada bulan Juni 2022, DVN menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (BJB) sebesar Rp13.000 juta. Jangka waktu perjanjian kredit ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal dimulai perjanjian.

Perjanjian atas pinjaman ini diperpanjang dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan sampai dengan Juni 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup telah mematuhi rasio keuangan dan batasan-batasan sebagaimana tercantum dalam perjanjian pinjaman yaitu rasio lancar lebih besar dari satu kali dan rasio utang terhadap modal tidak lebih dari satu kali.

Bank Ganesha

Pada tanggal 2 Juni 2021, Infokom menandatangani perjanjian fasilitas Short Term Loan (STL) sebesar Rp13.500 juta dengan PT Bank Ganesha Tbk. Bunga yang dikenakan sebesar 10,50% p.a dengan jangka waktu pinjaman 1 tahun dari tanggal ditandatangani fasilitas kredit, dan tidak terdapat batasan-batasan keuangan tertentu. Fasilitas pinjaman diatas dijamin dengan surat jaminan fidusia dengan objek jaminan berupa Hak Guna Bangunan. Perjanjian ini telah diperpanjang dan akan jatuh tempo pada tanggal 2 Juni 2025.

Bank Central Asia (BCA)

Pada tanggal 24 Juni 2022, RCTI memperoleh fasilitas pinjaman dari BCA maksimal sebesar Rp10.000 juta, jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal dimulai perjanjian. Perjanjian kredit ini telah di perpanjang pada tanggal 26 Juli 2024 dan berlaku selama 12 (duabelas) bulan dengan tingkat bunga 10% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2025 atau fasilitas kredit dinyatakan lunas oleh Bank. Pinjaman ini dijamin dengan tanah seluas 915 m^2 berlokasi di Kebon Jeruk, Jakarta Barat milik entitas anak.

Bank Oke Indonesia

Pada tanggal 31 Januari 2023, Infokom menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman kredit rekening koran sebesar Rp10.000 juta dengan PT Bank Oke Indonesia Tbk. Bunga yang dikenakan sebesar 11% per tahun dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditandatanganinya fasilitas kredit, dan tidak terdapat batasan-batasan keuangan tertentu. Perjanjian ini telah diperpanjang dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2026.

Bank Sinarmas

Pada tanggal 19 Maret 2019, RCTI memperoleh fasilitas kredit dari Bank Sinarmas sebesar Rp400.000 juta dengan tingkat bunga 12% per tahun, dan tidak terdapat batasan-batasan keuangan tertentu.

DVN

In June 2022, DVN entered into a loan facility agreement with PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (BJB) amounted Rp13,000 million. Loan term is 12 (tweleve) months from the date the agreement is signed.

The agreement on this loan was extended with loan term of 12 (twelve) months until June 2025.

On December 31, 2024 and 2023, the Group has complied with the financial ratios and covenants as stated in the loan agreement such as current ratio bigger than one time and debt-to-eqiuty ratio no more than one time.

Bank Ganesha

On June 2, 2021, Infokom entered into an Short Term Loan (STL) facility of Rp13,500 million with PT Bank Ganesha Tbk. Interest is charged at 10,5% p.a with 1 year period from the date of the credit facility was signed, and there are no particular financial covenants. Such Loan is secured with fiduciary bond with collateral in the form of Right to Build. This agreement was extended and will be due on June 2, 2025.

Bank Central Asia (BCA)

On June 24, 2022, RCTI obtained a loan facility from BCA with maximum amount of Rp10,000 million, for 12 (twelve) months from the date of the agreement. This credit agreement has been extended on July 26, 2024 and valid for 12 (twelve) months with interest rate at 10% per annum and due on June 27, 2025 or the credit facility is declared paid off by the Bank. This loan facility is secured by a 915 m^2 land located in Kebon Jeruk, West Jakarta, owned by a subsidiary.

Bank Oke Indonesia

On January 31, 2023, Infokom signed overdraft loans facility agreement amounting to Rp10,000 million with PT Bank Oke Indonesia Tbk. The interest charged is 11% per annum with a loan term of 12 (twelve) months from the date the credit facility was signed, and there are no particular financial covenants. This agreement was extended and will be due on January 31, 2026.

Bank Sinarmas

On March 19, 2019, RCTI obtained credit facilities from Bank Sinarmas amounting Rp400,000 million with interest rate 12% per annum, and there are no particular financial covenants.

Jangka waktu perjanjian kredit ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal di mulai perjanjian. Perjanjian kredit ini telah di perpanjang pada tanggal 16 Maret 2024 dan berlaku selama 12 (dua belas) bulan atau fasilitas kredit dinyatakan lunas oleh Bank. Pinjaman tersebut dijamin dengan aset, dan penjaminan MNC.

The term of this credit agreement is valid for 12 (twelve) months from the date of agreement starts. This credit agreement has been extended on March 16, 2024 and valid for 12 (twelve) months or the credit facility is declared paid off by the Bank. The loan is secured by asset, and corporate guarantee of MNC.

Pada tanggal 19 September 2024, RCTI telah melunasi fasilitas kredit ini.

On September 19, 2024, RCTI has settled the credit facility.

23. UTANG USAHA / *23. TRADE ACCOUNTS PAYABLE*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
a. Berdasarkan pemasok			*a. By supplier*
Pihak berelasi (Catatan 49)	7.271	6.562	*Related parties (Note 49)*
Pihak ketiga			*Third parties*
TV berbayar dan *broadband*	355.012	290.402	*Pay TV and broadband*
Iklan dan konten	40.299	50.555	*Advertising and content*
Lainnya	20.677	34.855	*Others*
Subjumlah	415.988	375.812	*Subtotal*
Jumlah	423.259	382.374	*Total*
b. Berdasarkan mata uang			*b. By currency*
Rupiah	384.565	311.644	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	37.521	67.860	*US Dollar*
Lainnya	1.173	2.870	*Others*
Jumlah	423.259	382.374	*Total*

Jangka waktu kredit yang timbul dari pembelian program, baik dari pemasok dalam maupun luar negeri, berkisar antara 30 sampai dengan 60 hari.

Purchases of program, both from local and foreign suppliers, have credit terms of 30 to 60 days.

Tidak ada bunga yang dibebankan pada utang usaha kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan karena pembayaran masih dilakukan dalam periode kredit normal.

No interest is charged on the trade accounts payable to third parties for the outstanding balance because the payments are still made within the normal credit period.

24. UTANG LAIN-LAIN / *24. OTHER ACCOUNTS PAYABLE*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Pihak berelasi (Catatan 49)	15.264	13.606	*Related parties (Note 49)*
Pihak ketiga			*Third parties*
Iklan dan konten	23.480	21.590	*Advertising and content*
TV berbayar dan *broadband*	7.459	8.737	*Pay TV and broadband*
Lainnya	80.796	141.424	*Others*
Subjumlah	111.735	171.751	*Subtotal*
Jumlah	126.999	185.357	*Total*

Utang lain-lain merupakan liabilitas kepada kreditur untuk operasional.

Other accounts payable represent liabilities to creditor for operational.

25. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA / *25. UNEARNED REVENUES*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Iklan dan konten	8.358	9.571	*Advertising and content*
TV berbayar dan *broadband*	309	311	*Pay TV and broadband*
Lainnya	2.558	3.399	*Others*
Jumlah	11.225	13.281	*Total*

26. UTANG PAJAK / *26. TAXES PAYABLE*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Pajak penghasilan	60.269	71.613	*Income tax*
Pajak pertambahan nilai - bersih	10.826	12.881	*Value added tax - net*
Jumlah	71.095	84.494	*Total*

27. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR / *27. ACCRUED EXPENSES*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Konten program	4.948	3.423	*Program contents*
Utilitas	4.323	3.044	*Utilities*
Lainnya	73.354	10.814	*Others*
Jumlah	82.625	17.281	*Total*

28. UANG MUKA PELANGGAN / *28. CUSTOMER DEPOSITS*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
TV berbayar dan *broadband*	2.603	8.936	*Pay TV and broadband*
Iklan dan konten	2.150	2.424	*Advertising and content*
Lainnya	1.578	3.308	*Others*
Jumlah	6.331	14.668	*Total*

29. PINJAMAN BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN – JANGKA PANJANG / *29. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION LOANS – LONG-TERM*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Bank Mayapada	343.321	431.443	*Bank Mayapada*
Pinjaman Sindikasi	334.583	-	*Syndicated Loan*
Bank BJB	255.995	380.740	*Bank BJB*
China Development Bank	225.925	307.993	*China Development Bank*
Investment Opportunities V Pte. Limited	160.812	198.866	*Investment Opportunities V Pte. Limited*
Deutshe Bank	155.559	716.062	*Deutshe Bank*
Bank Jtrust Indonesia	147.506	165.167	*Bank Jtrust Indonesia*
Marymount Road Limited	113.134	107.912	*Marymount Road Limited*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Bank Victoria	24.858	34.801	*Bank Victoria*
Bank Central Asia	14.184	19.307	*Bank Central Asia*
Shinhan Invesment Corp.	-	77.080	*Shinhan Invesment Corp.*
Bank Rakyat Indonesia	-	36.421	*Bank Rakyat Indonesia*
Jumlah	1.775.877	2.475.792	*Total*
Bagian jangka pendek	(808.495)	(1.298.860)	*Current maturities*
Bagian jangka panjang	967.382	1.176.932	*Long-term portion*

Pinjaman bank dan lembaga keuangan – jangka panjang akan dilunasi sebagai berikut:

The bank and financial institution loans – long-term are repayable as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Jatuh tempo dalam setahun	808.495	1.298.860	*Due in one year*
Pada tahun kedua	530.170	497.888	*In the second year*
Lebih dari tiga tahun	440.475	695.331	*More than three year*
Subjumlah	1.779.140	2.492.079	*Subtotal*
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(3.263)	(16.287)	*Unamortized transaction cost*
Jumlah	1.775.877	2.475.792	*Total*

Biaya perolehan diamortisasi atas pinjaman yang diperoleh adalah sebagai berikut:

The amortized cost of the loans are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Pinjaman dan lembaga keuangan - jangka panjang	1.775.877	2.475.792	*Bank and financial institution loans - long-term*
Biaya bunga masih harus dibayar	1.606	3.118	*Accrued interest expenses*
Jumlah	1.777.483	2.478.910	*Total*

Bank Mayapada

Infokom

Pada tanggal 21 Februari 2022, Infokom telah memperoleh fasilitas Pinjaman Tetap Angsuran (PTA LINE) dari Bank Mayapada sebesar Rp50.000 juta, jangka waktu 60 bulan, dengan tingkat bunga 10% per tahun, dan tidak terdapat batasan-batasan keuangan tertentu. Perjanjian tersebut dijamin dengan aset tetap berupa mesin-mesin.

MVN

Pada bulan November 2021, MVN menandatangani fasilitas pinjaman kredit sebesar Rp200.000 juta dengan PT Bank Mayapada Internasional Tbk (Bank Mayapada). Atas fasilitas ini dikenakan bunga 12% per tahun. Pinjaman ini mempunyai jangka waktu 5 tahun dari awal penarikan fasilitas/pinjaman pertama kali, dan tidak terdapat batasan-batasan keuangan tertentu.

Bank Mayapada

Infokom

On February 21, 2022, Infokom, has obtained a Fixed Installment Loan facility (PTA LINE) from Bank Mayapada amounting to Rp50,000 million, with a term of 60 months, with an interest rate of 10% per annum, and there are no particular financial covenants. The agreement is secured by machineries of fixed assets..

MVN

In November 2021 MVN signed an investment credit loan facility agreement of Rp200,000 million with PT Bank Mayapada Internasional Tbk (Bank Mayapada). This facility bears interest of 12% p.a with a loan term of 5 years from the date agreement is signed, and there are no particular financial covenants.

MSIN

Pada tanggal 8 April 2021, MSIN, melalui entitas anak telah memperoleh fasilitas Pinjaman Tetap Angsuran (PTA LINE) dari Bank Mayapada sebesar Rp200.000 juta, jangka waktu 120 bulan, dengan tingkat bunga 12% per tahun serta grace period selama 30 bulan ("Perjanjian"), dan tidak terdapat batasan-batasan keuangan tertentu. Perjanjian tersebut dijamin dengan tanah berupa Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh entitas anak.

MSIN

On April 8, 2021, MSIN, through a subsidiary, has obtained a Fixed Installment Loan facility (PTA LINE) from Bank Mayapada amounting to Rp200,000 million, with a term of 120 months, with an interest rate of 12% per annum and a grace period of 30 months ("Agreement"), and there are no particular financial covenants. The agreement is secured by land rights owned by the subsidiary.

Pinjaman Sindikasi

Pada tanggal 13 September 2024, RCTI, entitas anak menandatangani perjanjian pinjaman sindikasi dengan (i) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebagai mandated lead arrangers; (ii) PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Kalteng, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT Bank MNC Internasional Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebagai para kreditur sebesar Rp 365.000 juta. Jangka waktu fasilitas pinjaman adalah 36 bulan. Suku bunga pinjaman per tahun adalah 10%. Pinjaman ini dijamin dengan tanah beserta bangunan gedung, tagihan dan persediaan, serta jaminan MNC.

Syndicated Loan

On September 13, 2024, RCTI, a subsidiary, have entered into a syndicated loan agreement amongs (i) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk as mandated lead arrangers; (ii) PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Kalteng, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT Bank MNC Internasional Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk as creditors Rp 365,000 million. The term of the loan facility is 36 months. Interest rate per annum is 10%. The loan is secured by land and building, trade receivable and inventory, and corporate guarantee of MNC.

Rincian pemberi pinjaman sebagai berikut:

Details of original lenders as follows:

Pemberi pinjaman/*Lender*	31 Desember/ *December 31,* 2024
PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	68.474
PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara	68.474
PT Bank Kalteng	65.050
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	51.355
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	32.083
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	30.813
PT Bank MNC Internasional Tbk	18.334
Jumlah/*Total*	334.583

Sehubungan dengan pinjaman tersebut, RCTI diwajibkan mempertahankan rasio keuangan dan memenuhi batasan-batasan tertentu sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian Pinjaman. Pada tanggal 31 Desember 2024, RCTI telah memenuhi rasio keuangan dan batasan-batasan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Induk berikut perubahannya.

In connection with the loan, RCTI is required to maintain financial ratios and comply with certain covenants as stipulated in the Loan Agreement. As of December 31, 2024, RCTI has complied with the financial ratios and covenants as set forth in the Master Agreement and its amendments.

Bank BJB

MVN

Pada Desember 2020, MVN menandatangani fasilitas pinjaman kredit sebesar Rp250.000 juta dengan Bank BJB (BJB). Atas fasilitas ini dikenakan bunga 11% p.a. Pinjaman ini mempunyai jangka waktu 5 tahun dari awal penarikan fasilitas/pinjaman pertama kali.

Bank BJB

MVN

On December 2020, MVN signed an investment credit loan facility agreement of Rp250,000 million with Bank BJB (BJB). This facility bears interest of 11% p.a with a loan term of 5 years from the date agreement is signed.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, saldo rekening yang dibatasi penggunaannya adalah sebesar Rp14.750 juta yang tercatat di dalam akun "bank yang dibatasi penggunaannya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 5).

The balance of such interest fund as of December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp14,750 million and is shown in the account of "restricted cash in banks" in the consolidated statements of financial position (Note 5).

Pada tahun 2024, MVN membayar pinjaman kredit investasi sebesar Rp50.000 juta.

In 2024, MVN has paid investment credit loan facility amounted to Rp50,000 million.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, MVN telah mematuhi rasio keuangan dan batasan-batasan sebagaimana tercantum dalam perjanjian pinjaman, yaitu rasio lancar lebih besar dari satu kali dan *debt service coverage ratio* tidak kurang dari satu kali.

On December 31, 2024 and 2023, MVN has complied with the financial ratios and covenants as stated in the loan agreement, such as current ratio is bigger than one time and debt service coverage ratio is no less than one time.

RCTI

RCTI

Pada tanggal 7 September 2023, RCTI menandatangani adendum perjanjian kredit senilai Rp150,000 juta yang mengubah jangka waktu kredit menjadi 48 (empat puluh delapan) bulan dan tambahan fasilitas kredit sebesar Rp150.000 juta, dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal penandatanganan adendum perjanjian kredit atau fasilitas kredit dinyatakan lunas oleh Bank . Atas fasilitas ini dikenakan bunga 11% p.a.

On September 7, 2023, RCTI signed addendum of credit loan agreement amounted to Rp150,000 million which amended loan term to 48 (fourty eight) months and an additional facility of Rp150,000 million, valid for 48 (fourty eight) months from the date of agreement starts or the credit facility is declared fully paid by the Bank. This facility bears interest of 11% p.a.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, RCTI telah mematuhi rasio keuangan dan batasan-batasan sebagaimana tercantum dalam perjanjian pinjaman, yaitu rasio lancar lebih besar dari 1,5 kali *debt-to-equity ratio* kurang dari 1 kali dan *debt service coverage ratio* tidak kurang dari 1 kali.

On December 31, 2024 and 2023, RCTI has complied with the financial ratios and covenants as stated in the loan agreement, such as current ratio is bigger than 1.5 times, debt-to-equity ratio less than 1 time and debt service coverage ratio is no less than one time.

China Development Bank

China Development Bank

Pada tanggal 10 Juli 2014, MKM telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dalam kaitannya dengan proyek jaringan serat optic ZTE dan Huawei Tech Investment di Indonesia, dengan China Development Bank (sebagai Pemberi Pinjaman) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (sebagai Security Agent) serta Perusahaan (sebagai Penjamin) dan akan jatuh tempo pada bulan Oktober 2027.

On July 10, 2014, MKM has signed a loan facility agreement in relation to the optical fiber network project of ZTE and Huawei Tech Investment in Indonesia with China Development Bank (as the Lender) and PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (as the Security Agent) and the Company (as the Guarantor) and will be mature on October 2027.

Pada tanggal 17 November 2017, MKM telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman, dalam kaitannya dengan proyek jaringan serat optik ZTE dan Huawei Tech Investment di Indonesia, dengan China Development Bank (sebagai Pemberi Pinjaman, Arranger, Facility Agent) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (sebagai Security Agent). Dalam hal ini, Perusahaan bertindak sebagai penjamin.

On November 17, 2017, MKM has signed a loan facility agreements in relation to the optical fiber Network Project of ZTE and Huawei Tech Investment in Indonesia, with China Development Bank (as the Lender, Arranger, and Facility Agent) and PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (as the Security Agent). In this matter, the Company act as the guarantor.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, MKM telah mematuhi rasio keuangan dan batasan-batasan sebagaimana tercantum dalam perjanjian pinjaman, yaitu rasio lancar lebih besar dari satu kali, *debt-to-equity ratio* kurang dari tiga kali dan *debt service coverage ratio* lebih besar dari 1,25 kali.

On December 31, 2024 and 2023, MKM has complied with the financial ratios and covenants as stated in the loan agreement, such as current ratio no less than one time, debt-to-equity ratio no more than three times and debt service coverage ratio is higher than 1.25 times.

Investment Opportunities V Pte. Limited

Pada tahun 2019, MNCSV menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dengan Investment Opportunities V Pte. Limited dimana MNCSV memperoleh fasilitas pinjaman sebesar US$ 55 juta. Tingkat suku bunga untuk pinjaman ini adalah 8% per tahun yang dibayarkan setiap bulan.

Sampai pada bulan Desember 2024, MNCSV telah melunasi sebagian pinjaman sebesar US$ 45,05 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, saldo rekening yang dibatasi penggunaannya adalah masing-masing sebesar Rp27.784 juta dan Rp29.676 juta yang tercatat di dalam akun "bank yang dibatasi penggunaannya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 5).

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, MNCSV telah mematuhi rasio keuangan dan batasan-batasan sebagaimana tercantum dalam perjanjian pinjaman, yaitu rasio *leverage* kurang dari 3,5 kali. Dan pinjaman ini bersifat *roll-over* dapat diperpanjang.

Investment Opportunities V Pte. Limited

In 2019, MNCSV entered into a loan facility agreement with Investment Opportunities V Pte. Limited where the entity obtained a loan facility of US$ 55 million. The interest rate for this loan is 8% per year, paid monthly.

Until December 2024, MNCSV has paid the loan partially amounted to US$ 45.05 million.

The balance of such interest fund as of December 31, 2024 and 2023, is Rp27,784 million and Rp29,676 million, respectively, is shown in the account of "restricted cash in banks" in the consolidated statements of financial position (Note 5).

On December 31, 2024 and 2023, MNCSV has complied with the financial ratios and covenants as stated in the loan agreement, such as leverage ratio is less than 3.5 times. And this loan is roll-over renewable.

Deutsche Bank

BMTR Media Limited (BML)

Pada tanggal 4 Juni 2021, BML, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit dari Deutshe Bank AG, Singapore Branch sebesar US$ 35 juta dengan tingkat bunga Libor 3 bulan + 4,5% per annum dan jatuh tempo pada tanggal 24 Agustus 2022. BML telah melunasi pinjaman ini.

Pada tanggal 22 Agustus 2022, BML, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit dari Deutshe Bank AG, Singapore Branch sebesar US$ 50 juta dengan tingkat bunga SOFR 3 bulan + 5,35% per annum dengan jangka waktu 24 bulan, dan tidak terdapat batasan-batasan keuangan tertentu. Biaya perolehan belum diamortisasi termasuk dalam nilai tercatat pinjaman serta diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 26 Agustus 2024, BML telah melunasi fasilitas kredit dari Deutshe Bank AG, Singapore Branch sebesar US$ 27,5 juta atau setara dengan Rp424.325 juta.

BMTR Digital Limited (BDL)

Pada tanggal 27 Desember 2022, BDL, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit dari Deutshe Bank AG, Singapore Branch sebesar US$ 40 juta dengan tingkat bunga SOFR 3 bulan + 5,35% per annum dengan jangka waktu 24 bulan dan telah diperpanjang hingga 30 Juni 2025, dan tidak terdapat batasan-batasan keuangan tertentu. Biaya perolehan belum diamortisasi termasuk dalam nilai tercatat pinjaman serta diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Saldo pinjaman atas fasilitas pinjaman Deutsche Bank adalah US$ 9.625.000 (setara dengan Rp142.157 juta) pada 31 Desember 2024.

Deutsche Bank

BMTR Media Limited (BML)

On June 4, 2021, BML, a subsidiary, obtained credit facility from Deutshe Bank AG, Singapore Branch amounting to US$ 35 million with interest rate of Libor 3 months + 4.5% per annum and will be mature on August 24, 2022. BML has settled the loan.

On August 22, 2022, BML, a subsidiary, obtained credit facility from Deutshe Bank AG, Singapore Branch amounting to US$ 50 million with interest rate of SOFR 3 months +5.35% per annum with a term of 24 months, and there are no particular financial covenants. The unamortized transaction are include included in the carrying amount of the credit facility, which is amortized using the effective interest method.

On August 26, 2024, BML has settled credit facility from Deutshe Bank AG, Singapore Branch amounted to US$ 27.5 million, equivalent to Rp424,325 million.

BMTR Digital Limited (BDL)

On December 27, 2022, BDL, a subsidiary, obtained credit facility from Deutshe Bank AG, Singapore Branch amounting to US$ 40 million with interest rate of SOFR 3 months +5.35% per annum with a term of 24 months and has been extended until June 30, 2025, and there are no particular financial covenants. The unamortized transaction are include included in the carrying amount of the credit facility, which is amortized using the effective interest method. Oustanding loan facilities for Deutcshe Bank amounted to US$ 9,625,000 (equivalent to Rp142,157 million) as of December 31, 2024.

Bank JTrust Indonesia

Pada tanggal 29 Maret 2022, Infokom menandatangani perjanjan fasilitas pinjaman kredit investasi sebesar Rp90.000 juta dengan PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Bunga yang dikenakan sebesar 10,50% p.a. dan jangka waktu pinjaman 8 tahun dari tanggal ditandatangani fasilitas kredit, dan tidak terdapat batasan-batasan keuangan tertentu. Fasilitas pinjaman dijamin dengan surat jaminan fidusia dengan obyek jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan.

Pada tanggal 29 September 2022, Infokom menandatangani perjanjan fasilitas pinjaman kredit investasi sebesar Rp90.000 juta dan fasilitas pinjaman kredit rekening koran sebesar Rp10.000 juta dengan PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Bunga yang dikenakan sebesar 10,50% p.a. dan jangka waktu pinjaman 8 tahun dari tanggal ditandatangani fasilitas kredit, dan tidak terdapat batasan-batasan keuangan tertentu. Fasilitas pinjaman dijamin dengan surat jaminan fidusia dengan obyek jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan.

Bank JTrust Indonesia

On March 29, 2022, Infokom entered into investmentt loan facility agreement amounting to Rp90,000 million, with PT Bank JTrust Indonesia Tbk. The loan bears interest 10.50% p.a. with loan term of 8 year from the date of the credit facility was signed, and there are no particular financial covenants. The loan facilities is secured with fiduciary guarantee with collateral in the form of Building Use Rights.

On September 29, 2022, Infokom entered into investmentt loan facility agreement amounting to Rp90,000 million and checking account credit facility amounting to Rp10,000 million, with PT Bank JTrust Indonesia Tbk. The loan bears interest 10.50% p.a. with loan term of 8 year from the date of the credit facility was signed, and there are no particular financial covenants. The loan facilities is secured with fiduciary guarantee with collateral in the form of Building Use Rights.

Marymount Road Limited

Pada tanggal 4 November 2016, GMI menandatangani perjanjan fasilitas pinjaman sebesar US$ 30 juta dengan Marymount Road Limited (MRL) dengan bunga 1,5% per 90 hari. Pada tanggal 16 Januari 2020, perjanjian fasilitas pinjaman telah di amandemen dan telah diperpanjang. Fasilitas pinjaman di atas dijamin saham entitas anak.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, GMI telah mematuhi rasio keuangan dan batasan-batasan sebagaimana tercantum dalam perjanjian pinjaman, yaitu rasio utang terhadap modal kurang dari dua kali dan rasio EBITDA terhadap beban bunga lebih besar dari empat kali.

Marymount Road Limited

On November 4, 2016, GMI entered into a loan facility of US$ 30 million with Marymount Road Limited (MRL) bear interest at 1.5% per 90 days. On January 16, 2020, the loan facility agreement has been amended and extended. Such loan facilities are secured with subsidiariy's shares.

On December 31, 2024 and 2023, GMI has complied with the financial ratios and covenants as stated in the loan agreement, such as debt-to-equity ratio is less than two times and EBITDA to interest expense ratio is bigger than four times.

Bank Victoria

Pada tanggal 8 Desember 2021, MSIN, memperoleh tambahan fasilitas kredit modal kerja dari Bank Victoria sebesar Rp50.000 juta, jangka waktu 60 bulan, dengan tingkat bunga 10% per tahun ("Perjanjian"), dan tidak terdapat batasan-batasan keuangan tertentu. Perjanjian tersebut dijamin dengan fidusia tagihan dan persediaan yang dimiliki oleh entitas anak.

Bank Victoria

On December 8, 2021, MSIN has obtained an additional working capital credit facility from Bank Victoria amounting to Rp50,000 million, with a term of 60 months, with an interest rate of 10% per annum (the "Agreement"), and there are no particular financial covenants. The agreement is secured by fiduciary receivables and inventories owned by the subsidiary.

Bank Central Asia

MKM

Pada tanggal 21 Desember 2018, MKM menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman kredit investasi sebesar Rp50.000 juta.

Pada tahun 2024, MKM membayar pinjaman kredit investasi sebesar Rp392 juta.

Bank Central Asia

MKM

On December 21, 2018, MKM signed an investment credit loan facility agreement of Rp50,000 million.

In 2024, MKM has paid investment credit loan amounted to Rp392 million.

DVN

Pada tanggal 14 Juli 2022, DVN memperoleh fasilitas pinjaman dari BCA sebesar Rp17.000 juta, jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal dimulai perjanjian, dengan tingkat bunga 9,25% per tahun.

Pada tanggal 15 Agustus 2023, DVN memperoleh tambahan fasilitas pinjaman sebesar Rp6.000 juta dari BCA. Jangka waktu perjanjian kredit ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal dimulai perjanjian dengan tingkat bunga 8,25% untuk 2 tahun dan pengenaan bunga mengambang pada tahun berikutnya.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup telah mematuhi rasio keuangan dan batasan-batasan sebagaimana tercantum dalam perjanjian pinjaman, yaitu rasio *debt to equity* lebih besar dari empat kali dan *EBITDA to interest* lebih besar dari satu kali.

Shinhan Investment Corp.

Pada tanggal 24 Oktober 2020, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar US$ 20 juta dari Shinhan Investment Corp. (SHIC), dengan tingkat bunga sebesar LIBOR 3 bulan + 2,1% p.a yang akan jatuh tempo dalam 2 tahun dari tanggal utilisasi. Pada tanggal 26 Oktober 2022, Perusahaan melunasi pinjaman dari SIHC sebesar US$ 14.340.774 atau setara dengan Rp223.573 juta.

Pada tanggal 24 Oktober 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar US$ 10 juta dari Shinhan Investment Corp. (SHIC), dengan tingkat bunga sebesar SOFR 3 bulan + 2,85% p.a yang akan jatuh tempo dalam 2 tahun dari tanggal utilisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah mematuhi rasio keuangan dan batasan-batasan sebagaimana tercantum dalam perjanjian pinjaman, yaitu *debt-to-EBITDA ratio* tidak lebih dari tiga kali.

Pada tanggal 24 Oktober 2024, Perusahaan telah melunasi fasilitas pinjaman sebesar US$ 10 juta dari Shinhan Investment Corp. (SHIC) (Catatan 56).

Bank Rakyat Indonesia

Pada tanggal 20 Desember 2013, MNC memperoleh fasilitas Kredit Investasi (KI) dari Bank Rakyat Indonesia dengan jumlah maksimum sebesar Rp337.000 juta yang terdiri dari Kredit Investasi Pokok sebesar Rp315.000 juta dan Kredit Investasi IDC sebesar Rp22.000 juta dengan tingkat bunga tahun 2017 sebesar 11,5% per tahun dan jangka waktu utang sampai dengan bulan Desember 2024, dan tidak terdapat batasan-batasan keuangan tertentu. Pembayaran pokok pinjaman setiap 3 bulan dan telah diubah dimulai pada bulan Maret 2016 dengan jumlah angsuran tertentu. Pada tanggal 5 November 2020, Perusahaan melakukan kesepakatan restrukturisasi kredit yaitu penundaan pembayaran pokok periode September 2020 sampai dengan Juni 2021 dan memperpanjang waktu kredit selama satu tahun untuk fasilitas KI dan KI IDC.

DVN

On July 14, 2022, DVN obtained a loan facility from BCA with maximum amount of Rp 17,000 million, for 5 (five) years from the date of the agreement, with interest rate at 9.25% per annum.

On August 15, 2023, DVN entered into top up a loan facility agreement with BCA amounted to Rp6,000 million with a loan term of 5 (five) years from the date the agreement was signed, with interest rate at 8.25% for 2 years and imposition of floating interest in the following years.

On December 31, 2024 and 2023, the Group has complied with the financial ratios and covenants as stated in the loan agreement, such as debt to equity ratio is bigger than four times and EBITDA to interst ration is bigger than one time.

Shinhan Investment Corp.

On October 24, 2020, the Company obtained loan facility amounting to US$ 20 million from Shinhan Investment Corp. (SHIC), with interest rate at LIBOR 3 month + 2.1% p.a which will mature in 2 years from utilization date. On October 26, 2022, the Company has settled loan from SIHC amounted to US$ 14,340,774, equivalent to Rp223,573 million.

On October 24, 2022, the Company obtained loan facility amounting to US$ 10 million from Shinhan Investment Corp. (SHIC), with interest rate at SOFR 3 month + 2.85% p.a which will mature in 2 years from utilization date.

On December 31, 2024 and 2023, the Company has complied with the financial ratios and covenants as stated in the loan agreement, such as debt-to-EBITDA ratio no more than three times.

On October 24, 2024, the Company has settled the loan facility amounting to US$ 10 million from Shinhan Investment Corp. (SHIC) (Note 56).

Bank Rakyat Indonesia

On December 20, 2013, MNC obtained investment loan facility from Bank Rakyat Indonesia with a maximum credit limit amount of Rp337,000 million which consists of Principal Investment Loan of Rp315,000 million and IDC Investment Loan Facility of Rp22,000 million which bears interest rate in 2017 of 11.5% per annum and term of until December 2024, and there are no particular financial covenants. The principal amount is due every three months and has been changed starting in March 2016 with certain installments amounts. On November 5, 2020, the Company entered into a credit restructuring agreement involved postponing principal payments from September 2020 to June 2021 and extending the credit period by one year for the KI and KI IDC facilities.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan hak guna bangunan No. 601 dan No. 867 seluas 5.837 m^2 berlokasi di Kelurahan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

This loan facility is secured by land rights No. 601 and No. 867 with total area of 5,837 square meters located in Kebon Sirih, Central Jakarta.

Pada tahun 2024, MNC membayar pinjaman kredit investasi sebesar Rp29.530 juta.

In 2024, MNC has paid investment loan amounted to Rp29,530 million.

30. UTANG OBLIGASI / *30. BONDS PAYABLE*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Obligasi Berkelanjutan I			***Sustainable Bonds I***
Nilai nominal - Tahap 1			*Nominal value - Stage 1*
Seri C	-	38.900	*C Series*
Obligasi Berkelanjutan II			***Sustainable Bonds II***
Nilai nominal - Tahap 1			*Nominal value - Stage 1*
Seri C	1.075	1.075	*C Series*
Nilai nominal - Tahap 2			*Nominal value - Stage 2*
Seri B	-	20.405	*B Series*
Seri C	10.555	10.555	*C Series*
Obligasi Berkelanjutan III			***Sustainable Bonds III***
Nilai nominal - Tahap 1			*Nominal value - Stage 1*
Seri B	217.825	217.825	*B Series*
Seri C	169.505	169.505	*C Series*
Nilai nominal - Tahap 2			*Nominal value - Stage 2*
Seri B	139.160	139.160	*B Series*
Seri C	36.695	36.695	*C Series*
Obligasi Berkelanjutan IV			***Sustainable Bonds IV***
Nilai nominal - Tahap 1			*Nominal value - Stage 1*
Seri A	-	597.410	*A Series*
Seri B	230.260	230.260	*B Series*
Seri C	22.330	22.330	*C Series*
Nilai nominal - Tahap 2			*Nominal value - Stage 2*
Seri A	300.235	-	*A Series*
Seri B	217.510	-	*B Series*
Seri C	132.255	-	*C Series*
Biaya transaksi belum diamortisasi	(7.047)	(8.288)	*Unamortized issuance cost*
Subjumlah	1.470.358	1.475.832	*Subtotal*
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(656.819)	(658.368)	*Less current maturities*
Jumlah bagian jangka panjang	813.539	817.464	*Total non-current*

Obligasi Dengan Tingkat Bunga Tetap / ***Bonds With Fixed Interest Rate***

Obligasi Berkelanjutan I / *Sustainable Bonds I*

Perusahaan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom I Tahap 1 Tahun 2017 sebesar Rp850.000 juta dengan tingkat bunga tetap yang terdiri dari 3 seri, yaitu Seri A yang jatuh tempo pada 7 Juli 2022 (5 tahun) dengan tingkat bunga 11,5% dan Seri B yang jatuh tempo pada 7 Juli 2023 (6 tahun) dengan tingkat bunga 11,75% dan Seri C yang jatuh tempo pada 7 Juli 2024 (7 tahun) dengan tingkat bunga 12%, serta Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom I Tahap 2 sebesar Rp250.000 juta dengan tingkat bunga tetap 11,0% yang jatuh tempo pada 19 September 2020 (3 tahun).

The Company offered Sustainable Public Offering Global Mediacom Sustainable Bonds I Stage 1 Year 2017 amounting Rp850,000 million with Fixed Interest Rate consisting of 3 series, A Series due on July 7, 2022 (5 years) with an interest rate of 11.5% per annum and B Series due on July 7, 2023 (6 years) with an interest rate of 11.75% per annum and C Series due on July 7, 2024 (7 years) with an interest rate of 12% per annum, and Global Mediacom Sustainable Bonds I Stage 2 Year 2017 amounting Rp250,000 million due on September 19, 2020 (3 years) with Fixed Interest Rate of 11.0%.

Obligasi ditawarkan 100% dari nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Obligasi dijamin dengan saham entitas anak yang dimiliki Perusahaan dengan nilai 125% dari jumlah yang terutang atas jumlah pokok Obligasi.

The bonds was offered at 100% of the nominal value and listed on the Indonesia Stock Exchange. The bonds is secured by the subsidiary's shares owned by the Company with a value of 125% of the amount payable on the principal amount.

Sehubungan dengan penerbitan obligasi, Perusahaan harus memenuhi rasio keuangan dan persyaratan tertentu yang tercantum dalam propektus. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah mematuhi persyaratan-persyaratan tersebut.

In connection with the issuance of bonds, the Company shall fulfill financial ratio and certain requirement which was stated in the prospectus. As of December 31, 2024 and 2023, the Company has complied with the requirements.

Biaya perolehan belum diamortisasi termasuk dalam nilai tercatat obligasi serta diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

The unamortized transaction are include included in the carrying amount of the bonds, which is amortized using the effective interest method.

Pada tanggal 6 Juli 2022, Perusahaan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom I Tahap 1 Tahun 2017 Seri A sebesar Rp804.800 juta.

On July 6, 2022, the Company has paid Global Mediacom Sustainable Bonds I Stage 1 Year 2017 A Series amounting to Rp804,800 million.

Pada tanggal 24 Maret 2023, hasil pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak ketiga, Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom I Tahap 1 Tahun 2017 mempunyai rating idA+ (*Single A Plus*) dan telah diperpanjang pada tanggal 15 Maret 2024.

On March 24, 2023, the rating result from PT Pemeringkat Efek Indonesia, third party, Global Mediacom Sustainable Bonds I Stage 1 Year 2017 rating is idA+ (Single A Plus) and has been extended on March 15, 2024.

Pada tanggal 7 Juli 2023, Perusahaan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom I Tahap 1 Tahun 2017 Seri B sebesar Rp6.300 juta.

On July 7, 2023, the Company has paid Global Mediacom Sustainable Bonds I Stage 1 Year 2017 B Series amounting to Rp6,300 million.

Pada tanggal 7 Juli 2024, Perusahaan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom I Tahap 1 Tahun 2017 Seri C sebesar Rp38.900 juta.

On July 7, 2024, the Company has paid Global Mediacom Sustainable Bonds I Stage 1 Year 2017 C Series amounting to Rp38,900 million.

Obligasi Berkelanjutan II

Sustainable Bonds II

a. Tahap 1

a. Stage 1

Perusahaan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom II Tahap 1 Tahun 2020 sebesar Rp700.000 juta dengan tingkat bunga tetap yang terdiri dari 3 seri, yaitu Seri A yang jatuh tempo pada 21 September 2021 (370 hari) dengan tingkat bunga 10,75%, Seri B yang jatuh tempo pada 11 September 2023 (3 tahun) dengan tingkat bunga 11,25% dan Seri C yang jatuh tempo pada 11 September 2025 (5 tahun) dengan tingkat bunga 12%. Jumlah biaya transaksi Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom II Tahap 1 Tahun 2020 sebesar Rp5.197 juta diamortisasi setiap bulan sampai dengan jatuh tempo.

The Company offered Sustainable Public Offering Global Mediacom Sustainable Bonds II Stage 1 Year 2020 amounting Rp700,000 million with Fixed Interest Rate consisting of 3 series, A Series due on September 21, 2021 (370 days) with an interest rate of 10.75% per annum, B Series due on September 11, 2023 (3 years) with an interest rate of 11.25% per annum and C Series due on September 11, 2025 (5 years) with an interest rate of 12% per annum. Total transaction cost of Global Mediacom Sustainable Bonds II Stage 1 Year 2020 amounting to Rp5,197 million amortized every month until the maturity date.

Obligasi ditawarkan 100% dari nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Obligasi dijamin dengan saham entitas anak yang dimiliki Perusahaan dengan nilai 125% dari jumlah yang terutang atas jumlah pokok Obligasi.

The bonds was offered at 100% of the nominal value and listed on the Indonesia Stock Exchange. The bonds is secured by the subsidiary's shares owned by the Company with a value of 125% of the amount payable on the principal amount.

Sehubungan dengan penerbitan obligasi, Perusahaan harus memenuhi rasio keuangan dan persyaratan tertentu yang tercantum dalam propektus. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah mematuhi persyaratan-persyaratan tersebut.

In connection with the issuance of bonds, the Company shall fulfill financial ratio and certain requirement which was stated in the prospectus. As of December 31, 2024 and 2023, the Company has complied with the requirements.

Biaya perolehan belum diamortisasi termasuk dalam nilai tercatat obligasi serta diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

The unamortized transaction are include included in the carrying amount of the bonds, which is amortized using the effective interest method.

Pada tanggal 24 Maret 2023, hasil pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak ketiga, Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom II Tahap 1 Tahun 2020 mempunyai rating idA+ (*Single A Plus*) dan telah diperpanjang pada tanggal 4 Maret 2025 (Catatan 56).

On March 24, 2023, the rating result from PT Pemeringkat Efek Indonesia, third party, Global Mediacom Sustainable Bonds II Stage 1 Year 2020 rating is idA+ (Single A Plus) and has been extended on March 4, 2025 (Note 56).

Pada tanggal 11 September 2023, Perusahaan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom II Tahap 1 Tahun 2020 Seri B sebesar Rp367.500 juta.

On September 11, 2023, the Company has paid Global Mediacom Sustainable Bonds II Stage 1 Year 2020 B Series amounting to Rp367,500 million.

b. Tahap 2

b. Stage 2

Perusahaan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom II Tahap 2 Tahun 2021 sebesar Rp700.000 juta dengan tingkat bunga tetap yang terdiri dari 3 seri, yaitu Seri A yang jatuh tempo pada 24 September 2022 (370 hari) dengan tingkat bunga 9,40%, Seri B yang jatuh tempo pada 14 September 2024 (3 tahun) dengan tingkat bunga 10,30% dan Seri C yang jatuh tempo pada 14 September 2026 (5 tahun) dengan tingkat bunga 11%. Jumlah biaya transaksi Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom II Tahap 2 Tahun 2021 sebesar Rp3.780 juta diamortisasi setiap bulan sampai dengan jatuh tempo.

The Company offered Sustainable Public Offering Global Mediacom Sustainable Bonds II Stage 2 Year 2021 amounting Rp700,000 million with Fixed Interest Rate consisting of 3 series, A Series due on September 24, 2022 (370 days) with an interest rate of 9.40% per annum, B Series due on September 14, 2024 (3 years) with an interest rate of 10.30% per annum and C Series due on September 14, 2026 (5 years) with an interest rate of 11% per annum. Total transasction cost of Global Mediacom Sustainable Bonds II Stage 2 Year 2021 amounting to Rp3,780 million amortized every month until the maturity date.

Obligasi ditawarkan 100% dari nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Obligasi dijamin dengan saham entitas anak yang dimiliki Perusahaan dengan nilai 125% dari jumlah yang terutang atas jumlah pokok Obligasi.

The bonds was offered at 100% of the nominal value and listed on the Indonesia Stock Exchange. The bonds is secured by the subsidiary's shares owned by the Company with a value of 125% of the amount payable on the principal amount.

Sehubungan dengan penerbitan obligasi, Perusahaan harus memenuhi rasio keuangan dan persyaratan tertentu yang tercantum dalam propektus. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah mematuhi persyaratan-persyaratan tersebut.

In connection with the issuance of bonds, the Company shall fulfill financial ratio and certain requirement which was stated in the prospectus. As of December 31, 2024 and 2023, the Company has complied with the requirements.

Biaya perolehan belum diamortisasi termasuk dalam nilai tercatat obligasi serta diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

The unamortized transaction are include included in the carrying amount of the bonds, which is amortized using the effective interest method.

Pada tanggal 23 September 2022, Perusahaan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom II Tahap 2 Tahun 2021 Seri A sebesar Rp669.040 juta.

On September 23, 2022, the Company has paid Global Mediacom Sustainable Bonds II Stage 2 Year 2021 A Series amounting to Rp669,040 million.

Pada tanggal 24 Maret 2023, hasil pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak ketiga, Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom II Tahap 2 Tahun 2021 mempunyai rating idA+ (*Single A Plus*) dan telah diperpanjang pada tanggal 4 Maret 2025 (Catatan 56).

On March 24, 2023, the rating result from PT Pemeringkat Efek Indonesia, third party, Global Mediacom Sustainable Bonds II Stage 2 Year 2021 rating is idA+ (Single A Plus) and has been extended on March 4, 2025 (Note 56).

Pada tanggal 14 September 2024, Perusahaan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom II Tahap 2 Tahun 2021 Seri B sebesar Rp20.405 juta.

On September 14, 2024, the Company has paid Global Mediacom Sustainable Bonds II Stage 2 Year 2021 B Series amounting to Rp20,405 million.

Obligasi Berkelanjutan III

a. Tahap 1

Perusahaan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom III Tahap 1 Tahun 2022 sebesar Rp700.000 juta dengan tingkat bunga tetap yang terdiri dari 3 seri, yaitu Seri A yang jatuh tempo pada 10 Juli 2023 (370 hari) dengan tingkat bunga 8,5%, Seri B yang jatuh tempo pada 5 Juli 2025 (3 tahun) dengan tingkat bunga 10% dan Seri C yang jatuh tempo pada 5 Juli 2027 (5 tahun) dengan tingkat bunga 11%. Jumlah biaya transaksi Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom III Tahap 1 Tahun 2022 sebesar Rp5.413 juta diamortisasi setiap bulan sampai dengan jatuh tempo.

Obligasi ditawarkan 100% dari nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Obligasi dijamin dengan saham entitas anak yang dimiliki Perusahaan dengan nilai 125% dari jumlah yang terutang atas jumlah pokok Obligasi.

Sehubungan dengan penerbitan obligasi, Perusahaan harus memenuhi rasio keuangan dan persyaratan tertentu yang tercantum dalam propektus. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah mematuhi persyaratan-persyaratan tersebut.

Biaya perolehan belum diamortisasi termasuk dalam nilai tercatat obligasi serta diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 24 Maret 2023, hasil pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak ketiga, Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom III Tahap 1 Tahun 2022 mempunyai rating $_{id}$A+ (*Single A Plus*) dan telah diperpanjang pada tanggal 4 Maret 2025 (Catatan 56).

Pada tanggal 10 Juli 2023, Perusahaan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom III Tahap 1 Tahun 2022 Seri A sebesar Rp312.670 juta.

b. Tahap 2

Perusahaan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom III Tahap 2 Tahun 2022 sebesar Rp600.000 juta dengan tingkat bunga tetap terdiri dari 3 seri, yaitu Seri A yang jatuh tempo pada 21 September 2023 (370 hari) dengan tingkat bunga 8,25%, Seri B yang jatuh tempo pada 16 September 2025 (3 tahun) dengan tingkat bunga 10% dan Seri C yang jatuh tempo pada 16 September 2027 (5 tahun) dengan tingkat bunga 11%. Jumlah biaya transaksi Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom III Tahap 2 Tahun 2022 sebesar Rp4.020 juta diamortisasi setiap bulan sampai dengan jatuh tempo.

Sustainable Bonds III

a. Stage 1

The Company offered Sustainable Public Offering Global Mediacom Sustainable Bonds III Stage 1 Year 2022 amounting to Rp700,000 million with Fixed Interest Rate consisting of 3 series, A Series due on July 10, 2023 (370 days) with an interest rate of 8.5% per annum, B Series due on July 5, 2025 (3 years) with an interest rate of 10% per annum and C Series due on July 5, 2027 (5 years) with an interest rate of 11% per annum. Total transaction cost of Global Mediacom Sustainable Bonds III Stage 1 Year 2022 amounting to Rp5,413 million amortized every month until the maturity date.

The bonds was offered at 100% of the nominal value *and listed on the Indonesia Stock Exchange. The bonds is secured by the subsidiary's shares owned by the Company with a value of 125% of the amount payable on the principal amount.*

In connection with the issuance of bonds, the Company shall fulfill financial ratio and certain requirement which was stated in the prospectus. As of December 31, 2024 and 2023, the Company has complied with the requirements.

The unamortized transaction are include included in the carrying amount of the bonds, which is amortized using the effective interest method.

On March 24, 2023, the rating result from PT Pemeringkat Efek Indonesia, third party, Global Mediacom Sustainable Bonds III Stage 1 Year 2022 rating is $_{id}$A+ (Single A Plus) and has been extended on March 4, 2025 (Note 56).

On July 10, 2023, the Company has paid Global Mediacom Sustainable Bonds III Stage 1 Year 2022 A Series amounting to Rp312,670 million.

b. Stage 2

The Company offered Sustainable Public Offering Global Mediacom Sustainable Bonds III Stage 2 Year 2022 amounting to Rp600,000 million with Fixed Interest Rate consisting of 3 series, A Series due on September 21, 2023 (370 days) with an interest rate of 8.25% per annum, B Series due on September 16, 2025 (3 years) with an interest rate of 10% per annum and C Series due on September 16, 2027 (5 years) with an interest rate of 11% per annum. Total transaction cost of Global Mediacom Sustainable Bonds III Stage 2 Year 2022 amounting to Rp4,020 million amortized every month until the maturity date.

Obligasi ditawarkan 100% dari nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Obligasi dijamin dengan saham entitas anak yang dimiliki Perusahaan dengan nilai 125% dari jumlah yang terutang atas jumlah pokok Obligasi.

The bonds was offered at 100% of the nominal value *and listed on the Indonesia Stock Exchange. The bonds is secured by the subsidiary's shares owned by the Company with a value of 125% of the amount payable on the principal amount.*

Sehubungan dengan penerbitan obligasi, Perusahaan harus memenuhi rasio keuangan dan persyaratan tertentu yang tercantum dalam propektus. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah mematuhi persyaratan-persyaratan tersebut.

In connection with the issuance of bonds, the Company shall fulfill financial ratio and certain requirement which was stated in the prospectus. As of December 31, 2024 and 2023, the Company has complied with the requirements.

Biaya perolehan belum diamortisasi termasuk dalam nilai tercatat obligasi serta diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

The unamortized transaction are include included in the carrying amount of the bonds, which is amortized using the effective interest method.

Pada tanggal 24 Maret 2023, hasil pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak ketiga, Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom III Tahap 2 Tahun 2022 mempunyai rating idA+ (*Single A Plus*) dan telah diperpanjang pada tanggal 4 Maret 2025 (Catatan 56).

On March 24, 2023, the rating result from PT Pemeringkat Efek Indonesia, third party, Global Mediacom Sustainable Bonds III Stage 2 Year 2022 rating is idA+ (Single A Plus) and has been extended on March 4, 2025 (Note 56).

Pada tanggal 21 September 2023, Perusahaan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom III Tahap 2 Tahun 2022 Seri A sebesar Rp424.145 juta.

On September 21, 2023, the Company has paid Global Mediacom Sustainable Bonds III Stage 2 Year 2022 A Series amounting to Rp424,145 million.

Obligasi Berkelanjutan IV

Sustainable Bonds IV

a. Tahap 1

a. Stage 1

Perusahaan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom IV Tahap 1 Tahun 2023 sebesar Rp850.000 juta dengan tingkat bunga tetap terdiri dari 3 seri, yaitu Seri A yang jatuh tempo pada 16 Juli 2024 (370 hari) dengan tingkat bunga 9,25%, Seri B yang jatuh tempo pada 6 Juli 2026 (3 tahun) dengan tingkat bunga 10,25% dan Seri C sebesar yang jatuh tempo pada 6 Juli 2028 (5 tahun) dengan tingkat bunga 11,25%. Jumlah biaya transaksi Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom IV Tahap 1 Tahun 2023 sebesar Rp6.578 juta diamortisasi setiap bulan sampai dengan jatuh tempo.

The Company offered Sustainable Public Offering Global Mediacom Sustainable Bonds IV Stage 1 Year 2023 amounting to Rp850,000 million with Fixed Interest Rate consisting of 3 series, A Series due on July 16, 2024 (370 days) with an interest rate of 9.25% per annum, B Series due on July 6, 2026 (3 years) with an interest rate of 10.25% per annum and C Series due on July 6, 2028 (5 years) with an interest rate of 11.25% per annum. Total transaction cost of Global Mediacom Sustainable Bonds IV Stage 1 Year 2023 amounting to Rp6,578 million amortized every month until the maturity date.

Obligasi ditawarkan 100% dari nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Obligasi dijamin dengan saham entitas anak yang dimiliki Perusahaan dengan nilai 125% dari jumlah yang terutang atas jumlah pokok Obligasi.

The bonds was offered at 100% of the nominal value and listed on the Indonesia Stock Exchange. The bonds is secured by the subsidiary's shares owned by the Company with a value of 125% of the amount payable on the principal amount.

Sehubungan dengan penerbitan obligasi, Perusahaan harus memenuhi rasio keuangan dan persyaratan tertentu yang tercantum dalam propektus. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah mematuhi persyaratan-persyaratan tersebut.

In connection with the issuance of bonds, the Company shall fulfill financial ratio and certain requirement which was stated in the prospectus. As of December 31, 2024 and 2023, the Company has complied with the requirements.

Biaya perolehan belum diamortisasi termasuk dalam nilai tercatat obligasi serta diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

The unamortized transaction are include included in the carrying amount of the bonds, which is amortized using the effective interest method.

Pada tanggal 15 Maret 2024, hasil pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak ketiga, Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom IV Tahap 1 Tahun 2023 mempunyai rating idA+ (*Single A Plus*) dan telah diperpanjang pada tanggal 4 Maret 2025 (Catatan 56).

On March 15, 2024, the rating result from PT Pemeringkat Efek Indonesia, third party, Global Mediacom Sustainable Bonds IV Stage 1 Year 2023 rating is idA+ (Single A Plus) and has been extended on March 4, 2025 (Note 56).

Pada tanggal 16 Juli 2024, Perusahaan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom IV Tahap 1 Tahun 2023 Seri A sebesar Rp597.410 juta.

On July 16, 2024, the Company has paid Global Mediacom Sustainable Bonds IV Stage 1 Year 2023 A Series amounting to Rp597,410 million.

b. Tahap 2

b. Stage 2

Perusahaan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom IV Tahap 2 Tahun 2024 sebesar Rp650.000 juta dengan tingkat bunga tetap terdiri dari 3 seri, yaitu Seri A yang jatuh tempo pada 1 Juli 2025 (370 hari) dengan tingkat bunga 8,75%, Seri B yang jatuh tempo pada 21 Juni 2027 (3 tahun) dengan tingkat bunga 10,25% dan Seri C sebesar yang jatuh tempo pada 21 Juni 2029 (5 tahun) dengan tingkat bunga 11%. Jumlah biaya transaksi Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom IV Tahap 2 Tahun 2024 sebesar Rp4.419 juta diamortisasi setiap bulan sampai dengan jatuh tempo.

The Company offered Sustainable Public Offering Global Mediacom Sustainable Bonds IV Stage 2 Year 2024 amounting to Rp650,000 million with Fixed Interest Rate consisting of 3 series, A Series due on July 1, 2025 (370 days) with an interest rate of 8.75% per annum, B Series due on June 21, 2027 (3 years) with an interest rate of 10.25% per annum and C Series due on June 21, 2029 (5 years) with an interest rate of 11% per annum. Total transaction cost of Global Mediacom Sustainable Bonds IV Stage 2 Year 2024 amounting to Rp4,419 million amortized every month until the maturity date.

Obligasi ditawarkan 100% dari nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Obligasi dijamin dengan sebidang tanah dan bangunan beserta sarana pelengkap lainnya seluas 32.901 m^2 yang terletak di Kebon Jeruk, Jakarta dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya 100% dari jumlah yang terutang atas jumlah pokok Obligasi.

The bonds was offered at 100% of the nominal value and listed on the Indonesia Stock Exchange. The bonds is secured by a parcel of land and buildings including other complimentary facilities with covering area of 31,901 m^2 which located in Kebon Jeruk, Jakarta with a value of at least 100% of the amount payable on the principal amount.

Sehubungan dengan penerbitan obligasi, Perusahaan harus memenuhi rasio keuangan dan persyaratan tertentu yang tercantum dalam propektus. Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan telah mematuhi persyaratan-persyaratan tersebut.

In connection with the issuance of bonds, the Company shall fulfill financial ratio and certain requirement which was stated in the prospectus. As of December 31, 2024, the Company has complied with the requirements.

Biaya perolehan belum diamortisasi termasuk dalam nilai tercatat obligasi serta diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

The unamortized transaction are include included in the carrying amount of the bonds, which is amortized using the effective interest method.

Pada tanggal 4 Maret 2025, hasil pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak ketiga, Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom IV Tahap 2 Tahun 2024 mempunyai rating idA+ (*Single A Plus*) (Catatan 56).

On March 4, 2025, the rating result from PT Pemeringkat Efek Indonesia, third party, Global Mediacom Sustainable Bonds IV Stage 2 Year 2024 rating is idA+ (Single A Plus) (Note 56).

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah mematuhi rasio keuangan dan batasan-batasan yang tercantum dalam prospektus, yaitu rasio utang bersih terhadap modal tidak lebih dari empat kali dan rasio EBITDA terhadap beban bunga tidak kurang dari dua kali.

On December 31, 2024 and 2023, the Company has complied with the financial ratios and covenants as stated in the prospectus, such as net debt to equity ratio is not more than four times and EBITDA coverage ratio is not less than two times.

31. UTANG SUKUK IJARAH / *31. SUKUK IJARAH PAYABLE*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I			***Sustainable Sukuk Ijarah I***
Nilai nominal - Tahap 1			*Nominal value - Stage 1*
Seri C	-	22.950	*C Series*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II			**Sustainable Sukuk Ijarah II**
Nilai nominal - Tahap 1			*Nominal value - Stage 1*
Seri C	430	430	*C Series*
Nilai nominal - Tahap 2			*Nominal value - Stage 2*
Seri B	-	6.500	*B Series*
Seri C	50	50	*C Series*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III			**Sustainable Sukuk Ijarah III**
Nilai nominal - Tahap 1			*Nominal value - Stage 1*
Seri B	269.630	269.630	*B Series*
Seri C	10.210	10.210	*C Series*
Nilai nominal - Tahap 2			*Nominal value - Stage 2*
Seri B	96.600	96.600	*B Series*
Seri C	2.250	2.250	*C Series*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV			**Sustainable Sukuk Ijarah IV**
Nilai nominal - Tahap 1			*Nominal value - Stage 1*
Seri A	-	392.290	*A Series*
Seri B	442.360	442.360	*B Series*
Seri C	15.350	15.350	*C Series*
Nilai nominal - Tahap 2			*Nominal value - Stage 2*
Seri A	381.705	-	*A Series*
Seri B	267.130	-	*B Series*
Seri C	1.165	-	*C Series*
Biaya transaksi sukuk ijarah yang belum diamortisasi	(6.664)	(7.722)	*Unamortized sukuk ijarah issuance cost*
Subjumlah	1.480.216	1.250.898	*Subtotal*
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(746.633)	(423.605)	*Less current maturities*
Jumlah bagian jangka panjang	733.583	827.293	*Total non-current*

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I

Perusahaan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom I Tahap 1 Tahun 2017 sebesar Rp250.000 juta yang terdiri dari 3 seri, yaitu Seri A yang jatuh tempo pada 7 Juli 2022 (5 tahun) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp24.500 juta per tahun, Seri B yang jatuh tempo pada 7 Juli 2023 (6 tahun) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp1.645 juta per tahun dan Seri C yang jatuh tempo pada 7 Juli 2024 (7 tahun) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp2.754 juta per tahun, serta Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom I Tahap 2 Tahun 2017 sebesar Rp150.000 juta yang jatuh tempo pada 19 September 2020 (3 tahun) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp16.500 juta per tahun.

Sukuk ditawarkan 100% dari nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sukuk dijamin dengan saham entitas anak yang dimiliki Perusahaan dengan nilai 125% dari jumlah yang terutang atas jumlah pokok Sukuk.

Sustainable Sukuk Ijarah I

The Company offered Sustainable Public Offering Global Mediacom Sustainable Sukuk Ijarah I Stage 1 Year 2017 amounting Rp250,000 million consisting 3 series, as follows A Series due on July 7, 2022 (5 years) with Installment Ijarah amounting Rp24,500 million per annum, B Series due on July 7, 2023 (6 years) with Installment Ijarah amounting Rp1,645 million per annum and C Series due on July 7, 2024 (7 years) Installment Ijarah amounting Rp2,754 million, per annum and Global Mediacom Sustainable Sukuk Ijarah I Stage 2 Year 2017 amounting Rp150,000 million due on September 19, 2020 (3 years) with Installment Ijarah amounting Rp16,500 million per annum.

Sukuk were offered at 100% of the nominal value and listed on the Indonesia Stock Exchange. The sukuk are secured by the subsidiary's shares owned by the Company with a value of 125% of the amount payable on the principal amount.

Sehubungan dengan penerbitan sukuk ijarah, Perusahaan harus memenuhi rasio keuangan dan persyaratan tertentu yang tercantum dalam propektus. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah mematuhi persyaratan-persyaratan tersebut.

In connection with the issuance of sukuk ijarah, the Company shall fulfill financial ratio and certain requirement which was stated in the prospectus. As of December 31, 2024 and 2023, the Company has complied with the requirements.

Biaya perolehan belum diamortisasi termasuk dalam nilai tercatat sukuk serta diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

The unamortized transaction are include included in the carrying amount of sukuk, which is amortized using the effective interest method.

Pada tanggal 6 Juli 2022, Perusahaan telah melunasi seluruh Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom I Tahap 1 Tahun 2017 Seri A sebesar Rp213.050 juta.

On July 6, 2022, the Company has fully paid Global Mediacom Sustainable Sukuk Ijarah I Stage 1 A Series Year 2017 amounting Rp213,050 million.

Pada tanggal 24 Maret 2023, hasil pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak ketiga, Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom I Tahap 1 Tahun 2017 mempunyai rating $_{id}A+_{(sy)}$ (*Single A Plus Syariah*) dan telah diperpanjang pada tanggal 15 Maret 2024.

On March 24, 2023, the rating result from PT Pemeringkat Efek Indonesia, third party, Global Mediacom Sustainable Sukuk Ijarah I Stage 1 Year 2017 rating is $_{id}A+_{(sy)}$ (Single A Plus Syariah) and has been extended on March 15, 2024.

Pada tanggal 7 Juli 2023, Perusahaan telah melunasi Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom I Tahap 1 Tahun 2017 Seri B sebesar Rp14.000 juta.

On July 7, 2023, the Company has paid Global Mediacom Sustainable Sukuk Ijarah I Stage 1 Year 2017 B Series amounting to Rp14,000 million.

Pada tanggal 7 Juli 2024, Perusahaan telah melunasi Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom I Tahap 1 Tahun 2017 Seri C sebesar Rp22.950 juta.

On July 7, 2024, the Company has paid Global Mediacom Sustainable Sukuk Ijarah I Stage 1 Year 2017 C Series amounting to Rp22,950 million.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan II

Sustainable Sukuk Ijarah II

a. Tahap 1

a. Stage 1

Perusahaan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom II Tahap 1 Tahun 2020 sebesar Rp300.000 juta yang terdiri dari 3 seri, yaitu seri A yang jatuh tempo pada 21 September 2021 (370 hari) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp32.032 juta per tahun, Seri B yang jatuh tempo pada 11 September 2023 (3 tahun) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp180 juta per tahun dan Seri C yang jatuh tempo pada 11 September 2025 (5 tahun) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp51,6 juta per tahun. Jumlah biaya transaksi Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom II Tahap 1 Tahun 2020 sebesar Rp2.587 juta diamortisasi setiap bulan sampai dengan jatuh tempo.

The Company offered Sustainable Public Offering Global Mediacom Sustainable Sukuk Ijarah II Stage 1 Year 2020 amounting Rp300,000 million consisting 3 series, as follows A Series due on September 21, 2021 (370 days) with Installment Ijarah amounting Rp32,032 million per annum, B Series due on September 11, 2023 (3 years) with Installment Ijarah amounting Rp180 million per annum and C Series due on September 11, 2025 (5 years) with Installment Ijarah amounting Rp51.6 million per annum. Total transaction cost of Global Mediacom Sustainable Sukuk Ijarah II Stage 1 Year 2020 amounting to Rp2,587 million amortized every month until the maturity date.

Sukuk ditawarkan 100% dari nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sukuk dijamin dengan saham entitas anak yang dimiliki Perusahaan dengan nilai 125% dari jumlah yang terutang atas jumlah pokok Sukuk.

Sukuk were offered at 100% of the nominal value and listed on the Indonesia Stock Exchange. The sukuk are secured by the subsidiary's shares owned by the Company with a value of 125% of the amount payable on the principal amount.

Sehubungan dengan penerbitan sukuk ijarah, Perusahaan harus memenuhi rasio keuangan dan persyaratan tertentu yang tercantum dalam propektus. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah mematuhi persyaratan tersebut.

In connection with the issuance of sukuk ijarah, the Company shall fulfill financial ratio and certain requirement which was stated in the prospectus. As of December 31, 2024 and December 31, 2023, the Company has complied with the requirements.

Biaya perolehan belum diamortisasi termasuk dalam nilai tercatat sukuk serta diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

The unamortized transaction are include included in the carrying amount of sukuk, which is amortized using the effective interest method.

Pada tanggal 24 Maret 2023, hasil pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak ketiga, Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom II Tahap 1 Tahun 2020 mempunyai rating $_{id}A+_{(sy)}$ (*Single A Plus Syariah*) dan telah diperpanjang pada tanggal 4 Maret 2025 (Catatan 56).

On March 24, 2023, the rating result from PT Pemeringkat Efek Indonesia, third party, Global Mediacom Sustainable Sukuk Ijarah II Stage 1 Year 2020 rating is $_{id}A+_{(sy)}$ (Single A Plus Syariah) and has been extended on March 4, 2025 (Note 56).

Pada tanggal 11 September 2023, Perusahaan telah melunasi Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom II Tahap 1 Tahun 2020 Seri B sebesar Rp1.600 juta.

On September 11, 2023, the Company has paid Global Mediacom Sustainable Sukuk Ijarah II Stage 1 Year 2020 B Series amounting to Rp1,600 million.

b. Tahap 2

b. Stage 2

Perusahaan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom II Tahap 2 Tahun 2021 sebesar Rp300.000 juta yang terdiri dari 3 seri, yaitu seri A yang jatuh tempo pada 24 September 2022 (370 hari) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp27.584 juta per tahun, Seri B yang jatuh tempo pada 14 September 2024 (3 tahun) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp670 juta per tahun dan Seri C yang jatuh tempo pada 14 September 2026 (5 tahun) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp6 juta per tahun. Jumlah biaya transaksi Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom II Tahap 2 Tahun 2021 sebesar Rp1.620 juta diamortisasi setiap bulan sampai dengan jatuh tempo.

The Company offered Sustainable Public Offering Global Mediacom Sustainable Sukuk Ijarah II Stage 2 Year 2021 amounting Rp300,000 million consisting 3 series, as follows A Series due on September 24, 2022 (370 days) with Installment Ijarah amounting Rp27,584 million per annum, B Series due on September 14, 2024 (3 years) with Installment Ijarah amounting Rp670 million per annum and C Series due on September 14, 2026 (5 years) with Installment Ijarah amounting Rp6 million per annum. Total transaction cost of Global Mediacom Sustainable Sukuk Ijarah II Stage 2 Year 2021 amounting to Rp1,620 million amortized every month until the maturity date.

Sukuk ditawarkan 100% dari nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sukuk dijamin dengan saham entitas anak yang dimiliki Perusahaan dengan nilai 125% dari jumlah yang terutang atas jumlah pokok Sukuk.

Sukuk were offered at 100% of the nominal value and listed on the Indonesia Stock Exchange. The sukuk are secured by the subsidiary's shares owned by the Company with a value of 125% of the amount payable on the principal amount.

Sehubungan dengan penerbitan sukuk ijarah, Perusahaan harus memenuhi rasio keuangan dan persyaratan tertentu yang tercantum dalam propektus. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah mematuhi persyaratan tersebut.

In connection with the issuance of sukuk ijarah, the Company shall fulfill financial ratio and certain requirement which was stated in the prospectus. As of December 31, 2024 and 2023, the Company has complied with the requirements.

Biaya perolehan belum diamortisasi termasuk dalam nilai tercatat sukuk serta diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

The unamortized transaction are include included in the carrying amount of sukuk, which is amortized using the effective interest method.

Pada tanggal 23 September 2022, Perusahaan telah melunasi Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom II Tahap 2 Tahun 2021 Seri A sebesar Rp293.450 juta.

On September 23, 2022, the Company has paid Global Mediacom Sustainable Sukuk Ijarah II Stage 2 Year 2021 A Series amounting to Rp293,450 million.

Pada tanggal 24 Maret 2023, hasil pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak ketiga, Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom II Tahap 2 Tahun 2021 mempunyai rating $_{id}A+_{(sy)}$ (*Single A Plus Syariah*) dan telah diperpanjang pada tanggal 4 Maret 2025 (Catatan 56).

On March 24, 2023, the rating result from PT Pemeringkat Efek Indonesia, third party, Global Mediacom Sustainable Sukuk Ijarah II Stage 2 Year 2021 rating is $_{id}A+_{(sy)}$ (Single A Plus Syariah) and has been extended on March 4, 2025 (Note 56).

Pada tanggal 14 September 2024, Perusahaan telah melunasi Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom II Tahap 2 Tahun 2021 Seri B sebesar Rp6.500 juta.

On September 14, 2024, the Company has paid Global Mediacom Sustainable Sukuk Ijarah II Stage 2 Year 2021 B Series amounting to Rp6,500 million.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan III

Sustainable Sukuk Ijarah III

a. Tahap 1

a. Stage 1

Perusahaan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom III Tahap 1 Tahun 2022 sebesar Rp500.000 juta yang terdiri dari 3 seri, yaitu seri A yang jatuh tempo pada 10 Juli 2023 (370 hari) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp18.714 juta per tahun, Seri B yang jatuh tempo pada 5 Juli 2025 (3 tahun) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp26.963 juta per tahun dan Seri C yang jatuh tempo pada 5 Juli 2027 (5 tahun) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp1.123 juta per tahun. Jumlah biaya transaksi Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom III Tahap 1 Tahun 2022 sebesar Rp3.866 juta diamortisasi setiap bulan sampai dengan jatuh tempo.

The Company offered Sustainable Public Offering Global Mediacom Sustainable Sukuk Ijarah III Stage 1 Year 2022 amounting to Rp500,000 million consisting of 3 series, as follows A Series due on July 10, 2023 (370 days) with Installment Ijarah amounting to Rp18,714 million per annum, B Series due on July 5, 2025 (3 years) with Installment Ijarah amounting to Rp26,963 million per annum and C Series due on July 5, 2027 (5 years) with Installment Ijarah amounting to Rp1,123 million per annum. Total transaction cost of Global Mediacom Sustainable Sukuk Ijarah III Stage 1 Year 2022 amounting to Rp3,866 million amortized every month until the maturity date.

Sukuk ditawarkan 100% dari nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sukuk dijamin dengan saham entitas anak yang dimiliki Perusahaan dengan nilai 125% dari jumlah yang terutang atas jumlah pokok Sukuk.

Sukuk were offered at 100% of the nominal value and listed on the Indonesia Stock Exchange. The sukuk are secured by the subsidiary's shares owned by the Company with a value of 125% of the amount payable on the principal amount.

Sehubungan dengan penerbitan sukuk ijarah, Perusahaan harus memenuhi rasio keuangan dan persyaratan yang tercantum dalam propektus. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah mematuhi persyaratan tersebut.

In connection with the issuance of sukuk ijarah, the Company shall fulfill financial ratio and certain requirement which was stated in the prospectus. As of December 31, 2024 and December 31, 2023, the Company has complied with the requirements.

Biaya perolehan belum diamortisasi termasuk dalam nilai tercatat sukuk serta diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

The unamortized transaction are include included in the carrying amount of sukuk, which is amortized using the effective interest method.

Pada tanggal 24 Maret 2023, hasil pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak ketiga, Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom III Tahap 1 Tahun 2022 mempunyai rating $_{id}A+_{(sy)}$ (*Single A Plus Syariah*) dan telah diperpanjang pada tanggal 4 Maret 2025 (Catatan 56).

On March 24, 2023, the rating result from PT Pemeringkat Efek Indonesia, third party, Global Mediacom Sustainable Sukuk Ijarah III Stage 1 Year 2022 rating is $_{id}A+_{(sy)}$ (Single A Plus Syariah) and has been extended on March 4, 2025 (Note 56).

Pada tanggal 10 Juli 2023, Perusahaan telah melunasi Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom III Tahap 1 Tahun 2022 Seri A sebesar Rp220.160 juta.

On July 10, 2023, the Company has paid Global Mediacom Sustainable Sukuk Ijarah III Stage 1 Year 2022 A Series amounting to Rp220,160 million.

b. Tahap 2

Perusahaan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom III Tahap 2 Tahun 2022 sebesar Rp400.000 juta terdiri dari 3 seri, yaitu seri A yang jatuh tempo pada 21 September 2023 (370 hari) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp24.845 juta per tahun, Seri B yang jatuh tempo pada 16 September 2025 (3 tahun) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp9.660 juta per tahun dan Seri C yang jatuh tempo pada 16 September 2027 (5 tahun) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp248 juta per tahun. Jumlah biaya transaksi Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom III Tahap 2 Tahun 2022 sebesar Rp2.680 juta diamortisasi setiap bulan sampai dengan jatuh tempo.

Sukuk ditawarkan 100% dari nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sukuk dijamin dengan saham entitas anak yang dimiliki Perusahaan dengan nilai 125% dari jumlah yang terutang atas jumlah pokok Sukuk.

Sehubungan dengan penerbitan sukuk ijarah, Perusahaan harus memenuhi rasio keuangan dan persyaratan tertentu yang tercantum dalam propektus. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah mematuhi persyaratan tersebut.

Biaya perolehan belum diamortisasi termasuk dalam nilai tercatat sukuk serta diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 24 Maret 2023, hasil pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak ketiga, Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom III Tahap 2 Tahun 2022 mempunyai rating $_{id}$A+$_{(sy)}$ (*Single A Plus Syariah*) dan telah diperpanjang pada tanggal 4 Maret 2025 (Catatan 56).

Pada tanggal 21 September 2023, Perusahaan telah melunasi Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom III Tahap 2 Tahun 2022 Seri A sebesar Rp301.150 juta.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV

a. Tahap 1

Perusahaan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom IV Tahap 1 Tahun 2023 sebesar Rp850.000 juta yang terdiri dari 3 seri, yaitu seri A yang jatuh tempo pada 16 Juli 2024 (370 hari) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp36.287 juta per tahun, Seri B yang jatuh tempo pada 6 Juli 2026 (3 tahun) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp45.342 juta per tahun dan Seri C yang jatuh tempo pada 6 Juli 2028 (5 tahun) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp1.727 juta per tahun. Jumlah biaya transaksi Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom IV Tahap 1 Tahun 2023 sebesar Rp5.845 juta diamortisasi setiap bulan sampai dengan jatuh tempo.

b. Stage 2

The Company offered Sustainable Public Offering Global Mediacom Sustainable Sukuk Ijarah III Stage 2 Year 2022 amounting to Rp400,000 million consisting of 3 series, as follows A Series due on September 21, 2023 (370 days) with Installment Ijarah amounting to Rp24,845 million per annum, B Series due on September 16, 2025 (3 years) with Installment Ijarah amounting to Rp9,660 million per annum and C Series due on September 16, 2027 (5 years) with Installment Ijarah amounting to Rp248 million per annum. Total transaction cost of Global Mediacom Sustainable Sukuk Ijarah III Stage 2 Year 2022 amounting to Rp2,680 million amortized every month until the maturity date.

Sukuk were offered at 100% of the nominal value and listed on the Indonesia Stock Exchange. The sukuk are secured by the subsidiary's shares owned by the Company with a value of 125% of the amount payable on the principal amount.

In connection with the issuance of sukuk ijarah, the Company shall fulfill financial ratio and certain requirement which was stated in the prospectus. As of December 31, 2024 and December 31, 2023, the Company has complied with the requirements.

The unamortized transaction are include included in the carrying amount of sukuk, which is amortized using the effective interest method.

On March 24, 2023, the rating result from PT Pemeringkat Efek Indonesia, third party, Global Mediacom Sustainable Sukuk Ijarah III Stage 2 Year 2022 rating is $_{id}$A+$_{(sy)}$ (Single A Plus Syariah) and has been extended on March 4, 2025 (Note 56).

On September 21, 2023, the Company has paid Global Mediacom Sustainable Sukuk Ijarah III Stage 2 Year 2022 B Series amounting to Rp301,150 million.

Sustainable Sukuk Ijarah IV

a. Stage 1

The Company offered Sustainable Public Offering Global Mediacom Sustainable Sukuk Ijarah IV Stage 1 Year 2023 amounting to Rp850,000 million consisting of 3 series, as follows A Series due on July 16, 2024 (370 days) with Installment Ijarah amounting to Rp36,287 million per annum, B Series due on July 6, 2026 (3 years) with Installment Ijarah amounting to Rp45,342 million per annum and C Series due on July 6, 2028 (5 years) with Installment Ijarah amounting to Rp1,727 million per annum. Total transaction cost of Global Mediacom Sustainable Sukuk Ijarah IV Stage 1 Year 2023 amounting to Rp5,845 million amortized every month until the maturity date.

Sukuk ditawarkan 100% dari nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sukuk dijamin dengan saham entitas anak yang dimiliki Perusahaan dengan nilai 125% dari jumlah yang terutang atas jumlah pokok Sukuk.

Sukuk were offered at 100% of the nominal value and listed on the Indonesia Stock Exchange. The sukuk are secured by the subsidiary's shares owned by the Company with a value of 125% of the amount payable on the principal amount.

Sehubungan dengan penerbitan sukuk ijarah, Perusahaan harus memenuhi rasio keuangan dan persyaratan tertentu yang tercantum dalam propektus. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah mematuhi persyaratan tersebut.

In connection with the issuance of sukuk ijarah, the Company shall fulfill financial ratio and certain requirement which was stated in the prospectus. As of December 31, 2024 and 2023, the Company has complied with the requirements.

Biaya perolehan belum diamortisasi termasuk dalam nilai tercatat sukuk serta diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

The unamortized transaction are include included in the carrying amount of sukuk, which is amortized using the effective interest method.

Pada tanggal 15 Maret 2024, hasil pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak ketiga, Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom IV Tahap 1 Tahun 2023 mempunyai rating $_{id}A+_{(sy)}$ (*Single A Plus Syariah*) dan telah diperpanjang pada tanggal 4 Maret 2025 (Catatan 56).

On March 15, 2024, the rating result from PT Pemeringkat Efek Indonesia, third party, Global Mediacom Sustainable Sukuk Ijarah IV Stage 1 Year 2023 rating is $_{id}A+_{(sy)}$ (Single A Plus Syariah) and has been extended on March 4, 2025 (Note 56).

Pada tanggal 16 Juli 2024, Perusahaan telah melunasi Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom IV Tahap 1 Tahun 2023 Seri A sebesar Rp392.290 juta.

On July 16, 2024, the Company has paid Global Mediacom Sustainable Sukuk Ijarah IV Stage 1 Year 2023 A Series amounting to Rp392,290 million.

b. Tahap 2

b. Stage 2

Perusahaan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom IV Tahap 2 Tahun 2024 sebesar Rp650.000 juta yang terdiri dari 3 seri, yaitu seri A yang jatuh tempo pada 1 Juli 2025 (370 hari) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp33.399 juta per tahun, Seri B yang jatuh tempo pada 21 Juni 2027 (3 tahun) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp27.381 juta per tahun dan Seri C yang jatuh tempo pada 21 Juni 2029 (5 tahun) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp128 juta per tahun. Jumlah biaya transaksi Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom IV Tahap 2 Tahun 2024 sebesar Rp4.419 juta diamortisasi setiap bulan sampai dengan jatuh tempo.

The Company offered Sustainable Public Offering Sukuk Ijarah Global Mediacom IV Stage 2 Year 2024 amounting to Rp650,000 million consisting of 3 series, as follows A Series due on July 1, 2025 (370 days) with Installment Ijarah amounting to Rp33,399 million per annum, B Series due on June 21, 2027 (3 years) with Installment Ijarah amounting to Rp27,381 million per annum and C Series due on June 21, 2029 (5 years) with Installment Ijarah amounting to Rp128 million per annum. Total transaction cost of Sukuk Ijarah Global Mediacom IV Stage 2 Year 2024 amounting to Rp4,419 million amortized every month until the maturity date.

Sukuk ditawarkan 100% dari nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sukuk dijamin dengan sebidang tanah dan bangunan beserta sarana pelengkap lainnya seluas 32.901 m^2 yang terletak di Kebon Jeruk, Jakarta dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya 100% dari jumlah yang terutang atas jumlah pokok Sukuk.

Sukuk was offered at 100% of the nominal value and listed on the Indonesia Stock Exchange. The sukuk is secured by a parcel of land and buildings including other complimentary facilities with covering area of 31,901 m^2 which located in Kebon Jeruk, Jakarta with a value of at least 100% of the amount payable on the principal amount.

Sehubungan dengan penerbitan sukuk ijarah, Perusahaan harus memenuhi rasio keuangan dan persyaratan tertentu yang tercantum dalam propektus. Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan telah mematuhi persyaratan tersebut.

In connection with the issuance of sukuk ijarah, the Company shall fulfill financial ratio and certain requirement which was stated in the prospectus. As of December 31, 2024, the Company has complied with the requirements.

Biaya perolehan belum diamortisasi termasuk dalam nilai tercatat sukuk serta diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

The unamortized transaction are include included in the carrying amount of sukuk, which is amortized using the effective interest method.

Pada tanggal 4 Maret 2025, hasil pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak ketiga, Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom IV Tahap 2 Tahun 2024 mempunyai rating $_{id}A+_{(sy)}$ (*Single A Plus Syariah*) (Catatan 56).

On March 4, 2025, the rating result from PT Pemeringkat Efek Indonesia, third party, Global Mediacom Sustainable Sukuk Ijarah IV Stage 2 Year 2024 rating is $_{id}A+_{(sy)}$ (Single A Plus Syariah) (Note 56).

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah mematuhi rasio keuangan dan batasan-batasan yang tercantum dalam prospektus, yaitu rasio utang bersih terhadap modal tidak lebih dari empat kali dan rasio EBITDA terhadap beban bunga tidak kurang dari dua kali.

On December 31, 2024 and 2023, the Company has complied with the financial ratios and covenants as stated in the prospectus, such as net debt to equity ratio is not more than four times and EBITDA coverage ratio is not less than two times.

32. MODAL SAHAM / *32. CAPITAL STOCK*

Nama pemegang saham / *Name of stockholders*	31 Desember/*December 31,* 2024 — Jumlah saham (angka penuh)/ *Number of shares (full amount)*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Jumlah modal disetor/ *Total paid-up capital stock*
PT MNC Asia Holding Tbk	7.480.817.500	45,75%	748.082
Hary Tanoesoedibjo (Direktur Utama)	47.726.040	0,29%	4.773
Ruby Panjaitan (Direktur)	150.000	0,00%	15
Indra Pudjiastuti (Direktur)	20.000.000	0,12%	2.000
Rosano Barack (Komisaris Utama)	31.038.500	0,19%	3.104
Drs. Lo Kheng Hong	1.067.633.500	6,53%	106.763
Masyarakat dan koperasi (di bawah 5%)	7.705.146.546	47,12%	770.514
Jumlah saham yang beredar	16.352.512.086	100,00%	1.635.251
Saham diperoleh kembali	231.485.500		23.149
Jumlah saham yang diterbitkan	16.583.997.586		1.658.400

Nama pemegang saham / *Name of stockholders*	31 Desember/*December 31,* 2023 — Jumlah saham (angka penuh)/ *Number of shares (full amount)*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Jumlah modal disetor/ *Total paid-up capital stock*
PT MNC Asia Holding Tbk	7.480.817.500	45,75%	748.082
Hary Tanoesoedibjo (Direktur Utama)	31.226.040	0,19%	3.123
Ruby Panjaitan (Direktur)	150.000	0,00%	15
Indra Pudjiastuti (Direktur)	20.000.000	0,12%	2.000
Rosano Barack (Komisaris Utama)	31.038.500	0,19%	3.104
Drs. Lo Kheng Hong	1.067.633.500	6,53%	106.763
Masyarakat dan koperasi (di bawah 5%)	7.721.646.546	47,22%	772.164
Jumlah saham yang beredar	16.352.512.086	100,00%	1.635.251
Saham diperoleh kembali	231.485.500		23.149
Jumlah saham yang diterbitkan	16.583.997.586		1.658.400

Modal ditempatkan dan disetor penuh adalah saham biasa yang memberikan hak satu suara per saham dan berpartisipasi dalam dividen.

The shares issued and fully paid are ordinary shares which entitle the holder to carry one vote per share and to participate in dividends.

Jumlah saham beredar pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar 16.352.512.086 lembar.

Total outstanding shares on December 31, 2024 and 2023, is 16,352,512,086 shares.

33. TAMBAHAN MODAL DISETOR / *33. ADDITIONAL PAID-UP CAPITAL*

Mutasi tambahan modal disetor: / *Changes in additional paid-up capital:*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Saldo awal	1.810.189	1.810.189	*Beginning balance*
Penerbitan saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu	-	-	*Issuance of new shares without pre-emptive rights*
Saldo akhir	1.810.189	1.810.189	*Ending balance*

34. TRANSAKSI EKUITAS DAN PERUBAHAN EKUITAS ENTITAS ANAK

Akun ini berasal dari transaksi penjualan dan/atau pembelian saham entitas anak yang dilakukan Perusahaan dan entitas anak yang lain yang dikonsolidasikan dalam Perusahaan. Transaksi ini merupakan transaksi ekuitas dan dimasukkan dalam akun transaksi ekuitas dan perubahan ekuitas entitas anak karena tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian.

34. EQUITY TRANSACTION AND CHANGE IN EQUITY OF SUBSIDIARIES

This account was brought about from the sale and purchases of subsidiaries shares transaction performed by the Company and other consolidated subsidiaries. The transactions are treated as an equity transaction and change in equity of subsiaries, as this is a change in interest that do not result in a loss of control.

35. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Akun ini meliputi penghasilan komprehensif lain yang berasal dari selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan entitas anak, pengukuran kembali atas program imbalan pasti dan transaksi ekuitas lainnya yang diakumulasi dalam ekuitas.

35. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

This account comprises of other comprehensive income from the translation adjustment from the subsidiary's financial statements, remeasure-ment of defined benefit obligation, and other equity transactions that are accumulated in equity.

36. SAHAM DIPEROLEH KEMBALI

Sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023, Grup telah melakukan pembelian kembali saham Perusahaan sebanyak 231.485.500 lembar saham dengan biaya perolehan sebesar Rp347.895 juta yang disajikan sebagai "Saham Diperoleh Kembali" yang mengurangi ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

36. TREASURY STOCKS

Up to December 31, 2024 and 2023, the Group has repurchased its issued and paid up capital stock amounted to 231,485,500 shares with total costs of Rp347,895 million which is presented as "Treasury Stock" that deduct the equity in the consolidated statement of financial position.

37. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

Akun ini merupakan kepentingan non-pengendali atas aset bersih entitas anak sebesar Rp12.750.087 juta dan Rp12.068.808 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

37. NON-CONTROLLING INTERESTS

This account represents non-controlling interest in net assets of subsidiaries amounted to Rp12,750,087 million and Rp12,068,808 million as of December 31, 2024 and 2023, respectively.

38. PENDAPATAN

38. REVENUES

	2024	2023	
Iklan dan konten			*Advertising and content*
Iklan			*Advertising*
Non Digital	3.173.734	4.077.995	*Non Digital*
Digital	2.662.686	2.555.106	*Digital*
Konten dan IP	1.879.094	1.279.738	*Content and IP*
Subscription	714.811	498.013	*Subscription*
Lainnya	119.070	137.107	*Others*
Pendapatan antar segmen	(481.606)	(764.706)	*Intersegment revenue*
Iklan dan konten - bersih	8.067.789	7.783.253	*Advertising and content - net*
TV berbayar dan broadband	1.677.699	2.079.475	*Pay TV and broadband*
Lainnya	313.829	300.429	*Others*
Jumlah Pendapatan - Bersih	10.059.317	10.163.157	*Total Revenues - Net*

Pendapatan lainnya antar lain terdiri dari pelanggan ICT (*information and communication technology*).

Others revenue includes ICT (information and communication technology).

Pendapatan usaha dari pelanggan yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan usaha berasal dari PT Wira Pamungkas Pariwara masing-masing sebesar 10,36% dan 12,68% untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Revenues from customers which individually represent more than 10% of the total revenues came from PT Wira Pamungkas Pariwara amounting to 10.51% and 12.68% for the years ended December 31, 2024 and 2023, respectively.

0,11% dari jumlah pendapatan masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dilakukan dengan pihak berelasi.

0.11% of total revenues for the years ended December 31, 2024 and 2023, respectively, were made with related parties.

39. BEBAN POKOK PENDAPATAN / *39. COST OF REVENUE*

	2024	2023	
Beban program dan penyiaran	4.465.508	4.287.959	*Program and broadcast expenses*
Penyusutan dan amortisasi	776.399	1.018.531	*Depreciation and amortization*
Set top box	418.108	197.338	*Set top box*
Gaji dan kesejahteraan karyawan	90.779	119.835	*Salaries and employee welfare*
Beban layanan	58.434	251.626	*Service expenses*
Biaya alih daya	34.119	98.800	*Outsourcing*
Sewa	21.843	49.939	*Rental*
Lain-lain	154.393	151.277	*Others*
Jumlah	6.019.583	6.175.305	*Total*

Beban pokok pendapatan lainnya antara lain merupakan beban yang berhungan dengan ICT (*information and communication technology*), *homeshopping* dan *online travel agency*.

Others cost of revenue consist of cost of ICT (information and communication technology), homeshopping and online travel agency.

Tidak terdapat beban pokok pendapatan secara individu yang melebihi 10% dari jumlah beban pokok pendapatan.

There is no cost of revenue which individually represent more than 10% of the total cost of revenue.

0,21% dan 0,19% dari jumlah beban pokok pemdapatan masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dilakukan dengan pihak berelasi.

0.21% and 0.19% of total cost of revenue for the years ended December 31, 2024 and 2023, respectively, were made with related parties.

40. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *40. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	2024	2023	
Gaji dan tunjangan	902.315	877.341	*Salaries and allowances*
Penyusutan dan amortisasi	456.203	493.914	*Depreciation and amortization*
Iklan dan pemasaran	338.428	392.712	*Advertising and marketing*
Jasa profesional	72.603	119.418	*Professional fees*
Sewa	80.838	110.393	*Rent*
Lainnya (dibawah Rp100 juta)	449.598	431.234	*Others (each below Rp100 million)*
Jumlah	2.299.985	2.425.012	*Total*

41. BEBAN KEUANGAN / *41. FINANCE CHARGES*

	2024	2023	
Beban bunga	730.896	651.344	*Interest expenses*
Amortisasi emisi pinjaman	33.243	52.487	*Loan emission amortization*
Lainnya	35.547	63.599	*Others*
Jumlah	799.686	767.430	*Total*

Beban keuangan lainnya merupakan beban yang berkaitan langsung dengan pinjaman-pinjaman.

Others finance charges represent cost directly to loans.

42. LAIN-LAIN - BERSIH / *42. OTHERS – NET*

	2024	2023	
Keuntungan investasi dari aset keuangan pada FVTPL	4.748	5.096	*Investment gain from financial assets at FVTPL*
Pendapatan lain-lain - bersih	60.260	230.055	*Other income - net*
Jumlah	65.008	235.151	*Total*

Pendapatan lain-lain – bersih antara lain terdiri dari keuntungan/kerugian pelepasan asset tetap dan bagian keuntungan/kerugian bersih dari investasi pada entitas asosiasi.

Other income – net consist of gain/loss from disposal of fixed assets and share of net gain/loss from investment in associates.

43. PAJAK PENGHASILAN / *43. INCOME TAX*

Beban pajak Grup terdiri dari: / *Tax expense of the Group consists of the following:*

	2024	2023	
Pajak kini	(170.703)	(173.807)	*Current tax*
Manfaat pajak tangguhan			*Deferred tax benefit*
Perusahaan	7.732	1.736	*The Company*
Entitas anak	39.589	153.133	*Subsidiaries*
Beban pajak - bersih	(123.382)	(18.938)	*Tax expense - net*

Pajak Kini / *Current Tax*

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

Reconciliation between income before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income is as follows:

	2024	2023	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	1.040.602	1.086.680	*Income before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income*
Laba entitas anak sebelum pajak penghasilan	(1.261.073)	(1.078.359)	*Income before tax of subsidiaries*
Laba (rugi) sebelum pajak Perusahaan	(220.471)	8.321	*Gain (loss) before tax of the Company*
Perbedaan temporer:			*Temporary differences:*
Imbalan pasca kerja	600	1.994	*Post-employment benefits*
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal			*Non-deductible expenses (non-taxable income)*
Aset tetap	(110)	249	*Property and equipment*
Sumbangan dan kontribusi	26	18	*Donations and contributions*
Lainnya	144.726	(97.284)	*Others*
Rugi kena pajak Perusahaan	(75.229)	(86.702)	*Taxable loss of the Company*
Rugi fiskal tahun sebelumnya	(600.415)	(593.723)	*Prior year's fiscal loss carryforward*
Rugi fiskal yang telah dimanfaatkan	35.140	80.010	*Fiscal loss used*
Akumulasi rugi fiskal Perusahaan	(640.504)	(600.415)	*Accumulated fiscal loss carryforward*

Perusahaan mengalami rugi fiskal sehingga tidak terdapat taksiran pajak penghasilan. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, utang pajak penghasilan (PPh) badan merupakan utang PPh badan entitas anak.

The Company was in fiscal loss position, therefore, no provision for corporate income tax was made. At December 31, 2024 and 2023, income tax payable represents the subsidiaries' income tax payable.

Dalam laporan keuangan konsolidasian ini jumlah rugi kena pajak Perusahaan didasarkan atas perhitungan sementara, karena Perusahaan belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan.

In these consolidated financial statements, the amount of taxable loss is based on preliminary calculation, as the Company has not yet submitted its Corporate Income Tax Return.

Perusahaan telah menyampaikan perhitungan PPh badan atas Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan untuk tahun fiskal 2023 kepada kantor pajak dan dilaporkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

The Company has submitted the calculation of Corporate Income Tax Retrun for fiscal year 2023 to the tax office and reported in accordance with applicable regulation.

Pajak Tangguhan / *Deferred Tax*

Manfaat pajak tangguhan Grup adalah sebagai berikut:

Deferred tax benefit of the Group is as follows:

	2024	2023	
Manfaat pajak tangguhan - bersih			*Deferred tax benefit - net*
Perusahaan	7.732	1.736	*The Company*
Entitas anak	39.589	153.133	*Subsidiaries*
Manfaat pajak tangguhan - bersih	47.321	154.869	*Deferred tax benefit - net*

Aset Pajak Tangguhan / *Deferred Tax Assets*

Akun ini merupakan aset pajak tangguhan bersih setelah diperhitungkan dengan liabilitas pajak tangguhan dari masing-masing entitas usaha, dengan rincian sebagai berikut:

This account represents deferred tax assets after deducting the deferred tax liabilities of each of the same business entity as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Perusahaan			*Company*
Akumulasi rugi fiskal	121.696	114.078	*Accumulated fiscal loss*
Liabilitas imbalan pasca kerja	2.026	1.912	*Post-employment benefits obligation*
Entitas anak			*Subsidiaries*
Akumulasi rugi fiskal	273.397	313.358	*Accumulated fiscal losses*
Liabilitas imbalan pasca kerja	26.552	33.826	*Post-employment benefits obligation*
Lainnya	394.870	300.601	*Others*
Aset pajak tangguhan - bersih	818.541	763.775	*Deferred tax assets - net*

Liabilitas Pajak Tangguhan / *Deferred Tax Liabilities*

Akun ini merupakan liabilitas pajak tangguhan entitas anak setelah diperhitungkan dengan aset pajak tangguhan dari masing-masing entitas usaha, dengan rincian sebagai berikut:

This account represents deferred tax liabilities of subsidiaries after deducting the deferred tax asset of each of the samebusiness entity as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Entitas anak			*Subsidiaries*
Liabilitas imbalan pasca kerja	(17.984)	(8.323)	*Post-employment benefits obligation*
Lainnya	126.945	109.839	*Others*
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	108.961	101.516	*Deferred tax liabilities - net*

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

The computation of basic and diluted earnings per share attributable to the owners of the Company is based on the following data:

	2024	2023	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	1.040.602	1.086.680	*Income before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income*
Beban pajak sesuai tarif pajak yang berlaku	197.714	206.469	*Tax expense at effective tax rate*
Dampak pajak atas perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal			*Tax effect of non-deductible expenses*
Perusahaan	(27.482)	18.433	*The Company*
Entitas anak	(46.850)	(205.964)	*Subsidiaries*
Beban pajak - bersih	123.382	18.938	*Tax expense - net*

Tarif Pajak

Pada tanggal 30 November 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Penyakit Coronavirus 2019 ("COVID-19") dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR") pada tanggal 16 Mei 2020 menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 ("UU No. 2/2020"). UU No. 2/2020 antara lain menetapkan penyesuaian tarif PPh Badan menjadi sebesar 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020-2021. Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP No. 7 Tahun 2021) tanggal 29 Oktober 2021, maka tarif PPh badan tahun 2022 adalah 22%.

Tax rates

On November 30, 2020, the Government issued Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2020, on State Finances and the Stability of Financial System Policies for the Mitigation of Coronavirus Disease 2019 ("COVID-19") Pandemic and/or to Deal with Threats that are Potentially Harmful to the National Economy and/or the Stability of the Financial System, which has been approved by the House of Representatives ("DPR") on May 16, 2020 as Law No. 2 of 2020 ("Law No. 2/2020"). Law No. 2/2020 stipulates, among other things, adjustment of the CIT rate to 22% which applies in fiscal years 2020-2021. Based on Harmonization of Tax Regulation (Law No. 7 Year 2021) dated October 29, 2021, the CIT rate for year 2022 is 22%.

Perusahaan Terbuka yang memenuhi syarat- syarat tertentu dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif PPh Badan yang berlaku. Dalam hal Perusahaan memenuhi syarat-syarat tersebut, Perusahaan dapat memperoleh tarif PPh Badan lebih rendah untuk Tahun Pajak 2024 dan 2023.

Publicly Traded Companies which fulfil certain requirements are entitled to obtain a rate amounting to 3% lower than the applicable CIT rate. In the event that the Company fulfils the requirements, the Company can obtain lower CIT rate for Fiscal Year 2024 and 2023.

44. LABA PER SAHAM

44. EARNINGS PER SHARE

Berikut ini adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba per saham dasar dan dilusian yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk:

The computation of basic and diluted earnings per share attributable to the owners of the Company is based on the following data:

Laba per saham dasar

Basic earnings per share

	2024	2023	
Laba untuk perhitungan laba per saham	537.399	677.552	*Earnings for computing earnings per share*

Lembar saham

Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar (penyebut) untuk tujuan penghitungan laba per saham dasar dan dilusian adalah sebagai berikut:

Number of shares

The weighted average number of shares outstanding (denominator) for the computation of basic and diluted earnings per share were as follows:

	2024 lembar/*shares*	2023 lembar/*shares*	
Jumlah rata-rata tertimbang saham untuk tujuan laba per saham dasar	16.352.512.086	16.352.512.086	*Total weighted average number of shares for the purpose of basic earnings per share*

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat dilusi dari opsi saham karyawan karena tidak terdapat pelaksanaan opsi saham.

As of December 31, 2024 and 2023, there is no dilution from employee stock option since no option was exercised.

45. DIVIDEN TUNAI DAN PEMBENTUKAN CADANGAN UMUM

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Akta Perusahaan No. 75 tanggal 19 Juni 2023 dari Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui pembentukan cadangan umum sebesar Rp1.000 juta dan tidak membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2022.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Akta Perusahaan No. 78 tanggal 25 Juni 2024 dari Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui pembentukan cadangan umum sebesar Rp1.000 juta dan tidak membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2023.

45. CASH DIVIDENDS AND ALLOCATION FOR GENERAL RESERVE

Based on the minutes of the Company's Annual Stockholders' General Meeting as stated in Deed No. 75 dated June 19, 2023 of Aulia Taufani, S.H., Notary in Jakarta, the stockholders approved the appropriation of general reserve amounting to Rp1,000 million and not to distribute cash dividends for 2022.

Based on the minutes of the Company's Annual Stockholders' General Meeting as stated in Deed No. 78 dated June 25, 2024 of Aulia Taufani, S.H., Notary in Jakarta, the stockholders approved the appropriation of general reserve amounting to Rp1,000 million and not to distribute cash dividends for 2023.

46. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Imbalan Pasca-kerja

Program Iuran Pasti

Grup telah menerapkan Undang - Undang Cipta Kerja ("UUCK") No. 11/2020 dan peraturan penerapan terkaitnya PP 35/2021 yang diterbitkan di bulan Februari 2021 dalam perhitungan kewajiban imbalan kerja karyawan, kecuali jika peraturan tersebut diatur berbeda di Perjanjian Kerja Bersama.

Pada bulan November 2021, Mahkamah Konstitusi ("MK") menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat. Oleh karena itu, Pemerintah wajib untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja. MK juga menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU Cipta Kerja, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali.

46. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION

Post-employment Benefits

Defined Contribution Plan

The Group has implemented Job Creation Law ("UUCK") No. 11/2020, and its implementing regulation PP 35/2021 was issued in February 2021 in calculating the employee benefits obligation unless it is regulated otherwise in the Collective Labor Agreement.

In November 2021, Constitutional Court ("MK") declared that the Job Creation Law is conditionally unconstitutional. Therefore, the Government is required to postpone all strategic and all-encompassing actions or policies and prohibit them from issuing new implementing regulations in relation to the Job Creation Law. MK also ruled that if within 2 (two) years the Government has not finished revising the revisions to the Job Creation Law, the articles or contents of laws that have been revoked or amended by it shall be in effect.

Grup menggunakan UU Cipta Kerja dan peraturan penerapan terkaitnya sebagai basis dalam perhitungan kewajiban imbalan kerja karyawan sampai UU Cipta Kerja dinyatakan tidak berlaku. Grup secara berkelanjutan memantau perkembangan atas putusan MK dan mengevaluasi dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

The Group uses the Job Creation Law and its implementing regulation as a basis for calculating the employee benefits obligation until the Job Creation Law is revoked. The Group continuously monitors the development of the MK decision and evaluates the impact on the Group's consolidated financial statements.

PSAK 219 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja. PSAK 219 mengharuskan Perusahaan untuk mengakui liabilitas jika karyawan telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan, dan mengakui biaya jika Perusahaan menikmati manfaat ekonomis yang dihasilkan dari jasa yang diberikan oleh karyawan yang berhak memperoleh imbalan kerja.

PSAK 219 aims to regulate the accounting treatment and disclosure of employee benefits. PSAK 219 requires the Company to recognize a liability if the employee has rendered his services and is entitled to employee benefits that will be paid in the future, and to recognize costs if the Company received economic benefits resulting from the services provided by the employee who is entitled to employee benefits.

PSAK 219 mengharuskan penggunaan metode penilaian aktuaria *projected unit credit* untuk menghitung biaya dan kewajiban dari suatu program imbalan pasti. Metode ini mensyaratkan Perusahaan untuk melakukan atribusi atas (nilai sekarang dari) proyek imbalan, melalui jasa karyawan. Atribusi untuk masa kerja periode berjalan akan menghasilkan nilai Biaya Jasa Kini (sebagai komponen biaya dalam laporan Laba Rugi). Sementara itu, atribusi untuk masa kerja periode berjalan dan periode lalu akan menghasilkan Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti (sebagai komponen liabilitas dalam Neraca).

PSAK 219 requires the use of the projected unit credit actuarial valuation method to calculate the costs and liabilities of a defined benefit plan. This method requires the Company to attribution to the (present value of) benefit projects, through employee services. Attribution for the period of service for the current period will result in the value of Current Service Cost (as a component of costs in the Income Statement). Meanwhile, the attribution for the current period and prior period will result in the Present Value of Defined Benefit Obligations (as a component of liabilities in the Balance Sheet).

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 410/SK/HT-MCOM/III/2016 tanggal 24 Maret 2016, selain DANAPERA, Grup juga ikut serta dalam program pensiun yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun (BPJSK JP). Besaran iuran BPJSK JP adalah sebesar 2% dari penghasilan dasar karyawan dibayarkan oleh Perusahaan dan 1% dari gaji pokok dibayarkan oleh karyawan. Besaran iuran BPJSK JP tersebut diambil dari porsi iuran DANAPERA.

Under Directors' Circular No. 410/SK/HT-MCOM/III/2016 dated March 24, 2016, in addition to DANAPERA, the Group also participates in pension plan provided by Employment Social Security Program – Pension Benefit (BPJSK JP). Contribution to BPJSK JP consists of 2% of basic salary contributed by the Company and 1% of basic salary contributed by the employee. The contribution to BPJSK JP is deducted from the portion of contribution to DANAPERA's.

Beban pensiun Grup yang timbul dari program iuran pasti untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp29.670 juta dan Rp24.862 juta.

The Group's pension expense arising from the defined contribution plan for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp29,670 million and Rp24,862 million, respectively.

Program Imbalan Pasti

Defined Benefit Plan

Grup, kecuali entitas anak asing, juga membukukan dan menghitung imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan peraturan Grup dan Undang Undang Cipta Kerja No. 11/2020 ("UUCK") yang diterbitkan di bulan Februari 2021.

The Group, except foreign subsidiaries, also records and calculates post-employment benefits as required under the Group's regulations a Omnibus Law No. 11/2020 ("UUCK") which was issued in February 2021.

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti risiko investasi, risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

The defined benefit pension plan typically expose the Group to actuarial risks such as: investment risk, interest rate risk and salary risk.

Risiko Tingkat Bunga

Interest Risk

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Salary Risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain

Grup memberikan imbalan kerja jangka panjang lain berupa cuti besar kepada karyawan yang memenuhi persyaratan ditentukan berdasarkan pada masa kerja. Imbalan ini didasarkan pada masa kerja.

Beban imbalan kerja yang diakui di laba rugi komprehensif atas imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lain adalah:

Other Long-Term Employee Benefits

The Group provides other long-term benefits such as grand leaves to qualifying employees determined based on years of service. Other long-term benefit was determined based on years of service.

The amounts are recognized in total comprehensive income in respect to post employee benefit and other long-term benefit as follows:

	2024			
	Imbalan pasca-kerja/ *Post-employment benefits*	Imbalan kerja jangka panjang lainnya/ *Other long term benefits*	Jumlah/ *Total*	
Diakui pada laba (rugi):				*Recognized in profit (loss):*
Biaya jasa kini	16.068	1.185	17.253	*Current service cost*
Biaya jasa lalu dan keuntungan atas penyelesaian	(29.757)	(279)	(30.036)	*Past service cost and gain from settlements*
Beban bunga neto	12.731	346	13.077	*Net interest expense*
Keuntungan (kerugian) aktuaria	(29)	81	52	*Actuarial gains (losses)*
Komponen dari biaya imbalan pasti yang diakui dalam laba rugi	(987)	1.333	346	*Components of defined benefit costs recognised in profit or loss*
Diakui pada penghasilan komprehensif lain:				*Recognized in other comprehensive income:*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - neto				*Remeasurement on the net defined benefit liability:*
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul:				*Actuarial gains and losses arising from:*
dari perubahan asumsi keuangan	(139)	72	(67)	*changes in financial assumptions*
dari penyesuaian atas pengalaman	11.324	249	11.573	*experience adjustments*
Komponen beban imbalan pasti yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	11.185	321	11.506	*Components of defined benefit costs recognised in other comprehensive income*
Jumlah	10.198	1.654	11.852	*Total*

	2023			
	Imbalan pasca-kerja/ *Post-employment benefits*	Imbalan kerja jangka panjang lainnya/ *Other long term benefits*	Jumlah/ *Total*	
Diakui pada laba (rugi):				*Recognized in profit (loss):*
Biaya jasa kini	8.624	3.400	12.024	*Current service cost*
Biaya jasa lalu dan keuntungan atas penyelesaian	(37.849)	(66)	(37.915)	*Past service cost and gain from settlements*
Beban bunga neto	16.339	1.896	18.235	*Net interest expense*
Keuntungan (kerugian) aktuaria	12.254	(509)	11.745	*Actuarial gains (losses)*
Komponen dari biaya imbalan pasti yang diakui dalam laba rugi	(632)	4.721	4.089	*Components of defined benefit costs recognised in profit or loss*
Diakui pada penghasilan komprehensif lain:				*Recognized in other comprehensive income:*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - neto				*Remeasurement on the net defined benefit liability:*
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul:				*Actuarial gains and losses arising from:*
dari perubahan asumsi keuangan	(2.115)	-	(2.115)	*changes in financial assumptions*
dari penyesuaian atas pengalaman	(3.112)	(567)	(3.679)	*experience adjustments*
Komponen beban imbalan pasti yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(5.227)	(567)	(5.794)	*Components of defined benefit costs recognised in other comprehensive income*
Jumlah	(5.859)	4.154	(1.705)	*Total*

Jumlah tercatat di laporan posisi keuangan konsolidasian yang timbul dari liabilitas terkait dengan imbalan kerja selain pensiun iuran pasti adalah sebagai berikut:

The amounts included in the consolidated statements of financial position arising from the obligation in respect of the employee benefits other than defined contributions are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Imbalan pasca-kerja	227.128	227.980	*Post-employment benefits*
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	(8.847)	(10.501)	*Other long-term benefits*
Jumlah	218.281	217.479	*Total*

Mutasi nilai kini kewajiban pada periode berjalan adalah sebagai berikut:

Movements in the present values of obligation in the current period are as follows:

	31 Desember/December 31, 2024			
	Imbalan pasca-kerja/ *Post-employment benefits*	Imbalan kerja jangka panjang lainnya/ *Other long term benefits*	Jumlah/ *Total*	
Kewajiban imbalan pasti - awal	227.980	(10.501)	217.479	*Opening defined benefit obligation*
Biaya jasa kini	16.068	1.185	17.253	*Current service cost*
Biaya bunga	12.731	346	13.077	*Interest cost*
Keuntungan (kerugian) aktuarial	(29)	81	52	*Actuarial gains (losses)*
Pengukuran kembali (keuntungan)/kerugian:				*Remeasurement (gains)/losses:*
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang:				*Actuarial gains and losses arising from:*
timbul dari perubahan asumsi keuangan	(139)	72	(67)	*changes in financial assumptions*
timbul dari penyesuaian atas pengalaman	11.324	249	11.573	*experience adjustments*
Biaya jasa lalu, termasuk kerugian (keuntungan) dari kurtailmen	(29.757)	(279)	(30.036)	*Past service cost, including losses (gains) on curtailments*
Pembayaran manfaat	(11.050)	-	(11.050)	*Benefits paid*
Kewajiban imbalan pasti - akhir	227.128	(8.847)	218.281	*Closing defined benefit obligation*

	31 Desember/*December 31*, 2023			
	Imbalan pasca-kerja/ *Post-employment benefits*	Imbalan kerja jangka panjang lainnya/ *Other long term benefits*	Jumlah/ *Total*	
Kewajiban imbalan pasti - awal	246.817	(14.655)	232.162	*Opening defined benefit obligation*
Biaya jasa kini	8.624	3.400	12.024	*Current service cost*
Biaya bunga	16.339	1.896	18.235	*Interest cost*
Kerugian aktuarial	12.254	(509)	11.745	*Actuarial losses*
Pengukuran kembali (keuntungan)/kerugian :				*Remeasurement (gains)/losses:*
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang:				*Actuarial gains and losses arising from:*
timbul dari perubahan asumsi keuangan	(2.115)	-	(2.115)	*changes in financial assumptions*
timbul dari penyesuaian atas pengalaman	(3.112)	(567)	(3.679)	*experience adjustments*
Biaya jasa lalu, termasuk kerugian (keuntungan) dari kurtailmen	(37.849)	(66)	(37.915)	*Past service cost, including losses (gains) on curtailments*
Pembayaran manfaat	(12.978)	-	(12.978)	*Benefits paid*
Kewajiban imbalan pasti - akhir	227.980	(10.501)	217.479	*Closing defined benefit obligation*

Asumsi actuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode laporan, dengan semua asumsi lain konstan.

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined obligation are discount rate and expected salary increase. The sensitivity analyses below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

	Asumsi/ *Assumption*		
	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Usia pensiun normal	55	55	*Normal retirement age*
Tingkat mortalita	TMI IV / 2019	TMI IV / 2019	*Mortality rate*
Tingkat sakit	% of Martality Rate	% of Martality Rate	*Illness rate*
Tingkat diskonto	6,63% - 7,21%	6,75%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	5,50% - 6,50%	5,50%	*Salary increase rate*

	Imbalan pasca-kerja/ *Post-employment benefits*		
	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Tingkat diskonto			*Initial discount rate*
Tingkat diskonto +1%	167.732	195.607	*Discount rate +1%*
Tingkat diskonto -1%	187.471	222.286	*Discount rate -1%*
Tingkat kenaikan gaji			*Future salary increment rate*
Tingkat kenaikan gaji +1%	195.245	227.995	*Salary increment rate +1%*
Tingkat kenaikan gaji -1%	160.708	190.273	*Salary increment rate -1%*

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the defined benefit obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the defined benefit obligation liability recognised in the statement of financial position.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

There was no change in the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis from prior years.

47. AKUISISI ENTITAS ANAK / *47. ACQUISITION OF SUBSIDIARIES*

Ansat Broadcast Sdn. Bhd. / *Ansat Broadcast Sdn. Bhd.*

Pada tahun 2024, MVN membeli 350.000.000 saham atau setara 56% kepemilikan atas Ansat Broadcast Sd. Bhd. (ABSB) dari pihak ketiga dengan nilai perolehan sebesar Rp19.500 juta dengan nilai aset bersih pada tanggal akuisisi sebesar Rp14.784 juta. Atas akuisisi ini, MVN memperoleh pengendalian atas ABSB.

In 2024, MVN acquired 350,000,000 shares or equivalent with 56% ownership of Ansat Broadcast Sdn. Bhd. (ABSB) from athird party with acquisition cost amounting to Rp19,500 million with net asset on acquisition date amounting to Rp14,784 million. By this acquisition, MVN has a control of ABSB.

Entitas anak ini diakuisisi dengan tujuan perluasan aktivitas Grup pada media TV berbayar dan broadband.

This subsidiary acquired so as to continue the expansion of the Group's activities on pay TV and broadband.

	1 Januari/ *January 1,* 2024	
Imbalan yang dialihkan	19.500	*Consideration transferred*
Dikurang: Nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh	14.784	*Less: Fair Value Of Identifiable net assets acquired*
Goodwill yang timbul dari akusisi	4.716	*Goodwill arising from acquisition*
Biaya akuisisi secara tunai	-	*Acquisition cost on cash*
Ditambah : Kas dan setara kas yang diperoleh	26.288	*Add: Cash and cash equivalents acquired*
Arus kas masuk	26.288	*Net cash inflow on acquisition*

Goodwill yang timbul dalam kombinasi bisnis karena biaya perolehan kombinasi termasuk suatu pengendalian utama. Selanjutnya, imbalan yang dibayar untuk kombinasi secara efektif termasuk jumlah yang terkait dengan sinergi yang diharapkan, pertumbuhan pendapatan, pengembangan pasar yang akan datang, kumpulan tenaga kerja dan aset tak berwujud tertentu.

Goodwill arose in the business combination because the cost of the combination included a control premium. In addition, the consideration paid for the combination effectively included amounts in relation to the benefit of expected synergies, revenue growth, future market development, assembled workforce and certain intangible assets.

48. PEMBAYARAN BERBASIS SAHAM / *48. SHARE-BASED PAYMENTS*

Berdasarkan rapat umum pemegang saham luar biasa Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 309 tanggal 27 April 2010 dari Notaris Sutjipto S.H., M.Kn., para pemegang saham menyetujui Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris (EMSOP).

Based on the Company's extraordinary general meeting of stockholders, as stated in Deed No. 309 dated April 27, 2010, of Notary Sutjipto S.H., M.Kn., the stockholders approved the Employee and Management Stock Option Plan (EMSOP).

Berdasarkan Surat No. S-03642/BEI.PP2/06-2016, Bursa Efek Indonesia (BEI) menyetujui pencatatan saham dalam rangka EMSOP Tahap VII sebanyak 283.972.278 hak opsi dengan harga pelaksanaan opsi sebesar Rp1.128.

Based on Letter No. S-03642/BEI.PP2/06-2016, Indonesia Stock Exchange (IDX) approved the listng of shares in accordance with EMSOP Plan VII with 283,972,278 option with exercise price of Rp1,128.

Nilai wajar hak opsi EMSOP diestimasi pada tanggal pemberian hak opsi dengan menggunakan model *Black-Scholes*.

The fair value of EMSOP option is estimated at grant date using the Black-Scholes model.

Perhitungan nilai wajar hak opsi EMSOP Tahap VII ini dilakukan oleh PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, penilai independen. Asumsi utama untuk menghitung nilai wajar opsi adalah sebagai berikut:

The fair value of EMSOP option calculation for Plan VII is calculate by PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, an independent appraiser. Key assumptions used in calculating the fair value of the options are as follows:

	Asumsi/*Assumptions*	
Tingkat suku bunga bebas risiko (per tahun)	6,86%	*Risk-free interest rate (per annum)*
Periode opsi	5 tahun/*years*	*Option period*
Perkiraaan ketidakstabilan harga saham (per tahun)	21,83%	*Expected volatility of the share price (per annum)*
Dividen diharapkan (per tahun)	1,24%	*Expected dividend (per annum)*

Jumlah opsi saham yang beredar dan belum dieksekusi sebanyak 283.964.778 lembar saham dengan rata-rata tertimbang harga eksekusi sebesar Rp1.128.

Total share options outstanding and not yet exercised amounting to 283,964,778 shares with weighted average exercise price of Rp1,128.

Pada tahun 2024 dan 2023, tidak terdapat pemberian opsi dan eksekusi atas opsi saham.

In 2024 and 2023, no option was granted and exercised.

49. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI / *49. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES*

Sifat Pihak Berelasi / ***Nature of Relationship***

a. PT MNC Asia Holding Tbk merupakan pemegang saham mayoritas Perusahaan.

a. PT MNC Asia Holding Tbk is the majority stockholder of the Company.

b. Perusahaan yang pemegang saham akhirnya atau saham mayoritas sahamnya sama dengan pemegang saham Perusahaan adalah PT MNC Kapital Indonesia Tbk (MKAP), PT MNC Asset Management (MNCAM), PT MNC Sekuritas, PT MNC Finance PT MNC Asuransi Indonesia, PT MNC Land Tbk, PT MNC Life Assurance, PT Media Nusantara Press dan PT GLD Property.

b. The Companies which have the same ultimate stockholder or majority stockholder with the Company's are PT MNC Kapital Indonesia Tbk (MKAP), PT MNC Asset Management (MNCAM), PT MNC Sekuritas, PT MNC Finance, PT MNC Asuransi Indonesia, PT MNC Land Tbk, PT MNC Life Assurance, PT Media Nusantara Press and PT GLD Property.

c. PT Media Nusantara Informasi merupakan pemegang saham minoritas PT Media Nusantara Press.

c. PT Media Nusantara Informasi is the minority stockholder of PT Media Nusantara Press.

d. PT Bank MNC Internasional Tbk merupakan entitas anak dari PT MNC Asia Holding Tbk (melalui MKAP).

d. PT Bank MNC Internasional Tbk is a subsidiary of PT MNC Asia Holding Tbk (through MKAP).

Transaksi-transaksi Pihak Berelasi

Transactions with Related Parties

a. Grup melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi, meliputi penjualan/pembelian barang dan jasa, persewaan gedung dan transaksi pembiayaan dengan pihak berelasi. Grup juga melakukan penempatan dana investasi dan perolehan pinjaman dana dari pihak berelasi.

a. The Group entered into certain transactions with related parties, including sales and purchases of goods and services, office building rental, and financing transactions with related parties. The Group also entered into placement of investments with and loans obtained from related parties.

Pada tanggal pelaporan, saldo aset dan liabilitas yang timbul atas transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

At reporting dates, assets and liabilities related to transactions with related parties are as follows:

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Aset keuangan lainnya - lancar	5	6.956	26.685	*Other financial assets - current*
Persentase dari jumlah aset		0,0%	0,1%	*Percentage to total assets*
Piutang usaha	6			*Trade accounts receivable*
PT. MNC Aladin Indonesia		7.405	6.115	*PT. MNC Aladin Indonesia*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp 1 miliar)		15.526	15.828	*Others (each below Rp 1 billion)*
Jumlah		22.931	21.943	*Total*
Persentase dari jumlah aset		0,1%	0,1%	*Percentage to total assets*
Piutang lain-lain - lancar	7			*Other accounts receivable - current*
PT. MNC Land Tbk		40.676	31.207	*PT. MNC Land Tbk*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp 1 miliar)		37.403	58.908	*Others (each below Rp 1 billion)*
Jumlah		78.079	90.115	*Total*
Persentase dari jumlah aset		0,2%	0,2%	*Percentage to total assets*
Utang usaha	23			*Trade accounts payable*
PT. GLD Property		4.470	4.525	*PT. GLD Property*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp 1 miliar)		2.801	2.037	*Others (each below Rp 1 billion)*
Jumlah		7.271	6.562	*Total*
Persentase dari jumlah liabilitas		0,1%	0,1%	*Percentage to total liabilities*
Utang lain-lain kepada pihak berelasi	24	15.264	13.606	*Other accounts payable to related parties*
Persentase dari jumlah liabilitas		0,2%	0,2%	*Percentage to total liabilities*

b. Grup juga mempunyai transaksi lain dengan pihak berelasi yaitu:

- Pemberian/penerimaan pinjaman dana tanpa bunga atas pembayaran lebih dahulu biaya Grup oleh pihak berelasi atau sebaliknya yang tercatat sebagai piutang lain-lain kepada berelasi dan utang kepada pihak berelasi.
- Transaksi dengan personil manajemen kunci meliputi pemberian pinjaman tanpa bunga termasuk pinjaman perumahan.

b. The Group also entered into other transactions with related parties among others, as follows:

- *Obtaining/providing non-interest bearing advances arising from payments of expenses of the Group paid on its behalf by related parties or vice versa which is shown as other accounts receivable from related parties and other accounts payable to related parties.*
- *Transactions with key management personnels consisting of non-interest bearing loans including housing loans.*

c. Perusahaan menyediakan manfaat pada Komisaris, Direktur dan karyawan kunci Perusahaan untuk imbalan kerja jangka pendek dan imbalan pasca kerja masing-masing sebesar Rp12.832 juta dan Rp12.123 juta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

c. The Company provides benefits to the Commissioners, Directors and key management personnel of the Company for short-term employee benefits and post-employee benefit amounting to Rp12,832 million and Rp12,123 million for the years ended December 31, 2024 and 2023, respectively.

50. INFORMASI SEGMEN / *50. SEGMENT INFORMATION*

Berikut ini adalah informasi segmen berdasarkan segmen operasi:

The following are segment information based on the operating divisions:

	2024					
	Iklan dan konten/ *Advertising and content*	TV Berbayar dan broadband/ *Pay TV and broadband*	Lain-lain/ *Others*	Eliminasi/ *Elimination*	Jumlah/ *Total*	
PENDAPATAN BERSIH						***NET REVENUES***
Pendapatan eksternal	8.067.789	1.677.699	313.829	-	10.059.317	*External revenues*
Pendapatan antar segmen	481.606	-	-	(481.606)	-	*Intersegment revenues*
Jumlah pendapatan bersih	8.549.395	1.677.699	313.829	(481.606)	10.059.317	*Total net revenues*
HASIL SEGMEN	3.988.338	23.399	243.812	(215.815)	4.039.734	***SEGMENT RESULT***
Beban umum dan administrasi					(2.299.985)	*General and administrative expenses*
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih					(16.948)	*Gain (loss) on foreign exchange - net*
Beban keuangan					(799.686)	*Finance charges*
Penghasilan bunga					52.479	*Interest income*
Keuntungan dan kerugian lain-lain					65.008	*Other gains and losses*
Laba sebelum pajak					1.040.602	***Income before tax***
Penyusutan dan amortisasi	783.474	440.310	8.818	-	1.232.602	*Depreciation and amortization*
INFORMASI LAINNYA						***OTHER INFORMATION***
ASET						*ASSETS*
Aset segmen	24.642.848	8.770.333	5.585.341	(2.754.750)	36.243.772	*Segment assets*
LIABILITAS						*LIABILITIES*
Liabilitas segmen	2.069.918	1.286.958	5.797.485	(1.990.099)	7.164.262	*Segment liabilities*

	2023					
	Iklan dan konten/ *Advertising and content*	TV Berbayar dan broadband/ *Pay TV and broadband*	Lain-lain/ *Others*	Eliminasi/ *Elimination*	Jumlah/ *Total*	
PENDAPATAN BERSIH						***NET REVENUES***
Pendapatan eksternal	7.783.253	2.079.475	300.429	-	10.163.157	*External revenues*
Pendapatan antar segmen	764.706	-	-	(764.706)	-	*Intersegment revenues*
Jumlah pendapatan bersih	8.547.959	2.079.475	300.429	(764.706)	10.163.157	*Total net revenues*
HASIL SEGMEN	3.869.241	182.418	141.974	(205.781)	3.987.852	***SEGMENT RESULT***
Beban umum dan administrasi					(2.425.012)	*General and administrative expenses*
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih					1.371	*Gain (loss) on foreign exchange - net*
Beban keuangan					(767.430)	*Finance charges*
Penghasilan bunga					54.748	*Interest income*
Keuntungan dan kerugian lain-lain					235.151	*Other gains and losses*
Laba sebelum pajak					1.086.680	***Income before tax***
Penyusutan dan amortisasi	399.178	624.456	488.811	-	1.512.445	*Depreciation and amortization*
INFORMASI LAINNYA						***OTHER INFORMATION***
ASET						*ASSETS*
Aset segmen	22.765.561	9.478.407	7.848.679	(4.824.345)	35.268.302	*Segment assets*
LIABILITAS						*LIABILITIES*
Liabilitas segmen	1.851.417	1.760.387	6.856.961	(2.850.469)	7.618.296	*Segment liabilities*

Segmen Geografis

Tabel berikut menunjukkan distribusi dari kesuluruhan segmen Grup berdasarkan pasar geografis:

Geographical Segment

The following table shows the distribution of the Group's consolidated segmen by geographical market:

	2024	2023	
Pendapatan bersih			*Net revenues*
Indonesia	10.054.779	10.163.157	*Indonesia*
Malaysia	4.538	-	*Malaysia*
Jumlah	10.059.317	10.163.157	*Total*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Total Aset Segmen			*Total Segment Asset*
Indonesia	36.221.987	35.268.302	*Indonesia*
Malaysia	21.785	-	*Malaysia*
Jumlah	36.243.772	35.268.302	*Total*

51. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN

Grup mengadakan perjanjian dengan pihak sebagai berikut:

1) Pada tahun 2023, MKM telah menandatangani perjanjian dengan PT Asianet Media Teknologi, para pihak sepakat melakukan penjualan dan pengalihan atas Aset MNC Play dengan nilai Rp2.423.336 juta.

2) Pada tahun 2023, MKM telah menandatangani perjanjian dengan PT Indosat Tbk, para pihak sepatkat melakukan pengalihan atas Aset Pelanggan MNC Play dengan nilai Rp876.865 juta.

3) Pada tanggal 23 Mei 2023, Perusahaan telah menandatangani akta No. 86 dari Aulia Taufani, S.H., notaris di Jakarta, mengenai perjanjian pengikatan jual beli atas tanah milik Perusahaan dan telah menandatangani akta jual beli No. 16, 17, 18, 19 dan 20 pada tanggal 14 Agustus 2023 dari Andalia Farida, S.H., M.H., PPAT di Jakarta.

4) Perjanjian International Licensing Agreement dengan Associated Press Television News Ltd., (APTN) pada tanggal 16 Maret 2020 yang berlaku efektif dari 1 Juli 2019 hingga 30 Juni 2024. Amandemen perjanjian lisensi tertanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 30 Juni 2027.

5) Perjanjian antara PT Nielsen Audience Measurement ("Nielsen") dengan PT Media Nusantara Citra Tbk mewakili perusahaan-perusahaan terafiliasi-nya yaitu PT Rajawali Citra Televisi Indonesia, PT MNC Televisi Indonesia, PT Global Informasi Bermutu, PT MNC Televisi Network, PT Mediate Indonesia dan PT MNC Pictures, pada tanggal 25 Juli 2019, dan telah beberapa kali diaddendumkan terakhir tertanggal 5 April 2023 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 yang diperpanjang otomatis secara bulanan, kecuali disepakati lain oleh para pihak.

51. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS

The Group entered into agreements with the following parties:

1) In 2023, MKM has signed agreement with PT Asianet Media Teknologi, the Parties agreed sale and transfer of Assets MNC Play amounted to Rp2,423,336 million.

2) In 2023, MKM has signed agreement with PT Indosat Tbk, the Parties agreed transfer of Subscribers Asset MNC Play amounted to Rp876,865 million.

3) On May 23, 2023, the Company has signed deed No. 86 from Aulia Taufani, S.H., notary in Jakarta, regarding the agreement of binding sale and purchased of land owned by the Company and has signed deed of sale and purchase No. 16, 17, 18, 19 and 20 on August 14, 2023 from Andalina Farida, S.H., M.H., PPAT in Jakarta.

4) International Licensing Agreement with Associated Press Television News Ltd., (APTN) on March 16, 2020 which is effective as of July 1, 2019 to June 30, 2024. Amendment to the License Agreement dated July 1, 2024 until June 30, 2027.

5) Agreement between PT Nielsen Audience Measurement ("Nielsen") with PT Media Nusantara Citra Tbk representing its affiliated companies, i.e. PT Rajawali Citra Televisi Indonesia, PT MNC Televisi Indonesia, PT Global Informasi Bermutu, PT MNC Televisi Network, PT Mediate Indonesia dan PT MNC Pictures, and dated July 25, 2019, and has been addendum several times and last addendum dated April 5, 2023 which is effective until December 31, 2025 and shall be extended automatically on a monthly basis, unless the parties agree otherwise.

6) Perjanjian Lisensi dengan Asian Football Confederation ("AFC") pada tanggal 29 Oktober 2019 untuk 14 (empat belas) kompetisi yang diselenggarakan oleh AFC, dimana kompetisi pertama akan diadakan pada tahun 2021 dan kompetisi terakhir akan diadakan pada tahun 2024. Perjanjian ini berlaku efektif dari tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan 30 (tiga puluh) hari setelah pertandingan final dari kompetisi terakhir yang diselenggarakan oleh AFC.

6) License Agreement with Asian Football Confederation ("AFC") dated October 29, 2019 for 14 (fourteen) competitions held by AFC, which the first competition will be held in 2021 and the last competition will be held in 2024. This Agreement is effective as of October 29, 2019 until 30 (thirty) days after the final match of the last competition held by AFC.

7) Perjanjian lisensi dengan Endemol Shine International Limited ("Endemol") untuk program Masterchef Indonesia Seri 7 yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025. Endemol dalam perjanjian ini digantikan oleh Banijay Rights Limited berdasarkan perjanjian novasi tanggal 1 Oktober 2020 dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 2020.

7) License Agreement with Endemol Shine International Limited for Masterchef Indonesia Series 7 programme which is effective as of July 1, 2020 until June 30, 2025. Endemol in this agreement is replaced by Banijay Rights Limited under the novation agreement dated October 1, 2020 which is effective as of October 1, 2020.

8) Perjanjian lisensi dengan Banijay Rights Limited untuk program Masterchef Indonesia Seri 8 pada tanggal 23 Desember 2020 yang berlaku efektif dari tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2025, dan Seri 9 pada tanggal 8 Desember 2021, yang berlaku efektif dari tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2026.

8) Licence Agreement with Banijay Rights Limited for Masterchef Indonesia Series 8 programme dated December 23, 2020 which is effective as of December 31, 2020 until December 30, 2025, and Series 9 programme dated December 8, 2021, which is effective as of October 14, 2021 until October 13, 2026.

9) Perjanjian lisensi antara Sports News Television Management Limited (SNTV) dengan PT Media Nusantara Citra Tbk mewakili perusahaan-perusahaan terafiliasi-nya yaitu PT MNC Vision Networks Tbk, PT MNC Televisi Network and PT MNC Pictures pada tanggal 15 Maret 2019 yang berlaku efektif dari tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025.

9) Licence Agreement between Sports News Television Management Limited (SNTV) with PT Media Nusantara Citra Tbk representing its affiliated companies, i.e. PT MNC Vision Networks Tbk, PT MNC Televisi Network and PT MNC Pictures dated March 15, 2019 which is effective as of March 15, 2019 until March 14, 2025.

10) Amandemen Perjanjian Lisensi Format dengan ITV Studios Global Entertainment B.V. (dahulu Talpa Global B.V.) untuk beberapa program seperti The Voice Indonesia dan The Voice Kids Indonesia yang berlaku efektif sejak 2022 dan berakhir tahun 2027.

10) Amendment of Format License Agreement with ITV Studios Global Entertainment B.V. (formerly Talpa Global B.V.) for several programs i.e. The Voice Indonesia and The Voice Kids Indonesia which was effective as of 2022 and expire 2027.

11) Perjanjian dengan PT Dunia Visitama Produksi (Freemantle Media Ltd) untuk beberapa program seperti Indonesian Idol, Family 100 dan *The Price is Right* yang berlaku efektif sejak tahun 2020 dan berakhir tahun 2028.

11) Agreement with PT Dunia Visitama Produksi (Freemantle Media Ltd) for several programs such as Indonesian Idol, Family 100 and The Price is Right which was effective since 2020 and expire 2028.

12) Perjanjian dengan CJ E&M untuk beberapa musim program I Can See Your Voice Indonesia yang berlaku efektif sejak tahun 2016 dan berakhir antara tahun 2021 dan 2028.

12) Agreement with CJ E&M for several seasons of program I Can See Your Voice Indonesia which are effective as of 2016 and expire between 2021 and 2028.

13) Perjanjian Lisensi dengan Banijay Rights Limited untuk program Masterchef Indonesia Seri 10 dan Seri 11 pada tanggal 14 Juli 2022 dan 28 Agustus 2023 yang berlaku efektif dari tanggal 1 Oktober 2022 dan 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2027 dan 31 Juli 2028.

13) Licence Agreements with Banijay Rights Limited for Masterchef Indonesia Series 10 and Series 11 programme dated July 14, 2022 and August 28, 2023 which are effective as of October 1, 2022 and August 1, 2023 until September 30, 2027 and July 31, 2028.

14) Perjanjian Lisensi dengan Banijay Rights Limited untuk program Masterchef Indonesia Junior Seri 3 pada tanggal 13 Juli 2022 yang berlaku efektif dari tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2027.

15) Perjanjian Lisensi Program "32nd SEA GAMES - CAMBODIA 2023" tertanggal 27 Februari 2023, berlaku sampai dengan 8 Oktober 2025.

16) Perjanjian Lisensi Program "19th ASIAN GAMES HANGZHOU 2023" tertanggal 3 Maret 2023, berlaku sampai dengan 14 April 2025.

17) Perjanjian Lisensi Program Acara "Paket 27 Film Paramount" tertanggal 13 Juli 2023, berlaku sampai dengan 31 Oktober 2025.

18) Amandemen Perjanjian Lisensi "Nickelodeon" tertanggal 1 Juli 2023, berlaku sampai dengan 30 September 2025;

19) Perjanjian Lisensi Program Acara Paket Pertandingan Sepakbola AFC 2025-2029, berlaku sampai dengan 2029.

20) Sehubungan dengan peluncuran jasa penyiaran digital langsung oleh MNCSV dan penjualan dekoder digital, MNCSV melakukan perjanjian terpisah dengan:

    (i) Beberapa bank, sesuai dengan perjanjian, pelanggan dapat melakukan pembayaran menggunakan debet langsung untuk rekening pelanggan di bank tersebut. Sebagai imbalannya, MNCSV setuju untuk membayar biaya administrasi kepada bank.
    (ii) Beberapa *retailer*, dimana MNCSV setuju untuk membayar komisi kepada pengecer sebagaimana diatur dalam perjanjian sesuai dengan paket acara yang dipilih oleh pelanggan.
    (iii) Beberapa perusahaan instalasi, dimana MNCSV menunjuk beberapa perusahaan untuk memasang dekoder digital agar pelanggan dapat menerima dan menyaksikan acara televisi yang ditawarkan oleh MNCSV. Sebagai imbalannya, MNCSV setuju untuk membayar biaya pemasangan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian.

21) MKM mengadakan perjanjian dengan berbagai pemasok program untuk menyalurkan program. MKM harus membayar kompensasi tertentu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam masing-masing perjanjian dengan setiap pemasok.

22) PT Digital Vision Nusantara ("DVN") mengadakan perjanjian dengan berbagai penyedia program untuk menyalurkan program. DVN harus membayar kompensasi tertentu sesuai ketentuan yang tercantum dalam masing-masing perjanjian dengan setiap penyedia program.

14) Licence Agreement with Banijay Rights Limited for Masterchef Indonesia Series 3 programme dated July 13, 2022 which is effective as of May 1, 2022 until May 31, 2027.

15) License Agreement "32nd SEA GAMES - CAMBODIA 2023" dated 27 February 2023, valid until 8 October 2025.

16) License Agreement "19th ASIAN GAMES HANGZHOU 2023" dated 3 Maret 2023, valid until 14 April 2025

17) License Agreement "27 Films Packages" dated 13 July 2023, valid until 31 October 2025.

18) Amendment of License Agreement "Nickelodeon" dated July 1, 2023, valid until September 30, 2025.

19) License Agreement "AFC Football Matches 2025-2029", valid until 2029.

20) With the launching of MNCSV's digital direct broadcasting services and sale of digital decoders, MNCSV has entered into separate agreements with:

    (i) Several banks, pursuant to which agreements, subscribers may make payments by pre-authorized direct debit to the subscribers' accounts in such banks. In return, MNCSV agreed to pay fees to the banks.
    (ii) Several retailers, whereby MNCSV agreed to pay commission to the retailers as provided in the agreements based on the program packages chosen by the subscribers.
    (iii) Several installation companies, whereby MNCSV appointed such companies to install the digital decoders in order for the subscribers to receive and watch the television programs offered by MNCSV. In return, MNCSV agreed to pay the installer fee in accordance to the formula as stated in the agreement.

21) MKM entered into several arrangements with various program suppliers to distribute their respective programs. MKM shall pay certain compensation in accordance with the respective agreement with each supplier.

22) PT Digital Vision Nusantara ("DVN") entered into agreement with various content provider for program distribution arrangement. DVN requires to pay a certain compensation in accordance with the agreement to each content provider.

23) DVN mengadakan perjanjian dengan PT Indosat, Tbk. dan Measat Satellite Systems Sdn Bhd untuk kerjasama penggunaan transponder satelit sehubungan dengan pendistribusian program DVN. DVN harus membayar kompensasi tertentu sesuai dengan perjanjian dimana periode penggunaannya sesuai perjanjian masih berlaku berturut-turut sampai dengan tahun 2024.

DVN juga telah mengadakan kesepakatan dengan PT Telkom Satelit Indonesia untuk pengadaan satelit tambahan sampai dengan tahun 2030.

23) DVN entered into agreement with PT Indosat, Tbk. and Measat Satellite Systems Sdn Bhd for the satellite usage arrangement due to the DVN's programmes distribution. DVN requires to pay a certain compensation in accordance with agreements in which the term, based on agreement, still would be in effect, consecutively, to the year of 2024.

DVN also has entered into arrangement with PT Telkom Satelit Indonesia for additional satellite provision to the year of 2030.

24) DVN mengadakan perjanjian dengan PT Indosat, Tbk. dan PT Telkom Satelit Indonesia dengan kompensasi tertentu untuk penyediaan layanannya.

24) DVN entered into agreement with PT Indosat, Tbk. and PT Telkom Satelit Indonesia with a certain compensation for its services.

25) DVN mengadakan perjanjian dengan PT Citra Global Media Nusantara untuk kerjasama penyediaan perangkat dekoder, dimana atas setiap pembelian dekoder oleh DVN, DVN harus memberikan kompensasi tertentu kepada penyedia perangkat. Perjanjian penyediaan ini berlaku selama satu tahun sampai dengan 31 Desember 2024.

25) DVN entered into agreement with PT Citra Global Media Nusantara for the provision of decoder, in which for the purchase of each decoder by DVN, DVN requires to give a certain compensation to the decoder provider. The provision agreement is in effect for one year to 31 December 2024.

26) Pada tahun 2024, MNC, entitas anak, memperoleh fasilitas pembiayaan modal kerja sebesar Rp47.900 juta dengan bunga 15,75% per tahun, melalui skema *factoring without recourse* dari PT MNC Finance.

26) In 2024, MNC, a subsidiary, obtained a working capital financing facility of Rp47,900 million with an annual interest rate of 15.75% through a factoring without recourse scheme from PT MNC Finance.

52. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

52. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup, mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

The Group, had monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies as of December 31, 2024 and 2023, are as follows:

		31 Desember/ *December 31,* 2024		31 Desember/ *December 31,* 2023		
		Mata uang asing/ *Foreign currency* (nilai penuh/ *full amount)*	Ekuivalen/ *Equivalent/* Rupiah	Mata uang asing/ *Foreign currency* (nilai penuh/ *full amount)*	Ekuivalen/ *Equivalent/* Rupiah	
			Rp Juta/ *Rp Million*		Rp Juta/ *Rp Million*	
Aset moneter						*Monetary assets*
Kas dan setara kas	US$	1.903.106	30.758	2.198.690	33.895	*Cash and cash equivalents*
	Lainnya/ *Others*		7.323		6.053	
Aset keuangan lainnya - lancar	US$	1.719.121	27.784	1.925.000	29.676	*Other financial assets - current*
Piutang usaha	US$	3.186.425	51.499	3.499.481	53.948	*Trade accounts receivable*
Piutang lain-lain	US$	1.003.279	16.215	1.105.150	17.037	*Other accounts receivable*
Aset lain-lain	US$	1.243.225	20.093	1.245.070	19.194	*Other assets*
Jumlah aset moneter			153.672		159.803	*Total monetary assets*
Liabilitas moneter						*Monetary liabilities*
Utang bank	US$	23.500.000	379.807	-	-	*Bank loans*
Utang usaha	US$	2.321.557	37.521	4.401.920	67.860	*Trade accounts payable*
	Lainnya/ *Others*		1.173		2.870	
Utang lain-lain	US$	7.591.449	122.693	7.986.897	123.126	*Other accounts payable*
Biaya yang masih harus dibayar	US$	199.666	3.227	162.494	2.505	*Accrued expenses*
Uang muka pelanggan	US$	205.668	3.324	377.404	5.818	*Customer deposits*
Pinjaman jangka panjang	US$	40.553.803	655.431	92.128.803	1.420.258	*Long-term loans*
Jumlah liaibilitas moneter			1.203.176		1.622.437	*Total monetary liabilities*
Liabilitas Moneter Bersih			(1.049.504)		(1.462.634)	*Net Monetary Liabilities*

Grup memiliki kerugian selisih kurs sebesar Rp16.948 juta dan keuntungan selisih kurs sebesar Rp1.371 juta masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023,

The Group incurred foreign exchange loss of Rp16,948 million and foreign exchange gain of Rp1,371 million for the years ended December 31, 2024 and 2023, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, kurs konversi yang digunakan Grup adalah sebagai berikut:

The conversion rates used by the Group as of December 31, 2024 and 2023, were as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
USD 1	16.162	15.416	*1 USD*
SGD 1	11.919	14.412	*1 SGD*
MYR 1	3.616	3.342	*1 MYR*

53. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS PENDANAAN

53. RECONCILIATION OF LIABILITIES FROM FINANCING ACTIVITIES

	31 Desember/ *December 31,* 2023	Arus kas/ *Cash Flows*	Perubahan non-kas/ *Change in non-cash* Akuisisi/ *Acquisition*	Perubahan non-kas/ *Change in non-cash* Lain-lain/ *Others*	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Utang bank	1.316.404	(22.741)		18.296	1.311.959	*Bank loans*
Liabilitas sewa pembiayaan	82.920	(7.516)	-	1.672	77.076	*Finance lease obligations*
Pinjaman jangka panjang	2.475.792	(752.097)	-	52.182	1.775.877	*Long-term loans*
Utang obligasi	1.475.832	(6.715)	-	1.241	1.470.358	*Bonds payable*
Sukuk Ijarah obligasi	1.250.898	228.260	-	1.058	1.480.216	*Sukuk Ijarah payable*
Jumlah	6.601.846	(560.809)	-	74.449	6.115.486	*Total*

	31 Desember/ *December 31,* 2022	Arus kas/ *Cash Flows*	Perubahan non-kas/ *Change in non-cash* Akuisisi/ *Acquisition*	Perubahan non-kas/ *Change in non-cash* Lain-lain/ *Others*	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Liabilitas sewa pembiayaan	53.519	(7.516)	-	36.917	82.920	*Finance lease obligations*
Pinjaman jangka panjang	3.834.046	(1.387.163)	-	28.909	2.475.792	*Long-term loans*
Utang obligasi	1.736.730	(260.615)	-	(283)	1.475.832	*Bonds payable*
Sukuk Ijarah obligasi	941.000	313.090	-	(3.192)	1.250.898	*Sukuk Ijarah payable*
Jumlah	6.565.295	(1.342.204)	-	62.351	5.285.442	*Total*

54. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL

54. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT

a. Kategori dan Kelas Instrumen Keuangan

a. Categories and Classes of Financial Instruments

Kategori dan kelas instrumen keuangan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Classes and categories of financial instruments at December 31, 2024 and 2023, are as follows:

	31 Desember/*December 31*, 2024				
	Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ *Financial assets at amortized cost*	Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)/ *Fair value through profit or loss (FVTPL)*	Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI)/ *Fair value through other comprehensive income (FVOCI)*	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ *Financial liabilities at amortized cost*	
Aset Keuangan					***Financial Assets***
Kas dan setara kas					*Cash and cash equivalents*
Pihak berelasi	853.462	-	-	-	*Related parties*
Pihak ketiga	559.690	-	-	-	*Third parties*
Aset keuangan lainnya - lancar	42.534	2.631.428	-	-	*Other financial assets - current*
Piutang usaha					*Trade accounts receivable*
Pihak berelasi	22.931	-	-	-	*Related parties*
Pihak ketiga	3.656.822	-	-	-	*Third parties*
Piutang lain-lain	508.773	-	-	-	*Other accounts receivable*
Aset keuangan lainnya - tidak lancar	1.443	-	1.036.298	-	*Other financial assets - non-current*

	31 Desember/*December 31* , 2024				
	Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ *Financial assets at amortized cost*	Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)/ *Fair value through profit or loss (FVTPL)*	Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI)/ *Fair value through other comprehensive income (FVOCI)*	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ *Financial liabilities at amortized cost*	
Liabilitas Keuangan					***Financial Liabilities***
Utang bank	-	-	-	1.311.959	*Bank loan*
Utang usaha					*Trade accounts payable*
Pihak berelasi	-	-	-	7.271	*Related parties*
Pihak ketiga	-	-	-	415.988	*Third parties*
Utang lain-lain	-	-	-	126.999	*Other accounts payable*
Biaya masih harus dibayar	-	-	-	11.225	*Accrued expenses*
Pinjaman jangka panjang	-	-	-	1.775.877	*Long-term loans*
Liabilitas sewa/					*Lease liabilities/*
liabilitas sewa pembiayaan	-	-	-	77.076	*finance lease obligations*
Utang obligasi - bersih	-	-	-	1.470.358	*Bonds payable - net*
Sukuk Ijarah obligasi - bersih	-	-	-	1.480.216	*Sukuk Ijarah payable - net*
Jumlah	5.645.655	2.631.428	1.036.298	6.676.969	*Total*

	31 Desember/*December 31,* 2023				
	Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ *Financial assets at amortized cost*	Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)/ *Fair value through profit or loss (FVTPL)*	Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI)/ *Fair value through other comprehensive income (FVOCI)*	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ *Financial liabilities at amortized cost*	
Aset Keuangan					***Financial Assets***
Kas dan setara kas					*Cash and cash equivalents*
Pihak berelasi	1.468.247	-	-	-	*Related parties*
Pihak ketiga	528.861	-	-	-	*Third parties*
Aset keuangan lainnya - lancar	71.176	583.481	-	-	*Other financial assets - current*
Piutang usaha					*Trade accounts receivable*
Pihak berelasi	21.943	-	-	-	*Related parties*
Pihak ketiga	3.460.001	-	-	-	*Third parties*
Piutang lain-lain	505.644	-	-	-	*Other accounts receivable*
Aset keuangan lainnya -					*Other financial assets -*
tidak lancar	1.443	-	751.362	-	*non-current*
Liabilitas Keuangan					***Financial Liabilities***
Utang bank	-	-	-	1.316.404	*Bank loan*
Utang usaha					*Trade accounts payable*
Pihak berelasi	-	-	-	6.562	*Related parties*
Pihak ketiga	-	-	-	375.812	*Third parties*
Utang lain-lain	-	-	-	185.357	*Other accounts payable*
Biaya masih harus dibayar	-	-	-	13.281	*Accrued expenses*
Pinjaman jangka panjang	-	-	-	2.475.792	*Long-term loans*
Liabilitas sewa/					*Lease liabilities/*
liabilitas sewa pembiayaan	-	-	-	82.920	*finance lease obligations*
Utang obligasi - bersih	-	-	-	1.475.832	*Bonds payable - net*
Sukuk Ijarah obligasi - bersih	-	-	-	1.250.898	*Sukuk Ijarah payable - net*
Jumlah	6.057.315	583.481	751.362	7.182.858	*Total*

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Fungsi Corporate Group Treasury menyediakan jasa untuk bisnis, mengkoordinasikan akses ke pasar keuangan domestik dan internasional, memantau dan mengelola risiko keuangan yang berkaitan dengan operasi Grup melalui laporan risiko internal yang menganalisis eksposur dengan derajat dan besarnya risiko. Risiko ini termasuk risiko pasar (termasuk risiko mata uang, risiko suku bunga dan risiko harga lainnya), risiko kredit, risiko likuiditas.

b. Financial risk management objectives and policies

The Group's Corporate Treasury function provides services to the business, co-ordinates access to domestic and international financial markets, monitors and manages the financial risks relating to the operations of the Group through internal risk reports which analyze exposures by degree and magnitude of risks. These risks include market risk (including currency risk, interest rate risk and other price risk), credit risk, liquidity risk.

Grup berusaha untuk meminimalkan dampak dari risiko dengan menggunakan instrumen keuangan derivatif untuk lindung nilai terhadap eksposur risiko. Penggunaan derivatif keuangan diatur oleh kebijakan Grup yang disetujui oleh dewan direksi, yang memberikan prinsip-prinsip tertulis pada risiko nilai tukar, risiko suku bunga, risiko kredit, penggunaan derivatif keuangan dan instrumen derivatif non-keuangan, dan investasi atas kelebihan likuiditas. Kepatuhan terhadap batasan kebijakan dan eksposur ditinjau oleh auditor internal secara terus menerus. Grup tidak melaksanakan atau memperdagangkan instrumen keuangan, termasuk instrumen keuangan derivatif, untuk tujuan spekulasi.

The Group seeks to minimize the effects of these risks by using derivative financial instruments to hedge risk exposures. The use of financial derivatives is governed by the Group policies approved by the board of directors, which provide written principles on foreign exchange risk, interest rate risk, credit risk, the use of financial derivatives and non-derivative financial instruments, and the investment of excess liquidity. Compliance with policies and exposure limits is reviewed by the internal auditors on a continuous basis. The Group does not enter into or trade financial instruments, including derivative financial instruments, for speculative purposes.

Fungsi Corporate Treasury melaporkan setiap triwulanan kepada komite manajemen risiko Grup, sebuah badan independen yang memantau risiko dan kebijakan yang diterapkan untuk mengurangi eksposur risiko.

The Corporate Treasury function reports quarterly to the Group's risk management committee, an independent body that monitors risks and policies implemented to mitigate risk exposures.

i. Risiko Pasar

Industri media di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang berkesinambungan dari tahun ke tahun, dengan pertumbuhan ekonomi negara yang positif, ditandai oleh konsumsi domestik yang kuat dan kenaikan dalam profil investasi.

Manajemen menyadari tantangan dan perkembangan yang ada dan terus memperhatikan perkembangan industri dalam rencana tahunan dan jangka panjang. Pertumbuhan pendapatan yang kuat dan peningkatan pangsa pasar penonton, digabungkan dengan fokus manajemen pada pengendalian biaya untuk mengingatkan kompetitif di industri serta terus meningkatkan teknologi, kompetensi sumber daya manusia dan proses bisnis.

i. Market Risk

Media industry in Indonesia continues to show a sustainable growth over the year, with the positive economic growth of the country, anchored in strong domestic consumption as well as the rise in investment profile.

Management realized those challenges and developments and continues to take into account the industry development in its yearly and long-term improvement in its audience share, combined with management focus on cost control to remain competitive in the industry, as well as continue to improve its technology, human resources competencies and business process.

ii. Manajemen risiko mata uang asing

Sebagian pembelian program dan peralatan siaran menggunakan nilai tukar mata uang asing, terutama mata uang dolar Amerika Serikat, dalam transaksinya. Namun demikian, transaksi pembelian atau pembayaran dalam mata uang asing tidak signifikan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Hampir semua penempatan deposito dalam mata uang asing adalah bersifat *on call* dan bersifat jangka pendek. Dengan demikian, Grup tidak memiliki risiko atas fluktuasi mata uang asing.

Fluktuasi nilai tukar Dolar Amerika Serikat terhadap mata uang asing ini menyebabkan Grup memiliki kerugian selisih kurs sebesar Rp16.948 juta dan keuntungan selisih kurs sebesar Rp1.371 juta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

ii. Foreign currency risk management

The portion of program and broadcasting equipment purchases are denominated in foreign currencies, particularly denominated in US Dollar. However, these transactions do not have significant impact on the Group for the years ended December 31, 2024 and December 31, 2023. Most time deposits in foreign exchange are on call and short-term in nature. Therefore, the Group has no exposure to risk of foreign exchange fluctuation.

In relation to the exchange rate fluctuation of U.S. Dollar to foreign currencies, The Group incurred foreign exchange loss of Rp16,948 million and foreign exchange gain of Rp1,371 million for the years ended December 31, 2024 and 2023.

Grup mengelola risiko mata uang asing sebagai berikut:

- Grup memanfaatkan peluang harga pasar nilai tukar mata uang lainnya (*multi-currency)* untuk menutup kemungkinan risiko melemahnya nilai tukar fungsional dan begitu sebaliknya, sehingga secara natural risiko adanya pergerakan nilai tukar uang non-fungsional bisa saling menghilangkan. Transaksi valuta mata uang biasa dilakukan dengan selalu mempertimbangkan kurs yang menguntungkan Grup.
- Grup mengatur risiko dengan berusaha menyeleraskan penerimaan dan pembayaran untuk setiap jenis mata uang.
- Grup *telah* melakukan negosiasi ulang dengan sebagian besar pemasok konten program, dimana kedua belah pihak sepakat untuk setiap pembayaran kewajiban baik yang masih outstanding maupun tagihan baru selama masa licensing period, menggunakan nilai tukar tetap yang disepakati.

The Group manages the foreign currency risk as follows:

- *The Group takes advantage of the opportunities in the market prices of other currencies (multi-currency) to cover possible risk of weakening value of the functional currency and vice versa, thus, in an economic offset, the risks of non-functional currency exchange rate movements will be mutually eliminated. Currency transactions are always done with consideration to the exchange rate favorable to the Group.*
- *The Group manages the risk by matching receipt and payment in each individual currency.*
- *The Group has renegotiated with several large program content vendors, where in both parties agree that for every payment of outstanding liabilities or new invoices during the licensing period will use the agreed fixed exchange rate.*

Berikut ini sensitivitas untuk perubahan nilai tukar mata uang Dollar Amerika Serikat terhadap saldo mata uang non-fungsional lainnya yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dengan variabel lain konstan terhadap laba sebelum pajak Grup.

Following is the sensitivity of changes in exchange rate of functional currency of U.S. Dollar against significant outstanding non-functional currency as of December 31, 2024 and 2023, with other variables are constant to the income before tax of the Group.

	2024		
	Perubahan kurs/ *Changes in Currency rate*	Dampak terhadap laba (rugi) sebelum pajak/ *Effect on profit (loss) before tax*	
Mata uang Rupiah terhadap US$			*Rupiah to US$*
Penguatan	3%	20.176	*Strenghthening*
Pelemahan	3%	(20.176)	*Weakness*

	2023		
	Perubahan kurs/ *Changes in Currency rate*	Dampak terhadap laba (rugi) sebelum pajak/ *Effect on profit (loss) before tax*	
Mata uang Rupiah terhadap US$			*Rupiah to US$*
Penguatan	2%	29.200	*Strenghthening*
Pelemahan	2%	(29.200)	*Weakness*

Manajemen berpendapat bahwa analisis sensitivitas ini bukan merupakan representasi risiko nilai tukar mata uang asing yang melekat karena eksposur pada akhir periode tidak mencerminkan eksposur selama periode berjalan. Pembelian dalam mata uang asing tergantung pada fluktuasi volume pembelian serta penggunaan kas dan setara kas dapat mengakibatkan perubahan akun moneter dalam mata uang asing.

In management's opinion, the sensitivity analysis is unrepresentative of the inherent foreign exchange risk because the exposure at period end does not reflect the exposure during the period. Purchases denominated in foreign currency are dependent on the fluctuations in volume of purchases and use of cash and cash equivalents that can impact foreign currency denominated monetary items.

iii. Manajemen risiko tingkat bunga

iii. Interest rate risk management

Risiko tingkat bunga adalah risiko di mana nilai wajar arus kas di masa depan akan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga pasar. Grup terpengaruh risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dengan suku bunga mengambang.

Interest rate risk is the risk the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of change in market interest rates. The Group's exposure to the risk of changes in market interest rate related primarily to the short-term and long-term loans with floating interest rates.

Grup mengelola risiko ini dengan mempertahankan komposisi yang tepat antara tingkat suku bunga mengambang dan bunga tetap dan melakukan pinjaman dari pihak yang dapat memberikan tingkat suku bunga yang lebih rendah dari bank lain.

The Group manages this risk by maintaining an appropriate mix of floating and fixed rate of borrowings and entering into loan agreement with party which gives lower interest rate than other banks.

Analisis sensitivitas suku bunga

Interest rate sensitivity analysis

Analisis sensitivitas di bawah ini telah ditentukan berdasarkan eksposur suku bunga untuk kedua instrumen derivatif dan non-derivatif pada akhir periode pelaporan. Untuk liabilitas tingkat bunga mengambang, analisis tersebut disusun dengan asumsi jumlah liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan itu terutang sepanjang periode. Kenaikan atau penurunan 50 basis poin digunakan ketika melaporkan risiko suku bunga secara internal kepada karyawan kunci dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga.

The sensitivity analyses below have been determined based on the exposure to interest rates for both derivatives and non-derivative instruments at the end of the reporting period. For floating rate liabilities, the analysis is prepared assuming the amount of the liability outstanding at the end of the reporting period was outstanding for the whole period. A 50 basis point increase or decrease is used when reporting interest rate risk internally to key management personnel and represents management's assessment of the reasonably possible change in interest rates.

Jika suku bunga lebih tinggi/rendah 50 basis poin dan semua variabel lainnya tetap konstan, laba bersih, setelah pajak, untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 akan turun/naik masing-masing sebesar Rp3.083 juta dan Rp5.265 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh eksposur Grup terhadap suku bunga atas pinjamannya dengan suku bunga variabel.

If interest rates had been 50 basis points higher/lower and all other variables were held constant, net income, after tax, for the years ended December 31, 2024 and 2023 would decrease/increase by Rp3,083 million and Rp5,265 million, respectively. This is mainly attributable to the Group's exposure to interest rates on its variable rate borrowings.

Selain itu, Grup melakukan negosiasi dalam pinjaman dengan persyaratan yang fleksibel untuk mengelola risiko tingkat bunga, Grup memiliki kebijakan dalam memperoleh pembiayaan dalam Rupiah dengan tingkat bunga bank yang rendah, back to back deposito dan pinjaman yang akan memberikan spread bunga yang kecil serta jangka waktu pinjaman yang lebih fleksibel sehingga dapat dilakukan pelunasan segera apabila tingkat bunga meningkat tinggi.

In addition, the Group negotiates for borrowings with flexible terms to enable it to manage the interest rate risk. The Group also has a policy of obtaining a low interest financing, back to back deposit, and borrowing with a low margin of interest and also a flexible loan term, enabling the Group to pay the loan if there is a significant increase in the interest rate.

Pinjaman terkena dampak risiko suku bunga termasuk dalam risiko likuiditas dan tingkat bunga dalam table bagian (v) di bawah.

Borrowings exposed to interest rate risks are included in liquidity and interest rate risk table in section (v) below.

iv. Manajemen risiko kredit

iv. Credit risk management

Risiko kredit mengacu pada risiko rekanan gagal dalam memenuhi liabilitas kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Grup.

Credit risk refers to the risk that a counterparty will default on its contractual obligation resulting in a loss to the Group.

Risiko kredit Grup terutama melekat pada piutang usaha, simpanan bank, investasi jangka pendek dan investasi lainnya. Risiko kredit pada simpanan bank dan investasi jangka pendek diperhitungkan minimal karena ditempatkan dengan institusi keuangan terpercaya yang telah memiliki catatan yang baik. Investasi lain dan piutang usaha pihak ketiga ditempatkan pada pihak ketiga yang terpercaya dan memiliki catatan yang baik.

The Group's credit risk is primarily attributed to its trade accounts receivable, bank deposits, short-term investments and other investment. Credit risk on bank deposits and short-term investments is considered minimal because they are placed in credit worthy financial institutions. Other investments and trade accounts receivable with third parties are entered with respected and credit worthy third parties.

Eksposur Grup dan counterparties dimonitor secara terus-menerus dan nilai agregat transaksi terkait tersebar di antara counterparties yang telah disetujui. Eksposur kredit dikendalikan oleh batasan (limit) counterparty yang direviu dan disetujui oleh komite manajemen risiko secara tahunan.

The Group's exposure and its counterparties are continuously monitored and the aggregate value of transactions concluded is spread amongst approved counterparties. Credit exposure is controlled by counterparty limits that are reviewed and approved by the risk management committee annually.

Risiko kredit pada piutang usaha adalah risiko bahwa Grup akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak lawan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Tidak ada risiko kredit yang terpusat secara signifikan. Grup mengelola dan mengendalikan risiko kredit pada piutang usaha dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk pelanggan individu dan memantau eksposur terkait dengan batasan-batasan tersebut.

Credit risk on trade accounts receivable is the risk that the Group will incur a loss arising from its customers, clients or counterparties that fail to discharge their contractual obligations. There are no significant concentrations of credit risk. The Group manages and controls this credit risk by setting limits on amount of risk it is willing to accept for individual customers and by monitoring exposures in relation to such limits.

Grup melakukan hubungan usaha hanya dengan pihak ketiga yang diakui dan kredibel. Manajemen Grup menetapkan peninjauan secara mingguan dan bulanan pada umur piutang dan penagihan untuk membatasi jika tidak untuk menghilangkan risiko kredit. Sesuai dengan kebijakan manajemen Grup, media order pelanggan (agensi) akan dikenakan status "Hold" untuk yang telah melewati batas jatuh tempo.

The Group trades only with recognized and creditworthy third parties. The Group's management applies weekly and monthly trade accounts receivable aging review and collection to limit, if not eliminate credit risk. In accordance with the Group policy, long outstanding overdue trade accounts receivable from media order customers (agency) will be put on to "Hold".

Grup mempunyai jaminan uang terhadap beberapa piutang usaha individu yang tercatat sebagai uang muka pelanggan dalam liabilitas jangka pendek. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 telah sesuai dengan nilai wajar yang merupakan jaminan untuk resiko kredit.

The Group holds cash guarantee from certain individual trade receivables which are recorded as customers deposits in current liabilities. As of December 31, 2024 and 2023, respectively, represent its fair value, which serves as credit risk enhancement.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup memiliki aset keuangan lainnya yang diklasifikasikan sebagai FVTPL dan AFS. Aset keuangan lainnya FVTPL sebagian besar berupa reksadana yang dikelola oleh pihak berelasi yang merupakan manajemen investasi dengan peringkat kredit tinggi yang dinilai oleh lembaga pemeringkat kredit internasional, sehingga tidak menimbulkan eksposur risiko kredit yang signifikan. Grup juga memiliki aset keuangan lainnya FVTPL berupa efek diperdagangkan dan aset keuangan lainnya AFS berupa obligasi konversi dan obligasi wajib tukar, dimana penempatannya dilakukan dengan persetujuan dari Dewan Direksi dan dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada pada umumnya. Manajemen juga berperan aktif untuk memantau perkembangan riwayat kreditnya dan tidak mengharapkan counterparty gagal memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, aset keuangan lainnya yang timbul dimonitor terus-menerus untuk mengurangi eksposur risiko kredit.

As of December 31, 2024 and 2023, the Group has other financial assets classified as FVTPL and AFS. Other financial assets at FVTPL are mostly in the form of mutual funds which are managed by a related party investment management with high credit ratings from international credit rating agencies, therefore, it has not raised significant exposure to credit risk. The Group also has other financial assets at FVTPL in the form of equity securities held for trading and other financial assets AFS in the form of convertible bonds and mandatory exchangeable bond which placements are carried out with the approval of the Board of Directors and executed in accordance with the existing regulations in general. Management also actively monitors the progress of credit history and does not expect the counterparty to fail to meet its obligations. Furthermore, other financial assets arising are continuously monitored to minimize the exposure to credit risks.

Selanjutnya untuk menghindari kegagalan pembayaran dari sisi pelanggan, Grup mengoptimalkan penggunaan pembayaran dengan kartu kredit dan fasilitas pembayaran auto-debet dari bank untuk menghasilkan pembayaran otomatis. Grup juga memiliki Reminder Team yang berada di bawah Departemen Collection untuk membantu mengingatkan pelanggan atas kewajiban pembayaran berkala mereka.

Further to avoid payment failure from the customer's side, the Group optimizes the use of payment by credit card and auto-debit payment facility from bank to generate automatic payment. The Group also has a Reminder Team under the Collection Department to help reminding the customers of their periodic payment obligation.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai mencerminkan eksposur Grup terhadap risiko kredit.

The carrying amount of financial assets recorded in the consolidated financial statements, net of any allowance for losses represents the Group's exposure to credit risk.

v. Manajemen risiko likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko saat posisi arus kas Grup menunjukkan bahwa pendapatan jangka pendek tidak cukup menutupi pengeluaran jangka pendek.

Industri media adalah industri yang cash intensive dan mensyaratkan tersedianya dana yang signifikan setiap saat. Risiko likuiditas dalam industri media di Indonesia bisa timbul karena adanya ketidakcocokan antara penerimaan uang dari pelanggan (agensi) dan pembayaran atas pembelian atau memproduksi program.

Tanggung jawab utama untuk manajemen risiko likuiditas terletak pada dewan direksi, yang telah membentuk kerangka kerja manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk manajemen Grup dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang dan persyaratan manajemen likuiditas. Grup mengelola risiko likuiditas dengan memelihara cadangan yang memadai, fasilitas perbankan dan fasilitas pinjaman cadangan, dengan terus memantau arus kas prakiraan dan aktual, dan dengan cara mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Dalam mengelola risiko likuiditas, Grup secara prudent memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Grup dan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas. Grup juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang jangka panjang mereka, dan terus menelaah kondisi pasar keuangan untuk mengambil inisiatif penggalangan dana.

Tabel risiko likuiditas dan suku bunga

Tabel berikut merinci sisa jatuh tempo kontrak untuk liabilitas keuangan non-derivatif dengan periode pembayaran yang disepakati Grup. Tabel telah disusun berdasarkan arus kas yang didiskontokan dari liabilitas keuangan berdasarkan tanggal terawal di mana Grup dapat diminta untuk membayar. Tabel mencakup arus kas bunga dan pokok. Sepanjang arus bunga tingkat mengambang jumlah tidak didiskontokan berasal dari kurva suku bunga pada akhir periode pelaporan. Jatuh tempo kontrak didasarkan pada tanggal terawal dimana Grup mungkin akan diminta untuk membayar.

v. Liquidity risk management

Liquidity risk is defined as the risk when the cash flow position of the Group indicates that the short-term revenue is not enough to cover the short-term expenditures.

Media industry is a cash intensive industry and requires the availability of significant funds every time. Liquidity risk in the media industry in Indonesia could arise because of mismatch between cash receipts from customers (agency) and payments for the purchase or production of the programs.

Ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the board of directors, which has established an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Group's short, medium and long-term funding and liquidity management requirements. The Group manages liquidity risk by maintaining adequate reserves, banking facilities and reserve borrowing facilities, by continuously monitoring forecast and actual cash flows, and by matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

In managing liquidity risk, the Group prudently monitors and maintains a level of cash equivalents deemed adequate to finance the Group's operations and to mitigate the effects of fluctuation in cash flows. The Group also regularly evaluates the projected and actual cash flows, including its loan maturity profiles, and continuously assesses conditions in the financial markets for opportunities to pursue fund raising intiatives.

Liquidity and interest risk tables

The following table detail the Group's remaining contractual maturity for its non-derivative financial liabilities with agreed repayment periods. The tables has been drawn up based on the undiscounted cash flows of financial liabilities based on the earliest date on which the Group can be required to pay. The table includes both interest and principal cash flows. To the extent that interest flows are floating rate, the undiscounted amount is derived from interest rate curves at the end of the reporting period. The contractual maturity is based on the earliest date on which the Group may be required to pay.

	31 Desember/*December 31,* 2024							
	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang/ *Weighted average effective interest rate* %	Kurang dari satu bulan/ *Less than 1 month*	1-3 bulan/ *1-3 months*	3 bulan - 1 tahun/ *3 months to 1 year*	1-5 tahun *1-5 years*	Di atas 5 tahun/ *Above 5 years*	Jumlah/ *Total*	
Tanpa bunga								*Non-interest bearing*
Utang usaha		87.695	162.417	173.147	-	-	423.259	*Trade accounts payable*
Utang lain-lain		60.756	66.243	-	-	-	126.999	*Other accounts payable*
Biaya masih harus dibayar		20.099	37.964	24.562	-	-	82.625	*Accrued expenses*
Instrumen tingkat bunga variabel								*Variable interest rate instruments*
Pinjaman jangka panjang	SOFR + margin	-	162.443	15.843	190.970	-	369.256	*Long-term loans*
Instrumen tingkat bunga tetap								*Fixed interest rate instruments*
Pinjaman jangka pendek	8,75% - 14%	1.083	3.250	1.428.983	-	-	1.433.316	*Short-term loans*
Pinjaman jangka panjang	8,25% - 12%	169.574	116.437	394.200	796.207	20.903	1.497.321	*Long-term loans*
Liabilitas sewa/ liabilitas sewa pembiayaan	7,5% - 13,5%	9.842	9.058	10.953	52.837	-	82.690	*Lease liabilities/ Finance lease obligations*
Utang obligasi - bersih	8,75% - 12%	-	-	693.055	945.310	-	1.638.365	*Bonds payable - net*
Utang sukuk Ijarah - bersih	8,75% - 12%	-	-	785.329	864.517	-	1.649.846	*Sukuk Ijarah payable - net*
Jumlah		349.049	557.812	3.526.072	2.849.841	20.903	7.303.677	*Total*

	31 Desember/*December 31,* 2023							
	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang/ *Weighted average effective interest rate* %	Kurang dari satu bulan/ *Less than 1 month*	1-3 bulan/ *1-3 months*	3 bulan - 1 tahun/ *3 months to 1 year*	1-5 tahun *1-5 years*	Di atas 5 tahun/ *Above 5 years*	Jumlah/ *Total*	
Tanpa bunga								*Non-interest bearing*
Utang usaha		58.925	132.721	190.728	-	-	382.374	*Trade accounts payable*
Utang lain-lain		13.601	49.480	122.276	-	-	185.357	*Other accounts payable*
Biaya masih harus dibayar		2.875	3.690	10.716	-	-	17.281	*Accrued expenses*
Instrumen tingkat bunga variabel								*Variable interest rate instruments*
Pinjaman jangka panjang	SOFR + margin	19.507	288.659	686.431	566.602	-	1.561.199	*Long-term loans*
Instrumen tingkat bunga tetap								*Fixed interest rate instruments*
Pinjaman jangka pendek	8,75% - 14%	-	87.452	1.373.673	-	-	1.461.125	*Short-term loans*
Pinjaman jangka panjang	8,25% - 12%	3.580	30.366	400.899	702.286	32.288	1.169.419	*Long-term loans*
Liabilitas sewa/ liabilitas sewa pembiayaan	7,5% - 13,5%	744	15.469	40.357	34.189	-	90.759	*Lease liabilities/ Finance lease obligations*
Utang obligasi - bersih	9,25% - 12%	-	-	739.163	924.590	-	1.663.753	*Bonds payable - net*
Utang sukuk Ijarah - bersih	9,25% - 12%	-	-	475.238	926.435	-	1.401.673	*Sukuk Ijarah payable - net*
Jumlah		99.232	607.837	4.039.481	3.154.102	32.288	7.932.941	*Total*

Tabel berikut merinci ekspektasi jatuh tempo untuk aset keuangan non-derivatif Grup. Tabel disusun berdasarkan jatuh tempo kontrak tak terdiskonto dari aset keuangan termasuk bunga yang akan diperoleh dari aset tersebut. Dicantumkannya informasi aset keuangan non-derivatif diperlukan dalam rangka untuk memahami manajemen risiko likuiditas Grup dimana likuiditas dikelola atas dasar aset dan liabilitas bersih.

The following table details the Group's expected maturity for its non-derivative financial assets. The table has been drawn up based on the undiscounted contractual maturities of the financial assets including interest that will be earned on those assets. The inclusion of information on non-derivative financial assets is necessary in order to understand the Group liquidity risk management as the liquidity is managed on a net asset and liability basis.

	31 Desember/*December 31,* 2024						
	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang/ *Weighted average effective interest rate* %	Kurang dari satu bulan/ *Less than 1 month*	1-3 bulan/ *1-3 months*	3 bulan - 1 tahun/ *3 months to 1 year*	1-5 tahun/ *1-5 years*	Jumlah/ *Total*	
Tanpa bunga							*Non-interest bearing*
Kas		4.785	-	-	-	4.785	*Cash on hand*
Piutang usaha		2.044.612	1.492.019	143.122	-	3.679.753	*Trade accounts receivable*
Piutang lain-lain - lancar		312.353	20.884	175.536	-	508.773	*Other accounts receivable - current*
Aset keuangan lainnya - lancar *)		-	-	2.673.962	-	2.673.962	**) Other financial assets - current*
Aset keuangan lainnya - tidak lancar *)		-	-	-	1.037.741	1.037.741	**) Other financial assets - non-current*
Instrumen tingkat bunga variabel							*Variable interest rate instruments*
Bank	2,25%	728.359	-	-	-	728.359	*Bank*
Bank yang dibatasi penggunaannya	3,75% - 5,50%	-	-	44.048	1.443	45.491	*Restricted cash in bank*
Instrumen tingkat bunga tetap							*Fixed interest rate instruments*
Deposito berjangka	0,20% - 8,25%	-	704.100	-	-	704.100	*Time deposits*
Jumlah		3.090.109	2.217.003	3.036.668	1.039.184	9.382.964	*Total*

*) Bank yang dibatasi penggunaannya tidak termasuk dalam aset keuangan lainnya - lancar dan tidak lancar/
Restricted cash in bank is excluded from other financial assest - current and non-current

	31 Desember/*December 31,* 2023						
	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang/ *Weighted average effective interest rate* %	Kurang dari satu bulan/ *Less than 1 month*	1-3 bulan/ *1-3 months*	3 bulan - 1 tahun/ *3 months to 1 year*	1-5 tahun/ *1-5 years*	Jumlah/ *Total*	
Tanpa bunga							*Non-interest bearing*
Kas		5.042	-	-	-	5.042	*Cash on hand*
Piutang usaha		1.986.691	1.383.345	111.908	-	3.481.944	*Trade accounts receivable*
Piutang lain-lain - lancar		185.830	319.814	-	-	505.644	*Other accounts receivable - current*
Aset keuangan lainnya - lancar *)		-	-	583.481	-	583.481	**) Other financial assets - current*
Aset keuangan lainnya - tidak lancar *)		-	-	-	751.362	751.362	**) Other financial assets - non-current*
Instrumen tingkat bunga variabel							*Variable interest rate instruments*
Bank	2,25%	1.024.837	-	-	-	1.024.837	*Bank*
Bank yang dibatasi penggunaannya	5,25% - 5,50%	-	-	28.168	46.825	74.993	*Restricted cash in bank*
Instrumen tingkat bunga tetap							*Fixed interest rate instruments*
Deposito berjangka	0,10% - 6,00%	-	1.040.555	-	-	1.040.555	*Time deposits*
Jumlah		3.202.400	2.743.714	723.557	798.187	7.467.858	*Total*

*) Bank yang dibatasi penggunaannya tidak termasuk dalam aset keuangan lainnya - lancar dan tidak lancar/
Restricted cash in bank is excluded from other financial assest - current and non-current

Jumlah yang dicakup di atas untuk instrumen suku bunga variabel untuk liabilitas keuangan non-derivatif harus berubah jika perubahan suku bunga variabel berbeda dengan estimasi suku bunga yang ditentukan pada akhir periode pelaporan.

The amounts included above for variable interest rate instruments for non-derivative financial liabilities is subject to change if changes in variable interest rates differ to those estimates of interest rates determined at the end of the reporting period.

Grup memiliki akses ke fasilitas pembiayaan yang tidak terpakai pada akhir periode pelaporan. Grup berharap untuk memenuhi kewajiban lainnya dari arus kas operasi dan hasil jatuh tempo aset keuangan.

The Group has access to financing facilities which were unused at the end of the reporting period. The Group expects to meet its other obligations from operating cash flows and proceeds of maturing financial assets.

vi. Manajemen Risiko Modal

vi. Capital Risk Management

Tujuan utama Grup mengelola risiko modal adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha, melanjutkan keberlangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Struktur modal Grup terdiri dari pinjaman dan ekuitas pemegang saham induk.

The primary objective of the Group to manage capital risk is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business, continue as going concern, in addition to maximizing the profits of the shareholders through the optimization of the balance of debt and equity. The Group's capital structure consists of debts and equity shareholders of the holding.

Grup mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, bila diperlukan, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Grup dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, pengembalian modal kerja kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses untuk manajemen risiko modal pada tahun 2024 dan 2023.

The Group maintains the capital structure and applies some changes according to changes in economic condition, if needed. In order to maintain and adjust the capital structure, the Group can adjust dividends paid to shareholders, capital return to shareholders, or issue new shares. There are no changes in objectives, policies, and processes for capital risk management in 2024 and 2023.

Manajemen Perusahaan secara berkala melakukan reviu struktur permodalan Grup. Sebagai bagian dari review ini, manajemen mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

The management of the Company periodically reviews the Group's capital structure. As part of this review, the management considers the cost of capital and related risk.

Kebijakan Grup adalah tetap mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

The Group's policy is to maintain a healthy capital structure in order to secure finance at a reasonable cost.

Gearing ratio pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The gearing ratio as of December 31, 2024 and December 31, 2023 are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Pinjaman	6.115.486	6.601.846	*Debt*
Kas dan bank	1.413.152	1.997.108	*Cash on hand and in banks*
Pinjaman - bersih	4.702.334	4.604.738	*Net debt*
Ekuitas	29.079.510	27.650.006	*Equity*
Rasio pinjaman - bersih terhadap modal	16,17%	16,65%	*Net debt to equity ratio*

55. PENGUKURAN NILAI WAJAR

55. FAIR VALUE MEASUREMENTS

Nilai wajar instrumen keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

Nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan konsolidasian mendekati nilai wajarnya karena bersifat jangka pendek atau menggunakan tingkat suku bunga pasar.

Teknik penilaian dan asumsi yang diterapkan untuk tujuan pengukuran nilai wajar

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan sebagai berikut:

- Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga pasar.
- Nilai wajar instrumen derivatif dihitung menggunakan harga kuotasian. Bila harga tersebut tidak tersedia, analisis arus kas diskonto dilakukan dengan menggunakan kurva hasil yang berlaku selama instrumen untuk non-opsional derivatif, dan model harga opsi untuk derivatif opsional. Kontrak valuta berjangka mata uang asing diukur dengan menggunakan kurs kuotasi dan kurva yield yang berasal dari suku bunga kuotasi mencocokkan jatuh tempo kontrak. Swap suku bunga diukur pada nilai kini dari arus kas masa depan yang diestimasi dan didiskontokan berdasarkan kurva imbal hasil yang berasal dari suku bunga kuotasi.
- Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan lainnya (tidak termasuk yang dijelaskan di atas) ditentukan sesuai dengan model penentuan harga yang berlaku umum berdasarkan analisis *discounted cash flow* menggunakan harga dari transaksi pasar yang dapat diamati saat ini dan kutipan dealer untuk instrumen sejenis.

Secara khusus, asumsi signifikan yang digunakan dalam menentukan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan ditetapkan di bawah ini:

Fair value of financial instruments carried at amortized cost

The carrying amount of financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost in the consolidated financial statements approximate their fair values because of their short-term maturities or they carry market interest rates.

Valuation techniques and assumptions applied for the purposes of measuring fair value

The fair values of financial assets and financial liabilities are determined as follows:

- *The fair values of financial assets and financial liabilities with standard terms and conditions and traded on active liquid markets are determined with reference to quoted market prices.*
- *The fair values of derivative instruments are calculated using quoted prices. Where such prices are not available, a discounted cash flow analysis is performed using the applicable yield curve for the duration of the instruments for non-optional derivatives, and option pricing models for optional derivatives. Foreign currency forward contracts are measured using quoted forward exchange rates and yield curves derived from quoted interest rates matching maturities of the contracts. Interest rate swaps are measured at the present value of future cash flows estimated and discounted based on the applicable yield curves derived from quoted interest rates.*
- *The fair values of other financial assets and financial liabilities (excluding those described above) are determined in accordance with generally accepted pricing models based on discounted cash flow analysis using prices from observable current market transactions and dealer quotes for similar instruments.*

Specifically, significant assumptions used in determining the fair value of the following financial assets and liabilities are set out below:

Pengukuran nilai wajar diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian

Tabel berikut ini merangkum nilai tercatat dan nilai wajar aset dan liabilitas, yang dianalisis antara keduanya serta nilai wajar didasarkan pada:

- Level 1 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya deviasi dari harga); dan
- Level 3 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Fair value measurement hierarchy of the Group's assets and liabilities

The following tables summarize the carrying amounts and fair values of the assets and liabilities, analyzed among those whose fair value is based on:

- *Level 1 fair value measurements are those derived from quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;*
- *Level 2 fair value measurements are those derived from inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices); and*
- *Level 3 fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).*

31 Desember 2024	Level 1	Level 2	Level 3	Jumlah/ *Total*	*December 31, 2024*
Aset keuangan lainnya - lancar	2.673.962	-	-	2.673.962	*Other financial assets - current*
Aset keuangan lainnya - tidak lancar	1.443	-	-	1.443	*Other financial assets - non current*
Jumlah	2.675.405	-	-	2.675.405	*Total*

31 Desember 2023	Level 1	Level 2	Level 3	Jumlah/ *Total*	*December 31, 2023*
Aset keuangan lainnya - lancar	654.657	-	-	654.657	*Other financial assets - current*
Aset keuangan lainnya - tidak lancar	1.443	-	-	1.443	*Other financial assets - non current*
Jumlah	656.100	-	-	656.100	*Total*

Tidak ada transfer antara Tingkat 1 dan 2 pada periode berjalan.

There were no transfers between Level 1 and 2 during the period.

56. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Sampai bulan Mei 2025, BDL melakukan pembayaran fasilitas kredit dari Deutsche Bank AG, Singapore Branch sebesar US$ 4.983.972 atau setara dengan Rp82.133 juta.

Sampai bulan Mei 2025, MNC melakukan pembayaran fasilitas kredit dari Deutsche Bank AG, Singapore Branch dengan total sebesar US$ 5 juta atau setara dengan Rp82.095 juta.

Pada tanggal 4 Maret 2025, hasil pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak ketiga, Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom mempunyai rating $_{id}$A+ (*Single A Plus*) (Catatan 30).

Pada tanggal 4 Maret 2025, hasil pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak ketiga, Sukuk Ijarah Berkelanjutan Global Mediacom mempunyai rating $_{id}$A+$_{(sy)}$ (*Single A Plus Syariah*) (Catatan 31).

56. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

Until May 2025, BDL has paid credit facility from Deutsche Bank AG, Singapore Branch, amounted to US$ 4,983,972 or equivalent to Rp82,133 million.

Until May 2025, MNC has paid credit facility from Deutsche Bank AG, Singapore Branch total amounted to US$ 5 million or equivalent to Rp82,095 million.

On March 4, 2025, the rating result from PT Pemeringkat Efek Indonesia, third party, Global Mediacom Sustainable Bonds rating is $_{id}$A+ (Single A Plus) (Note 30).

On March 4, 2025, the rating result from PT Pemeringkat Efek Indonesia, third party, Sustainable Sukuk Ijarah Global Mediacom rating is $_{id}$A+$_{(sy)}$ (Single A Plus Syariah) (Note 31).

57. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V tahap I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V tahap I, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Perubahan tersebut adalah penambahan informasi pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, laporan arus kas konsolidasian, dan catatan atas laporan keuangan nomor 2a, 2q, 9, 10, 29, 30, 31, 39 dan 56.

57. REISSUEANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

In relation with the Sustainable Public Offering Global Mediacom Sustainable Bonds V Stage I and Sustainable Sukuk Ijarah V Stage I, the Company has reissued as of and for the year ended December 31, 2024, consolidated financial statements to conform with the capital market regulations. The changes are additional information on consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in consolidated equity, consolidated statement of cash flows, and notes to consolidated financial statements number 2a, 2q, 9, 10 29, 30, 31, 39 and 56.

58. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian dari halaman 1 sampai dengan 115 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direktur untuk diterbitkan pada tanggal 15 Mei 2025.

58. MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements on pages 1 to 115 were the responsibilities of the management, and were approved by the Directors and authorized for issue on May 15, 2025.